

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kabupaten Tuban

Tahun 2021-2026



**Pemerintah
Kabupaten Tuban**



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan amanat konstitusional yang harus dijalankan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka penjabaran visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Periode 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 27);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Bupati adalah Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Tahun pertama perencanaan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah Tahun 2021.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan RPJMD bertujuan untuk:
- a. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi, serta dengan Kabupaten yang berbatasan;
 - b. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.

BAB IV TATA PERENCANAAN

Pasal 4

RPJMD dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas bawah dan bawah atas.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 7

Sistematika penulisan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

| | |
|----------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH |
| BAB V | VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN |
| BAB VI | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB VII | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
| BAB VIII | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| BAB IX | PENUTUP |

Pasal 8

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil pelaksanaan RPJMD.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RPJMD setiap tahun pada periode masa jabatan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. merugikan kepentingan nasional; dan/atau
 - e. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau pemekaran Daerah.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional.

Pasal 12

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada Tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut akan dimuat/dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Apabila Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD mengalami perubahan dapat dilakukan penyesuaian pada RPJMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2026 dan dapat digunakan sebagai RPJMD transisi guna pedoman untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

- (2) Program dan Kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

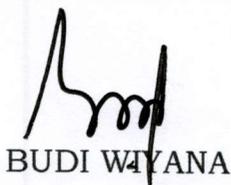
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Desember 2021
BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 147

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 278-18/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 dan untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi dan dengan Kabupaten yang berbatasan, serta sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah terpilih, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban, serta mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan dijabarkan dalam siklus rencana tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pada setiap Tahun Anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Huruf b

Yang dimaksud dengan responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;

Huruf c

Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal;

Huruf d

Yang dimaksud dengan efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;

Huruf e

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

Huruf f

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan terukur adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;

Huruf h

Yang dimaksud dengan berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;

Huruf i

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia;

Huruf j

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 5

Huruf a

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

Huruf b

Pendekatan Partisipatif adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

Huruf c

Pendekatan politis adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD; dan

Huruf d

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi hingga nasional.

Pasal 6

Huruf a

Pendekatan holistik-tematik adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

Huruf b

Pendekatan integratif adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan

Huruf c

Pendekatan spasial adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan periode masa jabatan Bupati adalah dimulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 sebelum RPJMD 2021-2026 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Peraturan Bupati dalam hal ini hanya mengatur hal yang bersifat teknis yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 161

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH TAHUN 2021 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dihadapkan dengan permasalahan bagaimana pemerintah mampu menghasilkan kinerja penyelesaian masalah-masalah publik. Berbagai kewenangan dan kapasitas sistemik dibangun untuk mewujudkan tantangan tersebut. Salah satunya, terkait kewenangan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana menjadi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12. Kewenangan ini menempatkan dan mengamankan Pemerintah Daerah dalam keterlibatan peran dan fungsi yang sangat penting dalam proses pembangunan, yang merupakan suatu proses perubahan yang terencana untuk terciptanya kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Konsepsi tersebut memuat konsekuensi logis untuk diterapkannya sebuah sistem perencanaan yang sekaligus menegaskan bahwa pembangunan bukanlah sebuah proses yang berjalan secara alamiah atau instan, melainkan membutuhkan perencanaan yang memadai. Pembangunan tidak mungkin dipahami secara normatif dan dijalankan secara praktis tanpa perencanaan.

Sistem perencanaan pada dasarnya dimaksudkan untuk memandu, menghasilkan, mengendalikan dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan itu sendiri yang disesuaikan dengan esensi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa format penyelenggaraan pemerintahan yang memberlakukan otonomi daerah, pada gilirannya turut memberi pengaruh terhadap sistematika perencanaan berikut integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan yang dihasilkan di tingkat nasional dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Proses pembangunan nasional dan daerah di Indonesia tidak terlepas dari relasi kuat 2 (dua) perangkat kebijakan yakni Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah berulang kali) sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan dapat dipahami

sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan dimensi waktu (*time dimension of planning*), jangkauan perencanaan pembangunan menghasilkan sejumlah dokumen yang terbagi atas rencana jangka panjang, jangka pendek, dan tahunan yang tidak lain adalah satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dipahami sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Demikian pula di dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa “Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dari ketentuan peraturan perundangan tersebut, terdapat dua hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pertama, perencanaan pembangunan daerah yang disusun harus dapat mewujudkan keselarasan dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Prioritas dan program pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota harus sedapat mungkin mendukung prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan pusat. Dengan demikian diharapkan terjadi keterpaduan dan keserasian pelaksanaan pembangunan. Kedua, Rumusan perencanaan pembangunan daerah adalah dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

kabupaten/kota. Program-program perencanaan pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan harus dapat menjamin terlaksananya suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dimaksud mengintegrasikan dan memadukan pendekatan yang bersifat prosedural-metodologis, yaitu menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*Top Down*) dan bawah-atas (*Bottom Up*), dan pendekatan yang bersifat substantif, yakni pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Salah satu dokumen yang strategis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disingkat RPJMD). Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (selanjutnya disingkat RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disingkat RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam perspektif konseptual dan normatif, RPJMD sebagai proses dan hasil perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki posisi, fungsi, dan urgensi yang strategis. Pertama, karena RPJMD menjembatani antara perencanaan jangka panjang yang lebih bersifat ideologis-paradigmatik dan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang lebih operasional. Kedua, RPJMD pada dasarnya merupakan bentuk produk otentik dari fungsi perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) itu sendiri, yang tidak hanya merepresentasikan hasil teknokratisasi dan intervensi programatik pemerintah, tetapi juga menggambarkan konstruksi idealisasi cita-cita politik atas kondisi yang ingin diwujudkan. Ketiga, Dokumen RPJMD adalah dokumen yang penyusunan dan substansinya dilekatkan pada otoritas, kewenangan, dan periode kepemimpinan hasil dari proses politik, sehingga membutuhkan proses interaksi dan penyelarasan yang sangat mendasar. Dokumen RPJMD disusun guna menjabarkan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih sesuai dengan janji-janji kampanye yang berdasarkan pada isu dan permasalahan strategis serta potensi Kabupaten. RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sebagai salah satu kabupaten yang turut menggelar pemilihan kepala daerah langsung serentak pada akhir tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki kewajiban dan agenda strategis untuk mempersiapkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 menjadi dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan di mana

substansi materi di dalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang, yang nantinya menjadi pedoman pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Tuban.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai pemenang pilkada berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 60/PL.02.7-SD/03/ KPU/I/2021 dan dilantiknya Aditya Halindra Faridzky S.E sebagai Bupati Tuban dan H. Riyadi, SH sebagai Wakil Bupati Tuban pada tanggal 20 Juni 2021, maka Pemerintah Kabupaten Tuban berkewajiban menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 dan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Esensi keberadaan RPJMD sebagai produk perencanaan adalah sebagai:

1. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi fungsi Pengawasan Internal (SPI) dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.
5. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dokumen jangka menengah ini juga mutlak berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban, berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti SDGs, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan, dan dokumen hasil studi lainnya.

RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode keempat dari RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025. Dokumen ini disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 40. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek

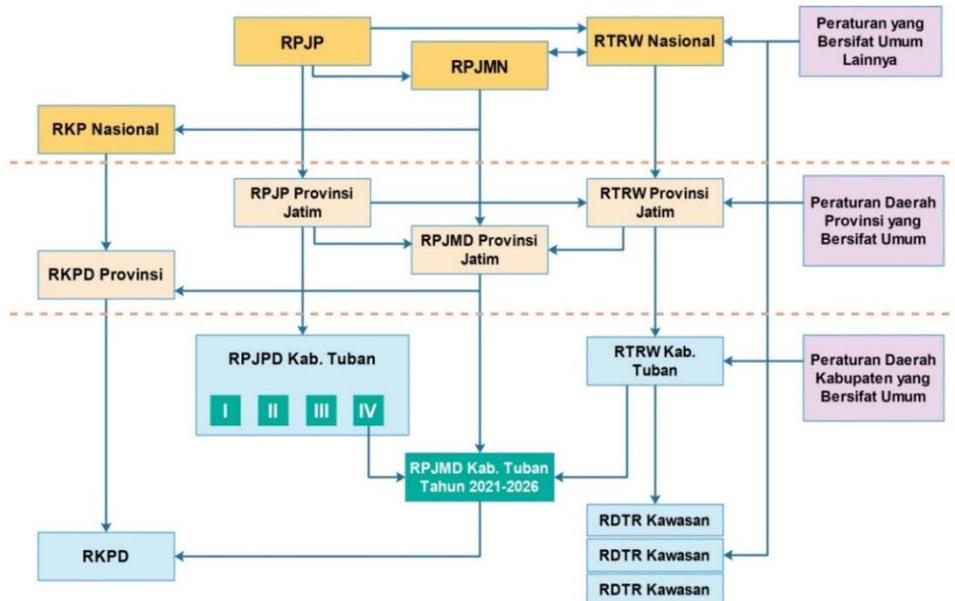
Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 27);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);

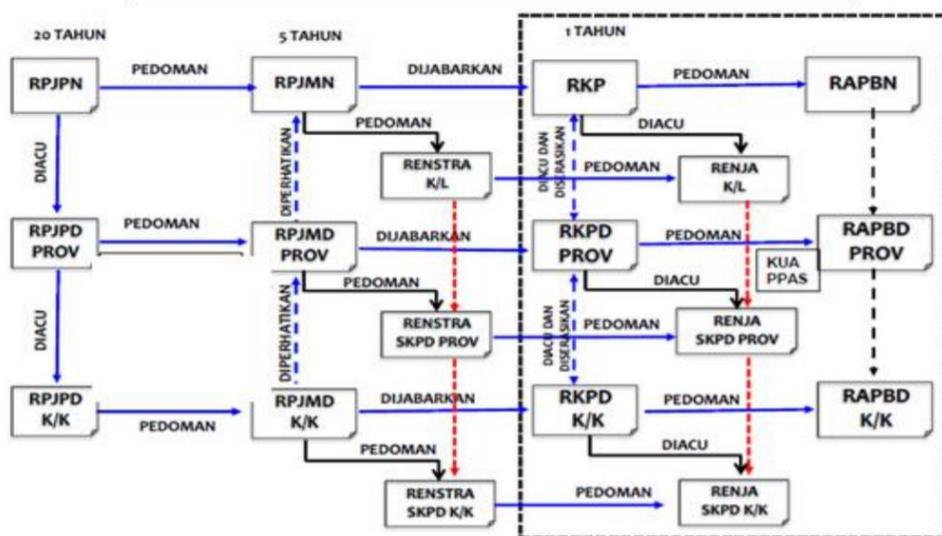
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai salah satu dokumen strategik yang memberikan arahan tindakan intervensi programatik dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam periode lima tahunan, RPJMD akan banyak berinteraksi secara substantif dengan berbagai dokumen kebijakan rencana pembangunan lainnya maupun regulasi-regulasi tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan. Secara ilustratif, hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Daerah Dengan Dokumen Penataan Ruang

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan sebagaimana tersebut dalam Gambar. 1.2 tersebut adalah :

- Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tuban dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

- Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD tahap keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

- Hubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Tuban sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tuban.

- Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu tahun 2021-2026, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tuban.

- Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari

tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya perangkat daerah dengan berpedoman pada Renstra perangkat daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Secara lebih terperinci, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

RPJM Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut di tempuh melalui misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini, yaitu :

- a. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
- b. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
- c. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan
- d. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arahan kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah di Provinsi Jawa Timur bisa tumbuh bersama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Adapun Visi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur adalah “Terwujudnya ruang wilayah Provinsi berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan”.

Misi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur diuraikan sebagai berikut:

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia;

3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhierarki serta bernilai tinggi;
4. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan;
5. Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global;
6. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan;
7. Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional.

1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban

RPJPD Kabupaten Tuban berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali.

1.3.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban

RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Tuban.

1.3.6 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;

1.3.7 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Renja PD, merupakan pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;

1.3.8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban

RKPD Kabupaten Tuban berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja PD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Berikut ini adalah hubungan keterkaitan dan relevansi antara RPJMD Kabupaten Tuban dengan Dokumen Perencanaan Lainnya:

1. Keterkaitan dan keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMN Tahun 2019-2024

Tabel 1.1 Keterkaitan dan keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

| RPJMN Tahun 2020-2024 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|---|--|
| Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong | Visi : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan |
| Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; | Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih |
| Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; | Misi 2 : Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif |
| Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; | Misi 1 : Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal |
| Misi 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | |
| Misi 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. | Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih |

| RPJMN Tahun 2020-2024 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|--|---|
| Misi 6 : Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya | Misi 4 : Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif |
| Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. | Misi 1 : Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal |
| Misi 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya | Misi 4 : Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif |
| Misi 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan | |

(Sumber: Bappenas, 2020 dan Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

2. Keterkaitan dan keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Tabel 1.2 Keterkaitan dan keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

| RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|---|--|
| Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan | Visi : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan |

| RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|--|--|
| Semangat Gotong Royong | |
| <p>Misi 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;</p> | <p>Misi 1 : Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal</p> |
| <p>Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;</p> | <p>Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih</p> |
| <p>Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan</p> | <p>Misi 4 : Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif</p> |
| <p>Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya</p> | <p>Misi 2 : Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif</p> |

(Sumber: Bappeda Provinsi Jatim, 2019 dan Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

3. Keterkaitan dan Keselarasan Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan Dokumen RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tuban

Tabel 1.3 Keterkaitan dan Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025

| <p style="text-align: center;">Misi RPJMD Tahun 2021-2026</p> | <p style="text-align: center;">Misi RPJPD Tahun 2005-2025</p> |
|--|---|
| <p>VISI : “Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”</p> | <p>VISI : “Kabupaten Tuban Sebagai Wilayah Pengembangan Pertanian dan Industri Yang Berdaya Saing, Unggul, Maju, Inovatif dan Berwawasan Lingkungan”</p> |
| <p>Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal</p> | <p>Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Tuban yang indah, bersih, tertib, aman, dan nyaman dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.</p> |
| | <p>Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat</p> |
| | <p>Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya kehidupan hukum dan politik yang stabil</p> |
| | <p>Sasaran Pokok 3 : Terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di Kabupaten Tuban</p> |
| | <p>Misi 5 : Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lestari sesuai dengan daya dukung lingkungan</p> |
| <p>Sasaran Pokok 1: Terciptanya keseimbangan pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> | |

| <p style="text-align: center;">Misi RPJMD Tahun 2021-2026</p> | <p style="text-align: center;">Misi RPJPD Tahun 2005-2025</p> |
|---|---|
| <p>Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif</p> | <p>Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang</p> |
| | <p>Misi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri</p> |
| | <p>Sasaran pokok 1 : Terwujudnya agrobisnis yang berbasis pada potensi lokal dan keunggulan kompetitif, yang termasuk didalamnya antara lain sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan</p> |
| | <p>Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya sektor industri dan UMKM yang berdaya saing serta berbasis potensi lokal</p> |
| <p>Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih</p> | <p>Sasaran Pokok 3 : Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing dan berbasis potensi wisata lokal</p> |
| | <p>Sasaran Pokok 4 : Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</p> |
| <p>Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih</p> | <p>Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berketrampilan</p> |

| <p style="text-align: center;">Misi RPJMD Tahun 2021-2026</p> | <p style="text-align: center;">Misi RPJPD Tahun 2005-2025</p> |
|--|---|
| <p>Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif</p> | <p>Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tuban yang beriman, berkualitas dan berketrampilan</p> |
| | <p>Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional</p> |
| | <p>Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mampu memberikan pelayanan prima kepada publik</p> |
| | <p>Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (<i>clean government</i>)</p> |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

4. Keterkaitan dan Keselarasan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2031 dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

Tabel 1.4 Keterkaitan dan Keselarasan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

| <p style="text-align: center;">RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031</p> | <p style="text-align: center;">RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026</p> |
|--|---|
| <p>Visi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur:</p> | <p>Visi:</p> |
| <p>Terwujudnya ruang wilayah Provinsi berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan</p> | <p>Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan</p> |

| RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|--|--|
| Misi Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur: | |
| Keseimbangan pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi; | Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif. |
| Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia | |
| Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia; | |
| Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan; | Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal |
| Optimasi fungsi budi daya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global; | Misi 3 Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih |
| Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan; | Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif |
| Kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerja sama regional | |

| RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|---|---|
| Tujuan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur: | |
| Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan | Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif |
| Pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur | Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal |
| Peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan | Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif |

(Sumber: Bappeda Provinsi Jatim, 2011 dan Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

5. Keterkaitan dan Keselarasan antara RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

Tabel 1.5 Keterkaitan dan Keselarasan Dokumen RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

| RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|---|--|
| Visi Penataan Ruang Kabupaten Tuban: | Visi: |
| Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Tuban berbasis industri yang ramah lingkungan dengan penyangga pertanian, perikanan, dan pertambangan | Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan |
| Misi Penataan Ruang Kabupaten Tuban: | Misi: |
| Perencanaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; | Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal |
| Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; | |
| Optimalisasi fungsi kawasan budidaya sesuai dengan peruntukannya; | |
| Pemantapan fungsi kawasan lindung dan kelestarian sumberdaya alam; | |
| Penyediaan sarana prasarana wilayah sebagai pendukung kawasan industri terpadu yang didukung oleh berbagai sektor; dan | |
| Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. | |
| Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tuban: | |
| Mewujudkan ruang wilayah kabupaten berbasis pertanian dan industri yang | Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai |

| RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|--|--|
| berkelanjutan dengan didukung ketersediaan infrastruktur guna mendorong daya saing wilayah. | tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif |
| | <p>Misi 1:</p> <p>Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal</p> |
| Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tuban: | |
| Pengembangan kegiatan berbasis pertanian yang produktif, inovatif, dan berdaya saing; | <p>Misi 2:</p> <p>Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif</p> |
| Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mempertahankan produktivitas pertanian; | |
| pengembangan kegiatan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan; | |
| Pemantapan keterkaitan dan interaksi antara simpul-simpul pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan kawasan perdesaan sebagai wilayah pendukungnya; | |

| RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 | RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 |
|--|--|
| Pelestarian dan pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah; | Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal |
| pengembangan upaya-upaya pelestarian fungsi lindung dan pengamanan wilayah terhadap potensi bencana alam; dan | Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal |
| pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan Pelayanan publik. | Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2020)

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai: Pedoman bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pedoman pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, Pedoman bagi stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah.

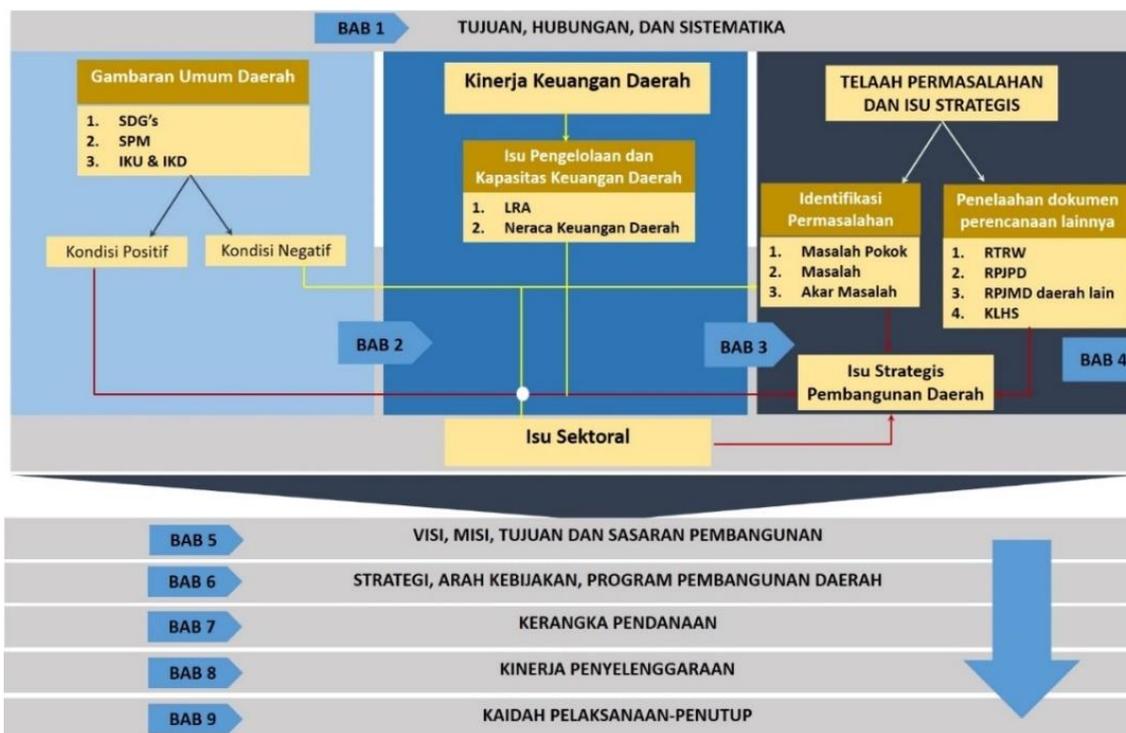
Tujuan disusunnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 ini adalah :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang berkeadilan dan sejahtera (Hasil);
2. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan (partisipasi masyarakat), berbasis lingkungan dan berdaya saing (Proses);

3. Menjadi tolak ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
4. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD;
5. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Gambar 1.3 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Tuban

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Tuban secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga diuraikan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tuban untuk jangka menengah.

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tuban untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dibagi dalam setiap misi. Dalam bab ini juga memuat Pengembangan Wilayah Terpadu jangka menengah.

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan. Bab ini juga menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah beserta pagu indikatif pendanaannya.

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama Kabupaten Tuban dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 9 PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dari dokumen RPJMD yang ditetapkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Tuban perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi

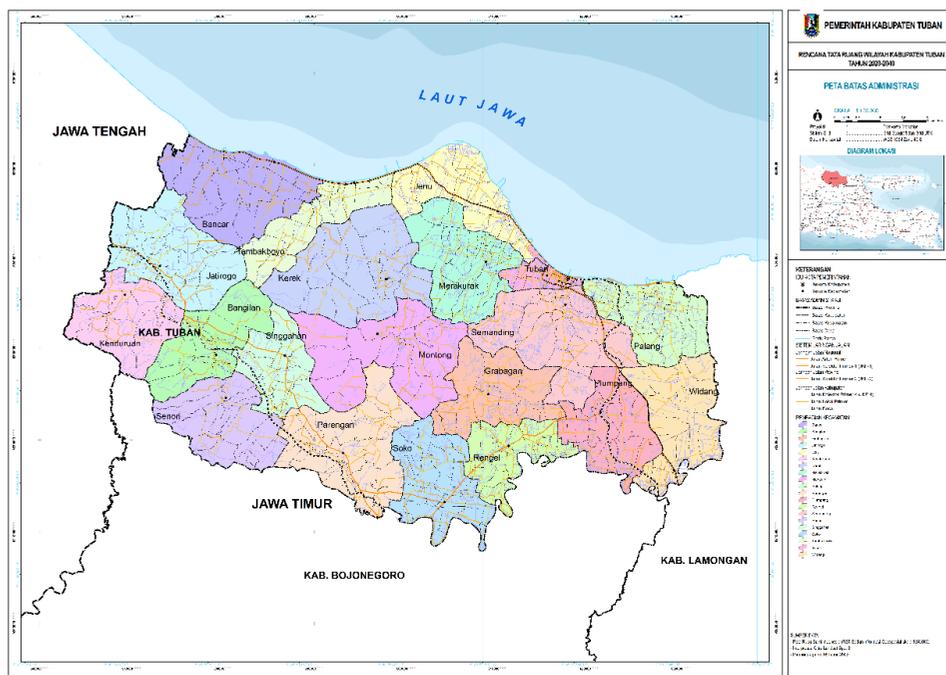
A. Wilayah Administrasi

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, berjarak sekitar 103 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Secara geografis letak Kabupaten Tuban cukup strategis berada di Pantai Utara Jawa, di ujung barat perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sekaligus sebagai pintu masuk Provinsi Jawa Timur dari arah barat. Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 111° 30' sampai dengan 112° 35' Bujur Timur dan 6° 40' sampai dengan 7° 18' Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tuban adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Blora Provinsi Jawa Tengah.

Untuk lebih jelasnya lagi letak Kabupaten Tuban dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Tuban
*(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
 RTRW Kabupaten Tuban, 2020)*

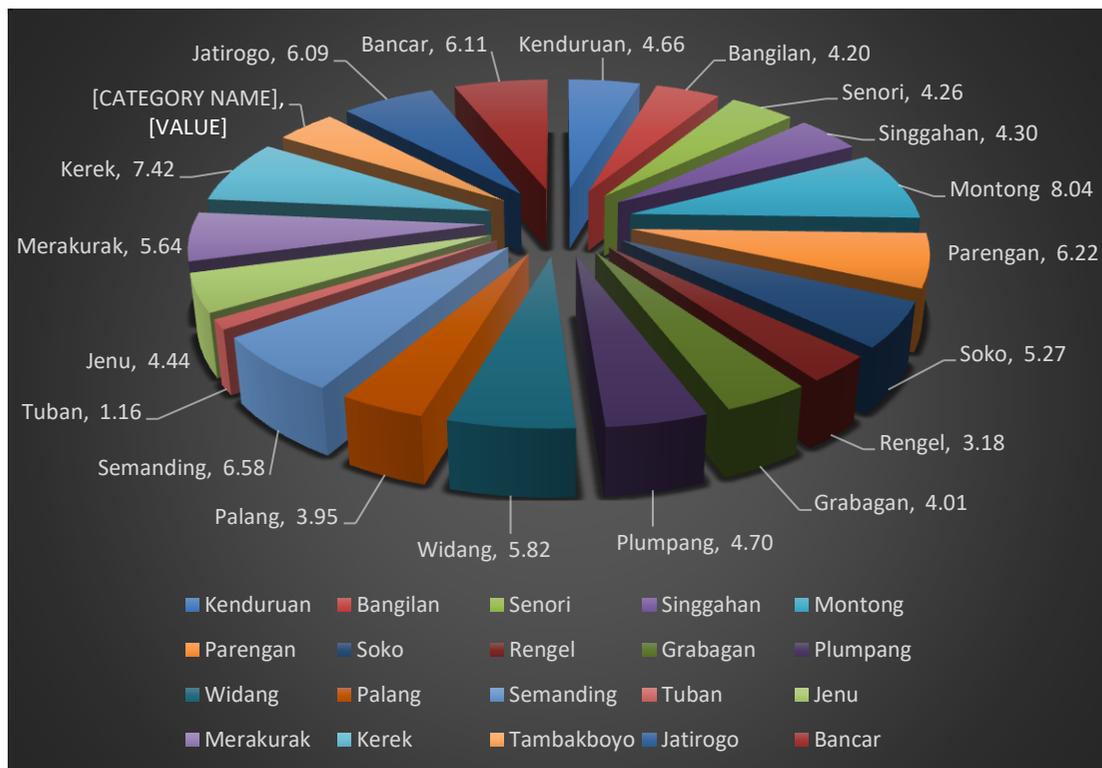
Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan, 328 Desa/Kelurahan, Serta 1.734 RW dan 6.796 RT. Kecamatan dengan masing-masing jumlah desa di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban

| No | Kecamatan | Luas wilayah (km ²) | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kenduruan | 85,73 | 9 | 45 | 191 |
| 2 | Bangilan | 77,27 | 14 | 110 | 309 |
| 3 | Senori | 78,39 | 12 | 70 | 251 |
| 4 | Singgahan | 79,05 | 12 | 61 | 187 |
| 5 | Montong | 147,98 | 13 | 68 | 259 |
| 6 | Parengan | 114,45 | 18 | 67 | 276 |
| 7 | Soko | 96,88 | 23 | 113 | 603 |
| 8 | Rengel | 58,52 | 16 | 75 | 377 |
| 9 | Grabagan | 73,79 | 11 | 46 | 232 |

| No | Kecamatan | Luas wilayah (km2) | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|----|------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 10 | Plumpang | 86,52 | 18 | 115 | 501 |
| 11 | Widang | 107,99 | 16 | 72 | 368 |
| 12 | Palang | 72,70 | 19 | 109 | 464 |
| 13 | Semanding | 120,99 | 17 | 177 | 584 |
| 14 | Tuban | 21,29 | 17 | 105 | 370 |
| 15 | Jenu | 81,61 | 17 | 72 | 230 |
| 16 | Merakurak | 103,77 | 19 | 101 | 381 |
| 17 | Kerek | 136,55 | 17 | 79 | 342 |
| 18 | Tambakboyo | 72,97 | 18 | 64 | 218 |
| 19 | Jatirogo | 111,98 | 18 | 103 | 362 |
| 20 | Bancar | 112,36 | 24 | 82 | 291 |
| | Jumlah : | 1.839,94 | 328 | 1.734 | 6.796 |

(Sumber : Kabupaten Tuban dalam Angka, 2021)

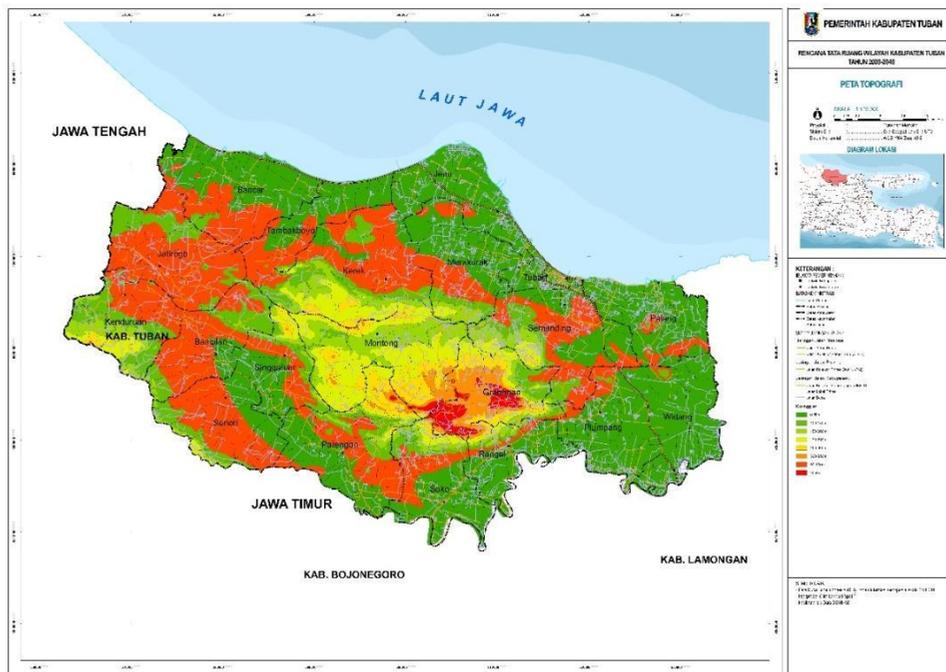


Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan

(Sumber : Kabupaten Tuban Dalam Angka, 2021)

B. Kondisi Topografi

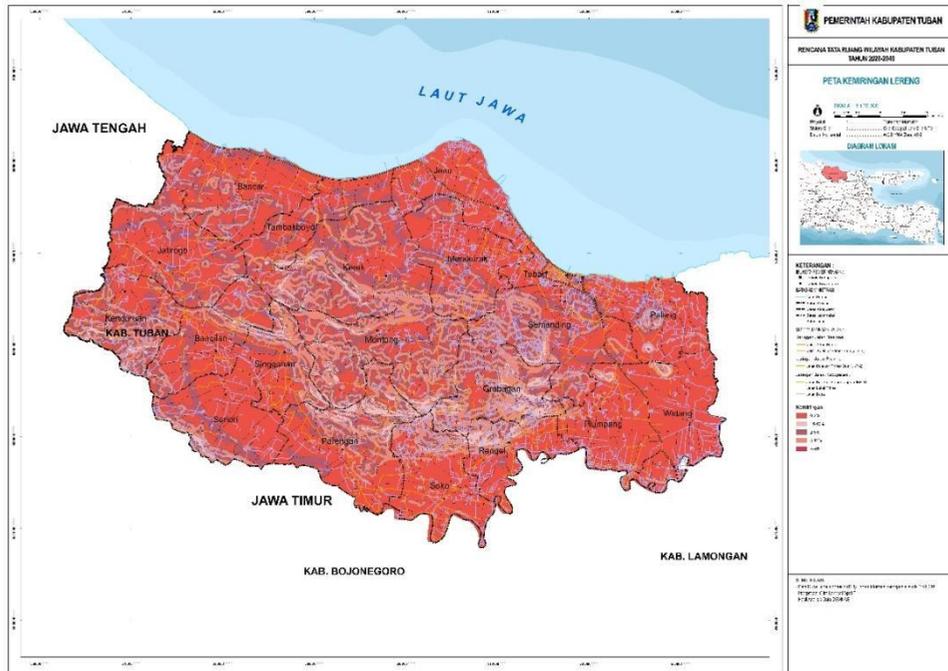
Secara garis besar, keadaan topografi Kabupaten Tuban dihitung sebagai daerah yang berdataran rendah dengan ketinggian daratan berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Bagian Utara dan Selatan Kabupaten Tuban berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut yang terdapat disekitar pantai dan sepanjang Sungai Bengawan Solo. Sedangkan daerah yang memiliki ketinggian di atas 100 mdpl (termasuk topografi bergelombang dan bergunung) terdapat di Kecamatan Montong, Kecamatan Semanding, dan Kecamatan Grabagan.



Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Tuban
(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

Mayoritas wilayah Kabupaten Tuban berada pada topografi datar, dengan kemiringan lereng 0-2%. Pada kemiringan ini tanah dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil untuk kegiatan yang bersifat budidaya.

Dalam rangka pengembangan penggunaan tanah, perlu diperhatikan wilayah yang memiliki kemiringan 15-40% dan >40% seperti di Kecamatan Kerek, Grabagan, Montong, Palang, Rengel, Singgahan, dan Soko. Pada kemiringan lereng 25-40%, jika pengembangan kegiatan permukiman dan pertanian menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi. Sedangkan pada lereng > 40%, lereng sangat peka terhadap erosi, sehingga kegiatannya harus bersifat non budidaya.



Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Tuban

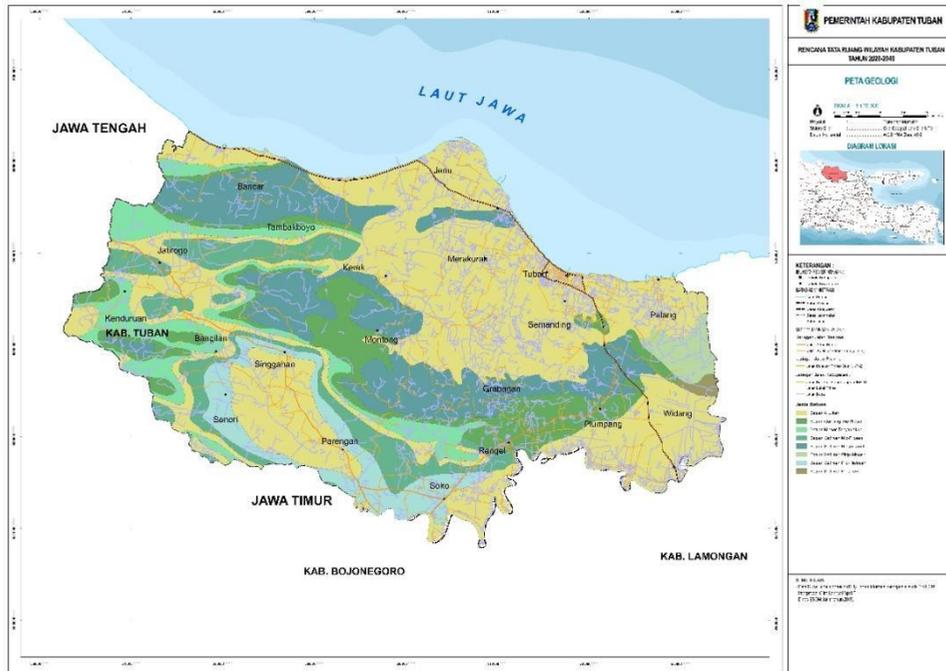
(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

C. Kondisi Geologi

Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan yang umumnya berupa batuan karbonat. Zona Rembang didominasi oleh perbukitan kapur.

Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari: *Miocene Sedimentary Facies*, *Miocene Limenston Facies*, *Pleistocene Limenstone Facies*, *Alluvium*, *Pleistocene Sedimentary Facies*, *Piocene Sedimentary Facies*. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan *Miocene lomenstone facies* yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan urutan stratigrafinya satuan formasi batuan yang dijumpai adalah Anggota Napal, Formasi Kujung, Anggota Batulempung, Formasi Kujung, Batugamping Prupuh, Anggota Formasi Kujung, Anggota Tawun Formasi Tuban, Formasi Tuban, Anggota Ngrayong Formasi Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial.

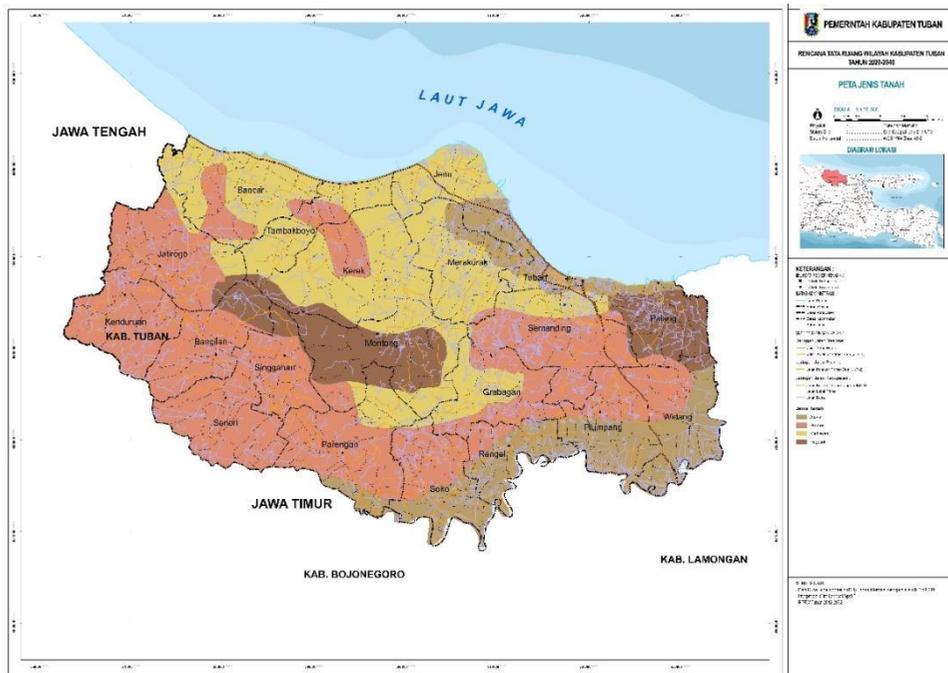


Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Tuban
 (Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
 RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

Secara geologi jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tuban yaitu :

- Alluvial : jenis tanah ini terdapat Kecamatan Grabagan, Kecamatan Jenu, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Palang, Kecamatan Parengan, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Rengel, Kecamatan Semanding, Kecamatan Soko, Kecamatan Tuban, Kecamatan Widang dengan luas sekitar 15,24% dari luas total Kabupaten Tuban.
- Regosol : jenis tanah ini seluas sekitar 11,04% dari luas total Kabupaten Tuban yang tersebar di Kecamatan Bangilan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Kerek, Kecamatan Montong, Kecamatan Palang, Kecamatan Parengan, Kecamatan Semanding, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Widang.
- Grumosol : jenis tanah ini seluas 44,49% dari luas total Kabupaten Tuban yang tersebar di Kecamatan Bancar, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Kerek, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Montong, Kecamatan Palang, Kecamatan Parengan, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Rengel, Kecamatan Semanding, Kecamatan Senori, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Soko, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Widang.
- Komplek Mediteran Merah Kuning : jenis tanah ini seluas 29,24% dari luas total Kabupaten Tuban yang tersebar di Kecamatan Bancar, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Jenu, Kecamatan Kerek, Kecamatan Merakurak, Kecamatan Montong, Kecamatan Palang,

Kecamatan Parengan, Kecamatan Semanding, Kecamatan Soko, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Tuban.



Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tuban
(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

D. Kondisi Klimatologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering sebesar 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Pada tahun 2019 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April.

E. Kondisi Hidrologi

Hidrologi di Kabupaten Tuban didukung oleh keberadaan air permukaan dan air tanah. Kabupaten Tuban sendiri berada di dalam BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Solo yang meliputi Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Bengawan Solo dan DAS Prumpung Klero. Secara garis besar, daerah yang dilewati aliran Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami banjir akibat luapan sungai. Untuk menangani masalah banjir tersebut, saat ini dalam proses pembangunan tanggul Bengawan Solo di Kecamatan Rengel, Plumpang, dan Widang.

Jumlah sungai di Kabupaten Tuban sebanyak 18 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai kening. Sungai-sungai yang terdapat

di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung.

Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tuban

| SWP Bengawan Solo | No | DAS | Luas (Ha) |
|-------------------|-------|-------------------|------------|
| Bengawan Solo | 1 | Bengawan Solo | 113.299,48 |
| Prumpung Klero | 2 | Sub DAS Klero | 10.213,21 |
| | 3 | Sub DAS Latsari | 1.881,85 |
| | 4 | Sub DAS Boncong | 3.356,22 |
| | 5 | Sub DAS Budur | 2.850,55 |
| | 6 | Sub DAS Bancar | 1.135,21 |
| | 7 | Sub DAS Prumpung | 22.319,14 |
| | 8 | Sub DAS Dasin | 3.102,15 |
| | 9 | Sub DAS Socorejo | 2.899,35 |
| | 10 | Sub DAS Purworejo | 1.694,94 |
| | 11 | Sub DAS Mentoso | 2.357,46 |
| | 12 | Sub DAS Wadung | 475,55 |
| | 13 | Sub DAS Kaliuntu | 598,58 |
| | 14 | Sub DAS Laorsemut | 12.596,48 |
| | 15 | Sub DAS Lengkong | 10.850,20 |
| | 16 | Sub DAS Karang | 3.801,52 |
| | 17 | Sub DAS Tasikmadu | 1.250,32 |
| | 18 | Sub DAS Lohgung | 3.890,62 |
| | Lasem | | |

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

Selain sungai, Kabupaten Tuban memiliki 35 sumber mata air yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sumber Mata air tertinggi berada di wilayah Ngerong yang masuk dalam Kecamatan Rengel dengan debit 980 L/detik. Sedangkan yang terendah berada di wilayah Gomang Kecamatan Bangilan dengan debit 7 L/dtk.

Tabel 2.3 Sungai di Kabupaten Tuban

| NO | NAMA SUNGAI | LOKASI | PANJANG | LEBAR (m) | | KEDALAMAN | DEBIT (m ³ /dtk) | | LUAS IRIGASI |
|----|---------------|--|---------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | (Km) | PERMUKAAN | DASAR | (meter) | MAKS | MIN | (Ha) |
| 1 | Bengawan Solo | Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Parengan | 60.00 | 120.00 | 50.00 | 18.00 | 588.00 | 1.000 | 5430 |
| 2 | Kening | Jatirogo, | 60.00 | 12.00 | 8.00 | 3.00 | 181.84 | 0.500 | 2522 |

| NO | NAMA SUNGAI | LOKASI | PANJANG | LEBAR (m) | | KEDALAMAN | DEBIT (m ³ /dtk) | | LUAS IRIGASI |
|----|--------------|--|---------|-----------|-------|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| | | | (Km) | PERMUKAAN | DASAR | (meter) | MAKS | MIN | (Ha) |
| | | Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan | | | | | | | |
| 3 | Kedung Geden | Kenduruan | 14.00 | 27.70 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 0.400 | 85 |
| 4 | Simbatan | Kerek | 42.00 | 10.00 | 2.00 | 2.50 | 30.00 | 0.050 | 167 |
| 5 | Kejuron | Bangilan | 12.00 | 12.50 | 4.50 | 3.00 | 14.20 | 0.050 | 196 |
| 6 | Cekalang | Soko | 8.00 | 15.00 | 3.20 | 3.20 | 16.00 | 0.050 | 485 |
| 7 | Kemawing | Tuban | 11.50 | 16.50 | 4.80 | 3.50 | 13.50 | - | 974 |
| 8 | Ngabongan | Singgahan | 4.00 | 12.00 | 4.10 | 2.40 | 10.40 | 0.010 | 200 |
| 9 | Prumpung | Tambak Boyo | 11.32 | 21.00 | 9.00 | 6.50 | 46.00 | 0.050 | 819 |
| 10 | Nglajam | Tambak Boyo | 5.00 | 16.00 | 3.00 | 2.50 | 28.26 | 0.030 | 412 |
| 11 | Kedung Kayen | Kerek | 1.20 | 14.00 | 2.50 | 2.50 | 28.00 | 0.080 | 183 |
| 12 | Bebek Putih | Senori | 4.52 | 13.50 | 3.00 | 2.50 | 13.38 | 0.050 | 383 |
| 13 | Guwo Terus | Montong | 7.50 | 13.00 | 2.50 | 3.70 | 18.70 | 0.050 | 1250 |
| 14 | Tawun | Bangilan | 2.50 | 15.00 | 6.50 | 4.20 | 40.72 | 0.050 | - |
| 15 | Soko Medalem | Senori | 8.75 | 17.20 | 3.40 | 3.80 | 12.10 | 0.010 | 307 |
| 16 | Katerban | Senori | 4.52 | 13.40 | 4.20 | 2.70 | 6.20 | 0.010 | 256 |
| 17 | Gede | Widang | 14.52 | 24.00 | 5.80 | 3.50 | 19.40 | 0.007 | 21 |
| 18 | Kramat | Singgahan | 2.20 | 12.35 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 0.005 | 191 |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

2.1.2 Demografi

Kondisi demografis Kabupaten Tuban berdasarkan penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020). Pada Tahun 2016 tercatat penduduk Kabupaten Tuban sebesar 1.315.155 menurun 47.269 jiwa di Tahun 2017 menjadi sebesar 1.267.886 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2018 jumlah penduduk menjadi sebesar 1.285.147 jiwa, meningkat 17.261 jiwa jika dibandingkan jumlah penduduk di Tahun 2017. Pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 1.298.302 jiwa. Tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 1.198.012 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 598.339 jiwa dan perempuan sebesar 599.673 jiwa. Adanya selisih yang cukup signifikan pada data jumlah penduduk tahun 2019 dan 2020 yaitu 100.290 jiwa, artinya ada pengurangan jumlah penduduk yang cukup besar dalam jangka waktu 1 tahun. Bahwa data jumlah penduduk mulai tahun 2016-2019 menggunakan data Jumlah Penduduk Akhir Tahun Hasil Registrasi di Kabupaten Tuban. Sedangkan pada tahun 2020 menggunakan data Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (September)/ *The Result of The 2020 Population Census* (September), di mana Sensus Penduduk dilaksanakan dengan periode 10 tahun sekali, sehingga wajar apabila terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data sebelum tahun 2020 dengan data pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,77. Angka tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Tuban, diketahui bahwa penduduk Kabupaten Tuban didominasi oleh penduduk usia muda atau dewasa, yakni mengelompok pada

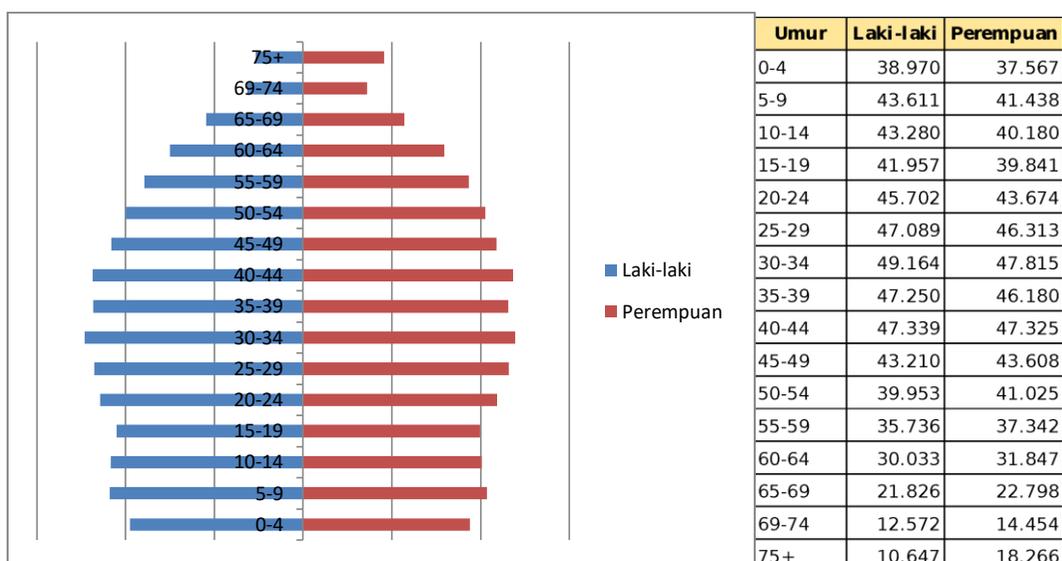
usia 15-49 tahun. Namun jika diamati pada piramida penduduk, penduduk berusia di bawah 15 tahun masih terlihat membesar, terutama pada kelompok usia 5-14 tahun, yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang berusia 04. Hal tersebut menunjukkan jumlah angkatan kerja yang besar. Secara terperinci perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir serta komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban
Tahun 2016-2020**

| No. | Tahun | Jenis Kelamin | | Total |
|-----|-------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | 2016 | 658.933 | 656.222 | 1.315.155 |
| 2. | 2017 | 636.053 | 631.833 | 1.267.886 |
| 3. | 2018 | 644.151 | 640.996 | 1.285.147 |
| 4. | 2019 | 650.778 | 647.514 | 1.298.302 |
| 5. | 2020 | 598.339 | 599.673 | 1.198.012 |

(Sumber : BPS Kab. Tuban, 2021)

Adanya selisih yang cukup signifikan pada data jumlah penduduk tahun 2019 dan 2020 yaitu 100.290 jiwa, artinya ada pengurangan jumlah penduduk yang cukup besar dalam jangka waktu 1 tahun. Bahwa data jumlah penduduk mulai tahun 2016-2019 menggunakan data Jumlah Penduduk Akhir Tahun Hasil Registrasi di Kabupaten Tuban. Sedangkan pada tahun 2020 menggunakan data Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (September)/ *The Result of The 2020 Population Census* (September), di mana Sensus Penduduk dilaksanakan dengan periode 10 tahun sekali, sehingga wajar apabila terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data sebelum tahun 2020 dengan data pada tahun 2020.



Gambar 2.7 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tuban

(Sumber : BPS Kab. Tuban, 2021)

Tabel 2.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Demografis Kabupaten Tuban Tahun 2020

| No | Kecamatan | (N) Jumlah Penduduk (Jiwa) | (A) Luas Wilayah (Ha) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) | (A) Daya Tampung Lahan (Ha/Jiwa) | Standar Konsumsi Lahan Minimal (Ha/Jiwa) | Ket Daya Tampung Demografis |
|----|------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Kenduruan | 30857 | 8573 | 3,599 | 0,278 | 0,086 | A>Klmin |
| 2 | Bangilan | 52668 | 7727 | 6,816 | 0,147 | 0,076 | A>Klmin |
| 3 | Senori | 45759 | 7839 | 5,837 | 0,171 | 0,086 | A>Klmin |
| 4 | Singgahan | 45496 | 7905 | 5,755 | 0,174 | 0,086 | A>Klmin |
| 5 | Montong | 57556 | 14798 | 3,889 | 0,257 | 0,076 | A>Klmin |
| 6 | Parengan | 59913 | 11445 | 5,235 | 0,191 | 0,076 | A>Klmin |
| 7 | Soko | 90668 | 9688 | 9,359 | 0,107 | 0,076 | A>Klmin |
| 8 | Rengel | 64106 | 5852 | 10,955 | 0,091 | 0,076 | A>Klmin |
| 9 | Grabagan | 42334 | 7379 | 5,737 | 0,174 | 0,086 | A>Klmin |
| 10 | Plumpang | 85811 | 8652 | 9,918 | 0,101 | 0,076 | A>Klmin |
| 11 | Widang | 54676 | 10799 | 5,063 | 0,198 | 0,076 | A>Klmin |
| 12 | Palang | 93196 | 7270 | 12,819 | 0,078 | 0,076 | A>Klmin |
| 13 | Semanding | 120486 | 12099 | 9,958 | 0,100 | 0,070 | A>Klmin |
| 14 | Tuban | 91980 | 2129 | 43,203 | 0,023 | 0,076 | A<Klmin |
| 15 | Jenu | 58724 | 8161 | 7,196 | 0,139 | 0,076 | A>Klmin |
| 16 | Merakurak | 62182 | 10377 | 5,992 | 0,167 | 0,076 | A>Klmin |
| 17 | Kerek | 75328 | 13655 | 5,517 | 0,181 | 0,076 | A>Klmin |
| 18 | Tambakboyo | 44530 | 7297 | 6,103 | 0,164 | 0,086 | A>Klmin |
| 19 | Jatirogo | 60140 | 11198 | 5,371 | 0,186 | 0,076 | A>Klmin |
| 20 | Bancar | 61892 | 11236 | 5,508 | 0,182 | 0,076 | A>Klmin |

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, 2020)

Tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan kondisi daya tampung demografis di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019 dan analisis daya tampung demografis, menunjukkan bahwa A atau daya tampung demografis di 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Tuban belum melampaui atau di bawah nilai konsumsi dan 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Tuban memiliki nilai daya tampung demografis telah melampaui nilai konsumsi lahannya. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Tuban

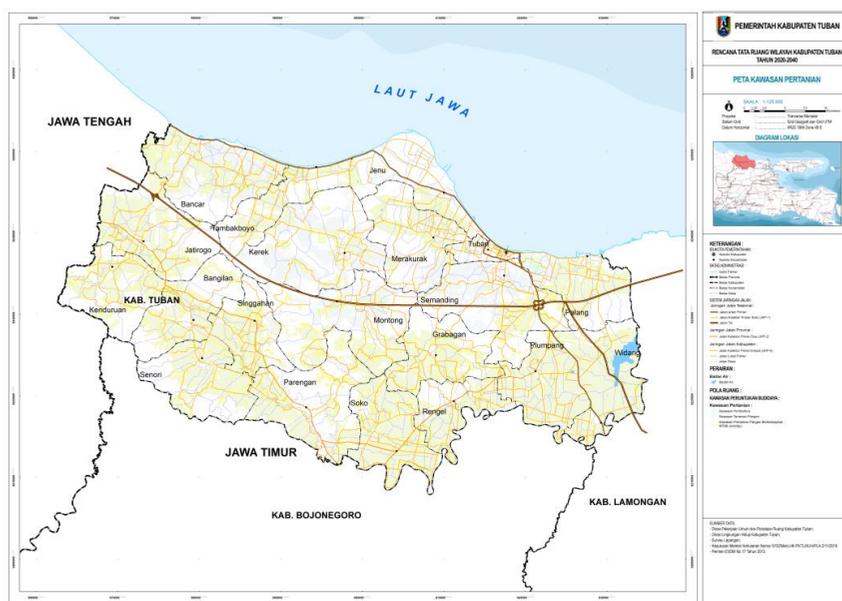
merupakan kawasan yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dibandingkan dengan luas kecamatannya. Sehingga hal tersebut memicu kepadatan penduduk yang tinggi dan belum mampu mencukupi kebutuhan hidup penduduk Kecamatan Tuban.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

A. Potensi Pertanian

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 98.443 Ha yang terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura.

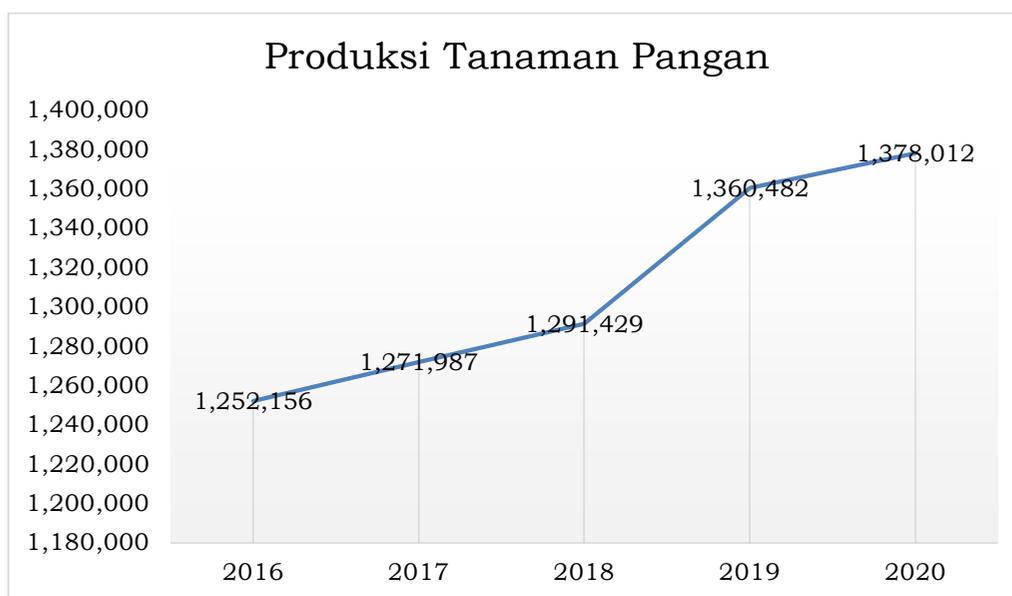
Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi-umbian lainnya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, cabe, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.



Gambar 2.8 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Tuban
(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

Perkembangan jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2016 sebesar 1.252.156 ton, tahun 2017 sebesar 1.271.987 ton, tahun 2018 sebesar 1.291.429 ton dan di tahun 2019 sebesar 1.360.482 ton. Pada tahun 2020 angkanya juga naik kembali menjadi sebesar 1.378.012 ton. Sehingga dari data ini ada kecenderungan trend kenaikan jumlah produksi yang akan menjadi potensi

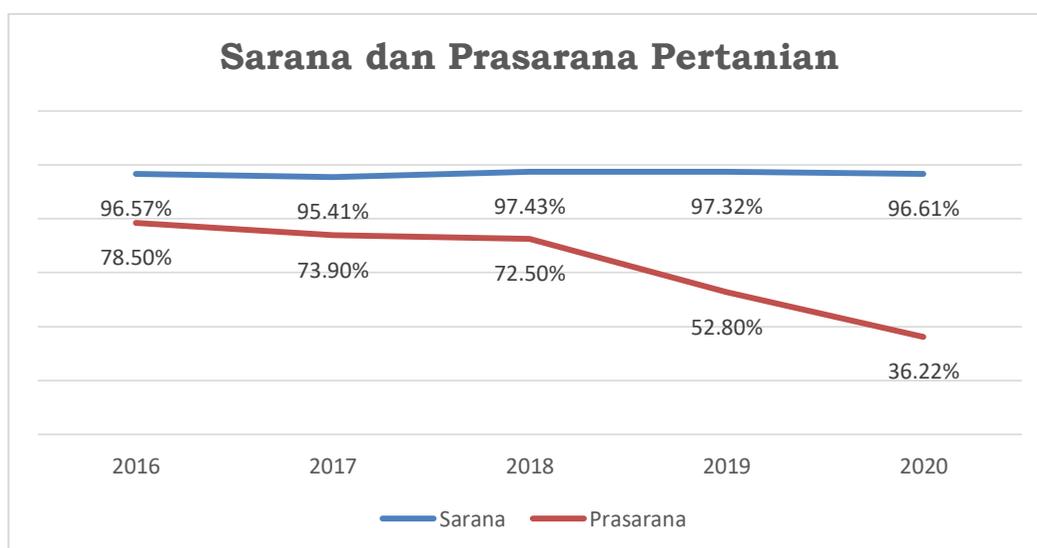
untuk dikembangkan di bidang pertanian tanaman pangan. Berikut ilustrasi nya:



Gambar 2.9 Produksi Tanaman Pangan

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Kenaikan jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Tuban tidak diikuti oleh persentase sarana pertanian di Kabupaten Tuban yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun dan persentase prasarana pertanian yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Persentase tersebut didapatkan dari sarana atau prasarana dalam keadaan baik dibagi dengan sarana atau prasarana yang dibangun/rusak. Yang menjadi faktor penurunan atau terjadinya fluktuasi pada persentase sarana dan prasarana pertanian adalah sarana dan prasarana pertanian yang mengalami kerusakan lebih banyak dibandingkan sarana dan prasarana pertanian dalam keadaan baik. Berikut ilustrasinya:



Gambar 2.10 Persentase Sarana dan Prasarana Pertanian

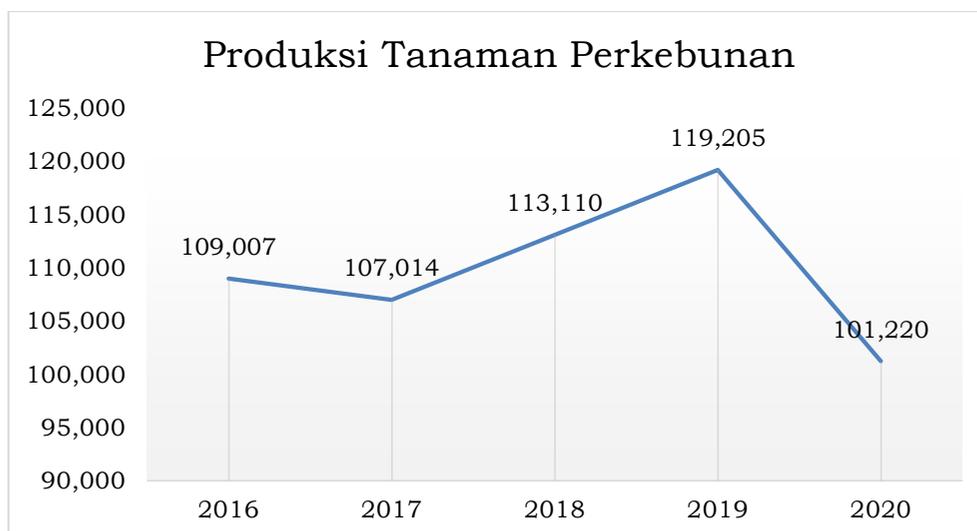
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Terlihat pada gambar diatas sarana pertanian pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase sebanyak 1,16% yang semula 96,57% menjadi 95,41%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 97,43%. Namun peningkatan ini tidak terjadi pada tahun berikutnya, dikarenakan pada tahun 2019 sampai dengan 2020, terjadi penurunan dengan capaian masing-masing sebesar 97,32% dan 96,61%. Persentase prasarana pertanian dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan dengan besaran capaian masing-masing secara berurutan sebesar 78,50%, 73,90%, 72,50%, 52,80% dan 36,22%. Jadi yang menjadi faktor penurunan atau terjadinya fluktuasi pada persentase sarana dan prasarana pertanian adalah sarana dan prasarana pertanian yang mengalami kerusakan lebih banyak dibandingkan sarana dan prasarana pertanian dalam keadaan baik.

B. Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur *Metharizium*, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

Perkembangan jumlah produksi tanaman perkebunan pada tahun 2016 sebesar 109.006,57 ton tetapi terjadi penurunan di tahun 2017 menjadi sebesar 107.014,43 ton, tahun 2018 sebesar 113.110 ton, tahun 2019 sebesar 119.205,03 ton dan di tahun 2020 sebesar 101.220 ton. Berikut gambar perkembangannya:



Gambar 2.11 Produksi Tanaman Perkebunan

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Sehingga dari data ini ada kecenderungan trend naik turun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor terutama cuaca dan musim, serta hama penyakit. Ke depan perlu diupayakan agar produksi perkebunan ini tetap menjadi bagian dari penopang pertanian secara umum.

C. Potensi Perikanan dan Kelautan

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu : ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Perkembangan jumlah produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berikut gambar perkembangannya:



Gambar 2.12 Produksi Perikanan dan Kelautan

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, 2021)

Pada tahun 2016 sebesar 49.408,46 ton, tahun 2017 sebesar 49.858,90 ton, tahun 2018 sebesar 53.677,36 ton, tahun 2019 sebesar 57.538,95 ton dan di tahun 2020 sebesar 63.645,23 ton. Sehingga dari data ini ada kecenderungan trend kenaikan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya peningkatan sarana dan prasarana produksi, pemanfaatan teknologi tepat guna serta pendampingan dan pemberdayaan masyarakat

perikanan. Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya (1) Pengembangan Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Lingkungan Pesisir; (3) Pengembangan Perikanan Budidaya; (4) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat; (5) Pengembangan Pembenihan Ikan; dan (6) Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

D. Potensi Peternakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukkan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan entog.

Perkembangan jumlah produksi peternakan di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berikut gambar perkembangannya:



Gambar 2.13 Produksi Peternakan

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, 2021)

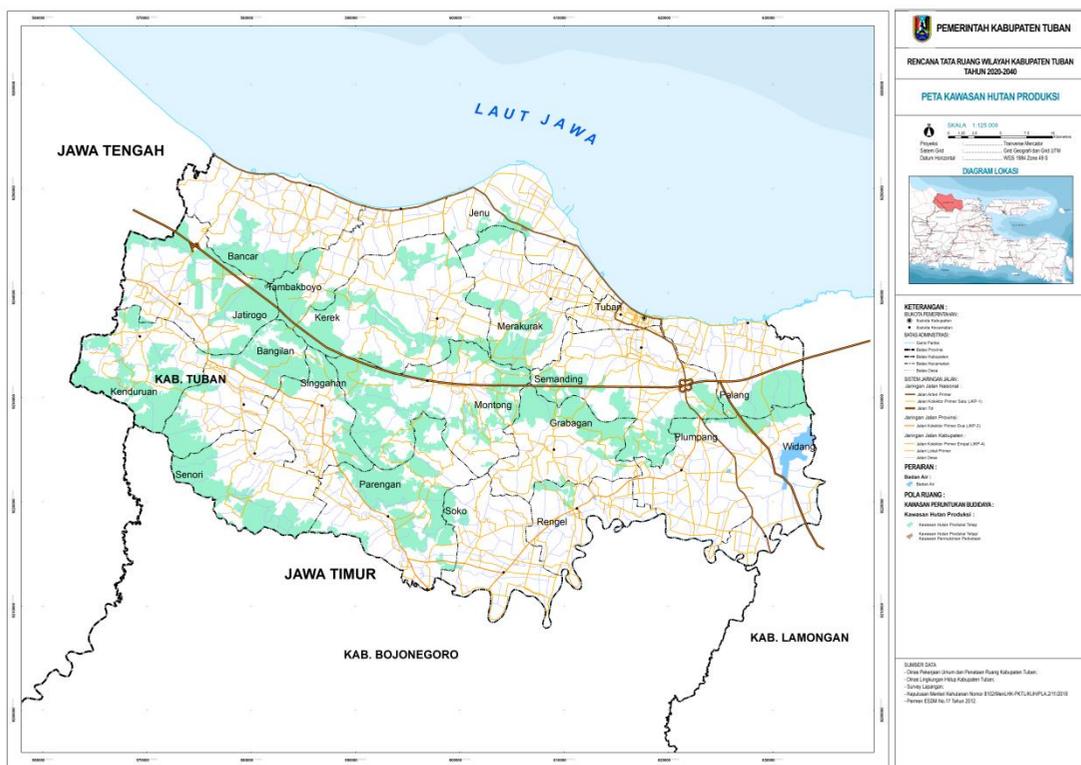
Pada 2016 sebesar 13.593.357 ekor, di tahun 2017 sebesar 16.692.395 ekor, tahun 2018 sebesar 17.108.512 ekor, tahun 2019 sebesar 17.547.672 ekor dan di tahun 2020 sebesar 17.605.232 ekor. Sehingga dari data ini ada kecenderungan trend kenaikan. Populasi yang lain juga tersedia dan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat seperti : sapi potong, kambing, ayam buras, ayam

ras petelur, itik, entog dan lain-lain. Disamping hal tersebut juga didukung pelaksanaan optimalisasi upaya khusus sapi wajib bunting (Upsus Siwab) serta pelaksanaan inseminasi buatan.

E. Potensi Kehutanan

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan.

Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.



Gambar 2.14 Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Tuban

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

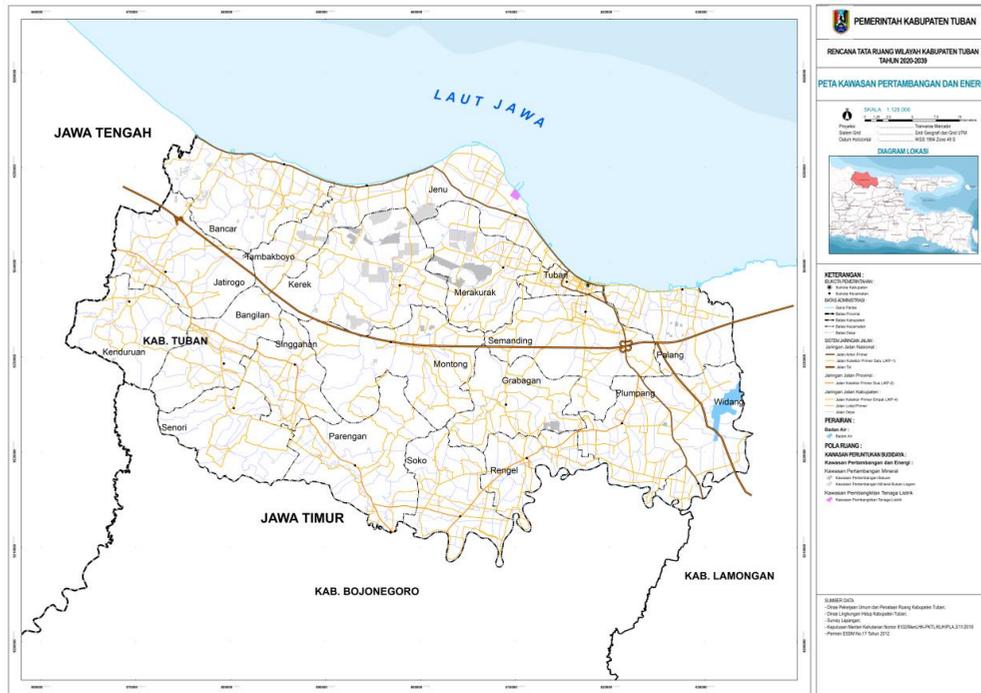
F. Potensi Pertambangan

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT. Semen Indonesia dan PT. Solusi Bangun Indonesia sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya :

- Batu Gamping (CaCO_3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.
- Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.
- Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain.
- Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen sorat. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel.
- Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainnya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
- Fosfat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang.

Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi.



Gambar 2.15 Peta Kawasan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban
*(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
 RTRW Kabupaten Tuban, 2020)*

G. Potensi Pariwisata

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, sesuai dengan perhitungan PDRB tahun dasar 2010, pariwisata masuk dalam kategori R dalam sektor jasa lainnya. Sektor ini meliputi kegiatan jasa hiburan, kesenian dan kreatifitas dan rekreasi lainnya. Tahun 2017 kontribusi sektor ini pada PRDB Kabupaten Tuban sebesar 0.98%. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0.96%, ini menunjukkan penurunan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Tuban kawasan pariwisata yang ditetapkan untuk pengembangannya diantaranya:

- a. Pariwisata budaya, meliputi:
 - Makam Sunan Bonang, Museum Kambang Putih, Makam Ronggolawe, dan Situs Boom di Kecamatan Tuban;
 - Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding; dan
 - Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang.
- b. Kawasan peruntukkan pariwisata alam, meliputi:
 - Pantai Sowan dan Pantai Sukolilo di Kecamatan Bancar;

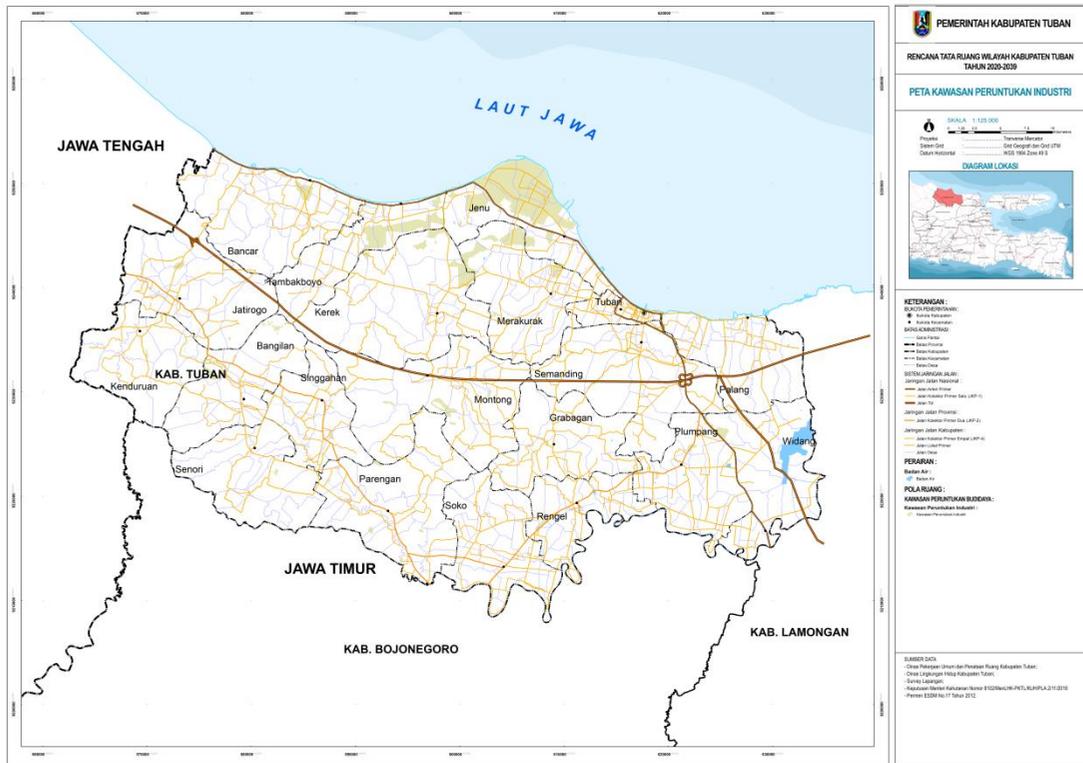
- Goa Akbar di Kecamatan Semanding;
 - Goa Suci di Kecamatan Palang;
 - Goa Ngerong dan Sendang Maibit di Kecamatan Rengel;
 - Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong;
 - Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang;
 - Air Terjun Nglirip di Kecamatan Singgahan; dan
 - Sumber Air Hangat Prataan di Kecamatan Parengan.
- c. Kawasan peruntukkan pariwisata buatan, meliputi:
- Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding; dan
 - Terminal dan Wisata Laut Tuban Kambang Putih di Kecamatan Tuban.

H. Potensi Industri

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat terciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainnya.

Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ± 7.608 Ha yang terdiri dari :

- a) Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
- b) Kawasan peruntukan industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rengel, Jatirogo, dan Palang.
- c) Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.



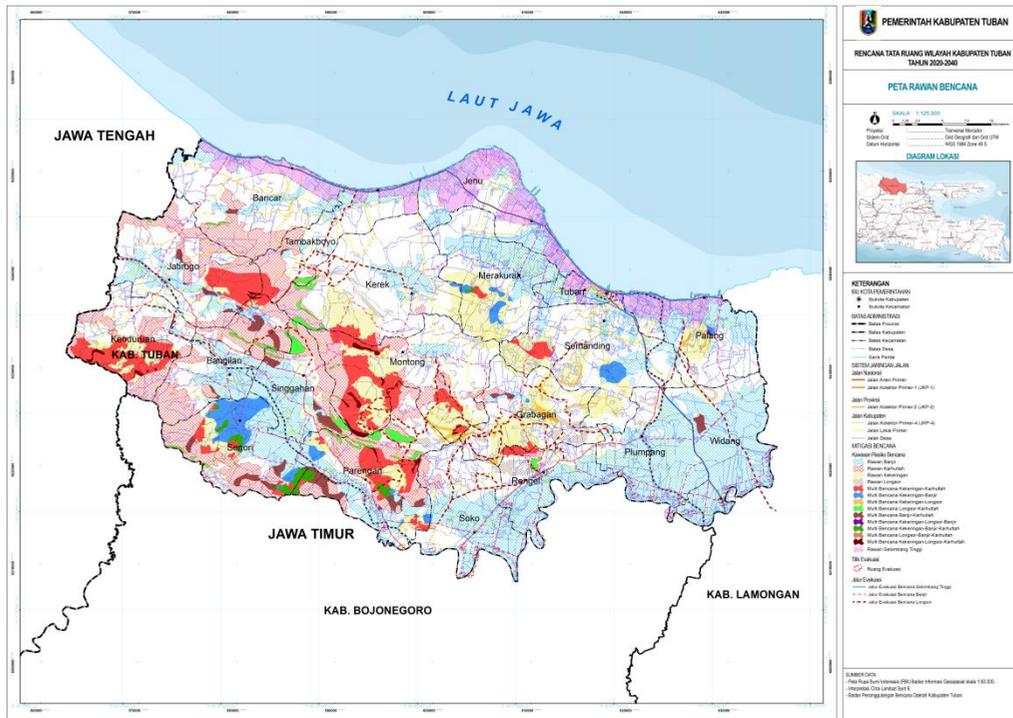
Gambar 2.16 Peta Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tuban

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

2.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Faktor rawan bencana di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh proses geologi berupa tektonik, hidrogeologi, sedimentasi dan klimatologi yang dapat menghasilkan produk kebencanaan antara lain banjir, abrasi, gerakan tanah/longsor, kekeringan dan angin puting beliung sedangkan dari faktor aktifitas manusia dampaknya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan pembangunan seperti banjir bandang, kebakaran hutan, kebakaran permukiman dan kegagalan industri. Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Tuban yaitu : Kawasan sempadan sungai yang rawan banjir, dan daerah pantai yang rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. Di wilayah Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana.



Gambar 2.17 Peta Rawan Bencana Kabupaten Tuban

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
RTRW Kabupaten Tuban, 2020)

1. Kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir :
 - Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko merupakan daerah aliran Sungai Bengawan Solo, sehingga tiap musim hujan Kecamatan ini rawan akan bencana banjir besar.
 - Afvoor Macanan dan Afvoor Sekardadi : Kecamatan Jenu dan Merakurak
 - Kecamatan yang terkena dampak luapan sungai Kening adalah Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, dan Parengan.
2. Kecamatan yang merupakan daerah rawan abrasi pantai yaitu Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar.
3. Kecamatan yang merupakan daerah rawan gelombang pasang yaitu Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar.

2.1.5 Jasa Ekosistem Penting

Jasa ekosistem penting dapat digunakan untuk mengetahui potensi daya dukung dan daya tampung pada suatu wilayah. Nilai ekosistem penting dapat diketahui melalui rata-rata koefisien daya dukung atau daya tampung. Tingkat kepentingan daya dukung pada jasa ekosistem diperoleh melalui rata-rata seluruh jasa ekosistem yang dikategorikan sebagai daya dukung. Jasa ekosistem yang dikategorikan sebagai daya dukung adalah seluruh jasa penyediaan, jasa budaya, dan jasa pendukung.

Tabel 2.6 Distribusi Luas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Penting Kabupaten Tuban (Ha)

| KECAMATAN | Prioritas I | Prioritas II | Prioritas III | Prioritas IV | Prioritas V | Grand Total |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| BANCAR | 3862.29 | 2901.94 | 1462.40 | 4191.38 | 303.67 | 12721.67 |
| BANGILAN | 1857.16 | 5316.52 | 1228.02 | 42.27 | 606.99 | 9050.97 |
| JATIROGO | 517.55 | 6641.29 | 2896.74 | 1457.23 | 741.15 | 12253.96 |
| JENU | 5361.02 | 971.66 | 236.93 | 2034.92 | 101.68 | 8706.21 |
| KENDURUAN | 655.98 | 6331.48 | 1936.06 | | 362.39 | 9285.90 |
| KEREK | | 5247.12 | 6881.98 | 1692.29 | 1605.89 | 15427.29 |
| MERAKURAK | 2923.39 | 2243.18 | 1758.92 | 2110.06 | 1358.92 | 10394.48 |
| MONTONG | | 7272.84 | 5794.99 | 628.24 | 1207.33 | 14903.40 |
| PALANG | 4436.64 | 2203.26 | 483.15 | 1385.76 | 179.68 | 8688.49 |
| PARENGAN | 2963.67 | 7361.52 | 2057.40 | 31.01 | 730.57 | 13144.16 |
| PLUMPANG | 4660.92 | 2071.58 | 932.00 | 117.79 | 991.09 | 8773.37 |
| RENGEL | 3293.71 | 2824.67 | 2791.80 | 2887.01 | 1112.97 | 12910.16 |
| SEMANDING | 853.13 | 6230.43 | 4918.84 | 1843.08 | 1472.11 | 15317.58 |
| SENORI | 3167.59 | 5778.45 | 379.30 | 6.73 | 579.73 | 9911.81 |
| SINGGAHAN | 3230.27 | 2153.67 | 288.31 | 512.08 | 705.36 | 6889.70 |
| SOKO | 4158.79 | 2008.73 | 2481.56 | 569.86 | 1012.64 | 10231.58 |
| TAMBAKBOYO | 1592.49 | 2070.46 | 868.67 | 2481.27 | 230.81 | 7243.69 |
| TUBAN | 753.21 | 46.22 | 41.64 | 971.20 | 102.76 | 1915.03 |
| WIDANG | 6872.98 | 1476.30 | 1024.23 | 26.09 | 609.30 | 10008.89 |
| Grand Total | 51160.78 | 71151.32 | 38462.95 | 22988.28 | 14015.03 | 197778.36 |

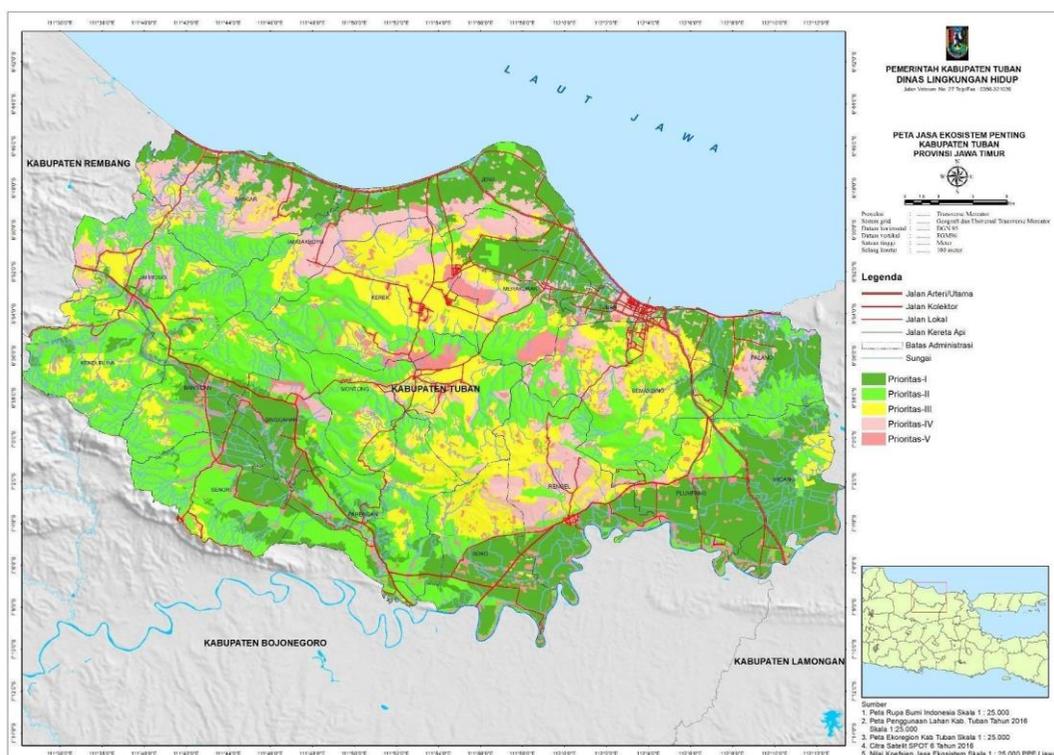
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, RPPLH, 2018)

Kategori Penting I atau Prioritas I dapat diartikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi daya dukung wilayah yang sangat besar untuk jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan. Selain itu, pada wilayah dengan kategori ini mendapat prioritas pertama dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan. Berdasarkan pada tabel di atas, kecamatan yang memiliki wilayah kategori I atau Prioritas pertama paling besar adalah Kecamatan Widang yang memiliki luas wilayah prioritas I sebesar 6.872,98 hektar. Sedangkan Kecamatan kedua yang wilayahnya didominasi oleh prioritas 1 adalah Kecamatan Jenu dengan luas mencapai 5.361,02 hektar. Dengan demikian untuk wilayah yang mendapatkan prioritas dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan adalah Kecamatan Widang dan Kecamatan Jenu.

Luasnya distribusi jasa ekosistem penting Kecamatan Widang dan Kecamatan Jenu juga terkait dengan keberadaan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang terdapat di Kecamatan Widang. Selain itu, pada kecamatan Jenu juga terdapat banyak sekali aktivitas tambang yang juga memiliki fungsi penting baik secara ekonomi, sosial maupun

ekosistem itu sendiri. Kedua kawasan ini juga memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup dan memiliki pengaruh penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga kelestariannya dijaga. Tingginya intervensi kegiatan manusia pada wilayah kecamatan tersebut merupakan sebuah tantangan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Hutan merupakan salah satu elemen utama dalam mendukung penyediaan jasa ekosistem, baik jasa ekosistem penyediaan, budaya, pengaturan maupun pendukung. Keberadaan kawasan lindung dan cukup banyaknya tegakkan pada kedua kecamatan tersebut juga mengindikasikan pentingnya memberikan prioritas pengembangan pada kedua kecamatan tersebut.

Selanjutnya wilayah dengan kategori jasa ekosistem penting II merupakan wilayah prioritas kedua dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan. Wilayah yang memiliki kategori Penting II yang paling luas adalah Kecamatan Montong dengan luasan 7.272,84 hektar dan Kecamatan Jatirogo dengan luas 6.641,29. Wilayah kategori III merupakan wilayah prioritas ketiga dalam dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan. Wilayah yang memiliki kategori Penting III terbesar adalah kecamatan Kerek dan mencapai 6.881,98 sesuai data tabel.



Gambar 2.18 Peta Jasa Ekosistem Penting Kabupaten Tuban
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, RPPLH, 2018)

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta kondisi seni budaya dan olah raga yang ada di Kabupaten Tuban. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Tuban.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Demografi

a. Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi.

Tabel berikut adalah kondisi kinerja kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2020 :

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2016-2020

| No. | Lapangan Usaha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019*) | 2020**) |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1. | A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 11 089,151 | 11 799,447 | 12 210,971 | 12 650,658 | 12.620,2 |
| 2. | B Pertambangan dan Penggalian | 4 705,272 | 5 156,942 | 5 623,912 | 5 812,727 | 5.573,9 |
| 3. | C Industri Pengolahan | 14 389,024 | 15 640,675 | 17 594,578 | 19 149,426 | 17.263,3 |
| 4. | D Pengadaan Listrik dan Gas | 51,069 | 58,097 | 62,684 | 65,635 | 67,7 |
| 5. | E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 31,099 | 32,409 | 34,018 | 36,577 | 38,3 |
| 6. | F Konstruksi | 6 999,155 | 7 224,631 | 7 312,847 | 7 808,529 | 7639,3 |
| 7. | G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6 848,743 | 7 588,086 | 8 278,960 | 9 016,504 | 8.367,4 |
| 8. | H Transportasi dan Pergudangan | 348,105 | 390,373 | 432,223 | 484,035 | 468,6 |
| 9. | I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 493,155 | 548,015 | 598,330 | 661,686 | 615,9 |
| 10. | J Informasi dan Komunikasi | 2 352,602 | 2 573,602 | 2 764,862 | 3 006,128 | 3.294,5 |
| 11. | K Jasa Keuangan dan Asuransi | 1 132,575 | 1 225,115 | 1 303,873 | 1 375,955 | 1.402,0 |
| 12. | L Real Estate | 746,905 | 804,853 | 879,544 | 954,154 | 985,8 |
| 13. | M,N Jasa Perusahaan | 108,960 | 119,317 | 133,213 | 145,744 | 138,1 |
| 14. | O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1 200,176 | 1 278,196 | 1 412,214 | 1 562,559 | 1597,0 |
| 15. | P Jasa Pendidikan | 882,206 | 949,572 | 1 005,792 | 1 092,343 | 1.130,3 |
| 16. | Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 268,380 | 296,028 | 322,266 | 353,692 | 389,9 |
| 17. | R,S,T,U Jasa Lainnya | 660,464 | 715,710 | 781,756 | 840,073 | 731,0 |
| 18. | Produk Domestik Bruto | 52 307,043 | 56 401,067 | 60 752,044 | 65 016,424 | 62.323,1 |

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021)

Keterangan:

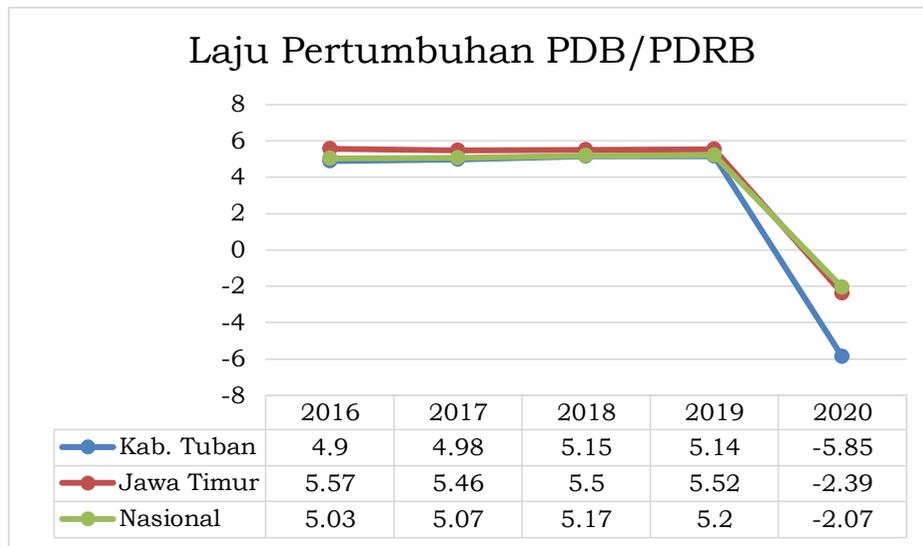
*) : Angka Diperbaiki

***) : Angka Sangat Sementara

Dari data diatas kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha sektor yang dominan di Kabupaten Tuban adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, kontruksi, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

PDRB Kabupaten Tuban memberikan gambaran mengenai ukuran ekonomi di Kabupaten Tuban. PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic covid-19. Pada 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban memiliki kecenderungan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur namun diatas Nasional, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 %, sedangkan provinsi Jawa Timur sebesar 5,52% dan Nasional sebesar 5,02 %. Di tahun 2020 laju pertumbuhan Tuban, Jawa Timur, dan Nasional mengalami penurunan, di Tuban laju pertumbuhan PDRB menurun sebesar -5,85 (data sangat sementara dari BPS Tuban).

Lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten 2020 adalah industri pengolahan (27.7%), pertanian, Kehutanan, perikanan (20.2%), dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13.4%). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2020 adalah informasi dan komunikasi (8.88%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (8.7%), Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang (3.69%). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative (terkontraksi) adalah Kegiatan jasa lain, Industri pengolahan, Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, Penyediaan akomodasi dan makanan minuman, Jasa perusahaan.

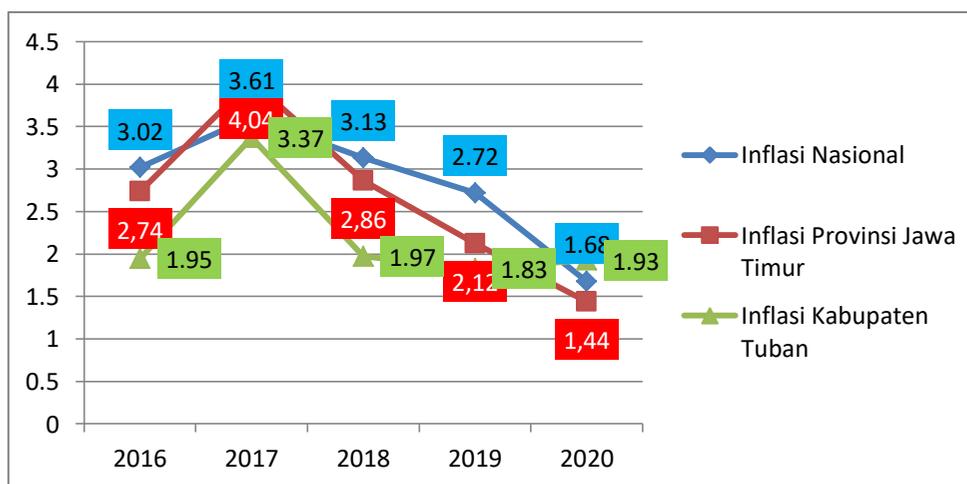


Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan PDRB Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban 2016-2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

b. Laju Inflasi

Untuk mengetahui tingkat perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan harga barang dan jasa. Peningkatan Indeks Harga Implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, sebaliknya dengan penurunan Indeks Harga Implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan Indeks Harga Implisit tersebut adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian.



Gambar 2.20 Laju Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2016-2020

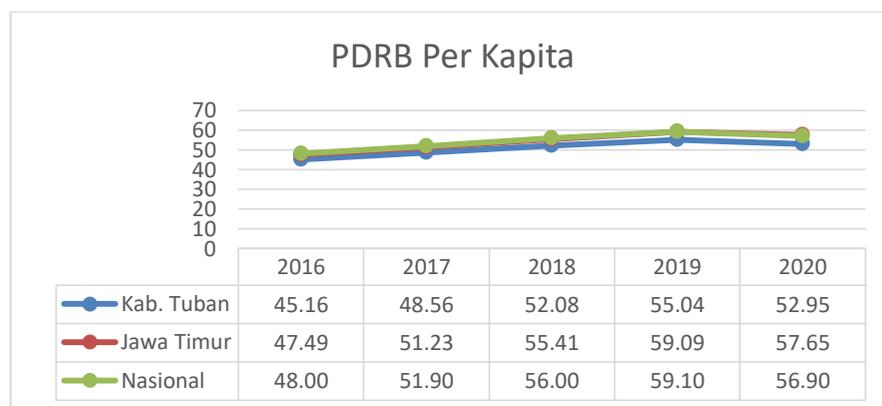
(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021)

Data laju Inflasi Kabupaten Tuban mengacu dari Laju Inflasi Kota Kediri karena Kabupaten Tuban menjadi bagian Sister City Kota Kediri

Kecenderungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, angka sementara tingkat inflasi di Kabupaten Tuban yang dirilis oleh BPS sebesar 1,95% pada tahun 2016, kemudian naik pada tahun 2017 sebesar 3,37%, kembali menurun pada tahun 2018 dan 2019 dengan besaran masing-masing 1,9% dan 1,83%. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,93%. Inflasi ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain meningkatnya permintaan, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, dan keterbatasan produksi.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Angka PDRB Per Kapita Kabupaten Tuban mengalami peningkatan selama tahun 2016 – 2019 yaitu dengan PDRB perkapita sebesar Rp 55,04 (dalam Juta) pada tahun 2019, namun ditahun 2020 PDRD per Kapita mengalami penurunan menjadi 52,95 (dalam juta), dan juga angka ini masih di bawah capaian rata-rata provinsi dan nasional. Berikut adalah grafik perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Tuban.



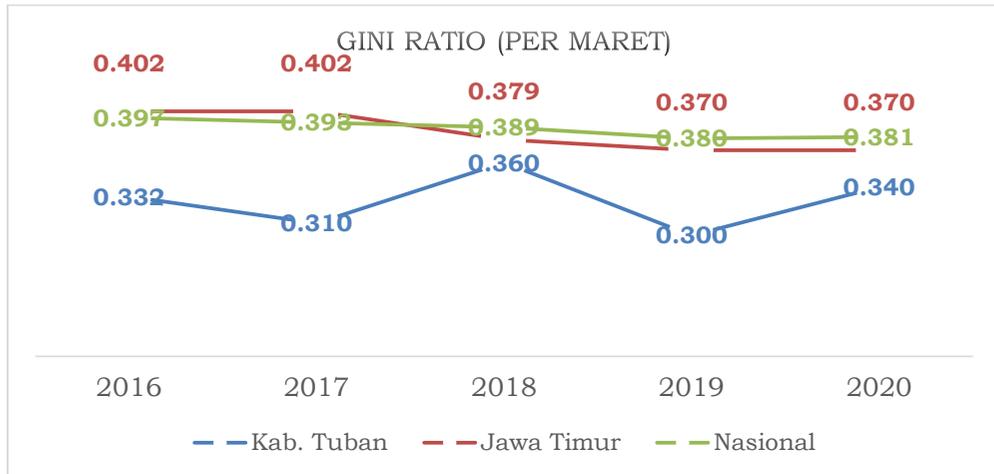
Gambar 2.21 Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Tuban, Provinsi dan Nasional 2016 – 2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

d. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*) merupakan ukuran ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Berdasarkan data *gini ratio* menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu berada pada angka 0.36,

tahun 2019 menurun sebesar 0.30, dan kembali naik di tahun 2020 sebesar 0.34. Capaian *gini ratio* Kabupaten Tuban masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.22 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020)

e. Persentase Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 4.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Hal tersebut tidak selalu tetap setiap tahunnya karena tren kebutuhan hidup manusia berubah setiap saat dan cenderung naik seiring kenaikan harga barang dan inflasi. Berdasarkan data BPS, Persentase kemiskinan di Kabupaten Tuban menunjukkan tren yang positif (penurunan). Namun capaian persentase kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2019 (14,58 %) masih di atas rata-rata provinsi (10,37 %) dan rata-rata nasional (9,4 %), dan tahun 2020 meningkat menjadi 15,91% dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

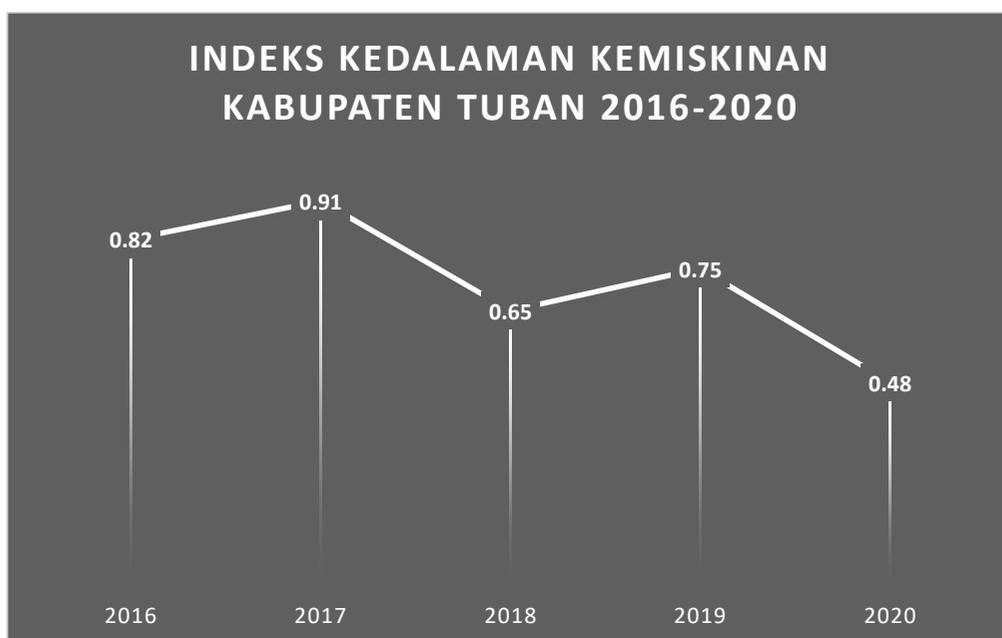


Gambar 2.23 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban Tahun 2016–2020

(Sumber: BPS Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2020)

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tuban dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif dengan tren positif (penurunan), yaitu dari 3,03 di tahun 2016 menjadi 2,27 di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun semakin membaik.

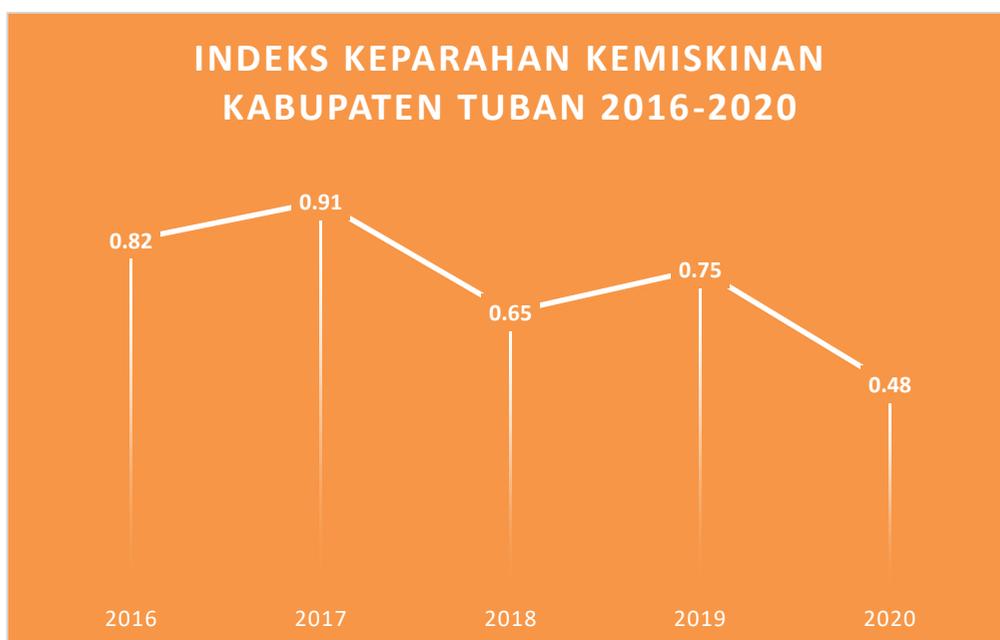
Sebagai contoh, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2019 sebesar 2,84 menjadi 2,27 di tahun 2020, yang berarti ada penurunan sebesar 0,57 poin. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Tuban semakin menjauhi garis kemiskinan. Dimana pada tahun 2019 garis kemiskinan Kabupaten Tuban sebesar Rp. 348.503,- per kapita per bulan. Pada Garis Kemiskinan (GK), terjadi perbaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu dari Rp. 328.268,- per kapita per bulan menjadi Rp. 348.503,- per kapita per bulan. Ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Tuban.



Gambar 2.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2016–2020

(Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2020)

Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2016–2020 cenderung fluktuatif dengan tren positif (menurun). Pada tahun 2016 Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Tuban sebesar 0,82 menjadi 0,48 di tahun 2020, yang menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,34 poin. Penurunan ini mengandung arti bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin kian mengecil.



Gambar 2.25 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2016–2020

(Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2020)

f. Data Terpilah Kemiskinan

Data terpilah kemiskinan adalah data kemiskinan yang dipilah menurut variabel. Variabel dalam data terpilah kemiskinan dapat berupa pengelompokan umur, pendidikan, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Data terpilah kemiskinan di Kabupaten Tuban menggunakan variabel umur (0-60 tahun) dan jenis kelamin sebagai indikator untuk melihat tingkat partisipasi gender, sehingga dapat menjadi faktor penting dalam pengarusutamaan gender.

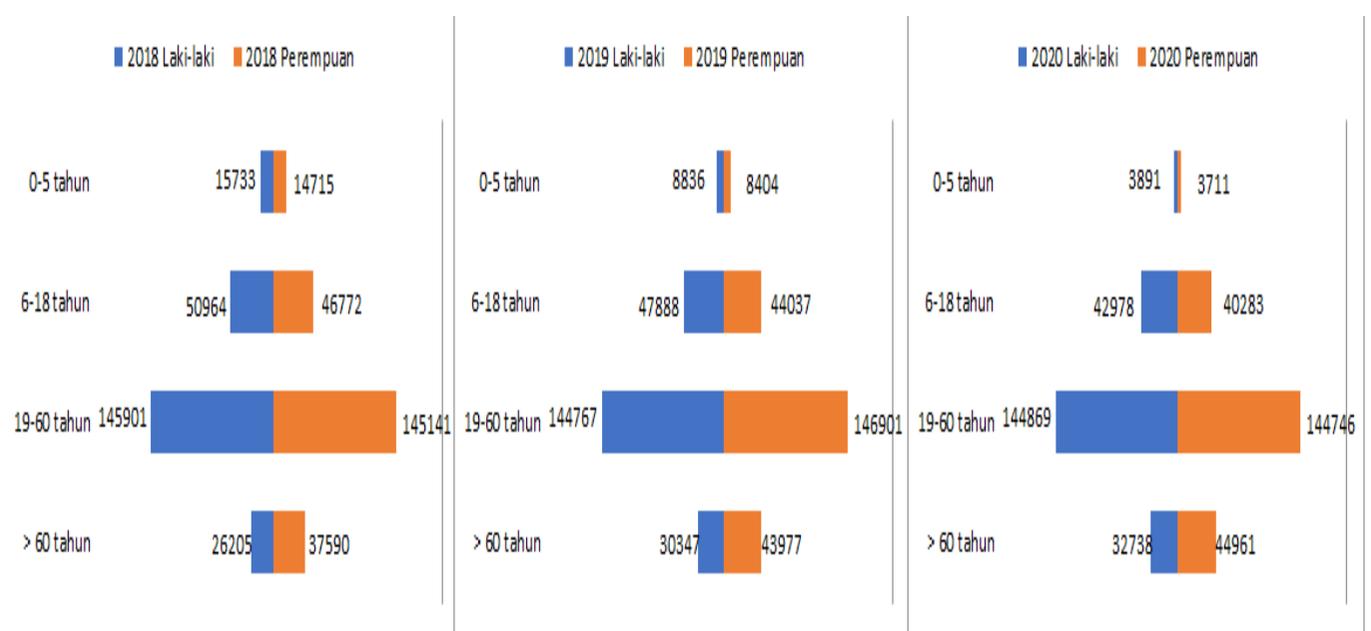
Jumlah kemiskinan di Kabupaten Tuban menurut data terpilah kemiskinan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan pada kelompok umur 0-5 tahun dan 6-18 tahun baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Pada kelompok umur 19-60 tahun cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada kelompok umur diatas 60 tahun data terpilah kemiskinan dari tahun ke tahunnya cenderung mengalami peningkatan baik dari jenis kelamin perempuan maupun jenis kelamin laki-laki. Berikut tabel yang memuat data terpilah kemiskinan Kabupaten Tuban dari tahun 2018-2020:

Tabel 2.8 Data Terpilah Kemiskinan Tahun 2018-2020 Kabupaten Tuban

| NO | KELOMPOK UMUR | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | L | P | L | P | L | P |
| 1 | 0-5 tahun | 15.733 | 14.715 | 8.836 | 8.404 | 3.891 | 3.711 |

| NO | KELOMPOK UMUR | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | L | P | L | P | L | P |
| 2 | 6-18 tahun | 50.964 | 46.772 | 47.888 | 44.037 | 42.978 | 40.283 |
| 3 | 19-60 tahun | 145.901 | 145.141 | 144.767 | 146.901 | 144.869 | 144.746 |
| 4 | > 60 tahun | 26.205 | 37.590 | 30.347 | 43.977 | 32.738 | 44.961 |
| JUMLAH TOTAL | | 238.803 | 244.218 | 231.838 | 243.319 | 224.476 | 233.701 |
| | | 483.021 | | 475.157 | | 458.177 | |

(Sumber: Dinas Sosial & P3A Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 2.26 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

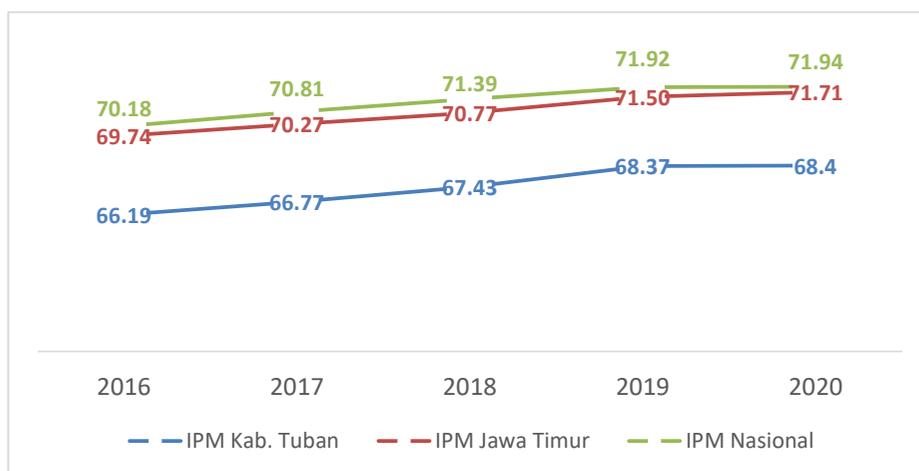
(Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2020)

Pada data terpilah kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2018 dapat dilihat dari semua kelompok umur, kelompok laki-laki cenderung lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelompok perempuan. Pada tahun 2019 kelompok umur 0-5 tahun dan 6-18 tahun jumlah kelompok laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan kelompok perempuan. Sedangkan pada kelompok umur 19-60 tahun dan 60 ke atas jumlah kelompok perempuan lebih banyak dari jumlah kelompok laki-laki. Di tahun 2020 pada kelompok umur 0-60 tahun terjadi kecenderungan jumlah kelompok laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah kelompok perempuan. Sedangkan pada kelompok umur diatas 60 tahun jumlah kelompok wanita jauh lebih banyak daripada jumlah kelompok laki-laki.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

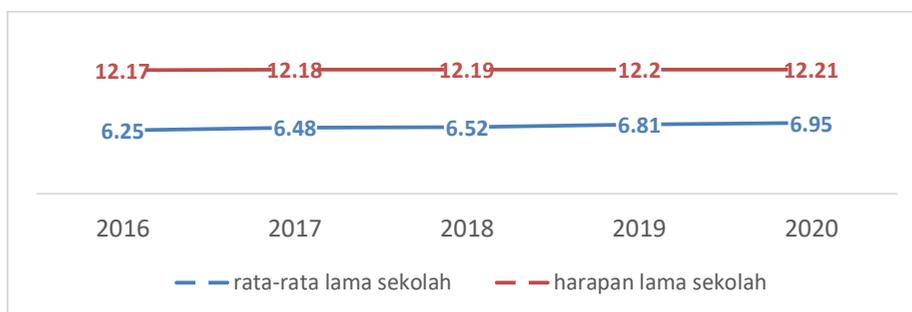


Gambar 2.27 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2016-2020

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020)

Secara umum IPM Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Tuban sebesar 66,19. Selanjutnya pada tahun 2017 IPM Kabupaten Tuban mengalami peningkatan menjadi 66,77. Selanjutnya pada tahun 2018 IPM Kabupaten Tuban juga mengalami peningkatan kembali yakni menjadi 67,43 pada tahun 2019 IPM Kabupaten Tuban menjadi 68,37, dan 2020 meningkat Kembali menjadi 68,40.

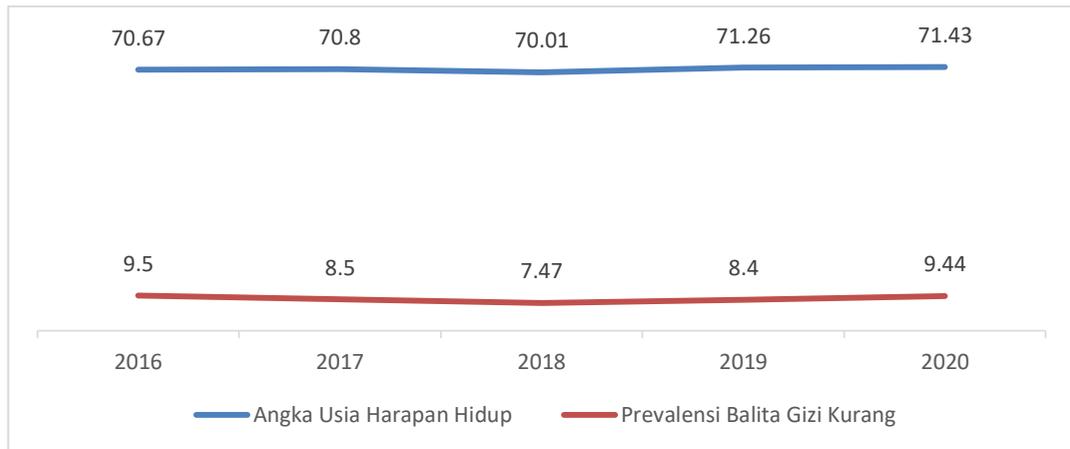
Peningkatan sumberdaya manusia perlu dilakukan di Kabupaten Tuban. Pembangunan manusia didasarkan dari komponen pembangunan manusia antara lain dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi daya beli. Dimensi pendidikan dilakukan dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.



Gambar 2.28 Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabuapten Tuban Tahun 2016 – 2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020)

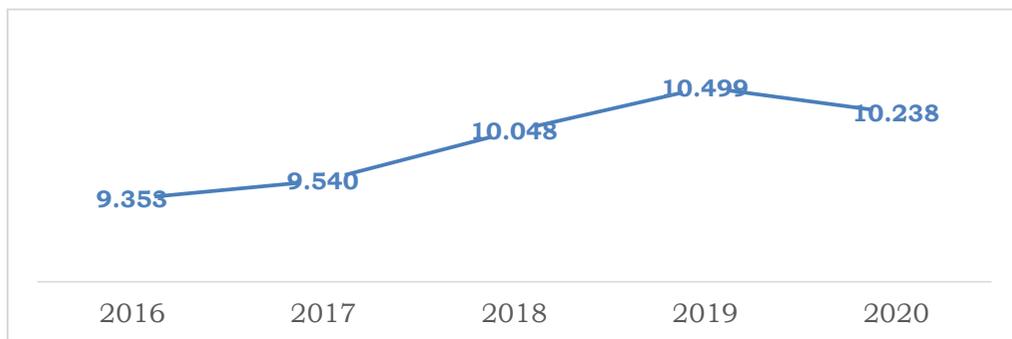
Dimensi kesehatan dilakukan dengan melihat angka usia harapan hidup, pravalensi balita gizi kurang, sehingga dapat meningkatkan promotif dan kualitas layanan kesehatan.



Gambar 2.29 Angka Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2020

(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

Dimensi daya beli dilakukan bersamaan dengan peningkatan iklim pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga daya beli masyarakat meningkat.

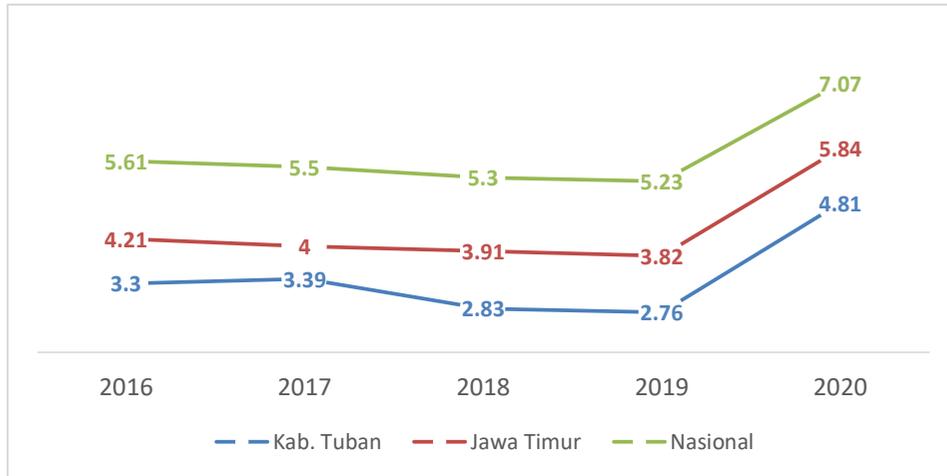


Gambar 2.30 Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa daya beli masyarakat di Kabupaten Tuban cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan daya beli ini dapat disebabkan melemahnya perekonomian masyarakat salah satunya yang terjadi selama masa pandemi COVID-19.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dari capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, tingkat pengangguran terbuka yang diperoleh Kabupaten Tuban adalah sebesar 2,76 lebih baik dari Capaian Provinsi dan Capaian Nasional. Namun meskipun rendah, masalah pengangguran adalah masalah penting yang harus diselesaikan dan ditekan angkanya oleh pemerintah. Pengangguran merupakan salah satu akar masalah yang menyebabkan masalah-masalah sosial lainnya.

3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan Seni budaya dan olah raga selain sebagai upaya melestarikan budaya bangsa juga sarana menumbuhkembangkan dan melestarikan seni budaya dikalangan pemuda sebagai penerus bangsa. Demikian juga bidang Olah raga haruslah ditunjukkan menjadikan bangsa ini lebih kuat dan bermartabat, dengan membangun berbagai sarana olah raga. Sedangkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tetap sebagai koordinator pembangunan olahraga.

Olahraga sebagai salah satu bentuk aktifitas fisik/jasmaniah yang teratur dan terprogram mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan memperoleh kondisi tubuh yang sehat dan prima. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Bab VI pasal 17, disebutkan bahwa olahraga terbagi dalam tiga bagian, yaitu : olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

Pada sisi lain, melalui kegiatan olahraga akan dapat membentuk sikap dan perilaku yang positif seseorang. Olahraga seharusnya menjadi pilihan yang tepat untuk membentuk karakter bangsa yang bertaqwa, sportif, disiplin, bertanggungjawab, bekerja keras, ulet, tangguh dan saling menghargai. Dengan berolahraga akan menghasilkan pribadi yang sehat tubuhnya (jasmani) dan juga sehat jiwanya (rohani). Organisasi olahraga di Kabupaten Tuban sampai akhir Tahun 2020 sejumlah 45 organisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Organisasi Keolahragaan di Kabupaten Tuban

| NO | CABOR | INDUK CABOR | NOMOR SK |
|-----|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. | AEROMODELLING | AEROMODELLING | SKEP/08/V/2019 |
| 2. | ANGKAT BERAT | PABERSI | 006/SKEP/PABERSI JATIM/XI/2020 |
| 3. | ANGKAT BESI | PABSI | 003/SKEP/PABSI JATIM II/2021 |
| 4. | ATLETIK | PASI | 009/SK/PASI JATIM/II/2021 |
| 5. | BALAP SEPEDA | ISSI | PP.ISSI/SK-010/VII/2017 |
| 6. | BASKET | PERBASI | 175/PENGPROV/VII/2017 |
| 7. | BILYAR | POBSI | 015/SKEP/PENGPROV/POBSO/JATIM/IV/2021 |
| 8. | BOLA TANGAN | ABTI | 051/ABTI JATIM/IV/2019 |
| 9. | BOLA VOLI | PBVSI | 147/PBVSI-IT/X/2015 |
| 10. | BULUTANGKIS | PBSI | 003/SKEP/PABSI JATIM/X/2020 |
| 11. | CATUR | PERCASI | 75/SK/PERCASI/JATIM/III/2017 |
| 12. | DRUM BAND | PDBI | 09 tahun 2015 |
| 13. | ESPORT | ESPORTS I | 01/SK/ESI.JATIM/V/2021 |
| 14. | GULAT | PGSI | 321/PGSI-JTM/SK/IV/2016 |
| 15. | JUDO | JUDO | SKEP/80/IX/2014/PJSI JATIM |
| 16. | JU-JITSU | JU-JITSU | KEP-21/PBBI-JATIM/III/2018 |
| 17. | KARATE | FORKI | 40/KTPS/FORKI-JT/KU/XI/18 |
| 18. | KEMPO | PERKEMI | 004/SK/PENPROV/JATIM/IV/2015 |
| 19. | KICK BOXING | KICK BOXING | 34/KBI-JATIM/SK/IV/2021 |
| 20. | LAYAR | PORLASI | 019-01/SKEP/PORLASI/JATIM/1/2012 |
| 21. | MENEMBAK | PERBAKIN | SKEP/17/KU/PPJT/III/2019 |
| 22. | MUAYTHAI | MI | 020/MI-JT/SK/IV/2019 |
| 23. | PANAHAN | PERPANI | 04/45/PENGDA.XA/XII/2016 |
| 24. | PANJAT TEBING | FPTI | 044/skep/FPTI-JTM/I/2018 |
| 25. | PARALAYANG | FASI/PLGI | SKEP/04/111/2015 |
| 26. | PETANQUE | FOPI | 111/FOPI.JATIM/XII/2017 |
| 27. | RENANG | PRSI | 08 TAHUN 2019 |
| 28. | SAMBO | SAMBO | 035/PERSAMBI.JATIM/SK/IV/2021 |
| 29. | SELAM | POSI | 001/SK.01/POSSI-JATIM/II/2020 |
| 30. | SENAM | PERSANI | NOMOR:5 TAHUN 2021 |
| 31. | SEPAK BOLA | PSSI | SKEP/025/PSSI-JATIM/XII/2018 |
| 32. | SEPAK TAKRAW | PSTI | 007/SK/PENGPROV.PSTI JTM/III/2020 |
| 33. | SEPATU RODA | PORSEROSI | 240/SKEP/VI/2019 |
| 34. | SILAT | IPSI | 074/45/PD.XA/XII/2019 |
| 35. | TAEKWONDO | TAEKWONDO | SKEP.154/PENGPROV TI-JTM/VII/2017 |
| 36. | TARUNG DERAJAT | TARUNG DERAJAT | 031/SK/PENGPROV.KODRAT.JATIM/II/2021 |

| NO | CABOR | INDUK CABOR | NOMOR SK |
|-----|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 37. | TENIS LAPANGAN | PELTI | 24/PENGDA/III/2015 |
| 38. | TENIS MEJA | PTMSI | 124/SK/PENGPROV.PSTI JTM/XII/2014 |
| 39. | TINJU | PERTINA | 14/SKEP/PERTINA- JTM/VI/2016 |
| 40. | WOODBALL | IWbA | 30/KEP.IwbA/IX/2017 |
| 41. | WUSHU | WI | KEP.097/PENGPROV.WI- JTM/X/2019 |
| 42. | KKGO SMP-SMA | KKGO SPM-SMA | 800/887/414.101/2021 |
| 43. | KKGO SD | KKGO SD | 420/0776/414.050/2020 |
| 44. | PERWOSI | PERWOSI | 05 TAHUN 2018 |
| 45. | KORD.OR.KEC | | 043/SK/KONI.TBN/VIII/2017 |

(Sumber : Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, 2020)

Jumlah lapangan olahraga yang terdapat di Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 adalah 300 unit, tersebar pada seluruh kecamatan se-Kabupaten Tuban, terdiri dari cabang olahraga : (a) Sepakbola (32 unit); (b) Bola Voli (64 unit); (c). Bulu Tangkis (18 unit); (d) Tenis Meja (53 unit); (e) Sepak Takraw (43 unit); (f) Bola Basket (18 unit); (g) Tenis Lapangan (12 unit); (h) Renang (3 unit); (i) Bilyard (36 unit); (j) Panahan (1 unit); (k) Sepatu Roda (2 unit); (l) Gulat (1 unit); (m) Golf (2 unit); dan (n) Futsal (15 unit). Adapun capaian jumlah dan jenis olahraga prestasi pada Tahun 2019 sejumlah 9 cabang olahraga. Cabang olahraga prestasi tersebut terdiri dari : selam; panahan; renang; bola voli pantai; tenis lapangan; pencak silat; paralayang; taekwondo; dan karate.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Kondisi umum aspek pelayanan umum merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Pada aspek pelayanan umum ini menjelaskan terkait dengan layanan urusan pemerintahan wajib, baik dasar maupun non dasar, layanan urusan pilihan dan layanan urusan penunjang.

1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | |
|------------|--|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pendidikan | | | | | | | |
| 1. | APK PAUD | % | 96,03 | 98,88 | 99,72 | 101,87 | 100,14 |
| 2. | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | |
| a. | APK SD/MI/Paket A | % | 109,75 | 110,14 | 100,09 | 100,82 | 100,63 |
| b. | APK SMP/MTs/Paket B | % | 96,31 | 96,93 | 96,43 | 98,84 | 98,65 |
| 3. | Angka partisipasi murni | | | | | | |
| a. | APM SD/MI/Paket A | % | 98,75 | 100,19 | 98,97 | 99,46 | 99,72 |
| b. | APM SMP/MTs/Paket B | % | 75,67 | 78,14 | 78,35 | 89,03 | 95,49 |
| 4. | Angka Partisipasi sekolah | | | | | | |
| a. | APS Kelompok Usia 7-12 tahun | % | 107,94 | 108,23 | 100,01 | 100,07 | 99,94 |
| b. | APS Kelompok Usia 13-15 tahun | % | 96,53 | 99,27 | 81,01 | 96,89 | 111,6 |
| 5. | Angka Putus Sekolah | | | | | | |
| a. | APtS SD/MI | % | 0,66 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0 |
| b. | APtS SMP/MTs | % | 0,22 | 0,109 | 0,109 | 0 | 0 |
| 6. | Angka Kelulusan | | | | | | |
| a. | AK SD/MI | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b. | AK SMP/MTs | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Angka Melanjutkan | | | | | | |
| a. | AM dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 104,61 | 115,15 | 95,67 | 90,36 | 97,63 |
| b. | AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 157,29 | 106,5 | 103,4 | 99,98 | 98,94 |
| 8. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 91,07 | 92,12 | 92,93 | N/A | 95,64 |
| 9. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Nilai | 6,25 | 6,48 | 6,52 | 6,55 | 6,81 |
| 10. | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Nilai | 12,17 | 12,18 | 12,19 | 12,2 | 12,2 |
| 11. | Cakupan Akses terhadap Fasilitas Pendidikan Dasar | Angka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Rasio Guru/Murid SD/MI | Angka | 12,00 | 12,00 | 12 | 15 | 15 |
| 13. | Rasio Guru/Murid SMP/ | angka | 12,00 | 12,11 | 12 | 16 | 15 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | MTs | | | | | | |
| 14. | Nilai NEM Rata-rata Ujian Sekolah SD/MI | Nilai | 22.88 | 28.30 | 26.95 | 26.74 | 0 |
| 15. | Nilai NEM Rata-rata Ujian Sekolah SMP/MTs | Nilai | 21.38 | 29.56 | 28.75 | 28.89 | 0 |
| 16. | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | % | 77.89 | 84.68 | 83.71 | 89.83 | 90.86 |
| 17. | Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B | % | 82.35 | 90.32 | 90.48 | 91.15 | 91.62 |
| 18. | Persentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan | % | 90.46 | 91.88 | 92.08 | 94.55 | 95.64 |

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2020)

Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah rasio jumlah siswa di semua usia yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada Tahun 2020 realisasi APK TK/RA/PAUD/ Penitipan Anak Memenuhi Target yang telah ditentukan karena terciptanya pola pendidikan anak usia dini di masyarakat hampir seluruhnya anak usia 4-6 tahun tertampung di PAUD. APK pada jenjang SMP/MTs/Paket B telah tercapai 98,65% pada tahun 2020.

Angka Partisipasi Murni (APM), adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Pada Tahun 2020 capaian APM SD/MI/ Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B melampaui target yang telah ditentukan karena pada saat penerimaan siswa baru, adanya peraturan pusat bahwa hanya siswa usia 6,5 tahun ke atas yang dapat masuk data Dapodik menjadikan siswa tertahan di TK/RA. Dan untuk siswa berjalan, adanya siswa usia 6 tahun yang sudah bersekolah di SD/MI dan anak usia 12 tahun sudah masuk ke SMP.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Pada bidang pendidikan, ukuran yang banyak digunakan seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian maka peningkatan persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Pada Tahun 2020, Angka Partisipasi

Sekolah (APS) Kelompok Usia 7 - 12 tahun melampaui target yang telah ditentukan karena Adanya peraturan pusat bahwa hanya siswa usia 6,5 tahun ke atas yang dapat masuk data Dapodik menjadikan siswa tertahan di TK/RA. Serta adanya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengatur tentang sistem Zonasi dalam PPDB Tahun 2018 berdampak pada penurunan (tambahan) jumlah siswa dari luar daerah.

Angka Melanjutkan ke SD/MI dan ke SMP/MTs melampaui target karena pada dasarnya kebutuhan pendidikan dasar terutama untuk masuk ke SD/MI telah terpenuhi, adanya selisih angka kemungkinan karena instrumen pendataan yang berbeda. Dan juga untuk masuk ke SMP/MTs adanya selisih angka kemungkinan karena adanya siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan ke luar daerah.

Angka Putus Sekolah (APtS), didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APtS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah, dengan demikian maka semakin kecil APtS menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengurangi siswa yang putus sekolah/Drop Out. Pada Tahun 2020, capaian APtS pada seluruh jenjang melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya. Selain itu, juga ditunjang oleh berbagai bantuan/beasiswa serta Program Penanggulangan Kemiskinan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, adapun masih ada yang putus sekolah karena adanya siswa yang pindah sekolah tanpa lapor ataupun bagi yang melanjutkan ke pesantren.

Adapun peningkatan kualitas pendidikan, digambarkan oleh capaian peningkatan angka kelulusan sekolah dan penghargaan/prestasi yang diperoleh, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Angka Kelulusan Sekolah menggambarkan tingkat kelulusan murid sesuai dengan jenjang sekolah. Pada tahun 2020 capaian angka kelulusan sekolah pada seluruh jenjang sebesar 100%.

B. Kesehatan

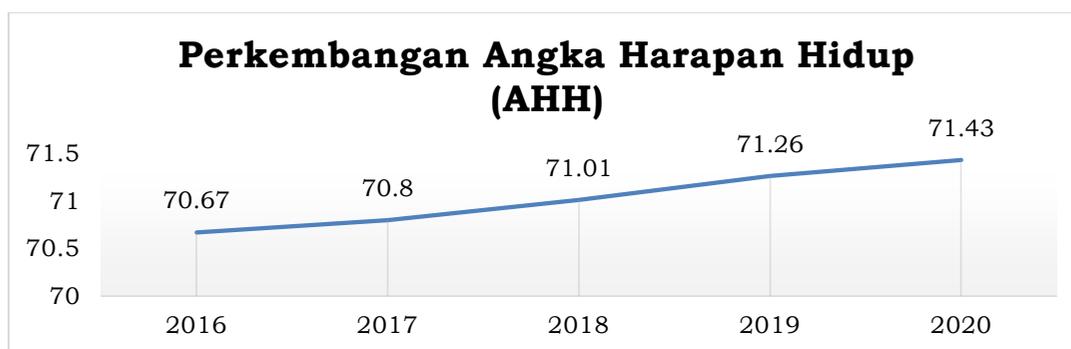
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----------|---|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kesehatan | | | | | | | |
| 1 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,67 | 70,8 | 71,01 | 71,26 | 71,43 |
| 2 | Jumlah kematian Bayi | Kasus | 219 | 109 | 158 | 129 | 111 |
| 3 | Jumlah kematian ibu | Kasus | 11 | 10 | 8 | 19 | 22 |
| 4 | Presentase balita gizi buruk | % | 0,85 | 0,80 | 0,87 | 1,20 | 1,52 |
| 5 | Persentase desa ODF | % | 3,30 | 4,6 | 9,45 | 19,51 | 21,34 |
| 6 | Persentase Fasilitas Kesehatan dasar sesuai standar | % | 2 | 16.36 | 42.11 | 64.71 | 60 |
| 7 | Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar | % | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 |
| 8 | Rasio pelayanan kesehatan dasar persatuan penduduk | Angka | 0.1129 | 0.1215 | 0.1362 | 0.1501 | 0.1359 |
| 9 | Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk | Angka | 0.0038 | 0.0040 | 0.0031 | 0.0043 | 0.00425 |

(Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten Tuban, 2021)

1. Angka Harapan Hidup (AHH)



Gambar 2.32 Perkembangan Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

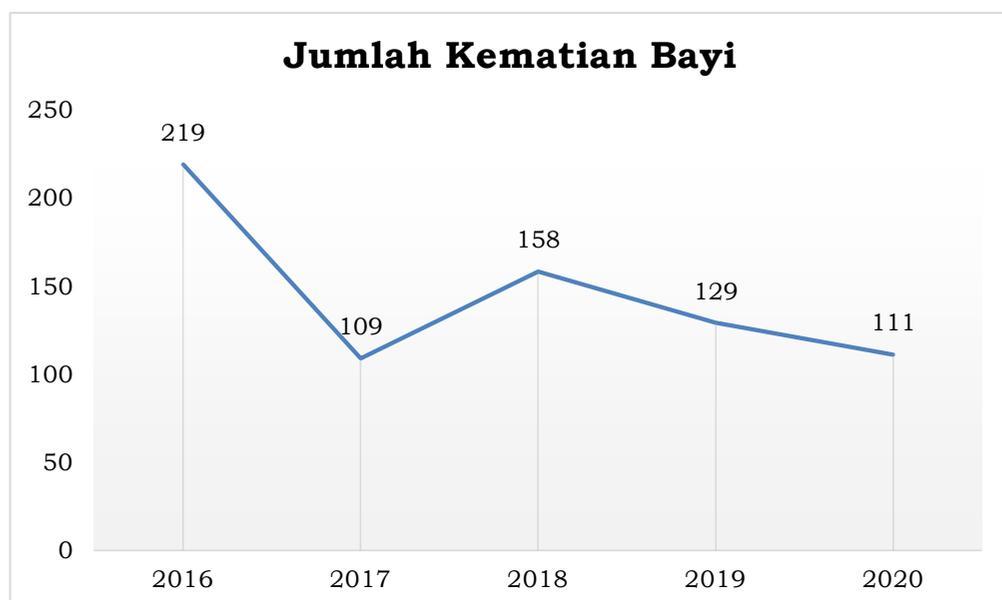
(Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten Tuban, 2021)

Angka harapan hidup kabupaten Tuban menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2016 angka harapan hidup di Kabupaten Tuban mencapai 70,67 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 angka harapan hidup di Kabupaten Tuban mencapai 70,8 dan pada 2018 angka harapan hidup di kabupaten tuban meningkat kembali menjadi 71,01. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 71,26 dan pada tahun 2020 menjadi 71,43. Kondisi ini memberikan gambaran

yang positif bahwasanya angka harapan hidup di kabupaten Tuban dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik meskipun tidak signifikan.

2. Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Tuban mengalami perkembangan dan trend yang fluktuatif setiap tahunnya. Diawali pada tahun 2016 jumlah kematian bayi di Kabupaten Tuban mencapai 219. Jumlah ini mengalami penurunan karena pada tahun 2017 hanya terjadi 109 kematian bayi di Kabupaten Tuban. Kemudian pada tahun 2018 jumlah kematian bayi mengalami peningkatan kembali menjadi 158 kasus. Dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan dengan besaran masing-masing capaian yaitu 129 kasus dan 111 kasus.



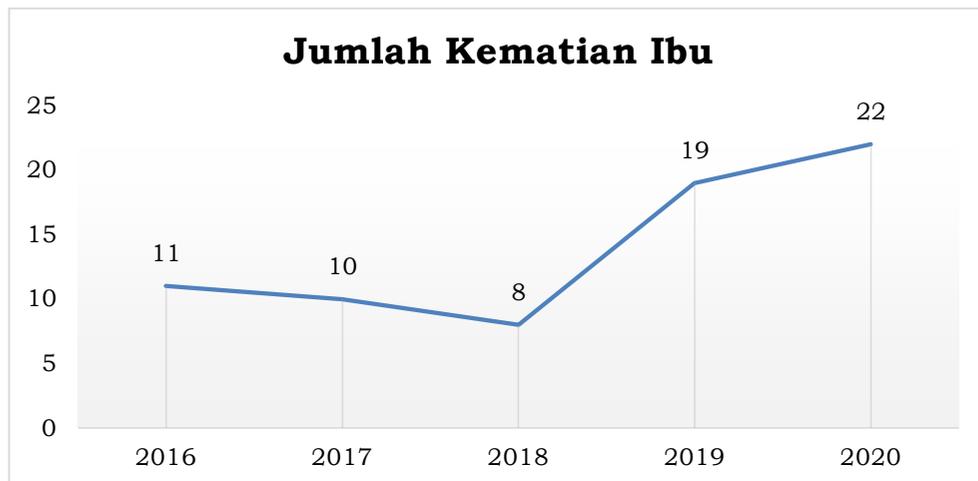
Gambar 2.33 Capaian Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

3. Jumlah kematian Ibu

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Tuban dengan urutan capaiannya yaitu 11 kasus, 10 kasus dan 8 kasus. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Tuban hingga mencapai 22 kasus di tahun 2020. Kenaikan Jumlah Kematian Ibu pada tahun 2019 disebabkan karena penyakit penyerta pada ibu hamil, diantaranya adalah pendaharaan,

eklamasi/pre eklamasi, jantung, kehamilan ekopik, dan infeksi. Sedangkan pada tahun 2020 kenaikan disebabkan karena pandemi Covid-19

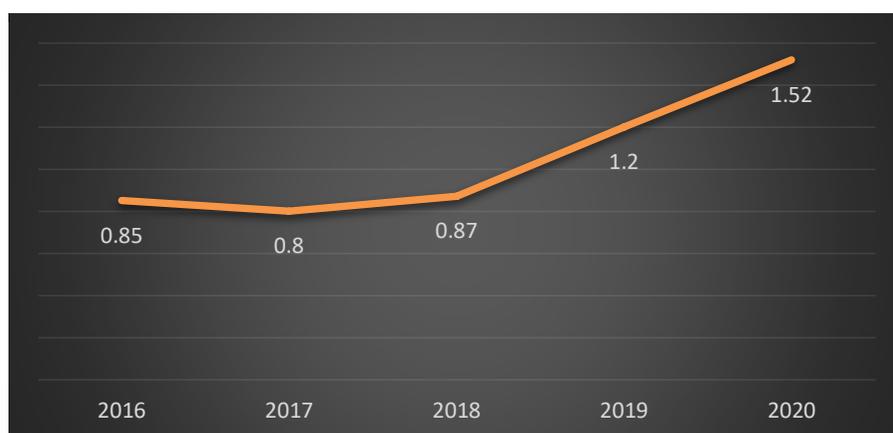


Gambar 2.34 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

4. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun cenderung meningkat, diawali pada tahun 2016 persentase balita gizi buruk menyentuh angka 0,85% kemudian pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,80%. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, presentase balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten tuban terus menerus mengalami peningkatan dengan besaran masing-masing menjadi 0,87%, 1,20% dan 1,52%.



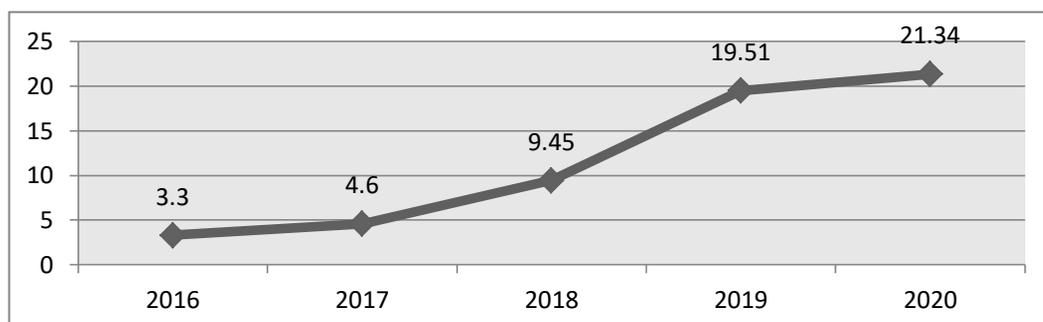
Gambar 2.35 Persentase Balita Gizi Buruk Di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

5. Persentase Desa Open Defecation Free (ODF)

Open Defecation Free (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja

yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Presentase desa ODF di Kabupaten Tuban dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan besaran masing-masing sebesar 3,3%, 4,6%, 9,45%, 19,51% dan 21,34%.

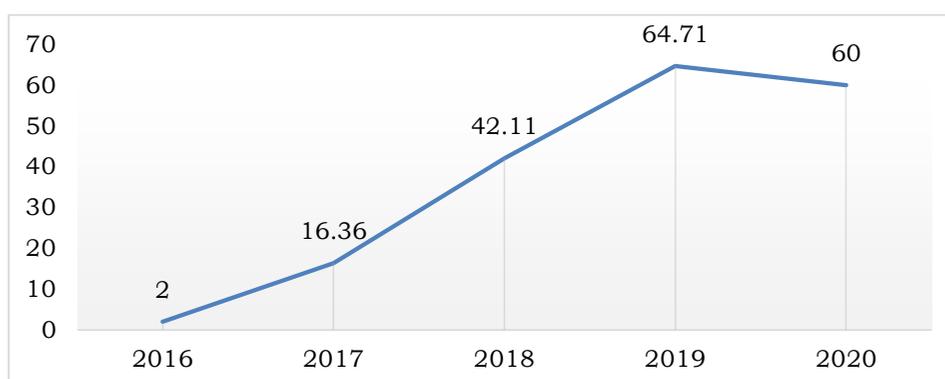


Gambar 2.36 Persentase Desa ODF Di Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

6. Persentase Fasilitas Kesehatan dasar sesuai standar

Persentase fasilitas kesehatan dasar sesuai standar di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun mengalami kondisi perkembangan yang cukup fluktuatif, diawali pada tahun 2016 presentase fasilitas kesehatan dasar sesuai standar capaiannya 2% kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dengan besaran masing-masing capaiannya yaitu 16.36%, 42,11%, 64.71%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 60%.



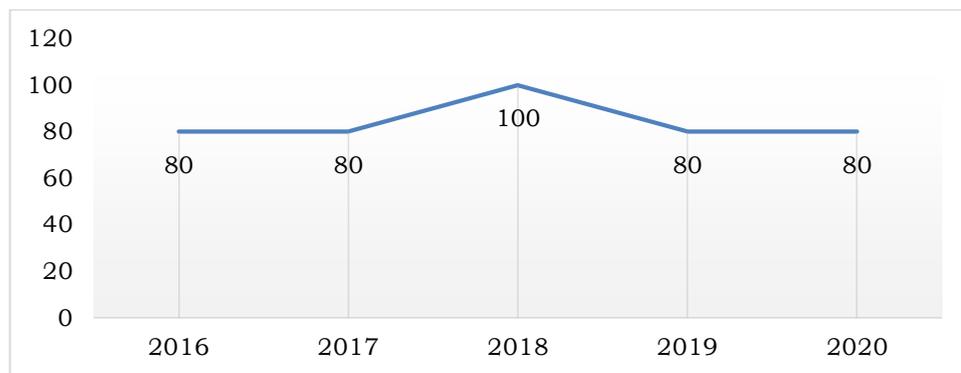
Gambar 2.37 Persentase Fasilitas Dasar Sesuai Standar di Kabupaten Tuban 2016 - 2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

7. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar

Persentase fasilitas kesehatan Rujukan sesuai standar di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun mengalami kondisi

perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2016 dan tahun 2017 presentase fasilitas kesehatan rujukan sesuai standar capaiannya sama yaitu 80% kemudian pada tahun 2018 persentase fasilitas kesehatan rujukan sesuai standar di Kabupaten tuban mengalami peningkatan menjadi 100%. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan dengan besaran sama yaitu 80%.

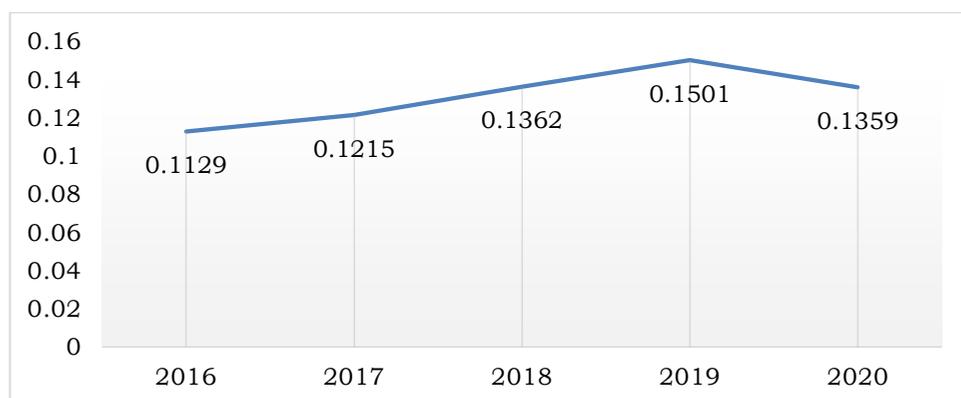


Gambar 2.38 Persentase Fasilitas Rujukan Sesuai Standar di Kabupaten Tuban 2016 - 2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

8. Rasio Pelayanan Kesehatan Dasar Persatuan Penduduk

Persentase Rasio pelayanan kesehatan dasar persatuan penduduk di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, rasio pelayanan kesehatan dasar persatuan penduduk mengalami peningkatan terus menerus dengan besaran masing-masing menjadi 0.1129%, 0.1215%, 0.1362%, dan 0.1501%. Pada tahun 2020 rasio pelayanan kesehatan dasar persatuan penduduk mengalami penurunan menjadi 0.1359%.



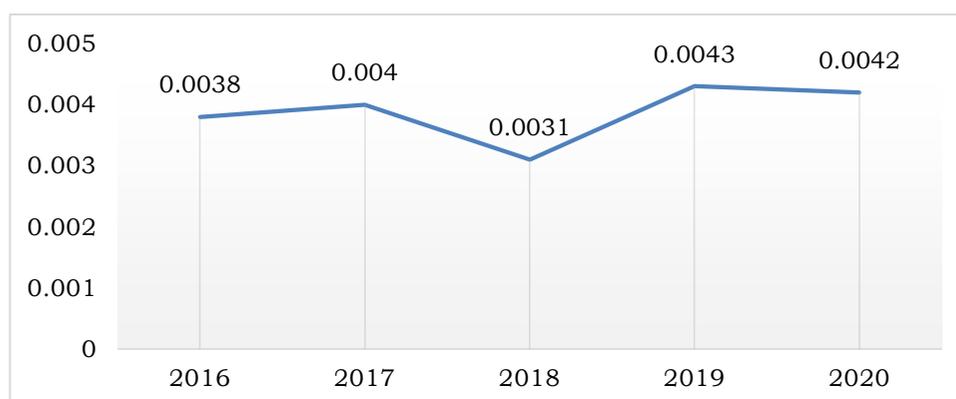
Gambar 2.39 Rasio Pelayanan Kesehatan Dasar Persatuan Penduduk di Kabupaten Tuban 2016 - 2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

9. Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk

Persentase Rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun mengalami kondisi perkembangan yang

fluktuatif, pada tahun 2016 Rasio rumah sakit terhadap penduduk capaiannya 0.0038% kemudian pada tahun 2017 capaiannya 0.004%. Pada tahun 2018 turun menjadi 0.0031% dan pada tahun 2019 menjadi 0.0043%. Dan pada tahun 2020 yaitu mencapai 0.0042%.



Gambar 2.40 Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk di Kabupaten Tuban 2016 - 2020

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2021)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|-----|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana | % | n/a | 15 | 30 | 40 | 60 |
| 2. | Persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) | % | n/a | 66,2 | 69,02 | 72 | 75 |
| 3. | Cakupan Ketersediaan Air Baku/ Irigasi | % | n/a | 75,1 | 80,2 | 83 | 85,2 |
| 4. | Cakupan Konektivitas Wilayah | % | n/a | 92,3 | 93,3 | 93,8 | 88,88 |
| 5. | Cakupan akses air bersih yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi dan non terlindungi | % | 27,49 | 29,5 | 29,54 | 79,56 | 82,72 |
| 6. | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik) | % | 70 | 72,17 | 73,45 | 74,37 | 75,32 |
| 7. | Cakupan layanan persampahan | % | 8.1 | 9,67 | 10,97 | 12 | 11,75 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|-----|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8. | Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas kawasan perkotaan | % | 4,78 | 4,85 | 4,86 | 4,86 | 4,89 |
| 9. | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 70 | 72,17 | 73,45 | 74,36 | 75,32 |
| 10 | Persentase penduduk berakses air minum (Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari) | % | 73,30 | 76,59 | 78,83 | 81,91 | 82,74 |
| 11 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan | % | 73,30 | 76,59 | 78,83 | 81,91 | 82,74 |
| 12 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | m2 | 74.705 | 74.705 | 74.705 | 74.705 | 74.705 |
| 13 | Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | m2 | 105.713,33 | 105.713,33 | 105.713,33 | 105.713,33 | 138.393,99 |
| 14 | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | m2 | 105.713,33 | 105.713,33 | 105.713,33 | 105.713,33 | 138.393,99 |
| 15 | Ketaatan terhadap RTRW | - | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 |
| 16 | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | - | 66 | 66,2 | 69,02 | 72 | 75 |
| 17 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | - | 69 | 75,1 | 80,2 | 83 | 85,2 |

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, 2020)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa data persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana pada tahun 2017 capaiannya sebesar 15%, tahun 2018 capaiannya meningkat menjadi 30% sedangkan pada tahun 2019 capaiannya kembali meningkat menjadi 40%, dan tahun 2020 capaiannya juga mengalami peningkatan menjadi 60%. Data persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) setiap tahun terus mengalami peningkatan. Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2jam) pada tahun 2017 capaiannya sebesar 66,2%, tahun 2018 capaiannya meningkat menjadi 69,02%, sedangkan pada tahun 2019 capaiannya kembali meningkat menjadi sebesar 72%, dan tahun 2020 capaiannya juga mengalami peningkatan menjadi 75%. Data cakupan ketersediaan air baku/ irigasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Cakupan ketersediaan air baku/irigasi pada tahun 2017 dengan capaian 75,1%, tahun 2018

mengalami peningkatan dengan capaian 80,2% sedangkan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 83%, dan tahun 2020 juga mengalami peningkatan dengan capaian 85,2%. Cakupan Konektivitas Wilayah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan besaran masing-masing sebesar 93,3% dan 93,80% dari tahun 2017 dengan capaian 92,3%, namun pada tahun 2020 angka ini mengalami penurunan menjadi 88,88% hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing anggaran infrastruktur ke pada upaya untuk penanganan pandemi covid-19. Data cakupan akses air bersih yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi dan non terlindungi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan capaian 82,72% pada tahun 2020 dari tahun 2016 sebesar 27,49%. Data Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 juga terus mengalami peningkatan dengan capaian 75,32% pada tahun 2020 dari tahun 2016 sebesar 70%. Data Cakupan layanan persampahan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 12% pada tahun 2019 dari tahun 2016 sebesar 8,1%. Sedangkan pada tahun 2020, cakupan layanan persampahan mengalami penurunan dengan capaian sebesar 11,75%. Data persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan capaian 4,86% pada tahun 2018 dari tahun 2016 sebesar 4,78%. Pada tahun 2019, angka ini mengalami kondisi stagnan/sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 4,86%. Sedangkan pada tahun 2020, angka ini mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 4,89%.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13 Hasil Kinerja Peyelenggaraan Jalan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| No | KONDISI JALAN | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----------------|------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | | Km | Bobot |
| JALAN KABUPATEN | | | | | | | | | | | |
| 1 | BAIK | 667,96 | 89,04 % | 710,48 | 94,70 % | 711,96 | 94,90 % | 715,58 | 95,38 % | 689,43 | 91,90 % |
| 2 | SEDANG | 42,21 | 5,63% | 21,74 | 2,90% | 19,01 | 2,53% | 16,94 | 2,26% | 37,39 | 4,98% |
| 3 | RUSAK | 25,70 | 3,43% | 9,90 | 1,32% | 11,25 | 1,50% | 9,55 | 1,27% | 16,55 | 2,21% |
| 4 | RUSAK BERAT | 14,35 | 1,91% | 8,10 | 1,08% | 8,00 | 1,07% | 8,15 | 1,09% | 6,85 | 0,91% |

| No | KONDISI JALAN | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | Km | Bobot |
| JUMLAH | | 750,22 | | 750,22 | | 750,22 | | 750,22 | | 750,22 | |
| JALAN POROS DESA | | | | | | | | | | | |
| 1 | BAIK | 856,08 | 80,65% | 961,59 | 90,59% | 978,35 | 92,17% | 983,77 | 92,68% | 920,78 | 86,75% |
| 2 | SEDANG | 92,38 | 8,70% | 27,65 | 2,61% | 23,80 | 2,24% | 24,49 | 2,31% | 89,48 | 8,43% |
| 3 | RUSAK | 59,53 | 5,61% | 25,79 | 2,43% | 18,74 | 1,77% | 15,89 | 1,50% | 31,99 | 3,01% |
| 4 | RUSAK BERAT | 53,44 | 5,03% | 46,38 | 4,37% | 40,52 | 3,82% | 37,27 | 3,51% | 19,27 | 1,82% |
| JUMLAH | | 1.061,42 | 1,00 | 1.061,42 | 1,00 | 1.061,42 | 1,00 | 1.061,42 | 1,00 | 1.061,51 | 1,00 |
| JALAN KABUPATEN DAN POROS DESA | | | | | | | | | | | |
| 1 | BAIK | 1.524,04 | 84,12 % | 1.672,07 | 92,30 % | 1.690,31 | 93,30 % | 1.699,35 | 93,80 % | 1.610,21 | 88,88 % |
| 2 | SEDANG | 134,59 | 7,43% | 49,39 | 2,73% | 42,81 | 2,36% | 41,43 | 2,29% | 126,87 | 7,00% |
| 3 | RUSAK | 85,23 | 4,70% | 35,69 | 1,97% | 29,99 | 1,66% | 25,44 | 1,40% | 48,54 | 2,68% |
| 4 | RUSAK BERAT | 67,79 | 3,74% | 54,48 | 3,01% | 48,52 | 2,68% | 45,42 | 2,51% | 26,12 | 1,44% |
| JUMLAH | | 1.811,6 4 | 1,00 | 1.811,6 4 | 1,00 | 1.811,6 4 | 1,00 | 1.811,6 4 | 1,00 | 1.811,7 3 | 1,00 |

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, 2020)

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.14 Hasil Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|---|--------|---------|-------|-------|-------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase layanan standart pelayanan minimum (SPM) PSU dengan pencapaian diatas 70 % | % | N/A | N/A | 55.56 | 66.67 | 77,78 |
| Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani pada kawasan permukiman | % | 46.05 | 52.63 | 70.25 | 70.25 | 71,58 |
| Cakupan pelayanan drainase | % | 66.14 | 72.64 | 74.48 | 74.48 | 78,37 |
| Cakupan layanan LPJU | % | 32.21 | 38.07 | 40.99 | 87.94 | 90,22 |
| Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan | % | N/A | 11.52 | 84.48 | 88.21 | 90,66 |
| Rasio panjang jalan lingkungan terhadap luas kawasan permukiman | Rasio | 50 | 68 | 68 | 77.78 | 87,17 |
| Kondisi Jalan Desa (Termasuk Jalan Lingkungan) | | | | | | |
| Baik | km | N/A | N/A | N/A | N/A | 275,39 |
| Sedang | | N/A | N/A | N/A | N/A | 600,03 |
| Rusak | | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.680,60 |
| Persentase Cakupan rumah layak huni | % | 83 | 84.29 | 85.1 | 85.26 | 85,31 |
| Persentase areal kawasan kumuh | % | 100 | 74.46 | 19.87 | 1.11 | 0.55 |
| Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 96.92 |

| Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | CAPAIAN | | | | |
|--|--------|---------|-------|-------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase lingkungan permukiman kumuh | % | 100 | 74.46 | 19.87 | 1.11 | 0.55 |
| Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | % | 100 | 74.46 | 19.87 | 1.11 | 0.55 |

(Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, 2020)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa data persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani pada kawasan permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan capaian 71,58% di tahun 2020 dari capaian tahun 2016 sebesar 46,05%. Data cakupan pelayanan drainase dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan capaian 78,37% pada tahun 2020 dari capaian tahun 2016 sebesar 66,14%. Data cakupan layanan LPJU dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan capaian 90,22% di tahun 2020 dari capaian tahun 2016 sebesar 32,21%. Data Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan capaian 90,66% di tahun 2020 dari capaian tahun 2017 sebesar 11,52%. Data rasio panjang jalan lingkungan terhadap luas kawasan permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat dengan capaian 87,17% di tahun 2020 dari capaian 2016 sebesar 50. Data persentase cakupan rumah layak huni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan capaian 85,31% di tahun 2020 dari capaian tahun 2016 sebesar 83%. Data persentase Layanan Standart Pelayanan Minimum (SPM) PSU dengan pencapaian di atas 70% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan dengan besaran capaian 77,78% pada tahun 2020 dari tahun 2018 dengan besaran capaian 55,56%.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

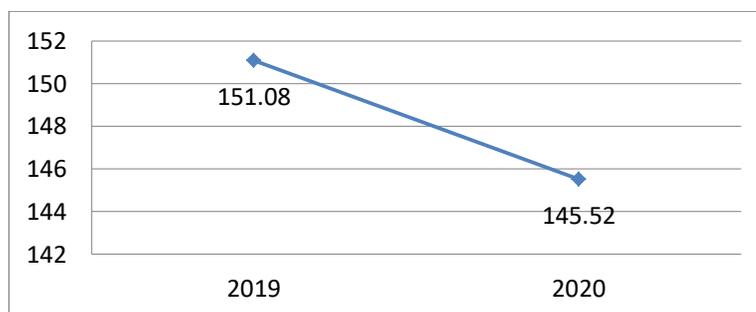
Tabel 2.15 Hasil Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|----------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 1. | Indeks Toleransi | | N/A | 81,40 | 81,40 | 84,20 | 88,00 |
| 2. | IRB | | N/A | N/A | N/A | 151,08 | 145,52 |
| 3. | Persentase desa rawan bencana | | N/A | 63,72 | 61,89 | N/A | N/A |
| 4. | Jumlah pelanggaran/gangguan keamanan dan ketertiban umum | Kasus | 116 | 330 | 241 | 250 | 86 |
| 5. | Angka kasus pelanggaran perundang-undangan yang terselesaikan | Kasus | 360 | 116 | 180 | 120 | 147 |
| 6. | Presentase penyelesaian konflik sosial/bencana oleh masyarakat | % | 100 | 63 | 86 | 75 | N/A |
| 7. | Angka konflik sosial / Persentase konflik sosial dan politik yang terselesaikan | kasus | 3 | 2 | 2 | 2 | 70% |
| 8. | Pelayanan informasi rawan bencana | Orang | 150 | 1.100 | 1.000 | 500 | 2.900 |
| 9 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Desa | 3 | 22 | 20 | 10 | 58 |
| 10 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Kejadian | 98 | 53 | 63 | 92 | 295 |
| 11 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Kejadian | 26 | 55 | 56 | 35 | 61 |

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten tuban, 2021)

1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Tuban mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Capain pada tahun 2019 adalah 151.08, sedangkan pada tahun 2020 adalah 145.52

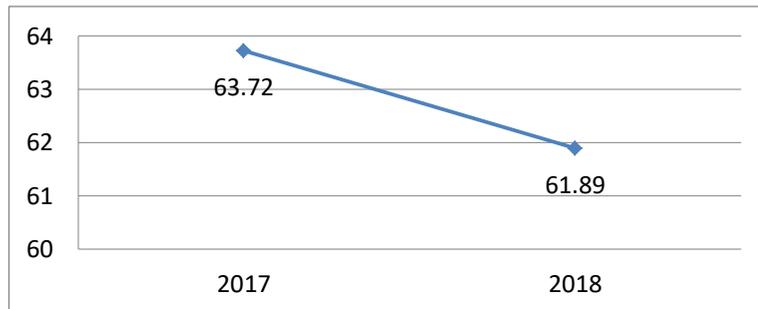


Gambar 2.41 Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, 2021)

2. Persentase Desa Rawan Bencana

Persentase Desa Rawan Bencana di Kabupaten Tuban mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Capaian pada tahun 2017 adalah 63,72, sedangkan pada tahun 2018 adalah 61,89.

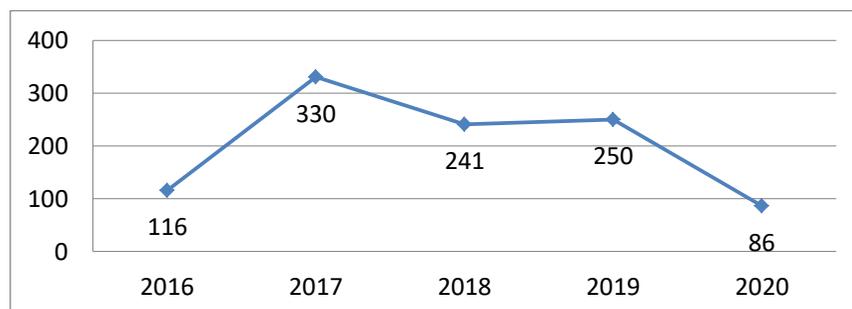


Gambar 2.42 Persentase Desa Rawan Bencana di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, 2021)

3. Jumlah pelanggaran/gangguan ketertiban umum

Jumlah pelanggaran dan gangguan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Tuban mengalami kondisi yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah pelanggaran mencapai 360 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 116 kasus. Pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 330 kasus dan pada tahun 2018 menurun kembali menjadi 241 kasus, kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 250 kasus pelanggaran, dan 2020 menurun kembali menjadi 86 kasus.



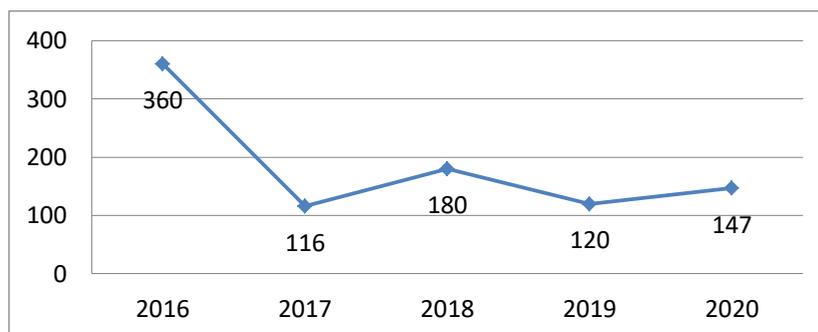
Gambar 2.43 Jumlah Pelanggaran/Gangguan Ketertiban Umum di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, 2021)

4. Angka kasus pelanggaran perundang-undangan

Angka kasus pelanggaran perundang-undangan yang terjadi di Kabupaten Tuban memiliki perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 pelanggaran yang terjadi sebanyak 365 kasus, kemudian pada tahun 2016 berkurang menjadi 360 kasus. Pada tahun 2017 mengalami

penurunan yang cukup signifikan menjadi 116 kasus. Kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 180 kasus, dan berdasarkan angka proyeksi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 120 kasus dan di tahun 2020 angka kasus pelanggaran perundang-undangan yang terselesaikan meningkat sebanyak 147 kasus.

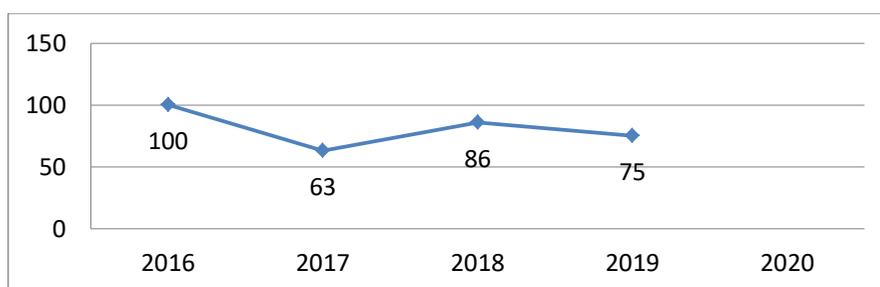


Gambar 2.44 Angka Kasus Pelanggaran Perundang-undangan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, 2021)

5. Presentase penyelesaian konflik sosial/bencana oleh masyarakat

Persentase Penyelesaian konflik sosial di kabupaten Tuban mengalami kondisi yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai 100%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 63% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 86% dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 75%.

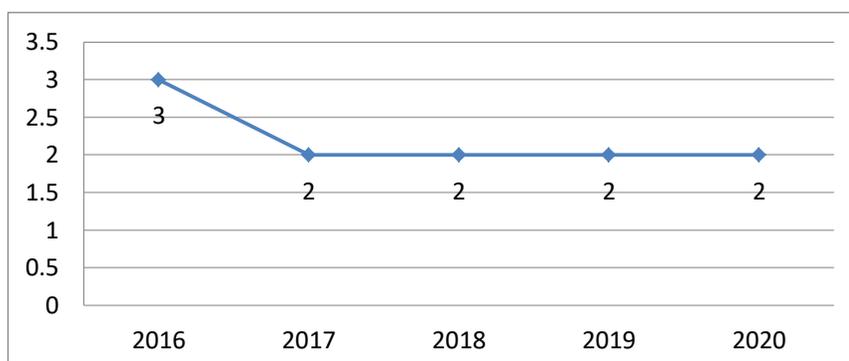


Gambar 2.45 Presentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, 2021)

6. Angka konflik sosial dan politik yang terselesaikan

Angka konflik sosial dan politik yang terselesaikan di Kabupaten Tuban memiliki perkembangan yang stagnan. Pada tahun 2016 angka konflik sosial dan politik yang terselesaikan sebanyak 3 kasus, kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 angka konflik sosial dan politik turun menjadi 2 kasus.



Gambar 2.46 Angka konflik sosial / Persentase konflik sosial dan politik yang terselesaikan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban, 2020)

F. Sosial

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16 Hasil Kinerja Bidang Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2017-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|---------------|--|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sosial | | | | | | | |
| 1 | Persentase rekomendasi penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel pada pelayanan publik yang ditindak lanjuti | % | 2 | 5 | 11 | 17,6 | n/a |
| 2 | Persentase PMKS yang sudah mandiri. | % | 0,008 | 0,091 | 0,11 | 0,2 | n/a |
| 3 | PMKS yang mendapat bantuan dan yg ditangani | Orang | 3.600 | 4.300 | 5.300 | 7.253 | 8.784 |
| 4 | PMKS yang diberdayakan | Orang | 485 | 550 | 269 | 310 | 230 |
| 5 | Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. | % | 87 | 88,15 | 89,05 | 90,5 | 90,5 |

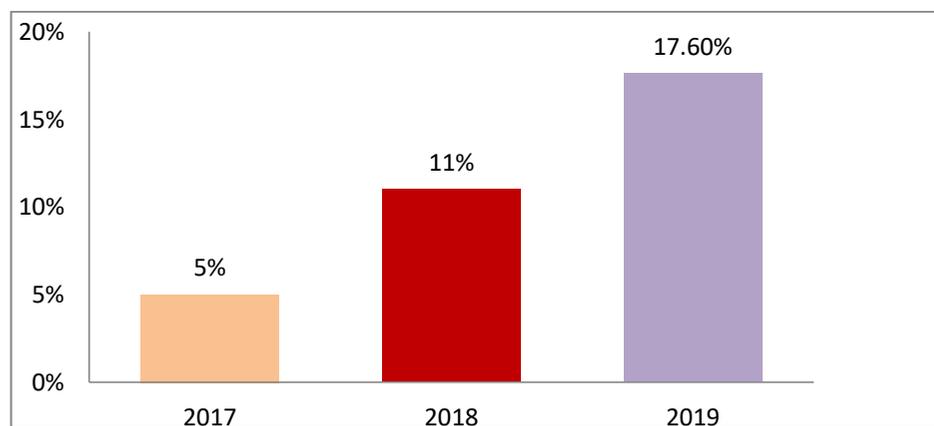
(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tuban khususnya yang berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terbagi dalam kategori permasalahan individu, keluarga dan masyarakat yang kurang beruntung masih membutuhkan uluran tangan penanganan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga nantinya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat hidup secara layak. Perlu kita pahami dan sadari bersama bahwa kemampuan Pemerintah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan PMKS masih jauh dari yang mereka harapkan dan butuhkan. Untuk itu perlu peran serta masyarakat melalui pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada

dalam masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat merupakan mitra kerja pemerintah dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS.

1. Persentase Rekomendasi Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Kaum Difabel Pada Pelayanan Publik Yang Ditindak Lanjuti Kabupaten Tuban

Dari data tabel kinerja bidang sosial, terlihat bahwa capaian persentase rekomendasi penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel pada pelayanan publik yang ditindak lanjuti di Kabupaten Tuban tahun 2017 sejumlah 5 %. Pada Tahun 2018 persentase rekomendasi penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel pada pelayanan publik yang ditindak lanjuti sebesar 11 % dan Pada tahun 2019 persentase rekomendasi penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel pada pelayanan publik yang ditindak lanjuti sejumlah 17,6%.

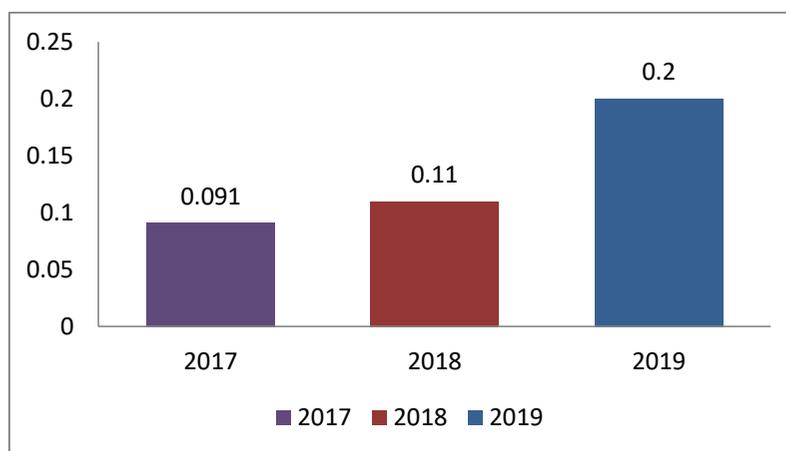


Gambar 2.47 Persentase rekomendasi penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel pada pelayanan publik yang ditindak lanjuti di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2019

(Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2019)

2. Persentase PMKS Yang Sudah mandiri

Capaian Persentase PMKS yang sudah mandiri di Kabupaten Tuban pada Tahun 2017 sebesar 0,091%. Pada Tahun 2018 Persentase PMKS yang sudah mandiri di Kabupaten Tuban Sebesar 0,11%. Dan pada Tahun 2019, Persentase PMKS yang sudah mandiri di Kabupaten Tuban sebesar 0,2%.

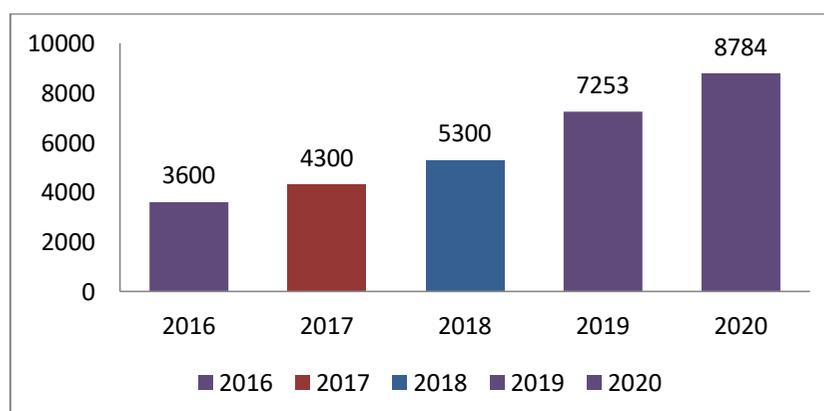


Gambar 2.48 Persentase PMKS yang sudah mandiri di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2019

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2019)

3. PMKS Yang Mendapat Bantuan dan ditangani

Dari data tabel kinerja bidang sosial, terlihat bahwa PMKS yang mendapatkan bantuan dan ditangani di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan tiap tahun nya. Capaian pada tahun 2016 PMKS yang mendapat bantuan dan ditangani sebanyak 3.600, pada tahun 2017 naik menjadi 4.300. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan juga menjadi 5.300. Untuk tahun 2019 dan 2020 juga mengalami kenaikan yaitu 7.253 dan 8.784



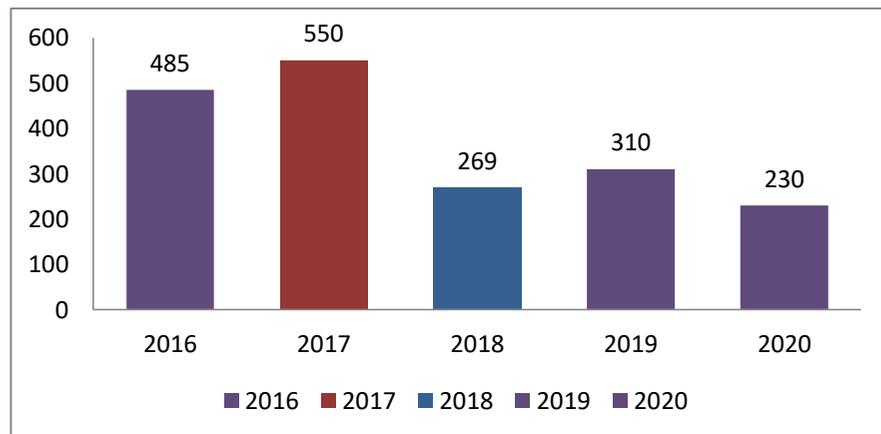
Gambar 2.49 PMKS Yang Mendapat Bantuan dan Yang ditangani di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

4. PMKS Yang Diberdayakan

Dari data tabel kinerja bidang sosial, terlihat bahwa PMKS yang yang diberdayakan di Kabupaten Tuban mengalami fluktuatif pada tiap tahun nya. Capaian pada tahun 2016 PMKS yang mendapat bantuan dan ditangani sebanyak 485, pada tahun 2017 naik menjadi 550.

Sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 269. Untuk tahun 2019 naik menjadi 310. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 230.

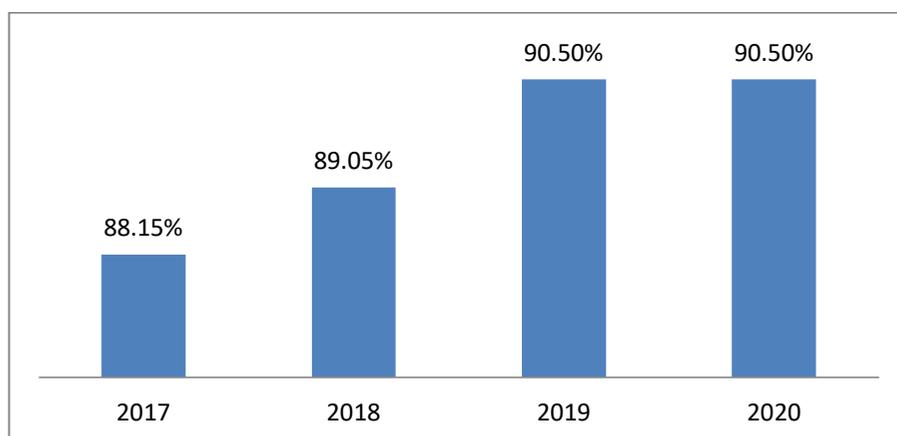


Gambar 2.50 PMKS Yang Diberdayakan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

5. Persentase Partisipasi PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Capaian persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencapai 88,15% Pada Tahun 2017. Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melebihi target yang ditetapkan yaitu 89% telah tercapai 89,05 % di tahun 2018. Dan presentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten Tuban pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 90,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi berkembang positif.



Gambar 2.51 Presentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17 Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tuban Tahun 2020

| No | JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) | JUMLAH | SATUAN |
|----|--|---------|--------|
| 1 | Anak Terlantar | 343 | Jiwa |
| 2 | Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 38 | Jiwa |
| 3 | Anak Jalanan | 42 | Jiwa |
| 4 | Anak Dengan Kedisabilitas | 733 | Jiwa |
| 5 | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan | 38 | Jiwa |
| 6 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 33 | Jiwa |
| 7 | Lanjut Usia Terlantar | 6.720 | Jiwa |
| 8 | Penyandang disabilitas | 4.068 | Jiwa |
| 9 | Tuna Susila | 58 | Jiwa |
| 10 | Tuna Sosial | 42 | Jiwa |
| 11 | Kelompok Minoritas | 11 | Jiwa |
| 12 | Bekas Warga Binaan Lembaga pemasyarakatan | 327 | Jiwa |
| 13 | Orang dengan HIV/AIDS | 20 | Jiwa |
| 14 | Korban Penyalahgunaan Napza | 93 | Jiwa |
| 15 | Korban Traficking | 0 | Jiwa |
| 16 | Perempuan Korban Tindak Kekerasan | 44 | Jiwa |
| 17 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 26 | Jiwa |
| 18 | Korban Bencana Alam dan Musibah Lainnya | 190 | Jiwa |
| 19 | Korban Bencana Sosial | 1 | Jiwa |
| 20 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 4.857 | Jiwa |
| 21 | Fakir Miskin (DTKS) | 142.774 | KK |
| 22 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 84 | KK |

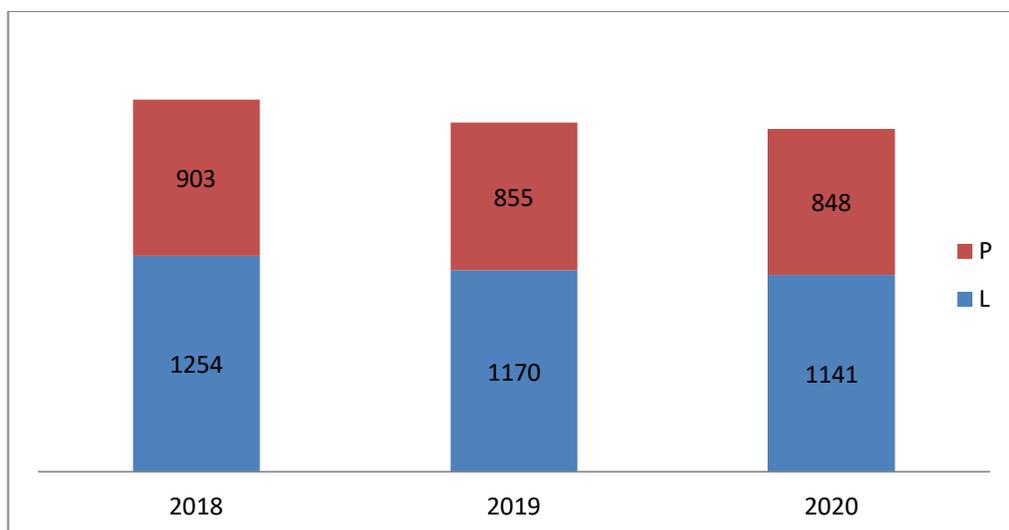
(Sumber : Dinas Sosial, P3A Kabupaten Tuban, 2021)

Tabel 2.18 Rekapitulasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Tuban Tahun 2020

| NO | POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) | JUMLAH | SATUAN |
|----|---|--------|---------|
| 1. | Pekerja Sosial Profesional | 1 | Orang |
| 2. | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 20 | Orang |
| 3. | Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | 68 | Orang |
| 4. | Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) | 22 | Lembaga |
| 5. | Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKS-LU) | 3 | Lembaga |
| 6. | Karang Taruna | 40 | Kartar |
| 7. | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 1 | Lembaga |

| NO | POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) | JUMLAH | SATUAN |
|-----|--|--------|------------|
| 8. | Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) | 20 | Lembaga |
| 9. | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial | 95 | Orang |
| 10. | Penyuluh Sosial | 30 | Orang |
| 11. | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 20 | Orang |
| 12. | Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial | 83 | Perusahaan |

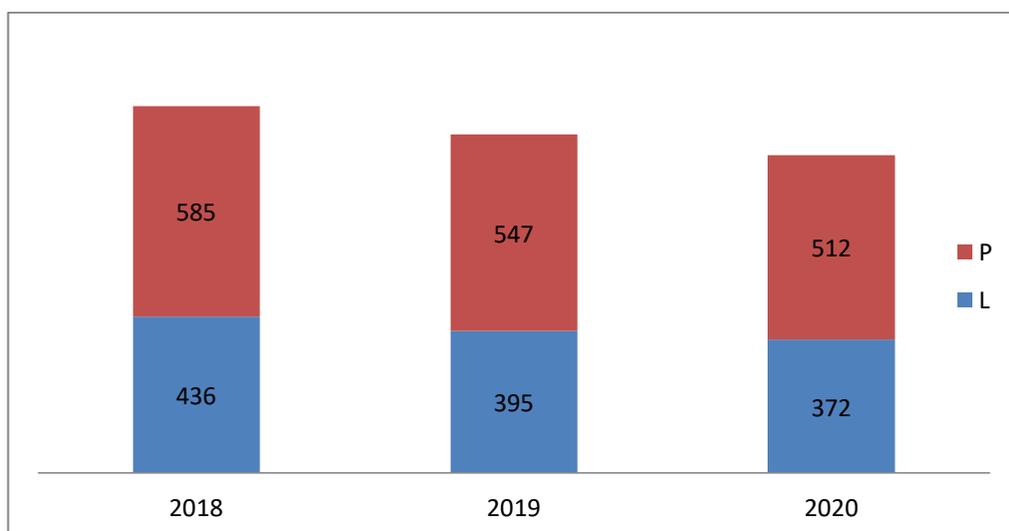
(Sumber : Dinas Sosial, P3A Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 2.52 Jumlah Tuna Daksa di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

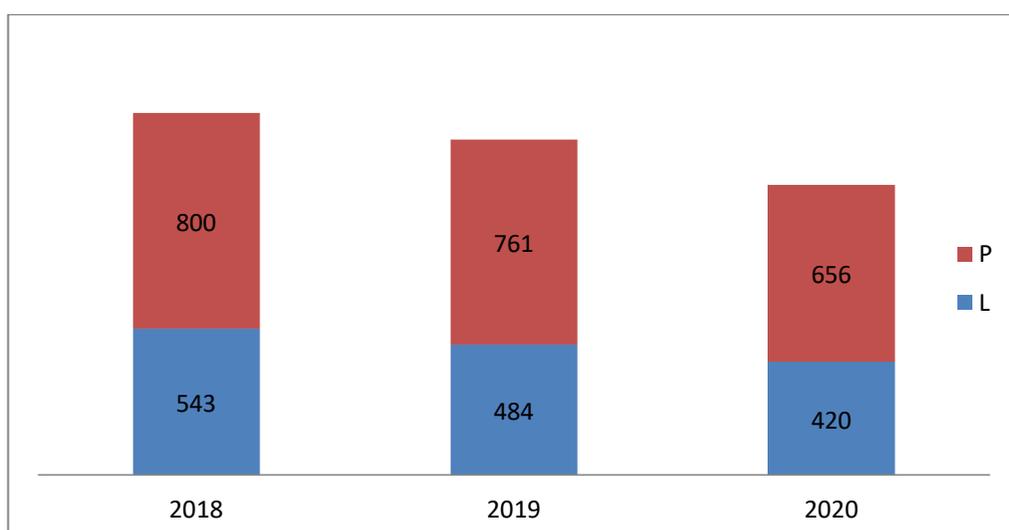
Tuna daksa merupakan istilah umum yang merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau kelainan dalam alat gerak (tulang, sendi, otot). Jumlah penyandang tuna daksa di Kabupaten Tuban dengan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2018 berjumlah 1254 jiwa dan menurun sampai dengan tahun 2020 sebanyak 113 jiwa sehingga pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitasnya jenis kelamin laki-laki sebesar 1141 jiwa. Untuk penyandang tuna daksa berjenis kelamin perempuan, jumlahnya tidak sebanyak yang berjenis kelamin laki-laki, dimana pada tahun 2018 jumlah penyandang tuna daksa berjenis kelamin perempuan sebesar 903 jiwa kemudian turun menjadi 855 jiwa pada tahun 2019 dan kembali turun di tahun 2020 menjadi 848 jiwa.



Gambar 2.53 Jumlah Tuna Netra di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

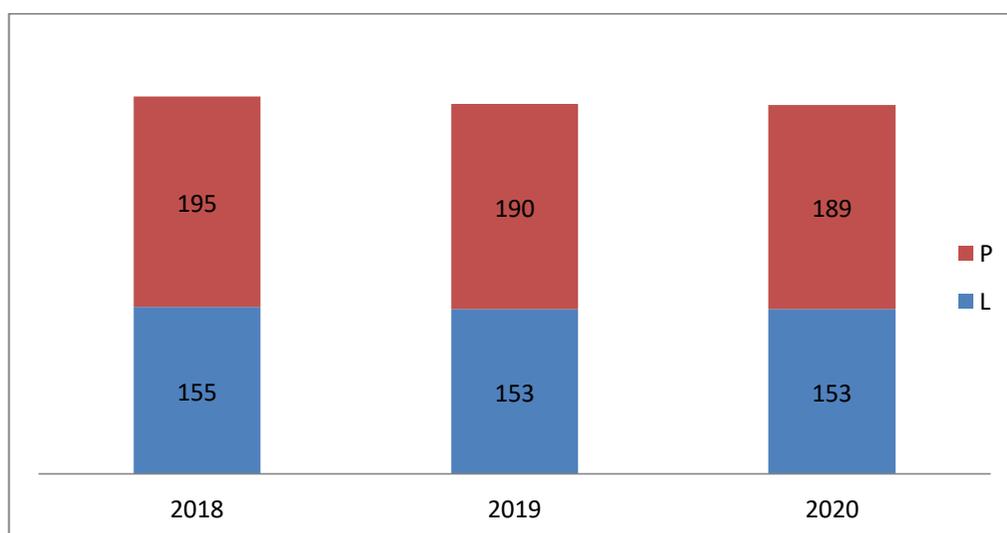
Tuna netra merupakan istilah umum yang merujuk pada kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam penglihatan. Pada data yang dihimpun, jumlah penyandang tuna netra yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan jika dilihat berdasarkan grafik jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dimana pada tahun 2018 jumlah tuna netra berjenis kelamin laki-laki berjumlah 436 jiwa kemudian mengalami penurunan menjadi 395 jiwa pada tahun 2019 dan di tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 372 jiwa. Sedangkan penyandang tuna netra berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 berjumlah 585 jiwa, mengalami penurunan menjadi 547 jiwa pada tahun 2019 dan di tahun 2020 kembali turun menjadi 512 jiwa.



Gambar 2.54 Jumlah Tuna Rungu di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

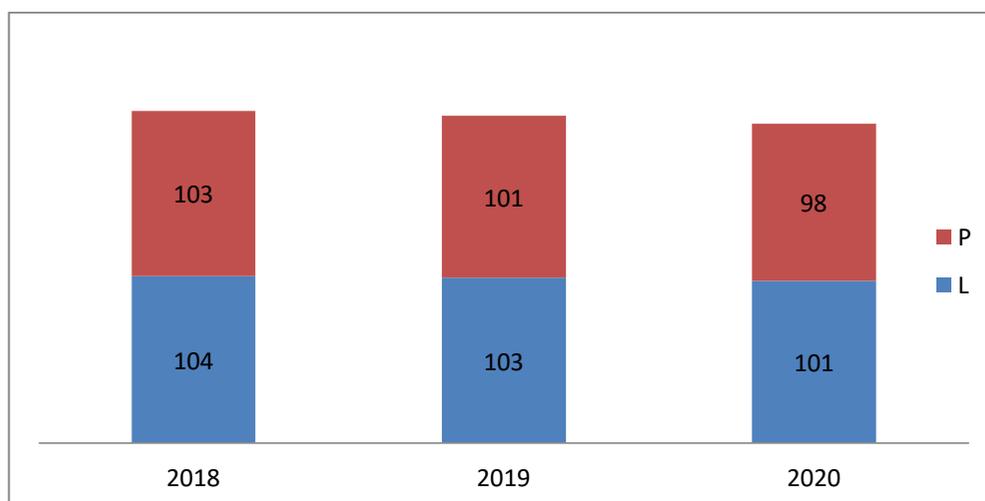
Tuna rungu adalah sebutan yang halus untuk mereka yang mengalami masalah karena rusak pada pendengarannya dibandingkan sebutan Tuli. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik penderita tuna rungu berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2018 penyandang tuna rungu berjenis kelamin laki-laki sebanyak 543 jiwa menurun menjadi 484 jiwa di tahun 2019 dan turun kembali menjadi 420 jiwa di tahun 2020. Data penyandang tuna rungu berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 sebanyak 800 jiwa kemudian turun menjadi 761 jiwa pada tahun 2019 dan menurun kembali menjadi 656 jiwa pada tahun 2020.



Gambar 2.55 Jumlah Tuna Wicara di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

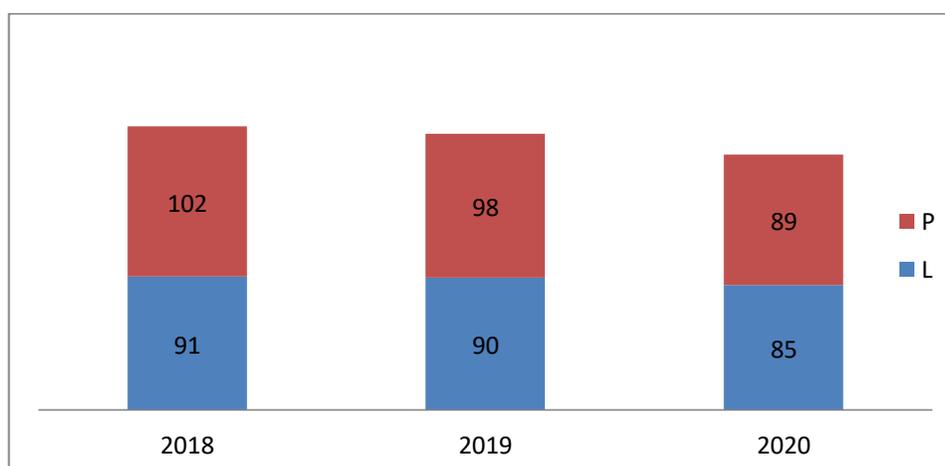
Tuna Wicara merupakan kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan baik dalam pengucapan bahasa, berbicara maupun suara, sehingga menimbulkan penderita mengalami kesulitan dalam berkomunikasi di kesehariannya. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik penderita tuna wicara berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah penyandang tuna wicara berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2018 berjumlah 155 jiwa dan mengalami penurunan menjadi 153 jiwa pada tahun 2019 dan tetap diangka yang sama yaitu 153 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan di tahun 2018 untuk penyandang berjenis kelamin perempuan berjumlah 195 jiwa kemudian turun menjadi 190 jiwa pada tahun 2019 dan turun kembali menjadi 189 jiwa pada tahun 2020.



Gambar 2.56 Jumlah Tuna Rungu dan Tuna Wicara di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

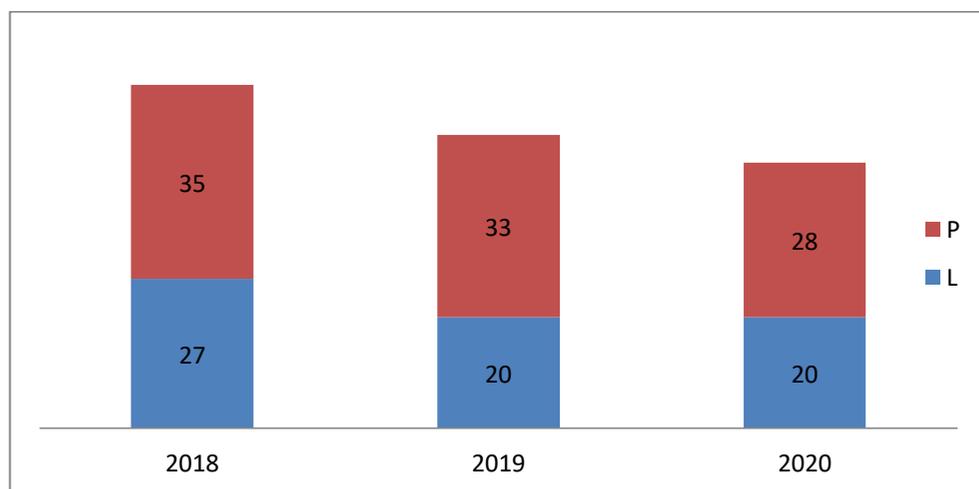
Tuna Rungu dan Tuna Wicara merupakan kondisi dimana individu mengalami hambatan pendengaran baik itu permanen ataupun tidak permanen. Disamping itu individu tersebut mengalami gangguan berkomunikasi. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik penderita tuna rungu dan tuna wicara berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2018 dengan jumlah penyandang tuna rungu dan tuna wicara berjenis kelamin laki-laki sebesar 104 jiwa, jumlah tersebut turun pada tahun 2019 menjadi 103 jiwa dan kembali turun menjadi 101 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2018 penyandang tuna rungu dan tuna wicara berjenis kelamin perempuan sebanyak 103 jiwa dan turun menjadi 101 jiwa pada tahun 2019 kemudian di tahun 2020 turun kembali menjadi 98 jiwa.



Gambar 2.57 Jumlah Tuna Netra dan Tuna Daksa di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

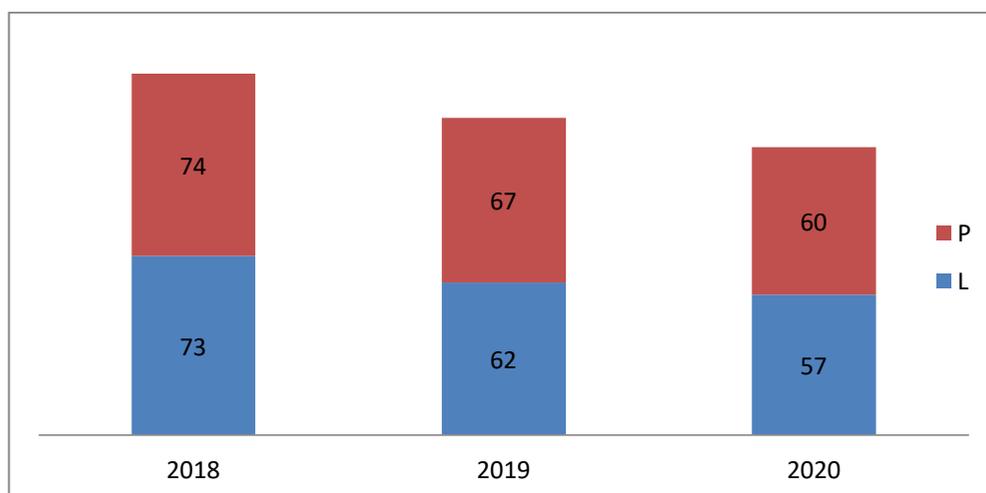
Tuna Netra dan Tuna Daksa merupakan kondisi dimana individu mengalami hambatan pengelihatn dan gangguan gerak. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik penderita tuna netra dan tuna daksa berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2018 penyandang tuna netra dan tuna daksa berjenis kelamin laki-laki berjumlah 91 jiwa, kondisi tersebut turun menjadi 90 jiwa pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 85 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan penyandang tuna netra dan tuna daksa berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 berjumlah 102 jiwa sedangkan tahun 2019 berjumlah 98 jiwa dan di tahun 2020 berjumlah 89 jiwa.



Gambar 2.58 Jumlah Tuna Netra, Tuna Rungu dan Tuna Wicara di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

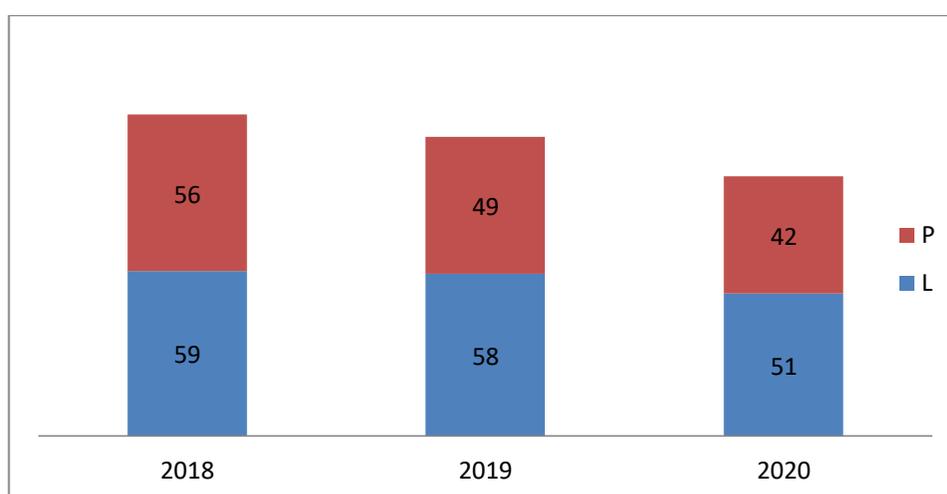
Tuna Netra, Tuna Rungu dan Tuna Wicara merupakan kondisi dimana individu mengalami gangguan penglihatan, pendengaran dan berkomunikasi. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik penderita tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2018 penyandang tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara berjenis kelamin laki-laki berjumlah 27 jiwa dan turun menjadi 20 jiwa pada tahun 2019 dan angkanya tetap yaitu 20 jiwa di tahun 2020. Sedangkan bagi penyandang tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 berjumlah 35 jiwa dan turun menjadi 33 jiwa pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 28 jiwa pada tahun 2020.



Gambar 2.59 Jumlah Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Tuna Daksa di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

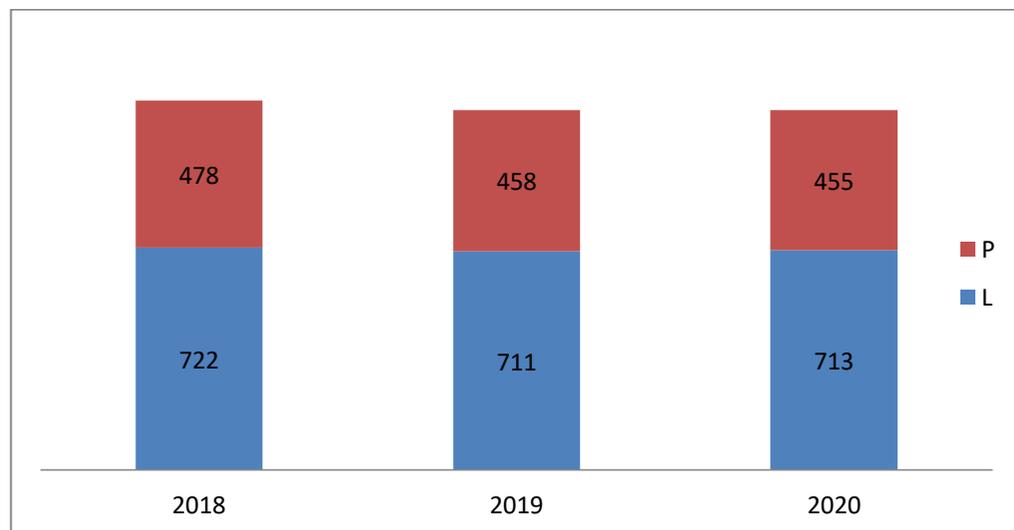
Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Tuna Daksa merupakan kondisi dimana individu mengalami gangguan pendengaran, berkomunikasi dan gerak. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik penderita tuna rungu, tuna wicara dan tuna daksa berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2018 penyandang tuna rungu, tuna wicara dan tuna daksa berjenis kelamin laki-laki berjumlah 73 jiwa dan turun menjadi 62 jiwa pada tahun 2019 dan turun kembali menjadi 57 jiwa. Sedangkan bagi penyandang tuna rungu, tuna wicara dan tuna daksa berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 berjumlah 74 jiwa dan turun menjadi 67 jiwa pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 60 jiwa pada tahun 2020.



Gambar 2.60 Jumlah Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Netra dan Tuna Daksa di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

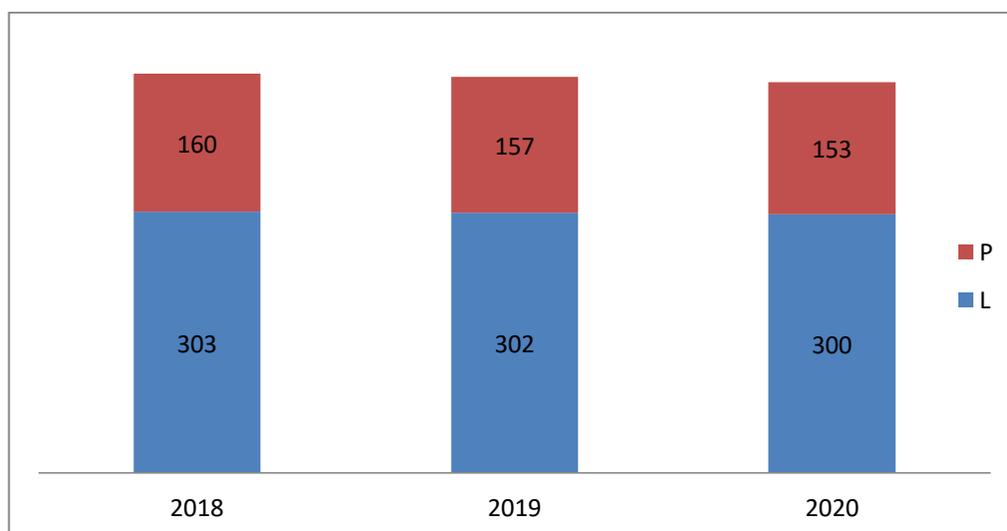
Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Netra dan Tuna Daksa merupakan kondisi dimana individu mengalami gangguan pendengaran, berkomunikasi, gerak dan penglihatan. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik penderita tuna rungu, tuna wicara, tuna netra dan tuna daksa berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Jumlah penyandang tuna rungu, tuna wicara, tuna netra dan tuna daksa berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2018 berjumlah 59 jiwa kemudian turun menjadi 58 jiwa pada tahun 2019 dan turun kembali menjadi 51 jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah penyandang tuna rungu, tuna wicara, tuna netra dan tuna daksa berjenis kelamin perempuan berjumlah 56 jiwa kemudian menurun menjadi 49 jiwa dan turun kembali menjadi 42 jiwa pada tahun 2020.



Gambar 2.61 Jumlah Retardasi Mental di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

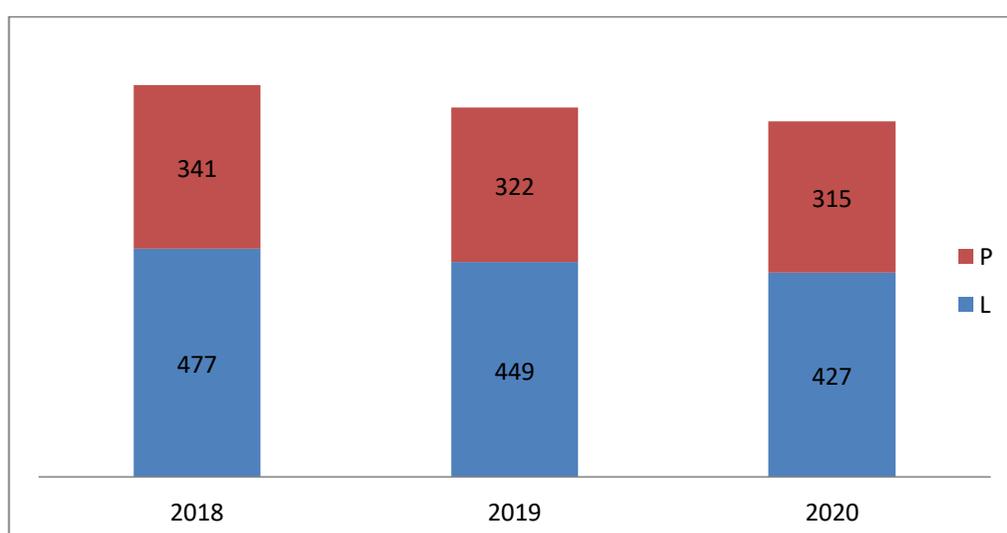
Retardasi mental merupakan gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata dan ketidakmampuan menjalani aktivitas seperti orang pada umumnya. Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik jumlah retardasi mental berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Jumlah penyandang retardasi mental berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2018 berjumlah 722 jiwa, menurun menjadi 711 jiwa pada tahun 2019 dan kembali naik menjadi 713 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penyandang retardasi mental berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 berjumlah 478 jiwa dan naik menjadi 458 jiwa pada tahun 2019 dan turun menjadi 455 jiwa pada tahun 2020.



Gambar 2.62 Jumlah Eks ODGJ di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik jumlah eks ODGJ berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Jumlah eksODGJ atau orang yang pernah mengalami gangguan jiwa berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2018 berjumlah 303 jiwa, kemudian turun menjadi 302 jiwa pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 300 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan jumlah eksODGJ atau orang yang pernah mengalami gangguan jiwa berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 berjumlah 160 jiwa dan turun menjadi 157 jiwa pada tahun 2019 dan turun kembali menjadi 153 jiwa pada tahun 2020.



Gambar 2.63 Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental di Kabupaten Tuban sesuai dengan Gender Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2021)

Berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk grafik jumlah disabilitas fisik dan mental berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki tingkat grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Jumlah penyandang disabilitas fisik dan mental berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2018 berjumlah 477 jiwa, kemudian turun menjadi 449 jiwa pada tahun 2019 dan turun kembali menjadi 427 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan penyandang disabilitas fisik dan mental berjenis kelamin perempuan pada tahun 2018 berjumlah 341 jiwa pada tahun 2018 kemudian turun menjadi 322 jiwa pada tahun 2019 dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi 315 jiwa.

2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

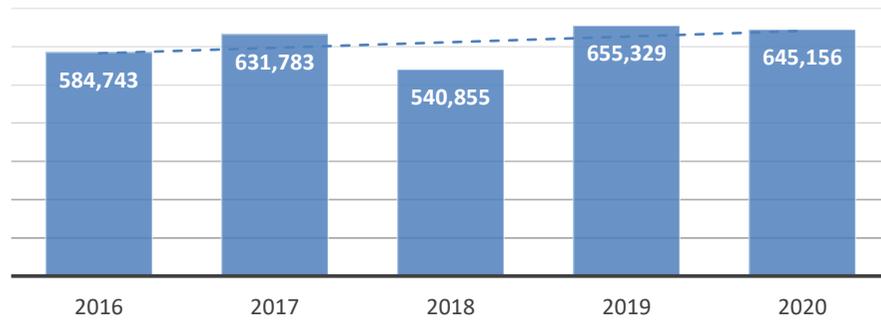
Tabel 2.19 Hasil Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah Penduduk yang bekerja | Jiwa | 584.743 | 631.783 | 540.855 | 655.329 | 645.156* |
| 2. | Jumlah Pengangguran | Jiwa | 18.926 | 22.198 | 18.644 | 15.983 | 15.216* |
| 3. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 67,18 | 71,71 | 71,78 | 68,62 | 71,84* |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,03 | 3,39 | 2,83 | 2,76 | 4,81 |
| 5. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 88,91 | 100 | 75,72 | 100 | N/A |
| 6. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | % | 88,8 | 86,75 | 65,04 | 100 | N/A |
| 7. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 89,92 | 76,39 | 77,12 | 77,98 | 72,02 |
| 8. | Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | - | 81,8 | 80 | 90 | 94,73 |

*data 2020 bulan agustus

(Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

1. Jumlah Penduduk yang bekerja

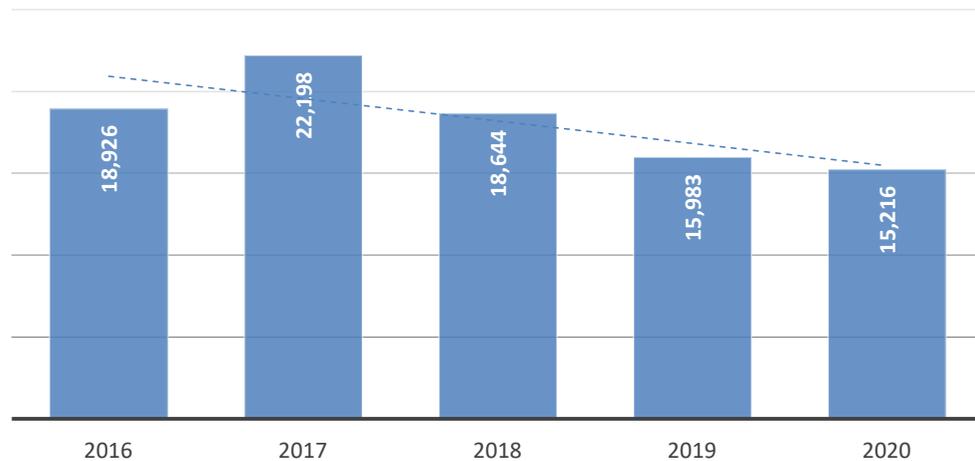


Gambar 2.64 Jumlah Penduduk yang bekerja di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: DMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Tuban dari tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2016 mencapai 584.743 jiwa, kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 631.783 jiwa. Tahun 2018 jumlah ini mengalami penurunan hingga menjadi 540.855 jiwa, pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 655.329 jiwa, dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 645.156 (data per agustus 2020).

2. Jumlah Pengangguran



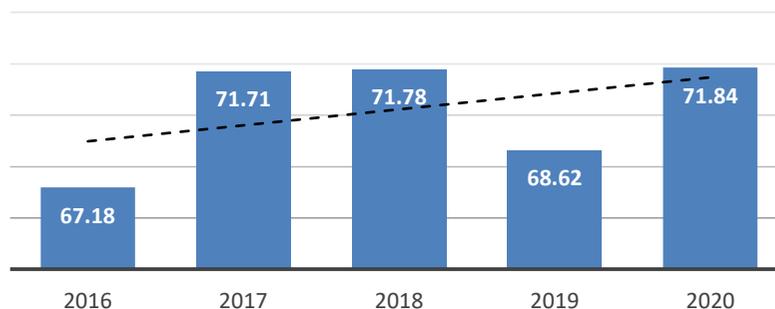
Gambar 2.65 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Tuban setiap tahunnya mengalami kondisi yang fluktuatif, namun cenderung menurun. Pada tahun 2016 jumlah pengangguran di Kabupaten Tuban sebesar 18.926 jiwa. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada

tahun 2017 menjadi 22.198 jiwa dan di tahun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga mencapai 15.216 jiwa di tahun 2020.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

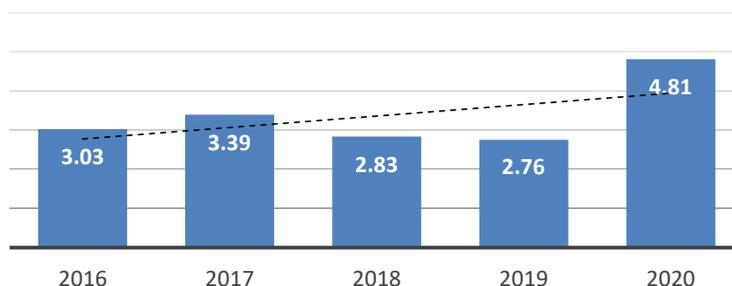


Gambar 2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tuban dari tahun 2016-2020 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,18%. Angka ini meningkat pada tahun 2017 sebesar 71,71% dan tahun 2018 sebesar 71,78%. Namun di tahun 2019 menurun menjadi 68,62%, dan tahun 2020 meningkat kembali menjadi 71,84%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

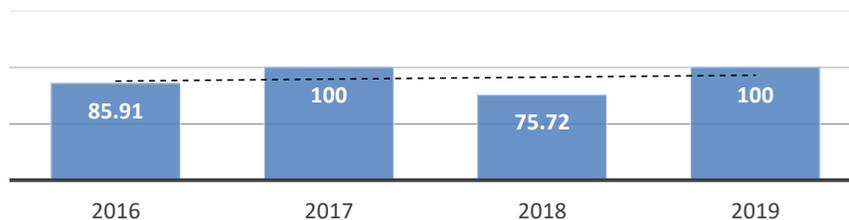


Gambar 2.67 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran di kabupaten Tuban sebesar 3,03%. Meningkat di tahun 2017 sebesar 3,39%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 2,83% dan 2,76%. Di tahun 2020 meningkat kembali menjadi 4,81%.

5. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

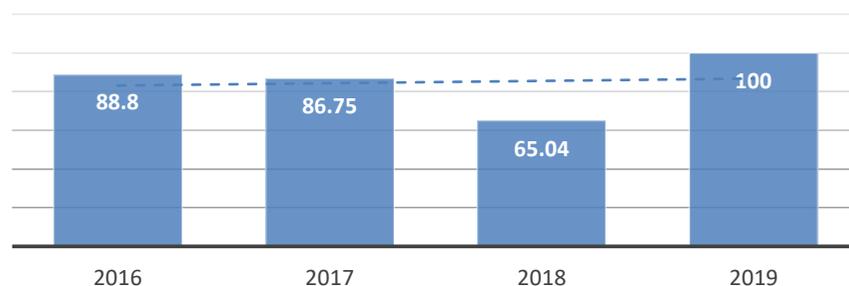


Gambar 2.68 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Tuban Tahun 2016-2019

(Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2019)

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Tuban tahun 2016-2019 mengalami kondisi yang fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Tuban mencapai 85,91% dan terus meningkat pada tahun 2017 hingga 100%, namun terjadi penurunan di tahun 2018 menjadi 75,72% dan kembali meningkat hingga mencapai 100% di tahun 2019.

6. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan



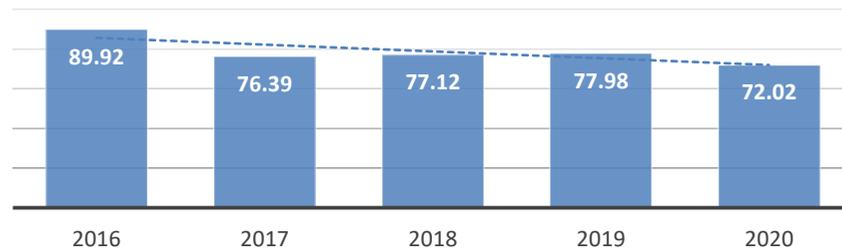
Gambar 2.69 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2019

(Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2019)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa besaran tenaga kerja di Kabupaten Tuban yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dari tahun 2016-2019 mengalami kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016, besaran tenaga kerja di Kabupaten Tuban yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan mencapai 88,8% dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2017 mencapai 86,75%. Angka ini mengalami penurunan yang

signifikan pada tahun 2018 hingga 65,04% dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2019 mencapai 100%.

7. Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan

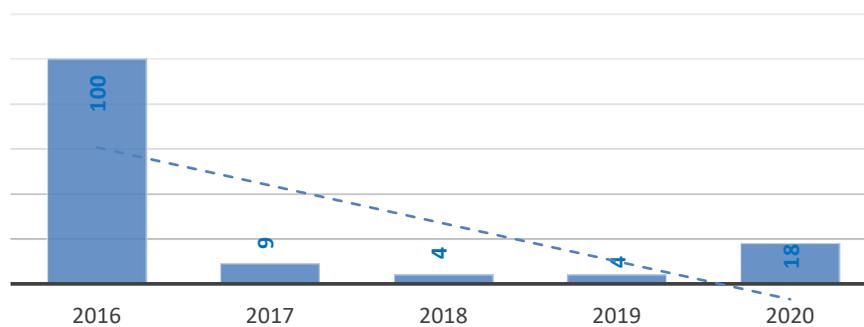


Gambar 2.70 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Dan Ditempatkan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan di Kabupaten Tuban mengalami kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja terdaftar dan ditempat sebesar 89,92%. Angka ini menurun di tahun 2017 menjadi 76,39%, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2018 dan tahun 2019 dengan besaran masing-masing 77,12% dan 77,98%. Angka ini tidak bertahan lama, karena di tahun 2020 menurun menjadi 72.02%.

8. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama



Gambar 2.71 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di Kabupaten Tuban mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016 jumlah kasus yang dapat diselesaikan mencapai 100 kasus. Kemudian angka ini mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 9 kasus pada tahun 2017 dan hanya 4 kasus di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun

2020, angka ini mulai meningkat yaitu terdapat sebanyak 18 kasus yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama.

B. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

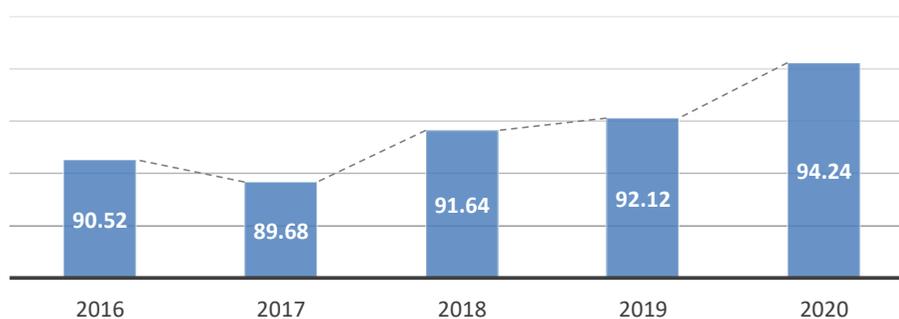
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20 Hasil Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase Kepemilikan KTP elektronik | % | 90,52 | 89,68 | 91,64 | 92,12 | 94,24 |
| 2. | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 0 | 0,43 | 4,72 | 13,63 | 15,45 |
| 4. | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun | % | 78,07 | 86,20 | 88,48 | 92,66 | 96,41 |
| 5. | Persentase Kepemilikan Akta kematian | % | 7,76 | 60,96 | 80,05 | 79,72 | 87,81 |
| 6. | IKM pelayanan administrasi kependudukan | Nilai | 76,23 (Baik) | 74,25 (Baik) | 77,45 (Baik) | 76,90 (Baik) | 80,02 (Baik) |
| 7. | Persentase Ketersediaan Informasi Data Kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 2020)

1) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik



Gambar 2.72 Presentase Kepemilikan KTP Elektronik Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 2021)

Indikator kinerja persentase kepemilikan KTP elektronik Kabupaten Tuban tahun 2016 sebesar 90,52%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase kepemilikan KTP elektronik sebesar 89,68%. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase kepemilikan KTP elektronik terus mengalami peningkatan masing-masing menjadi 91,64%, 92,12% dan 94,24%. Capaian tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jemput bola dengan perakaman penduduk wajib KTP ke desa/kelurahan dan sekolah, serta adanya ketentuan akan dilakukan pemblokiran data penduduk usia 23 tahun keatas yang belum melakukan perekaman.

2) Persentase kepemilikan Kartu Keluarga

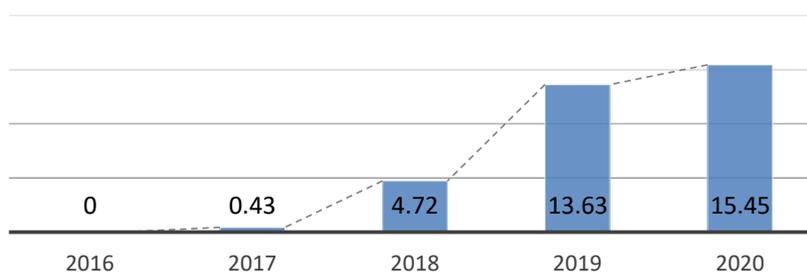


Gambar 2.73 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 2021)

Capaian indikator kinerja kepemilikan Kepala keluarga dari tahun 2016 telah mencapai 100%. Angka ini selalu stabil hingga tahun 2020 yaitu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Tuban telah memiliki Kartu Keluarga baik yang menggunakan aplikasi SIAK maupun yang belum masuk aplikasi SIAK. Dan sesuai ketentuan perundangan sejak tahun 2011 mewajibkan penduduk untuk memiliki Kartu Keluarga dengan aplikasi SIAK.

3) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

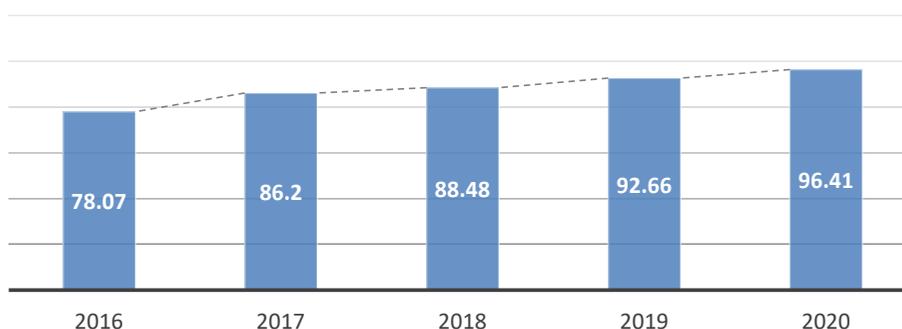


Gambar 2.74 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Tuban menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Besaran kepemilikan kartu identitas anak pada tahun 2016 hingga tahun 2020 secara berurutan yaitu 0%, 0,43%, 4,72%, 13,63% dan 15,45%. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya kepemilikan KIA bagi anak-anaknya sebagai identitas resmi anak serta kepedulian stakeholder terkait.

4) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun

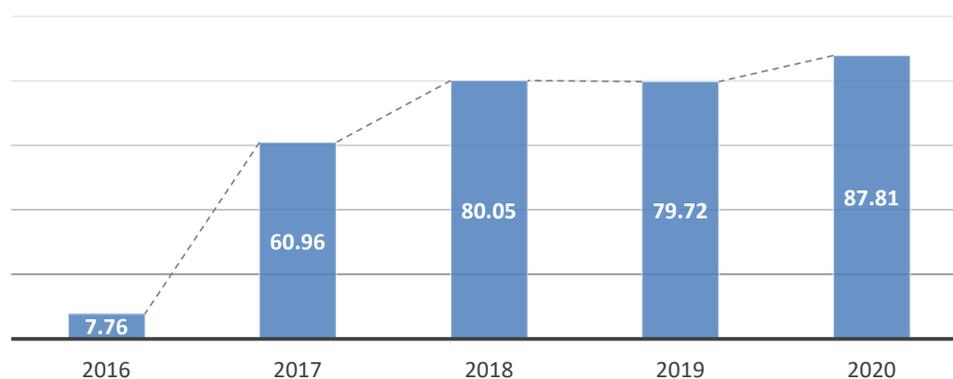


Gambar 2.75 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 2021)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta keahiran usia 0-8 tahun di Kabupaten Tuban menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 kepemilikan akta kelahiran mencapai 78,07%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2017 hingga 2020 dengan besaran kepemilikan akta kelahiran secara berurutan yaitu 86,2%, 88,48%, 92,66% dan 96,41%. Peningkatan ini disebabkan karena dilaksanakannya pelayanan online akta pencatatan sipil melalui desa/kel dan kecamatan dengan program “JADEK” atau Jauh Jadi Dekat. Hasil penerbitannya akan di kirimkan ke kecamatan dan dari kecamatan akan didistribusikan ke desa/kelurahan.

5) Persentase kepemilikan akta kematian

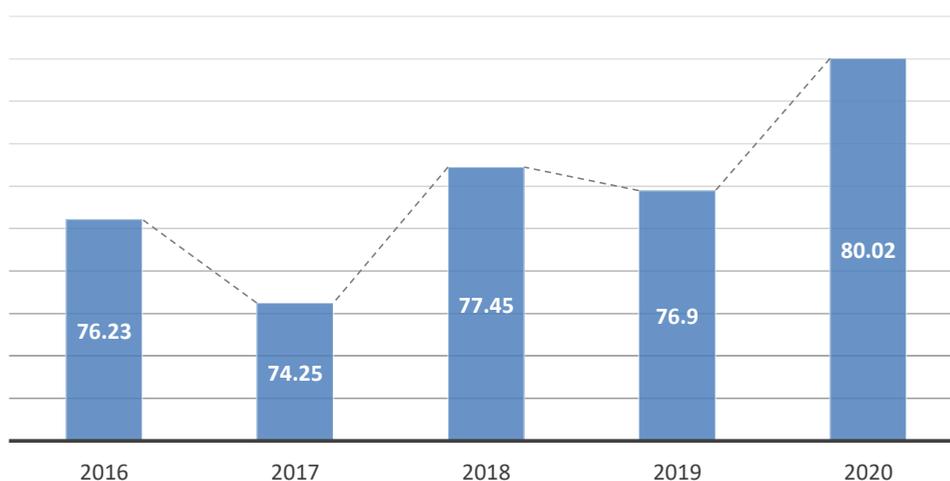


Gambar 2.76 Persentase Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase kepemilikan akta kematian di Kabupaten Tuban menunjukkan angka yang cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan dengan besaran kepemilikan akta kematian masing-masing sebesar 7,76%, 60,96% dan 80,05%. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 79,72%, namun pada tahun 2020, persentase kepemilikan akta kematian kembali mengalami peningkatan menjadi 87,81%. Peningkatan ini dikarenakan dalam setiap pengurusan perubahan Kartu Keluarga apabila terjadi pengurangan anggota keluarga karena kematian, diwajibkan juga untuk mengurus akta kematiannya.

6) IKM Pelayanan administrasi kependudukan



Gambar 2.77 IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 2021)

Capaian untuk Indikator kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pelayanan administrasi kependudukan, berdasarkan hasil survey independen yang telah dilakukan maka capaian dari IKM untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban pada tahun 2016 dianggap baik dengan nilai 76,23. Pada tahun 2017 nilai IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Tuban turun menjadi 74,25. Pada tahun 2018 kembali meningkat yaitu 77,45% dan tahun 2019 kembali menurun menjadi 76,90, namun masih termasuk dalam kategori baik. Peningkatan nilai kembali terjadi di tahun 2020 sebesar 80,02. Dengan demikian bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tuban telah memenuhi standar pelayanan dengan kategori baik.

7) Persentase ketersediaan informasi data kependudukan

Persentase ketersediaan informasi data kependudukan di Kabupaten Tuban selama tahun 2016-2020 selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa laporan informasi tentang data kependudukan yang diminta oleh stakeholder terkait telah dapat dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



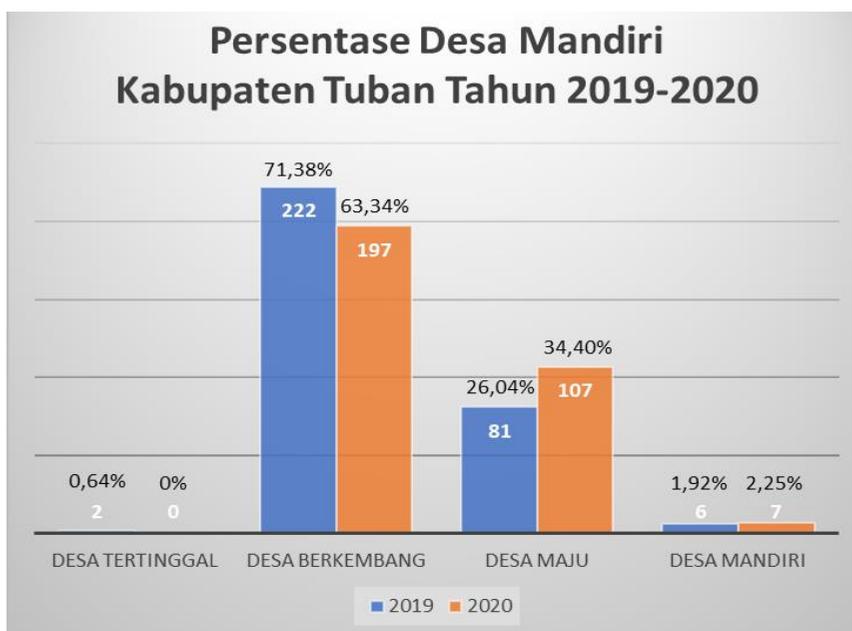
Gambar 2.78 Persentase Ketersediaan Informasi Data Kependudukan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 2021)

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam indeks desa membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan

menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.



Gambar 2.79 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020

(Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021)

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

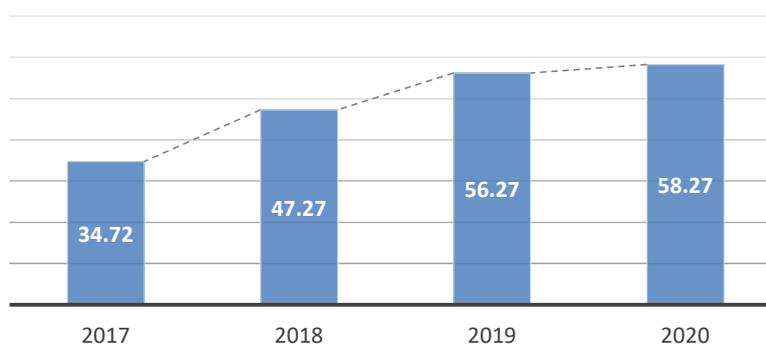
Tabel 2.21 Hasil Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2017-2020

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih | % | | 34,72 | 47,27 | 56,27 | 58,27 |
| 2. | Persentase kecamatan yang berhasil membina pemerintah desa sesuai aturan | % | | 25 | 100 | n/a | n/a |
| 3. | Persentase pertumbuhan badan usaha ekonomi desa | % | | 60,29 | 69,37 | n/a | n/a |
| 4. | Tingkat pertumbuhan BUMDes mandiri | - | | n/a | n/a | 57.14 | 62.05 |
| 5. | Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | % | | n/a | n/a | 100 | 100 |
| 5. | Persentase Peningkatan Kerjasama Desa | % | n/a | n/a | n/a | n/a | 44 |
| 6. | Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan | Desa | n/a | n/a | n/a | n/a | 23 |

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan | | | | | | |

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

1) Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih

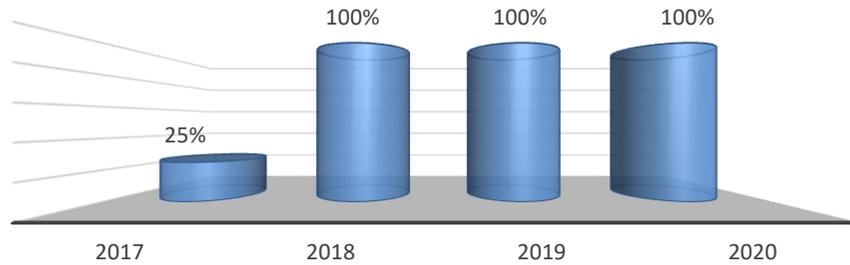


Gambar 2.80 Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih di kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dengan kriteria tertib administrasi mengalami peningkatan pada empat tahun terakhir. Pada Tahun 2017 persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dengan kriteria tertib administrasi sebesar 34,72%. Pada Tahun 2018 persentase desa dengan tata kelola pemerintah desa yang bersih dengan kriteria tertib administrasi sebesar 47,27%, tahun 2019 sebesar 56,27%, dan di tahun 2020 kembali meningkat sebesar 58,27%. Namun peningkatan di tahun 2020 masih belum memenuhi target dimana dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, desa yang memenuhi kualifikasi bersih sejumlah 181 desa dari 311 desa yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena, pada masa pandemi ini, pengawasan terhadap administrasi berkurang dan pemenuhan terhadap keterisian SOTK tidak bisa dipenuhi.

2) Persentase kecamatan yang berhasil membina pemerintah desa sesuai aturan

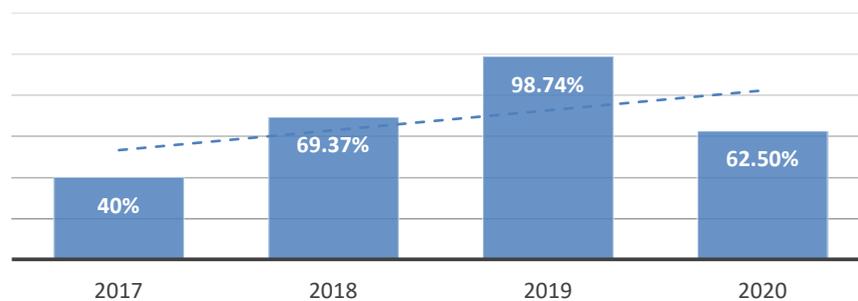


Gambar 2.81 Persentase kecamatan yang berhasil membina pemerintah desa sesuai aturan

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase kecamatan yang berhasil membina pemerintah desa sesuai aturan Kabupaten Tuban mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 Persentase kecamatan yang berhasil membina pemerintah desa sesuai aturan mencapai 25%. Sedangkan tahun 2018 hingga 2020 persentasenya selalu meningkat yaitu mencapai 100%. Artinya semua Lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban adalah Lembaga yang aktif. Pada tahun 2020, Lembaga masyarakat yang ada sebesar 10.916 lembaga yang meliputi RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM.

3) Persentase pertumbuhan badan usaha ekonomi desa

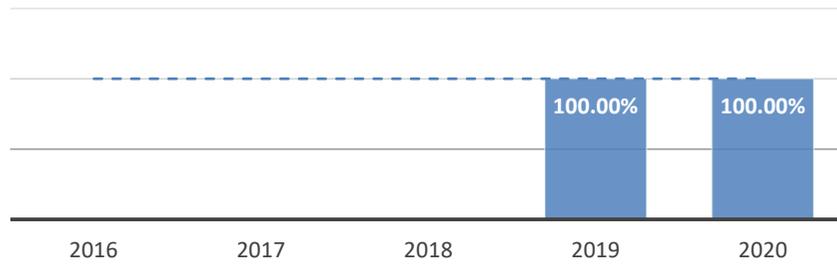


Gambar 2.82 Persentase pertumbuhan badan usaha ekonomi desa Kabupaten Tuban tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase pertumbuhan badan usaha ekonomi desa Kabupaten tuban dari tahun 2017-2019 mengalami trend yang positif. Persentase pertumbuhan badan usaha ekonomi desa Kabupaten Tuban tahun 2017 mencapai 40%. Tahun 2018 Persentase pertumbuhan badan usaha ekonomi desa Kabupaten Tuban mengalami peningkatan sebesar 69,37%. Dan di tahun 2019 Persentase pertumbuhan badan usaha ekonomi desa Kabupaten Tuban mencapai 98,74%.

4) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif

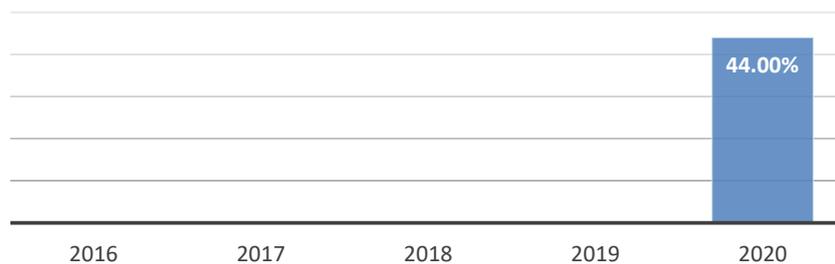


Gambar 2.83 Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif Kabupaten Tuban dari tahun 2019-2020 capaiannya tetap. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif Kabupaten Tuban tahun 2019 mencapai 100%. Tahun 2020 Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif Kabupaten Tuban capainya tetap sebesar 100%.

5) Persentase Peningkatan Kerjasama Desa



Gambar 2.84 Persentase Peningkatan Kerjasama Desa di Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

Data Persentase peningkatan kerjasama desa Kabupaten Tuban hanya tersedia di tahun 2020, dikarenakan indikator tersebut mulai berjalan di tahun 2020 sesuai Permendagri No 18 Tahun 2020. Besaran persentase peningkatan kerjasama desa tahun 2020 capaiannya sebesar 44%.

6) Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan



Gambar 2.85 Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan di Kabupaten Tuban tahun 2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

Data Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan hanya tersedia di tahun 2020, dikarenakan indikator tersebut mulai dilaksanakan di tahun 2020 sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020. Besaran jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan di Kabupaten Tuban tahun 2020 mencapai 23 Desa.

D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.22 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | |
|---|---|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pengendalian Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Indeks Pemberdayaan Gender | indek | 61,25 | 67,74 | 64,32 | 64 |
| 2 | Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti | % (kasus) | 100 (47) | 100 (60) | 100 (52) | 100 |
| 3 | Persentase tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti | % (kasus) | 100 (38) | 100 (38) | 100 (18) | 100 |

(Sumber : Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2020)

1. Indeks Pemberdayaan Gender

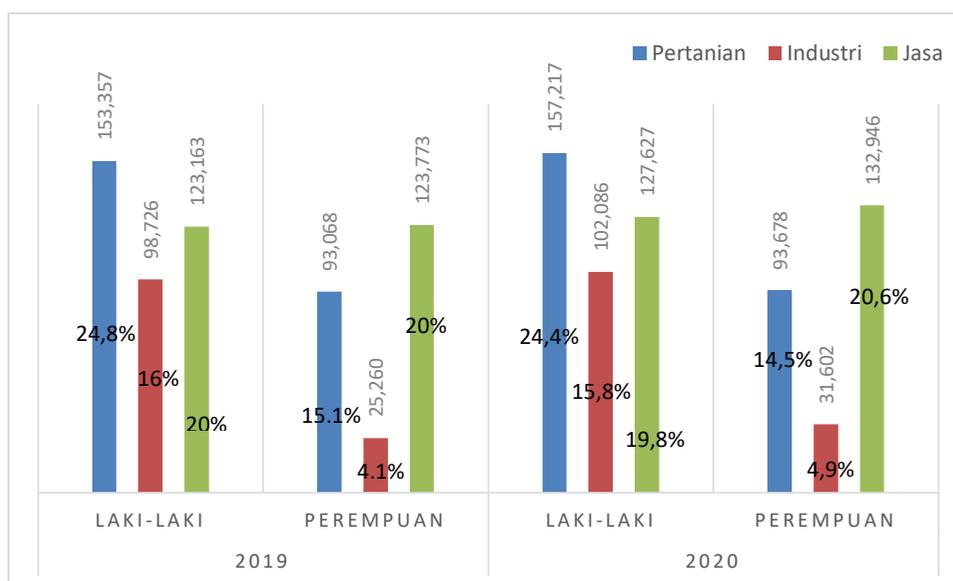
Indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.



Gambar 2.86 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Keterwakilan perempuan dalam parlemen (DPRD) di Kabupaten Tuban terbilang masih cukup kecil. Pada dua kali Pemilu Legislatif (Tahun 2014 dan 2019) peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD tidak bertambah secara signifikan. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 keterwakilan perempuan hanya sebesar 12% (6 orang) dan bertambah menjadi 14% (7 orang) dari total 50 orang anggota DPRD Kabupaten Tuban.

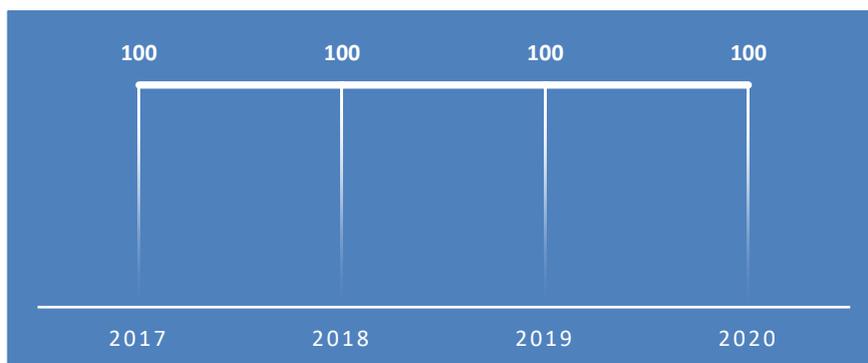


Gambar 2.87 Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Laki-Laki dan Perempuan pada Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Partisipasi perempuan pada lapangan kerja utama di sektor pertanian, industri, dan jasa di Kabupaten Tuban cukup tinggi. Secara rasio, partisipasinya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase partisipasi perempuan pada lapangan kerja utama mencapai 39% dan meningkat menjadi 40% ditahun 2020.

2. Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti



Gambar 2.88 Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase tindak kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Tuban tahun 2017-2020 mencapai 100%. Hanya saja jumlah kasus yang membedakan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 47 kasus yang diselesaikan, kemudian pada tahun 2018 ada 60 kasus yang diselesaikan dan pada tahun 2019 terdapat 52 kasus yang diselesaikan.

3. Persentase tindak kekerasan pada anak yang ditindaklanjuti



Gambar 2.89 Persentase tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase tindak kekerasan pada anak yang ditindaklanjuti di Kabupaten Tuban tahun 2017-2020 sebesar 100% setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2017 dan 2018 jumlahnya 38 kasus. Dan berdasarkan angka proyeksi tahun 2019 mengalami kestabilan yaitu mencapai 38 kasus. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu mencapai 18 kasus.

E. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

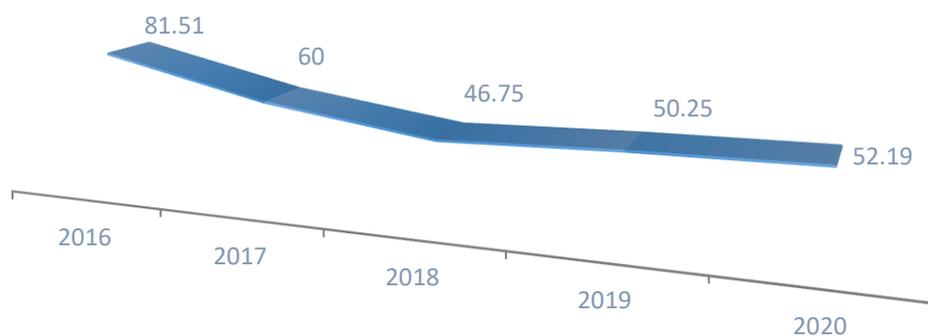
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23 Hasil Kinerja Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase koperasi aktif | % | 81,51 | 60 | 46,75 | 50,25 | 52.19 |
| 2. | Persentase peningkatan jumlah usaha mikro | % | 5,26 | 1,85 | 3,38 | 2,48 | 0,24 |
| 3. | jumlah koperasi yang aktif | Unit | 897 | 744 | 582 | 604 | 626 |
| 4. | jumlah koperasi yang tidak aktif | Unit | 338 | 496 | 692 | 686 | 689 |
| 5. | jumlah usaha mikro yang dibina maupun yang naik kelas | Unit | 29.092 | 30.095 | 31.394 | 32.282 | 32.774 |
| 6. | jumlah anggota koperasi | anggota | 87.804 | 109.759 | 121.821 | 192.771 | 228.028 |
| 7. | Jumlah pengurus koperasi | anggota | 3.815 | 3.830 | 3.932 | 3.980 | 4.055 |

(Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 2020)

1) Persentase Koperasi Aktif

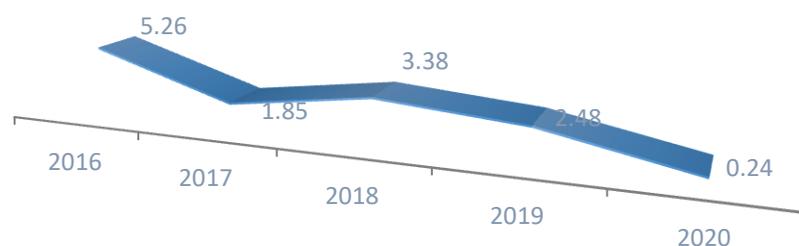


Gambar 2.90 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Tuban setiap tahunnya mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 Persentase koperasi yang aktif mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 81,51%. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 60% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 50,25%. Angka ini kemudian mulai meningkat di tahun 2020 yaitu mencapai 52,19%. Kenaikan ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan anggota koperasi.

2) Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro



Gambar 2.91 Persentase Peningkatan Jumlah usaha mikro di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Tuban mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2016 angkanya sebesar 5,26%. Kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 1,85%, namun di tahun 2018 angkanya mengalami peningkatan sebesar 3,38%. Angka ini

tidak bertahan lama, karena pada tahun 2019 kembali menurun di angka 2,48%, dan 2020 kembali menurun di angka 0,24%.

F. Kebudayaan

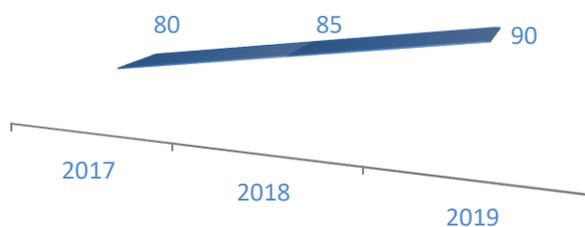
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No. | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|----------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Cakupan desa/kelurahan berbudaya | % | N/A | 80 | 85 | 90 | N/A |
| 2. | Jumlah benda, Situs Cagar Budaya di Kabupaten Tuban yang dilindungi | Unit | 5774 | 5774 | 5774 | 5774 | 5774 |
| 3. | Jumlah Gedung Kesenian | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Cakupan Kajian Seni | kegiatan | 6 | 6 | 6,8 | 20 | 20 |
| 5. | Cakupan Fasilitas Seni | unit | 5 | 5 | 6,2 | 20 | 20 |
| 6. | Cakupan Gelar Seni | kegiatan | 5 | 17 | 15 | 20 | 20 |
| 7. | Cakupan Misi Kesenian | kegiatan | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 8. | Cakupan SDM kesenian | % | | | | 95 | 95 |
| 9. | Cakupan Tempat Kesenian | % | | | | 35 | 35 |
| 10. | Jumlah benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | buah | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 11. | Jumlah kesenian daerah yang dikelola | Buah | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 12. | Jumlah Kebudayaan daerah | Buah | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020)

1) Cakupan Desa/Kelurahan Berbudaya

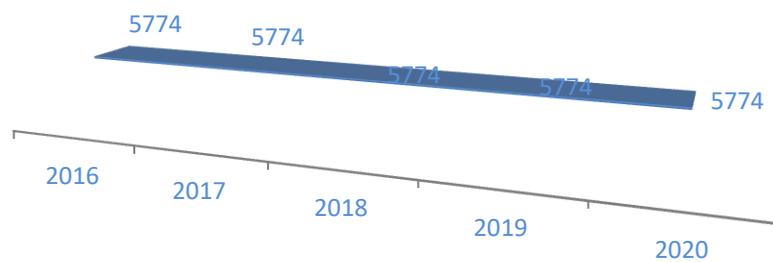


Gambar 2.92 Cakupan Desa/ Kelurahan Berbudaya di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2019

(Sumber: Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2019)

Cakupan Desa/Kelurahan berbudaya yang ada di Kabupaten Tuban dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai angka 80%. Lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu meningkat menjadi 85%. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi 90%.

2) Jumlah Benda, Situs, cagar Budaya di Kabupaten Tuban yang dilindungi

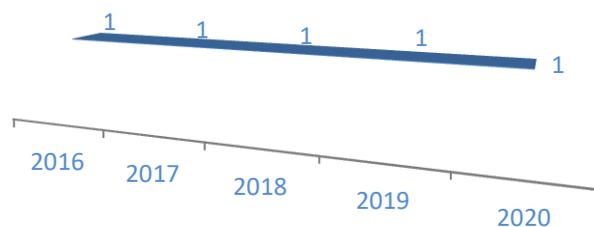


Gambar 2.93 Jumlah benda, situs, cagar budaya yang dilindungi di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2019

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2019)

Jumlah benda, situs serta cagar budaya yang dilindungi merupakan salah satu indikator mengenai urusan Kebudayaan di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kestabilan. Jumlah benda, situs serta cagar budaya yang dilindungi berjumlah 5.774 buah.

3) Jumlah Gedung Kesenian

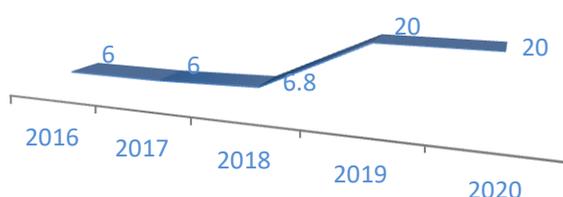


Gambar 2.94 Jumlah Gedung Kesenian di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020)

Jumlah gedung kesenian merupakan salah satu indikator urusan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah gedung kesenian di Kabupaten Tuban masih stabil yaitu hanya mempunyai 1 gedung kesenian.

4) Cakupan Kajian Seni

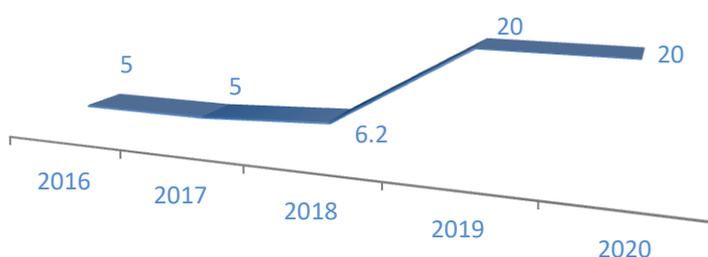


Gambar 2.95 Cakupan Kajian Seni di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020)

Cakupan Kajian Seni merupakan salah satu indikator urusan Kebudayaan di Kabupaten Tuban. Cakupan kajian seni yang ada di Kabupaten Tuban pada tahun 2015 sebanyak 6 kali hingga tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 6,8. Pada tahun 2019 hingga 2020 jumlah kegiatan yang terlaksana meningkat signifikan yaitu sebanyak 20 kajian seni tradisi modern.

5) Cakupan Fasilitas Seni

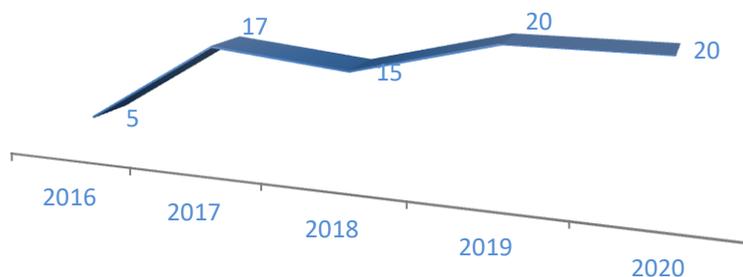


Gambar 2.96 Cakupan fasilitas seni di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber :Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020)

Cakupan fasilitas seni yang ada di Kabupaten Tuban mengalami kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Sejak tahun 2016 hingga 2017 jumlahnya sebanyak 5 unit. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 6,2 unit dan semakin meningkat signifikan di tahun 2019 hingga 2020 yaitu sebanyak 20 unit. Fasilitas seni di Kabupaten Tuban diantaranya: Goa Akbar, Bektiharjo, Pantai Boom, lapangan watu gajah, dan lapangan wire. Taman bermain, Pujasera Gor, Aula Disparbudpora, Panggung Budaya Unirow, Aula SMPN 6 Tuban, Budayaloka, Pantai Kelapa, Aula SMAN 1 Tuban, Rest area, lapangan kodokbende.

6) Cakupan Gelar Seni

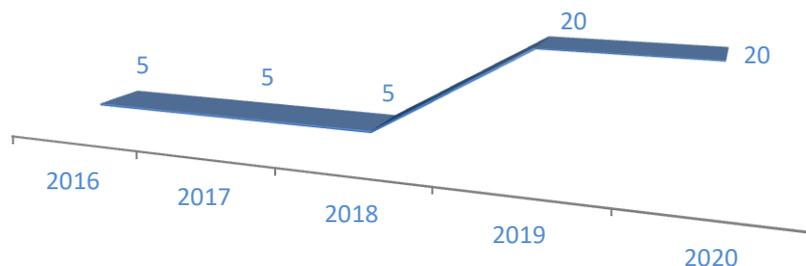


Gambar 2.97 Cakupan Gelar Seni di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2020)

Cakupan gelar seni di Kabupaten Tuban sejak tahun 2015 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 pagelaran seni terjadi sebanyak 5 kali. Kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi 17 kali pagelaran, namun menurun di tahun 2018 menjadi 15 pagelaran. Angka ini kemudian kembali meningkat pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu terlaksana sebanyak 20 kali.

7) Cakupan misi kesenian

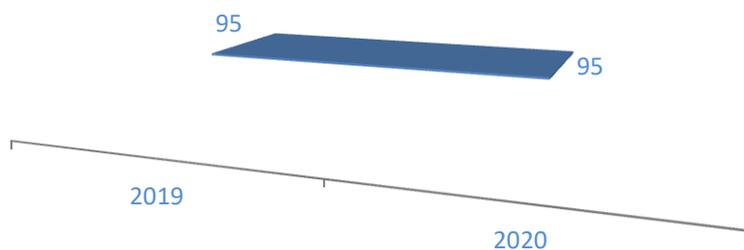


Gambar 2.98 Cakupan Misi Kesenian di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban, 2020)

Cakupan misi kesenian merupakan salah satu indikator kinerja urusan Kebudayaan di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2016 hingga tahun 2018 cakupan misi kesenian di Kabupaten Tuban mengalami kestabilan yaitu mencapai 5 kegiatan. Angka ini kemudian meningkat signifikan selama tahun 2019 hingga 2020 yaitu sejumlah 20 kegiatan, terutama dalam rangka pembinaan dan pementasan.

8) Cakupan SDM Kesenian

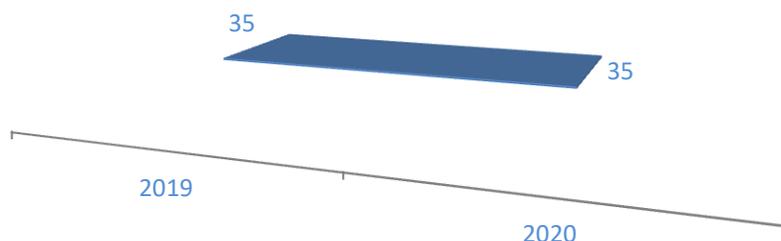


Gambar 2.99 Cakupan SDM kesenian di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020

(Sumber: Dinas Parbudpora, 2020)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa cakupan SDM pada tahun 2019 linier dengan tahun 2020, yaitu mencapai 95%. Meskipun secara persentase angka yang ditunjukkan besar, namun di tahun 2020 ini sumber daya manusia pelaku kesenian sangat jauh dari target yaitu hanya sejumlah 210 orang, dari target capaian sejumlah 855 orang. Hal ini sangat jauh dari target yang ditentukan dikarenakan adanya pandemic Covid-19.

9) Cakupan Tempat Kesenian

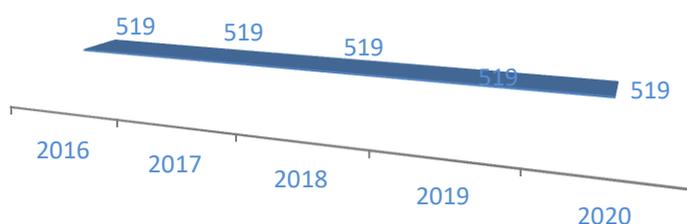


Gambar 2.100 Cakupan Tempat Kesenian di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020

(Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban, 2020)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa cakupan tempat kesenian di Kabupaten Tuban pada tahun 2019 linier dengan tahun 2020, yaitu mencapai 35%. Jumlah tempat kesenian di Kabupaten Tuban sebanyak 4 unit.

10) Jumlah benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

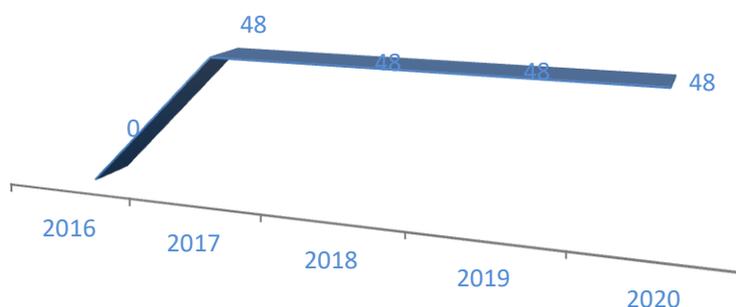


Gambar 2.101 Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban 2020

Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Tuban dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kestabilan sebanyak 519 buah.

11) Jumlah Kesenian Daerah Yang Dikelola



Gambar 2.102 Jumlah kesenian daerah yang dikelola di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban 2020

Terkait jumlah kesenian daerah yang dikelola oleh Dinas Parbudpora data pada tahun 2016 N/A atau 0 dikarenakan Dinas Parbudpora berdiri pada tahun 2017. Jumlah kesenian yang dikelola oleh Dinas Parbudpora sendiri tidak mengalami kenaikan atau penurunan mulai tahun 2017-2019.

G. Penanaman Modal

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018-2020

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | |
|----|---|----------|-----------------|---------|--------|--------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) | investor | 34 | 245 | 614 | 482 |
| 2. | Jumlah investasi berskala nasional (PMA/PMDN) | Milyar | 214.193 | 407.896 | 27.700 | 14.294 |
| 3. | Nilai IKM Pelayanan Publik | Nilai | n/a | 86,5 | 81,72 | 84,24 |

(Sumber: DPMPTSP dan Naker Kabupaten Tuban, 2020)



Gambar 2.103 Jumlah Investor dan Nilai Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2018-2020

(Sumber: DPMPTSP dan Naker Kabupaten Tuban, 2020)

Jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Tuban menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2018 terdapat 245 investor dan meningkat tahun 2019 menjadi 614 investor, namun jumlahnya menurun di tahun 2020 yaitu hanya sebanyak 482 investor dikarenakan adanya pandemi Covid - 19. Jumlah investasi berskala nasional yang ada di Kabupaten Tuban juga menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai investasi mencapai 4.171 milyar dan meningkat signifikan di tahun 2019 yaitu mencapai 27.700 milyar. Angka ini tidak bertahan lama, karena selama tahun 2020 nilai investasi mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 14.294 milyar.

Disisi lain, indikator kepuasan pelayanan publik di urusan investasi nilainya cenderung turun yakni pada tahun 2018 sebesar 86,5 sedangkan

pada tahun 2019 sebesar 81,72, dan IKM 2020 sebesar 84,24. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya memperbaiki kinerja pelayanan publik dengan melakukan inovasi sehingga kepuasan masyarakat meningkat.

H. Kepemudaan dan Olahraga

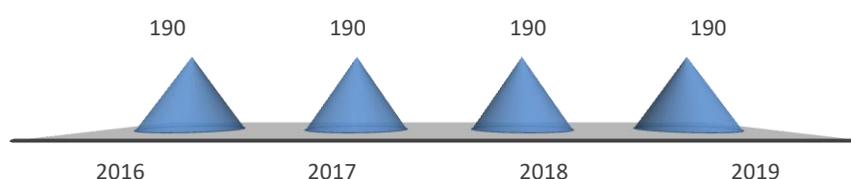
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|------------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan | orang | 190 | 190 | 190 | 190 | N/A |
| 2. | Jumlah Organisasi Kepemudaan | organisasi | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 3. | Jumlah Organisasi Keolahragaan | organisasi | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 4. | Jumlah Gelanggang / Balai Remaja | unit | 8 | 8 | 8 | 8 | N/A |
| 5. | Jumlah Lapangan Olahraga | lapangan | 55 | 299 | 299 | 300 | 300 |
| 6. | Jumlah Dan Jenis Olahraga Berprestasi | jenis | 9 | 9 | 9 | 9 | N/A |

(Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban, 2020)

1) Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan

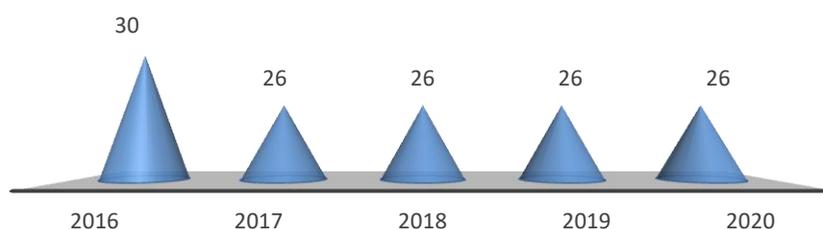


Gambar 2.104 Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2019

(Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban, 2019)

Indikator yang pertama dari kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tuban yaitu meningkatnya peran serta pemuda dalam Pembangunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kestabilan. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 peran serta pemuda dalam pembangunan yaitu berjumlah 190 orang. Angka ini tetap stabil hingga tahun 2019.

2) Jumlah Organisasi Kepemudaan

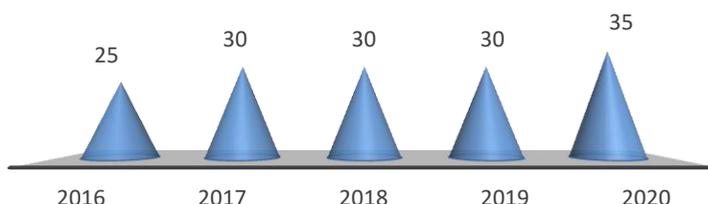


Gambar 2.105 Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban, 2020)

Indikator yang kedua dari Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tuban yaitu jumlah organisasi kepemudaan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, namun cenderung stabil. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah organisasi kepemudaan mencapai 30 organisasi, namun menurun tahun 2017 yaitu sejumlah 26 organisasi. Angka ini stabil hingga tahun 2020.

3) Jumlah Organisasi Keolahragaan

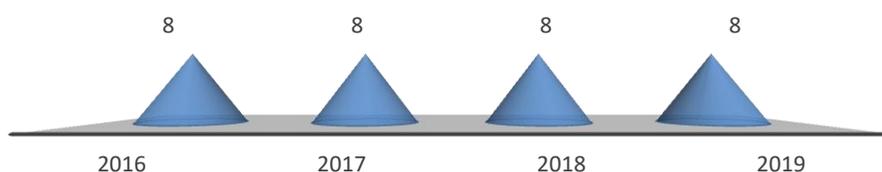


Gambar 2.106 Jumlah Organisasi Keolahragaan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban, 2020)

Indikator yang ketiga dari Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tuban yaitu jumlah organisasi keolahragaan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 berjumlah 25 organisasi. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah organisasi kepemudaan mengalami peningkatan yaitu berjumlah 30 organisasi kepemudaan. Di tahun 2020 mengalami peningkatan Kembali menjadi 35 organisasi.

4) Jumlah Gelanggang/Balai Remaja

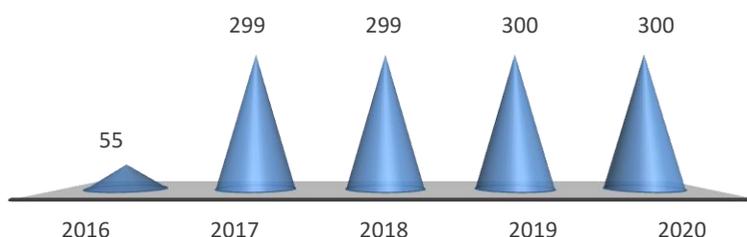


Gambar 2.107 Jumlah Gelanggang/Balai Remaja di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2019

(Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban 2019)

Indikator yang keempat dari Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tuban yaitu jumlah gelanggang/balai remaja dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kestabilan. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Jumlah Balai/Gelanggang Remaja yaitu berjumlah 8 unit. Angka ini stabil hingga tahun 2019.

5) Jumlah Lapangan Olahraga

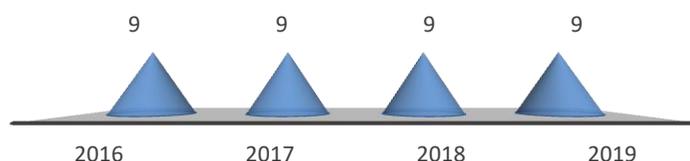


Gambar 2.108 Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban 2021)

Indikator yang kelima dari Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tuban yaitu Jumlah Lapangan Olahraga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah lapangan olahraga yaitu 55 lapangan. Lalu angka ini meningkat secara signifikan di tahun 2017 dan stabil di tahun 2018 dengan besaran capaiannya sama yaitu 299 lapangan. Di tahun 2019, angka ini kembali mengalami peningkatan dan kembali stabil di tahun 2020 dengan besaran capaiannya sama yaitu 300 lapangan.

6) Jumlah Olahraga Berprestasi



Gambar 2.109 Jumlah Olahraga Berprestasi di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2019

(Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban, 2019)

Indikator yang keenam dari Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tuban yaitu jumlah olahraga berprestasi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kestabilan. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah olahraga berprestasi sebanyak 9 jenis. Angka ini stabil hingga tahun 2019.

I. Perhubungan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | IKM Pelayanan Bidang Perhubungan | Nilai | n/a | 75,60 (Baik) | 75,72 (Baik) | N/A | 81,86 (Baik) |
| 2. | Tingkat Kepadatan Lalu Lintas | Konstanta | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,51 | 0,52 |
| 3. | Cakupan Angkutan Umum per Desa | % | 33,84 | 34,76 | 35,67 | 36,89 | 37,50 |
| 4. | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/ Umum | % | 15 | 369 | 127 | 1 | -7 |
| 5. | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal -Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum | % | -2 | -93 | -60 | 97 | -51 |

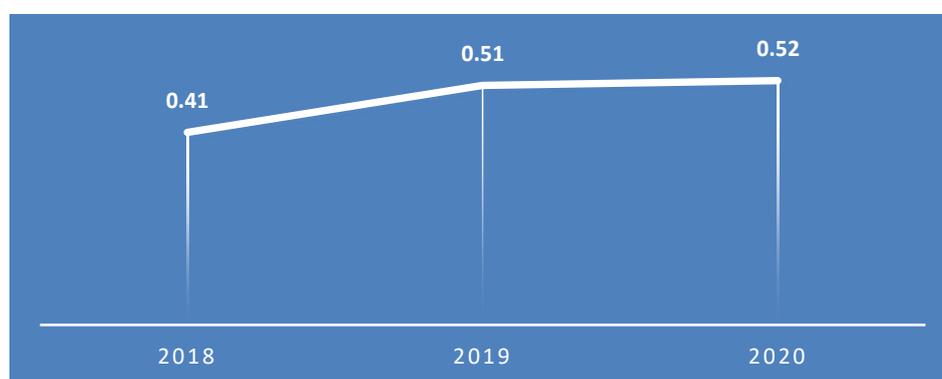
(Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, Tahun 2021)

1) **IKM Pelayanan Bidang Perhubungan**

Target indikator kinerja IKM pelayanan bidang Perhubungan pada tahun 2018 yang ditetapkan adalah baik. Sedangkan capaian indikator kinerja IKM pelayanan bidang Perhubungan yang dicapai pada tahun 2018 adalah cukup. Secara nilai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Pada tahun 2017 nilai IKM yang di dapatkan adalah sebesar 75,60 dengan kategori B, sedangkan pada tahun 2018 nilai yang di dapatkan sebesar 75,72 dengan kategori C. Nilai ini mulai mengalami perbaikan di tahun 2020 yaitu adanya peningkatan nilai IKM sebesar 81,86 dengan kategori B. Tercapainya IKM Pelayanan Umum Bidang Perhubungan, hal ini karena Dinas Perhubungan berkomitmen dan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja pelayanannya dengan menciptakan berbagai inovasi dan juga menyediakan sarana prasarana yang memadai.

2) **Tingkat Kepadatan Lalu Lintas**

Tingkat kepadatan lalu lintas yang diformulasikan dengan V/C ratio, V/C ratio merupakan perbandingan antara volume kendaraan di suatu ruas jalan dibagi dengan kapasitas jalan itu sendiri. Semakin besar angka V/C ratio semakin padat lalu lintas di jalan tersebut, dan sebaliknya semakin kecil angka V/C ratio semakin lengang jalan dan lancar lalu lintasnya. Kenaikan kepadatan lalu lintas pada tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat tajam karena penambahan jumlah sample survey dari 47 ruas jalan pada tahun 2016 – 2018 menjadi 58 ruas jalan pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yang ada di masyarakat namun tidak diikuti dengan penambahan ruas jalan pada perkotaan.

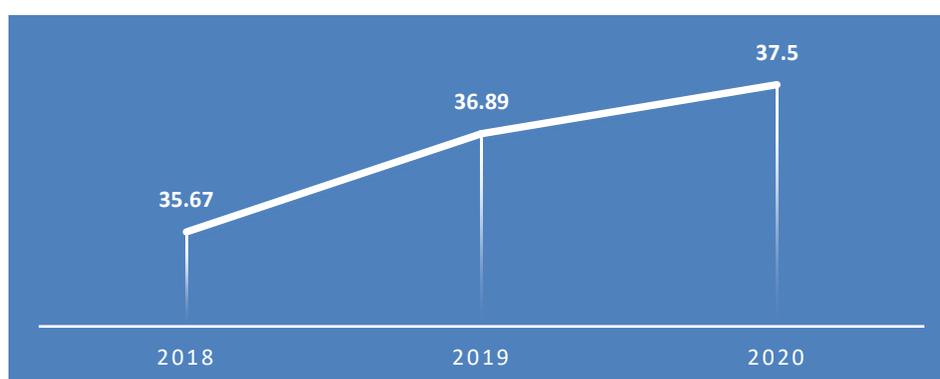


Gambar 2.110 Tingkat Kepadatan Lalu Lintas di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, 2020)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan lalu lintas di Kabupaten Tuban dari tahun 2018-2020 semakin meningkat. Tercapainya tingkat kepadatan lalu lintas ini didukung dengan adanya beberapa kegiatan seperti: Pengamanan, penertiban, pengawasan dan penindakan pelanggaran LLAJ; Survey/kajian pendataan dan perencanaan di bidang lalu lintas; Forum lalu lintas Kab. Tuban; Pengadaan alat perlengkapan jalan; serta Rehabilitasi/pemeliharaan alat perlengkapan jalan.

3) Cakupan Angkutan Umum per Desa

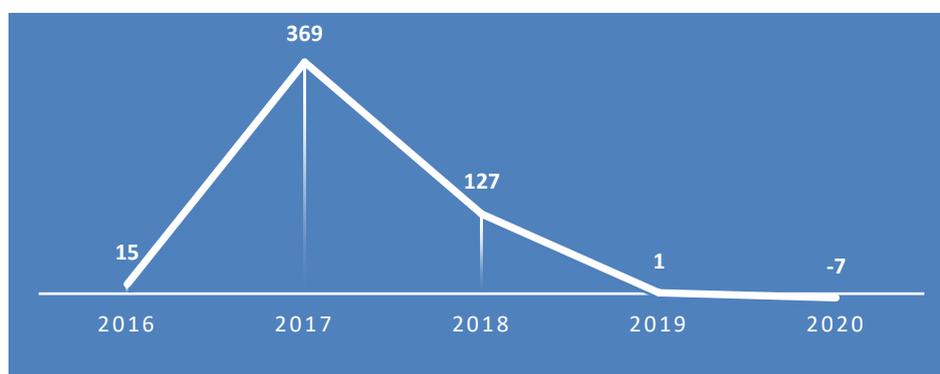


Gambar 2.111 Cakupan Angkutan Umum per Desa di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, 2020)

Target indikator kinerja cakupan angkutan umum per desa menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mencapai 35,67%. Kembali meningkat tahun 2019 sebesar 36,89% dan tahun 2020 sebesar 37,50%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah izin trayek yang diperpanjang sehingga mempengaruhi jumlah armada angkutan umum yang beroperasi.

4) Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/ Umum

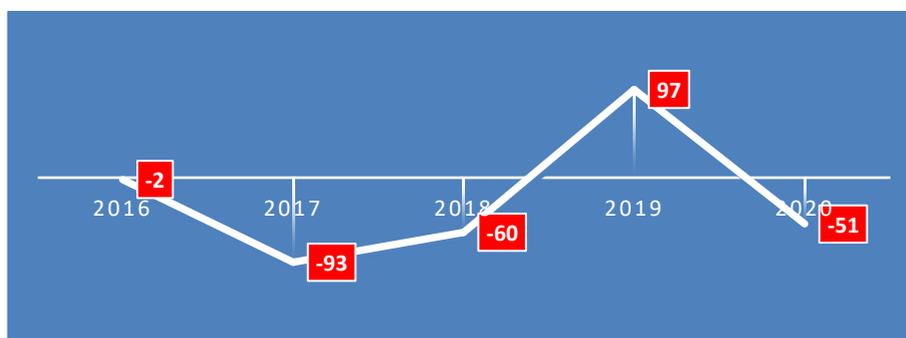


Gambar 2.112 Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/Umum di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan/Umum cenderung menurun. Pada tahun 2016 persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan/Umum mencapai 15%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 369%. Namun peningkatan ini tidak berlangsung lama, dikarenakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan dengan besaran masing-masing sebesar 127%, 1% dan -7%.

5) Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum



Gambar 2.113 Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, persentase peningkatan pendapatan retribusi terminal-tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum mencapai -2%. Pada tahun 2017 angka ini mengalami penurunan hingga mencapai -93%. Namun penurunan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2018 dan tahun 2019 angka ini mencapai -60% dan 97%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi -51%.

J. Pangan

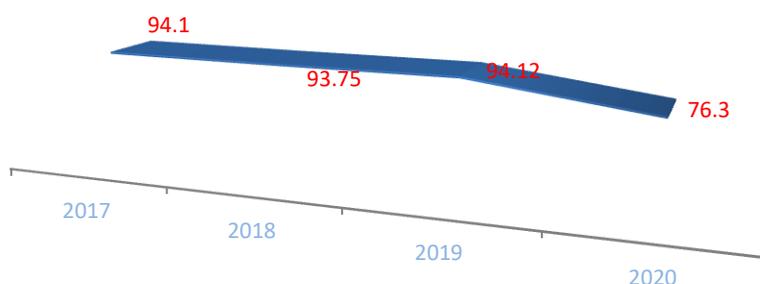
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.28 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tuban tahun 2017-2020**

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | |
|----|--|--------|-----------------|-------|-------|-------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase ketersediaan kebutuhan energy dan protein perkapita | % | 94,1 | 93,75 | 94,12 | 76.3 |
| 2. | Persentase cadangan pangan daerah | % | 52,2 | 62,4 | 74,8 | 63.66 |
| 3. | Persentase keamanan pangan | % | 93,4 | 91,75 | 96,4 | 96 |
| 4. | Skor pola pangan harapan | % | 82,6 | 83,1 | 84,2 | 82.4 |
| 5. | Penanganan daerah rawan pangan | % | 76,8 | 90,07 | 88,74 | 89.4 |
| 6. | Persentase peningkatan konsumsi energi per kapita per hari | % | 0 | 4.80 | 10 | 4.40 |
| 7. | Persentase peningkatan konsumsi protein per kapita per hari | % | 0 | 0.73 | 4.20 | -2.60 |
| 8. | Persentase infrastruktur pangan yang digunakan | % | 75 | 77,78 | 78,95 | 84,21 |
| 9. | Persentase desa tahan pangan | % | N/A | 61,28 | N/A | 75,3 |

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2021)

1) Persentase ketersediaan kebutuhan energy dan protein perkapita



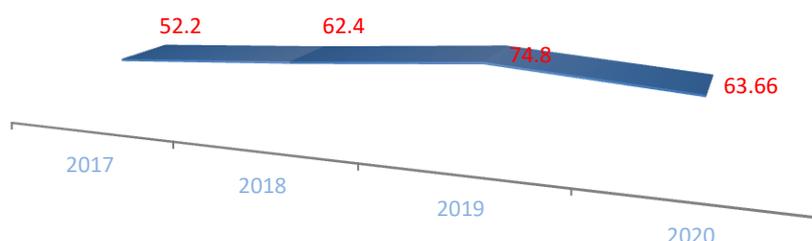
Gambar 2.114 Persentase Ketersediaan Kebutuhan Energi dan Protein di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Persentase ketersediaan kebutuhan energy dan protein yang ada di kabupaten Tuban mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2017 mencapai 94,1%. Kemudian pada tahun 2018 menjadi 93,75%. Untuk tahun 2019 mencapai 94,12%, dan pada tahun 2020 turun menjadi 76,3 %, pada tahun 2020 turun dikarenakan adanya perbedaan

cara penghitungan. Untuk tahun - tahun sebelumnya penghitungan dari unsur ekspor import hanya dilakukan pada komoditas tertentu, sedangkan tahun 2020 sudah dilakukan pada semua komoditas sehingga mempengaruhi hasil akhir

2) Persentase Cadangan Pangan Daerah

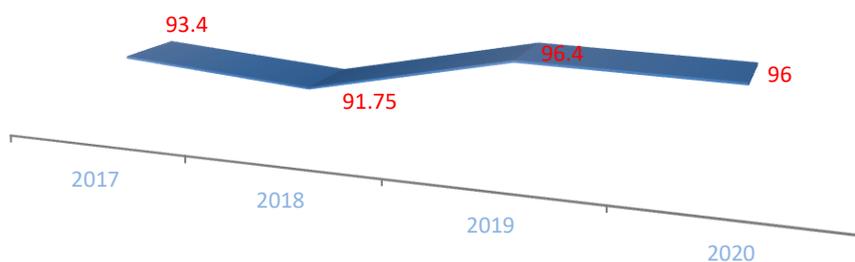


Gambar 2.115 Persentase Cadangan Pangan daerah di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase cadangan pangan daerah Kabupaten Tuban mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 angkanya mencapai 52,2% kemudian pada tahun 2018 menjadi 62,4% sedang capaian pada tahun 2019 mencapai 74,8% dan pada tahun 2020 mencapai 63.66%. penyebab turun pada tahun 2020 dikarenakan adanya perbedaan cara penghitungan. Untuk tahun - tahun sebelumnya penghitungan dari unsur ekspor import hanya dilakukan pada komoditas tertentu, sedangkan tahun 2020 sudah dilakukan pada semua komoditas sehingga mempengaruhi hasil akhir

3) Persentase Keamanan Pangan

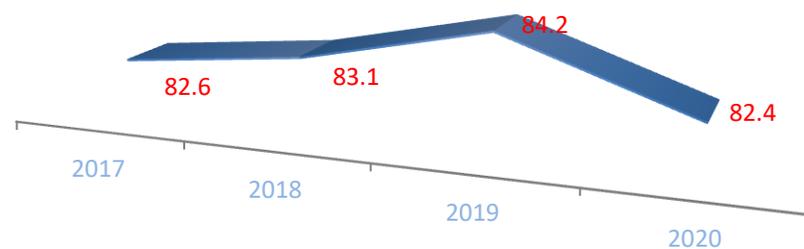


Gambar 2.116 Persentase Keamanan Pangan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Persentase keamanan pangan di Kabupaten Tuban setiap tahun mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2017 angkanya mencapai 93,4% kemudian tahun 2018 menjadi 91,75% sedangkan pada tahun 2019 mencapai 96,4% dan capaian pada tahun 2020 menurun menjadi 96% dikarenakan adanya perbedaan cara penghitungan. Untuk tahun - tahun sebelumnya penghitungan dari unsur ekspor import hanya dilakukan pada komoditas tertentu, sedangkan tahun 2020 sudah dilakukan pada semua komoditas sehingga mempengaruhi hasil akhir.

4) **Skor Pola Pangan Harapan**

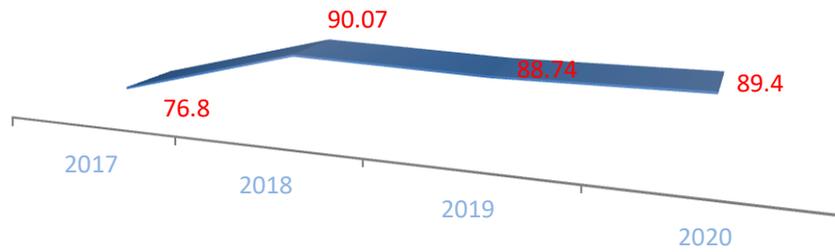


Gambar 2.117 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021)

Skor pola pangan harapan kabupaten Tuban mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 angkanya mencapai 82,6% dan pada tahun 2018 menjadi 83,1%. Kemudian pada tahun 2019 mencapai 84,2. Pada tahun 2020 capaian skor pangan harapan menurun menjadi 82.4 dikarenakan adanya perbedaan cara penghitungan. Untuk tahun - tahun sebelumnya penghitungan dari unsur ekspor import hanya dilakukan pada komoditas tertentu, sedangkan tahun 2020 sudah dilakukan pada semua komoditas sehingga mempengaruhi hasil akhir

5) **Penanganan Daerah Rawan Pangan**

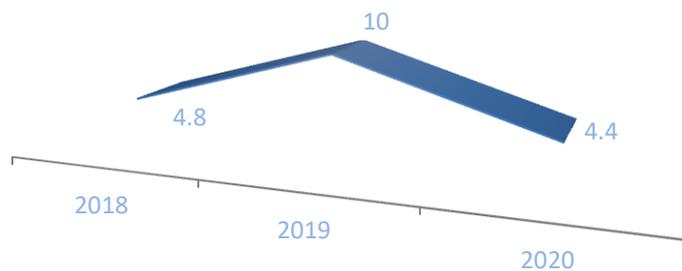


Gambar 2.118 Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2021)

Penanganan daerah rawan pangan yang ada di Kabupaten Tuban selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 penanganan yang dilaksanakan mencapai angka 76,8%. Kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 90,07% dan pada tahun 2019 mencapai 88,74%. Dan untuk tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 89.4%

6) **Persentase Peningkatan Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari**

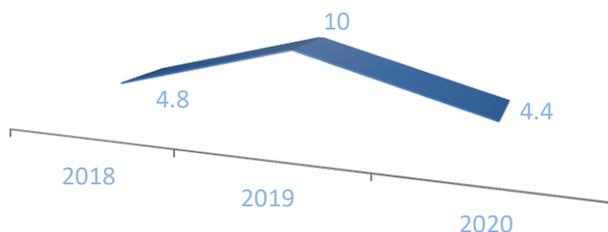


Gambar 2.119 Persentase Peningkatan Konsumsi Energi Per kapita per hari di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase peningkatan konsumsi energi per kapita per hari yang ada di Kabupaten Tuban selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2018 peningkatan konsumsi energi mencapai angka 4,8%. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 10% dan pada tahun 2020 mencapai 4.4%

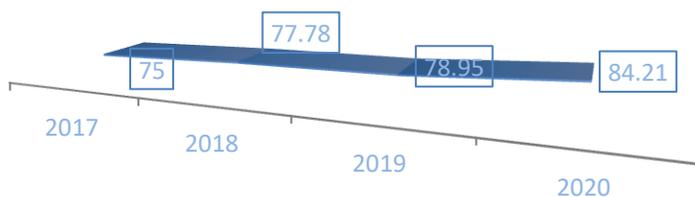
7) **Persentase peningkatan konsumsi protein per kapita per hari**



Gambar 2.120 Persentase peningkatan konsumsi energi per kapita per hari di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2020)

8) **Persentase Infrastruktur Pangan yang Digunakan**

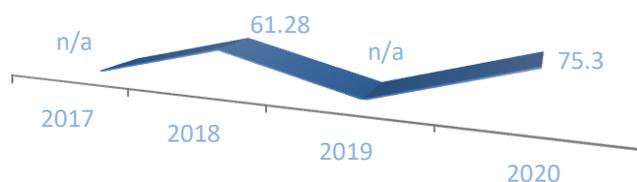


Gambar 2.121 Persentase Infrastruktur Pangan yang Digunakan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase infrastruktur pangan yang digunakan di Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan dengan besaran capaian masing-masingnya yaitu 75%, 77,78%, 78,95% dan 84,21%.

9) **Persentase Desa Tahan Pangan**

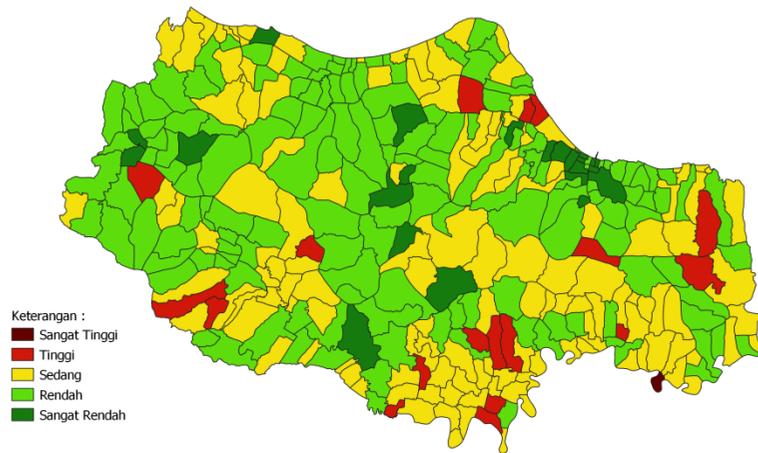


Gambar 2.122 Persentase Desa Tahan Pangan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2021)

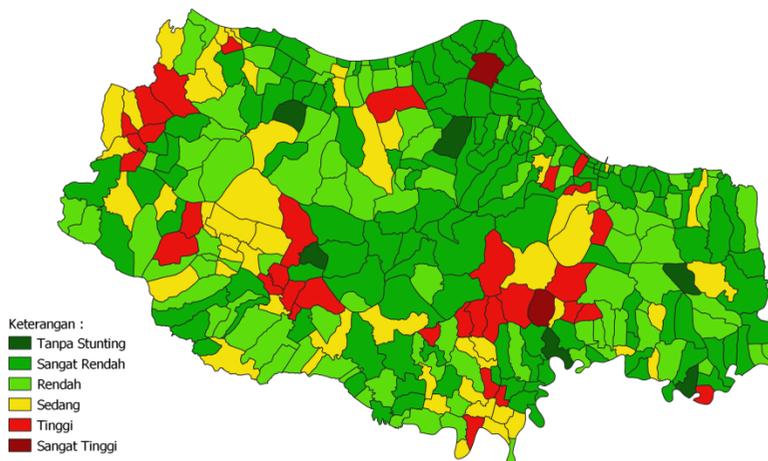
Persentase desa tahan pangan yang ada di Kabupaten Tuban hanya tersedia di tahun 2018 dan tahun 2020 dengan besaran masing-

masing sebesar 61,28% dan 75,3%. Hal ini dikarenakan pengukuran persentase desa tahan pangan dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban.



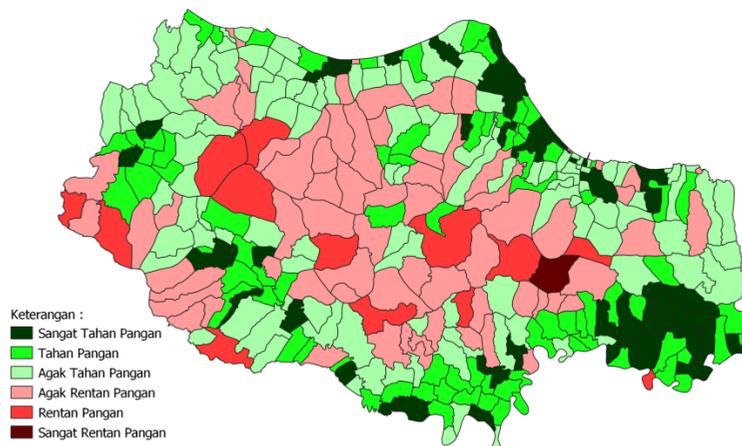
Gambar 2.123 Peta Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Tuban

(Sumber: Data Diolah Bappeda, 2021)



Gambar 2.124 Peta Sebaran Stunting di Kabupaten Tuban

(Sumber: Data Diolah Bappeda, 2021)



Gambar 2.125 Peta Sebaran Pangan di Kabupaten Tuban

(Sumber: Data Diolah Bappeda, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah wajib Menyusun Rencana Aksi Daerah – Pangan dan Gizi (RAD-PG), mengacu pada Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah – Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2025 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 154 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah – Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Tuban tahun 2021-2025, tertanggal 12 Oktober 2021.

K. Pertanian

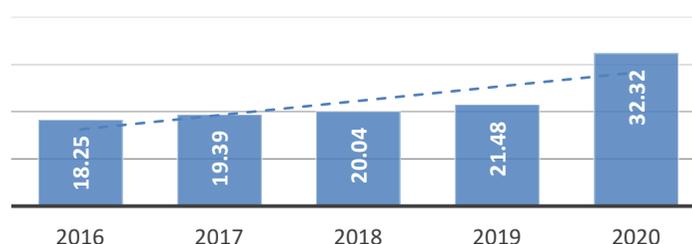
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.29 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2017-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat | % | 10.59 | 11.36 | 13.08 | 21.35 | 27.31 |
| 2. | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 11.83 | 12.08 | 12.43 | 13.04 | 14.21 |
| 3. | Penyelesaian kasus tanah Negara | % | 23.13 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Penyelesaian izin lokasi | % | 100 | 83.33 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | % | n/a | n/a | n/a | 100 | 100 |
| 6. | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal | % | n/a | n/a | n/a | 100 | 100 |
| 7. | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | % | n/a | n/a | n/a | 100 | 100 |

(Sumber : BPPKAD Kabupaten Tuban 2020)

1) Persentase Tanah Milik Daerah Yang Bersertifikat

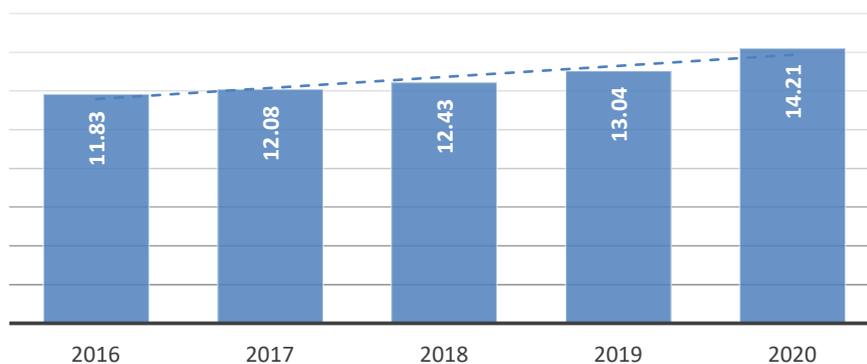


Gambar 2.126 Persentase Tanah Milik Daerah yang Bersertifikat di Kabupaten Tuban Tahun 201-2020

(Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase tanah milik daerah yang ada di Kabupaten Tuban sangat fluktuatif. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 18,25% kemudian pada tahun 2017 angkanya naik menjadi 19,39%. pada tahun 2018 mencapai 20,04%, untuk tahun 2019 pada angka 21.49%, dan tahun 2020 mencapai 32,32%.

2) Persentase luas lahan bersertifikat

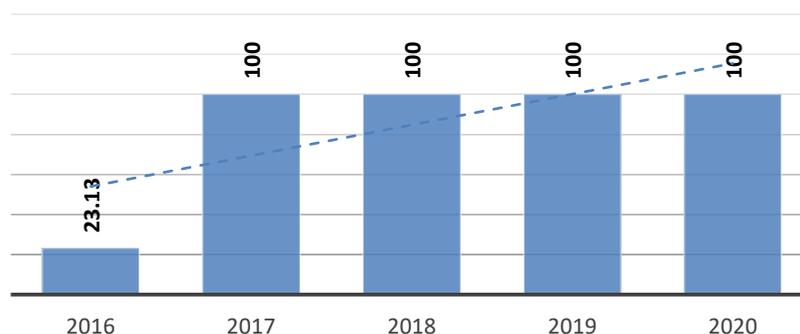


Gambar 2.127 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: BPPKAD, SETDA, dan Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 11,83% kemudian pada tahun 2017 angkanya naik menjadi 12,08%. pada tahun 2018 naik mencapai 12,43%, untuk tahun 2019 pada angka 13.04%, dan tahun 2020 mencapai 14,21%.

3) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

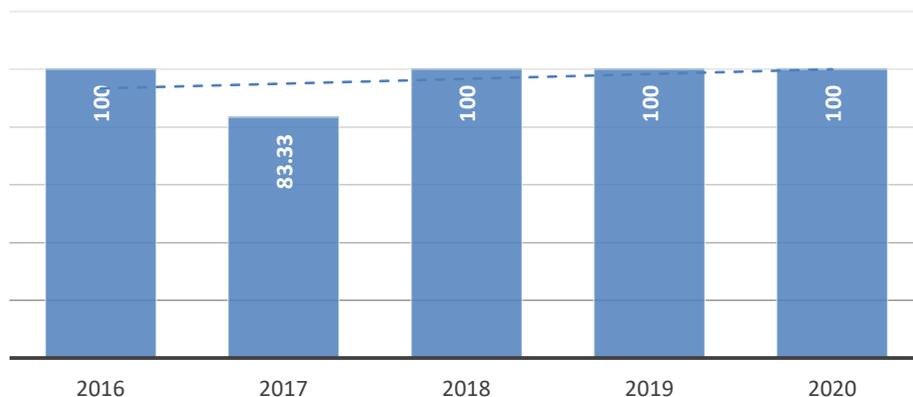


Gambar 2.128 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: BPPKAD, SETDA, dan Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Tuban sangat mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 23.13,83% kemudian pada tahun 2017 – 2020 capaiannya 100%.

4) Penyelesaian izin lokasi

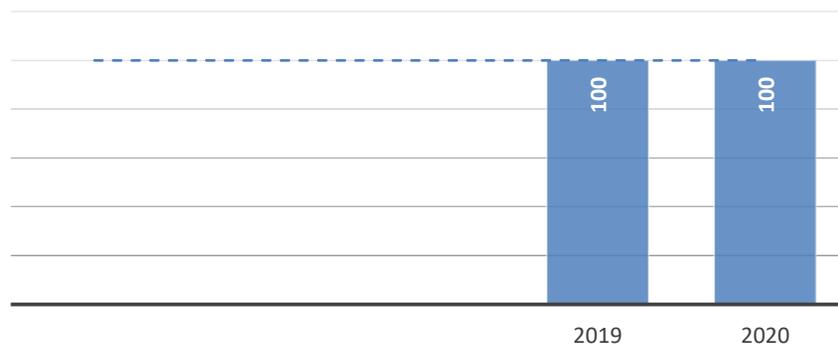


Gambar 2.129 Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: BPPKAD, SETDA, dan Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Tuban. Pada tahun 2016 angkanya mencapai 83,33% kemudian pada tahun 2017 – 2020 capaiannya 100%

5) Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan



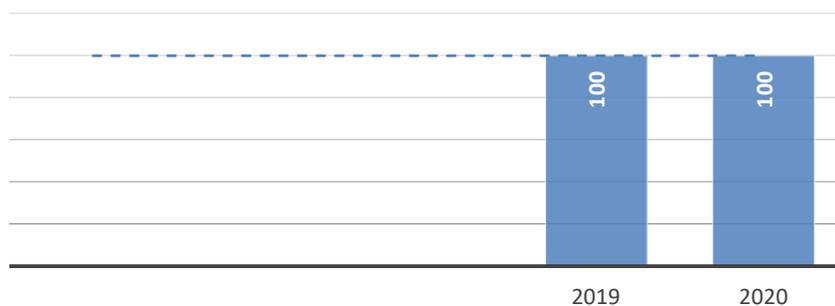
Gambar 2.130 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020

(Sumber: BPPKAD, SETDA, dan Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang

diterbitkan di Kabupaten Tuban. Pada tahun 2019 angkanya mencapai 100% kemudian pada tahun 2020 capaiannya 100%

6) Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

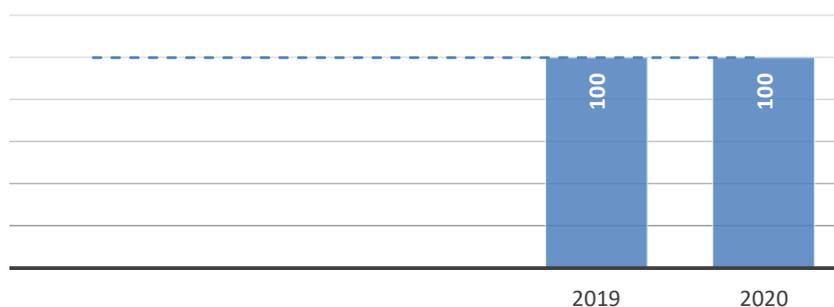


Gambar 2.131 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020

(Sumber: BPPKAD, SETDA, dan Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020 di Kabupaten Tuban. Pada tahun 2019 angkanya mencapai 100% kemudian pada tahun 2020 capaiannya 100%

7) Penangan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi



Gambar 2.133 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020

(Sumber: BPPKAD, SETDA, dan Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, 2020)

Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2020 di Kabupaten Tuban. Pada tahun 2019 angkanya mencapai 100% kemudian pada tahun 2020 capaiannya 100%.

L. Lingkungan Hidup

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

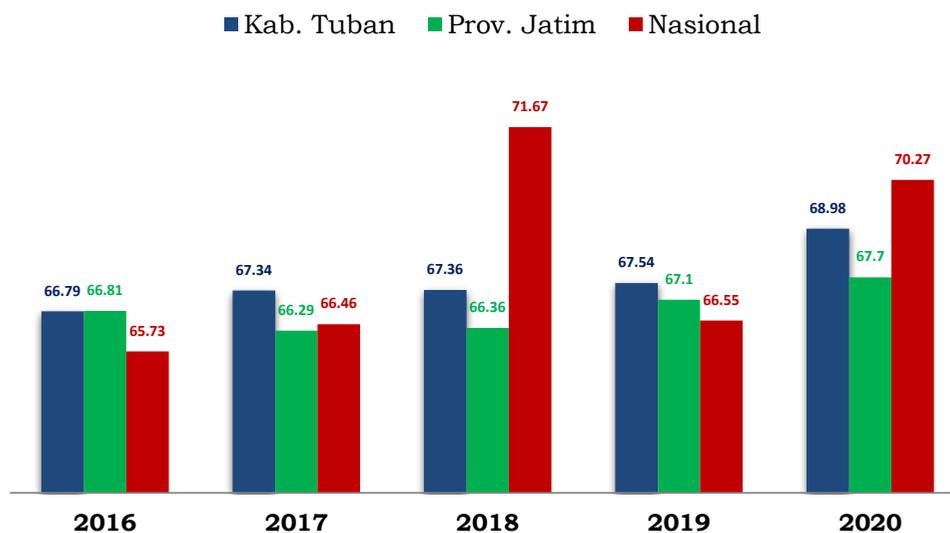
Tabel 2.30 Hasil Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | - | 66,79 | 67,34 | 67,36 | 67,54 | 68,98 |
| 2. | Indeks Kualitas Air (IKA) | - | 60 | 60,34 | 60,36 | 55,71 | 60,82 |
| 3. | Indeks Kualitas Udara (IKU) | - | 94,07 | 95,28 | 95,28 | 97,77 | 98,92 |
| 4. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | - | 51,44 | 51,65 | 51,65 | 53,76 | 52,64 |
| 5. | Persentase Penyelesaian Dokumen Lingkungan yang Diamanatkan PUU LH | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, 2021)

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH Kab Tuban, Prov. JATIM, Nasional 2016-2020



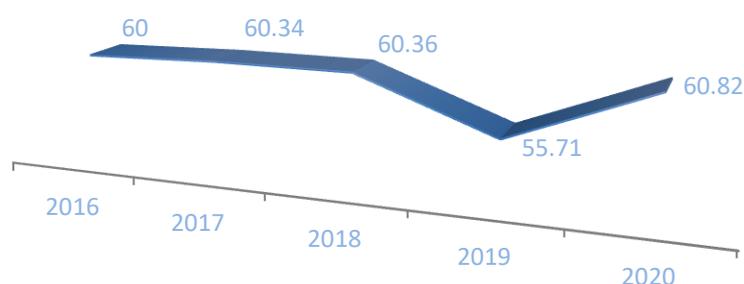
Gambar 2.134 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020

(Sumber: : Dinas Lingkungan Hidup, 2021)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada

waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) capaian IKLH Kabupaten Tuban tidak terlalu jauh dengan capaian nasional, dan masih diatas capaian Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Digambarkan diagram diatas.

2) Indeks Kualitas Air (IKA)



Gambar 2.135 Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

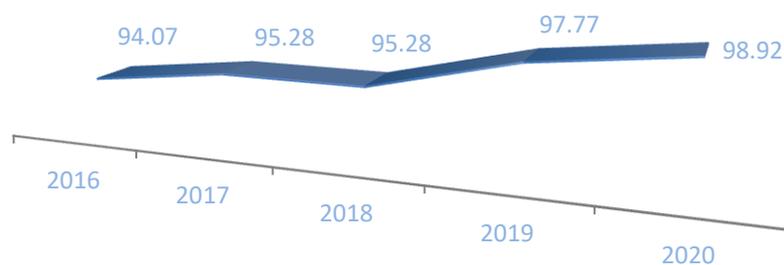
(Sumber: : Dinas Lingkungan Hidup, 2021)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Air yang ada di Kabupaten Tuban menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 60% mengalami peningkatan hingga 2018 menjadi 60,36%. Angka ini kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 55,71% dan kembali meningkat di tahun 2020 mencapai 60,82%.

Peningkatan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tuban ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

- Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair;
- Meningkatnya ketaatan perusahaan penghasil limbah cair;
- Meningkatnya jumlah komunitas peduli lingkungan/keompok masyarakat yang *concern* terhadap kualitas air sungai/sampah di sungai; dan
- Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2020 hal itu didukung oleh kegiatan Konservasi dan Upaya Edukasi pengelolaan sampah/limbah dari sumber penghasil baik di level masyarakat maupun di tingkat rumah tangga.

3) Indeks Kualitas Udara (IKU)



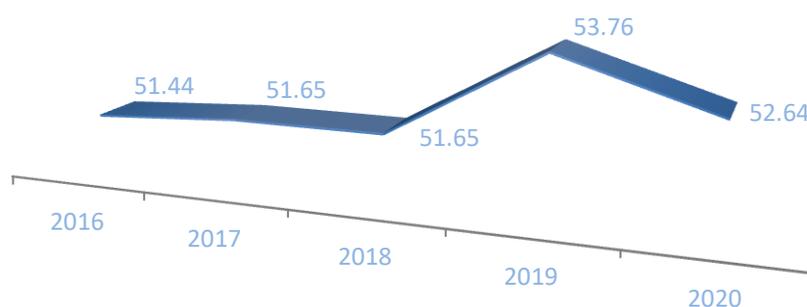
Gambar 2.136 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, 2021)

Indeks Kualitas Udara yang ada di Kabupaten Tuban selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 IKU mencapai 94,07%. Pada tahun 2017 dan 2018 capaian IKU sama yaitu 95,28%. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2020 mencapai 98,92%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara, serta meningkatnya ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi.

Pada tahun 2020 peningkatan IKU didukung oleh Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh OPD terkait serta meningkatnya kesadaran bersepeda (gowes) sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari.

4) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)



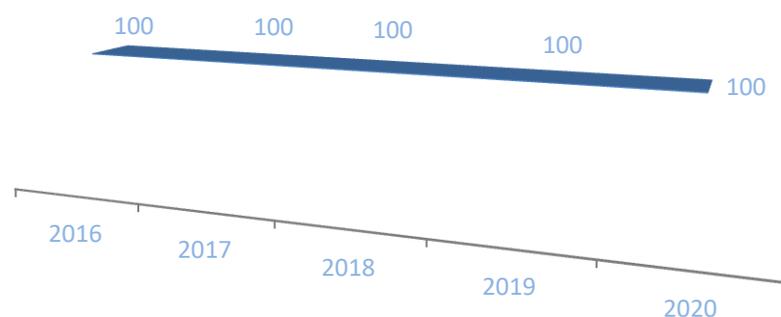
Gambar 2.137 Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, 2021)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Tuban menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 capaian IKTL sebesar 51,44%. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 besaran capaian IKTL sama yaitu 51,65%. Angka ini kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 53,76%, namun menurun di tahun 2020 mencapai 52,64%. Penyebab turunnya nilai IKTL adalah adanya penurunan tutupan belukar, hutan lahan kering sekunder, dan hutan tanaman yang cukup besar menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan campuran atau kebun campur, dan juga perubahan dari tutupan lahan hutan menjadi lahan terbangun. Dengan penurunan IKTL di tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya melalui instansi terkait berusaha untuk meningkatkan IKTL dengan melakukan penghijauan dengan melibatkan berbagai pihak, baik swasta/ perusahaan, kelompok masyarakat, dan pemerintah.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/MenLHK/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berwawasan lingkungan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diubah menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL). Selanjutnya untuk penetapan target IKLH pada tahun 2022 – 2026 unsur pendukungnya terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL)

5) Persentase Penyelesaian Dokumen Lingkungan yang Diamanatkan PUU LH



Gambar 2.138 Persentase Penyelesaian Dokumen Lingkungan yang Diamanatkan PUU LH di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase penyelesaian dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH di Kabupaten Tuban mencerminkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Persentase

penyelesaian dokumen lingkungan yang diamatkan PUU LH di Kabupaten Tuban secara berurutan sudah mencapai 100%.

M. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

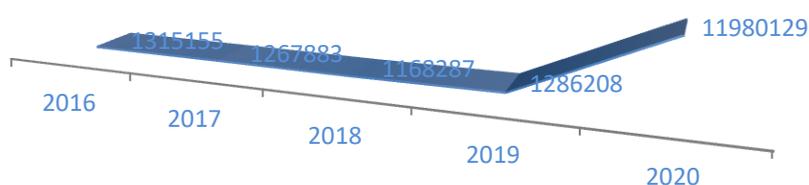
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Laju Pertumbuhan Penduduk Kab Tuban | Jumlah Penduduk | 1,315,155 | 1,267,883 | 1,168,287 | 1,286,208 | 1,198,012 |
| 2. | Tingkat Fertilitas Total (Total Fertility Rate) | Tingkat | 1,9 | 1,9 | 1,86 | 1,86 | 1,9 |
| 3. | Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | - | 72,65 | 74,28 | 74,72 | 74,19 | 74,93 |
| 4. | Unmet Need | - | 12,98 | 11,30 | 10,78 | 9,73 | 8,85 |
| 5. | ASFR | - | 31,87 | 31,87 | 17,27 | 41,23 | 40,63 |
| 6. | Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri | % | 8,5 | 12,0 | 13,0 | 18,0 | 21 |

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

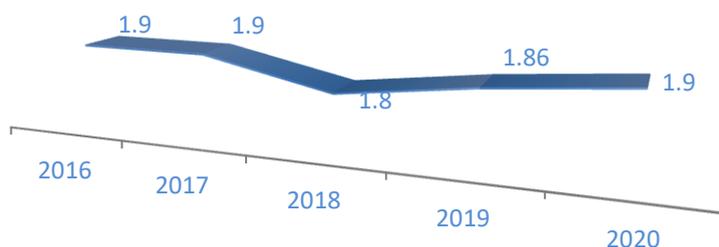


Gambar 2.139 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

Capaian laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan besaran capaian tahun 2020 sebesar 11.980.129 penduduk.

2) Total Fertility Rate (TFR)



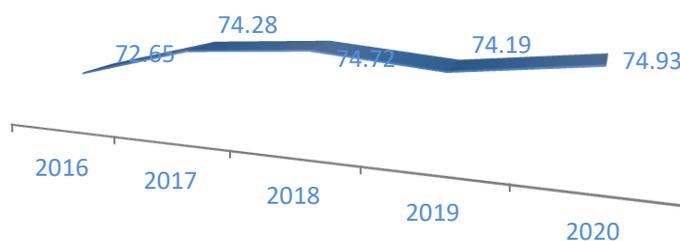
Gambar 2.140 Tingkat Fertilitas Total di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Fertilitas Total yang ada di Kabupaten Tuban sejak tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 hingga 2017 capaiannya konsisten yaitu sebesar 1,90%. Kemudian pada tahun 2018 angka ini menurun hingga 1,80% dan kembali meningkat di tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 1,86% dan 1,90%.

Total Fertility Rate (TFR) yaitu Taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia mereka pada saat sekarang. Pada 2020 ditargetkan TFR sebesar 1,86%. Artinya, diharapkan rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya di Kabupaten Tuban adalah 1,86 anak. Meskipun tidak mencapai target renstra, tetapi secara nasional, TFR Kabupaten Tuban sudah bagus, yaitu dibawah 2.

3) Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)



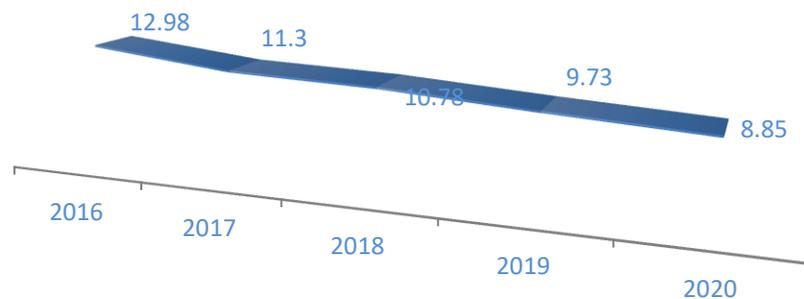
Gambar 2.141 Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

Target nasional mCPR pada tahun 2024 adalah sebesar 63,41. Dengan demikian, data mCPR di atas menunjukkan bahwa capaian mCPR Kabupaten Tuban mengalami tren positif (peningkatan) dalam

lima tahun terakhir (2016-2020) dan jauh lebih tinggi capaiannya daripada target nasional di Tahun 2024

4) Unmet Need KB

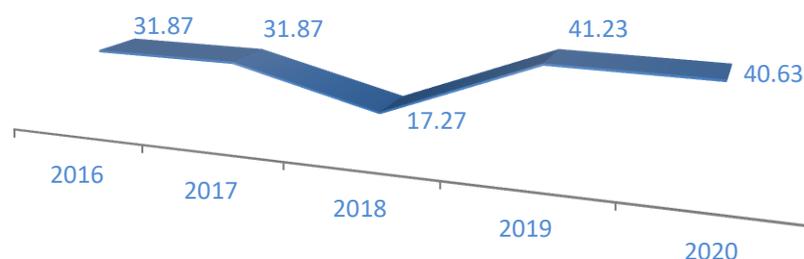


Gambar 2.142 Unmet Need KB di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

Tingginya angka unmet need KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran yang memicu terjadinya ledakan penduduk. Dari diagram di atas menunjukkan bahwa tren unmet need KB Kabupaten Tuban cenderung menurun (membaik), yang berarti bahwa pelayanan KB di Kabupaten Tuban semakin baik.

5) ASFR

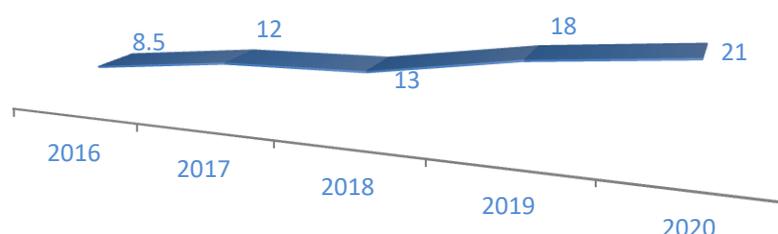


Gambar 2.143 Unmet Need KB di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

ASFR adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran pada wanita usia 15-19 tahun per 1000 kelahiran. Jadi ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.

6) Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri



Gambar 2.144 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan KB Kabupaten Tuban, 2021)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri yang ada di Kabupaten Tuban sejak tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 hingga 2020 besaran persentase desa siaga aktif Purnama Mandiri di Kabupaten Tuban secara berurutan sebesar 8,5%, 12%, 13%, 18% dan 21%.

N. Statistik

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32 Hasil Kinerja Bidang Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---------------------------------|---------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Buku "Kabupaten Dalam Angka" | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Buku "Kecamatan dalam Angka" | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator urusan Statistik di Kabupaten Tuban memiliki beberapa indikator berupa Buku diantaranya yaitu Buku Kabupaten dalam Angka, dan Buku Kecamatan dalam Angka. Saat ini sedang dirintis penyelenggaraan data sektoral melalui Portal satu data kabupaten sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019.

O. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33 Hasil Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2017-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | |
|----|---|--------|-----------------|------|------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Informasi | | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik |
| 2. | Cakupan Layanan sistem dan jaringan TIK | | 55 | 95 | 100 | 100 |
| 3. | Terintegrasinya sistem informasi di OPD | | N / A | 91 | 77,8 | 71,4 |

(Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban, 2020)

1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Informasi

Berdasarkan Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi selalu mendapatkan nilai yang baik, bahkan pada tahun 2020 sangat baik. Pencapaian ini didukung oleh:

- Persentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat;
- Persentase OPD yang memanfaatkan TIK untuk menunjang Administrasi Pembangunan;
- Cakupan pelayanan jaringan teknologi informatika;
- Persentase jumlah data yang tersandikan;
- Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi integrasi data; dan
- Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate.

2) Cakupan layanan sistem dan jaringan TIK

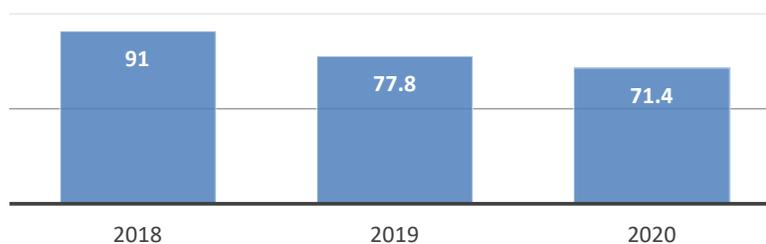


Gambar 2.145 Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban, 2020)

Cakupan layanan sistem dan jaringan TIK Kabupaten Tuban terus menaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sudah mencapai angka 55%, kemudian kembali meningkat menjadi angka 95% pada tahun 2018. Angka ini terus meningkat hingga 100% pada tahun 2019 dan 2020.

3) Terintegrasinya sistem informasi di OPD



Gambar 2.146 Terintegrasinya Sistem Informasi OPD di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020)

Terintegrasinya sistem informasi OPD merupakan salah satu indikator urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tuban. Terintegrasinya jaringan OPD di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, namun cenderung menurun. Pada tahun 2018 mencapai 91%, kemudian menurun tahun 2019 menjadi 77,8%. Angka ini terus menurun hingga tahun 2020 yaitu capaiannya hanya sebesar 71,4%.

P. Perpustakaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan | - | n/a | BAIK (80,44) | BAIK (80,44) | BAIK (84,74) | BAIK (83,70) |
| 2. | Jumlah pengunjung perpustakaan | orang | 215.099 | 597.930 | 531.117 | 596.587 | 48.389 |
| 3. | Persentase kecamatan yang terdapat perpustakaan umum (%) | % | 35% | 45% | 60 | 60 | 60 |
| 4. | Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku | % | 44 | 54 | 64 | 76 | 88 |
| 5. | Jumlah arsip in aktif / statis yang tertata | berkas | 51.915 | 51.354 | 48957 | 56797 | 36.068 |

(Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tuban, 2021)

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan

Nilai IKM terhadap Pelayanan Perpustakaan pada Tahun 2020 adalah Baik. Capaian ini memenuhi target yang ditetapkan sesuai hasil penghitungan IKM keseluruhan dari 12 Perpustakaan sebesar 83,70 dengan sub indikator : Koleksi, Fasilitas, SDM dan Layanan. Meskipun tercapai sesuai target akan tetapi jumlah penilaian IKM menurun dari tahun sebelumnya 84,74 hal ini karena pelayanan menyesuaikan kondisi di tengah pandemic covid-19.

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

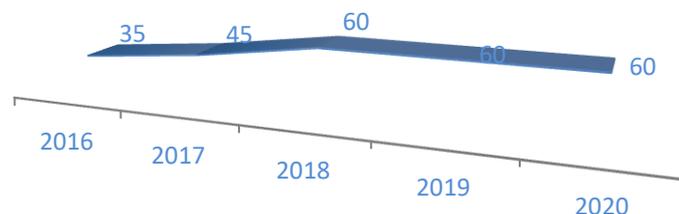


Gambar 2.147 Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tuban, 2021)

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Tuban selama tahun 2018 hingga 2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari 531.117 orang bertambah menjadi 596.587 orang. dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastic karena adanya covid 19 menjadi sebanyak 48.389 orang.

3) Persentase kecamatan yang memiliki perpustakaan umum



Gambar 2.148 Persentase Kecamatan yang memiliki perpustakaan umum di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase Kecamatan yang terdapat layanan perpustakaan umum sampai dengan akhir Desember 2020, Kecamatan yang Terdapat Perpustakaan Umum sejumlah 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tuban, Kecamatan Rengel, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Kerek, Kecamatan Jenu dan Kecamatan Widang, Kecamatan Palang, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Senori, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Semanding. Capaian ini berhenti mulai pada tahun 2019, penambahan 3 perpustakaan umum di kecamatan pada tiap tahunnya tidak terlaksana karena tidak adanya Anggaran dan terbatasnya SDM pengelola perpustakaan kecamatan.

Q. Kearsipan

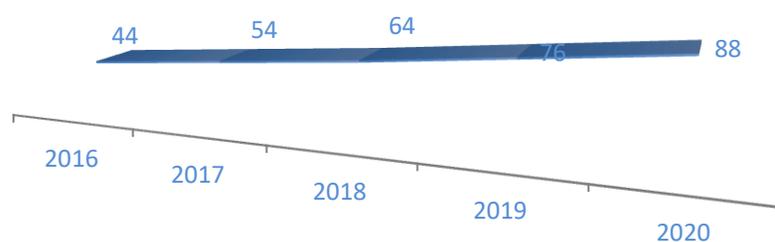
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku | % | 44 | 54 | 64 | 76 | 88 |
| 2. | Jumlah arsip inaktif/statis yang tertata | berkas | 51.915 | 51.354 | 48.957 | 56.797 | 36.068 |

(Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tuban, 2021)

1) Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku

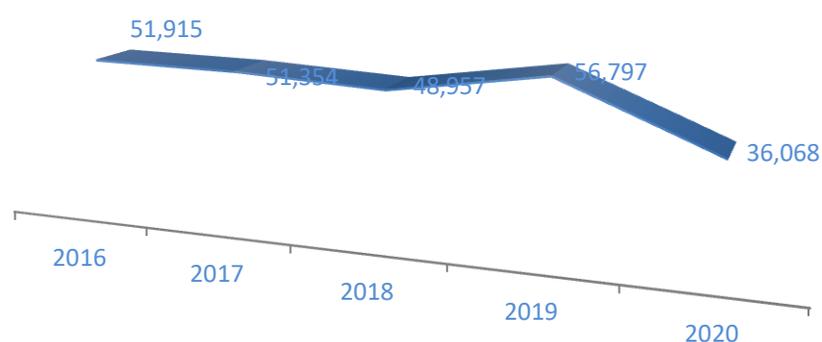


Gambar 2.149 Persentase OPD yang telah Melaksanakan sistem kearsipan sesuai dengan aturan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase OPD yang telah Melaksanakan sistem kearsipan sesuai dengan aturan selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2016 angkanya sebesar 44%, di tahun 2017 angkanya sebesar 54%, kemudian pada tahun 2018 menjadi 64%. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2020, persentase OPD yang melaksanakan sistem kearsipan mencapai 88% atau sebanyak 44 OPD.

2) Jumlah arsip inaktif/statis yang tertata



Gambar 2.146 Jumlah arsip inaktif/statis yang tertata di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tuban, 2021)

Jumlah arsip inaktif yang tertata di Kabupaten Tuban mengalami angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 51.354 buah dan pada tahun 2018 jumlahnya menurun menjadi 48.957 buah. Kemudian pada tahun 2019 jumlah meningkat mencapai 56.797 buah, dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 36.068 buah. capaian kinerja jumlah arsip inaktif /statis di tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan hal ini karena arsip dari OPD lain yang dikirim ke Lembaga Kearsipan dalam keadaan kacau serta keadaan arsip yang ditangani tiap tahunnya berbeda-beda sehingga hasil pengolahannya naik turun akan tetapi jika dibandingkan dengan target tiap tahunnya capaiannya melebihi target (target tiap tahun 48.000 berkas. Untuk tahun 2020 capaian turun karena karena adanya pandemic Covid-19 menjadikan sistem pengolahan arsip yang menyesuaikan dengan kondisi serta adanya refocusing anggaran di Bidang Kearsipan yang menjadikan kegiatan penunjang tidak dilaksanakan serta adanya tenaga pengolah yang berkurang karena dimutasi ke OPD lain.

3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, yaitu bidang urusan:

a. Pertanian

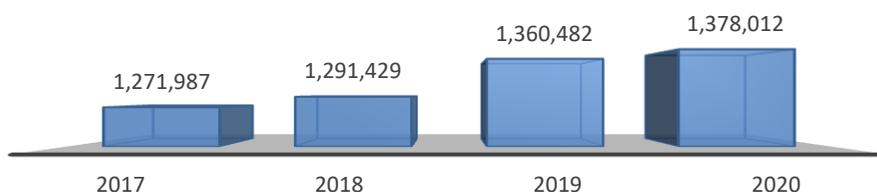
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.36 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2017-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | |
|----|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah produksi komoditas tanaman pangan | Ton | 1.271.987 | 1.250.347 | 1.360.482 | 1.378.012 |
| 2. | Jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan | Ton | 107.014 | 113.110 | 113.515 | 101.220 |
| 3. | Jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura | Ton | 28.684 | 65.614 | 39.527 | 60.905,50 |
| 4. | Pendapatan bruto petani | Rp/kap/Thn | 33.383.920 | 36.914.332 | 38.263.129 | 41.820.770 |
| 5. | Persentase kenaikan kelas kelompok tani | % | 7 | 4 | 15 | 2,15 |
| 6. | Persentase sarana pertanian yang digunakan | % | 95,41 | 97,43 | 97,32 | 96,61 |
| 7. | Persentase Prasarana Pertanian yang digunakan | % | 73,9 | 72,5 | 52,8 | 36,22 |

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2021)

1) Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan



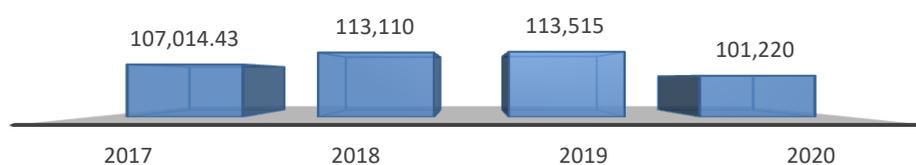
Gambar 2.151 Capaian Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2020)

Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan merupakan salah satu indikator urusan Pertanian di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah produksi komoditas tanaman pangan mencapai 1.271.987 ton. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu menjadi 1.291.429 ton. Sementara pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai 1.360.482 ton. Angka ini terus meningkat di tahun 2020 hingga mencapai 1.378.012 ton. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa target produksi tanaman pangan pada tahun 2020 telah terlampaui sebesar 235.864 ton (meningkat 20,7%).

2) Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan

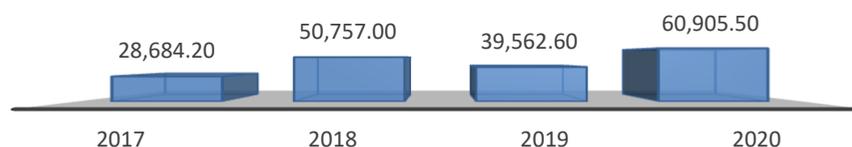


Gambar 2.152 Capaian Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2020)

Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan merupakan salah satu indikator urusan Pertanian di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan mencapai 107.014,43 ton. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu menjadi 113.110 ton dan semakin meningkat tahun 2019 yaitu mencapai 119.205,03 ton. Namun pencapaian jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan tahun 2020 menurun hingga 101.220 ton.

3) Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Holtikultura

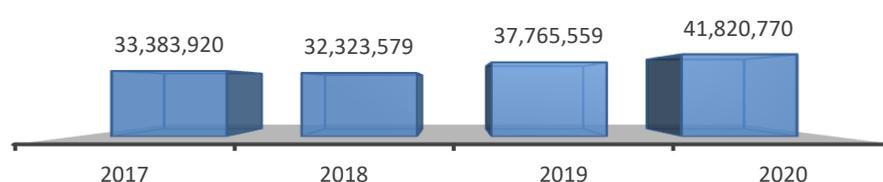


Gambar 2. 153 Capaian Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Holtikultura di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tuban 2020)

Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan merupakan salah satu indikator urusan Pertanian di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura mencapai 28.684,20 ton. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 50.757,00 ton. Sementara pada tahun 2019 jumlah produksi menurun hanya mencapai 39.562,60 ton. Angka ini kemudian meningkat signifikan di tahun 2020 yaitu mencapai 60.905,50 ton.

4) Pendapatan Bruto Petani

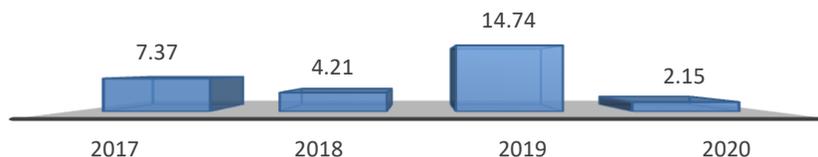


Gambar 2.154 Capaian Pendapatan Bruto Petani di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2020)

Pendapatan Bruto Petani dihitung dari jumlah produksi dikalikan dengan harga per komoditas dibagi dengan jumlah petani. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 pendapatan bruto petani mengalami kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 pendapatan bruto petani mencapai Rp 33.383.920,- kapita/tahun, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 32.323.579,- kapita/tahun. Pada tahun 2019 pendapatan bruto petani mulai mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 37.765.559,- kapita/tahun. Angka ini terus meningkat selama tahun 2020 yaitu mencapai 41.820.770,- kapita/tahun. Penghitungan Pendapatan Bruto Petani yang dilakukan hanya sebatas pada jenis komoditas yang masuk pada Indikator Kinerja Utama yaitu komoditas padi, jagung, kacang tanah, tebu, tembakau, kelapa, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, belimbing, jeruk, dan jambu biji.

5) Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Petani

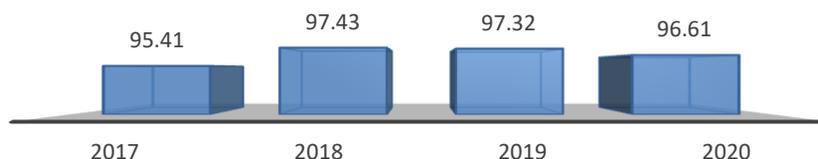


Gambar 2.155 Capaian Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Petani di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Petani merupakan salah satu indikator urusan Pertanian di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 Persentase kenaikan kelas kelompok petani mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 Persentase kenaikan kelas kelompok petani mencapai 7,37%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi 4,21%. Sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu mencapai 14,74%. Dan di tahun 2020 meningkat sebesar 2,15%.

6) Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan

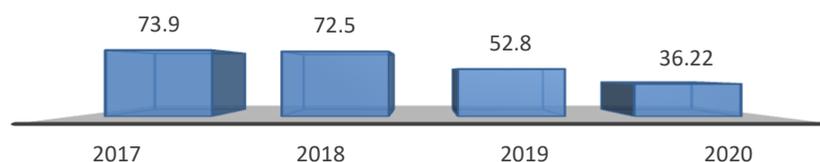


Gambar 2.152 Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan merupakan salah satu indikator urusan Pertanian di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 Persentase sarana pertanian yang Digunakan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, persentase sarana pertanian yang Digunakan mencapai 95,41%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu menjadi 97,43%. Namun peningkatan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2019 sampai 2020 terus mengalami penurunan dengan capaian masing-masing sebesar 97,32% dan 96,61%.

7) Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan



Gambar 2.157 Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan merupakan salah satu indikator urusan Pertanian di Kabupaten Tuban. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Persentase prasarana pertanian yang digunakan mengalami penurunan dengan besaran masing-masing capaian secara berurutan yaitu 73,9%, 72,5%, 52,8% dan 36,22%.

b. Pariwisata

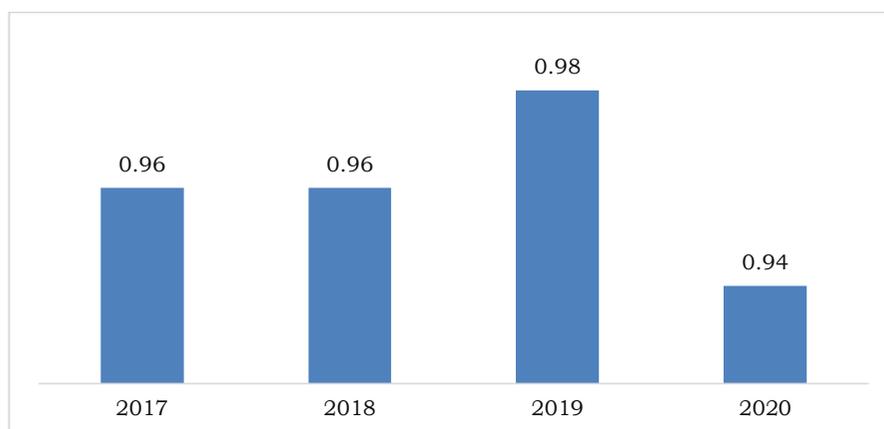
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.37 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | % | n/a | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.94 |
| 2. | Jumlah kunjungan wisatawan lokal di Kabupaten Tuban | Orang | 5,108,295 | 5,699,800 | 6,965,561 | 7,033,690 | 2,836,562 |
| 4 | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Tuban | Orang | 385 | 604 | 774 | 446 | 283 |
| 5. | Long Stay / waktu lama tinggal wisatawan | hari | n/a | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 6. | Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata | % | n/a | 3% | 5% | 7% | 10% |
| 7. | Jumlah pokdawis | pokdar wis | n/a | 0 | 11 | 20 | 31 |

(Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban, 2021)

1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

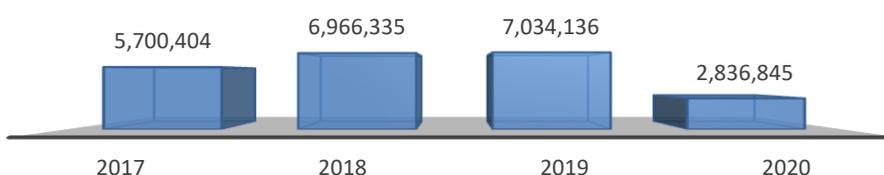


Gambar 2.158 Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban 2021)

Kontribusi Sektor Pariwisata merupakan salah satu indikator yang menggambarkan urusan Pariwisata di Kabupaten Tuban. Dapat dilihat pada gambar bahwa kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Tuban selama tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan yaitu dari 0,98% menjadi 0,96%, dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 1,17%.

2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara di Kabupaten Tuban



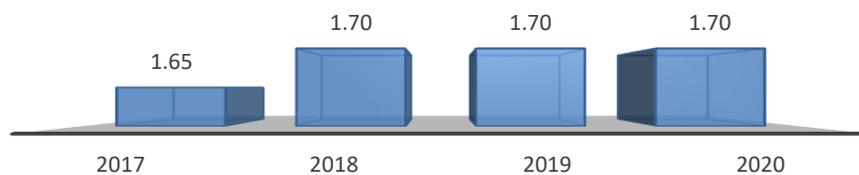
Gambar 2.159 Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban 2021)

Dapat dilihat pada gambar bahwa jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara di Kabupaten Tuban dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan sebanyak 5.700.404 orang. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu mencapai 6.966.335 orang. Angka ini terus meningkat selama tahun 2019 hingga mencapai 7.034.136 orang, namun di tahun

2020 menurun signifikan yaitu hanya mencapai 2.836.845 orang wisatawan. Sektor pariwisata di Tahun 2020 mengalami penurunan sangat drastis dimana menjadi salah satu yang paling merasakan dampak langsung dari adanya pandemi Covid-19. Di tahun 2020 ini penutupan obyek wisata di Tuban mulai bulan Maret – Juli, selain itu adanya pembatasan pengunjung yang hanya 50% dari kapasitas obyek wisata berdampak melemahkan perekonomian di sektor pariwisata. Penurunan jumlah pengunjung dibarengi dengan penurunan target pendapatan Asli Daerah namun Dinas Pariwisata kebudayaan Pemuda dan Olahraga tetap berupaya sebaik mungkin.

3) *Long Stay/waktu lama tinggal wisatawan*

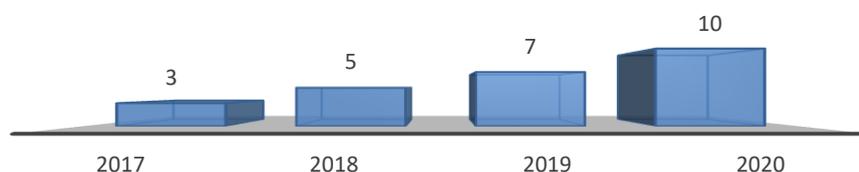


Gambar 2.160 Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban 2021)

Dapat dilihat pada gambar bahwa *Long Stay/waktu lama tinggal* wisatawan di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dan cenderung stabil selama tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2017 mencapai 1,65 hari. Pada tahun 2018 meningkat yaitu selama 1,70 hari. Angka ini stabil hingga tahun 2020 yaitu 1,70 hari.

4) *Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata*



Gambar 2.161 Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Tuban 2021)

Dari grafik yang ditampilkan terlihat bahwa terjadi kenaikan di setiap tahun. Pada tahun pertama yaitu tahun 2017 dimulai dengan 3% lalu mengalami peningkatan di tahun selanjutnya sebesar 5% dan peningkatan terus terjadi sehingga di tahun 2020 peningkatannya mencapai 10%.

c. Kelautan dan Perikanan

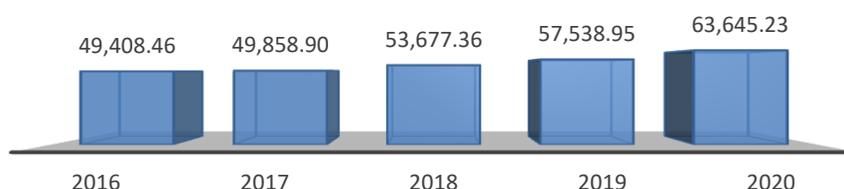
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.38 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020**

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah produksi perikanan | Ton | 49.408,46 | 49.858,90 | 53.677,36 | 57.538,95 | 63.645,23 |
| 2. | Jumlah produksi olahan hasil perikanan | Ton | N/A | 45.352,930 | 39.357 | 47.056,81 | 34.738,09 |
| 3. | Jumlah konsumsi ikan | Kg / kapita / tahun | 32,93 | 35,4 | 37,97 | 38,8 | 40,67 |
| 4. | Jumlah produksi peternakan | Ekor | N/A | 16.692.395 | 17.108.512 | 17.537.672 | 17.605.232 |
| 5. | Tingkat konsumsi protein hewani | Kg / kapita / tahun | N/A | 3,39 | 3,42 | 3,53 | 0* |

(Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan, 2021)

1) Jumlah Produksi Perikanan



**Gambar 2.162 Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Tuban
Tahun 2016-2020**

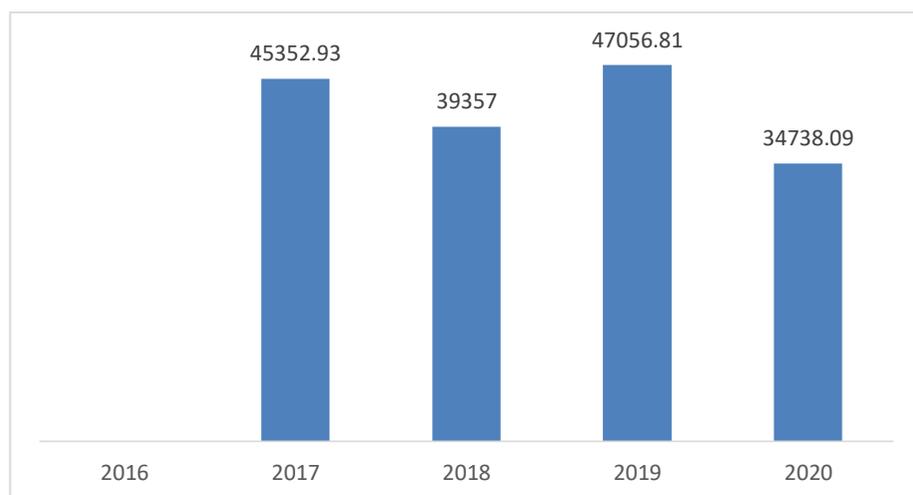
(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, 2020)

Dapat dilihat pada gambar bahwa jumlah produksi perikanan di Kabupaten Tuban dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 jumlah produksi mencapai 49.408,46 ton. Tahun 2017 jumlah produksi mengalami peningkatan yaitu mencapai 49.858,90 ton, tahun 2018 meningkat hingga 53.677,36 ton, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan mencapai 57.538,95 ton. Angka ini meningkat di tahun 2020 yaitu mencapai 63.645,23 ton.

Peningkatan produksi ini didukung dengan adanya program dan kegiatan yang menunjang peningkatan produksi, seperti pembangunan pada Tempat Pelelangan Ikan, penyediaan sarana dan prasarana TPI, Bantuan sarana (kapal dan mesin) dan alat penangkap ikan ramah lingkungan, Bantuan Benih dan sarana produksi budidaya ikan. Selain itu juga didukung oleh faktor dan angin yang masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan dan meningkatnya jumlah kapal yang berlabuh di pangkalan pendaratan ikan. Terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah perairan di pantura juga disebabkan oleh adanya kegiatan konservasi perairan seperti pemberian rumah ikan, fish apartemen yang dapat membuat ikan lebih banyak bergerombol di sekitar daerah tersebut

2) Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan



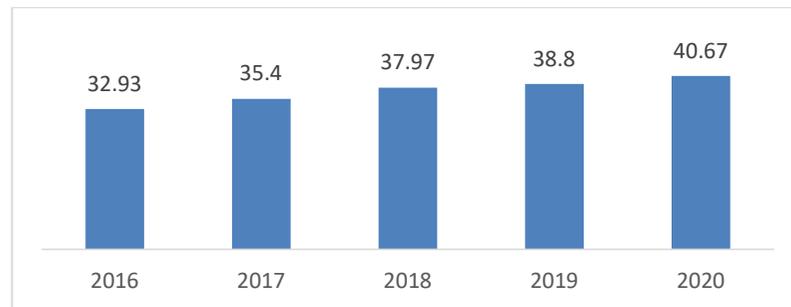
Gambar 2.163 Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, 2020)

Dapat dilihat pada gambar bahwa Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2017 sampai dengan 2020 bergerak secara fluktuatif. Data jumlah produksi olahan hasil perikanan di tahun 2016 tidak tersedia dikarenakan indikator tersebut baru dilaksanakan di tahun 2017. Jumlah produksi olahan hasil perikanan di tahun tahun 2017 mencapai 45.352,93 ton. Lalu pada tahun 2018

Jumlah produksi olahan hasil perikanan mengalami penurunan menjadi 39.357 ton. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan mencapai 47.056,81 ton. Namun peningkatan ini tidak berlangsung lama, dikarenakan pada tahun 2020 jumlah produksi olahan hasil perikanan kembali mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 34.738,09 ton.

3) Jumlah Konsumsi Ikan

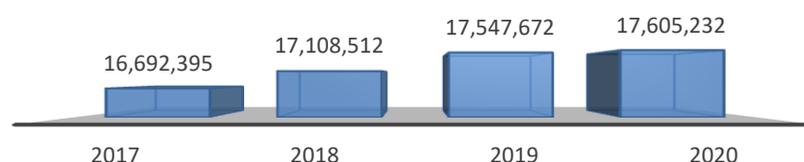


Gambar 2.164 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, 2020)

Jumlah Konsumsi Ikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tuban. Dapat dilihat pada gambar bahwa Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Tuban dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 jumlah konsumsi ikan mencapai angka 32,93 kg/kapita/tahun. Lalu pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai 35,4 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2018 Jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Tuban kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai 37,97 kg/kapita/tahun. Dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 38,8 kg/kapita/tahun. Di tahun 2020 sebesar 40,67 kg/kapita/tahun.

4) Jumlah Produksi Peternakan

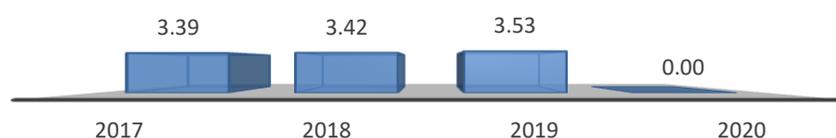


Gambar 2.165 Jumlah Produksi Peternakan di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, 2020)

Dapat dilihat pada gambar bahwa Jumlah Produksi Peternakan di Kabupaten Tuban dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2017 jumlah produksi peternakan mencapai 16.692.395 ekor. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan mencapai 17.108.512 ekor dan tahun 2019 kembali meningkat hingga 17.547.672 ekor. Angka ini terus meningkat di tahun 2020 hingga mencapai 17.605.232 ekor. Meskipun jumlah produksi peternakan tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum bias memenuhi target. Hal ini belum dapat dicapai karena adanya dampak dari pandemi covid-19. Pasalnya penyumbang populasi ternak terbanyak adalah komoditas unggas, beberapa bulan awal covid-19 masyarakat banyak yang takut untuk pergi ke pasar dan menyebabkan permintaan turun, serta berpengaruh pada stok daging, sehingga banyak peternak yang mengurangi produksi ternaknya.

5) **Tingkat konsumsi protein hewani**



Gambar 2.166 Tingkat Konsumsi Protein Hewani di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, 2020)

Dapat dilihat pada gambar bahwa tingkat konsumsi protein hewani di Kabupaten Tuban dari tahun 2017 hingga 2019 selalu meningkat. Tingkat konsumsi di tahun 2017 sebesar 3,39% kg/kapita/tahun. Pada tahun 2018 meningkat mencapai 3,42 kg/kapita/tahun, hingga tahun 2019 mencapai 3,53 kg/kapita/tahun.

d. Perdagangan

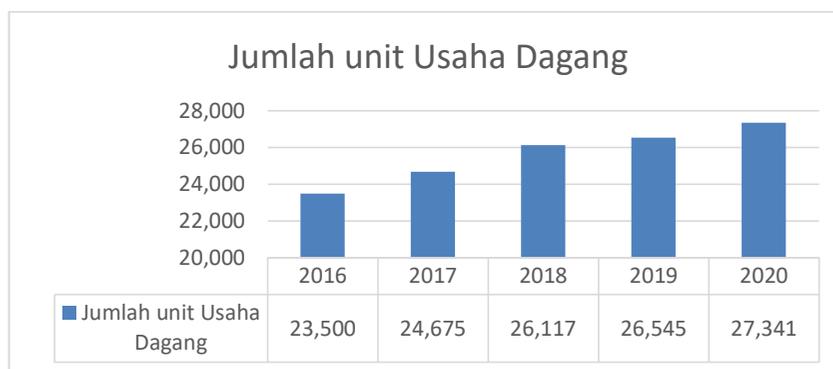
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018-2020

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah unit Usaha Dagang | Unit | 23.500 | 24.675 | 26.177 | 26.545 | 27.341 |
| 2. | Jumlah omset usaha sektor perdagangan | triliun rupiah | 12,690 | 13,545 | 14,130 | 14,323 | 14,432 |
| 3. | Tingkat stabilitas harga 22 bahan pokok masyarakat < 13 persen | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2021)

1) Jumlah Unit Usaha Dagang

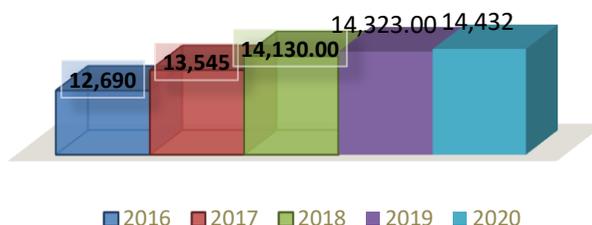


Gambar 2.167 Capaian Jumlah Unit Usaha Dagang di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2021)

Dapat diketahui bahwa indikator urusan perdagangan di Kabupaten Tuban yaitu Jumlah Unit Usaha Dagang. Pada tahun 2016 jumlah unit usaha dagang di Kabupaten Tuban adalah 23.500 unit mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu mencapai 24.675 unit. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 26.177 unit, dan 2019 mencapai 26.545. sedangkan pada tahun 2020 mencapai 27.341.

2) Jumlah Omset Usaha Sektor Perdagangan

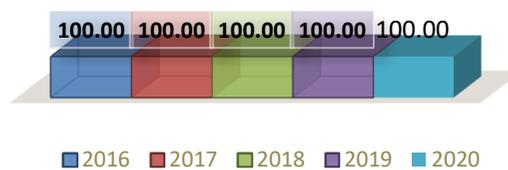


Gambar 2.168 Capaian Jumlah Omset Usaha Sektor Perdagangan di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2021)

Dapat diketahui dari gambar bahwa indikator urusan perdagangan di Kabupaten Tuban yaitu Jumlah Omset Usaha Sektor Perdagangan. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Jumlah Omset Usaha Sektor Perdagangan 12.690 Trilyun Rupiah. Pada tahun 2017 Jumlah Omset Usaha Sektor Perdagangan di Kabupaten Tuban sebesar 13,545 Triliun Rupiah. Pada tahun 2018 jumlah Omset Usaha Dagang di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yaitu mencapai 14,130 Triliun Rupiah. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 14,323 Triliun Rupiah. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 14,432 Triliun Rupiah. Pertumbuhan Jumlah Omset Usaha Sektor Perdagangan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan menjadi 1 % dikarenakan antara lain dampak pandemi covid-19.

3) Tingkat Stabilitas harga 22 bahan pokok masyarakat



Gambar 2.169 Capaian Tingkat Stabilitas Harga 22 Bahan Pokok Masyarakat di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2020)

Dapat diketahui dari gambar bahwa indikator urusan perdagangan di Kabupaten Tuban yaitu Tingkat Stabilitas harga 22 bahan pokok masyarakat. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kestabilan harga bahan pokok. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu Persentase Tingkat Stabilitas Harga 22 Bahan Pokok masyarakat di Kabupaten Tuban mengalami kestabilan yaitu mencapai 100%.

e. Perindustrian

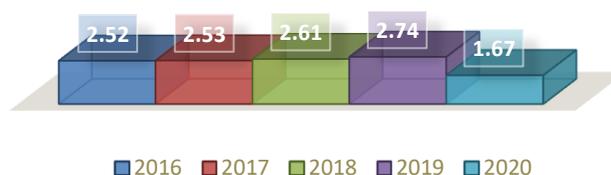
Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.40 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Pemerintah
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020**

| No | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah | % | 2,52 | 2,53 | 2,61 | 2,74 | 1,67 |
| 2. | Persentase unit usaha IKM yang meningkat skala usahanya | % | 0,34 | 0,34 | 0,66 | 1,03 | 1,13 |

(Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2021)

1) Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

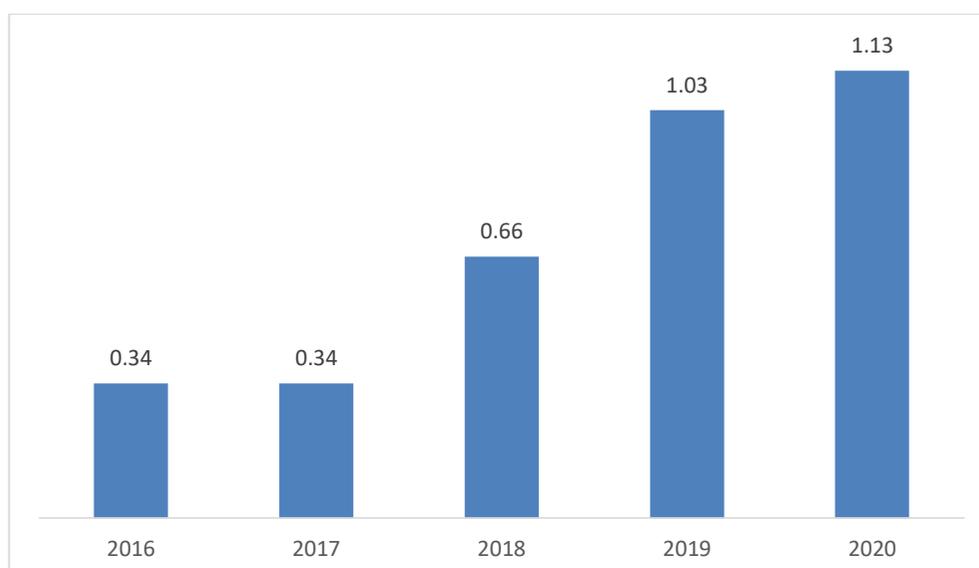


**Gambar 2.170 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di
Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020**

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2021)

Indikator mengenai Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tuban Tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 mencapai angka 2,52 %. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 2,53 %. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,61 %. Pada tahun 2019 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil di Kabupaten Tuban kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 2,74 %. Dan di tahun 2020 meningkat lagi sebesar 1,67%

2) Persentase unit usaha IKM yang meningkat skala usahanya



Gambar 2.171 Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkatkan Skala Usahanya di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2021)

Indikator berikutnya mengenai perindustrian adalah mengenai Persentase Unit Usaha IKM yang meningkat skala usahanya di Kabupaten Tuban. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 Persentase Unit Usaha IKM di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 dan 2017 mencapai 0,34 %. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu mencapai angka 0,66 %. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu mencapai 1,03 %. Di tahun 2020 meningkat sebesar 1,13%.

4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

Analisis kinerja atas layanan penunjang urusan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, yaitu bidang urusan:

a. Perencanaan Pembangunan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.41 Hasil Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020**

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Nilai AKIP Bappeda | Indeks | n/a | n/a | 77,10 | 78,68 | 80,29 |
| 2. | Persentase OPD dengan kualitas dokumen perencanaan yang baik (%) | % | n/a | 84,00 | 73,08 | 84,00 | 100,00 |
| 3. | Persentase penjabaran program RPJMD dalam dokumen RKPD | % | n/a | 98,00 | 100,00 | 98,00 | 91,67 |
| 4. | Persentase capaian sasaran tahunan pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% | % | n/a | 93,00 | 82,00 | 81,00 | 89,10 |
| 5. | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan | % | n/a | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 75,00 |
| 6. | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah | % | n/a | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah | % | n/a | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban, 2021)

Kinerja pada tahun 2016 tidak tersedia datanya mengingat indikator pada perencanaan ini terdapat pada RPJMD tahun 2016-2021 dengan tahun pertama adalah tahun 2017. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pencapaian nilai ini dikarenakan kualitas dokumen perencanaan baik berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat Kabupaten Tuban. Persentase OPD dengan kualitas dokumen perencanaan baik pada tahun 2020 mencapai 100% karena memang kondisi dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah pada tahun 2020 yang disusun pada tahun 2019 telah banyak dilakukan pembenahan dan penyesuaian. Sementara itu, persentase penjabaran program RPJMD ke dalam dokumen RKPD dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan, karena jumlah program yang direncanakan dokumen RPJMD dilaksanakan dalam dokumen RKPD hanya 143 program, sedangkan jumlah seluruh program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD adalah sebanyak 156 program, hal ini dikarenakan efisiensi anggaran, dengan adanya pandemic COVID-19.

Persentase capaian sasaran tahunan pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% sejak tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan peningkatan. Hal ini karena tercapainya sebagian hasil (outcome) minimal 75% yaitu sebanyak 139 program dari jumlah program pembangunan yang dilaksanakan yaitu 156 program. Sementara, persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan dari 2018 hingga 2019 tetap sama yaitu 80%, dan di tahun 2020 menurun menjadi 75%

b. Keuangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.42 Hasil Kinerja Bidang Urusan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | |
|----|--|------------|-----------------|-------|-------|-------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | % | 36,44 | -0,11 | 17,05 | 6,49 |
| 2. | Persentase peningkatan kualitas LKD (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat (%) | % | 11,36 | 13,08 | 21,35 | 27,31 |
| 4. | Persentase OPD yang di inventarisir (%) | % | | 2,17 | 43,48 | 93,48 |
| 5. | Nilai AKIP BPPKAD | NILAI AKIP | | BB | A | A |

(Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban, 2020)

Pada Tahun 2020, jumlah Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 554.973.623.342,31. Jumlah realisasi PAD pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar RP. 36.970.060.779,84. Adapun persentase tanah milik daerah yang bersertifikat tahun 2020 tercapai sebesar 32,32%. Persentase kesesuaian LKD terhadap SAP tercapai sebesar 100%. Persentase OPD yang diinventarisir meningkat hingga 93,48%. Selain itu, Nilai AKIP BPPAKD semakin menunjukkan peningkatan yaitu mendapat predikat "A".

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.43 Hasil Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | |
|----|--|--------|-----------------|------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan | % | 191,36 | 99 | 43,66 |
| 2. | Persentase ASN dengan Kinerja yang baik | % | 191,36 | 96 | 98,35 |
| 3. | Persentase ASN yang menerima kompensasi | % | 100 | 100 | N/A |
| 4. | Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi | % | N/A | N/A | 83,71 |
| 5. | Persentase ASN yang memiliki disiplin yang baik | % | 110 | 100 | 114 |

(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan di tahun 2020 menurun jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu 99%. Penurunan ini dikarenakan pada Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Administrator dan Pengawas (Struktural) bagi ASN dengan target 115 orang tercapai 72 orang, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi ASN dengan target 570 orang tercapai 86 Orang, Kegiatan Pelatihan dasar bagi calon ASN dengan target 184 orang kesemua kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan dampak Refocusing Anggaran dan Pandemi Covid 19.

Persentase ASN dengan Kinerja yang baik di tahun 2020 meningkat jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu 96%. Peningkatan ini dikarenakan Kegiatan Penempatan PNSD bagi PNS JPT dan Administrasi dari target 300 SK terealisasi 721 SK.

Persentase ASN yang menerima kompensasi di tahun 2020 menurun jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu 100%. Penurunan ini dikarenakan Kegiatan Fasilitasi Penerimaan ASN dimana usulan kebutuhan 700 orang pelamar terealisasi penetapan formasi dari Menpan RB sebanyak 586.

Persentase ASN yang memiliki disiplin yang baik di tahun 2020 meningkat jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu 100%. Peningkatan ini dikarenakan perbandingan jumlah ASN yang berkinerja dan berdisiplin baik berjumlah 8049 dengan ASN yang mendapat hukuman disiplin berjumlah 7 orang. Meningkatnya ASN yang Profesional didukung oleh:

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan;
- Penyelenggaraan pelayanan prima sebagai salah satu upaya standarisasi komitmen dalam pelayanan kepegawaian;
- Peningkatan Kultur Budaya Kerja Publik; dan
- Peningkatan Kedisiplinan pegawai melalui penerapan *Reward and Punishment*.

d. Penelitian dan Pengembangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.44 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020**

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | |
|----|---|--------|-----------------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan | % | 80 | 80 | 80 | 75 |

(Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tuban, 2020)

Persentase hasil penelitian tahun 2020 sebesar 75%, mengalami sedikit penurunan disbanding tahun-tahun sebelumnya, namun telah melebihi target yaitu 60%. Berdasarkan hasil penelitian ini maka akan ditindaklanjuti sebagai dasar untuk menentukan rumusan kebijakan dari masing-masing yang tema yang telah diteliti. Dari 12 penelitian berdasarkan rencana ada 9 penelitian yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rumusan kebijakan.

e. Sekretariat DPRD

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Sekretariat DPRD Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.45 Hasil Kinerja Bidang Urusan Penunjang Sekretariat DPRD
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017-2020**

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | |
|----|---|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | - | 76 (Baik) | 76 (Baik) | 76 (Baik) | 78 (Baik) |

(Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, 2020)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sekretariat Dewan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target interval nilai sampai dengan nilai 80 pada tahun 2020 dan mampu tercapai nilai 78 dengan persentase 97,5% atau kategori baik. Karena target Sekretariat DPRD untuk indikator kinerja adalah dengan Kategori BAIK maka dengan realisasi interval nilai 78 dengan kategori BAIK capaian Sekretrariat DPRD dapat dikatakan telah tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: adanya jumlah pegawai yang cukup; tersedianya anggaran yang cukup memadai; adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; serta adanya

dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD. Perolehan angka indeks 78 tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Umum Sekretariat DPRD sebesar 77 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD sebesar 78 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD sebesar 78 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRD sebesar 79 (kategori B(Baik)) dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Adapun standar penilaian yang digunakan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.46 Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban

| Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1,00 – 1,75 | 25,00 – 43,75 | D | Tidak Baik |
| 1,76 – 2,50 | 43,76 – 62,50 | C | Kurang Baik |
| 2,51 – 3,25 | 62,51 – 81,25 | B | Baik |
| 3,26 – 4,00 | 81,26 – 100,00 | A | Sangat Baik |

(Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban, Tahun 2020)

f. Sekretariat Daerah

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.47 Hasil Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase jumlah kebijakan yang menjadi kebijakan dibidang agama | % | 92 | 74 | 75,7 | 75,7 | 79 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan kriteria KemenPANRB | Predikat | 45,58 | 61,29 | B | B | dalam proses |
| 3. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) | Nilai | 3,119 9 | 3,139 4 | 3,346 9 | N/A | N/A |
| 4. | Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan Ekonomi | % | n/a | n/a | 83,3 | 83,33 | 85,71 |
| 5. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai/ Kategori | n/a | n/a | 80,35 (Baik) | 81,17 (Baik) | 84,85 (Baik) |

(Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, 2021)

Persentase jumlah kebijakan yang menjadi kebijakan dibidang agama tahun 2020 mencapai 79% dari target 77% yang ditetapkan. Selama tahun 2019 dibidang Agama ada sejumlah 63 kebijakan bidang Agama yang ditinjaulanjuti menjadi rumusan kebijakan dibidang Agama sejumlah 50 kebijakan. Sedangkan di Bidang Kesra ada 26 kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti menjadi rumusan sebanyak 21 rumusan kebijakan. Dalam pelaksanaannya perumusan kebijakan dibidang pelayanan keagamaan dan kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan secara optimal terkait koordinasi dengan OPD terkait. Hal ini disebabkan karena kebijakan pelayanan keagamaan dan kesejahteraan rakyat meliputi kegiatan-kegiatan pada OPD lain termasuk Instansi Vertikal.

Pada Tahun 2020 hasil evaluasi Sakip dari Kemenpan RB belum dirilis masih dalam proses Kemenpan RB, sehingga menggunakan nilai hasil evaluasi tahun 2019 yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban memperoleh nilai 69,00 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerja sudah Baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Penilaian ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 67,92.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah penilaiannya dilakukan terhadap 2 variabel yaitu Indeks Capaian Kinerja 95% dan Indeks Kesesuaian Materi 5%. Penilaian Variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari Penilaian pada Tataran Pengambil Kebijakan yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek dan pada Tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian terhadap kinerja satuan manajerial kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri atas 9 aspek (8 aspek administrasi umum dan 1 aspek

tingkat capaian kinerja/SPM). Pada Tahun 2018 Nilai EKPPD Kabupaten Tuban mencapai skor 3,3469 (Sangat Tinggi).

Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan ekonomi yang ditargetkan sebesar 86% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 target 84% dan capaian indikator kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 26 fasilitasi dan rumusan kebijakan ekonomi dari target awal yaitu 30 atau sebesar 86,67%. Capaian persentase ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas rumusan hasil fasilitasi kebijakan ekonomi kerakyatan yang mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan potensi lokal yang berdaya saing. Dengan dilakukannya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kebijakan ekonomi di daerah, diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dibawah pengaruh ekonomi global.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 rata-rata sebesar 84,85 dengan kinerja unit pelayanan Baik. Capaian ini merupakan perolehan nilai IKM pada unit OPD pelayanan publik yang disurvei sebanyak 59 unit pelayanan publik.

g. Pengawasan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------|-----------------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | % | 97,58 | 99,51 | 99,76 | 100 | 99,87 |
| 2. | Persentase penanganan kasus aduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan | % | n/a | 101,43 | 60,86 | 65,22 | 89,13 |

| No | Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|----|--|--------|-----------------|------|-------|------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | kategori peringkat minimal BB | | | | | | |
| 4. | Presentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang di tindaklanjuti | % | 87 | 80 | 65,45 | 82,9 | 92,15 |

(Sumber : Inspektorat Kabupaten Tuban, 2021)

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tahun 2020 menurun yaitu hanya 99,87%. Hal ini dikarenakan karena masih ada 1 (satu) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Sementara untuk persentase penanganan kasus aduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2020 terealisasi sebesar 100%. Hal ini didukung oleh kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator persentase OPD yang di-evaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 terealisasi sebesar 89,13%. Pada persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti berdasarkan data dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan bisa terjadi karena beberapa alasan, diantaranya karena OPD yang diperiksa lambat dalam menindaklanjuti temuan administrasi hasil pemeriksaan, hal lain yang bisa menjadi penyebab adalah pemenuhan tindak lanjut terkait kerugian negara yang tidak segera dibayar oleh objek diperiksa. Penyebab kenaikan persentase bisa saja dari dilakukannya rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) berkala (semesteran) atas tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan yg belum selesai, atau bisa juga telah dicukupinya pemenuhan tindak lanjut oleh obyek diperiksa atas temuan sementara sebelum laporan hasil pemeriksaan disampaikan resmi.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan adalah kegiatan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal (oleh Inspektorat) maupun pemeriksaan eksternal (oleh BPK), baik melalui pemantauan secara langsung ke obrik maupun dengan rakor penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan dua kali dalam 1 tahun yaitu bulan Juni dan Desember.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menggambarkan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pada aspek daya saing ini terklasifikasi menjadi 4 (empat) fokus

yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Salah satu fokus yang menjadi daya saing di Kabupaten Tuban adalah kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Tuban. Ditunjang dengan letak geografis Kabupaten Tuban yang sangat strategis berada pada akses arteri primer jalan Perkembangan kemampuan ekonomi daerah di Kabupaten Tuban dari masa ke masa menunjukkan kecenderungan positif ditunjukkan dengan beranjaknya angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2020, tercatat nilai PDRB ADHB sebesar Rp 62.323,07 (dalam miliar rupiah). Geliat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban ditunjang oleh berkembangnya aktivitas perekonomian baik dalam bentuk investasi, industri pengolahan maupun ekonomi kerakyatan. Sektor industri pengolahan yang memang tidak terlepas dari letak geografis Kabupaten Tuban dan sejak jaman dahulu menjadi pusat lalu lintas perdagangan baik skala regional maupun nasional. Namun demikian, untuk mengimbangi kegiatan pada sektor industri pengolahan, Pemerintah Kabupaten Tuban juga tetap fokus dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan untuk menunjang ketersinambungan pembangunan. Kriteria industri pengolahan dengan basis lingkungan hidup menjadi fokus dalam menjaring investasi di Kabupaten Tuban.

Realisasi investasi berskala nasional di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 total nilai investasi sebesar 14.294 Milyar Rupiah, dengan jumlah investor sebanyak 482. Investasi di Kabupaten Tuban dipegaruhi oleh perkembangan ekonomi domestik dan eksternal serta kondisi kondusif keamanan dan ketertiban wilayah. Pada Tahun 2017 nilai investasi di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini didukung oleh masuknya investasi dari perusahaan Roosneft yang bekerjasama dengan Pertamina untuk membuat kilang minyak dengan nilai investasi sebesar Rp. 211.950.000,28. Dari investasi ini selanjutnya akan menimbulkan multiplier effect terhadap pengembangan industri pendukungnya. Oleh Karena itu Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan infrastruktur pendukung.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Livable City merupakan istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain).

Indikator livable city menjadi petunjuk dan tolak ukur dalam menilai suatu kota yang layak huni. Indikator livable city di Indonesia dapat dilihat dari Most Livable city Index (MLCI) dari IAP tahun 2009, 2011, dan 2014. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur kelayakan huni kota-kota di Indonesia. Kota-kota yang diukur pada MLCI didominasi oleh kota besar yang dianggap penting oleh IAP (MLCI, 2014). Adapun kriteria dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.49 Tabel Kriteria dan Indikator Livable City

| No. | Kategori | Sub Kategori | Indikator |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | KEAMANAN DAN KEBENCANAAN | KEAMANAN | Frekuensi gangguan keamanan |
| | | | Rasa aman dari gangguan keamanan |
| | | | Kemudahan mendapat perlindungan diri dari gangguan keamanan |
| | | | Kepuasan terhadap perlindungan pihak berwenang dari gangguan keamanan |
| | | KEBENCANAAN | Frekuensi kejadian bencana |
| | | | Rasa aman dari kejadian bencana |
| | | | Kemudahan mendapatkan bantuan/perlindungan dari pihak berwenang terkait kebencanaan |
| | | | Kepuasan terhadap bantuan/perlindungan dari pihak berwenang terkait kebencanaan |
| POLITIK DAN DEMOKRASI | POLITIK | Seberapa pentingnya politik | |
| | | Rasa aman dan nyaman ketika menyampaikan hak dan pendapat politik | |
| | | Rasa aman dan nyaman dengan situasi politik | |
| | | Kepuasan terhadap kebijakan pemerintah terkait politik | |
| | PARTISIPASI PUBLIK | Frekuensi kegiatan musyawarah pembangunan | |
| | | Seberapa penting kegiatan musyawarah pembangunan | |
| | | Peluang untuk terlibat/dilibatkan dalam kegiatan musyawarah pembangunan | |
| | | Kepuasan terhadap pelibatan warga dalam kegiatan musyawarah pembangunan | |
| EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN | KETAHANAN PANGAN | Seberapa penting bahan pangan pokok | |
| | | Kemudahan mendapatkan bahan pangan pokok | |
| | | Keterjangkauan harga bahan pangan pokok | |
| | | Kepuasan terhadap ketersediaan dan kualitas bahan pangan pokok | |
| | EKONOMI | Kemudahan mendapatkan pekerjaan | |

| No. | Kategori | Sub Kategori | Indikator |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | Kepuasan terhadap pekerjaan |
| | | | Kemudahan mengembangkan usaha |
| | | | Seberapa menguntungkan usaha yang dikembangkan |
| | | | Kepuasan terhadap usaha yang digeluti |
| | | | Keterjangkauan biaya hidup dibandingkan dengan besaran penghasilan |
| | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Frekuensi mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat |
| | | | Seberapa penting kegiatan pemberdayaan masyarakat |
| | | | Kemudahan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat |
| | | | Kepuasan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat |
| | LINGKUNGAN HIDUP | LINGKUNGAN HIDUP | Kondisi iklim |
| | | | Kepuasan tinggal di lingkungan dengan kondisi iklim |
| | | | Kepentingan kondisi lingkungan hidup (bebas pencemaran) |
| | | | Kualitas udara |
| | | | Kepuasan tinggal di lingkungan dengan kondisi kualitas udara |
| | | | Kualitas air |
| | | | Kepuasan tinggal di lingkungan dengan kondisi kualitas air |
| | | | Kondisi kebisingan |
| | | | Kepuasan tinggal di lingkungan dengan kondisi kebisingan |
| | PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Status rumah |
| | | | Seberapa penting memiliki rumah |
| | | | Keterjangkauan harga rumah/harga tanah |
| | | | Kemudahan pengurusan akte pertanahan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| | | | Kepuasan terhadap kondisi dan kualitas lingkungan rumah/perumahan/permukiman |
| | SARANA KAWASAN | PENDIDIKAN | Seberapa penting pendidikan |
| | | | Kualitas fasilitas pendidikan |
| | | | Kemudahan mengakses fasilitas pendidikan |
| | | | Kepuasan terhadap layanan fasilitas pendidikan |
| | | KESEHATAN MASYARAKAT | Seberapa penting hidup sehat |
| | | | Kemudahan mengakses fasilitas kesehatan |
| | | | Kepuasan terhadap layanan fasilitas kesehatan |
| | | KEAGAMAAN | Kenyamanan dalam melakukan kegiatan keagamaan |
| | | | Kemudahan mengakses fasilitas peribadatan |
| | | | Kepuasan terhadap layanan fasilitas peribadatan |
| | | FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASA | Seberapa penting keberadaan fasilitas perdagangan dan jasa |
| | | | Kualitas penataan sector informal/PKL |
| | | | Kemudahan mengakses fasilitas perdagangan dan jasa |
| | | | Kepuasan terhadap layanan fasilitas perdagangan dan jasa |

| No. | Kategori | Sub Kategori | Indikator | |
|--|---|---|---|---|
| | | FASILITAS ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK | Seberapa penting keberadaan fasilitas administrasi dan layanan publik | |
| | | | Kemudahan mengakses fasilitas administrasi dan layanan publik | |
| | | | Kepuasan terhadap layanan fasilitas administrasi dan layanan publik | |
| | | | REKREASI | Seberapa penting rekreasi |
| | | | | Kemudahan mengakses fasilitas rekreasi |
| | | | | Kepuasan terhadap layanan fasilitas rekreasi |
| | | RTH | Seberapa penting keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) | |
| | | | Kemudahan menemukan ruang terbuka hijau (RTH) | |
| | | | Kepuasan terhadap layanan ruang terbuka hijau (RTH) | |
| | | OLAHRAGA | Seberapa penting berolahraga | |
| | | | Kemudahan mendapatkan layanan fasilitas olahraga | |
| | | | Kepuasan terhadap layanan fasilitas olahraga | |
| | | KESENIAN DAN KEBUDAYAAN | Seberapa penting kesenian dan kebudayaan | |
| | | | Frekuensi pertunjukan kesenian dan kebudayaan | |
| | | | Kemudahan mengakses fasilitas kesenian dan kebudayaan | |
| | | | Kepuasan terhadap layanan fasilitas kesenian dan kebudayaan | |
| | | PRASARANA KAWASAN | KEBERSIHAN | Sistem pengelolaan sampah di rumah dan lingkungan |
| | | | | Seberapa penting layanan pengelolaan sampah |
| | | | | Kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan |
| | | | | Kemudahan mengakses layanan fasilitas kebersihan |
| Kepuasan terhadap layanan fasilitas kebersihan | | | | |
| AIR BERSIH | Sumber air bersih | | | |
| | Kualitas air bersih | | | |
| | Seberapa penting keberadaan air bersih | | | |
| | Kemudahan mendapatkan layanan air bersih | | | |
| | Kepuasan terhadap layanan air bersih | | | |
| PRASARANA AIR KOTOR / LIMBAH | Jenis prasarana air kotor/limbah | | | |
| | Seberapa penting keberadaan fasilitas pengolahan air kotor/limbah | | | |
| | Kemudahan mengakses layanan pengolahan air kotor/limbah | | | |
| | Kepuasan terhadap layanan pengolahan air kotor/limbah | | | |
| PRASARANA ENERGI | Sumber pasokan sumber daya energi listrik | | | |
| | Frekuensi pemadaman listrik | | | |
| | Seberapa penting listrik | | | |
| | Kemudahan mendapatkan sambungan listrik atau gas | | | |
| | Kepuasan terhadap layanan energy listrik atau gas | | | |

| No. | Kategori | Sub Kategori | Indikator |
|-----|--------------|---|--|
| | | PRASARANA TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Jenis layanan telekomunikasi |
| | | | Kualitas koneksi telepon rumah/umum |
| | | | Seberapa penting koneksi telepon rumah/umum |
| | | | Kemudahan mengakses layanan telepon rumah/umum |
| | | | Kepuasan terhadap layanan telepon rumah/umum |
| | | | Kualitas koneksi telepon seluler |
| | | | Seberapa penting koneksi telepon seluler |
| | | | Kemudahan mengakses layanan telepon seluler |
| | | | Kepuasan terhadap layanan telepon seluler |
| | | | Kualitas koneksi internet |
| | | | Seberapa penting koneksi internet |
| | | | Kemudahan mengakses layanan internet |
| | | | Kepuasan terhadap layanan internet |
| | | | PRASARANA PENANGANAN BANJIR |
| | | Kecepatan penanganan genangan/banjir | |
| | | Seberapa penting keberadaan prasarana penanganan banjir | |
| | | Kepuasan terhadap penanganan genangan/banjir | |
| | TRANSPORTASI | ANGKUTAN UMUM | Jenis layanan angkutan umum yang tersedia |
| | | | Seberapa penting keberadaan angkutan umum |
| | | | Kemudahan mendapatkan layanan angkutan umum |
| | | | Kepuasan terhadap layanan angkutan umum |
| | | TRANSPORTASI | Tingkat kemacetan |
| | | | Keamanan dari risiko kecelakaan lalu lintas |
| | | | Kualitas jalan |
| | | | Seberapa penting keberadaan jaringan jalan |
| | | | Kepuasan menggunakan jaringan jalan |
| | | | |

(Sumber: Ikatan Ahli Perencana (IAP) Tahun 2014)

Penilaian Indeks Livability berdasarkan 9 kategori meliputi: Keamanan dan Kebencanaan, Politik dan Demokrasi, Ekonomi dan Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Sarana Kawasan, Prasarana Kawasan, dan Transportasi.

Dimana pada 9 kategori di atas, Kabupaten Tuban memiliki Indeks Livability tahun 2020 sebesar 74,14. Adapun kriteria nyaman pada tahun 2020 dengan gambaran rincian sebagaimana berikut :

1. Keamanan dan Kebencanaan dengan capaian tahun 2020 sebesar 74,18%
2. Politik dan Demokrasi dengan capaian tahun 2020 sebesar 72,59%
3. Ekonomi dan Ketahanan Pangan dengan capaian tahun 2020 sebesar 74,98%
4. Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian tahun 2020 sebesar 68,54%
5. Lingkungan Hidup dengan capaian tahun 2020 sebesar 75,61%

6. Perumahan & Permukiman dengan capaian tahun 2020 sebesar 74,78%
7. Sarana Kawasan dengan capaian tahun 2020 sebesar 76,12%
8. Prasarana Kawasan dengan capaian tahun 2020 sebesar 74,96
9. Transportasi dengan capaian tahun 2020 sebesar 75,07%

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu daerah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan budaya masyarakat. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan dan efisiensi usaha. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.50 Hasil Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018-2020

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|--------|-----------------|------|------|------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Indeks Liveability | - | n/a | n/a | n/a | n/a | 74.14 |
| 2. | Persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana | % | n/a | 15 | 30 | 40 | 60 |
| 3. | Persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) | % | n/a | n/a | 69 | 72 | 75 |
| 4. | Cakupan Ketersediaan Air Baku/ Irigasi | % | n/a | 75,1 | 80,2 | 83 | 85,2 |
| 5. | Cakupan Konektivitas Wilayah | % | n/a | 92,3 | 93,3 | 93,8 | 88,88 |

**Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, 2021)*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana pada tahun 2018 dengan capaian 30% dari target 20% sedangkan pada tahun 2019 dengan capaian 40% dari target 40%, dan tahun 2020 capaian 60% dari target 40%. Data persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) pada tahun 2018 dengan capaian 69% dari target 69% sedangkan pada tahun 2019 dengan capaian 72% dari target 72% dan tahun 2020 capaian 75% dari target 75%. Data cakupan Ketersediaan Air Baku/ Irigasi pada tahun 2018 dengan capaian 80,2% dari target 80% sedangkan pada tahun 2019 dengan capaian 83% dari target 83% dan tahun 2020 capaian 85,2% dari target 85%. Cakupan Konektivitas Wilayah pada tahun 2018 dengan capaian 93,3% dari target 87% sedangkan pada tahun 2019 dengan capaian 93,80% dari

target 89% dan tahun 2020 capaian 88,88% dari target 91% hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing anggaran infrastruktur ke pada upaya untuk penanganan pandemi covid-19.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Besarnya investasi di Kabupaten Tuban tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi keamanan, ketentraman, ketertiban, kecepatan perijinan dan kepastian hukum dalam berusaha.

Salah satu penunjang kenyamanan iklim berinvestasi di Kabupaten Tuban adalah keberadaan perda yang mendukung iklim usaha. Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Tuban pada tahun 2013 sejumlah 15 perda sedangkan pada tahun 2014 menjadi 22 Perda. Hal ini untuk menunjang kepastian hukum dan peningkatan prosedur pelayanan perijinan maupun jenis/jumlah macam pajak/retribusi daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan/undang-undang yang lebih tinggi. Selain itu ditunjang dengan minimnya jumlah demo, angka kriminalitas serta pengelolaan sistem administrasi keuangan yang tertib dan transparan.

Selain itu pelayanan perijinan menjadi hal terpenting dalam meningkatkan daya saing daerah. Semakin mudah dan jelas prosedur suatu pelayanan perijinan akan semakin meningkatkan minat investasi. Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian transparansi dan akuntabilitas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui ketentuan dimaksud diharapkan setiap perijinan investasi memiliki mekanisme yang lebih mudah sehingga mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Sebagai tindaklanjut di daerah, dibentuk instansi pelayanan terpadu satu pintu yang melaksanakan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta fungsi penyelenggaraan penanaman modal.

Standar pelayanan publik adalah pedoman yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Adapun standar pelayanan publik meliputi : (1) Dasar Hukum; (2) Persyaratan; (3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (4) Jangka waktu penyelesaian; (5) Biaya/tariff; (6) Produk Pelayanan; (7) Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas; (8) Kompetensi Pelaksana; (9) Pengawasan Internal; (10) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; (11) Jumlah Pelaksana; (12) Jaminan Pelayanan; (13) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pekerja; dan (14) Evaluasi Kinerja Pelaksana. Untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha, penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diberlakukan sejak Tahun 2015 memberikan manfaat sebagai berikut : (1) Adanya pedoman kerja yang berstandar, sehingga lebih efektif dan efisien; (2) Senantiasa melakukan inovasi dan perubahan yang lebih baik; (3) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan; dan (4) Meningkatkan citra organisasi serta meningkatkan investasi daerah.

Tabel 2. 51 Target dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2020

| NO. | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | |
|-----|---|----------|------------|---------|------------|---------|
| | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) | investor | 8 | 614 | 45 | 482 |
| 2 | Jumlah investasi berskala nasional (PMA/PMDN) | Milliar | 9.648 | 27.700 | 9.889 | 14.294 |
| 3 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di Dinas PMPTSPNK | Nilai | 79 | 81,72 | | 84,24 |
| 4 | Persentase Peningkatan nilai investasi | | | | | |

(Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker, Tahun 2020)

Setiap tahun pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dievaluasi berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang dinilai melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), survey dilakukan oleh pihak ketiga sehingga nilai yang dihasilkan benar-benar independen dan tidak memihak. Tahun 2020 ini Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mendapat predikat Baik (B) dengan nilai 84.24 yang berarti bahwa kinerja pelayanan mendapat respon yang positif dari masyarakat. Hal ini akan menjadi acuan untuk kinerja pelayanan di tahun-tahun mendatang. Berikut ini jenis-jenis dan waktu proses pengajuan perijinan di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 52 Jenis dan Waktu Proses Perijinan Tahun 2021

| No. | Jenis Izin | Waktu Proses (hari) |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Izin Usaha Industri | 5 |
| 2 | Izin Usaha Perdagangan | 2 |
| 3 | Tanda Daftar Gudang | 2 |
| 4 | Tanda Daftar Perusahaan | 2 |
| 5 | Izin Pemasangan Reklame Komersial | 5 |
| 6 | Izin Pemasangan Reklame Non Komersial | 2 |
| 7 | Izin Usaha Pendirian Hotel | 5 |
| 8 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata | 2 |
| 9 | Izin Usaha Rekreasi Hiburan Umum | 2 |
| 10 | Izin Usaha Jasa Konstruksi | 5 |
| 11 | Izin Penyelenggaraan Klinik | 5 |
| 12 | Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika | 5 |
| 13 | Izin Laboratorium Klinik Pratama | 5 |
| 14 | Izin Optikal | 5 |
| 15 | Izin Apotek | 5 |
| 16 | Izin Operasional Menara Telekomunikasi | 2 |
| 17 | Izin Usaha Pembudidayaan Ikan | 2 |
| 18 | Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras | 2 |
| 19 | Izin Jagal/Pengedar Daging | 2 |
| 20 | Izin Prinsip Penanaman Modal | 2 |
| 21 | Izin Mendirikan Bangunan | 5 |
| 22 | Izin Gangguan (HO) | 5 |
| 23 | Izin Pemanfaatan Tanah | |

(Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker, Tahun 2021)

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan bagian integral dalam proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan, oleh karenanya penduduk tidak dapat hanya dilihat sebagai obyek, tetapi juga diperlukan sebagai subyek yang harus dibina dan dikerahkan secara efektif, sehingga benar-benar menjadi modal yang besar dan menguntungkan bagi proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengarahan penduduk agar dapat dilaksanakan secara efektif maka diperlukan adanya data penduduk yang valid dan lengkap cakupannya. Data penduduk yang valid adalah data penduduk yang secara riil menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dilapangan. Dengan demikian kepemilikan dokumen kependudukan menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi demografis Kabupaten Tuban berdasarkan penduduk Tahun 2020 sejumlah 1.198.012 jiwa

Jumlah penduduk laki-laki sebesar 598.339 jiwa dan perempuan sebesar 599.673 jiwa. Dari jumlah tersebut angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,77. Angka tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 jumlah

penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Indikator kualitas atau mutu dari sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kesehatan.

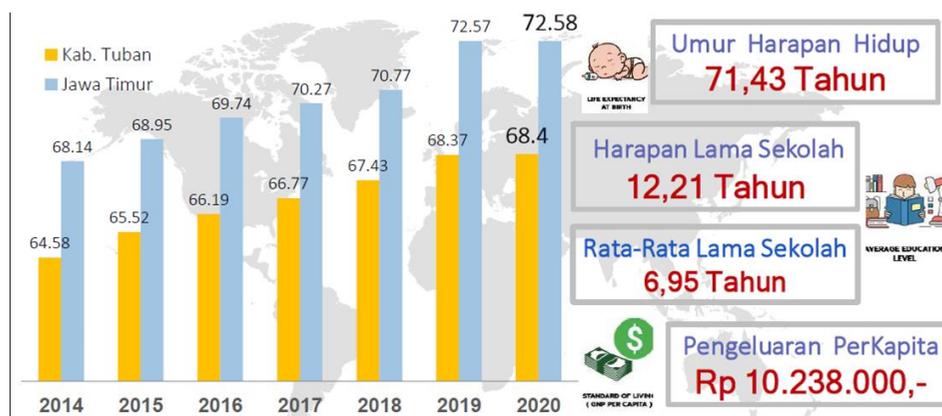
Tingkat ketergantungan (Rasio ketergantungan) di Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Jenis dan Waktu Proses Perijinan Tahun 2021

| No. | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
|-----|---|---------|---------|---------|------|---------|
| 1. | Rasio Ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif | 1 :2.63 | 1 :2.64 | 1 :2.33 | n/a | 1 :2.46 |

(Sumber: BPS diolah, 2021)

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Dari tabel diatas bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah 1:2,63 adalah berarti 1 orang tidak produktif tergantung pada 2 orang produktif. Sedangkan pada tahun 2018 adalah 1:2,64. Pada Tahun 2019 rasio nya adalah 1:2.33. untuk tahun 2020 adalah 1:2.46.



Gambar 2. 172 IPM di Kabupaten Tuban Tahun 2014-2020 dan Komposit IPM 2020

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020)

Tabel 2. 54 Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tuban

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|------------|--|----------|---------|-------|--------|--------|--------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan | | | | | | | |
| 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Regional | | | | | | | |
| 1 | Laju Pertumbuhan PDRB | % | 4,9 | 5 | 5,16 | 5,14 | -5,85 | |
| 2 | PDRB per Kapita | Juta Rp | 45,16 | 48,56 | 52,08 | 55,04 | 52,95 | |
| 3 | Inflasi Rata-Rata Jawa Timur | % | 2,74 | 4,04 | 2,86 | 2,12 | 1,44 | |
| 4 | Indeks Gini | % | 0,332 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | |
| 5 | Angka Kemiskinan Tuban | % | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 15,91 | |
| 6. | Indeks Williamson/ Ketimpangan Regional | - | 0,833 | 0,833 | 0,905 | 0,921 | 0,9906 | |
| 7. | Pertumbuhan 7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pertanian, kehutanan, dan perikanan | - | 3,70 | 3,13 | -0,16 | 1,29 | -1,39 | |
| 8. | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | - | 4,48 | 5,78 | 9,71 | 7,16 | -11,44 | |
| 9. | Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | - | 9,05 | 8,57 | 7,73 | 8,71 | -9,34 | |
| 1.2 | Kesejahteraan Sosial | | | | | | | |
| 1. | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 66,19 | 66,77 | 67,43 | 68,37 | 68,4 | |
| 2. | Angka Rata-rata lama sekolah | tahun | 6,25 | 6,48 | 6,52 | 6,81 | 6,95 | |
| 3. | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,17 | 12,18 | 12,19 | 12,2 | 12,22 | |
| 4. | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 70,67 | 70,8 | 70,01 | 71,26 | 71,43 | |
| 5. | Daya Beli Masyarakat | - | 9,355 | 9,54 | 10,048 | 10,499 | 10,238 | |
| 6. | Tingkat Pengangguran Terbuka | - | 3,3 | 3,39 | 2,83 | 2,76 | 4,81 | |
| 7. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | - | N/A | 87,32 | 87,34 | 87,63 | 87,78 | |
| 8. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | - | N/A | 61,25 | 67,74 | 64,32 | 64 | |
| 9. | Indeks Toleransi | - | N/A | 81,40 | 81,40 | 84,20 | 88,00 | |
| 1.3 | Seni Budaya dan Olahraga | | | | | | | |
| 1 | Organisasi Keolahragaan di Kabupaten Tuban | Lembaga | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | |
| 2 | Jumlah lapangan olahraga yang terdapat di Kabupaten Tuban | Lapangan | 55 | 299 | 299 | 300 | 300 | |
| 2 | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | |
| 2.1 | Pelayanan Urusan Wajib | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|--------------|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2.1.1 | PENDIDIKAN | | | | | | | |
| 1. | APK PAUD | % | 96,03 | 98,88 | 99,72 | 101,87 | 100,14 | |
| 2. | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | | |
| 3. | APK SD/MI/Paket A | % | 109,75 | 110,14 | 100,09 | 100,82 | 100,63 | |
| 4. | APK SMP/MTs/Paket B | % | 96,31 | 96,93 | 96,43 | 98,84 | 98,65 | |
| 5. | Angka partisipasi murni | | | | | | | |
| 6. | APM SD/MI/Paket A | % | 98,75 | 100,19 | 98,97 | 99,46 | 99,72 | |
| 7. | APM SMP/MTs/Paket B | % | 75,67 | 78,14 | 78,35 | 89,03 | 95,49 | |
| 8. | Angka Partisipasi sekolah | | | | | | | |
| 9. | APS Kelompok Usia 7-12 tahun | % | 107,94 | 108,23 | 100,01 | 100,07 | 99,94 | |
| 10. | APS Kelompok Usia 13-15 tahun | % | 96,53 | 99,27 | 81,01 | 96,89 | 111,6 | |
| 11. | Angka Putus Sekolah | | | | | | | |
| 12. | APtS SD/MI | % | 0,66 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0 | |
| 13. | APtS SMP/MTs | % | 0,22 | 0,109 | 0,109 | 0 | 0 | |
| 14. | Angka Kelulusan | | | | | | | |
| 15. | AK SD/MI | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16. | AK SMP/MTs | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 17. | Angka Melanjutkan | | | | | | | |
| 18. | AM dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 104,61 | 115,15 | 95,67 | 90,36 | 97,63 | |
| 19. | AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 157,29 | 106,5 | 103,4 | 99,98 | 98,94 | |
| 20. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 91,07 | 92,12 | 92,93 | N/A | 95,64 | |
| 21. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Nilai | 6,25 | 6,48 | 6,52 | 6,55 | 6,81 | |
| 22. | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Nilai | 12,17 | 12,18 | 12,19 | 12,2 | 12,2 | |
| 23. | Indeks Pendidikan | - | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | |
| 24. | Indeks Literasi | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.1.2 | KESEHATAN | | | | | | | |
| 1. | Angka Harapan Hidup | Nilai | 70,67 | 70,8 | 71,01 | 71,26 | 71,43 | |
| 2. | Jumlah kematian Bayi | Kasus | 219 | 109 | 158 | 129 | 111 | |
| 3. | Jumlah kematian ibu | Kasus | 11 | 10 | 8 | 19 | 22 | |
| 4. | Presentase balita gizi buruk | % | 0,85 | 0,80 | 0,87 | 1,20 | 1,52 | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|--------------|---|--------|---------|--------|--------|-------|-------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 5. | Prevalensi Balita Gizi kurang | Indeks | 2,07 | 2,05 | 1 | 0,11 | | |
| 6. | Presentase desa ODF | % | 3,30 | 4,6 | 9,45 | 19,51 | 21,34 | |
| 7. | Indeks Kesehatan | | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | |
| 8. | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (k4) | % | N/A | 93,89 | 92,9 | 94 | 94 | |
| 9. | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | N/A | 96,86 | 96,06 | 85 | 99 | |
| 10. | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | N/A | 101,28 | 100,59 | 102 | 103 | |
| 11. | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan skrining kesehatan | % | N/A | 92,43 | 92 | 91 | 88 | |
| 12. | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan | % | N/A | 88,65 | 99,82 | 85 | 96 | |
| 13. | Persentase anak usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan | % | N/A | 100 | 41,26 | 66 | 37 | |
| 14. | Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan | % | N/A | 100 | 96,90 | 96 | 62 | |
| 15. | Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | % | N/A | 51,40 | 36,40 | 30 | 19 | |
| 16. | Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | N/A | 41,80 | 38,04 | 86 | 84 | |
| 17. | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | % | N/A | 70,27 | 100 | 78 | 84 | |
| 18. | Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | % | N/A | 106,77 | 100 | 92 | 25 | |
| 19. | Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV | % | N/A | 54,92 | 60,54 | 79 | 53 | |
| 2.1.3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| 1. | Persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana | % | N/A | 15 | 30 | 40 | 60 | |
| 2. | Persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) | % | N/A | 66,2 | 69,02 | 72 | 75 | |
| 3. | Cakupan Ketersediaan Air Baku/ Irigasi | % | N/A | 75,1 | 80,2 | 83 | 85,2 | |
| 4. | Cakupan Konektivitas Wilayah | % | N/A | 92,3 | 93,3 | 93,8 | 88,88 | |
| 2.1.4 | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINGKUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|--------------|---|--------|---------|-------|-------|--------|--------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Jumlah pelanggaran/gangguan keamanan dan ketertiban umum | Kasus | 116 | 330 | 241 | 250 | N/A | |
| 2. | Angka kasus pelanggaran perundang-undangan | Kasus | 360 | 116 | 180 | 120 | 147 | |
| 3. | Persentase Satuan polisi pamong praja yang kompeten | % | 23 | 32,76 | 49 | 48 | N/A | |
| 4. | Presentase penyelesaian konflik social/bencana oleh masyarakat | % | 100 | 63 | 86 | 75 | 100 | |
| 5. | Angka konflik sosial | kasus | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Indeks Resiko Bencana | - | N/A | N/A | N/A | 151,08 | 145,52 | |
| 2.1.5 | PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| 1 | Persentase layanan standart pelayanan minimum (SPM) PSU dengan pencapaian diatas 70 % | % | N/A | N/A | 55.56 | 66.67 | 77,78 | |
| 2 | Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani pada kawasan permukiman | % | 46.05 | 52.63 | 70.25 | 70.25 | 71,58 | |
| 3 | Cakupan pelayanan drainase | % | 66.14 | 72.64 | 74.48 | 74.48 | 78,37 | |
| 4 | Cakupan akses air bersih yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi dan non terlindungi | % | 27.49 | 29.5 | 29.54 | 79.56 | 82,72 | |
| 5 | Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai | % | 70 | 72.17 | 73.45 | 74.37 | 75,32 | |
| 6 | Cakupan layanan persampahan | % | 8.1 | 9.67 | 10.97 | 12 | 11,75 | |
| 7 | Cakupan layanan LPJU | % | 32.21 | 38.07 | 40.99 | 87.94 | 90,22 | |
| 8 | Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan | % | N/A | 11.52 | 84.48 | 88.21 | 90,66 | |
| 9 | Rasio panjang jalan lingkungan terhadap luas kawasan permukiman | Rasio | 50 | 68 | 68 | 77.78 | 87,17 | |
| 10 | Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas kawasan perkotaan | % | 4.78 | 4.85 | 4.86 | 4.86 | 4,89 | |
| 11 | Persentase Cakupan rumah layak huni | % | 83 | 84.29 | 85.1 | 85.26 | 85,31 | |
| 2.1.6 | SOSIAL | | | | | | | |
| 1 | Persentase rekomendasi penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel pada pelayanan publik yang ditindak lanjuti. | % | N/A | 5 | 11 | 17,6 | 18,6 | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|---------------|---|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2 | Persentase PMKS yang sudah mandiri. | % | N/A | 0,091 | 0,11 | 0,2 | 0,2 | |
| 3 | Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. | % | N/A | 88,15 | 89,05 | 90,5 | 90,3 | |
| 2.1.7 | PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| 1. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | N/A | N/A | 86,5 | 81,72 | 84,24 | |
| 2. | Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) | investor | N/A | N/A | 245 | 614 | 482 | |
| 3. | Jumlah investasi berskala nasional (PMA/PMDN) | Milyar | N/A | N/A | 4.171 | 27.700 | 14.294 | |
| 2.1.8 | TENAGA KERJA | | | | | | | |
| 1. | Jumlah Penduduk yang bekerja | Jiwa | 584.743 | 631.783 | 540.855 | 655.329 | 645.156* | |
| 2. | Jumlah Pengangguran | Jiwa | 18,926 | 22.198 | 18,644 | 15.983 | 15.216* | |
| 3. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 67,18 | 71,71 | 71,78 | 68,62 | 71,84* | |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,03 | 3,39 | 2,83 | 2,76 | 4,81 | |
| 5. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 88,91 | 100 | 75,72 | 100 | 76,40 | |
| 6. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan | % | 88,8 | 86,75 | 65,04 | 100 | 65,69 | |
| 7. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 89,92 | 76,39 | 77,12 | 77,98 | 72,02 | |
| 8. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | Kasus | N/A | 9 | 4 | 4 | 18 | |
| 2.1.9 | PANGAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase ketersediaan kebutuhan energi dan protein perkapita | % | N/A | 94,1 | 93,75 | 94,12 | 76,30 | |
| 2. | Persentase cadangan pangan daerah | % | N/A | 52,2 | 62,4 | 74,8 | 63,66 | |
| 3. | Persentase keamanan pangan | % | N/A | 93,4 | 91,75 | 96,4 | 96,0 | |
| 4. | Skor pola pangan harapan | % | N/A | 82,6 | 83,1 | 84,2 | 82,4 | |
| 5. | Penanganan daerah rawan pangan | % | N/A | 76,8 | 90,07 | 88,74 | 89,40 | |
| 6 | Indeks Ketahanan Pangan | - | N/A | N/A | 78,61 | 81,45 | 83,57 | |
| 7 | Persentase infrastruktur pangan yang digunakan | % | 69,23 | 75 | 77,78 | 78,95 | 84,21 | |
| 8 | Persentase desa tahan pangan | % | 99,7 | N/A | 61,28 | N/A | 75,3 | |
| 2.1.10 | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|---------------|--|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Indeks Kualitas Air (IKA) | - | 60 | 60 | 60,36 | 55,71 | 60,82 | |
| 2. | Indeks Kualitas Udara (IKU) | - | 94,07 | 95,28 | 95,28 | 97,77 | 98,92 | |
| 3. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL) | - | 51,44 | 51,65 | 51,65 | 53,76 | 52,64 | |
| 4. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | - | N/A | 67,34 | 67,36 | 67,54 | 68,98 | |
| 5. | Persentase Penyelesaian Dokumen Lingkungan yang Diamanatkan PUU LH | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.1.11 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | |
| 1. | Persentase Kepemilikan KTP elektronik | % | N/A | 89,68 | 91,64 | 92,12 | 94,24 | |
| 2. | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3. | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | N/A | 0,43 | 4,72 | 13,63 | 15,45 | |
| 4. | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 -18 tahun | % | N/A | 86,2 | 88,48 | 92,66 | 96,41 | |
| 5. | Persentase Kepemilikan Akta kematian | % | N/A | 60,96 | 80,05 | 79,72 | 87,81 | |
| 6. | IKM pelayanan administrasi kependudukan | Nilai | N/A | 74,25 | 77,45 | 76,9 | 80,02 | |
| 7. | Persentase Ketersediaan Informasi Data Kependudukan | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.1.12 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | |
| 1. | Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih | Persen | N/A | 34,72 | 47,27 | 56,27 | 58,27 | |
| 2. | Persentase kecamatan yang berhasil membina pemerintah desa sesuai aturan | Persen | N/A | 25 | 100 | N/A | N/A | |
| 3. | Persentase pertumbuhan badan usaha ekonomi desa | Persen | N/A | 60,29 | 69,37 | N/A | N/A | |
| 4. | Indeks Desa Membangun | - | N/A | N/A | N/A | 0,6840 | 0,6999 | |
| 5. | Persentase Peningkatan Kerjasama Desa | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 | |
| 6. | Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan | Desa | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 | |
| 2.1.13 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | |
| 1. | Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti | % (kasus) | N/A | 100 (47) | 100 (60) | 100 (52) | 100 | |
| 2. | Persentase tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti | % (kasus) | N/A | 100 (38) | 100 (38) | 100 (18) | 100 | |
| 3. | Tingkat Fertilitas Total (Total Fertility Rate) | | 1,9 | 1,9 | 1,86 | 1,86 | 1,9 | |
| 4. | Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri | % | 8,5 | 12,0 | 13,0 | 18,0 | 21 | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|---------------|---|-----------|---------|-----------------|------------------|-------|-----------------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2.1.14 | PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| 1. | IKM Pelayanan Bidang Perhubungan | Nilai | N/A | 75,60 (Baik) | 75,72 (Cukup) | N/A | 81,86 (Baik) | |
| 2. | Tingkat Kepadatan Lalu Lintas | Konstanta | N/A | N/A | 0,41 | 0,51 | 0,52 | |
| 3. | Cakupan Angkutan Umum per Desa (%) | | N/A | N/A | 35,67 | 36,89 | 37,5 | |
| 4. | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/ Umum | % | 15 | 369 | 127 | 1 | -7 | |
| 5. | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum | % | -2 | -93 | -60 | 97 | -51 | |
| 2.1.15 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | |
| 1. | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Informasi | - | N/A | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | |
| 2. | Cakupan Layanan sistem dan jaringan TIK | - | N/A | 55 | 95 | 100 | 100 | |
| 3. | Terintegrasinya sistem informasi di OPD | - | N/A | N/A | 91 | 77,8 | 71,4 | |
| 4. | Indeks SPBE | - | N/A | N/A | 2,3 | 2,1 | Tdk dinilai | |
| 2.1.16 | KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | |
| 1. | Persentase koperasi aktif | % | 81,51 | 60 | 46,75 | 50,25 | 52,19 | |
| 2. | Persentase peningkatan jumlah usaha mikro | % | 5,26 | 1,85 | 3,38 | 2,48 | 0,24 | |
| 2.1.17 | KEBUDAYAAN | | | | | | | |
| 1. | Cakupan desa/kelurahan berbudaya | % | N/A | 0,8 | 0,85 | 0,9 | N/A | |
| 2. | Jumlah benda, Situs Cagar Budaya di Kabupaten Tuban yang dilindungi | Unit | N/A | 5774 | 5774 | 5774 | 5774 | |
| 3. | Jumlah Gedung Kesenian | Buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | Cakupan Kajian Seni | kegiatan | 6 | 6 | 6,8 | 20 | 20 | |
| 5. | Cakupan Fasilitas Seni | unit | 5 | 5 | 6,2 | 20 | 20 | |
| 6. | Cakupan Gelar Seni | kegiatan | 5 | 17 | 15 | 20 | 20 | |
| 7. | Cakupan Misi Kesenian | kegiatan | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| 8. | Cakupan SDM kesenian | % | N/A | N/A | N/A | 95 | 95 | |
| 9. | Cakupan Tempat Kesenian | % | N/A | N/A | N/A | 35 | 35 | |
| 10. | Jumlah benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | buah | 2584 | 2584 | 2584 | 2584 | 2084 | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|---------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 11. | Jumlah kesenian daerah yang dikelola | buah | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 2.1.18 | KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan | orang | 190 | 190 | 190 | 190 | N/A | |
| 2. | Jumlah Organisasi Kepemudaan | organisasi | 30 | 26 | 26 | 26 | N/A | |
| 3. | Jumlah Organisasi Keolahragaan | organisasi | 25 | 30 | 30 | 30 | N/A | |
| 4. | Jumlah Gelanggang / Balai Remaja | unit | 8 | 8 | 8 | 8 | N/A | |
| 5. | Jumlah Lapangan Olahraga | lapangan | 55 | 299 | 299 | 300 | 300 | |
| 6. | Jumlah Dan Jenis Olahraga Berprestasi | jenis | 9 | 9 | 9 | 9 | N/A | |
| 2.1.19 | PERPUSTAKAAN | | | | | | | |
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan | orang | N/A | N/A | 531117 | 596587 | 66408 | |
| 2. | Persentase kecamatan yang terdapat perpustakaan umum (%) | % | N/A | 45 | 60 | 60 | 60 | |
| 3. | Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku | % | N/A | N/A | 64 | 76 | 88 | |
| 2.1.20 | KEARSIPAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase OPD yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku | % | N/A | 54 | 64 | 76 | 88 | |
| 2. | Jumlah arsip inaktif/statis yang tertata | berkas | N/A | 51.354 | 48.957 | 56.797 | 88.441 | |
| 2.1.21 | STATISTIK | | | | | | | |
| 1. | Buku "Kabupaten Dalam Angka" | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 2. | Buku "PDRB Kabupaten" | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 3. | Buku "Kecamatan Dalam Angka" | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | |
| 2.1.22 | PERTANAHAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat | % | 10.59 | 11.36 | 13.08 | 21.35 | 27.31 | |
| 2.2 | Urusan Pilihan | | | | | | | |
| 2.2.1 | PERTANIAN | | | | | | | |
| 1. | Jumlah produksi komoditas tanaman pangan | Ton | 1.252.156 | 1.271.987 | 1.250.347 | 1.360.482 | 1.378.012 | |
| 2. | Jumlah produksi komoditas tanaman perkebunan | Ton | 109.006 | 107.014 | 113.110 | 113.515 | 101.220 | |
| 3. | Jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura | Ton | N/A | 28.684 | 65.614 | 39.527 | 60.905,50 | |
| 4. | Pendapatan bruto petani | Rp/kap/Thn | N/A | 33.383.920 | 36.914.332 | 38.263.129 | 41.820.770 | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 5. | Persentase kenaikan kelas kelompok tani | % | N/A | 7 | 4 | 15 | N/A | |
| 6. | Persentase sarana pertanian yang digunakan | % | 96,57 | 95,41 | 97,43 | 97,32 | 96,61 | |
| 7. | Persentase prasarana pertanian yang digunakan | % | 78,5 | 73,9 | 72,5 | 52,8 | 36,22 | |
| 2.2.2 | PERINDUSTRIAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah | % | 2,52 | 2,53 | 2,61 | 2,74 | 1,67 | |
| 2. | Persentase unit usaha IKM yang meningkat skala usahanya | % | 0,34 | 0,34 | 0,66 | 1,03 | 1,13 | |
| 2.2.3 | PERDAGANGAN | | | | | | | |
| 1. | Jumlah unit Usaha Dagang | Unit | 23.500 | 23.930 | 24.675 | 26.177 | 26.545 | |
| 2. | Jumlah omset usaha sektor perdagangan | miliar rupiah | 12.690 | 13.165 | 13.545 | 14,13 | 14,323 | |
| 3. | Tingkat stabilitas harga 22 bahan pokok masyarakat < 13 persen | % | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| 2.2.4 | PARIWISATA | | | | | | | |
| 1. | Jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara di Kabupaten Tuban | Orang | N/A | 5.700.404 | 6.966.335 | 7.034.136 | 2.836.845 | |
| 2. | Jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara di Kabupaten Tuban | Orang | N/A | 5.700.404 | 6.966.335 | 7.034.136 | 2.836.845 | |
| 3. | Long Stay / waktu lama tinggal wisatawan | hari | N/A | 1,65 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| 4. | Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata | % | N/A | 3% | 5% | 7% | 10% | |
| 2.2.5 | PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | | | | | |
| 1. | Jumlah produksi perikanan | Ton | 49.408,46 | 49.858,90 | 53.677,36 | 57.538,95 | 63.645,23 | |
| 2. | Jumlah olahan hasil perikanan | Ton | N/A | 45.352,930 | 39.357 | 47.056,81 | 34.738,09 | |
| 3. | Jumlah konsumsi ikan | kg/kapita/tahun | 32,93 | 35,4 | 37,97 | 38,8 | 53,04 | |
| 4. | Jumlah produksi peternakan | Ekor | N/A | 16.692.395 | 17.108.512 | 17.537.672 | 17.605.232 | |
| 5. | Tingkat konsumsi protein hewani | Kg/kapita/tahun | N/A | 3,39 | 3,42 | 3,53 | 3,58 | |
| 2.3 | Urusan Penunjang | | | | | | | |
| 2.3.1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | |
| 1. | Persentase jumlah kebijakan yang menjadi kebijakan dibidang agama | % | N/A | N/A | 75,7 | 75,7 | 79 | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2. | Indeks Pelayanan Publik | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,53 | |
| 3. | Indeks Reformasi Birokrasi | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,40 | |
| 4. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan kriteria KemenPANRB | Nilai | 45,58 (C) | 61,29 (B) | 67,92 (B) | 69,00 (B) | 69,67 (B) | |
| 5. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) | Nilai | 3,1199 | 3,1394 | 3,3469 | Belum rilis | Belum rilis | |
| 6. | Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan Ekonomi | % | N/A | N/A | 83,3 | 83 | 85,71 | |
| 7. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai/ Kategori | N/A | N/A | 80,35 (Baik) | 81,17 (Baik) | 84,85 (Baik) | |
| 2.3.2 | SEKRETARIAT DEWAN | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Niai IKM | N/A | 76 (Baik) | 76 (Baik) | 76 (Baik) | 78 (Baik) | |
| 2.3.3 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan | % | N/A | N/A | 191,36 | 99 | 43,66 | |
| 2. | Persentase ASN dengan Kinerja yang baik | % | N/A | N/A | 99,29 | 96 | 98,35 | |
| 3. | Persentase ASN yang menerima kompensasi | % | N/A | N/A | 100 | 100 | N/A | |
| 4. | Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi | % | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,71 | |
| 5. | Persentase ASN yang memiliki disiplin yang baik | % | N/A | N/A | 110 | 100 | 114 | |
| 6. | Indeks Profesional ASN | | N/A | N/A | N/A | 99 | 43,66 | |
| 2.3.4 | PENGAWASAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | % | N/A | N/A | 99,76 | 100 | 99,87 | |
| 2. | Persentase penanganan kasus aduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. | % | N/A | N/A | 100 | 100 | 100 | |
| 3. | Persentase OPD yang di-evaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB | % | N/A | N/A | 60,86 | 65,22 | 89,13 | |
| 4 | Presentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang di tindaklanjuti | % | 87 | 80 | 65,45 | 82,9 | 92,15 | |
| 2.3.5 | KEUANGAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | % | N/A | 36,44 | -0,11 | 17,05 | 6,49 | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|--------------|--|----------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2. | Persentase peningkatan kualitas LKD (%) | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3. | Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat (%) | % | 10,59 | 11,36 | 13,08 | 21,35 | 27,31 | |
| 4. | Persentase OPD yang di inventarisir (%) | % | N/A | N/A | 2,17 | 43,48 | 93,48 | |
| 5. | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6. | Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah | - | 0,1666 | 0,1738 | 0,1802 | 0,1955 | 0,2195 | |
| 7. | Indeks Kapasitas Fiskal | - | 0,20 | 1,14 | 1,452 | 1,345 | 1,431 | |
| 2.3.6 | PERENCANAAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase OPD dengan kualitas dokumen perencanaan yang baik (%) | % | N/A | 84 | 73,08 | 84 | 100 | |
| 2. | Persentase penjabaran program RPJMD dalam dokumen RKPD | % | N/A | 98 | 100 | 98 | 91,67 | |
| 3. | Persentase capaian sasaran tahunan pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% | % | N/A | 93 | 82 | 81 | 89,1 | |
| 4. | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5. | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.3.7 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | |
| 1. | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan | % | N/A | N/A | 80 | 80 | 75 | |
| 2. | Indeks Inovasi Daerah | - | N/A | N/A | 4000 | 3807 | 3807 | |
| 3 | Daya Saing Daerah | | | | | | | |
| 3.1 | Kemampuan Ekonomi | | | | | | | |
| 1. | Laju Pertumbuhan PDRB | % | 4.9 | 5 | 5.16 | 5.14 | -4,1 | |
| 2. | PDRB per Kapita | Juta Rp | 45.16 | 48.56 | 52.08 | 55.04 | 52,95 | |
| 3. | Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) | investor | N/A | N/A | 245 | 614 | 482 | |
| 4. | Jumlah investasi berskala nasional (PMA/PMDN) | Milyar | N/A | N/A | 4.171 | 27.700 | 14.294 | |
| 3.2 | Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian | | | | | Keterangan |
|------------|---|----------|---------|-------|--------|--------|--------|------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana | % | N/A | 15 | 30 | 40 | 60 | |
| 2. | Persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%) | % | N/A | N/A | 69 | 72 | 75 | |
| 3. | Cakupan Ketersediaan Air Baku/ Irigasi | % | N/A | N/A | 80,2 | 83 | 85,2 | |
| 4. | Cakupan Konektivitas Wilayah | % | N/A | N/A | 93,3 | 93,8 | 88,88 | |
| 5. | Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index) | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 74.14 | |
| 6. | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | - | N/A | N/A | N/A | 75,86 | 75,80 | |
| 3.3 | Iklm Berinvestasi | | | | | | | |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) | investor | N/A | N/A | N/A | 614 | 482 | |
| 2 | Jumlah investasi berskala nasional (PMA/PMDN) | Milliar | N/A | N/A | N/A | 27.700 | 14.294 | |
| 3 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di Dinas PMPTSPNK | Nilai | N/A | N/A | N/A | 81,72 | 84,24 | |
| 4 | Persentase Peningkatan nilai investasi | % | N/A | 1,84 | -0,99 | 4,5 | 54,27 | |
| 3.4 | Sumber Daya Manusia | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 66.19 | 66.77 | 67.43 | 68.37 | 68,7 | |
| 2 | Angka Rata-rata lama sekolah | tahun | 6,25 | 6,48 | 6,52 | 6,81 | 6,95 | |
| 3 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,17 | 12,18 | 12,19 | 12,2 | 12,22 | |
| 4 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 70,67 | 70,8 | 70,01 | 71,26 | 71,43 | |
| 5 | Daya Beli Masyarakat | Juta | 9,355 | 9,54 | 10,048 | 10,499 | 10,238 | |

Sumber : Data Diolah Bappeda, 2021)

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah merupakan komposisi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis untuk mengetahui keadaan keuangan daerah perlu dilakukan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa merencanakan program dan kebijakan yang akan dilakukan di suatu daerah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah yang dijadikan pondasi untuk perencanaan pembangunan daerah harus tercantum di RPJMD daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang penting dalam penyusunan RPJMD. Hal ini dikarenakan gambaran pengelolaan keuangan yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di RPJMD akan bisa mendeskripsikan keuangan yang digunakan dalam suatu pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. Dengan demikian APBD yang tercantum di

RPJMD akan menggambarkan program prioritas pembangunan daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan dapat dianalisis melalui keuangan yang digunakan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tuban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian serta memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Demi mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana pembangunan lima tahunan melalui RPJMD, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk masyarakat umum. Gambaran pengelolaan keuangan membahas mengenai analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, juga menganalisis perkembangan neraca daerah yang meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah perlu diketahui sebagai dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan daerah dan penjabaran APBD ditetapkan dengan peraturan Bupati. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam; (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kabupaten Tuban dalam melakukan pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan komitmen pemerintah

kabupaten guna mewujudkan suatu sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada subbab ini akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tuban terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer berasal dari bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, pendapatan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban semakin meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlahnya belum terlalu besar. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban masih tergantung dari pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat antara lain DBH pajak / bukan pajak, DAU, DAK, DID, dan dana desa maupun pendapatan transfer antar daerah yaitu dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan provinsi. Hal inilah yang menjadi persoalan yang penting bagi penerimaan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang

- dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi, pelayanan pasar, retribusi penyewaan tanah, retribusi pemakaian laboratorium, retribusi terminal retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2020

| No. | Uraian | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| 1 | PENDAPATAN | 2,183,545,377,123.84 | 2,376,526,696,431.43 | 2,455,664,334,976.63 | 2,650,229,496,675.59 | 2,578,839,055,752.70 | 4.35 |
| 1.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 364,133,296,889.84 | 497,223,807,932.43 | 442,531,646,743.74 | 518,003,562,562.47 | 566,077,757,668.16 | 12.97 |
| 1.1.1. | Pendapatan Pajak daerah | 173,837,492,597.60 | 194,942,273,735.15 | 206,118,222,787.00 | 236,424,785,507.31 | 306,909,482,317.00 | 15.60 |
| 1.1.2. | Hasil Retribusi daerah | 21,916,473,831.00 | 24,283,568,805.05 | 29,915,717,568.17 | 7,141,164,524.00 | 31,534,164,145.00 | 74.86 |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 11,081,531,774.74 | 11,023,833,733.44 | 11,036,116,409.50 | 11,857,711,437.73 | 14,812,410,122.89 | 7.99 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah | 157,297,798,686.50 | 266,974,131,658.79 | 195,461,589,979.07 | 232,579,901,093.43 | 212,821,701,083.27 | 13.36 |
| 1.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 1,766,130,500,234.00 | 1,871,581,188,499.00 | 1,929,455,162,353.00 | 2,036,412,128,195.00 | 1,918,625,184,979.00 | 2.21 |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 1,443,895,947,283.00 | 1,418,244,471,704.00 | 1,493,217,733,407.00 | 1,529,633,733,214.00 | 1,409,012,104,780.00 | (0.48) |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 99,898,634,223.00 | 4,967,625,045.00 | 82,041,594,994.00 | 77,598,456,058.00 | 96,965,661,714.00 | 1.01 |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 8,522,591,217.00 | 24,493,170,082.00 | 72,249,797,730.00 | 81,502,888,482.00 | 36,139,571,896.00 | 46.09 |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 1,046,758,509,000.00 | 1,028,370,328,000.00 | 1,027,874,285,222.00 | 1,066,053,324,000.00 | 972,894,861,000.00 | (1.71) |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 278,716,212,843.00 | 290,413,348,577.00 | 311,052,055,461.00 | 304,479,064,674.00 | 303,012,010,170.00 | 2.18 |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 198,514,339,000.00 | 302,322,233,000.00 | 253,450,413,000.00 | 289,284,956,000.00 | 365,885,070,000.00 | 19.19 |
| 1.2.2.1 | Dana Penyesuaian | 198,514,339,000.00 | 302,322,233,000.00 | 253,450,413,000.00 | 289,284,956,000.00 | 365,885,070,000.00 | 19.19 |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 123,720,213,951.00 | 151,014,483,795.00 | 182,787,015,946.00 | 217,493,438,981.00 | 143,728,010,199.00 | 7.04 |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 123,720,213,951.00 | 151,014,483,795.00 | 153,180,299,996.00 | 183,969,331,981.00 | 135,601,081,199.00 | 4.33 |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.3 | Bantuan Keuangan | - | - | 29,606,715,950.00 | 33,524,107,000.00 | 8,126,929,000.00 | - |
| 1.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 53,281,580,000.00 | 7,721,700,000.00 | 83,677,525,879.89 | 95,813,805,918.12 | 94,136,113,105.54 | 227.73 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | - | - | 83,677,525,879.89 | 95,813,805,918.12 | 94,136,113,105.54 | - |
| 1.3.2 | Pendapatan Lainnya | 53,281,580,000.00 | 7,721,700,000.00 | - | - | - | - |

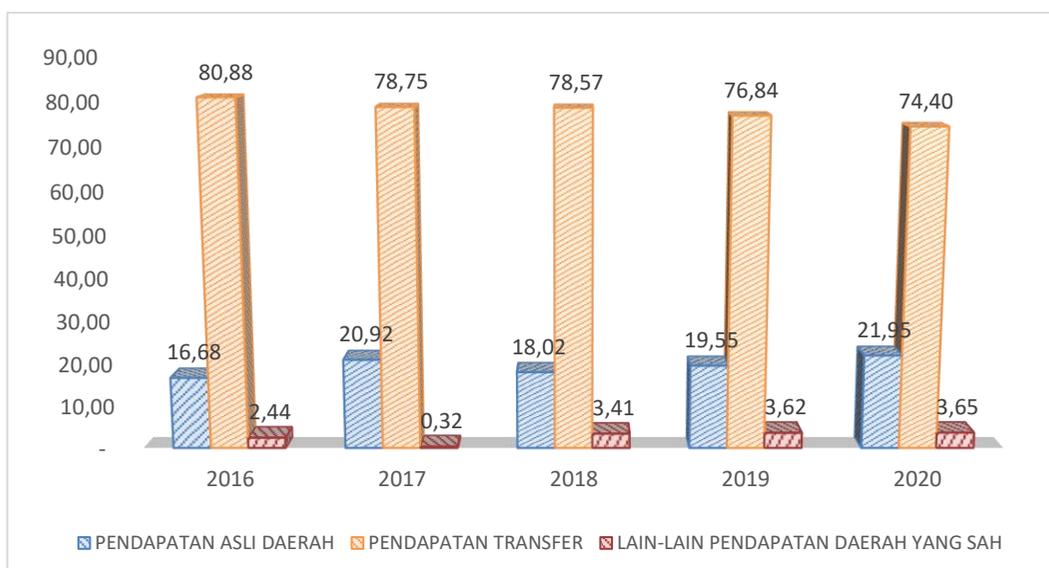
(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016–2020 Audited, BPPKAD Kab Tuban, 2021)

Berdasarkan data selama tahun 2016-2020, mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun pada tahun 2020 angka pendapatan Kabupaten Tuban menurun sebesar 2,77 % dari tahun 2019 dimana salah satu penyebabnya adalah adanya pandemic covid 19 namun secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Tuban mengalami peningkatan meskipun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,35 %. Pada tahun 2017, total pendapatan Kabupaten Tuban sebesar Rp. 2.376.526.696.431,43 dimana meningkat 8,12% dari tahun 2016, kemudian tahun 2018 meningkat sebesar 3,32 % menjadi Rp. 2.455.664.334.976,63. Tahun 2019 terjadi meningkat 7,34% menjadi Rp. 2.650.229.496.675,59. Secara keseluruhan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan dan kemajuan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini :



Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020
(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban Audited, 2016 – 2020, BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Secara terperinci, komposisi pendapatan daerah selama periode tahun anggaran 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Persentase Komposisi pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban Audited, 2016 – 2020, BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Berdasarkan grafik pada gambar 3.2 selama tahun 2016-2020 perkembangan Kabupaten Tuban diketahui penyumbang terbanyak selama 5 tahun berasal dari Pendapatan Transfer (dana perimbangan) dengan persentase terbesar 80,88% di tahun 2016, yang secara tren mengalami penurunan prosentase. Apabila dianalisis, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Tuban terhadap pemerintah pusat dari segi pendapatan masih sangat besar. Penyumbang terbesar kedua adalah pendapatan asli daerah dengan persentase terbesar 21,95% di tahun 2020 dan komposisi pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 4 tahun cenderung mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung mengalami peningkatan dalam memberi sumbangsih pada pendapatan daerah Kabupaten Tuban dengan persentase terbesar sebesar 3,65 terjadi di tahun 2020.

B. Belanja Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam

rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah secara umum diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Tuban 2016-2020

| No | Uraian | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| 2.1 | Belanja Operasi | 1,417,978,761,262.87 | 1,483,245,937,666.11 | 1,539,096,564,973.69 | 1,652,045,062,374.49 | 1,685,699,268,992.41 | 4.44 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 976,169,868,729.00 | 849,070,830,212.50 | 855,495,188,766.74 | 986,006,778,840.80 | 982,063,509,956.68 | 0.65 |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 317,131,339,734.38 | 486,444,884,344.61 | 532,404,819,994.94 | 511,029,954,582.49 | 485,115,060,553.49 | 13.44 |
| 2.1.3 | Belanja Hibah | 104,214,938,190.49 | 115,920,832,517.00 | 139,348,967,797.01 | 129,643,155,151.20 | 197,235,767,357.24 | 19.15 |
| 2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 19,808,542,250.00 | 31,252,415,500.00 | 11,847,588,415.00 | 25,365,173,800.00 | 21,284,931,125.00 | 23.42 |
| 2.1.5 | Bantuan Keuangan | 654,072,359.00 | 556,975,092.00 | - | - | - | (28.71) |
| 2.2 | Belanja Modal | 464,180,160,121.32 | 497,409,334,514.91 | 494,963,683,321.90 | 474,259,825,168.00 | 309,230,413,251.33 | (8.08) |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 66,326,696,680.22 | 16,786,400,483.00 | 19,576,786,475.00 | 23,795,278,644.69 | 10,042,421,905.00 | (23.58) |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 75,960,818,295.35 | 78,102,880,405.82 | 100,282,858,033.45 | 119,556,197,000.11 | 84,921,205,760.46 | 5.37 |
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 79,133,553,091.35 | 121,936,840,558.75 | 139,801,992,277.78 | 76,045,292,738.31 | 58,674,411,007.11 | 0.07 |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 238,190,006,789.40 | 256,643,710,972.00 | 217,811,493,136.88 | 237,587,763,837.60 | 147,673,471,595.32 | (9.04) |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 3,054,572,815.00 | 23,492,591,895.34 | 16,827,288,898.79 | 16,588,929,110.28 | 7,155,083,583.44 | 145.61 |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 1,514,512,450.00 | 446,910,200.00 | 663,264,500.00 | 686,363,837.00 | 763,819,400.00 | (1.83) |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | 4,463,052,399.00 | 13,524,010.00 | 113,306,268.00 | 1,191,862,851.05 | 53,560,485,652.00 | 1,495.96 |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 4,463,052,399.00 | 13,524,010.00 | 113,306,268.00 | 1,191,862,851.05 | 53,560,485,652.00 | 1,495.96 |
| 2.4 | Transfer | 332,457,075,008.00 | 385,887,726,031.43 | 381,038,025,530.99 | 427,157,493,983.66 | 415,283,979,808.98 | 6.03 |
| 2.4.1 | Transfer Bagi Hasil | 18,022,134,184.00 | 20,180,425,100.43 | 23,254,004,900.99 | 25,220,423,533.66 | 28,319,875,969.98 | 11.99 |
| 2.4.1.1 | Bagi Hasil Pajak | 16,149,205,133.00 | 17,506,447,375.81 | 19,247,622,310.90 | 20,584,441,281.22 | 25,101,942,340.41 | 11.81 |
| 2.4.1.2 | Bagi Hasil Retribusi | 1,872,929,051.00 | 2,673,977,724.62 | 4,006,382,590.09 | 4,635,982,252.44 | 3,217,933,629.57 | 19.43 |
| 2.4.1.3 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa | 1,004,990,350.00 | 112,594,380,450.00 | 217,330,810.00 | - | - | 2,725.93 |
| 2.4.1.4 | Transfer Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa | 313,429,950,474.00 | 253,112,920,481.00 | 356,583,879,320.00 | 400,948,501,450.00 | 385,964,017,839.00 | 7.58 |
| 2.4.1.5 | Belanja Bagi Hasil Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.6 | Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya | - | - | 982,810,500.00 | 988,569,000.00 | 1,000,086,000.00 | 0.44 |
| BELANJA DAERAH | | 2,219,079,048,791.19 | 2,366,556,522,222.45 | 2,415,211,580,094.58 | 2,554,654,244,377.20 | 2,463,774,147,704.72 | 2.73 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (35,533,671,667.35) | 9,970,174,208.98 | 40,452,754,882.05 | 95,575,252,298.39 | 115,064,908,047.98 | 83.58 |

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016 – 2020 Audited, BPPKAD Kab Tuban, 2021)

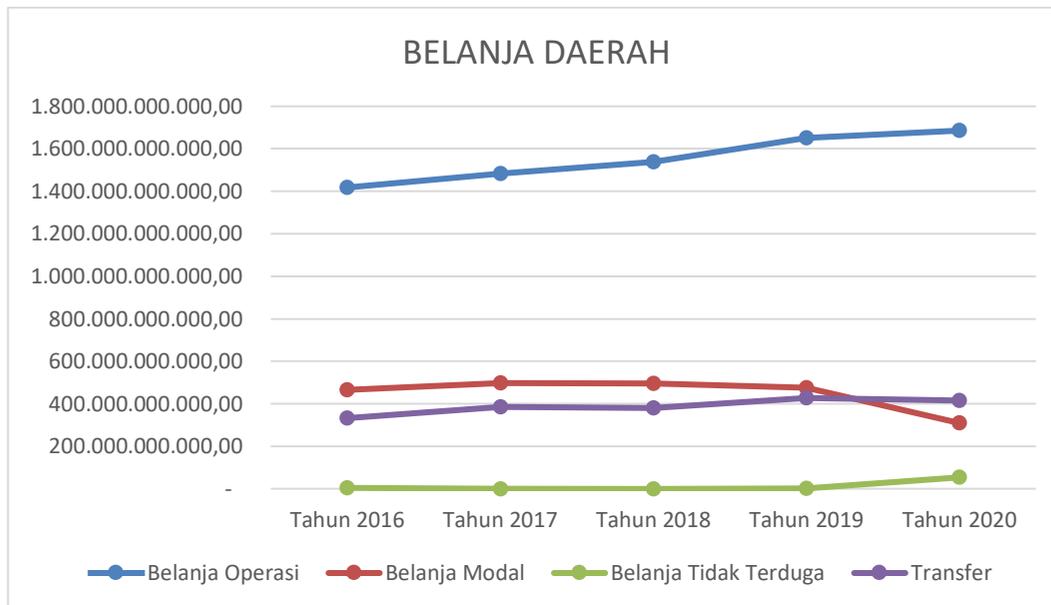


Gambar 3. 3 Total Belanja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban, 2016 – 2020 Audited BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Dari gambar di atas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 cenderung meningkat, namun ada tahun 2020 realiasi belanja daerah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 seiring dengan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah Kabupaten Tuban antara lain disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait refocusing belanja untuk pembiayaan penanggulangan pandemi covid-19 dan pengalokasian pada belanja tidak terduga, sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2016 – 2020, rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 2,73%.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Secara rinci realisasi belanja daerah dilihat dari komposisi belanja daerah tahun 2016 – 2020 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 4 Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban, 2016 – 2020), BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Berdasarkan gambar 3.4 diketahui bahwa realisasi belanja operasi selama periode 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,44 %. Untuk belanja modal cenderung mengalami penurunan, belanja transfer, dan belanja tidak terduga cenderung mengalami peningkatan.

Selanjutnya jika dilihat dari capaian kinerja belanja daerah dapat dilihat pada table dibawah ini.

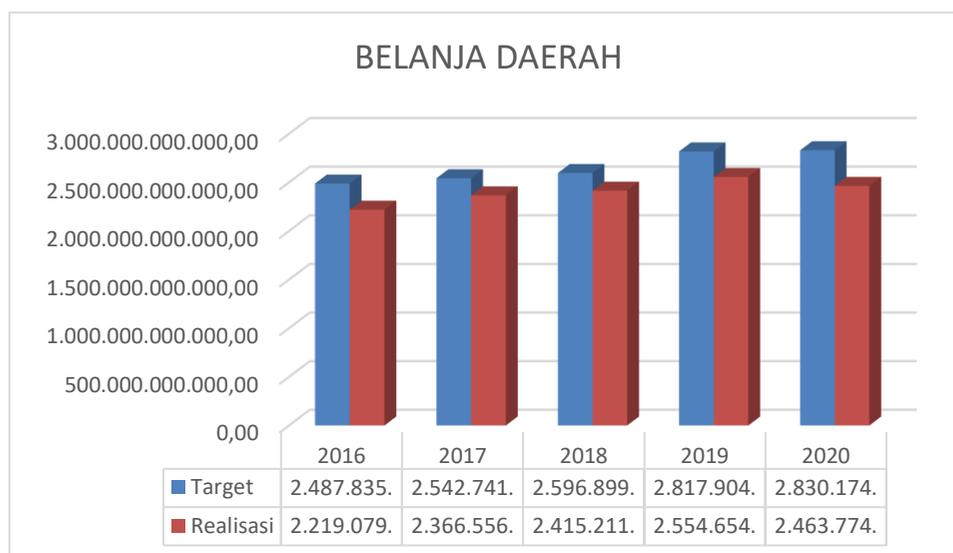
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016-2020

| No. | Tahun | Target | Realisasi | Selisih | Persentase |
|--|-------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2016 | 2,487,835,684,122.59 | 2,219,079,048,791.19 | -268,756,635,331.40 | 89.20 |
| 2 | 2017 | 2,542,741,880,972.14 | 2,366,556,522,222.45 | -176,185,358,749.69 | 93.07 |
| 3 | 2018 | 2,596,899,799,569.44 | 2,415,211,580,094.58 | -181,688,219,474.86 | 93.00 |
| 4 | 2019 | 2,817,904,581,941.50 | 2,554,654,244,377.20 | -263,250,337,564.30 | 90.66 |
| 5 | 2020 | 2,830,174,665,860.00 | 2,463,774,147,704.72 | -366,400,518,155.28 | 87.05 |
| Rata-rata Prosentase Realisasi Belanja Daerah | | | | | 90.60 |

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban, 2016 – 2020 Audited, BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata prosentase antara target dan realisasi belanja daerah dari tahun 2016 – 2020 adalah sebesar 90,60%, dengan tingkat capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 93,07%. Adapun ditinjau dari tingkat capaian kinerja, maka realisasi

belanja daerah selama periode tahun 2016 - 2020 dapat digambarkan dengan Gambar berikut:



Gambar 3. 5 Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2020

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban, 2015 – 2019 Audited, BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Berdasar gambar tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah setiap tahun tidak memenuhi target/rencana, hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyerapan anggaran.

Tabel 3. 4 Rasio Realisasi Pendapatan Dengan Realisasi Belanja Dalam Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2016 – 2020

| No | URAIAN | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|----|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Pendapatan Daerah | 2,183,545,377,123.84 | 2,376,526,696,431.43 | 2,455,664,334,976.63 | 2,650,229,496,675.59 | 2,578,839,055,752.70 |
| 2 | Belanja Daerah | 2,219,079,048,791.19 | 2,366,556,522,222.45 | 2,415,211,580,094.58 | 2,554,654,244,377.20 | 2,463,774,147,704.72 |
| 3 | Rasio | 0.984 | 1.004 | 1.016 | 1.037 | 1.046 |

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban, 2016 – 2020 Audited, BPPKAD Kab Tuban, 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase terbesar antara pendapatan daerah dengan belanja daerah terjadi pada tahun 2019 dan 2020.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, basik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan OPD.

Tabel 3. 5 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tuban 2016-2020

| No | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Rata-Rata Pertumbuhan |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| | Pembiayaan | | | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 294,018,836,475.48 | 264,646,713,610.90 | 275,450,838,335.35 | 311,565,281,197.40 | 403,313,892,772.99 | 9.16 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Penerimaan Kembali Penyertaan Modal | - | - | - | - | 3,950,000,000.00 | - |
| 3.1.4 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 2,279,246,200.00 | - | 202,304,800.00 | - | - | - |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | 400,059,134.97 | 833,950,515.46 | 130,783,180.00 | 329,944,415.80 | 81,833,500.00 | 50.61 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 296,698,141,810.45 | 265,480,664,126.36 | 275,783,926,315.35 | 311,895,225,613.20 | 407,345,726,272.99 | 9.26 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2,970,000,000.00 | - | 4,671,400,000.00 | 4,156,585,138.60 | - | (52.76) |
| 3.2.3 | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2,970,000,000.00 | - | 4,671,400,000.00 | 4,156,585,138.60 | - | (52.76) |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 293,728,141,810.45 | 265,480,664,126.36 | 271,112,526,315.35 | 307,738,640,474.60 | 407,345,726,272.99 | 9.60 |
| | SILPA Tahun Berkenaan | 258,194,470,143.10 | 275,450,838,335.34 | 311,565,281,197.40 | 403,313,892,772.99 | 522,410,634,320.97 | 19.69 |

(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016 – 2020, BPPKAD Kab Tuban, 2021)

Berdasarkan Tabel 3.5. Realisasi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan peningkatan dan penurunan. Realisasi pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu Rp. 407,345,726,272.99.

3.1.2 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah menjelaskan pasal 3 ayat (1) angka 3 menjelaskan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia bahwa neraca adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban selama kurun waktu 2016-2020 seperti terlihat tabel berikut dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tuban 2016-2020

| No | Uraian | Jumlah | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ASET | | | | | | |
| 11 | ASET LANCAR | | | | | | |
| | Kas dan Setara Kas | | | | | | |
| 11101 | Kas di Kas Daerah | 243,073,781,035.47 | 247,180,230,691.95 | 275,244,598,583.51 | 335,768,896,751.17 | 419,356,192,726.64 | 14.98 |
| 11102 | Kas di Bendahara Penerimaan | 14,134,507.77 | 25,124,700.00 | 20,399,560.00 | 22,879,220.00 | 9,951,627.00 | 3.65 |
| 11103 | Kas di Bendahara Pengeluaran | - | 1,087,014,363.00 | 662,272.00 | - | - | (49.98) |
| 11104 | Kas di Bendahara BLUD | 3,894,143,225.63 | 6,299,811,898.30 | 17,141,334,582.59 | 33,918,658,394.98 | 57,085,942,714.67 | 100.01 |
| 11105 | Kas di Bendahara JKN | 11,226,545,882.00 | 10,874,596,007.80 | 11,510,132,485.73 | 14,948,580,117.73 | 19,739,451,130.73 | 16.16 |
| 11106 | Kas Lainnya | 8,089,041,784.40 | 11,071,075,037.30 | 7,699,880,258.57 | 18,654,998,744.11 | 26,219,096,121.93 | 47.31 |
| | Investasi Jangka Panjang | | | | | | |
| | Piutang | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan | | | | | | |
| 11109 | Piutang Pajak Daerah | 2,306,328,482.85 | 11,736,283,098.25 | 18,160,836,253.00 | 10,471,322,458.00 | 18,866,593,444.00 | 125.36 |
| 11110 | Piutang Retribusi Daerah | 497,381,689.80 | 1,924,044,576.00 | 4,068,005,894.67 | 933,803,456.67 | 795,747,590.00 | 76.61 |
| 11111 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg sah | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 11112 | Piutang Lain-lain PAD yg Sah | - | 26,089,827,367.70 | 44,031,440,938.99 | 43,195,541,556.60 | 13,554,575,563.00 | (0.44) |
| 11113 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | - | - | - | 12,072,460,062.00 | 14,358,154,184 | (25.00) |
| 11114 | Piutang Transfer Pemerintah Lainnya | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 11115 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | - | 27,322,076,629.00 | 9,347,878,533.00 | - | 10,328,846,832.00 | (41.45) |
| | Penyisihan Piutang Pendapatan | | (14,193,675,774.00) | (14,951,183,504.12) | (14,402,224,321.54) | (9,951,250,671.63) | (7.31) |
| | Piutang Lain-lain | | | | | | |
| 11115 | Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang | - | - | - | - | - | - |
| 11116 | Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | | | | - | - | 0.00 |
| 11117 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | | | - | - | 0.00 |
| 11118 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | | 88,004,952.57 | 88,004,952.57 | 920,566,044.96 | 63,004,952.57 | 213.22 |

| No | Uraian | Jumlah | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11119 | Uang Muka | | - | - | - | - | - |
| 11120 | Piutang Lainnya | 51,475,862,395.07 | 10,992,320,662.90 | 9,877,690,357.66 | 9,547,745,941.86 | 9,465,912,441.86 | (23.25) |
| 11121 | Penyisihan Piutang Lainnya | | (10,553,737,408.16) | (9,854,299,945.80) | (9,639,913,699.89) | (9,528,917,394.43) | (2.49) |
| 11122 | Belanja Dibayar Dimuka | 43,971,736.33 | 35,030,408.33 | 26,089,080.33 | 17,137,545.33 | 284,804,115.96 | 370.43 |
| 11123 | Persediaan | 45,568,438,393.63 | 27,217,035,551.40 | 26,891,999,791.09 | 67,417,720,353.70 | 51,633,230,154.23 | 21.45 |
| JUMLAH ASET LANCAR | | 366,189,629,132.94 | 357,195,062,762.34 | 399,303,470,093.78 | 523,848,172,625.68 | 622,281,355,532.52 | 14.14 |
| 12 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | | |
| 121 | Investasi Non Permanen | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Investasi Permanen | 99,346,005,706.57 | 156,974,669,474.27 | 162,480,170,850.65 | 180,804,029,343.98 | 188,665,148,699.58 | 19.29 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | | 99,346,005,706.57 | 156,974,669,474.27 | 162,480,170,850.65 | 180,804,029,343.98 | 188,665,148,699.58 | 19.29 |
| 13 | ASET TETAP | | | | | | |
| 13101 | Tanah | 1,934,627,523,436.15 | 3,623,443,217,894.55 | 3,675,231,255,138.55 | 3,705,491,190,547.08 | 3,723,426,357,156.78 | 22.51 |
| 13201 | Peralatan dan Mesin | 469,039,788,387.82 | 510,901,499,462.35 | 601,970,915,309.10 | 723,194,230,751.01 | 812,232,471,649.11 | 14.80 |
| 13301 | Gedung dan Bangunan | 1,039,641,343,769.36 | 1,142,340,143,625.76 | 1,283,137,281,780.54 | 1,344,841,892,836.18 | 1,399,288,258,493.39 | 7.77 |
| 13401 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2,395,520,252,238.40 | 2,663,476,798,735.70 | 2,872,954,187,909.79 | 3,122,896,166,782.20 | 3,274,349,432,415.10 | 8.15 |
| 13501 | Aset Tetap Lainnya | 58,040,029,968.36 | 76,784,435,207.72 | 87,398,261,556.65 | 103,639,455,542.96 | 109,939,816,311.96 | 17.70 |
| 13601 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 141,372,788,536.22 | 3,117,093,425.00 | 3,718,311,664.00 | 5,637,652,834.50 | 5,232,974,384.33 | (8.52) |
| 13701 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (2,152,928,905,139.01) | (2,148,738,714,264.64) | (2,312,517,518,285.42) | (2,590,365,512,813.57) | (2,850,343,812,262.37) | 7.37 |
| JUMLAH ASET TETAP | | 3,885,312,821,197.31 | 5,871,324,474,086.44 | 6,211,892,695,073.22 | 6,415,335,076,480.36 | 6,474,125,498,148.30 | 15.28 |
| 14 | DANA CADANGAN | | | | | | 0.00 |
| 14101 | Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ASET LAINNYA | | | | | | - |
| 15301 | Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 15302 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 15302 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - | 9,901,375,022.71 | 10,527,175,022.71 | 10,527,175,022.71 | 10,527,175,022.71 | 1.58 |
| 15303 | Aset Tidak Berwujud | | 593,408,420.00 | | | | 108.88 |

| No | Uraian | Jumlah | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 3,350,265,350.00 | | 3,503,688,850.00 | 3,835,245,245.00 | 4,521,809,645.00 | |
| | Amortisasi Aset Tak Berwujud | (2,398,607,910.00) | | (2,986,546,450.00) | (3,313,911,129.00) | (3,669,807,488.00) | (19.57) |
| 15303 | Aset Lain-lain | 12,911,908,159.87 | 82,280,444,750.97 | 46,562,851,143.67 | 10,250,050,601.83 | 4,286,877,604.35 | 89.42 |
| | Aset Lain-Lain-Aset dalam kondisi rusak | | | | | | 0.00 |
| | Aset Lain-Lain- Persediaan Barang yang diserahkan pada masyarakat | | | | | | 0.00 |
| | Aset Lain-lain Tidak ditemukan/Aset dalam penelusuran | 4,142,789,191.97 | | | | 3.530.700.158,00 | (25.00) |
| | Aset Lain-lain Diserahkan ke propinsi | 125,251,114,774.09 | | | | | (25.00) |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | | | | | (30.721.253.910,05) | 0.00 |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 143,257,469,565.93 | 92,775,228,193.68 | 57,607,168,566.38 | 21,298,559,740.54 | 15,666,054,784.06 | (40.65) |
| | JUMLAH ASET | 4,494,105,925,602.75 | 6,478,269,434,516.72 | 6,831,283,504,584.03 | 7,141,285,838,190.56 | 7,300,738,037,164.47 | 14.09 |
| 2 | KEWAJIBAN | | | | | | - |
| 21 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | | - |
| 21101 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | - | 1,087,014,363.00 | - | - | - | |
| 21102 | Pendapatan Diterima Dimuka | - | 99,134,521.00 | 83,972,267.12 | 84,617,095.89 | 168,850,682.93 | 21.26 |
| 21103 | Utang Beban | - | 8,698,687,093.36 | 26,765,610,372.91 | 22,189,458,800.20 | 12,708,392,993.00 | 36.97 |
| 21108 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 35,276,260,650.42 | 16,764,619,104.30 | - | 179,648,900.00 | 9.771.764.370,00 | (63.12) |
| | | | | | | | 0.00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 35,276,260,650.42 | 26,649,455,081.66 | 26,849,582,640.03 | 22,453,724,796.09 | 12,877,243,675.93 | (20.68) |
| 22 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | - |
| 22105 | Utang Dalam Negeri | - | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 35,276,260,650.42 | 26,649,455,081.66 | 26,849,582,640.03 | 22,453,724,796.09 | 22,649.008,045.93 | (20.68) |
| 3 | EKUITAS DANA | | | | | | - |
| | JUMLAH EKUITAS DANA | 4,458,829,664,952.33 | 6,451,619,979,435.06 | 6,804,433,921,944.00 | 7,118,832,113,394.47 | 7,278,089,029,118.54 | 14.25 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 4,494,105,925,602.75 | 6,478,269,434,516.72 | 6,831,283,504,584.03 | 7,141,285,838,190.56 | 7,300,738,037,164.47 | 14.09 |

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2016–2020 Audited, BPPKAD Kab Tuban, 2021)

Gambaran umum pertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 2016 - 2020, sebagai berikut:

- Rata-rata pertumbuhan Aset Daerah mencapai 14,04%, kenaikan signifikan terjadi pada Aset Lancar sebesar 14,14%; Aset Tetap sebesar 15,28%. Adanya perkembangan signifikan pada pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi asset Pemerintah Kabupaten Tuban berada pada kondisi sehat.
- Rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana mencapai 14,04%, Peningkatan terjadi pada Ekuitas Dana sebesar 14,24%; Sedangkan rata-rata pertumbuhan kewajiban -20,68%.

Dari perkembangan neraca keuangan di atas selanjutnya dilakukan analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah Kabupaten Tuban dapat diketahui dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

- 1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain:
 - a. Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
 - b. Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek
- 2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain:
 - a. Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
 - b. Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas
- 3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.
 - a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut.
Rata-rata umur piutang = $365 : \text{perputaran piutang}$
Dimana :
Perputaran piutang = $\frac{\text{pendapatan daerah}}{\text{rata-rata piutang pendapatan daerah}}$
Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = $(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}) : 2$

- b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = $365 : \text{perputaran persediaan}$

Dimana :

Perputaran persediaan = $\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun} : \text{rata-rata nilai persediaan}$.

Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = $(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan}) : 2$.

Analisis terhadap neraca keuangan daerah pada tahun 2016 - 2020 yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

| Rasio | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rasio Likuiditas | Rasio Lancar | 9.09 | 12.38 | 13.87 | 20.33 | 27.47 |
| | Rasio Quick | 9.09 | 12.38 | 13.87 | 20.33 | 25.20 |
| Rasio Solvabilitas | Rasio Total Hutang terhadap Total Aset | 0.0078 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0031 | 0.0031 |
| | Rasio Hutang terhadap Modal | 0.0079 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0032 | 0.0031 |
| Rasio Aktivitas | Rata-Rata Umur Piutang | 4.72 | 10.38 | 11.61 | 9.93 | 6.79 |
| | Rata-Rata Umur Persediaan | 92.57 | 195.33 | 257.83 | 134.64 | 194.20 |

(Sumber : Laporan Neraca Kabupaten Tuban, 2016 – 2020 audited, BPPKAD Kab Tuban, 2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat rasio likuiditas masih dalam posisi yang sehat dalam artian bahwa setiap hutang lancar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban masih dapat dijamin dengan baik oleh aset lancar. Sedangkan untuk rasio solvabilitas menunjukkan trend positif, dimana pengadaan aset yang dibiayai oleh hutang mengalami penurunan sepanjang tahun disamping itu rasio hutang terhadap modal setiap tahun mengalami peningkatan, yang berarti setiap tahun ada peningkatan kemampuan dari ekuitas atau modal sendiri dari Pemerintah Kabupaten Tuban untuk membayar kewajiban atau hutang. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang pada tahun 2016 dan 2020 menunjukkan pada kisaran 4,72 dan 11,61, ini berarti bahwa piutang berputar selama 4 – 12 hari. Sedangkan tingkat

efektifitas manajemen dalam pengelolaan persediaan mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya rata-rata umur persediaan yang berarti semakin kecil umur persediaan maka semakin besar tingkat penggunaan persediaan, sehingga semakin besar aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Sesuai data neraca Kabupaten Tuban diatas serta dari hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam kondisi baik, ditunjukkan oleh rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas yang positif.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Idealnya, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu Kabupaten Tuban secara umum bisa dilihat pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan APBD.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Kebijakan pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakan keuangan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Tuban antara lain :

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
6. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
7. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, kebijakan belanja tertuang pada RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2016 -2021, adapun kebijakan belanja tersebut adalah

1. Mengalokasikan anggaran yang memadai agar tercapainya target-target indikator kinerja yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016 -2021.
2. Menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan;
3. Transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi: tujuan, sasaran, kebijakan, program, fungsi dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, sehingga penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparansi dan akuntabel.

c. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan;
3. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.
4. Apabila APBD diperkirakan surplus, maka kebijakan pembiayaan dalam rangka pemanfaatan surplus anggaran diarahkan untuk:
 - a) Pembentukan dana cadangan;
 - b) Penyertaan modal (investasi daerah dengan memilih instrument investasi yang bebas resiko dan menguntungkan secara ekonomi dan sosial;

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

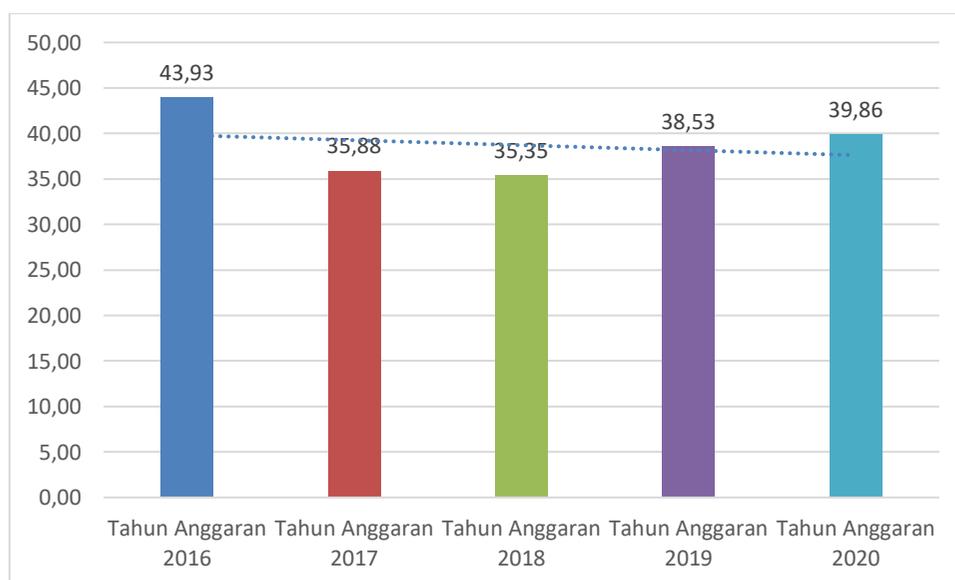
Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Gambaran mengenai belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

| No | Uraian | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp) | Prosentase |
|----|---------------------|---|--|----------------|
| | | (a) | (b) | (a)/(b) x 100% |
| 1 | Tahun Anggaran 2016 | 976,169,868,729.00 | 2,222,049,048,791.19 | 43.93 |
| 2 | Tahun Anggaran 2017 | 849,070,830,212.50 | 2,366,556,522,222.45 | 35.88 |
| 3 | Tahun Anggaran 2018 | 855,495,188,766.74 | 2,419,882,980,094.58 | 35.35 |
| 4 | Tahun Anggaran 2019 | 986,006,778,840.80 | 2,558,810,829,515.80 | 38.53 |
| 5 | Tahun Anggaran 2020 | 982,063,509,956.68 | 2,463,774,147,704.72 | 39.86 |

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tuban, 2016 – 2020 Audited, BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Berdasarkan tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa selama periode 2016-2020, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,558,810,829,515.80 dan terus menurun di tahun 2020 menjadi Rp. 2,463,774,147,704.72. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup besar, hal ini dalam optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Tuban masih relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur agak tinggi terhadap pengeluaran dalam APBD. Prosentase terbesar penggunaan anggaran belanja adalah pada tahun 2016 sebesar 43,93%.



Gambar 3. 6 Persentase Perbandingan Belanja Pegawai Dengan Total Belanja

(Sumber: BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Berdasarkan gambar 3.6 terjadi fluktuatif pada persentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja Kabupaten Tuban. Tahun 2018 persentase perbandingan belanja pegawai dengan total belanja sebesar 35,35% dan meningkat di tahun 2019 menjadi 38,53% dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 39,86%. Hal ini menunjukkan apabila jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat yang berarti alokasi belanja operasi semakin berkurang yang merupakan anggaran terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*prog-rowth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran.

Tabel 3. 9 Surplus (Defisit Riil) Anggaran Kabupaten Tuban

| No | URAIAN | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|-----------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Pendapatan Daerah | 2,183,545,377,123.84 | 2,376,526,696,431.43 | 2,455,664,334,976.63 | 2,650,229,496,675.59 | 2,578,839,055,752.70 |
| | Dikurangi realisasi : | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 2,219,079,048,791.19 | 2,366,556,522,222.45 | 2,415,211,580,094.58 | 2,554,654,244,377.20 | 2,463,774,147,704.72 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 2,970,000,000.00 | - | 4,671,400,000.00 | 4,156,585,138.60 | - |
| | Defisit riil | (38,503,671,667.35) | 9,970,174,208.98 | 35,781,354,882.05 | 91,418,667,159.79 | 115,064,908,047.98 |

(Sumber: BPPKAD Kab. Tuban, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah dari 2016-2020 mengalami deficit riil pada pada tahun 2016 yaitu sebesar (38,503,671,667.35), dan selanjutnya mengalami surplus dari tahun 2017 – 2020.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Sejak tanggal 6 Maret 2019, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam PP 12 Tahun 2019, Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Tranfer Pemerintah Pusat terdiri atas (1) Dana Perimbangan bersumber dari Dana transfer umum yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus, (4) Dana Keistimewaan, dan (5) Dana Desa. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Kabupaten Tuban

| 1 | URAIAN | Jumlah | | | | | Pertumbuhan (%) |
|----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Proyeksi/Target pada Tahun 2022 | Proyeksi/Target pada Tahun 2023 | Proyeksi/Target pada Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun 2025 | Proyeksi/Target pada Tahun 2026 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 556,364,111,487.00 | 612,960,582,667.05 | 675,360,709,969.81 | 744,166,460,358.25 | 820,043,237,694.25 | 10% |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 312,410,105,000.00 | 343,651,115,500.00 | 378,016,227,050.00 | 415,817,849,755.00 | 457,399,634,730.50 | 10% |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 19,201,200,627.00 | 22,081,380,721.05 | 25,393,587,829.21 | 29,202,626,003.59 | 33,583,019,904.13 | 15% |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 17,530,172,073.00 | 19,283,189,280.30 | 21,211,508,208.33 | 23,332,659,029.16 | 25,665,924,932.08 | 10% |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 207,222,633,787.00 | 227,944,897,165.70 | 250,739,386,882.27 | 275,813,325,570.50 | 303,394,658,127.55 | 10% |
| 12 | PENDAPATAN TRANSFER | 1,834,647,512,000.00 | 1,834,647,512,000.00 | 1,834,647,512,000.00 | 1,834,647,512,000.00 | 1,834,647,512,000.00 | - |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Transfer Pem Pusat - Dana Perimbangan | 1,721,888,718,000.00 | 1,721,888,718,000.00 | 1,721,888,718,000.00 | 1,721,888,718,000.00 | 1,721,888,718,000.00 | - |
| 1.2.1.1.1 | Dana Bagi Hasil | 119,244,743,000.00 | 119,244,743,000.00 | 119,244,743,000.00 | 119,244,743,000.00 | 119,244,743,000.00 | - |
| 1.2.1.1.3 | Dana Alokasi Umum | 960,230,004,000.00 | 960,230,004,000.00 | 960,230,004,000.00 | 960,230,004,000.00 | 960,230,004,000.00 | - |
| 1.2.1.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 343,631,392,000.00 | 343,631,392,000.00 | 343,631,392,000.00 | 343,631,392,000.00 | 343,631,392,000.00 | - |
| | Dana Insentif Daerah | 17,921,986,000.00 | 17,921,986,000.00 | 17,921,986,000.00 | 17,921,986,000.00 | 17,921,986,000.00 | - |
| 1.2.1.1.5 | Dana Desa | 280,860,593,000.00 | 280,860,593,000.00 | 280,860,593,000.00 | 280,860,593,000.00 | 280,860,593,000.00 | - |
| 1.2.1.2 | Transfer Pem Pusat - Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2.1 | Dana Penyesuaian | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Transfer Antar Daerah - Pem. Provinsi | 112,758,794,000.00 | 112,758,794,000.00 | 112,758,794,000.00 | 112,758,794,000.00 | 112,758,794,000.00 | - |
| 1.2.2.1 | Pendapatan Transfer Pemda Lainnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 112,758,794,000.00 | 112,758,794,000.00 | 112,758,794,000.00 | 112,758,794,000.00 | 112,758,794,000.00 | - |

| 1 | URAIAN | Jumlah | | | | | Pertumbuhan (%) |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Proyeksi/Target pada Tahun 2022 | Proyeksi/Target pada Tahun 2023 | Proyeksi/Target pada Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun 2025 | Proyeksi/Target pada Tahun 2026 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.2.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak | - | - | - | - | - | |
| 1.2.2.3 | Bantuan Keuangan | - | - | - | - | - | |
| 13 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 89,865,770,000.00 | 89,865,770,000.00 | 89,865,770,000.00 | 89,865,770,000.00 | 89,865,770,000.00 | - |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Pendapatan Lainnya | 89,865,770,000.00 | 89,865,770,000.00 | 89,865,770,000.00 | 89,865,770,000.00 | 89,865,770,000.00 | - |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (11+12+13) | | 2,480,877,393,487.00 | 2,537,473,864,667.05 | 2,599,873,991,969.81 | 2,668,679,742,358.25 | 2,744,556,519,694.25 | 2.56% |
| 2 | BELANJA DAERAH | | | | | | |
| 2,1 | Belanja Operasi | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | 1,119,157,350,507.00 | 1,124,753,137,259.53 | 1,130,376,902,945.83 | 1,136,028,787,460.56 | 1,141,708,931,397.86 | 0.5% |
| | Belanja Barang dan Jasa | 660,491,663,507.00 | 667,096,580,142.07 | 673,767,545,943.49 | 680,505,221,402.93 | 687,310,273,616.96 | 1% |
| | Belanja Hibah | 69,727,737,565.00 | 70,425,014,940.65 | 71,129,265,090.06 | 71,840,557,740.96 | 72,558,963,318.37 | 1% |
| | Belanja Bantuan Sosial | 20,036,277,300.00 | 20,236,640,073.00 | 20,439,006,473.73 | 20,643,396,538.47 | 20,849,830,503.85 | 1% |
| | Jumlah Belanja Operasi | 1,869,413,028,879.00 | 1,882,511,372,415.25 | 1,895,712,720,453.11 | 1,909,017,963,142.91 | 1,922,427,998,837.04 | 1% |
| 2,2 | Belanja Modal | | | | | | |
| | Belanja Modal - Tanah | 3,998,452,753.00 | 4,038,437,280.53 | 4,078,821,653.34 | 4,119,609,869.87 | 4,160,805,968.57 | 1% |
| | Belanja Modal - Peralatan dan Mesin | 52,460,692,277.00 | 52,985,299,199.77 | 53,515,152,191.77 | 54,050,303,713.69 | 54,590,806,750.82 | 1% |
| | Belanja Modal - Bangunan dan Gedung | 65,208,481,677.00 | 65,860,566,493.77 | 66,519,172,158.71 | 67,184,363,880.29 | 67,856,207,519.10 | 1% |
| | Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan | 309,494,468,308.00 | 312,589,412,991.08 | 313,715,307,120.99 | 313,852,460,192.20 | 313,490,984,794.12 | 0.32% |

| 1 | URAIAN | Jumlah | | | | | Pertumbuhan (%) |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Proyeksi/Target pada Tahun 2022 | Proyeksi/Target pada Tahun 2023 | Proyeksi/Target pada Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun 2025 | Proyeksi/Target pada Tahun 2026 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya | 3,947,656,655.00 | 3,987,133,221.55 | 4,027,004,553.77 | 4,067,274,599.30 | 4,107,947,345.30 | 1% |
| | Belanja Modal - Aset Lainnya | - | - | - | - | - | |
| | Jumlah Belanja Modal | 435,109,751,670.00 | 439,460,849,186.70 | 443,855,457,678.57 | 448,294,012,255.35 | 452,776,952,377.91 | 5% |
| 2,3 | Belanja tidak terduga | 32,655,477,729.00 | 11,550,741,340.90 | 10,283,009,475.08 | 9,146,943,387.15 | 8,105,975,499.54 | -25% |
| | Belanja tidak terduga | 32,655,477,729.00 | 11,550,741,340.90 | 10,283,009,475.08 | 9,146,943,387.15 | 8,105,975,499.54 | -25% |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga | 32,655,477,729.00 | 11,550,741,340.90 | 10,283,009,475.08 | 9,146,943,387.15 | 8,105,975,499.54 | -25% |
| | JUMLAH BELANJA | 2,337,178,258,278.00 | 2,336,972,221,601.96 | 2,354,568,178,131.68 | 2,372,311,975,398.26 | 2,390,204,951,214.94 | 1% |
| 2,4 | Belanja Transfer | | | | | | |
| | Transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | | | | | | |
| | Bagi Hasil | 33,323,990,963.00 | 33,361,130,562.70 | 36,773,249,622.11 | 40,650,574,584.32 | 44,915,632,042.75 | 10.29% |
| | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 417,679,065,886.00 | 417,679,065,886.00 | 417,679,065,886.00 | 417,679,065,886.00 | 417,679,065,886.00 | - |
| | Transfer Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemdes | - | - | - | - | - | - |
| | Belanja Bagi Hasil Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| | Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah Transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | 451,003,056,849.00 | 454,452,315,508.11 | 458,220,047,373.92 | 462,381,113,461.86 | 466,977,331,349.46 | 1% |
| | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 2,788,181,315,127.00 | 2,787,975,278,450.96 | 2,805,571,234,980.68 | 2,823,315,032,247.26 | 2,841,208,008,063.94 | 0,50% |
| | SURPLUS / DEFISIT | (307,303,921,640.00) | (250,501,413,783.91) | (205,697,243,010.87) | (154,635,289,889.02) | (96,651,488,369.69) | -25% |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | | |
| 3,1 | Penerimaan pembiayaan | | | | | | |

| 1 | URAIAN | Jumlah | | | | | Pertumbuhan (%) |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Proyeksi/Target pada Tahun 2022 | Proyeksi/Target pada Tahun 2023 | Proyeksi/Target pada Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun 2025 | Proyeksi/Target pada Tahun 2026 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 307,451,921,640.00 | 250,626,413,783.91 | 205,817,243,010.87 | 154,750,289,889.02 | 96,766,488,369.69 | -25% |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | | | |
| 3.1.3 | Penerimaan Kembali Penyertaan Modal | | | | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 148,000,000.00 | 125,000,000.00 | 120,000,000.00 | 115,000,000 | 115,000,000 | -6% |
| 3.1.5 | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - | - | - | |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | 307,303,921,640.00 | 250,501,413,783.91 | 205,697,243,010.87 | 154,635,289,889.02 | 96,651,488,369.69 | -25% |
| 3,2 | Pengeluaran pembiayaan | | | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran cicilan pokok utang | | | | | | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | | |
| 3.2.5 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | | | | | |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | | 307,303,921,640.00 | 250,501,413,783.91 | 205,697,243,010.87 | 154,635,289,889.02- | 96,651,488,369.69 | -25% |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | | - | - | - | - | - | |

(Sumber: BPPKAD, data diolah Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proyeksi keuangan daerah Kabupaten Tuban 2021 - 2026 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai proyeksi pendapatan belanja daerah Kabupaten Tuban meliputi 3 hal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 2,480,877,393,487.00, Tahun 2023 sebesar Rp. 2,537,473,864,667.05, Tahun 2024 sebesar Rp. 2,599,873,991,969.81, Tahun 2025 sebesar Rp. 2,668,679,742,358.25. Tahun 2026 sebesar Rp. 2,744,556,519,694.25. Sedangkan proyeksi Belanja Kabupaten Tuban tahun 2022 sebesar Rp. 2,788,181,315,127.00, tahun 2023 sebesar Rp. 2,787,975,278,450.96, tahun 2024 sebesar Rp. 2,805,571,234,980.68, tahun 2025 sebesar Rp. 2,823,315,032,247.26, dan tahun 2026 sebesar Rp. 2,841,208,008,063.94. Serta untuk proyeksi pembiayaan Kabupaten Tuban tahun 2022 sebesar Rp. (307,303,921,640.00), tahun 2023 sebesar Rp. (250,501,413,783.91), pada tahun 2024 sebesar Rp. (205,697,243,010.87), pada tahun 2025 sebesar Rp. (154,635,289,889.02), dan pada tahun 2026 sebesar Rp. (96,651,488,369.69).

A. Kebijakan Pendapatan

Dari Tabel 3.10 di atas diproyeksikan bahwa kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2021-2026, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 9% per tahun. Dengan meningkatnya perekonomian yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi, maka potensi obyek pajak dan retribusi akan meningkat.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.10. kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Balai Penghasil, dan BUMD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, diantaranya melalui penyertaan modal.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tuban yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan investasi daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban.

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
5. Memperhatikan belanja urusan wajib dan mengikat yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya belanja fungsi pendidikan dialokasikan paling sedikit 20 % dari total belanja, belanja fungsi kesehatan minimal 10% dari total belanja diluar gaji, belanja infrastruktur dialokasikan 25 % dari dana transfer umum, alokasi dana desa dan dana keluraha;
6. Mengalokasikan belanja untuk menunjang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19;

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 2 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
3. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Menyusun perencanaan penganggaran Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA) yang cermat dan rasional serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengoptimalkan sinergitas pendanaan melalui potensi dana CSR (Corporate Social Responsibility) dengan memprioritaskan pada dukungan pembangunan berkelanjutan.
6. Pada kondisi tertentu dimungkinkan adanya kebijakan untuk mendapatkan alternatif pendanaan non APBD diantaranya melalui KPBU, hutang antar daerah, Pinjaman SMI.

3.3.2 Penghitungan kerangka pendanaan

Perhitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Tabel 3.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban

| No. | Uraian | Proyeksi | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Pendapatan | 2,480,877,393,487.00 | 2,537,473,864,667.05 | 2,599,873,991,969.81 | 2,668,679,742,358.25 | 2,744,556,519,694.25 |
| 2 | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sisa lebih riil perhitungan anggaran | 307,303,921,640.00 | 250,501,413,783.91 | 205,697,243,010.87 | 154,635,289,889.02 | 96,651,488,369.69 |
| | TOTAL PENERIMAAN | 2,788,181,315,127.00 | 2,787,975,278,450.96 | 2,805,571,234,980.68 | 2,823,315,032,247.26 | 2,841,208,008,063.94 |
| | Dikurangi: | | | | | |
| 4 | Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama | 1,295,706,715,331.00 | 1,302,498,128,762.00 | 1,305,934,725,019.00 | 1,309,544,514,470.00 | 1,313,361,107,499.00 |
| | KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN | 1,492,474,599,796.00 | 1,485,477,149,688.96 | 1,499,636,509,961.68 | 1,513,770,517,777.27 | 1,527,846,900,564.94 |

(Sumber: BPPKAD, data diolah Bappeda Kabupaten Tuban, 2021))

Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban

| No | Uraian | Proyeksi | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Kapasitas Riil kemampuan keuangan | 1,492,474,599,796.00 | 1,485,477,149,688.96 | 1,499,636,509,961.68 | 1,513,770,517,777.27 | 1,527,846,900,564.94 |
| 2 | Prioritas I | 702,014,422,152.00 | 711,694,402,855.06 | 674,135,074,164.83 | 736,389,494,705.21 | 748,456,663,390.58 |
| 3 | Prioritas II | 177,147,716,953 | 179,719,194,126 | 181,516,386,063 | 183,331,549,927 | 185,164,865,423 |
| 4 | Prioritas III | 613,312,460,691.00 | 594,063,552,707.90 | 643,985,049,733.85 | 594,049,473,145.06 | 594,225,371,751.36 |

(Sumber: BPPKAD, data diolah Bappeda Kabupaten Tuban, 2021))

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah yang menunjang urusan wajib pelayanan dasar. Prioritas II merupakan program yang menunjang pencapaian prioritas kepala daerah. Sedangkan Prioritas III merupakan program yang menunjang prioritas perangkat daerah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan instrumen sistemik sebagai dasar melakukan penyelarasan dan merasionalisasi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan konstruksi teknokratis, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yakni tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Tuban merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan beberapa standar, seperti misalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional/Target Tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya, atau tren, sebagaimana telah dibahas pada bagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bab II). Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan melalui indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya, atau tren). Dalam rancangan ini permasalahan pembangunan juga dirumuskan berdasarkan pengintegrasian dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD dan hasil pengkajian permasalahan urusan pemerintahan di mana permasalahan dirumuskan berdasarkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang dilaksanakan sebagai komitmen dan bagian pelaksanaan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data sekunder seperti data dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tuban dapat petakan masalah pokok, masalah, dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|
| 1. Urusan Pendidikan | | |
| Akses dan kualitas pendidikan sesuai standar yang belum merata | Layanan Pendidikan yang berkualitas sesuai standar belum merata*) | <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik tidak merata dan berkurang minat murid kepada sekolah negeri b) Kurangnya Guru PNS c) Belum semua fasilitas pendidikan sesuai standar d) Kualifikasi akademik guru masih kurang e) Akreditasi sekolah belum merata |
| | Angka putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah tinggi | belum dilakukan <i>updating</i> data pada keluarga Pra sejahtera penerima bantuan PIP maupun PKH |
| | Rendahnya rata-rata lama sekolah | <ul style="list-style-type: none"> a) Kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan b) Status pendidikan masyarakat tidak terupdate secara berkala didalam dokumen kependudukan. c) Kurang sinergisnya peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan |
| | Literasi Siswa Masih Rendah *) | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sekolah b) Belum adanya tenaga khusus yang mengelola perpustakaan sekolah |
| 2. Urusan Kesehatan | | |
| Belum meratanya derajat kesehatan masyarakat | Kualitas dan akses layanan kesehatan belum merata. | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum semua fasilitas kesehatan dasar sesuai standar b) Rasio puskesmas per satuan penduduk yang dilayani masih timpang c) Masih terdapat SDM Kesehatan yang belum memenuhi standar sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| | Kasus kematian ibu & bayi serta angka stunting yang masih relatif tinggi. | a) Pencegahan dan deteksi dini penyakit penyerta ibu hamil dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) belum maksimal b) Masih banyaknya warga yang BAB sembarangan (28.126 rumah yang tersebar di 251 desa/kelurahan), di tahun 2021 baru 77 desa/kelurahan yang sudah deklarasi ODF *) c) Aksi kolaboratif penanganan stunting dan ODF masih terbatas |
| 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis integrasi fungsi spasial belum maksimal | Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu ditingkatkan | a) Regulasi tata ruang cenderung terlambat dibandingkan dengan kecepatan pembangunan yang dapat menyebabkan tata ruang di lapangan berkembang tanpa kendali dan menimbulkan ketidakpastian investasi b) cakupan Pembangunan/ perbaikan plengsengan/ tanggul maupun pengerukan/ normalisasi sungai untuk pencegahan banjir belum maksimal c) masih terdapat sarana dan prasarana penanganan air baku yang belum berfungsi maksimal d) Tingkat kerusakan jalan Kabupaten dan Desa yang masih tinggi e) Masih terdapat jalan Kabupaten dan Desa belum memenuhi standard lebar jalan f) semua sungai di Kabupaten Tuban masuk dalam Kewenangan Pusat, termasuk pengambilan air dan bangunan sungai. Sehingga memunculkan masalah dalam penanganan banjir maupun pemanfaatan irigasi g) Tidak adanya Juru Air pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten h) Tidak adanya kelembagaan Petani Pengguna air pada lokasi DI sehingga pengaturan pembagian air diserahkan pada petani di masing-masing Desa |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|---|
| | | i) Belum maksimalnya pembinaan HIPPA dan GHIPPA pada Daerah Irigasi j) Sulitnya mencari sumber air dari permukaan tanah sehingga perlu melakukan sumur bor dalam air tanah |
| 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | |
| Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis integrasi fungsi spasial belum maksimal | Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang perlu ditingkatkan | a) Banyak permukiman yang belum dilengkapi dengan sistem jaringan drainase b) Masih banyak masyarakat yang belum terlayani air bersih yang layak (Akses layanan air minum belum merata*) c) Masih banyak terdapat rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh dengan disesuaikan target dari kriteria kumuh yang ditetapkan dalam Permen PUPR d) Banyak Jalan Lingkungan yang rusak/mengalami penurunan fungsi jalan e) Banyaknya pembangunan perumahan tidak dikendalikan dengan baik sehingga penyerahan aset PSU pada perumahan yang telah dibangun masih banyak yang bermasalah f) Belum adanya update data perumahan/rumah yang sudah dilengkapi PSU |
| 5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | |
| Adanya potensi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban umum di tengah kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat yang semakin terbuka, dinamis dan juga | Ancaman Ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat yang semakin tinggi seiring kompleksitas kehidupan | a) Masih terdapat kasus pelanggaran perundangan daerah b) Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|--|
| meningkatnya ketidakpastian | Potensi kebencanaan Kabupaten Tuban yang relatif tinggi | a) Belum terupdatenya data potensi kebencanaan di Kabupaten Tuban b) Pelaksanaan Manajemen Resiko Bencana belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat c) Belum adanya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pecegahan dan mitigasi bencana d) Penggunaan Teknologi Informasi belum digunakan dalam pelaksanaan mitigasi kebencanaan |
| 6. Urusan Sosial | | |
| Angka kemiskinan masih tinggi di atas angka kemiskinan Jawa Timur dan Nasional dengan laju penurunan yang cenderung lambat*) | Kemiskinan masih ditangani secara parsial dengan pendekatan sosial, belum dioptimalkan dengan pengarusutamaan kolaboratif dengan pendekatan ekonomi. | a) Belum Optimalnya Update Data Kemiskinan dan PMKS. b) Penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel belum sepenuhnya terpenuhi. c) Kemiskinan tidak hanya menimpa kelompok penganggur tetapi juga kelompok produktif berpendapatan rendah di sektor-sektor penyerap tenaga kerja terbesar. d) Belum sinergisnya pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan. e) Penurunan anggaran belanja untuk program pengentasan kemiskinan*) |
| 7. Urusan Tenaga Kerja | | |
| Arus dan struktur investasi tidak selalu linear dengan rasio kesempatan kerja dan kecepatan pertumbuhan angkatan kerja | Belum tercipta <i>link and match</i> pendidikan dan pasar kerja | a) Angkatan kerja didominasi jenjang pendidikan SMA/SMK. b) Banyaknya lulusan SLTA sederajat yang belum mempunyai ketrampilan/skill kompetensi yang dibutuhkan langsung oleh perusahaan c) terbatasnya instruktur dan tempat pelatihan berbasis kompetensi. |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|--|---|
| | Belum optimalnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya | a) Perlindungan upah, stabilitas dan intervensi harga komoditas yang kurang maksimal b) Kurangnya kesadaran hukum para pelaku hubungan industrial terhadap tata Kelola layak c) Kurangnya pengetahuan para pelaku hubungan industrial terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan |
| 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| Belum efektifnya kinerja intervensi sosial kemasyarakatan | Masih belum optimalnya peran pengarusutamaan gender. | a) Masih belum optimalnya Perlindungan Perempuan dan anak; b) Minimnya peran perempuan dalam pembangunan. |
| 9. Urusan Pangan | | |
| Belum meratanya derajat kesehatan masyarakat | 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola pangan harapan 2. Masih terdapat daerah rawan pangan. | a) Keberagaman dan keseimbangan energi dan protein yang kurang b) Cadangan pangan tersedia tetapi surplus pangan tidak meningkat signifikan c) Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat belum optimal terjaga d) Belum sepenuhnya terjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan e) Belum semua desa atau daerah rawan pangan tertangani f) Belum ada mekanisme dan sistem yang digunakan untuk mengawasi peredaran hewan yang keluar/masuk Kab Tuban g) Keamanan pangan dari hewan ternak yang dijual belum semuanya diuji kelayakannya |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|--|
| 10. Urusan Pertanahan | | |
| Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis integrasi fungsi spasial belum maksimal | Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan BPN terkait sertifikat tanah aset daerah belum maksimal 2. Proses sertifikasi aset daerah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit 3. Pengelolaan pertanahan daerah belum maksimal, terutama dalam hal fasilitasi dan pengendalian pemanfaatan tanah. |
| 11. Urusan Lingkungan Hidup | | |
| Adanya ancaman terhadap kualitas, keberlanjutan, Kelestarian Lingkungan Hidup | Pengendalian, Pemeliharaan, pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> a) Ruang Terbuka Hijau belum mencapai 30% dari luas wilayah b) Minimnya ketersediaan dan akses data dan informasi terkait kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan. c) Berkurangnya daya dukung lingkungan belum diimbangi dengan pelaksanaan konservasi yang holistik. d) Terjadinya pencemaran air akibat kurang optimalnya pengendalian buangan pada badan air e) Belum semua parameter pengujian Laboratorium terakreditasi. f) Belum diterapkannya sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu. g) Penegakkan regulasi dan penindakan pelanggaran kejahatan lingkungan yang belum maksimal h) Tidak adanya kewenangan daerah pada bidang pertambangan (dari perencanaan sampai pengawasan) menyebabkan banyaknya aktivitas penambang liar) i) Rendahnya Kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dalam kegiatan pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajibannya. |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|
| | | <p>j) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3*) k) Keterbatasan kapasitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA*)</p> |
| 12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Kurangnya inklusivitas pelayanan yang ramah dan berwawasan difabelitas | Belum optimalnya pemenuhan sarpras untuk difabel dalam pelayanan publik |
| | Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih belum optimal | <p>a) belum banyak inovasi-inovasi layanan dihasilkan dengan pendekatan yang proaktif b) Pelayanan kependudukan belum berbasis teknologi secara maksimal sehingga memberi celah praktek calo c) Data kependudukan tidak di update secara berkala d) Masih banyak pemanfaatan data kependudukan belum berdasarkan perjanjian kerjasama e) Sistem data kependudukan belum seluruhnya terintegrasi dengan sistem pelayanan lain di Kabupaten Tuban</p> |
| 13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| Tingginya jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Tuban berpotensi meningkatkan <i>Total Fertility Rate</i> . | Masih terdapat angka pernikahan dini. | <p>a) Minimnya penyuluhan terkait dampak pernikahan dini b) Masih rendahnya Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan pernikahan dini.</p> |
| | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesejahteraan keluarga. | <p>a) Masih minimnya pembinaan kesejahteraan keluarga kepada masyarakat. b) Penyuluhan masyarakat dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih belum optimal.</p> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| 14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dan Desa | <ul style="list-style-type: none"> a) Kurang intensifnya pembinaan pengelolaan pemerintahan desa b) Minimnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa c) Kurangnya sinergisnya peran kelembagaan masyarakat dalam penguatan daya saing desa d) Keberadaan BUMDes belum sepenuhnya berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa |
| 15. Urusan Perhubungan | | |
| Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis integrasi fungsi spasial belum maksimal | Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan layanan Perhubungan yang belum sepenuhnya terpenuhi | <ul style="list-style-type: none"> a) Banyaknya angkutan kota mati b) Ketersediaan layanan angkutan umum di wilayah pedesaan terbatas c) Masih terdapat ruas jalan yang belum di lengkapi dengan alat kelengkapan jalan d) Layanan pengujian kendaraan masih perlu ditingkatkan e) Belum lengkapnya data rencana jaringan transportasi yang terpadu (termasuk angkutan air) f) Belum meratanya ketersediaan LPJU |
| 16. Urusan Komunikasi dan Informatika | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi dan Informasi | Fungsi dan kegiatan Komunikasi dan Informatika masih belum massif membangun citra kinerja pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> a) Integrasi sistem informasi dan database Perangkat Daerah belum optimal b) Belum optimalnya Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi c) Pengaruh besar media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan citra pemkab maupun kepala daerah. d) Integrasi teknologi informasi e-gov masih berjalan parsial. Variasi dan diferensiasi penggunaan sistem tiap Perangkat Daerah masih tinggi. |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| 17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | |
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | Masih minimnya peran Koperasi dalam menumbuhkan Wirausaha, UMKM dan IKM | <ul style="list-style-type: none"> a) Masih minimnya diversifikasi usaha Koperasi b) Minimnya peran dan kualitas pengelolaan Koperasi dalam penguatan nilai tambah komoditas produk masyarakat setempat |
| | Belum semua sektor memiliki nilai tambah dan keunggulan daya saing yang kuat (Daya saing ekonomi) | <ul style="list-style-type: none"> a) Pemanfaatan teknologi dalam produksi maupun promosi produk belum maksimal b) Kualitas produk belum memenuhi tuntutan kualitas pasar c) Masih minimnya pendampingan kepada Wirausaha, dan UMKM yang dilakukan secara holistik (mulai dari penyiapan produk sampai dengan pemasaran) d) Masih minimnya peran dan kualitas pengelolaan rumah produksi dalam meningkatkan nilai tambah produk |
| 18. Urusan Penanaman Modal | | |
| Masih Rendahnya minat investor terhadap pengelolaan potensi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata | Iklim investasi belum mampu memberikan daya tarik investor | <ul style="list-style-type: none"> a) Minimnya informasi terkait Peta investasi peluang potensi, dan kebutuhan investasi di Kabupaten Tuban b) Kurangnya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pelayanan perizinan hingga pengendalian dan evaluasi terhadap izin yang diterbitkan c) Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam penyiapan iklim investasi yang menarik |
| | Pemerintah belum mampu menjamin ketersediaan dan kontinuitas bahan baku kepada investor dibidang pertanian dan perikanan | Kurangnya sinergitas dan pembinaan perangkat daerah kepada masyarakat dalam penyediaan dan kontinuitas bahan baku kepada investor dibidang pertanian dan perikanan |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| 19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga | | |
| Belum efektifnya kinerja intervensi sosial kemasyarakatan | Peran Kepemudaan dan Olah raga dalam memajukan daerah belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> a) Kurangnya even-even kreatifitas pemuda b) Belum sinergisnya pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembinaan kepemudaan c) Masih minimnya jumlah pemuda berprestasi d) Rendahnya pembinaan atlet menyebabkan minimnya atlet yang berprestasi e) fasilitas-fasilitas olahraga masih terkonsentrasi di perkotaan. f) Minimnya even-even olahraga menyebabkan olahraga kurang masyarakat |
| 20. Urusan Statistik | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Masih terdapat tumpang tindih data statistik sektoral menyebabkan data tidak valid | <ul style="list-style-type: none"> a) Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral belum maksimal b) Belum ada mekanisme pengelolaan data statistik sektoral secara terpadu c) Pengelolaan data statistik masih manual |
| 21. Urusan Persandian | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Pengelolaan persandian masih belum optimal | Sarpras persandian eksisting belum sepenuhnya mendukung kinerja keamanan informasi dan persandian |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|
| 22. Urusan Kebudayaan | | |
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | Rendahnya pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah | <ul style="list-style-type: none"> a) Rendahnya minat dan karakter masyarakat terhadap kesenian dan budaya tradisional. b) Konsep pelestarian dan pemanfaatan budaya sebagai obyek dan aset wisata belum kuat. c) pemeliharaan benda budaya dan sarana prasarana museum belum maksimal d) minat wisata budaya rendah |
| 23. Urusan Perpustakaan | | |
| Akses dan kualitas pendidikan sesuai standar yang belum merata | Minat baca masyarakat masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan perpustakaan masih terbatas dan aksesibilitasnya masih kepada di wilayah perkotaan/ibu kota kecamatan b) Kampanye untuk meningkatkan minat baca masyarakat belum massif |
| 24. Urusan Kearsipan | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Pengelolaan kearsipan belum sepenuhnya tertib | <ul style="list-style-type: none"> a) Arsip Perangkat Daerah belum terkelola dengan baik b) Pengelolaan arsip masih manual |
| 25. Urusan Kelautan dan Perikanan | | |
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | Ancaman keberlanjutan peningkatan produktifitas sektor Kelautan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan sarpras dan teknologi oleh nelayan masih rendah b) Kelembagaan nelayan masih belum berfungsi optimal c) Masih rendahnya SDM pembudidaya ikan d) Pemanfaatan balai benih belum optimal |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|---|
| | | e) Banyak usaha pembudidaya dan penangkapan ikan belum memenuhi standar yang benar dari segi perizinan, teknis, dan keamanan bagi lingkungan f) Rendahnya harga dan kesejahteraan petambak garam g) Masih rendahnya mutu produk pengolahan hasil perikanan. |
| 26. Urusan Pariwisata | | |
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | Pengembangan pariwisata dengan ekonomi kreatif belum terintegrasi | a) Pengembangan Destinasi wisata yang potensial belum didukung konsep dan pedoman perencanaan (lokus di desa) b) pembangunan pariwisata masih secara parsial/ belum menjadi komitmen bersama c) Belum ada strategi promosi pariwisata yang strategis (Promosi lewat media elektronik dan media massa belum efektif dan belum ada promosi wisata di luar Daerah) d) Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pariwisata kurang e) Belum ada manajemen kolaboratif ekonomi kreatif dengan pariwisata. f) Pengembangan wisata pantai terkendala oleh Permen PUPR No.4/2015 (pengelolaan pantai masuk dalam Kewenangan Pusat) |
| 27. Urusan Pertanian | | |
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | 1. Adanya potensi ancaman keberlanjutan produktivitas pertanian 2. Masih rendahnya peningkatan nilai tambah pada komoditas pertanian | a) Adanya kecenderungan petani untuk lebih memilih menanam salah satu jenis tanaman dikarenakan harga pada tahun sebelumnya meningkat (kurangnya diversifikasi komoditas tanam) b) Kurangnya lahan yang diarahkan untuk meningkatkan luas |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---------------|---|---|
| | | <p>tambah tanam (LTT) tanaman pangan</p> <p>c) Adanya ancaman kekeringan dan banjir pada wilayah-wilayah pertanian akan mempengaruhi produktivitas pertanian</p> <p>d) Belum tuntasnya pembangunan infrastruktur penanganan banjir dan irigasi pertanian</p> <p>e) Pengaruh serangan hama penyakit.</p> <p>f) Ketersediaan pupuk bersubsidi belum mencukupi seluruh kebutuhan pupuk petani</p> <p>g) Masih merajalelanya tengkulak pada komoditas pertanian yang merugikan petani</p> <p>h) Mata rantai perdagangan sektor pertanian masih cukup panjang sehingga harga komoditas pertanian dilevel konsumen masih cukup tinggi, sedangkan keuntungan petani rendah</p> <p>i) Minimnya pendampingan kepada petani untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian</p> <p>j) Sulitnya petani mengakses permodalan yang mudah dan berbunga rendah</p> <p>k) Belum semua petani terakses dengan asuransi pertanian</p> <p>l) Perlunya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam memanfaatkan teknologi hasil pertanian</p> |
| | Rendahnya manajemen pemeliharaan ternak | <p>a) Kurangnya tenaga medis dan paramedis veteriner</p> <p>b) Rendahnya kemampuan peternak dalam pembuatan pakan konsentrat sendiri.</p> <p>c) belum optimalnya Rumah Potong Hewan (RPH) dan banyak</p> |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|
| | | peternak yang menyembelih sendiri hewan ternaknya |
| 28. Urusan Perdagangan | | |
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | Nilai perdagangan yang belum akseleratif | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum terpenuhinya standarisasi layanan pasar sesuai SNI 8152 tentang pasar rakyat b) Sektor perdagangan belum maksimal dalam memasarkan hasil produk masyarakat c) Mata rantai perdagangan sektor primer (Pertanian dan perikanan) cukup panjang sehingga harga komoditas sektor primer dilevel konsumen masih cukup tinggi, sedangkan keuntungan penghasil sektor primer (Petani dan nelayan) rendah d) Upaya pengembangan usaha dagang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi e) Perkembangan usaha Perdagangan belum banyak tersentuh modernisasi dan digitalisasi market f) belum banyak pedagang/pengusaha terlibat dalam platform-platform perdagangan digital g) Rendahnya retribusi pelayanan pasar |
| 29. Urusan Perindustrian | | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | Industri menengah-kecil tumbuh belum maksimal | <ul style="list-style-type: none"> a) Kualitas produk belum memenuhi tuntutan kualitas pasar b) Masih minimnya pendampingan kepada IKM yang dilakukan secara holistic (mulai dari penyiapan produk sampai dengan pemasaran) c) Belum tersusunnya Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) d) Masih minimnya peran dan kualitas pengelolaan rumah produksi dalam meningkatkan nilai tambah produk |
| 30. Urusan Transmigrasi | | |
| Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | Rendahnya minat masyarakat terhadap transmigrasi | Kurangnya sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat untuk bertransmigrasi |
| 31. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Belum optimalnya kapasitas Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan rancangan kebijakan daerah | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum maksimalnya perumusan bisnis proses antar perangkat daerah b) Masih kurangnya kapasitas analisis dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah |
| 32. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD | | |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|---|
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang fungsi-fungsi kinerja DPRD | a) Masih kurangnya kapasitas pelayanan kepada DPRD |
| 33. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Belum optimalnya kinerja Perencanaan daerah | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum semua Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan yang berkualitas b) Penjabaran Program RPJMD ke dalam dokumen RKPD dan Renstra maupun Program RKPD ke dalam dokumen Renja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (bernilai kemanfaatan) c) Belum semua target sasaran tahunan pembangunan dapat tercapai sesuai rencana d) Belum memiliki data terpadu yang valid sebagai basis data perencanaan, pengendalian dan evaluasi e) Pelaporan pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya berbasis analisis f) Sistem perencanaan yang saat ini terpusat melalui SIPD belum dilengkapi dengan sistem data dan pengendalian evaluasi |
| 34. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Belum optimalnya kinerja pengelolaan Keuangan dan aset daerah | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya penggalan dan pemungutan potensi sumber-sumber pendapatan lain b) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan perubahan obyek pajak; c) Pencatatan barang milik Daerah masih dilakukan secara |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|
| | | manual |
| 35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Belum optimalnya pengembangan pola karir dan peningkatan kesejahteraan ASN | <ul style="list-style-type: none"> a) Database Kepegawaian saat ini belum realtime dan belum mendukung penerapan <i>merit system</i> b) Belum diterapkannya <i>merit system</i> kepegawaian c) Aplikasi pengelolaan kepegawaian belum terintegrasi dan belum mendukung penerapan <i>merit system</i> d) Bisnis proses dan standar layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal e) Belum ada mekanisme <i>reward and punishment</i> atas kinerja ASN f) Belum diterapkannya standar dan sistem pola karir pegawai secara jelas g) Belum diterapkannya pola pemberian kesejahteraan ASN secara terpadu satu pintu |
| 36. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN | <ul style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan diklat kompetensi belum diselaraskan dengan isu strategis dan program prioritas pembangunan b) Belum ada evaluasi penerapan hasil diklat yang menunjang peningkatan kompetensi |
| 37. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan daerah | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Belum optimalnya kinerja Penelitian dan Pengembangan daerah | <ul style="list-style-type: none"> a) Tematik riset belum sepenuhnya menjawab isu strategis dan pencapaian sasaran prioritas daerah b) Pemanfaatan hasil riset masih belum optimal c) Belum memiliki pusat jejaring inovasi di daerah |

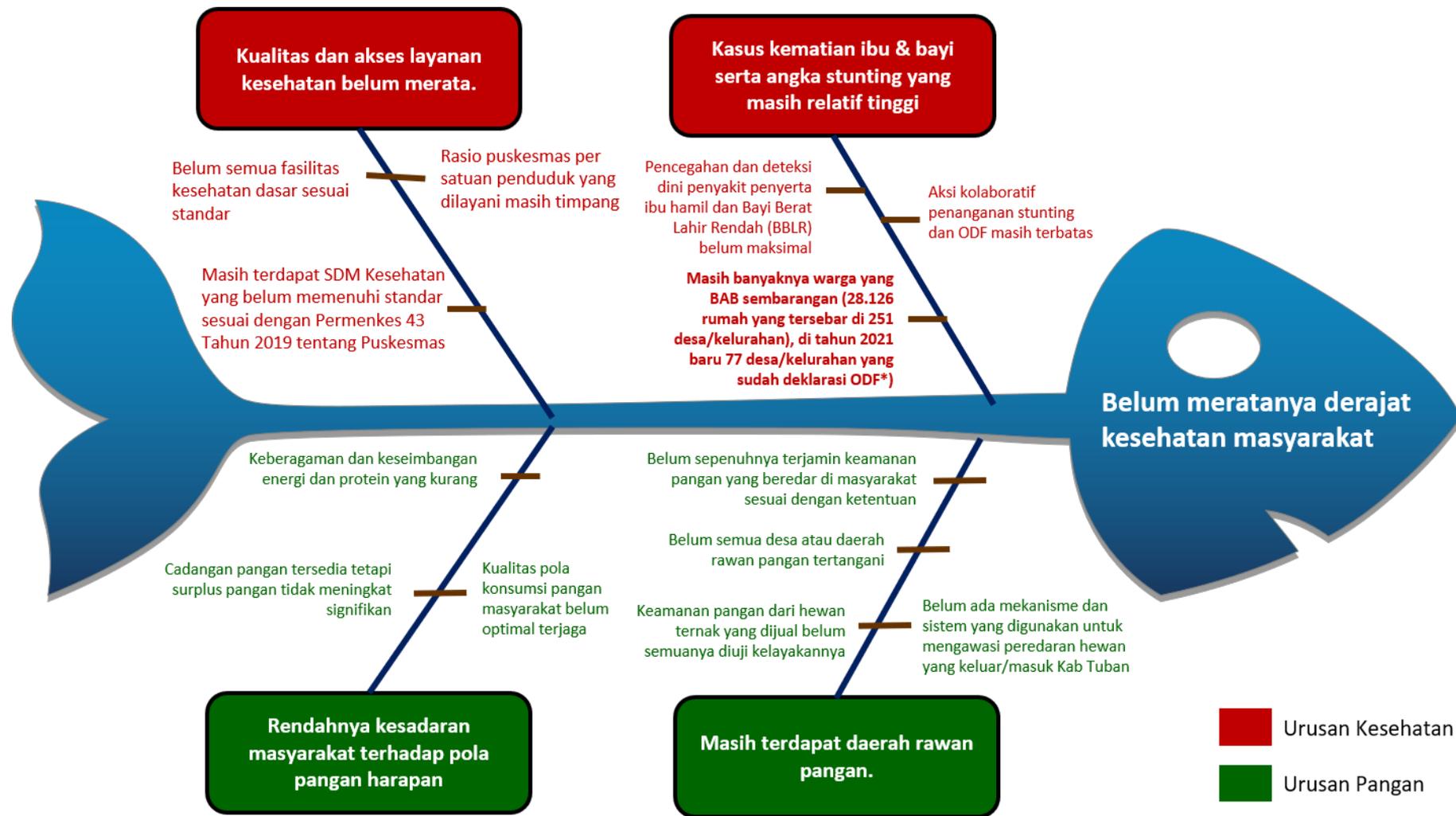
| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| 38. Unsur Pengawasan | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Belum optimalnya pengawasan yang berorientasi pada pembinaan internal daerah | <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan pengawasan masih berorientasi pada temuan b) Output pelaksanaan pengawasan belum ditindaklanjuti dengan SOP pembinaan dan rekomendasi kepada perbaikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi c) Pelaksanaan evaluasi kinerja masih berorientasi pada penilaian dan belum ditindaklanjuti dengan pemberian solusi penyelesaian d) Belum memiliki sistem Aduan berbasis teknologi informasi |
| 39. Unsur Kewilayahan Kecamatan | | |
| Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi | Kapasitas pelayanan belum terstandarisasi | <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi b) Sarana dan prasarana pelayanan belum tersedia sepenuhnya c) SDM pelayanan belum distandarisasi |
| 40. Urusan Pemerintahan Umum | | |
| Adanya potensi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban umum di tengah kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat yang semakin terbuka, dinamis dan juga meningkatnya ketidakpastian | Masih tingginya potensi konflik di dan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum adanya deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sejak dini b) Pendidikan dan partisipasi politik belum merata |

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Hasil Analisis 2021)



Gambar 4.1 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Pendidikan

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)



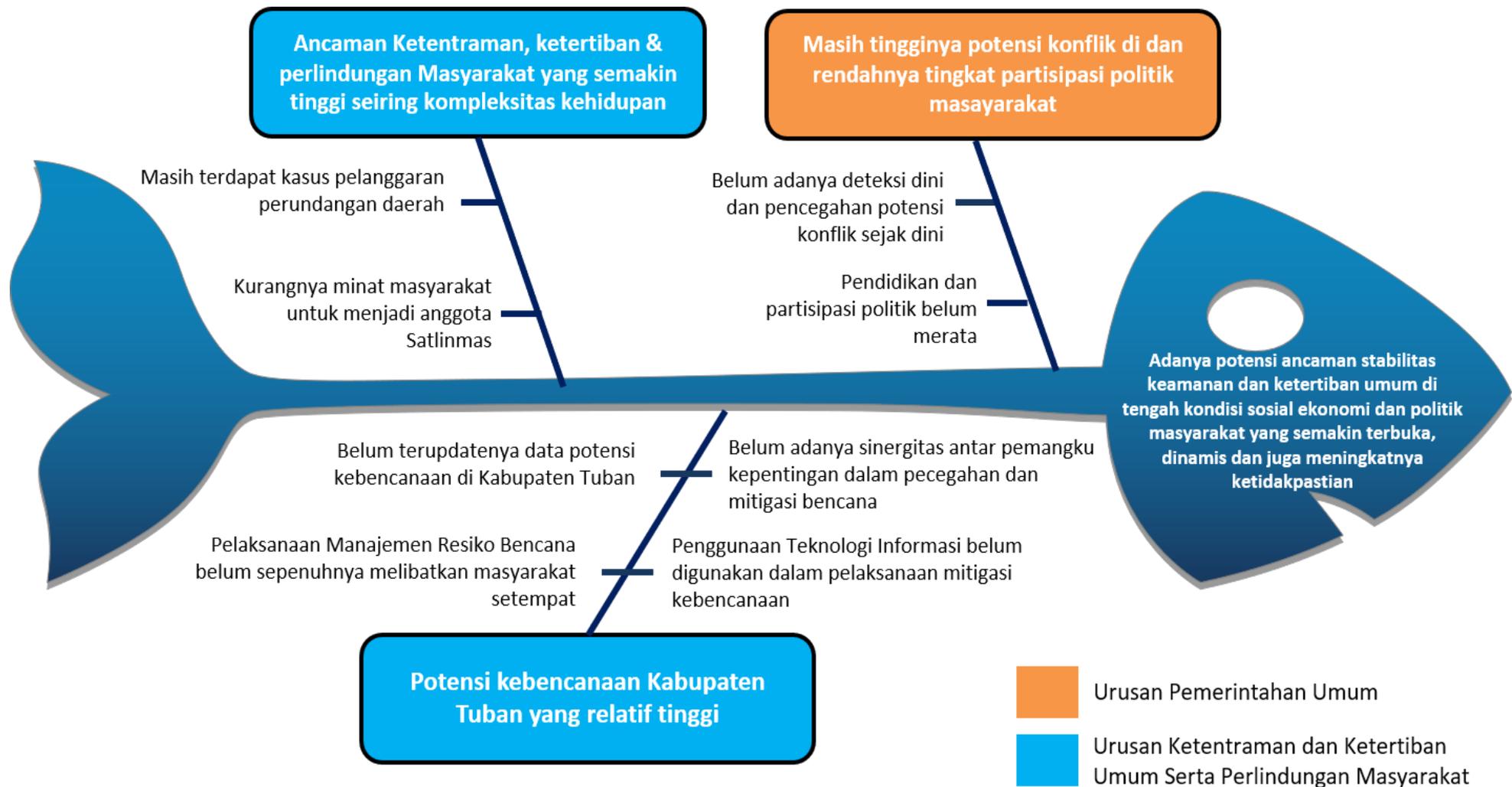
Gambar 4.2 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Kesehatan dan Urusan Pangan

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)

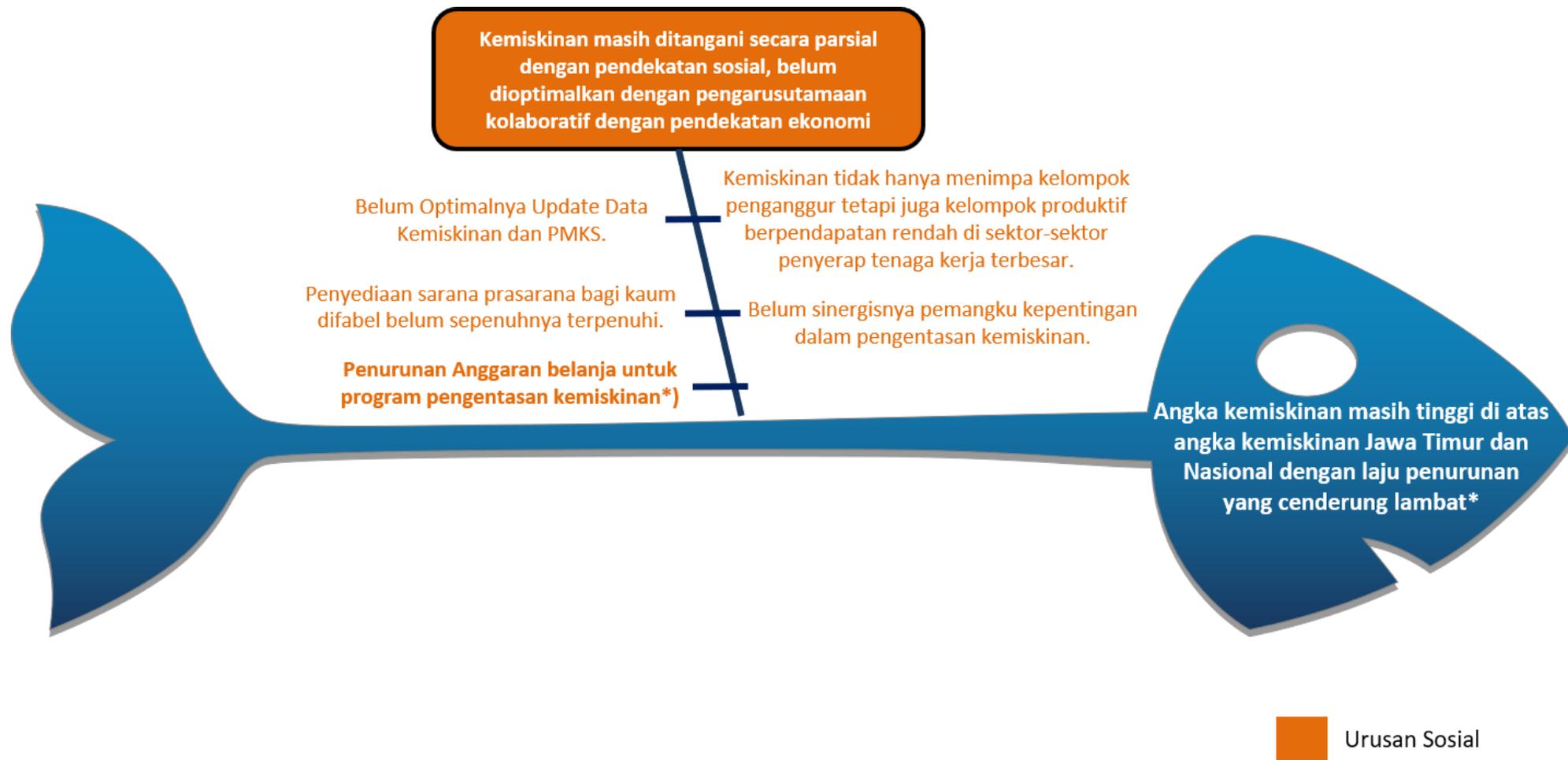


Gambar 4.3 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Perhubungan

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)



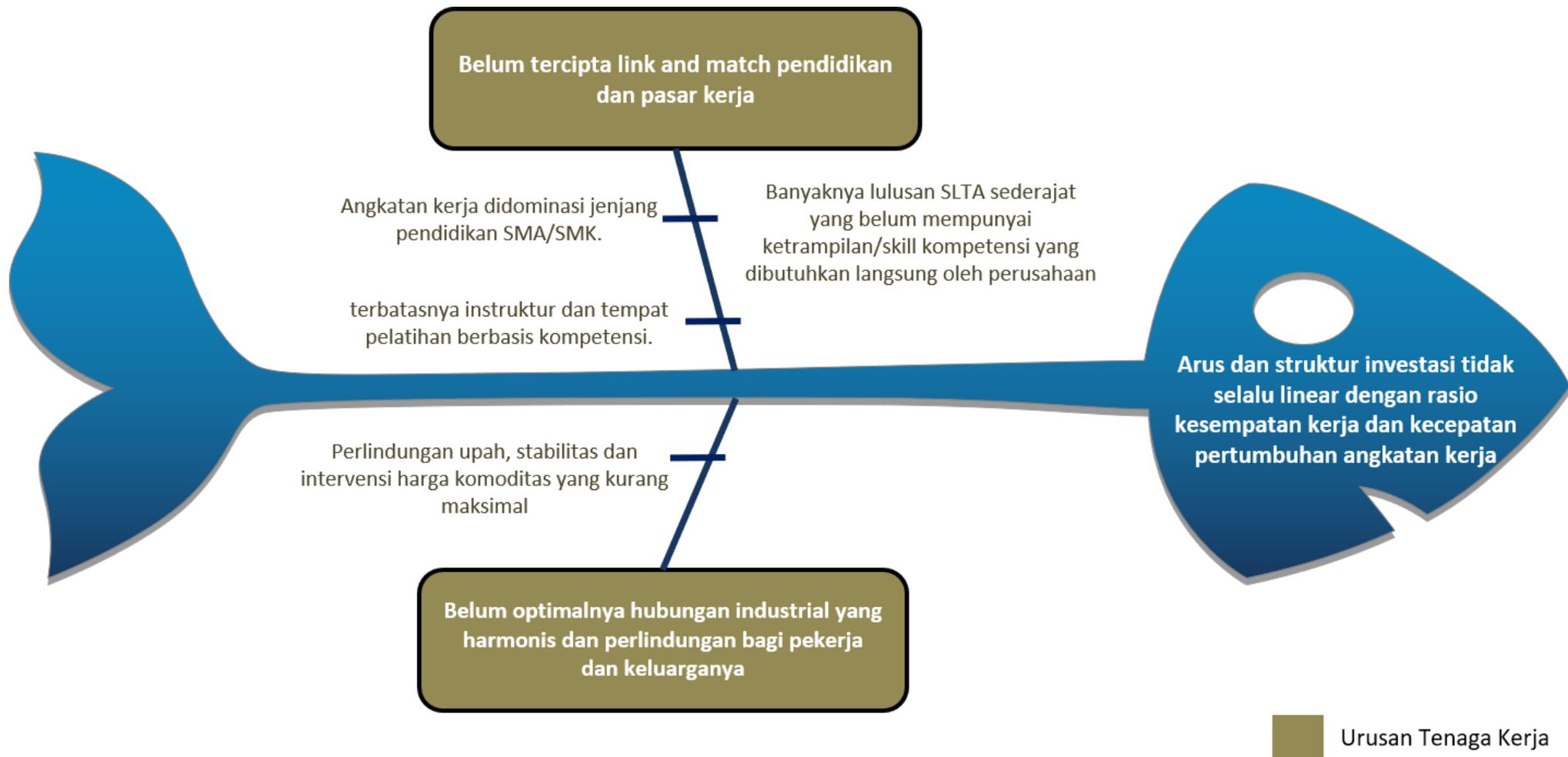
Gambar 4.4 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat



(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)

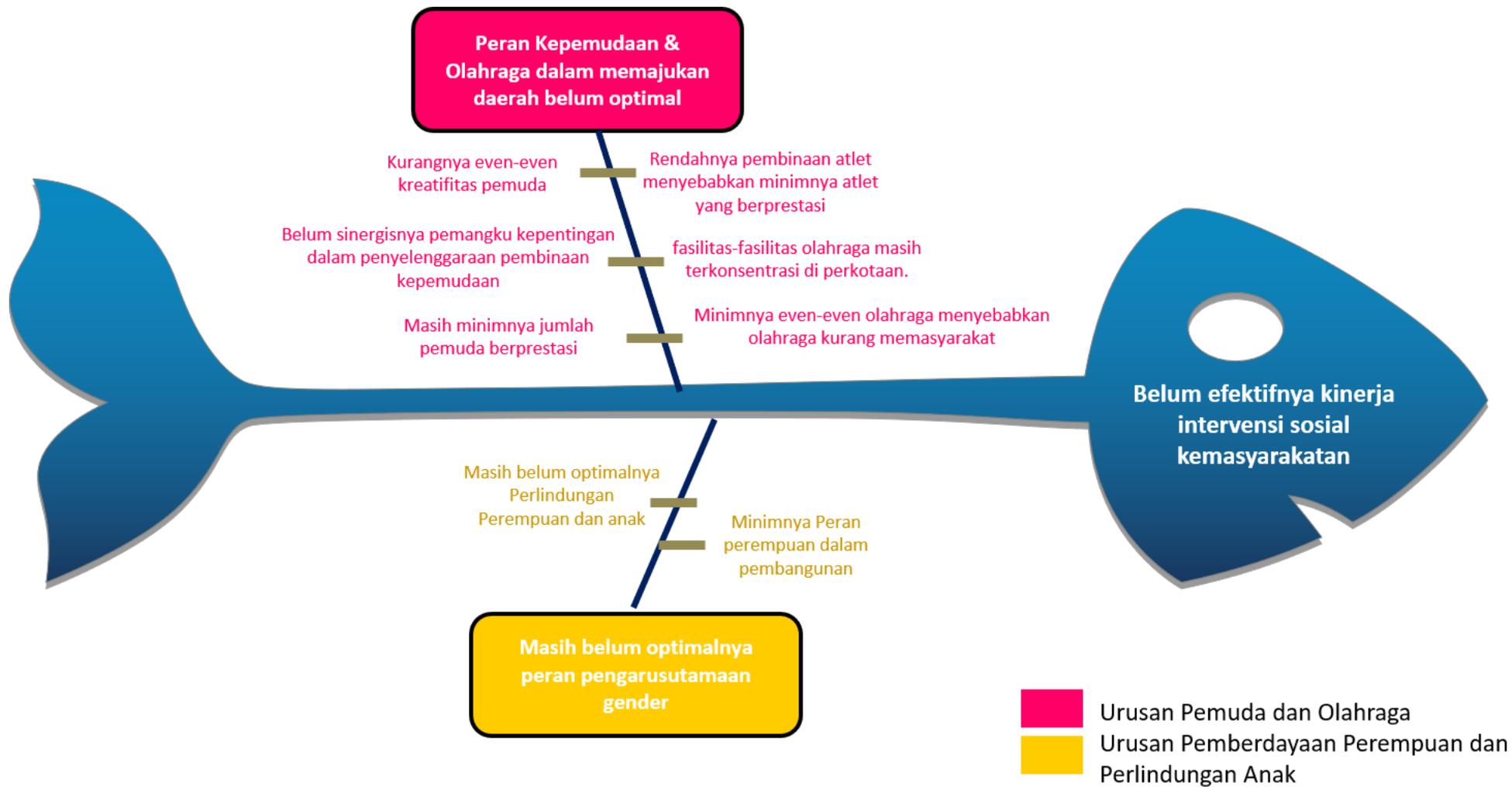
Gambar 4.5 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Sosial

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)



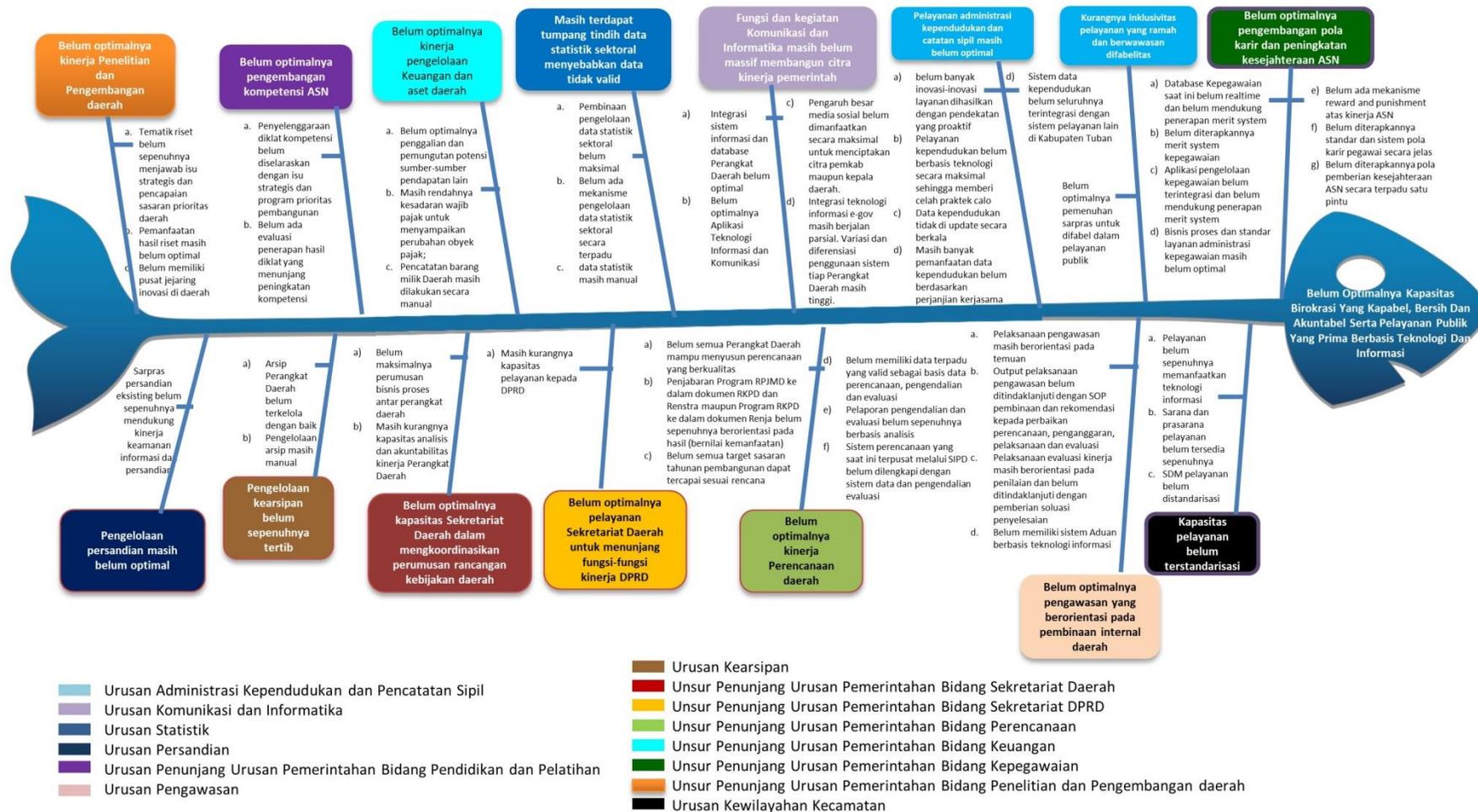
Gambar 4.6 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Tenaga Kerja

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)



Gambar 4.7 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Pemuda dan Olahraga dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)



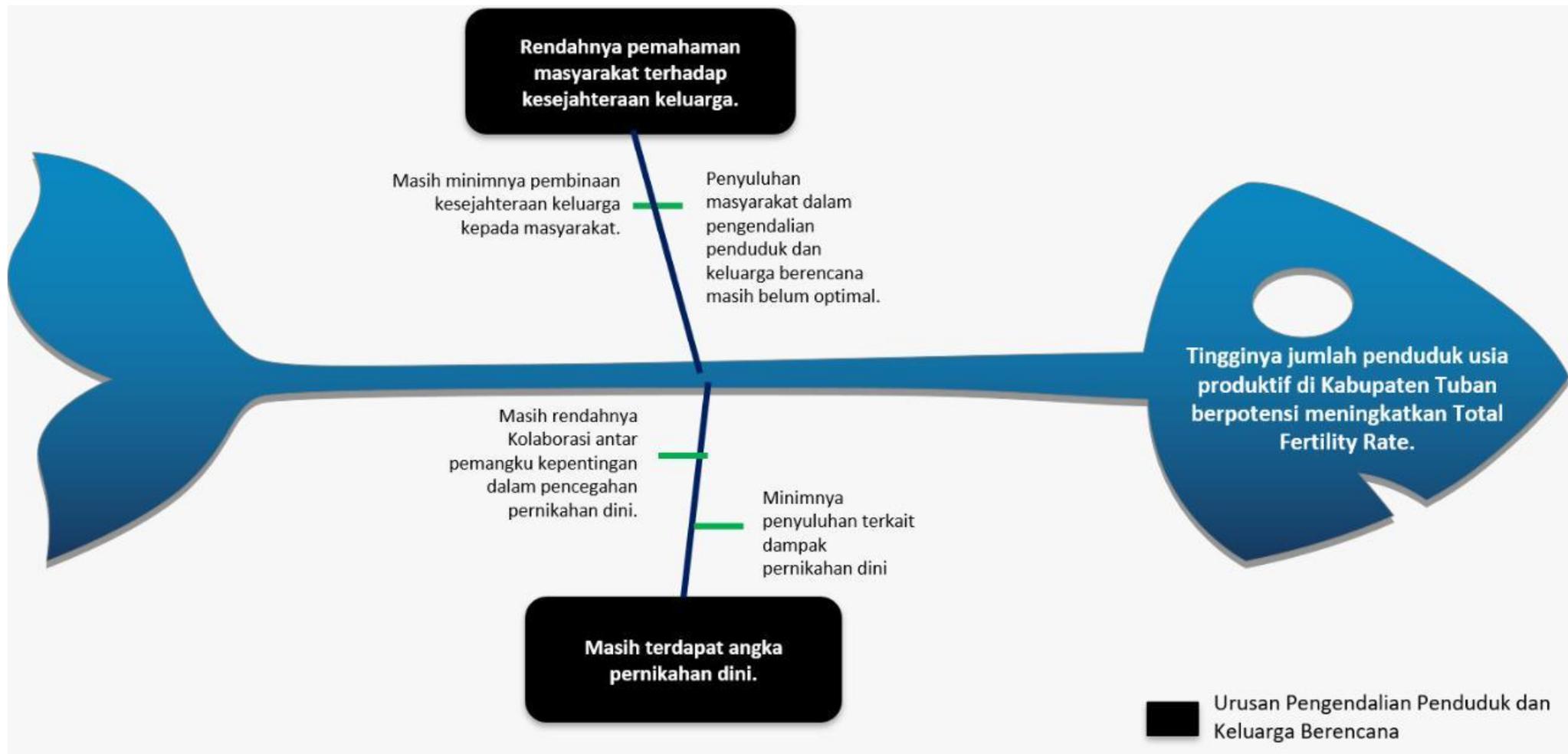
Gambar 4.8 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Masalah Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)

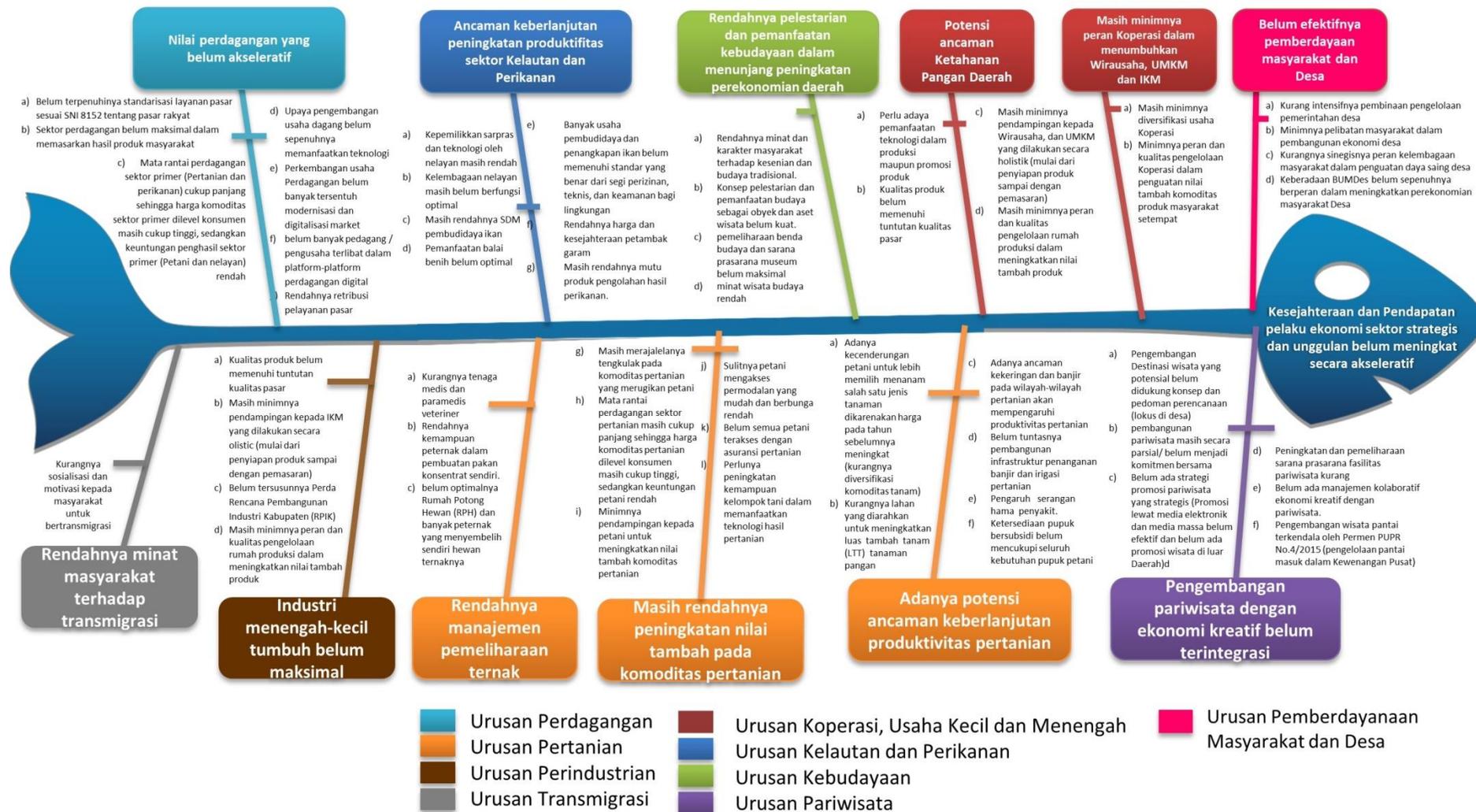


Gambar 4.9 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Lingkungan Hidup

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)



Gambar 4.10 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 (Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)



Gambar 4.11 Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan Belum Meningkat Secara Akseleratif



(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)

Gambar 4.12 Gambaran Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah pada Urusan Penanaman Modal

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tuban, 2021)

4.2 Telaah-Telaah Kebijakan

Untuk memperkaya dan mempertajam identifikasi isu-isu strategis, maka permasalahan pembangunan daerah dielaborasi dengan telaah-telaah beberapa dokumen kebijakan perencanaan yang relevan dan terkait dengan pembangunan jangka menengah. Telaah dilakukan terhadap beberapa dokumen berikut ini.

4.2.1 RTRW Provinsi dan Kawasan Percepatan Ekonomi

Terdapat dua pendekatan yang akan diterapkan dalam percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yaitu pendekatan untuk pusat pertumbuhan yang telah ada dan pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan baru. Pendekatan pusat pertumbuhan yang telah ada memerlukan penguatan infrastruktur, dilakukan pada kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, yang dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur. Pendekatan ini diterapkan untuk (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur):

- a. **Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila**, meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban dengan fokus pada bidang industri, khususnya yang bersifat capital-intensive serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih, dan hub arus barang dan orang. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila didorong dengan pengembangan kawasan pendukung yaitu Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan. Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan, meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata;
- b. **Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru**, meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Probolinggo dengan fokus utama pada sektor pariwisata, dan agroproduksi dan agroindustri. Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru didorong dengan pengembangan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo dengan fokus pengembangan pada sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan; dan
- c. **Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan**, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten

Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

4.2.2 RTRW Kabupaten Tuban dan Pemetaan Pengembangan Kawasan

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

a. Rencana Struktur Ruang

Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Tuban dikembangkan dengan kriteria aksesibilitas lokasi, kondisi faktual, jenis dan skala kegiatan, potensi sebagai pusat kegiatan masyarakat. Secara garis besar pengembangan kota-kota di Kabupaten Tuban diarahkan dengan fungsi utama:

- Sebagai pusat kegiatan yang membentuk suatu wilayah pelayanan tertentu (pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan hiburan);
- Sebagai pusat koleksi dan distribusi yang mencakup kegiatan pembangunan dan komunikasi, pemasaran, perdagangan serta pengumpulan; dan
- Sebagai tempat fungsi tertentu berdasarkan kegiatan/sektor yang dominan (penting, industri dan jasa).

Penetapan peran dan fungsi perkotaan di Kabupaten Tuban, meliputi:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Perkotaan Tuban dengan fungsi sebagai:
 - pusat perkantoran pemerintahan;
 - pusat pengembangan pariwisata;
 - pusat perdagangan dan jasa;
 - pusat pelayanan kesehatan;
 - pusat pelayanan pendidikan;
 - pusat olahraga dan kesenian; dan
 - pusat peribadatan dan pusat pengkajian Islam (*Islamic Centre*).

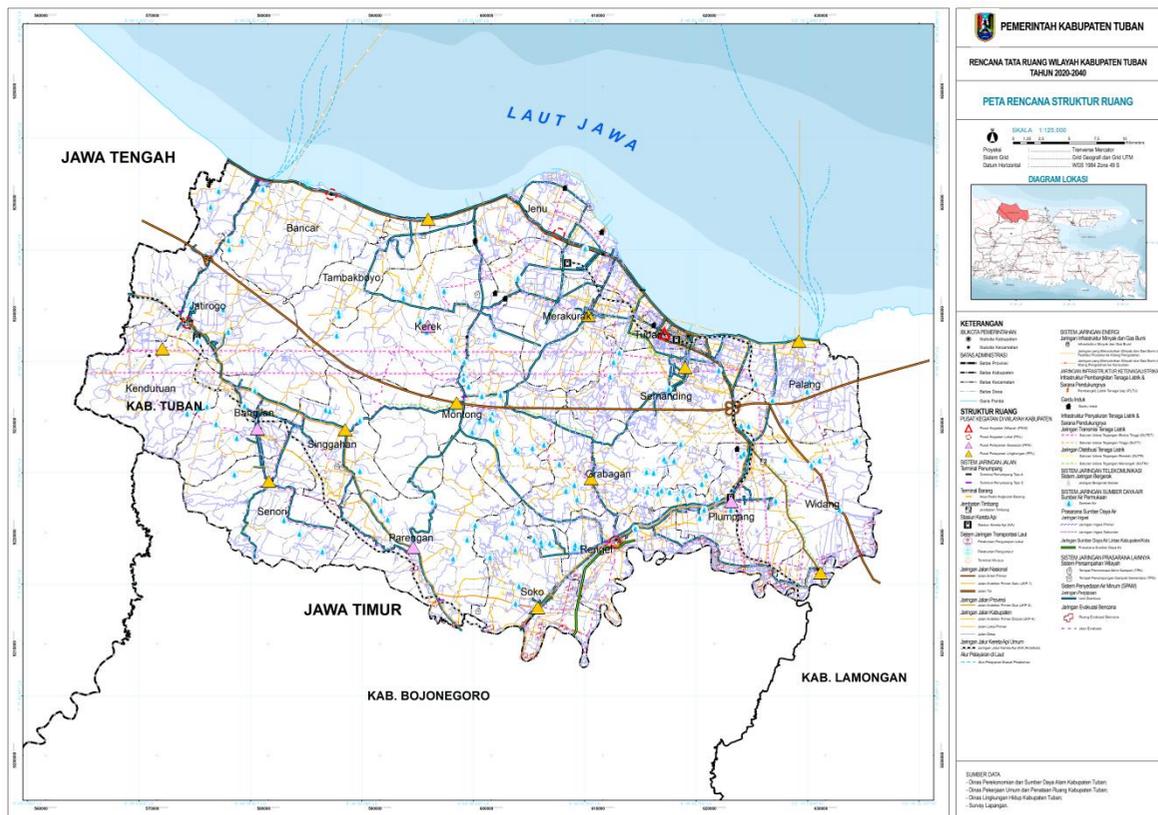
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan pada perkotaan:
 - Perkotaan Jatirogo dengan fungsi sebagai permukiman, industri kecil dan menengah, serta pengolahan hasil pertanian.
 - Perkotaan Rengel dengan fungsi sebagai permukiman, industri kecil dan menengah, pengolahan hasil pertanian, serta konservasi DAS Bengawan Solo.
 - Perkotaan Bancar dengan fungsi sebagai permukiman dan minapolitan.
 - Perkotaan Jenu dengan fungsi sebagai permukiman dan pusat kegiatan industri.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang ditetapkan pada:
 - Perkotaan Bangilan dengan fungsi permukiman dan pengolahan hasil pertanian.
 - Perkotaan Parengan dengan fungsi permukiman dan pengolahan hasil pertanian.
 - Perkotaan Plumpang dengan fungsi permukiman, konservasi DAS Bengawan Solo dan agropolitan.
 - Perkotaan Kerek dengan fungsi permukiman, pertambangan dan industri.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Penetapan rencana pengembangan untuk kawasan perdesaan di Kabupaten Tuban meliputi:

1. Kawasan agropolitan terdapat di Kecamatan Palang dan Semanding. Rencana pengembangan kegiatan agropolitan terdapat di Kecamatan Plumpang, Widang dan Jatirogo. Sedangkan untuk kawasan pendukung dan kawasan sentra produksi adalah kecamatan di sekitarnya, yaitu Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, Parengan, Soko dan Rengel.
2. Kawasan kegiatan minapolitan di Kecamatan Bancar dan Tambakboyo serta sentra produksinya di Kecamatan Palang.
3. Pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah.
4. Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman termasuk jaringan jalan, transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sarana pendukung yang lainnya.
5. Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan dengan memperhatikan karaktersitik sosial budaya masyarakat.

Sistem jaringan prasarana wilayah dibagi menjadi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem jaringan persampahan wilayah, dan sistem jaringan evakuasi bencana. Secara keseluruhan pengembangan prasarana ini akan mendukung struktur dan pola ruang di masa yang akan datang.

Gambar 4.13 Peta Struktur Ruang Kabupaten Tuban



(Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tuban, 2020)

b. Rencana Pola Ruang

Kawasan pertanian di Kabupaten Tuban seluas sekitar 98.443 Ha yang terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Selain itu di Kabupaten Tuban terdapat potensi komoditas perkebunan dan peternakan. Sebagai upaya pemerintah dalam mempertahankan dan mengurangi terjadinya konversi lahan pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan, maka ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. KP2B di Kabupaten Tuban direncanakan seluas 75.610 Ha.

Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi-umbian lainnya.

Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, cabe, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi surplus.

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu : ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Tuban seluas kurang lebih 1.003 Hektar yang tersebar di Kecamatan Bancar seluas 118,49 Hektar; Jenu seluas 208,84 hektar; Merakurak seluas 73,76 hektar; Palang seluas 482,85 hektar; dan Tambakboyo seluas 118,60 berupa perikanan tangkap di tambak (komoditas garam), sawah, maupun kolam.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang dan energi di Kabupaten Tuban hingga tahun 2040 direncanakan seluas 4.457 Ha yang meliputi kawasan pertambangan mineral dan kawasan pembangkitan tenaga listrik. Kawasan pertambangan batuan tersebar di Kecamatan Grabagan, Jenu, Kerek, Merakurak, Montong, Palang, Rengel, dan Tambakboyo. Sedangkan kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di Kecamatan Bancar, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, Semanding, Singgahan, Grabagan, Jenu, Kerek, Merakurak, Montong, Palang, Rengel, Tambakboyo.

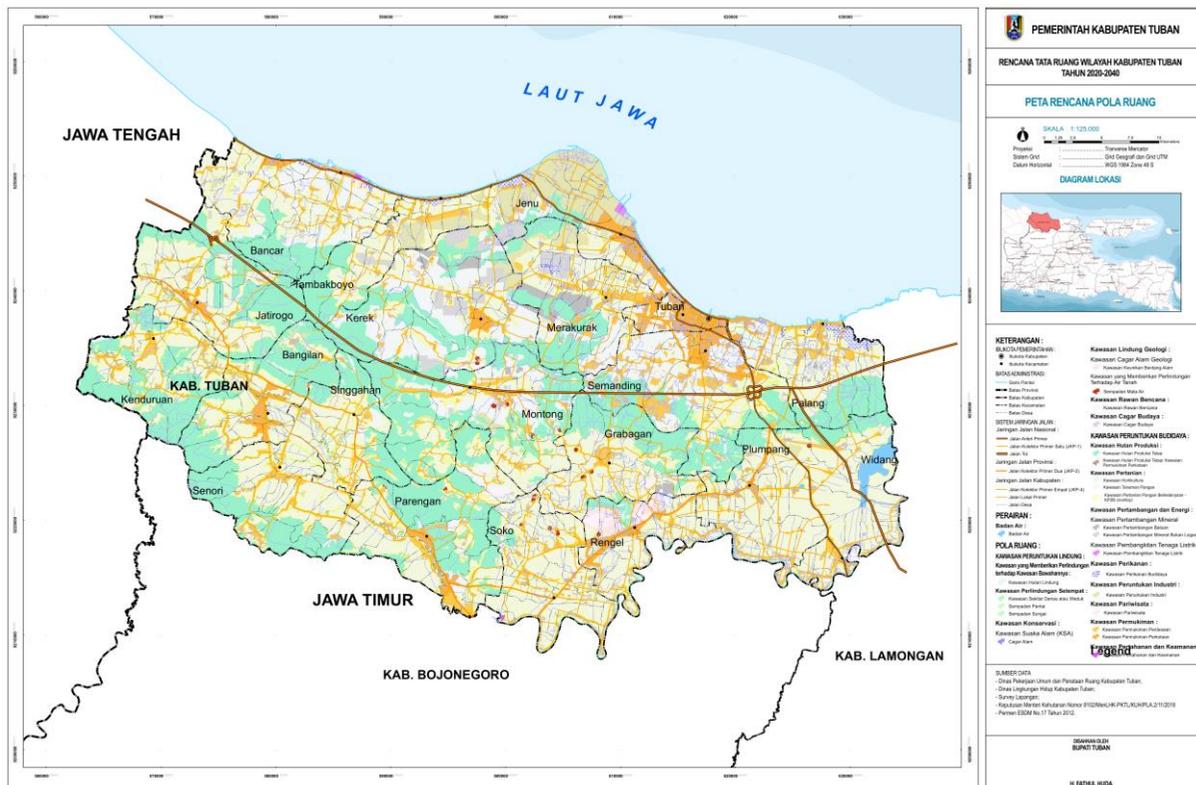
Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas sekitar 7.608 Ha yang terdiri dari kawasan industri seluas 236 Ha di Kecamatan Jenu dan peruntukan industri seluas 7.372 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban kecuali di Kecamatan Tuban.

Pada sektor pariwisata, pengembangan wisata di Kabupaten Tuban meliputi:

- Kecamatan Tuban meliputi Makam Sunan Bonang, Museum Kambang Putih, Makam Ronggolawe, Klenteng KwanSing Bio, dan Pantai Boom.
- Kecamatan Semanding meliputi Terminal dan Wisata Laut Kambang Putih dan Mangrove Center.

- Kecamatan Bangilan berupa Wanawisata Nganget.
- Kecamatan Bancar meliputi Pantai Sowan dan Pantai Sukolilo.
- Kecamatan Kerek berupa Desa Wisata Batik Kerek.
- Kecamatan Montong meliputi Goa Lawa, Goa Putri Asih dan Sumber Air Krawak.
- Kecamatan Palang meliputi Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi, Goa Suci, Pantai Panyuran, Wisata Agro Belimbing Madu dan Siwalan.
- Kecamatan Parengan berupa Wana Wisata Prataan.
- Kecamatan Plumpang berupa Sendang Joko Tarub.
- Kecamatan Rengel meliputi Goa Ngerong dan Bumi Perkemahan Sendang Maibit.
- Kecamatan Semanding meliputi Pemandian Bektiharjo, Masjid Perut Bumi Al Maghribi Makam Sunan Bejagung, Desa wisata religi dan sejarah Prungahan Wetan, Makam Sunan Geseng, Goa Akbar, Bukit Watu Ondo, dan Kawasan Desa Wisata Banyulangse.
- Kecamatan Singgahan meliputi Air Terjun dan Goa Nglirip dan Makam Syeh Abdul Jabbar.

Gambar 4.14 Peta Pola Ruang Kabupaten Tuban



(Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tuban, 2020)

4.2.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tuban

Dari hasil pendalaman dan telaah beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tuban diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Bidang Ekonomi

Tabel 4. 2 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Ekonomi

| NO | ISU | LOKASI (DESA/KECAMATAN) |
|----|---|---|
| 1 | Kebutuhan tenaga kerja lokal untuk rencana pembangunan kilang minyak (NGRR) | Kecamatan Jenu dan sekitarnya |
| 2 | Belum optimalnya pengembangan kawasan agropolitan sebagai kawasan yang terintegrasi | Kec. Palang, Kec. Soko, Kec. Merakurak, Kec. Bangilan Dan Kec. Jatirogo |
| 3 | Intervensi pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi kreatif belum optimal | 20 Kecamatan |
| 4 | Kurangnya dukungan UKM/KM terhadap pengembangan pariwisata | 20 Kecamatan |
| 5 | Belum optimalnya digital marketing dalam pengembangan UMKM | 20 Kecamatan |
| 6 | Belum optimal beroprasinya Kawasan Industri Tuban (KIT) | Kec. Jenu |
| 7 | Kurangnya ruang/ lokasi bagi sentra PKL yang menjamur di ruang publik | Kec. Tuban, Kec. Jenu, Kec Merakurak |
| 8 | Kurangnya Permodalan untuk pengembangan sektor koperasi dan UMKM | 20 Kecamatan |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2020)

2. Aspek Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

Tabel 4. 3 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

| NO | ISU | LOKASI (DESA/ KECAMATAN) |
|----|--|---|
| 1 | Minimnya penanganan kerusakan kali kening yang menyebabkan banjir yang sering terjadi di 5 Kecamatan (Kec. Jatirogo, Kec. Bangilan, Kec. Singgahan, Kec. Pargangan Dan Kec. Senori). | Desa Sugihan, Desa Wotsogo, Desa Sidodadi, Desa Kedungjambangan, Desa Tangkir, Desa Binangun, Desa Mergorejo, Desa Brangkal |

| NO | ISU | LOKASI (DESA/ KECAMATAN) |
|----|---|--|
| 2 | Pertambangan bukit kapur yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan kantung-kantung air tanah Tuban sangat berkurang dan berpotensi kedepannya Tuban akan kekurangan air bersih dan intrusi air laut masuk ke sungai bawah tanah sehingga air bisa menjadi payau. | Kec. Rengel desa punggulrejo, desa banjaragung. Kec. Palang desa leran wetan, desa leran kulon. Kec. Semanding desa Jadi, desa Bektiharjo. |
| 3 | Alih fungsi lahan yang masih tanpa adanya perencanaan strategis dari pihak kabupaten. | Dusun latsari desa latsari Bancar |
| 4 | Penggunaan lahan pertanian produktif menjadi area permukiman/ industri yang menyebabkan kekurangannya produksi pangan. | 19 Kecamatan kecuali kec. Tuban |
| 5 | Permasalahan sampah (sampah disungai) yang berada dalam aliran sungai menuju laut, menyumbang 60/70 % dari sampah laut Tuban. | Kec. Tuban , Kec. Palang dan Kec. Jenu |
| 6 | Eksplorasasi pertambangan di wilayah hutan (perhutani) wilayah resapan cadangan air. | Kecamatan-kecamatan dan desa-desa hutan di kabupaten Tuban |
| 7 | Kurangannya sarana prasarana (pelabuhan, jalan, kereta api, energi) untuk kawasan industri. | Kec. Jenu |
| 8 | Pengelolaan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang kurang maksimal, sehingga banyak permasalahan aset irigasi maupun air irigasinya. | 19 Kecamatan kecuali kec. Tuban |
| 9 | Pengembangan sanitasi kabupaten yang belum optimal untuk penanganan peningkatan ODF. | 20 Kecamatan |
| 10 | Penataan dan Penambahan Kawasan RTH yang belum maksimal di Kabupaten Tuban | Kec. Tuban, Kec. Palang dan Kec. Jenu |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2020)

Berdasarkan hasil analisis, maka identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Urusan Pemerintahan Daerah

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|---|----------------------------|---|
| I | Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun | Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> a) Angkatan kerja didominasi jenjang pendidikan SMA/SMK. b) Banyaknya lulusan SLTA sederajat yang belum mempunyai ketrampilan/skill kompetensi yang dibutuhkan langsung oleh perusahaan c) terbatasnya instruktur dan tempat pelatihan berbasis kompetensi. d) Perlindungan upah, stabilitas dan intervensi harga komoditas yang kurang maksimal e) Kurangnya kesadaran hukum para pelaku hubungan industrial terhadap tata Kelola layak f) Kurangnya pengetahuan para pelaku hubungan industrial terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan |
| II | Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan | Ketahanan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> a) Keberagaman dan keseimbangan energi dan protein yang kurang b) Cadangan pangan tersedia tetapi surplus pangan tidak meningkat signifikan c) Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat belum optimal terjaga d) Belum sepenuhnya terjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan e) Belum semua desa atau daerah rawan pangan tertangani f) Belum ada mekanisme dan sistem yang digunakan untuk mengawasi peredaran hewan yang keluar/masuk Kab Tuban g) Keamanan pangan dari hewan ternak yang dijual belum semuanya diuji kelayakannya |
| III | Menjamin Kehidupan yang Sehat, dan Meningkatkan Kesejahteraan seluruh Penduduk di Segala Usia | Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum semua fasilitas kesehatan dasar sesuai standar b) Rasio puskesmas per satuan penduduk yang dilayani masih timpang c) Masih terdapat SDM Kesehatan yang belum memenuhi standar sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas) d) Pencegahan dan deteksi dini penyakit penyerta ibu hamil dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) belum maksimal e) Masih banyaknya warga yang BAB sembarangan (28.126 rumah yang tersebar di 251 desa/kelurahan), di tahun 2021 baru 77 desa/kelurahan yang sudah deklarasi ODF *) |

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|---|--|---|
| | | | f) Aksi kolaboratif penanganan stunting dan ODF masih terbatas |
| IV | Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua | Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta didik tidak merata dan berkurang minat murid kepada sekolah negeri b) Kurangnya Guru PNS c) Belum semua fasilitas pendidikan sesuai standar d) Kualifikasi akademik guru masih kurang e) Akreditasi sekolah belum merata f) belum dilakukan <i>updating</i> data pada keluarga Pra sejahtera penerima bantuan PIP maupun PKH g) Kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan h) Status pendidikan masyarakat tidak terupdate secara berkala didalam dokumen kependudukan. i) Kurang sinergisnya peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan j) Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sekolah k) Belum adanya tenaga khusus yang mengelola perpustakaan sekolah |
| | | Perpustakaan | <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan perpustakaan masih terbatas dan aksesibilitasnya masih kepada di wilayah perkotaan/ibu kota kecamatan b) Kampanye untuk meningkatkan minat baca masyarakat belum massif |
| V | Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none"> a) Masih belum optimalnya Perlindungan Perempuan dan anak; b) Minimnya peran perempuan dalam pembangunan. |
| | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | <ul style="list-style-type: none"> a) Minimnya penyuluhan terkait dampak pernikahan dini b) Masih rendahnya Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan pernikahan dini. c) Masih minimnya pembinaan kesejahteraan keluarga kepada masyarakat. d) Penyuluhan masyarakat dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih |

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | belum optimal. |
| VI | Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> a) Regulasi tata ruang cenderung terlambat dibandingkan dengan kecepatan pembangunan yang dapat menyebabkan tata ruang di lapangan berkembang tanpa kendali dan menimbulkan ketidakpastian investasi b) cakupan Pembangunan/ perbaikan plengsengan/ tanggul maupun pengerukan/ normalisasi sungai untuk pencegahan banjir belum maksimal c) masih terdapat sarana dan prasarana penanganan air baku yang belum berfungsi maksimal d) Tingkat kerusakan jalan Kabupaten dan Desa yang masih tinggi e) Masih terdapat jalan Kabupaten dan Desa belum memenuhi standard lebar jalan f) semua sungai di Kabupaten Tuban masuk dalam Kewenangan Pusat, termasuk pengambilan air dan bangunan sungai. Sehingga memunculkan masalah dalam penanganan banjir maupun pemanfaatan irigasi g) Tidak adanya Juru Air pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten h) Tidak adanya kelembagaan Petani Pengguna air pada lokasi DI sehingga pengaturan pembagian air diserahkan pada petani di masing-masing Desa i) Belum maksimalnya pembinaan HIPPA dan GHIPPA pada Daerah Irigasi j) Sulitnya mencari sumber air dari permukaan tanah sehingga perlu melakukan sumur bor dalam air tanah |
| VII | Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. | - | - |
| VIII | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | <ul style="list-style-type: none"> a) Masih minimnya diversifikasi usaha Koperasi b) Minimnya peran dan kualitas pengelolaan Koperasi dalam penguatan nilai tambah komoditas produk masyarakat setempat c) Pemanfaatan teknologi dalam produksi maupun promosi produk belum maksimal d) Kualitas produk belum memenuhi tuntutan kualitas pasar e) Masih minimnya pendampingan kepada Wirausaha, dan UMKM yang dilakukan secara holistik (mulai dari penyiapan produk sampai dengan pemasaran) |

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|---|----------------------------------|---|
| | | | f) Masih minimnya peran dan kualitas pengelolaan rumah produksi dalam meningkatkan nilai tambah produk |
| | | Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan Destinasi wisata yang potensial belum didukung konsep dan pedoman perencanaan (lokus di desa) b) pembangunan pariwisata masih secara parsial/ belum menjadi komitmen bersama c) Belum ada strategi promosi pariwisata yang strategis (Promosi lewat media elektronik dan media massa belum efektif dan belum ada promosi wisata di luar Daerah) d) Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pariwisata kurang e) Belum ada manajemen kolaboratif ekonomi kreatif dengan pariwisata. f) Pengembangan wisata pantai terkendala oleh Permen PUPR No.4/2015 (pengelolaan pantai masuk dalam Kewenangan Pusat) |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | <ul style="list-style-type: none"> a) Kurang intensifnya pembinaan pengelolaan pemerintahan desa b) Minimnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa c) Kurangnya sinergisnya peran kelembagaan masyarakat dalam penguatan daya saing desa d) Keberadaan BUMDes belum sepenuhnya berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa |
| IX | Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi | Perindustrian | <ul style="list-style-type: none"> a) Kualitas produk belum memenuhi tuntutan kualitas pasar b) Masih minimnya pendampingan kepada IKM yang dilakukan secara holistic (mulai dari penyiapan produk sampai dengan pemasaran) c) Belum tersusunnya Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) d) Masih minimnya peran dan kualitas pengelolaan rumah produksi dalam meningkatkan nilai tambah produk |
| | | Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum terpenuhinya standarisasi layanan pasar sesuai SNI 8152 tentang pasar rakyat b) Sektor perdagangan belum maksimal dalam memasarkan hasil produk masyarakat c) Mata rantai perdagangan sektor primer (Pertanian dan perikanan) cukup panjang sehingga harga komoditas sektor primer dilevel konsumen masih cukup tinggi, sedangkan keuntungan penghasil sektor primer (Petani dan nelayan) rendah d) Upaya pengembangan usaha dagang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi e) Perkembangan usaha Perdagangan belum banyak tersentuh modernisasi dan digitalisasi |

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|--|----------------------------|--|
| | | | market f) belum banyak pedagang/pengusaha terlibat dalam platform-platform perdagangan digital g) Rendahnya retribusi pelayanan pasar |
| X | Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara | Tenaga Kerja | |
| XI | Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. | Perumahan dan Permukiman | a) Banyak permukiman yang belum dilengkapi dengan sistem jaringan drainase b) Masih banyak masyarakat yang belum terlayani air bersih yang layak (Akses layanan air minum belum merata*) c) Masih banyak terdapat rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh dengan disesuaikan target dari kriteria kumuh yang ditetapkan dalam Permen PUPR d) Banyak Jalan Lingkungan yang rusak/mengalami penurunan fungsi jalan e) Banyaknya pembangunan perumahan tidak dikendalikan dengan baik sehingga penyerahan aset PSU pada perumahan yang telah dibangun masih banyak yang bermasalah f) Belum adanya update data perumahan/rumah yang sudah dilengkapi PSU |
| | | Perhubungan | a) Banyaknya angkutan kota mati b) Ketersediaan layanan angkutan umum di wilayah pedesaan terbatas c) Masih terdapat ruas jalan yang belum dilengkapi dengan alat kelengkapan jalan d) Layanan pengujian kendaraan masih perlu ditingkatkan e) Belum lengkapnya data rencana jaringan transportasi yang terpadu (termasuk angkutan air) f) Belum meratanya ketersediaan LPJU |
| XII | Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan | Pertanian | a) Adanya kecenderungan petani untuk lebih memilih menanam salah satu jenis tanaman dikarenakan harga pada tahun sebelumnya meningkat (kurangnya diversifikasi komoditas tanam) b) Kurangnya lahan yang diarahkan untuk meningkatkan luas tambah tanam (LTT) tanaman pangan c) Adanya ancaman kekeringan dan banjir pada wilayah-wilayah pertanian akan mempengaruhi produktivitas pertanian d) Belum tuntasnya pembangunan infrastruktur penanganan banjir dan irigasi pertanian |

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|--|------------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e) Pengaruh serangan hama penyakit. f) Ketersediaan pupuk bersubsidi belum mencukupi seluruh kebutuhan pupuk petani g) Masih merajalelanya tengkulak pada komoditas pertanian yang merugikan petani h) Mata rantai perdagangan sektor pertanian masih cukup panjang sehingga harga komoditas pertanian di level konsumen masih cukup tinggi, sedangkan keuntungan petani rendah i) Minimnya pendampingan kepada petani untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian j) Sulitnya petani mengakses permodalan yang mudah dan berbunga rendah k) Belum semua petani terakses dengan asuransi pertanian l) Perlunya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam memanfaatkan teknologi hasil pertanian |
| XIII | Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya | Penanggulangan Bencana Daerah | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum terupdatenya data potensi kebencanaan di Kabupaten Tuban b) Pelaksanaan Manajemen Resiko Bencana belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat c) Belum adanya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pencegahan dan mitigasi bencana d) Penggunaan Teknologi Informasi belum digunakan dalam pelaksanaan mitigasi kebencanaan |
| XIV | Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan | Kelautan, Perikanan dan Peternakan | <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan sarpras dan teknologi oleh nelayan masih rendah b) Kelembagaan nelayan masih belum berfungsi optimal c) Masih rendahnya SDM pembudidaya ikan d) Pemanfaatan balai benih belum optimal e) Banyak usaha pembudidaya dan penangkapan ikan belum memenuhi standar yang benar dari segi perizinan, teknis, dan keamanan bagi lingkungan f) Rendahnya harga dan kesejahteraan petambak garam g) Masih rendahnya mutu produk pengolahan hasil perikanan. h) Kurangnya tenaga medis dan paramedis veteriner i) Rendahnya kemampuan peternak dalam pembuatan pakan konsentrat sendiri j) Belum optimalnya Rumah Potong Hewan (RPH) dan banyak peternak yang menyembelih |

| No Agenda SDGs | Suustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|---|---|---|
| | | | sendiri hewan ternaknya |
| XV | Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti- kan kehilangan keanekaragaman hayati. | Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> a) Ruang Terbuka Hijau belum mencapai 30% dari luas wilayah b) Minimnya ketersediaan dan akses data dan informasi terkait kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan. c) Berkurangnya daya dukung lingkungan belum diimbangi dengan pelaksanaan konservasi yang holistik. d) Terjadinya pencemaran air akibat kurang optimalnya pengendalian buangan pada badan air e) Belum semua parameter pengujian Laboratorium terakreditasi. f) Belum diterapkannya sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu. g) Penegakkan regulasi dan penindakan pelanggaran kejahatan lingkungan yang belum maksimal h) Tidak adanya kewenangan daerah pada bidang pertambangan (dari perencanaan sampai pengawasan) menyebabkan banyaknya aktivitas penambang liar) i) Rendahnya Kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dalam kegiatan pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajibannya. j) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3*) k) Keterbatasan kapasitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA*) |
| XVI | Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> a) Masih terdapat kasus pelanggaran perundangan daerah b) Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas |
| | | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya pemenuhan sarpras untuk difabel dalam pelayanan public b) belum banyak inovasi-inovasi layanan dihasilkan dengan pendekatan yang proaktif c) Pelayanan kependudukan belum berbasis teknologi secara maksimal sehingga memberi celah |

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | | | praktek calo d) Data kependudukan tidak di update secara berkala e) Masih banyak pemanfaatan data kependudukan belum berdasarkan perjanjian kerjasama f) Sistem data kependudukan belum seluruhnya terintegrasi dengan sistem pelayanan lain di Kabupaten Tuban |
| | | Sosial | a) Belum Optimalnya Update Data Kemiskinan dan PMKS. b) Penyediaan sarana prasarana bagi kaum difabel belum sepenuhnya terpenuhi. c) Kemiskinan tidak hanya menimpa kelompok penganggur tetapi juga kelompok produktif berpendapatan rendah di sektor-sektor penyerap tenaga kerja terbesar. d) Belum sinergisnya pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan. e) Penurunan anggaran belanja untuk program pengentasan kemiskinan*) |
| | | Kepemudaan dan Olahraga | a) Kurangnya even-even kreatifitas pemuda b) Belum sinergisnya pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembinaan kepemudaan c) Masih minimnya jumlah pemuda berprestasi d) Rendahnya pembinaan atlet menyebabkan minimnya atlet yang berprestasi e) fasilitas-fasilitas olahraga masih terkonsentrasi di perkotaan. f) Minimnya even-even olahraga menyebabkan olahraga kurang memasyarakat |
| | | Kebudayaan | a) Rendahnya minat dan karakter masyarakat terhadap kesenian dan budaya tradisional. b) Konsep pelestarian dan pemanfaatan budaya sebagai obyek dan aset wisata belum kuat. c) pemeliharaan benda budaya dan sarana prasarana museum belum maksimal d) minat wisata budaya rendah |
| | | Kearsipan | a) Arsip Perangkat Daerah belum terkelola dengan baik b) Pengelolaan arsip masih manual |
| | | Pertanahan | a) Koordinasi dengan BPN terkait sertifikat tanah aset daerah belum maksimal |

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b) Proses sertifikasi aset daerah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit c) Pengelolaan pertanahan daerah belum maksimal, terutama dalam hal fasilitasi dan pengendalian pemanfaatan tanah. |
| XVII | Memperkuat sarana pelaksanaan, dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> a) Database Kepegawaian saat ini belum realtime dan belum mendukung penerapan <i>merit system</i> b) Belum diterapkannya <i>merit system</i> kepegawaian c) Aplikasi pengelolaan kepegawaian belum terintegrasi dan belum mendukung penerapan <i>merit system</i> d) Bisnis proses dan standar layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal e) Belum ada mekanisme <i>reward and punishment</i> atas kinerja ASN f) Belum diterapkannya standar dan sistem pola karir pegawai secara jelas g) Belum diterapkannya pola pemberian kesejahteraan ASN secara terpadu satu pintu |
| | | Statistik | <ul style="list-style-type: none"> a) Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral belum maksimal b) Belum ada mekanisme pengelolaan data statistik sektoral secara terpadu c) Pengelolaan data statistik masih manual |
| | | Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> a) Belum optimalnya penggalan dan pemungutan potensi sumber-sumber pendapatan lain b) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan perubahan obyek pajak; c) Pencatatan barang milik Daerah masih dilakukan secara manual |
| | | Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> a) Minimnya informasi terkait Peta investasi peluang potensi, dan kebutuhan investasi di Kabupaten Tuban b) Kurangnya sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pelayanan perizinan hingga pengendalian dan evaluasi terhadap izin yang diterbitkan c) Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam penyiapan iklim investasi yang menarik d) Kurangnya sinergitas dan pembinaan perangkat daerah kepada masyarakat dalam penyediaan dan kontinuitas bahan baku kepada investor dibidang pertanian dan perikanan |

| No Agenda SDGs | Sustainable Development Goal's | Urusan Pemerintahan Daerah | Permasalahan |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| | | Persandian | Sarpras persandian eksisting belum sepenuhnya mendukung kinerja keamanan informasi dan persandian |
| | | Komunikasi dan Informatika | <ul style="list-style-type: none"> a) Integrasi sistem informasi dan database Perangkat Daerah belum optimal b) Belum optimalnya Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi c) Pengaruh besar media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan citra Pemkab maupun kepala daerah. d) Integrasi teknologi informasi e-gov masih berjalan parsial. Variasi dan diferensiasi penggunaan sistem tiap Perangkat Daerah masih tinggi. |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

4.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Tuban. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.3.1 Internasional

1. Sustainable Development Goals (SDG'S)

SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target sehingga memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut :

- a. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- b. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*) Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
- d. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan;
- f. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*) Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;

- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;
- h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
- j. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*) Mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;
- k. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*) Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;
- l. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*) Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;
- m. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
- n. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*) Melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
- o. Kehidupan di Darat (*Life on Land*) Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
- p. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strongg Institutions*) Mendorong masyarakat yang damai, dan inklusif untuk *pembangunan* berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goal's*) Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2. Isu Perekonomian Global

Beberapa isu perekonomian global antara lain sebagai berikut:

a. Pertama, Pertumbuhan ekonomi dunia

Pada tahun 2020, ekonomi global mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi global, yang mencapai puncaknya mendekati 4% pada 2017, melambat menjadi 3,6% pada 2018, di tahun 2019 menurun

lebih lanjut menjadi 2,8% pada 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan sebesar -3,3%. Perlambatan ekonomi dunia tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya pandemi covid 19, aktivitas ekonomi yang melambat ditengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan kenaikan tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok, penurunan kepercayaan bisnis, pengetatan kondisi keuangan, dan ketidakpastian kebijakan yang lebih tinggi di banyak negara.

b. Kedua, Dinamika Hubungan dan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok

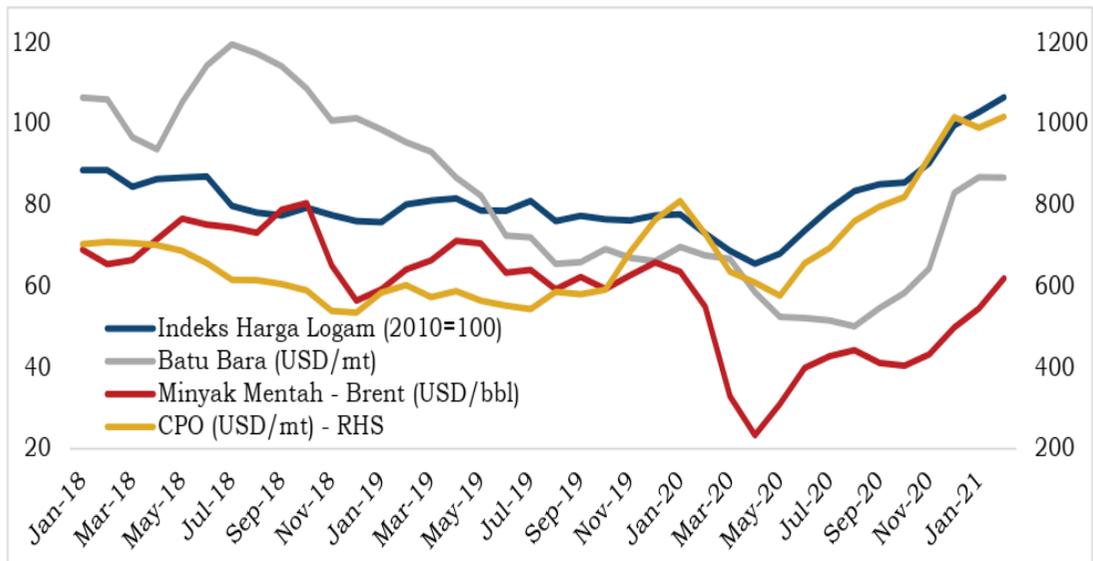
Pertumbuhan Tiongkok yang menurun dan berfluktuasi setelah kombinasi pengetatan regulasi yang diperlukan untuk mengendalikan shadow banking dan peningkatan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan.

c. Ketiga, Kebijakan perdagangan negara perekonomian besar yang semakin protektif

Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta **menciptakan** ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan. Kebijakan proteksionisme perdagangan ini dapat memberikan sentiment negatif terhadap perdagangan dunia maupun pasar keuangan global.

d. Keempat, Harga komoditas dunia yang fluktuatif

Laju pertumbuhan harga komoditas yang berakselerasi cukup cepat di tahun 2017-2018, dan di tahun 2019 pertumbuhan harga komoditas mengalami perlambatan, hal itu disebabkan karena tingkat pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat., dan di pertengahan tahun 2020 harga komoditas dunia sudah mulai membaik Kembali. Berikut grafik perkembangan harga komoditas dunia:



Gambar 4. 15 Perkembangan harga komoditas dunia

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021)

3. Asean Economic Community (AEC)

Berikut adalah tujuan dari adanya *Asean Economic Community* (AEC):

- a. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi (production base) dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan.
- b. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas e-Commerce, dan pengembangan infrastruktur.
- c. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV). Sebagaimana diketahui bersama negara CMLV telah lama dan berulang kali didera dengan beragam masalah politik, sosial, dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap keamanan negara tersebut. Dengan demikian, sebagaimana terangkum dalam ASEAN Vision 2020 serta Pakta ASEAN Concord II, MEA dibuat dengan maksud untuk pemeratakan ekonomi hingga ke seluruh penjuru kawasan.
- d. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan global. Hal ini tentu adalah salah satu sisi positif sebab nantinya masukan negara-negara ASEAN dianggap penting.

4. Pandemi Covid-19

Kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat China (RRC) pada akhir Desember 2019. Sejak saat itu hingga akhir Mei 2021, berdasarkan data worldometers menunjukkan bahwa terdapat 167.502.621 kasus dipastikan terinfeksi oleh virus corona dan 3.477.593 orang telah meninggal secara total. Negara dengan kasus covid 19 tertinggi adalah Amerika Serikat, dengan 33.895.659 kasus dan 604.080 meninggal dunia. Kedua India dengan 26.285.069 kasus dan 303.751 meninggal dunia. Ketiga Brasil dengan 16.083.258 kasus dan 449.068 meninggal dunia. Keempat Prancis dengan 5.603.666 kasus, dan 108.596 meninggal dunia. Kelima Turki dengan 5.186.487 kasus, dan 46.268 meninggal dunia. Covid-19 memiliki kemampuan menular dan infektivitas yang tinggi, meskipun tingkat kematiannya rendah. Ini merupakan ancaman besar bagi kesehatan masyarakat global dan WHO telah menyatakan wabah covid 19 sebagai darurat kesehatan masyarakat global (pandemi global).

Dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, keamanan, budaya, dan berbagai sektor lain. Sektor ekonomi merupakan sektor yang dipengaruhi langsung dengan adanya covid-19. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh lembaga dunia bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 mengalami resesi (pertumbuhan ekonomi mengalami minus). Lumpuhnya beberapa negara dengan ekonomi terbesar tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi negara-negara lain. Negara sedang berkembang tidak luput dari dampak ekonomi ini, bahkan beberapa negara sedang berkembang juga akan diprediksi mengalami resesi. Selain ekonomi, dampak sosial, keamanan dan budaya merupakan aspek yang tidak dapat diragukan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Pembatasan jarak sosial dan fisik (*social and physical distancing*), sekolah dan universitas sebagian besar dihentikan aktivitasnya, serta banyaknya pekerja/buruh yang dirumahkan dapat menjadi akar dari masalah-masalah sosial lainnya seperti pengangguran, kemiskinan dan masalah pembangunan manusia.

Dalam menghadapi situasi pandemi kesehatan seperti ini, maka diperlukan sebuah tata pemerintah kelola yang baik dan tidak hanya berhenti secara kerangka logis dan aturan normatif, namun lebih jauh bagaimana implementasi tata kelola pemerintah yang baik tersebut dapat memulihkan segala aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat. Penguatan transparansi kebijakan, akuntabilitas kinerja dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta partisipasi merupakan beberapa kunci dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk saat ini dan pemulihan setelah pandemi berakhir.

4.3.2 Nasional

1. RPJPN (RPJM ke-4 (2020 – 2024))

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

- a. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.
- b. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.
- d. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

2. RPJMN 2020-2024

Menurut RPJMN melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 lampiran 2, terdapat Pembangunan kilang baru (grass root) di kabupaten Tuban. Latar belakang adanya kebijakan nasional ini didasarkan pada: 1) Industri minyak bumi nasional sudah beroperasi lebih dari 100 tahun dan produksinya semakin

menurun, 2) Belum ada penambahan kapasitas kilang dalam 10 tahun terakhir, dan 3) Meningkatnya kebutuhan BBM dan produk petrokimia.

Beberapa agenda pembangunan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Memperkuat ketahanan ekonomi merupakan fokus pemerintah saat ini. Ketahanan ekonomi menjadi isu penting bagi pemerintah, mengingat upaya untuk menurunkan kemiskinan masih terus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan, dan mewujudkan serta mencapai tujuan dari SDG's mengenai kemiskinan, sehingga tidak ada lagi kemiskinan (*no poverty*). Guna memperkuat ketahanan ekonomi maka dalam hal ini dibutuhkan pembangunan ekonomi.

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kedepan, pembangunan tidak hanya berfokus pada upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, melainkan pula berfokus pada pembentukan atau pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumberdaya manusia yang berkualitas serta berdaya saing.

3) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatan SDM berkualitas dan Berdaya Saing menjadi fokus dari pembangunan Indonesia kedepan, yaitu dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. Sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Membangun kebudayaan dan karakter bangsa menjadi fokus bagi pemerintah mengingat kuatnya budaya dan karakter bangsa akan memberikan kemajuan bagi suatu bangsa. Prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat, yang pada intinya kebudayaan merupakan jati diri atau identitas dari suatu bangsa yang terbentuk melalui nilai-nilai perilaku yang terbangun dalam proses sosial.

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Infrastruktur merupakan salah satu fokus pembangunan yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terpilihnya kembali presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 tidak begitu saja menghilangkan pembangunan

infrastruktur yang telah dilakukan dalam periode sebelumnya. Fokus pada infrastruktur pada periode 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Mengingat Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.

6) **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Tidak hanya pembangunan manusia, dan infrastruktur, serta penguatan ekonomi saja yang menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan jangka panjang, melainkan juga lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim juga menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi fokus pemerintah lima tahun kedepan, hal ini karena apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam maka akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu juga perubahan iklim yang mulai tidak menentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah mengingat perubahan iklim yang tidak tentu tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya resiko bencana yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang.

7) **Memperkuat Stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik**

Terwujudnya stabilitas POLHUKAM akan memberikan dampak positif terhadap sistem pemerintahan dan kestabilan ekonomi bangsa, dan hal itu perlu pula penguatan dalam memebrikan pelayanan publik, sehingga diperlukan transformasi pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 memiliki fokus untuk memperkuat stabilitas POLHUKAM dan Transformasi Pelayanan Publik, mengingat akan pentingnya manfaat dan fungsi dari hal tersebut.

3. Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (disingkat PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum dari

Proyek Strategis Nasional adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang direvisi menjadi Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2018. Selain itu, Proyek Strategis Nasional juga diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau. Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp 100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati. Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik

4.3.3 Regional

1. RPJPD Provinsi (Tahap Keempat (2020–2024))

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, maka pembangunan tahap keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk agrobisnis sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung Agrobisnis tersebut, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai.

- a. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh** ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik.

- b. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang** ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta terwujudnya masyarakat informasi; Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian (kawasan Agropolitan).
- c. Pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur diarahkan pada peningkatan SDM dalam fasilitasi masyarakat sebagai agen pembaharuan, pemberdaya dan pelayanan umum**
- d. Dalam bidang kelembagaan politik dan hukum telah kondusif** yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global.
- e. Pembangunan dalam bidang kesejahteraan telah mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat**

2. Isu Strategis Lingkup Provinsi melalui RPJMD Provinsi

Berikut adalah isu strategis di lingkup Provinsi Jawa Timur :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan**
Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.
- b. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat.**

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,50%, lebih tinggi 0,05% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2017 yang hanya mencapai 5,45%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan, pada tahun 2018 pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,17%.

c. Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk:

1. Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
2. Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih; dan
3. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

d. Demokrasi Kewargaan

Demokrasi kewargaan berhubungan hak demokrasi dan kewajiban warga Negara dalam menjalankan aktifitasnya dengan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum dan pemerintahan. Demokrasi meliputi komponen yaitu Kebebasan sipil, hak-hak politik dan partisipasi politik. Kebebasan sipil meliputi : kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan diskriminasi. Hak-hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah meliputi : lembaga demokrasi, pemilu yang bebas adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemda dan peradilan yang independen. Pemerintah bersama aparaturnya memberikan jaminan hak warga berdasarkan prinsip kebhinekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kewargaan juga mengutamakan hak-hak bagi perempuan dan anak, orang terlantar dan kelompok marginal lainnya.

e. Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang dan bandara.

3. Isu Strategis Daerah Sekitar

Tabel 4. 5 Isu Strategis Daerah sekitar

| No | Daerah | Isu Strategis |
|----|---|---|
| 1. | Kabupaten Lamongan (RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan SDM. 2. Pertumbuhan ekonomi relatif belum stabil dan belum inklusif. 3. Daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga barang/jasa atau inflasi. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu dari Pemerintah Daerah. 5. Belum mantapnya kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan serta jaringan irigasi. 6. Relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). 7. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi |
| 2. | Kabupaten Bojonegoro (RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Birokrasi 2. Kerukunan Umat Beragama 3. Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Pembangunan Gender 5. Peluang Kerja 6. Daya Saing Ekonomi 7. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Ramah Lingkungan |

(Sumber: Bappeda Kab. Lamongan, 2016 dan Bappeda Kab. Bojonegoro, 2018)

4. RPJPD Kabupaten Tuban

Beberapa isu strategis di RPJPD Kabupaten Tuban antara lain :

1. Kemiskinan, Kesempatan Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kesenjangan sosial, dalam banyak hal akan melahirkan proses eksploitasi dan marginalisasi masyarakat miskin karena posisi mereka yang rentan dan ter subordinasi. Sedangkan kemiskinan, di sisi yang lain akan menyebabkan terjadinya percepatan dan pendalaman kemiskinan.
2. Penurunan Ketersediaan Pangan
Penurunan ketersediaan pangan sangat erat kaitannya dengan perkembangan jumlah penduduk, berkurangnya lahan produktif, serta rendahnya nilai tukar petani sehingga profesi sebagai petani semakin tidak menarik. Perkembangan industri yang terkonsentrasi di wilayah urban dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Disisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan margin keuntungan

yang makin tipis, sehingga nilai tukar petani menjadi rendah, hal ini antara lain yang menyebabkan gairah petani bercocok-tanam mengalami kelesuan, dan pada akhirnya profesi petani semakin tidak menarik.

3. Penurunan Ketersediaan Energi

Sebagai daerah yang diarahkan untuk pengembangan daerah industri, serta meningkatnya akan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, kebutuhan akan energi akan terus meningkat. Sementara itu energi minyak dan gas alam yang tersedia jumlahnya semakin terbatas karena sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Keterbatasan energi yang tersedia selama satu dekade terakhir telah menyebabkan harga energi menjadi semakin mahal, yang dampak berantainya adalah pada peningkatan harga kebutuhan masyarakat lainnya. Dalam rangka mengatasi keterbatasan ketersediaan energi, pemerintah terus berupaya melalui penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi matahari, air, angin serta bahan yang bersumber dari tanaman berupa minyak nabati.

4. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Perubahan iklim dan pemanasan global (global warming) merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (green house effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Banyaknya kejadian bencana seperti banjir, longsor, erosi, badai tropis, dan kekeringan merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan pemanasan global.

5. Daya Saing Industri

Penataan kawasan industri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban diharapkan akan menumbuhkan klaster-klaster industri baru yang mampu mengolah sumber daya alam dan produk lokal serta menyerap potensi tenaga kerja yang tersedia. Dengan telah berdirinya beberapa perusahaan bersekala nasional maupun internasional di Kabupaten Tuban seperti PT. Semen Indonesia, PT. Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG), PT. United Tractors Semen Gresik (UTSG), PT. Varia Usaha, JOB Pertamina – PetroChina East Java, PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Pertamina, PLTU dan PT. Holcim Indonesia, mampu menarik investor untuk berinvestasi di berbagai bidang usaha baik industri dan perdagangan.

5. Isu Strategis KLHS RPJMD

Berdasarkan hasil penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 berikut disajikan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Tuban pada tabel 4.5, sedangkan Penyandingan Isu Strategis KLHS dengan Indikator TPB dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tuban pada tabel 4.6

Tabel 4. 6 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Tuban

| Isu Berdasarkan Kesepakatan Pemangku Kepentingan | Isu berdasarkan KLHS RTRW | Isu Strategis Berdasarkan RPPLH | Berdasarkan Capaian TPB | | |
|---|---|--|-------------------------|------------|--|
| | | | Pilar | Tujuan TPB | Isu Strategis |
| Tanpa kemiskinan (No Poverty) | Tingginya kerentanan wilayah terhadap bencana banjir | Isu Strategis Terkait Lahan Dan Hutan | Sosial | TPB 1 | Kekurangan air minum disaat musim kemarau – pengeboran air tanah, pembuatan check dam di anakan sungai kali kering Lokasi: Sidoharjo, Wanglukulon, Sendang, Jatisari, edalem, Leran dan Kaligede |
| Tanpa kelaparan (Zero Hunger) | Tingginya kerentanan wilayah terhadap abrasi | Isu Strategis Terkait Air | | TPB 4 | Kurangnya keterjangkauan fasilitas pendidik baik sarana maupun prasarana |
| Kehidupan sehat dan sejahtera (Good Health and Well-Being for people) | Degradasi Kawasan pantai | Isu Strategis Terkait Udara | | | Kurang adanya ketersediaan layanan bagi penyandang disabilitas |
| Pendidikan berkualitas (Quality Education) | Penurunan muka air tanah | Isu Strategis Terkait Pesisir Dan Lautan | | | Kurang adanya penguatan dari berbagai pihak bagi siswa putus sekolah maupun masyarakat tidak mampu melalui program kesetaraan dan keaksaraan |
| Kesetaraan gender (Gender Equality) | Penurunan kualitas Kawasan resapan air akibat kegiatan pertambangan | Isu Strategis Terkait Kebencanaan | | | Peningkatan SDM Guru/Tenaga Pengajar Kurikulum pendidikan di perbaiki Penambahan kegiatan ekstrakurikuler |

| Isu Berdasarkan Kesepakatan Pemangku Kepentingan | Isu berdasarkan KLHS RTRW | Isu Strategis Berdasarkan RPPLH | Berdasarkan Capaian TPB | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|------------|--|--|
| | | | Pilar | Tujuan TPB | Isu Strategis | |
| Air bersih dan sanitasi layak (Clean Water and Sanitation) | Alih fungsi lahan | | | | Kualitas pendidikan di tengah pandemi | |
| Energi bersih dan terjangkau (Affordable and Clean Energy) | Kurang terpadunya pemanfaatan lahan | | | | Cakupan aksesibilitas terhadap fasilitas perpustakaan yang kurang merata | |
| Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent Work and Economic Growth) | Kurangnya pemenuhan luasan RTH perkotaan | | Ekonomi | TPB 8 | Bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian. Jika tenaga kerja sebelumnya (petani) tidak mampu diserap semua, itu akan menambah angka pengangguran | |
| Industri, inovasi dan infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure) | Pencemaran lingkungan akibat industri | | | | Standarisasi/sertifikasi SDM Pariwisata | |
| Berkurangnya kesenjangan (Reduced Inequalities) | Sampah berserakan di sungai dan pantai | | | | Pengembangan produk pariwisata | |
| Kota dan komunitas berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities) | Kerusakan hutan akibat kegiatan yang kurang berwawasan lingkungan | | | | Peningkatan aksesibilitas ke destinasi wisata | |
| Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Responsible Consumption and Production) | Kurang optimalnya pengelolaan Kawasan pariwisata | | | | Pengembangan promosi pariwisata | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Isu Berdasarkan Kesepakatan Pemangku Kepentingan | Isu berdasarkan KLHS RTRW | Isu Strategis Berdasarkan RPPLH | Berdasarkan Capaian TPB | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--|
| | | | Pilar | Tujuan TPB | Isu Strategis |
| Penanganan perubahan iklim (Climate Action) | | | | | Pendataan dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif |
| Ekosistem laut (Life Below Water) | | | | | Pembangunan ruang kreatif dan kreatif hub |
| Ekosistem daratan (Life on Land) | | | | | Integrasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif |
| Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (Peace, Justice and Strong Institutions) | | | | TPB 9 | Belum optimal beroperasinya Kawasan Industri Tuban (KIT) |
| Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnerships for the Goals) | | | | | Dampak sosial, ekonomi, kemanan dan ketertiban dan lingkungan tentang keberadaan industri besar di wilayah Kecamatan Jenu |
| | | | | | Membuka lapangan kerja seluas-luasnya yang berarti perusahaan/industri yang beroperasi di Kab. Tuban harus mementingkan tenaga kerja lokal |
| | | | | | |
| | | | | TPB 10 | Dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan dampak menurunnya pertumbuhan ekonomi skala besar |
| | | | | | Angka kemiskinan sulit diturunkan karena angka pengangguran meningkat |
| | | | | TPB 17 | Sinkronisasi data BPS dan Pemerintah Daerah |

| Isu Berdasarkan Kesepakatan Pemangku Kepentingan | Isu berdasarkan KLHS RTRW | Isu Strategis Berdasarkan RPPLH | Berdasarkan Capaian TPB | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| | | | Pilar | Tujuan TPB | Isu Strategis |
| | | | Lingkungan | TPB 6 | Pencemaran air (Domestik, Industri, Sampah, Intrusi Air Laut) |
| | | | | | Penanganan desa yang belum ODF |
| | | | | TPB 11 | Kemacetan di wilayah perkotaan |
| | | | | | Bencana alam kebakaran lahan/hutan, kekeringan, banjir rob, abrasi |
| | | | | TPB 13 | Pengendalian emisi (Migas, Galian C, Transportasi) |
| | | | | TPB 14 | Masih banyaknya pembuangan sampah di laut (sampah plastic maupun popok bayi) |
| | | | | TPB 15 | Berkurangnya kawasan hutan alam karena alih fungsi lahan hutan lindung menjadi pertambangan, pertanian, dan permukiman |
| | | | Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan | TPB 16 | Kesetaraan /hak kedudukan pria/wanita yg duduk di pemerintahan dan Parlemen |

(Sumber: Hasil Analisis Tim, 2021)

Tabel 4. 7 Penbandingan Isu Strategis KLHS dengan Indikator TPB dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tuban

| Berdasarkan Capaian TPB | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| Tujuan TPB | Isu Strategis | Kode Indikator | Indikator TPB | Isu Strategis RPJMD |
| TPB 1 | Kekurangan air minum disaat musim kemarau – pengeboran air tanah, pembuatan check dam di anakan sungai kali kering Lokasi : Sidoharjo, Wanglukulon, Sendang, Jatisari, Medalem, Leran dan Kaligede | 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Meningkatkan cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur di Kabupaten Tuban |
| TPB 4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya keterjangkauan fasilitas pendidik baik sarana maupun prasarana 2. Kurang adanya ketersediaan layanan bagi penyandang disabilitas 3. Kurang adanya penguatan dari berbagai pihak bagi siswa putus sekolah maupun masyarakat tidak mampu melalui program kesetaraan dan keaksaraan 4. Peningkatan SDM Guru/Tenaga Pengajar Kurikulum pendidikan di perbaiki Penambahan kegiatan ekstrakurikuler 5. Kualitas pendidikan di tengah pandemi 6. Cakupan aksesibilitas terhadap fasilitas perpustakaan yang kurang merata | 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Meningkatkan Kualitas Layanan Sosial Dasar untuk perlindungan dan Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing |
| | | 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | |
| | | 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. | |
| | | 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat | |
| | | 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | |
| | | 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi | |

| Berdasarkan Capaian TPB | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| Tujuan TPB | Isu Strategis | Kode Indikator | Indikator TPB | Isu Strategis RPJMD |
| | | 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | |
| | | 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | |
| TPB 8 | Bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian. Jika tenaga kerja sebelumnya (petani) tidak mampu diserap semua, itu akan menambah angka pengangguran | 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka |
| | 1. Standarisasi/sertifikasi SDM Pariwisata 2. Pengembangan produk pariwisata 3. Peningkatan aksesibilitas ke destinasi wisata 4. Pengembangan promosi pariwisata 5. Pendataan dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif 6. Pembangunan ruang kreatif dan kreatif hub 7. Integrasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| | | 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | |
| | | 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | |
| TPB 9 | Belum optimal beroperasinya Kawasan Industri Tuban (KIT) | 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| | Dampak sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban dan lingkungan tentang keberadaan industri besar di wilayah Kecamatan Jenu | 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Mendukung Sinergitas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
| | | | | Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal |

| Berdasarkan Capaian TPB | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| Tujuan TPB | Isu Strategis | Kode Indikator | Indikator TPB | Isu Strategis RPJMD |
| | Membuka lapangan kerja seluas-luasnya yang berarti perusahaan/ industri yang beroperasi di Kab. Tuban harus mementingkan tenaga kerja lokal | 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka |
| TPB 10 | 1. Dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan dampak menurunnya pertumbuhan ekonomi skala besar | 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Dampak Ekonomi |
| | | 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | Menurunkan ketimpangan wilayah dan gini ratio Kabupaten Tuban |
| | 2. Angka kemiskinan sulit diturunkan karena angka pengangguran meningkat | 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurunkan Angka Kemiskinan |
| | | 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | Menurunkan ketimpangan wilayah dan gini ratio Kabupaten Tuban |
| TPB 17 | Sinkronisasi data BPS dan Pemerintah Daerah | 17.19.2.(e) | Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum |
| TPB 6 | Pencemaran air (Domestik, Industri, Sampah, Intrusi Air Laut) | 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Meningkatkan daya dukung kualitas lingkungan |

| Berdasarkan Capaian TPB | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|--|
| Tujuan TPB | Isu Strategis | Kode Indikator | Indikator TPB | Isu Strategis RPJMD |
| | Penanganan desa yang belum ODF | 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Meningkatkan Kualitas Layanan Sosial Dasar untuk perlindungan dan Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing |
| TPB 11 | Kemacetan di wilayah perkotaan | 11.2.1.(a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | Meningkatkan cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur di Kabupaten Tuban |
| | Bencana alam kebakaran lahan/hutan, kekeringan, banjir rob, abrasi | 11.5.1.(b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Meningkatkan daya dukung kualitas lingkungan |
| TPB 13 | Pengendalian emisi (Migas, Galian C, Transportasi) | 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) | Meningkatkan daya dukung kualitas lingkungan |
| TPB 14 | Masih banyaknya pembuangan sampah di laut (sampah plastik maupun popok bayi) | 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. | Meningkatkan daya dukung kualitas lingkungan |
| TPB 15 | Berkurangnya kawasan hutan alam karena alih fungsi lahan hutan lindung menjadi pertambangan, pertanian, dan permukiman | 15.1.1 | Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan. | Meningkatkan daya dukung kualitas lingkungan |
| TPB 16 | Kesetaraan /hak kedudukan pria/ wanita yg duduk di pemerintahan dan Parlemen | 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Meningkatkan keberdayaan gender, taraf hidup dan kemandirian PMKS melalui partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

4.3.4 Isu Strategis Kabupaten Tuban

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Berdasarkan hasil telaah dan pendalaman, maka isu strategis Kabupaten Tuban diantaranya sebagai berikut:

1. Mendukung Sinergitas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (disingkat PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Menurut RPJMN melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 lampiran 2, terdapat Pembangunan kilang baru (grass root) di kabupaten Tuban. Selain itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, dimana Kabupaten Tuban dengan fokus pada bidang industri, khususnya yang bersifat *capital-intensive* serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih, dan hubungan arus barang dan orang serta juga berfokus pada agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

2. Menurunkan Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Tuban masih tinggi dengan laju penurunan yang cenderung melambat, kemudian diperparah dengan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Persentase kemiskinan di Kabupaten Tuban tahun 2019 sebesar (14,58 %) masih di atas rata-rata provinsi (10,37 %) dan rata-rata nasional (9,4 %). Di tahun 2020 penduduk miskin bertambah menjadi 15,91%.

3. Menurunkan ketimpangan wilayah dan gini ratio Kabupaten Tuban

Tahun 2019 indeks ketimpangan regional Kabupaten Tuban sebesar 0,905 hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan regional masih tinggi, karena mendekati angka 1 dan gini ratio di tahun 2020 sebesar 0,34.

4. Meningkatkan keberdayaan gender, taraf hidup dan kemandirian PMKS melalui partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial

Indeks pemberdayaan gender (IPG) pada tahun 2019 sebesar 67,74, dan tahun 2020 IPG Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi sebesar 64,32, sehingga di 5 tahun kedepan perlu adanya peningkatan keberdayaan gender, sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan PMKS Kabupaten Tuban di tahun 2020 sebesar 160.542 jiwa. Tingginya PMKS ini harus segera diselesaikan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

5. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

Angka kasus pelanggaran perundang-undangan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 27 kasus. jumlah kasus di tahun 2020 sebanyak 147 kasus. sedangkan jumlah pelanggaran/gangguan keamanan dan ketertiban umum juga mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 9 kasus, dengan jumlah total kasus 250 kasus. penanganan tersebut harus segera ditingkatkan agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

6. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban memiliki kecenderungan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan namun diatas Nasional, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 %, sedangkan provinsi Jawa Timur sebesar 5,52% dan Nasional sebesar 5,00 %. Namun di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban mengalami minus, yaitu sebesar -4,1.

7. Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban tahun 2020 sebesar 4,81. TPT mengalami peningkatan dari tahun 2019, dimana TPT sebesar 2,76. Masalah pengangguran adalah masalah penting yang harus diselesaikan, karena pengangguran merupakan salah satu akar masalah yang berdampak pada timbulnya masalah-masalah sosial lainnya.

8. Meningkatkan cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur di Kabupaten Tuban

Cakupan Konektivitas Wilayah di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 sebesar 88,88, hal ini mengalami penurun dari tahun 2019 yang sebesar 93,80. Sedangkan Ketersediaan Air Baku/ Irigasi di Kabupaten Tuban tahun 2020 sebesar 85,2%. Agar tidak terjadinya ketimpangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu adanya peningkatkan cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur di Kabupaten Tuban

9. Meningkatkan daya dukung kualitas lingkungan.

Daya dukung kualitas lingkungan relatif mengalami penurunan cukup dalam di tengah ancaman pemanfaatan untuk industri dan infrastruktur yang semakin tinggi dengan perizinan yang akan dipermudah seiring pemberlakuan UU Cipta Kerja dan kebijakan investasi nasional.
10. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tuban pada tahun 2019 sebesar 60.02, sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2019 dengan nilai 69 kategori Baik (B). Diharapkan pada periode RPJMD 2021-2026 tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik bisa lebih meningkat, sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan atas pelayanan publik.
11. Meningkatkan Kualitas Layanan Sosial Dasar untuk perlindungan dan Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Tuban sebesar 68,4 angka tersebut masih dibawah IPM Jawa Timur yang sebesar 71,71, dan IPM Nasional yang sebesar 71,94. Untuk meningkatkan IPM perlu dilakukan peningkatan melalui 3 komponen pembentuknya yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi daya beli.
12. Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Dampak Ekonomi

Tingkat penyebaran covid-19 di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu yang tertinggi dengan DKI Jakarta serta Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Timur, kasus terkonfirmasi sebanyak 154.060 kasus, secara lebih rinci Kabupaten Tuban terdapat 3704 kasus konfirmasi positif covid-19. Berkaitan dengan perkembangan covid-19 maka pemerintah daerah perlu mengantisipasi upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan sertaantisipasi dampak-dampak ekonomi, sosial dan pembangunan manusia dari adanya pandemi covid-19 ini.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi dalam RPJMD pada dasarnya merupakan adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan atas cita-cita politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam kerangka kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah, perumusan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran lima tahun ke-empat dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025. Dalam kerangka hubungan sistem pembangunan dimaksud, RPJPD menjadi kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kabupaten Tuban dalam periode 20 tahunan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, RPJMD 2021-2026 harus mempedomani visi misi pembangunan jangka panjang (2005-2025).

Selanjutnya, untuk menjalankan RPJPD pada tahapan ke-empat periode lima (5) tahunan, rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 juga harus dilakukan kontekstualisasi pada dinamika kekinian isu-isu strategis daerah dan kondisi masa depan. Penekanan pada periode dimaksud adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan di bidang-bidang strategis pada penguatan karakter dan pencapaian daya saing berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas, kemampuan penguatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, derajat kesehatan yang membaik, kekuatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang semakin menguat untuk dijadikan landasan pencapaian daya saing ekonomi Kabupaten Tuban.

Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Tuban dan pencapaian RPJMD lima tahun ke-tiga (2016-2021), serta implementasi dan capaian RPJMN Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

5.1 Visi

Perumusan Visi Kabupaten Tuban didasarkan pada permasalahan utama yang dihadapi, dari masalah-masalah utama diambil inti kalimat dan

dirumuskannya visi Kabupaten Tuban. Berikut perumusan visi Kabupaten Tuban yang disajikan dalam tabel:

Tabel 5.1 Perumusan Visi

| No | Masalah Pokok | Pokok-pokok Visi | Pernyataan Visi |
|-----------|---|-------------------------|--|
| 1 | Angka kemiskinan masih tinggi di atas angka kemiskinan Jawa Timur dan Nasional dengan laju penurunan yang cenderung lambat | Sejahtera | Membangun serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan |
| 2 | Derajat kualitas & akses layanan kesehatan belum merata | | |
| 3 | Kasus kematian ibu & bayi serta angka stunting yang masih relatif tinggi | | |
| 4 | Kesejahteraan dan Pendapatan pelaku ekonomi sektor strategis dan unggulan belum meningkat secara akseleratif | | |
| 5 | Belum efektifnya kinerja intervensi sosial kemasyarakatan | | |
| 6 | Adanya potensi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban umum di tengah kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat yang semakin terbuka, dinamis dan juga meningkatnya ketidakpastian | Berkeadilan | |
| 7 | Birokrasi yang Kapabel, Birokrasi Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi dan Informasi | Berbudaya | |
| 8 | Pemajuan, pengembangan, dan pelestarian budaya lokal yang kurang ditambah budaya maju, cakap literasi sesuai transformasi zaman yang relatif terbatas | | |
| 9 | Akses dan kualitas pendidikan sesuai standar yang belum merata | Berdaya Saing | |
| 10 | Arus dan struktur investasi tidak selalu linear dengan rasio kesempatan kerja dan kecepatan pertumbuhan angkatan kerja | | |
| 11 | Belum semua sektor memiliki nilai tambah dan keunggulan daya saing yang kuat (Daya saing ekonomi) | | |
| 12 | Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis integrasi fungsi spasial belum maksimal | | |
| 13 | Birokrasi yang Kapabel, Birokrasi Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima berbasis Teknologi dan Informasi | | |

| No | Masalah Pokok | Pokok-pokok Visi | Pernyataan Visi |
|----|---|----------------------------|-----------------|
| 14 | Pengendalian, Pemeliharaan, pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup belum optimal karena faktor alam-geografis, sarana-prasarana, SDM maupun integritas penegakkan aturan | Berbasis Lingkungan | |
| 15 | Tingginya potensi kerawanan dan resiko bencana Kabupaten Tuban | | |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, adapun rumusan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah :

“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Sejahtera dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau berkurangnya masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara materiil maupun non materiil. Kesejahteraan, sebagaimana juga problematika kemiskinan, merupakan situasi yang terbentuk karena berbagai faktor dalam dimensi yang beragam sehingga konstruksi intervensinya pun harus bersifat multidimensi. Setidaknya kekuatan visi pembangunan Kabupaten Tuban akan fokus pada elaborasi dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman untuk tidak semakin terperosok dalam problem kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus utama untuk mampu meningkat dan mengentaskan masyarakat dan kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, peningkatan produktivitas dalam rantai aktivitas ekonomi.

Berkeadilan adalah Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok

masyarakat yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (citizenship) baik hak politik, ekonomi, maupun sosial. Berkeadilan juga merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran hukum pada aturan-aturan yang ada untuk menghormati hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial maupun ekonomi.

Berbudaya dalam rumusan visi dijelaskan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama. Kekuatan Budaya yang dibangun juga difokuskan pada idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan yang memiliki budaya melayani berdasarkan basis kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang kuat. Dengan demikian, **“berbudaya” dalam hal ini merupakan kekuatan budaya** yang mencakup aspek SDM, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan akuntabel, dan kekuatan.

Berdaya saing dikonsepsikan sebagai Suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan. **“Daya Saing” Kabupaten Tuban** yang pada dasarnya merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota.

Berbasis lingkungan memiliki makna suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

Berikut *core values* yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan yang disajikan dalam tabel:

Tabel 5. 2 Penjelasan Visi

| Visi | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|--|---------------------------|---|
| <p>Membangun serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan</p> | <p>Sejahtera</p> | <p>idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau berkurangnya masyarakat Kabupaten Tuban dari jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup materiil maupun non materiil, lahir dan batin. Fokus dengan elaborasi dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman untuk tidak semakin terperosok dalam problem kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus utama untuk mampu mengangkat dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, peningkatan produktivitas dalam rantai aktivitas ekonomi produktif</p> |
| | <p>Berkeadilan</p> | <p>Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kelompok masyarakat yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (citizenship). Berkeadilan juga merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran hukum pada aturan-aturan yang ada untuk menghormati hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun</p> |

| Visi | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|----------------------------|---|---|
| | | kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial maupun ekonomi. |
| | Berbudaya | suatu kondisi kehidupan masyarakat Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama. Kekuatan Budaya juga merepresentasikan idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan yang melayani, transparan, dan akuntabel berdasarkan basis kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang kuat |
| | Berdaya Saing | Suatu kondisi kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan. “Daya Saing” merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. |
| Berbasis Lingkungan | terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis. | |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Nilai-nilai dasar sebagaimana dimuat dalam visi tersebut pada dasarnya bukan sesuatu yang terlepas dan berdiri sendiri satu dengan lainnya, melainkan memiliki relasi yang beririsan dan berinteraksi bekerja dengan kerangka logis

tertentu dalam mewujudkan visi. Berikut ini ilustrasi interaksi relasional nilai-nilai yang menjadi pokok-pokok visi :



Gambar 5. 1 Relasi Nilai dan Kerangka Kinerja Pencapaian Visi
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2021-2026 yaitu :

Misi 1

"Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal"

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada:

- Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan

- Infrastruktur untuk layanan dasar
- Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi
- Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi

Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah yang harmonis dan terpadu antara desa dan kota. Kecepatan kemajuan perkotaan diharapkan tidak memposisikan desa dalam ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar ruang, antar wilayah, dan antar masyarakat. Dengan orientasi inilah relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi pertumbuhan dan kemajuan desa.

Misi 2

“Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”

Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang mutlak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan

hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis pemberdayaan masyarakat.

Misi 3

“Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih”

Substansi “**SDM berkualitas**” mencakup aspek kecerdasan kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis (mentalitas), keterampilan yang dimaknai memiliki penguasaan ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 (tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan

masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Misi 4

“Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif”

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan strategis yang menjalankan *delivery mechanism* pencapaian tujuan politik pembangunan daerah. Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya. Misi Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai Berbudaya maupun Daya Saing.

Berikut penjelasan 4 misi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan yang disajikan dalam tabel:

Tabel 5. 3 Penjelasan Misi

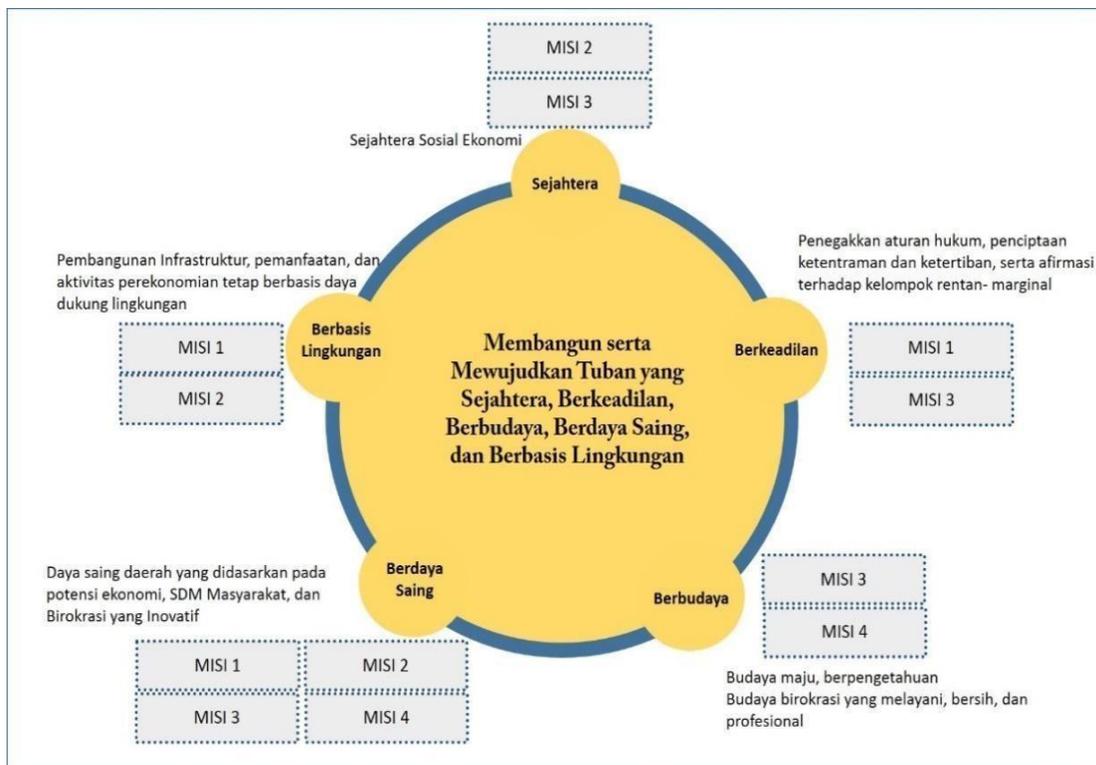
| Visi | Misi | Penjelasan Misi |
|---|--|--|
| Membangun serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan | Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal | Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah yang nyaman, aman, harmonis, terpadu antara desa dan kota. Dinamika kemajuan perkotaan diharapkan tidak memposisikan desa dalam ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar ruang wilayah, dan antar masyarakat. Relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian |

| Visi | Misi | Penjelasan Misi |
|------|---|--|
| | | sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi pertumbuhan dan kemajuan desa. |
| | Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif | Misi ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban dengan basis orientasi satu desa satu produk unggulan (One Village One Product/OVOP). |
| | Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih | SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan |
| | Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif | Birokrasi pemerintahan merupakan instrumen legal dan strategis yang menjalankan <i>delivery mechanism</i> pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi harus mampu membangun dirinya |

| Visi | Misi | Penjelasan Misi |
|------|------|---|
| | | <p>sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Misi ini merepresentasikan komitmen kuat membangun dan menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.</p> |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Konstruksi relasi empat (4) misi terhadap *core values* visi pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5. 2 Konstruksi relasi empat misi dan *core values* visi

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Tabel 5. 4 Keterkaitan Isu Strategis dengan Misi

| ISU STRATEGIS | MISI |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendukung dan mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2) Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal 3) Meningkatkan cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur di Kabupaten Tuban 4) Meningkatkan daya dukung kualitas lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan local |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendukung dan mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2) Menurunkan Angka Kemiskinan 3) Menurunkan ketimpangan wilayah dan gini ratio Kabupaten Tuban 4) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi 5) Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka 6) Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Dampak Ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> 2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendukung dan mewujudkan Sinergitas Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2) Meningkatkan keberdayaan gender, taraf hidup dan kemandirian PMKS 3) Meningkatkan Kualitas Layanan Sosial Dasar untuk perlindungan dan Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing 4) Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Dampak Ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> 3) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum 2) Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Dampak Ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> 4) Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan faktualisasi isu-isu strategis Kabupaten Tuban secara empiris, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tuban 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tuban 2021-2026 memiliki 5 tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tujuan dalam Misi 1

Misi 1 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban adalah Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Dengan menelaah muatan substansi misi ini, maka tujuan yang dirumuskan adalah :

Tujuan 1 : “Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi (T1)”

Tujuan ini menggambarkan orientasi dan idealisasi konstruksi kondisi Kabupaten Tuban yang ingin dicapai hingga tahun 2026 yakni Kabupaten Tuban merupakan daerah yang layak dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal dengan dukungan infrastruktur yang memadai baik untuk kepentingan layanan sosial, kepentingan ekonomi, dan sebagai ruang yang mewadahi berbagai aktivitas kehidupan warga masyarakat Tuban. Di dalamnya mencakup

bagaimana intervensi kebijakan pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan dengan memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terus meningkat kualitasnya disertai dengan meningkatnya kapasitas tanggap dan kesiap-siagaan terhadap potensi kebencanaan. Ruang wilayah dikembangkan dengan kualitas infrastruktur yang mempertautkan relasi harmonis atau terpadu antara ruang desa, kawasan perdesaan, dan perkotaan dengan orientasi utilitas publik tanpa mendegradasi lingkungan itu sendiri. Kenyamanan juga dikembangkan dengan kondusivitas aktivitas warga yang ada dalam ruang dengan komitmen menjaga harmonisasi dan kerukunan kehidupan warga. Rangkaian intervensi untuk aktivitas sosial masyarakat dalam mengaktualisasikan kepentingan dan aspirasinya, mengekspresikan nilai-nilai religiusitas dan kultural membutuhkan dukungan ruang ekologis yang inklusif, terbuka, dan harmonis. Oleh karenanya, hal ini juga menyangkut penciptaan kenyamanan ruang yang harmonis dengan kekuatan sikap mental dan perilaku yang toleran dan penuh kerukunan. Dengan demikian, **tujuan “Tuban Nyaman”** ini juga mencakup di dalamnya orientasi menciptakan utilitas ruang yang kondusif untuk aktivitas sosial berbasis nilai harmonisasi, ketentraman, ketertiban umum. Dengan pertimbangan konstruktif tersebut, maka indikator yang ditetapkan untuk mengukur capaian tujuan adalah Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index).

Tujuan dalam Misi 2

Rumusan Misi ke-2 pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban 2021-2026 adalah Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan telaah terhadap substansi misi dengan didukung analisis dari isu-isu strategis secara empirik yang akan dihadapi Kabupaten Tuban dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan, terutama isu-isu strategis terkait daya saing dan daya tahan ekonomi, isu-isu produktivitas dan kemiskinan maka rumusan atau pernyataan tujuan dalam misi ini adalah sebagai berikut :

Tujuan 2 : “Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2)”

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban tidak hanya ditekankan pada tantangan peningkatan produksi dan produktivitas, melainkan juga tantangan rendahnya nilai tambah ekonomi itu sendiri, yang lebih bersentuhan dengan kemampuan sistem dan struktur perekonomian daerah dalam melakukan reformasi ekonomi atau transformasi struktural. Pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban juga tidak hanya diarahkan pada kemampuan bersaing di dalam bingkai konstelasi perekonomian regional maupun nasional, melainkan juga bagaimana Kabupaten Tuban mengambil tempat untuk mengoptimalkan peran kolaboratif dan kooperatif dalam berbagai kerjasama regional perekonomian yang dalam dunia kontemporer menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan.

Berikutnya, keberdayaan dan kapasitas sosial masyarakat harus dibangun sebagai kekuatan untuk membentengi masyarakat dari ketergantungan dan kerentanan sosial. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mendayagunakan berbagai sumber daya dan modal sosial yang mereka miliki untuk meningkatkan kualitas hidup, akses, dan daya tawar. Pada gilirannya, ketahanan masyarakat sebagai satu kesatuan entitas sosial masyarakat akan terbangun dan menjadi faktor modal sosial tertentu.

Pembangunan daerah di Kabupaten Tuban juga dihadapkan pada kondisi masih adanya kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun secara statistik terus mengalami penurunan (kecuali kondisi pada era pandemik Covid 19) dan angka kemiskinan berada di bawah nasional dan provinsi, namun demikian penurunan tersebut sangat lambat dan tetap membutuhkan langkah intervensi untuk mengakselerasi dan menginkluskasikan penurunan dari tahun ke tahun hingga 2026. Untuk itu, **diperlukan keberdayaan dan ketahanan sosial** yang harus diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban melalui sinergis seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan yang inklusif dan integratif.

Tujuan dalam Misi 3

Misi 3 pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban memiliki fokus pada domain Sumberdaya Manusia dan Sosial. Berdasarkan substansi yang dimuat di dalam misinya, maka tujuan yang dikonstruksi adalah :

Tujuan 3 : “Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender” (T3)”

Tujuan ini diyakini sangat strategis sebagai tujuan pembangunan yang harus dicapai dalam menempatkan Tuban sesuai dengan konstruksi cita-cita

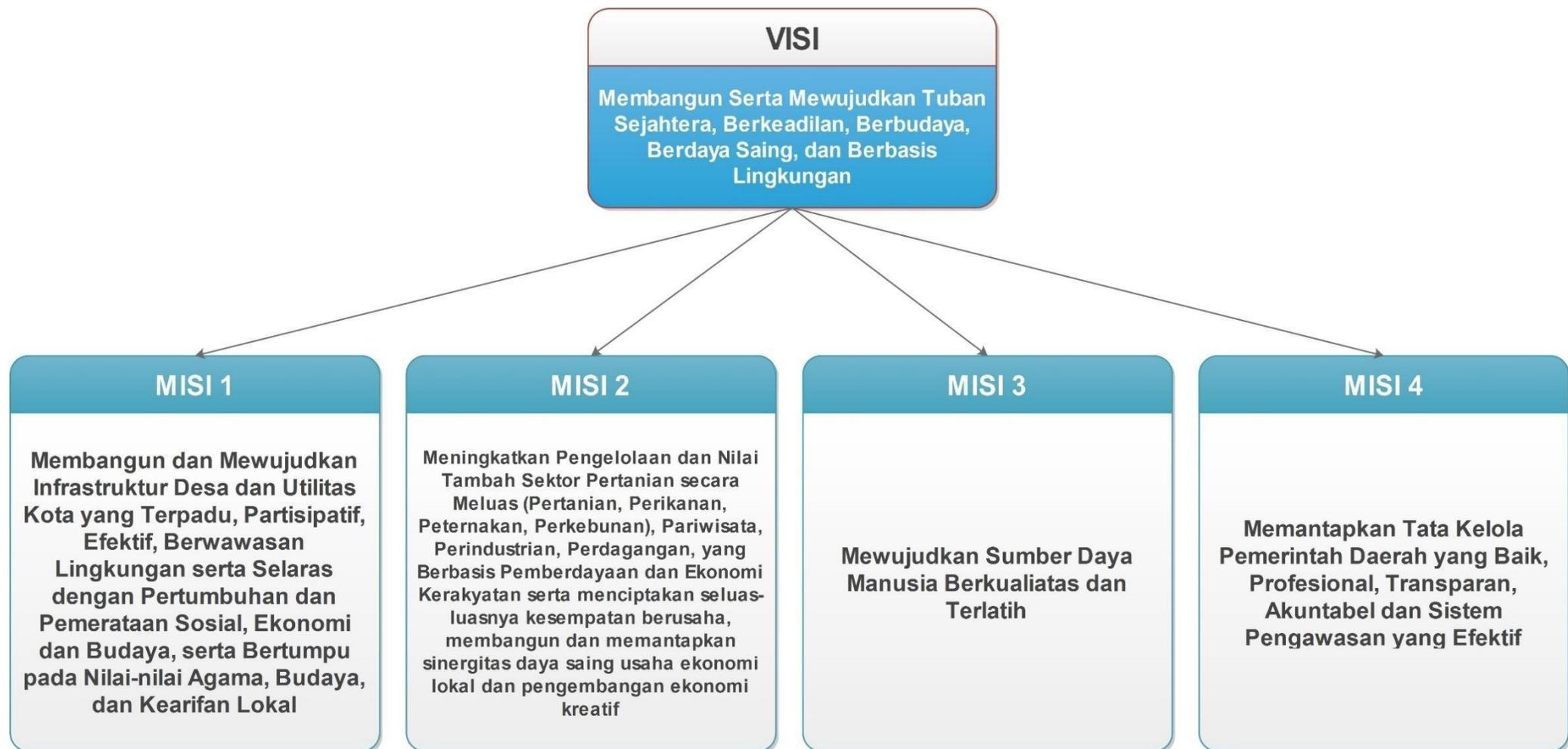
politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni terutama nilai Tuban yang sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing. SDM yang berkualitas adalah karakter kuat yang harus dibentuk untuk sekaligus mampu mengambil tempat pada konteks persaingan regional, nasional maupun internasional. Masyarakat Tuban memiliki karakter dasar yang kuat sebagai masyarakat yang berkeinginan dan memiliki semangat yang tinggi untuk maju. Tidak hanya cerdas, intervensi kesehatan juga harus menjadi prioritas dalam misi ini, karena hampir tidak mungkin berbicara kualitas SDM tanpa aspek kesehatan masyarakat. SDM yang berkualitas akan terpenuhi jika prasyarat kesehatan terpenuhi.

Tujuan dalam Misi 4

Pembangunan di Bidang Birokrasi (pemerintahan), pada dasarnya mencakup dimensi proses (*inward looking*) dan dimensi hasil (*Outward looking*/dampak eksternal. Pada akhirnya, secara ideal pembangunan birokrasi/tata pemerintahan harus ditujukan pada dampak eksternal. Dampak eksternal dalam hal ini adalah pelayanan publik yang berkualitas (pelayanan publik adalah titik temu birokrasi dan masyarakat) dan juga daya dukung terhadap sasaran prioritas pembangunan lainnya. Dengan demikian, pembangunan pada MISI 4 ini memiliki tujuan :

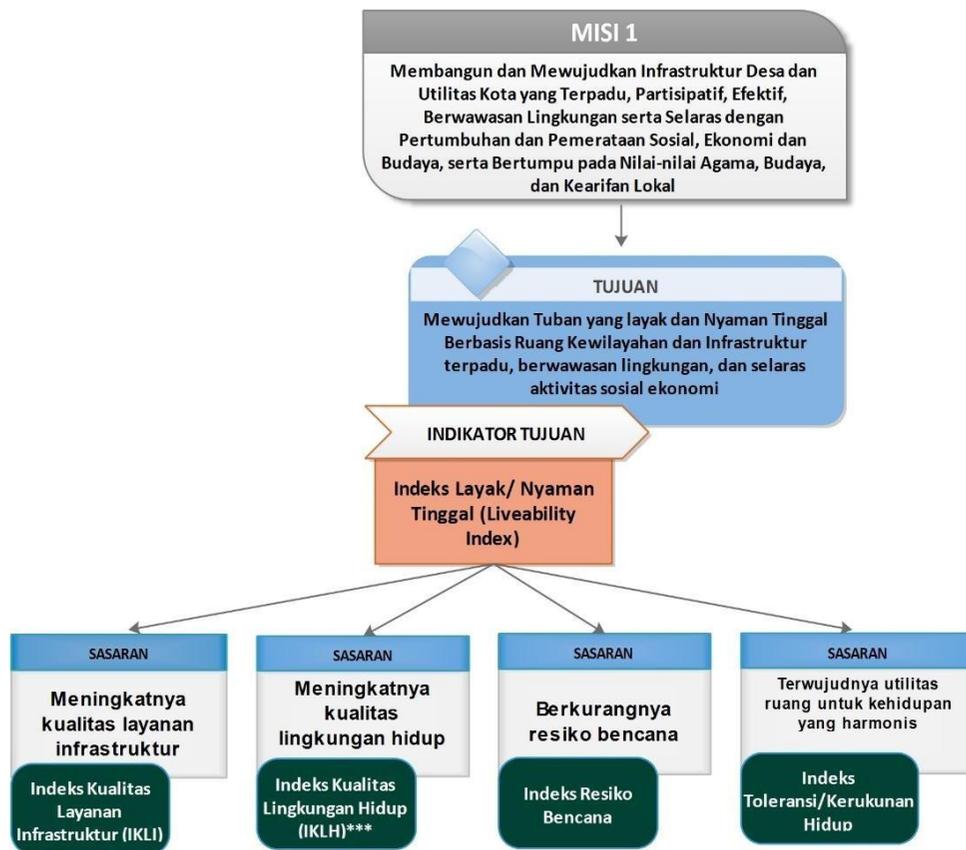
Tujuan 4 : “Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik (T4)”

Tujuan ini pada dasarnya merupakan prasyarat dasar atau syarat prakondisi bagi tercapainya tujuan lain pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu peningkatan tata kelola pemerintahan harus menjadi tujuan awal yang harus dicapai oleh pemerintah kabupaten Tuban. Cakupan substansi dalam kerangka tujuan pembangunan memuat pembangunan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan profesionalisme dan kompetensi ASN, dan pembangunan kapasitas pengembangan *information, communication, and Technology*.



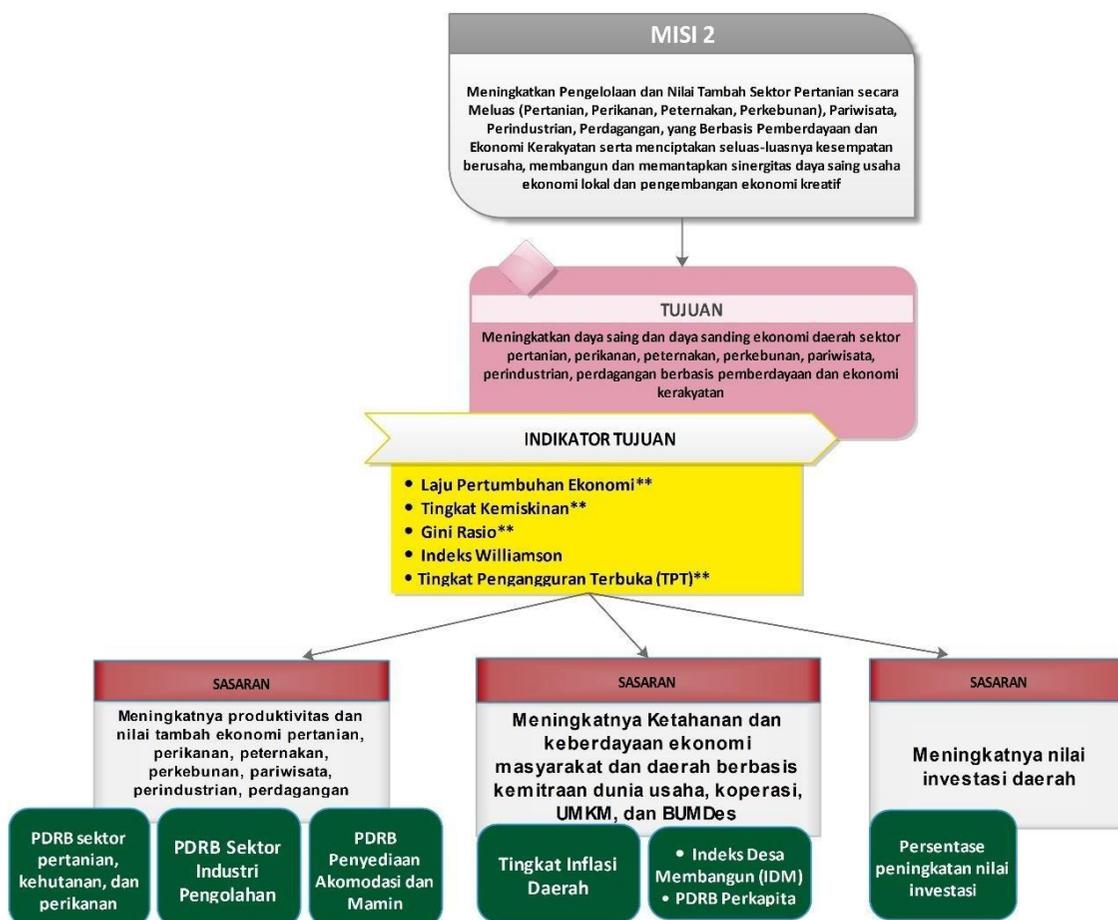
Gambar 5. 3 Visi dan Misi Kepala Daerah

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



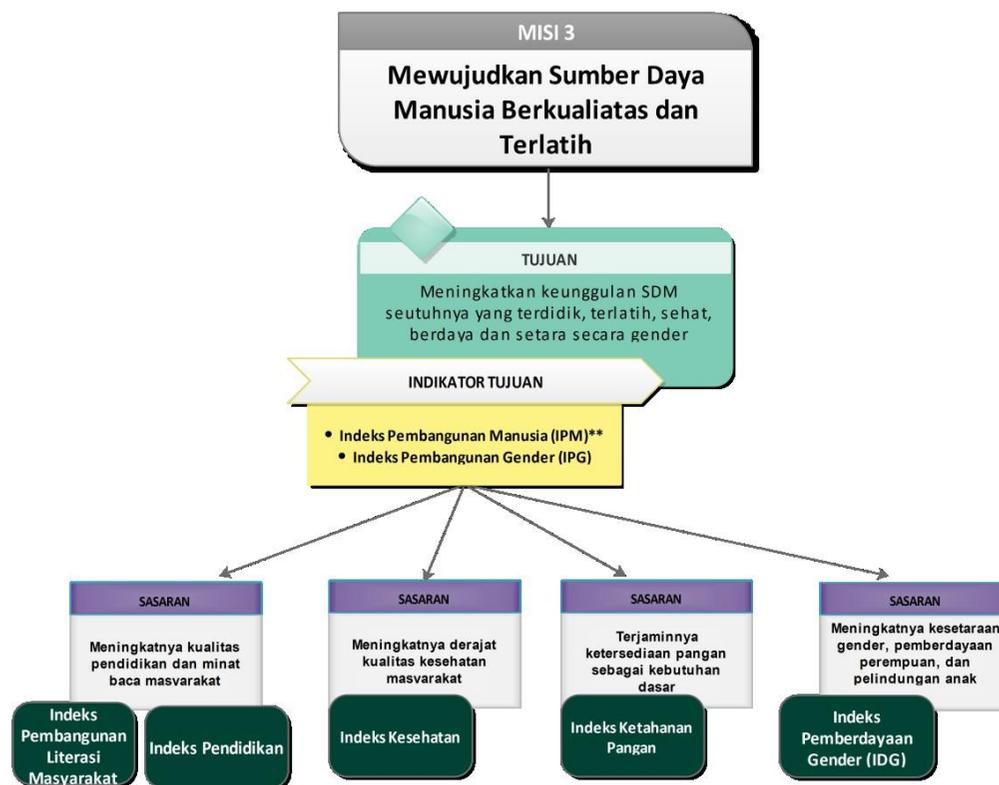
Gambar 5. 4 Misi 1 Kepala Daerah

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

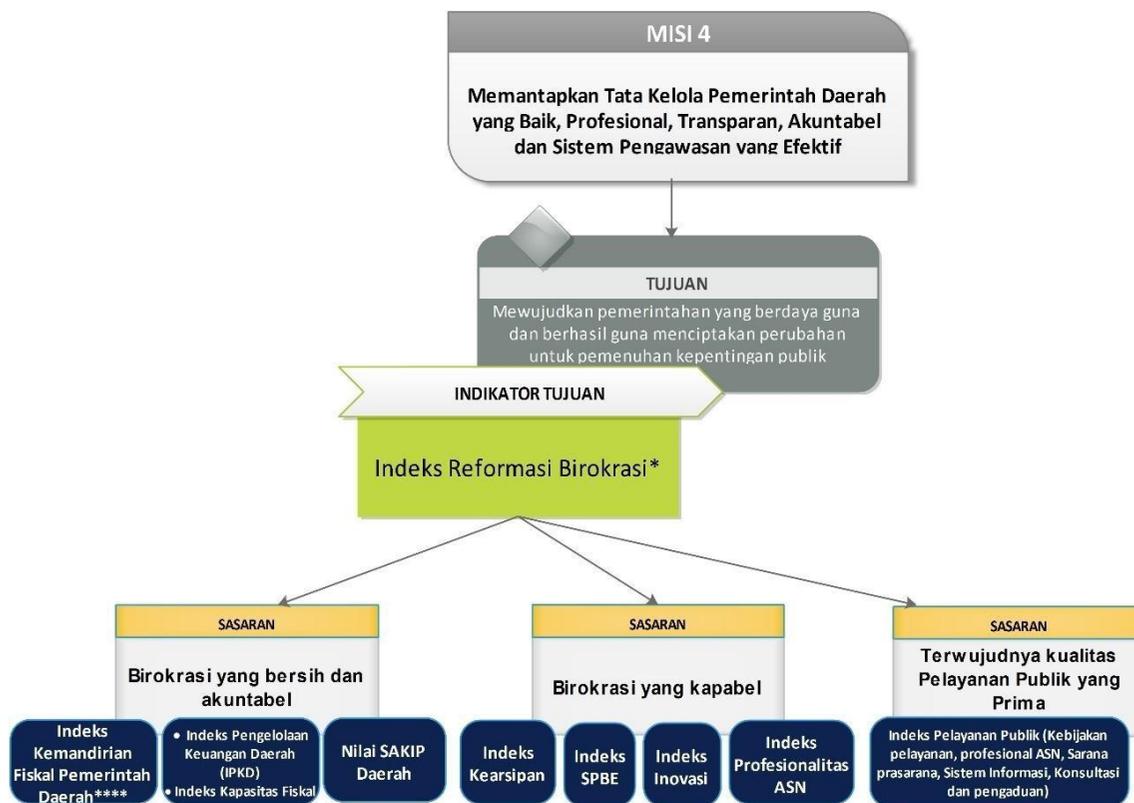


Gambar 5. 5 Misi 2 Kepala Daerah

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 6 Misi 3 Kepala Daerah
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 7 Misi 4 Kepala Daerah
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Sasaran Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

Sasaran RPJMD menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Sasaran dalam Tujuan Misi 1

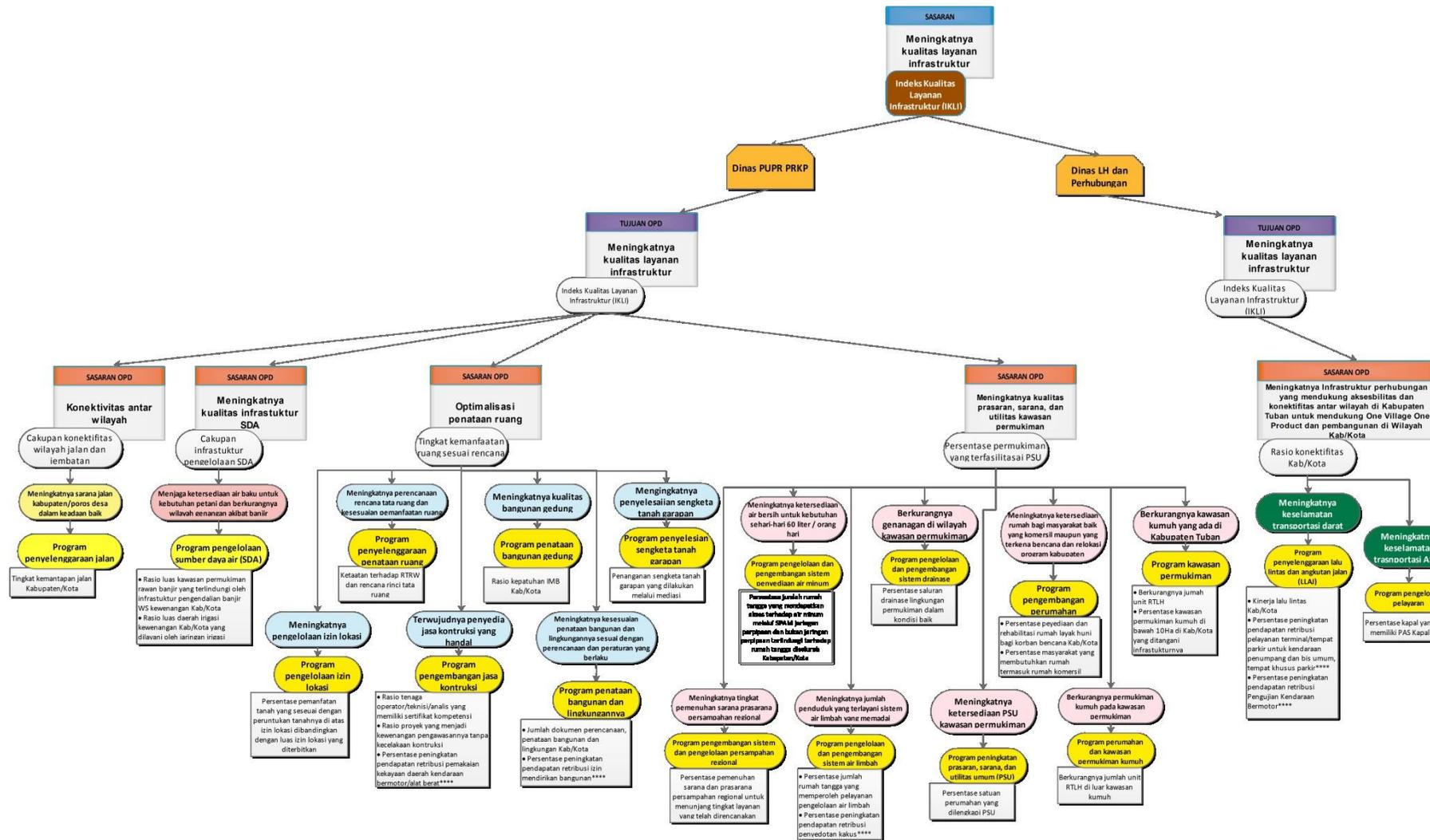
Tujuan dalam Misi ke-1 “Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi” akan dicapai dengan sasaran (1) Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur; (2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; (3) Berkurangnya resiko bencana; (4) Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis.



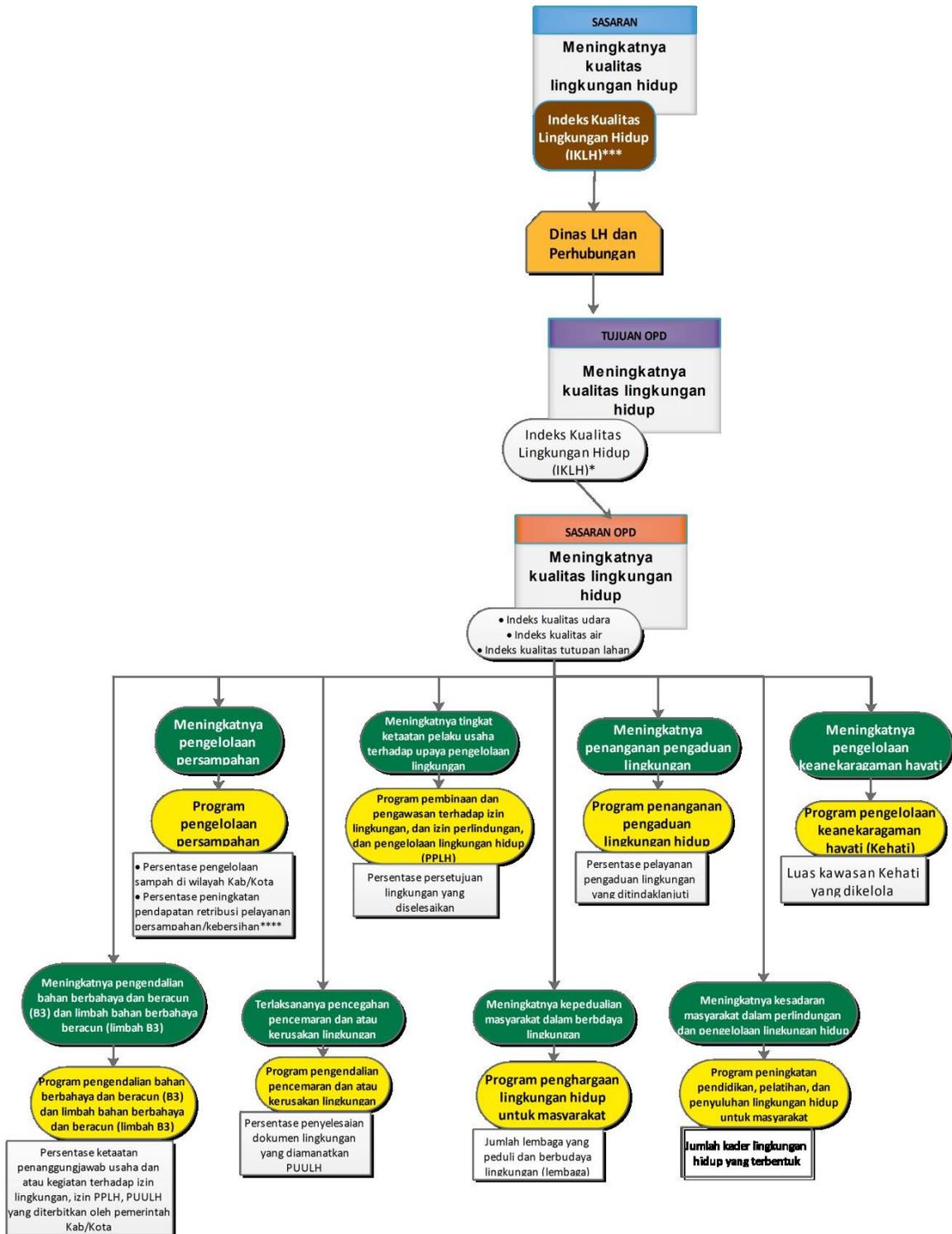
Gambar 5. 8 Kerangka kerja logis pencapaian Misi 1

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Kerangka kerja logis pencapaian Misi 1 Kabupaten Tuban 2021-2026 tersebut memiliki kerangka intervensi penyelesaian permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam gambar *Pohon Kinerja* sebagai berikut:

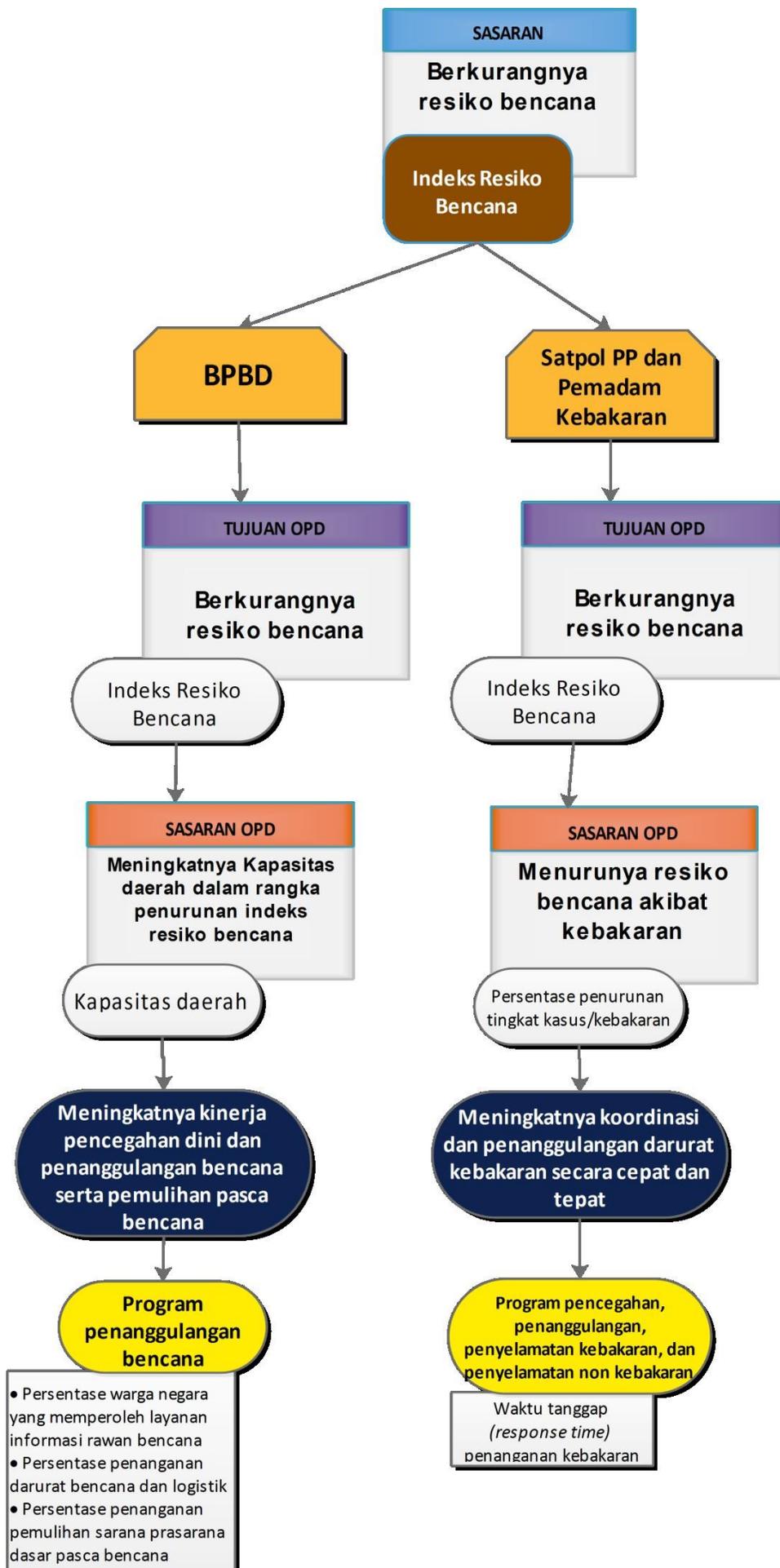


Gambar 5. 9 Misi 1 Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



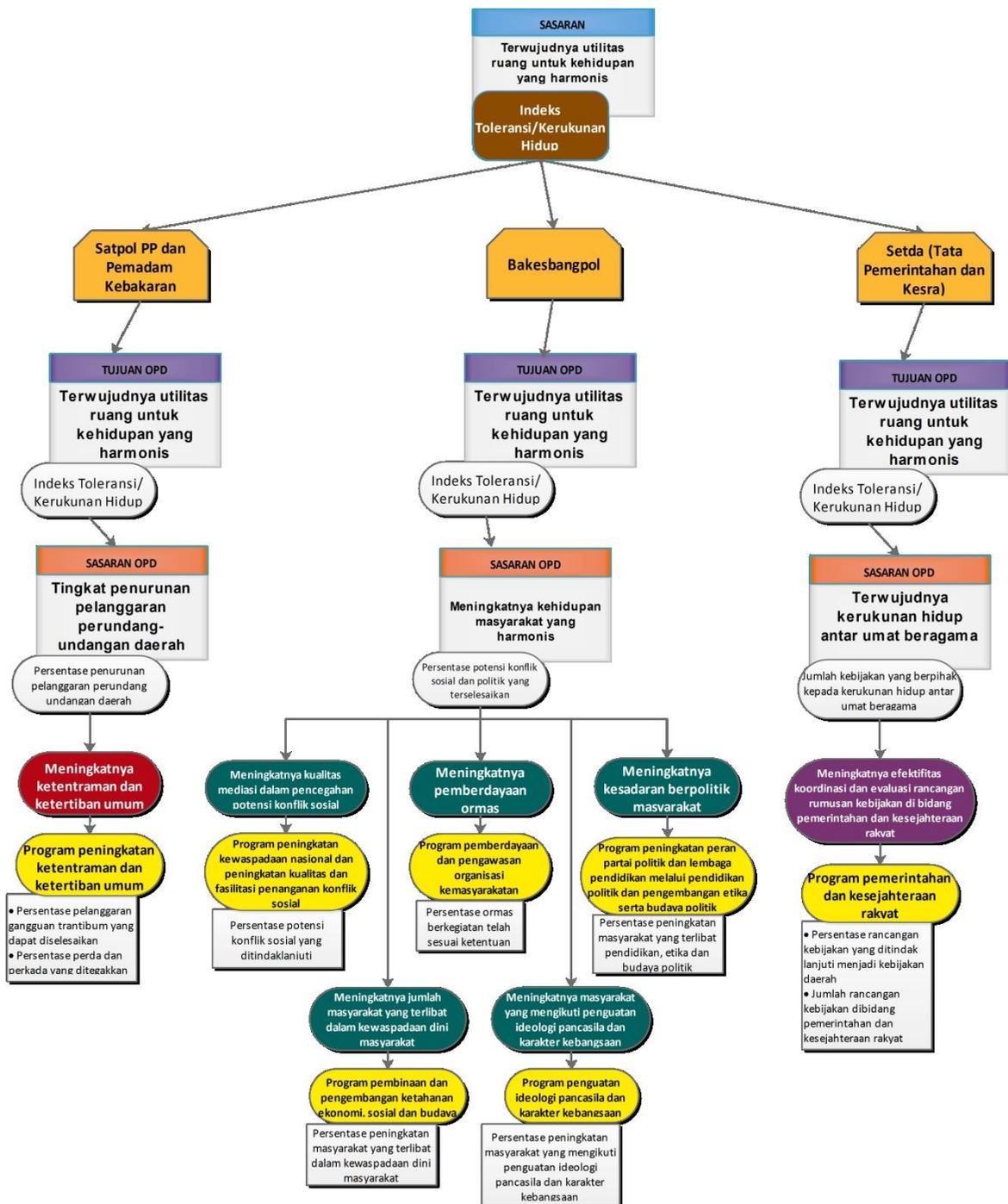
Gambar 5. 10 Misi 1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 11 Misi 1 Sasaran Berkurangnya Resiko Bencana

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 12 Misi 1 Sasaran Terwujudnya Utilitas Ruang untuk Kehidupan yang Harmonis

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Sasaran dalam Tujuan Misi 2

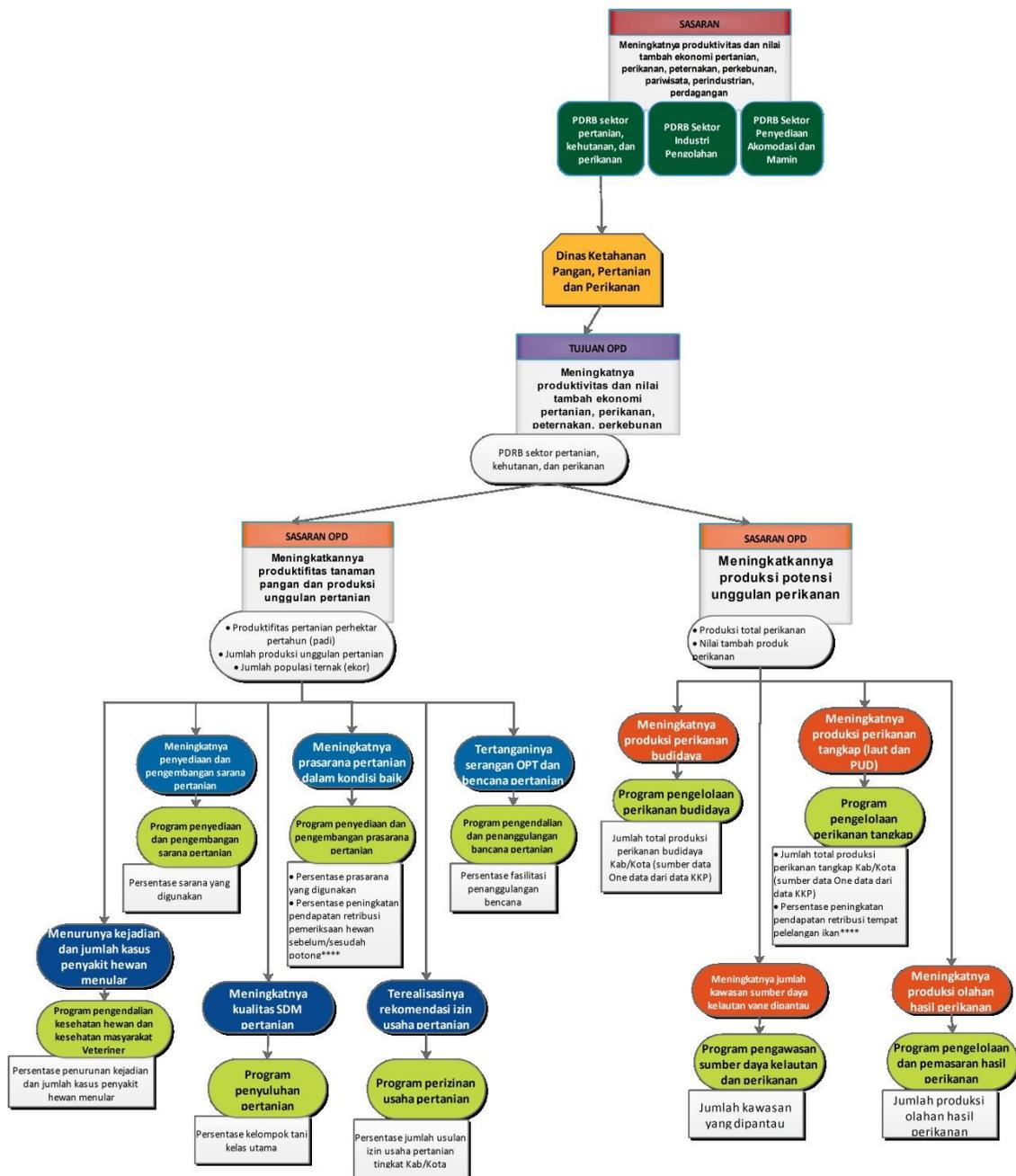
Misi 2 memiliki tujuan “Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah berbasis nilai tambah sektor unggulan.” Tujuan ini akan diwujudkan pencapaiannya dengan sasaran-sasaran : (1) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan; yang kinerja pencapaiannya akan diukur dari PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Mamin; PDRB Sektor Industri Pengolahan; (2) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah; yang kinerja pencapaiannya akan diukur dari Tingkat Inflasi Daerah dan Indeks Desa Membangun (3) Meningkatnya nilai investasi daerah yang kinerja pencapaiannya akan diukur dari Persentase Peningkatan Nilai Investasi. Berikutnya, secara faktual, sektor investasi juga memainkan peran penting dalam kerangka peningkatan daya saing dan daya sanding perekonomian Kabupaten Tuban sehingga keberadaanya juga harus menjadi sasaran dari pembangunan daerah.



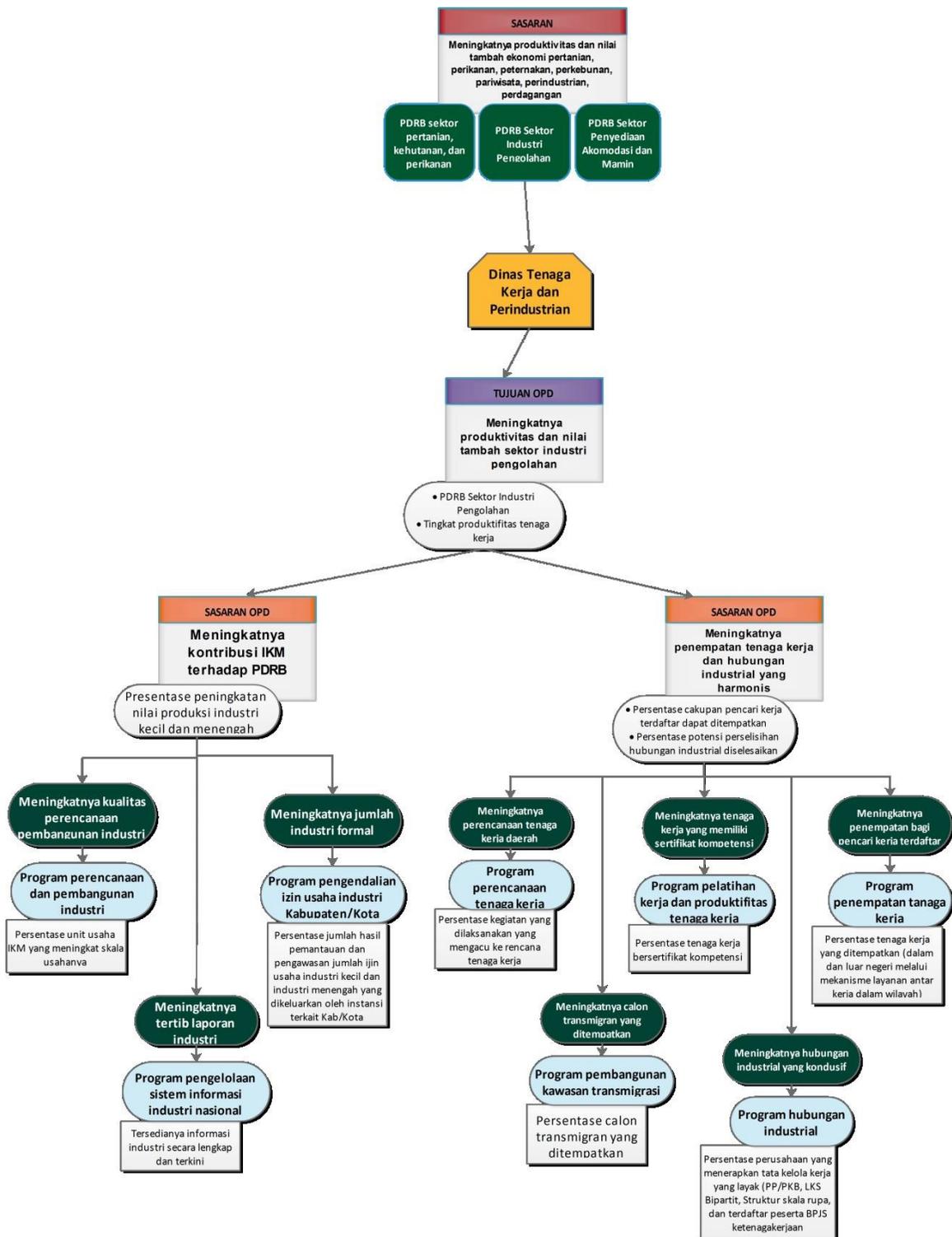
Gambar 5. 13 Kerangka kerja logis pencapaian Misi 2

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Kerangka kerja logis pencapaian Misi 2 Kabupaten Tuban 2021-2026 tersebut memiliki kerangka intervensi penyelesaian permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam gambar Pohon Kinerja berikut:

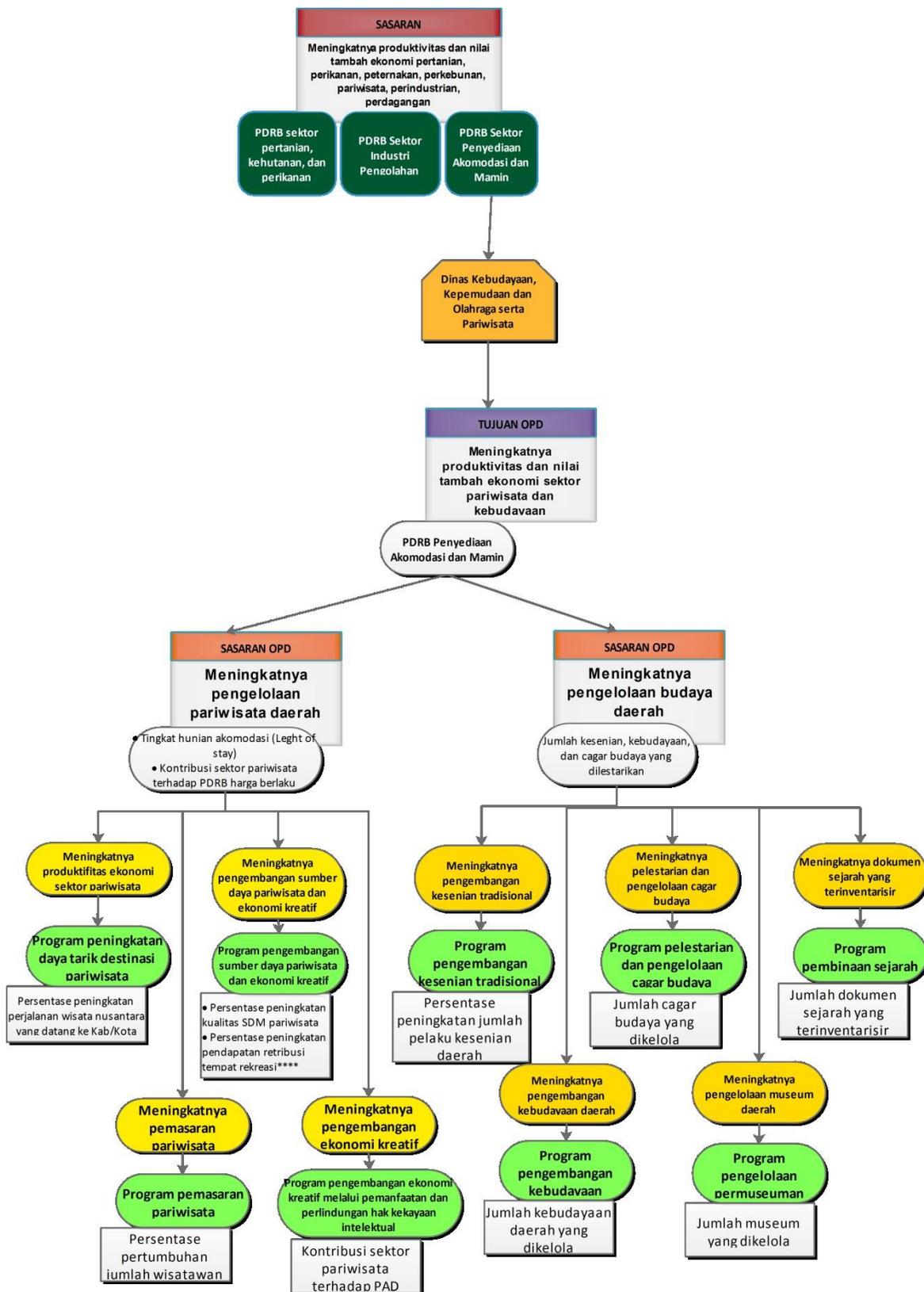


Gambar 5. 14 Misi 2 Sasaran Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



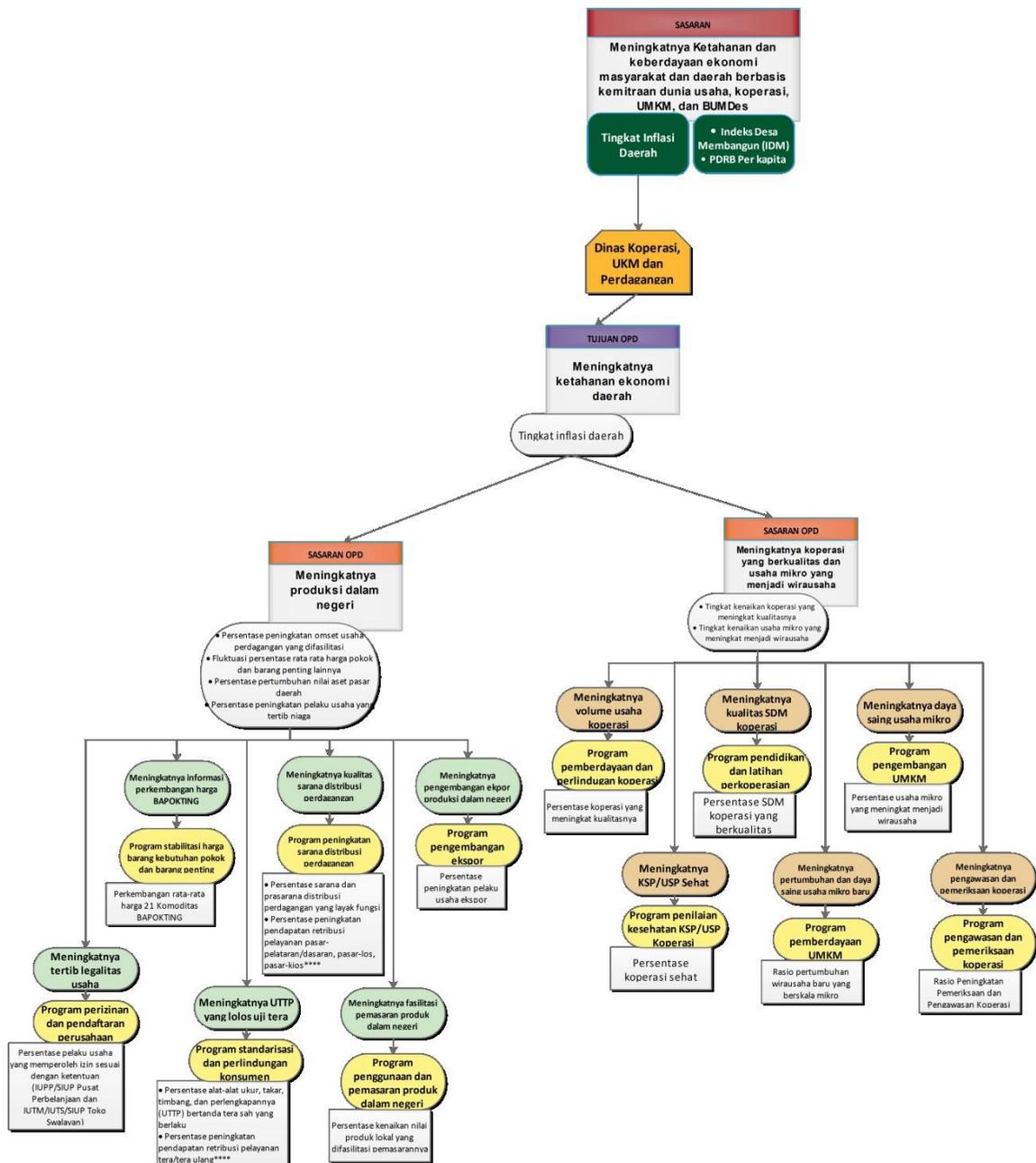
Gambar 5. 15 Misi 2 Sasaran Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



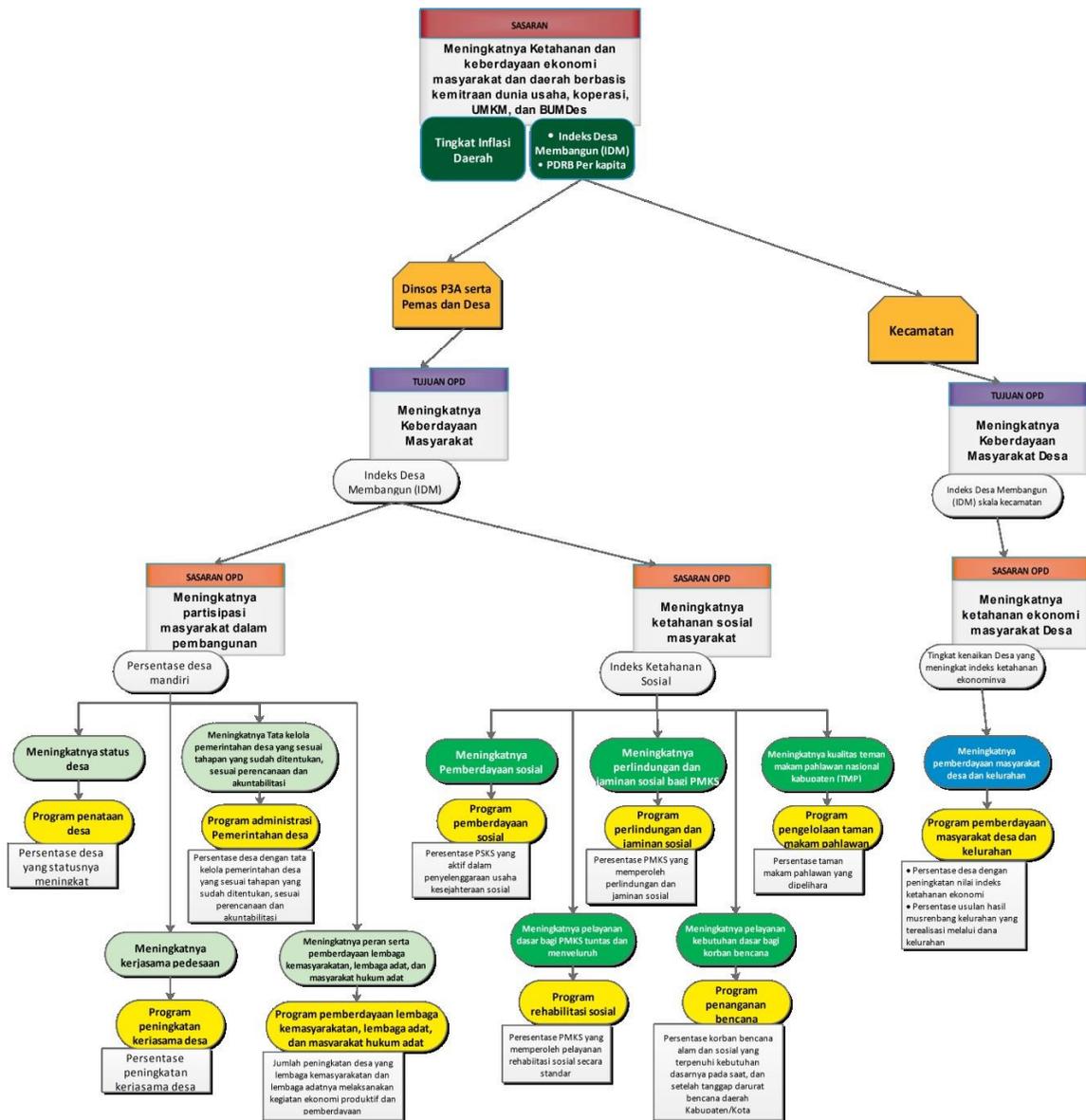
Gambar 5. 16 Misi 2 Sasaran Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



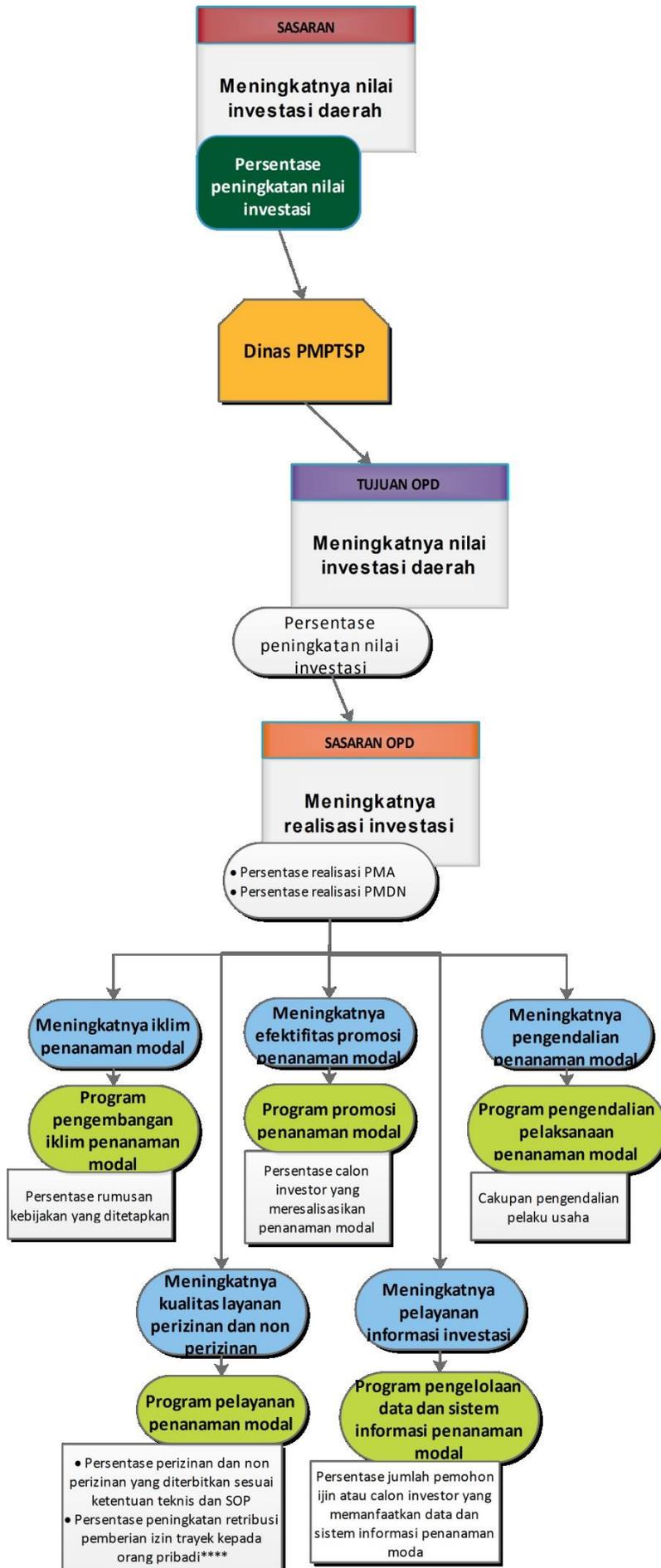
Gambar 5. 17 Misi 2 Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan Indikator Tingkat Inflasi Daerah

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 18 Misi 2 Sasaran Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 19 Misi 2 Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Sasaran dalam Tujuan Misi 3

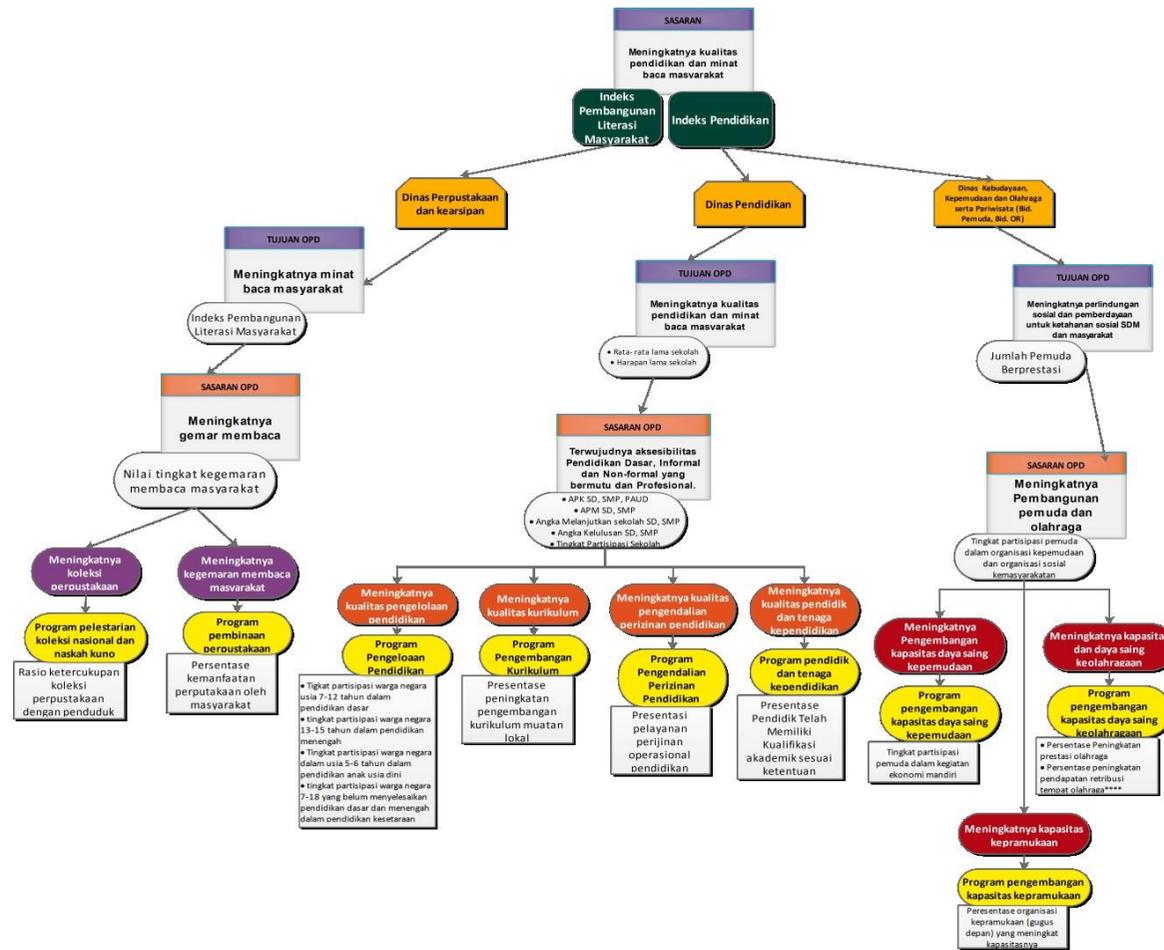
Misi 3 memiliki tujuan “Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya dan setara secara gender”. Tujuan ini akan dikonstruksi pencapaiannya melalui sasaran-sasaran sebagai berikut : (1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan minat baca masyarakat, yang kinerja pencapaiannya akan diukur dari Indeks Pendidikan dan Indeks Literasi; (2) Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat dengan Indeks Kesehatan sebagai indikator kinerjanya; (3) Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar yang akan diukur dengan indikator ketahanan pangan dan; (4) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).



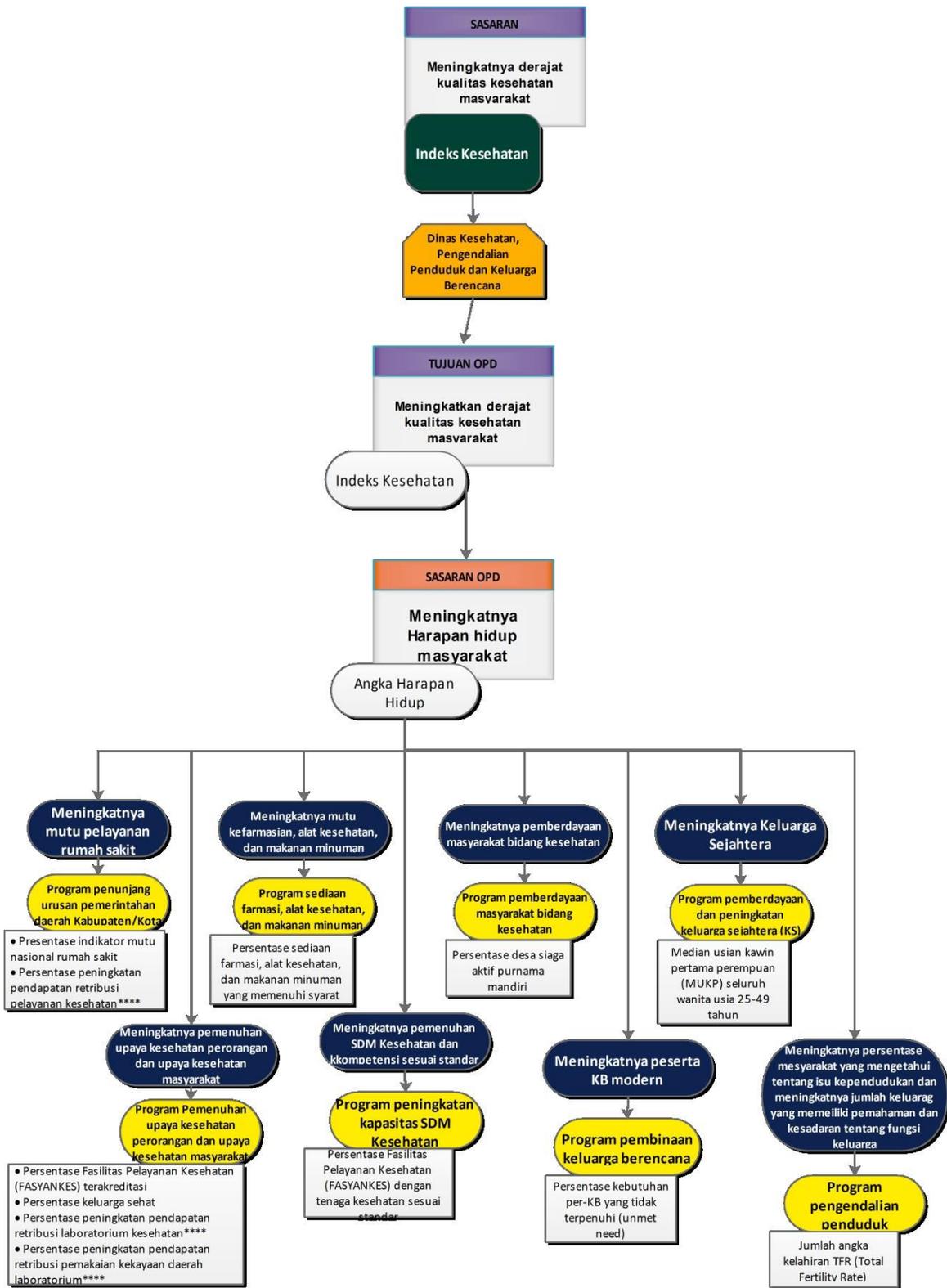
Gambar 5. 20 Kerangka kerja logis pencapaian Misi 3

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Kerangka kerja logis pencapaian Misi 3 Kabupaten Tuban 2021-2026 tersebut memiliki kerangka intervensi penyelesaian permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam gambar *Pohon Kinerja* berikut:

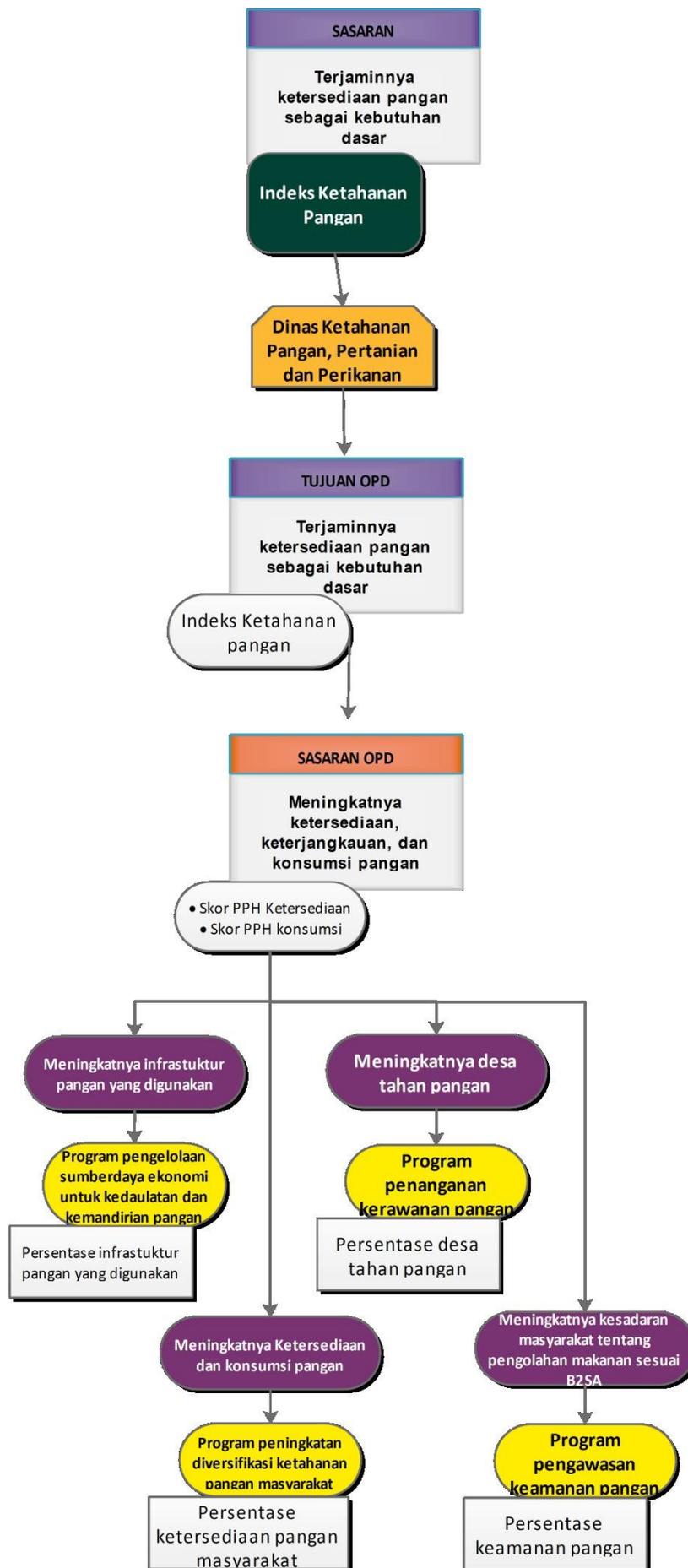


Gambar 5. 21 Misi 3 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat
(Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



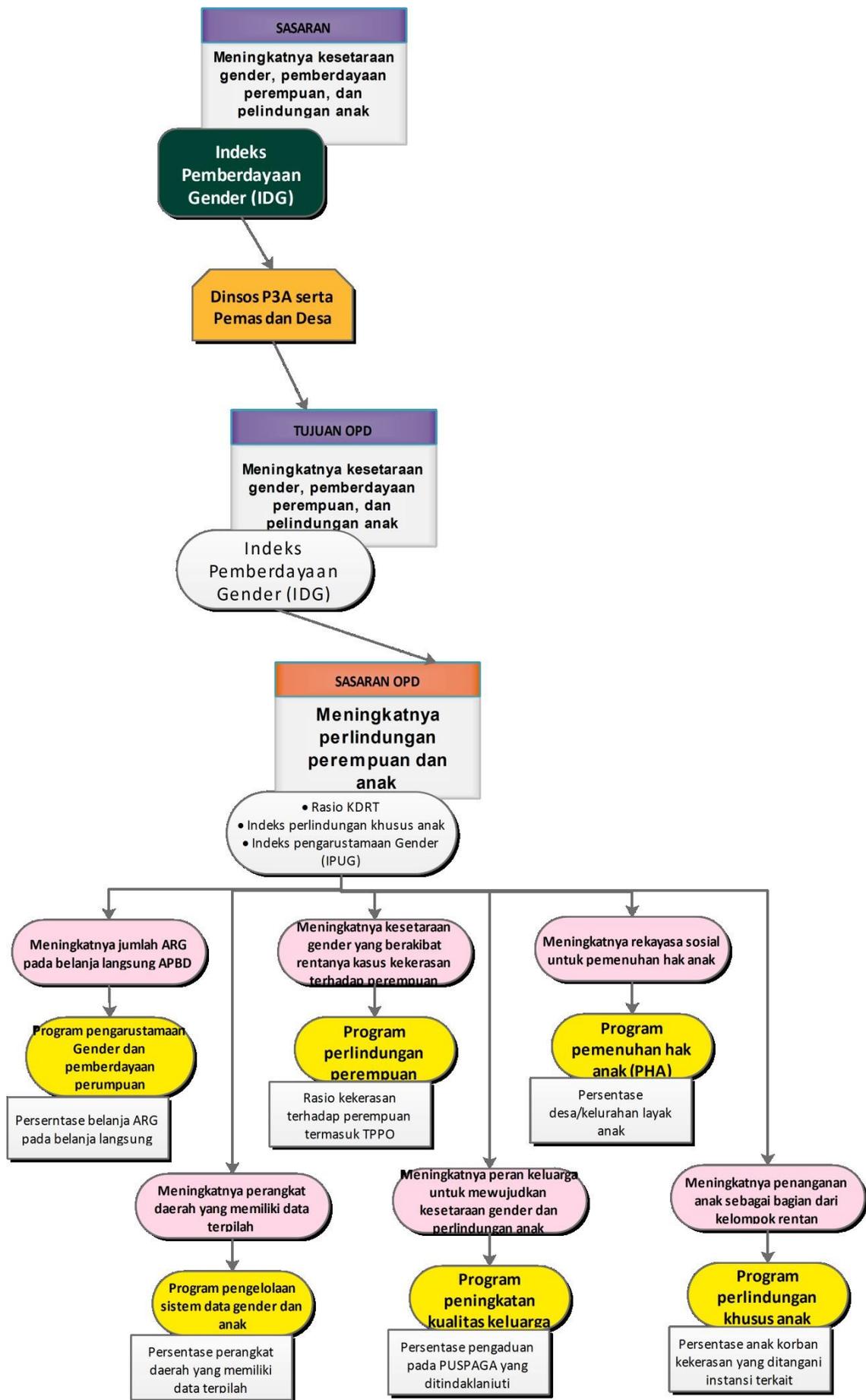
Gambar 5. 22 Misi 3 Sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Kesehatan Masyarakat

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 23 Misi 3 Sasaran Terjaminnya Ketersediaan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

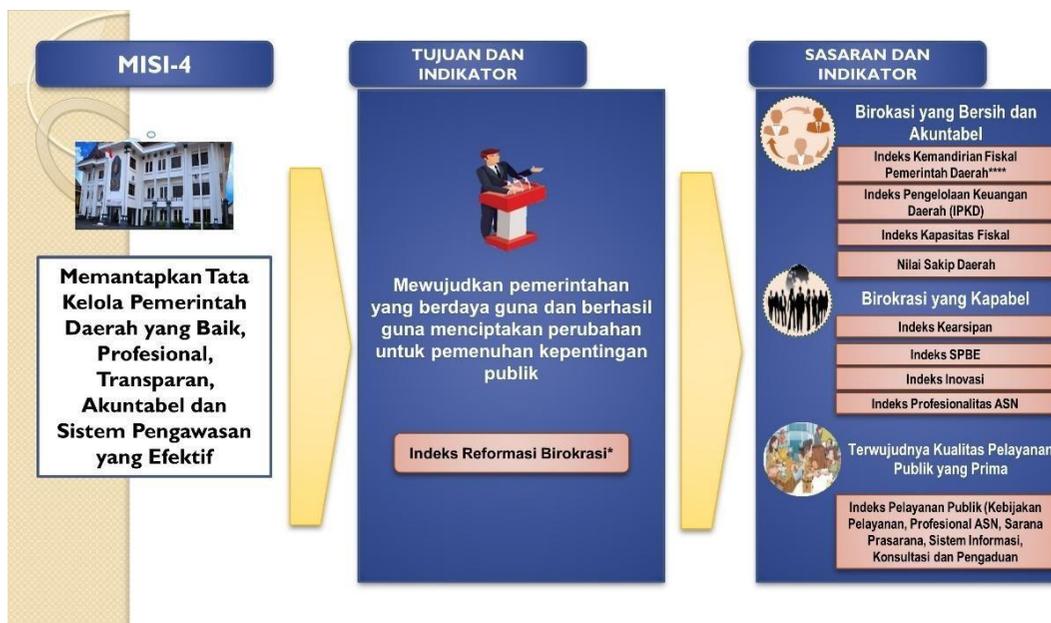


Gambar 5. 24 Misi 3 Sasaran Terjaminnya Ketersediaan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Sasaran dalam Tujuan MISI 4

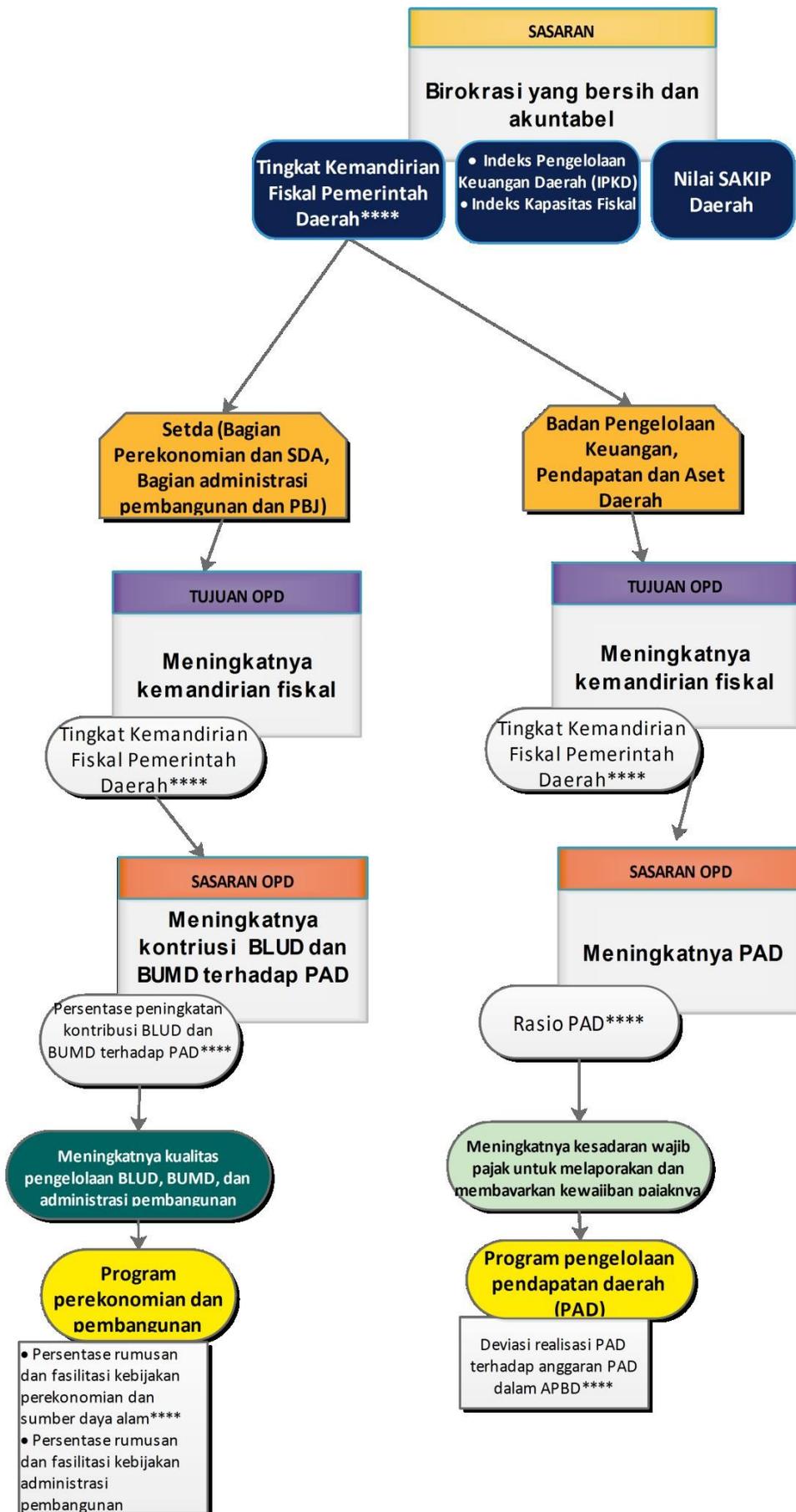
Pembangunan birokrasi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik akan dicapai dengan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut : (1) terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) terwujudnya birokrasi yang kapabel; (3) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima. Kerangka logis misi 4 hingga sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5. 25 Kerangka kerja logis pencapaian Misi 4

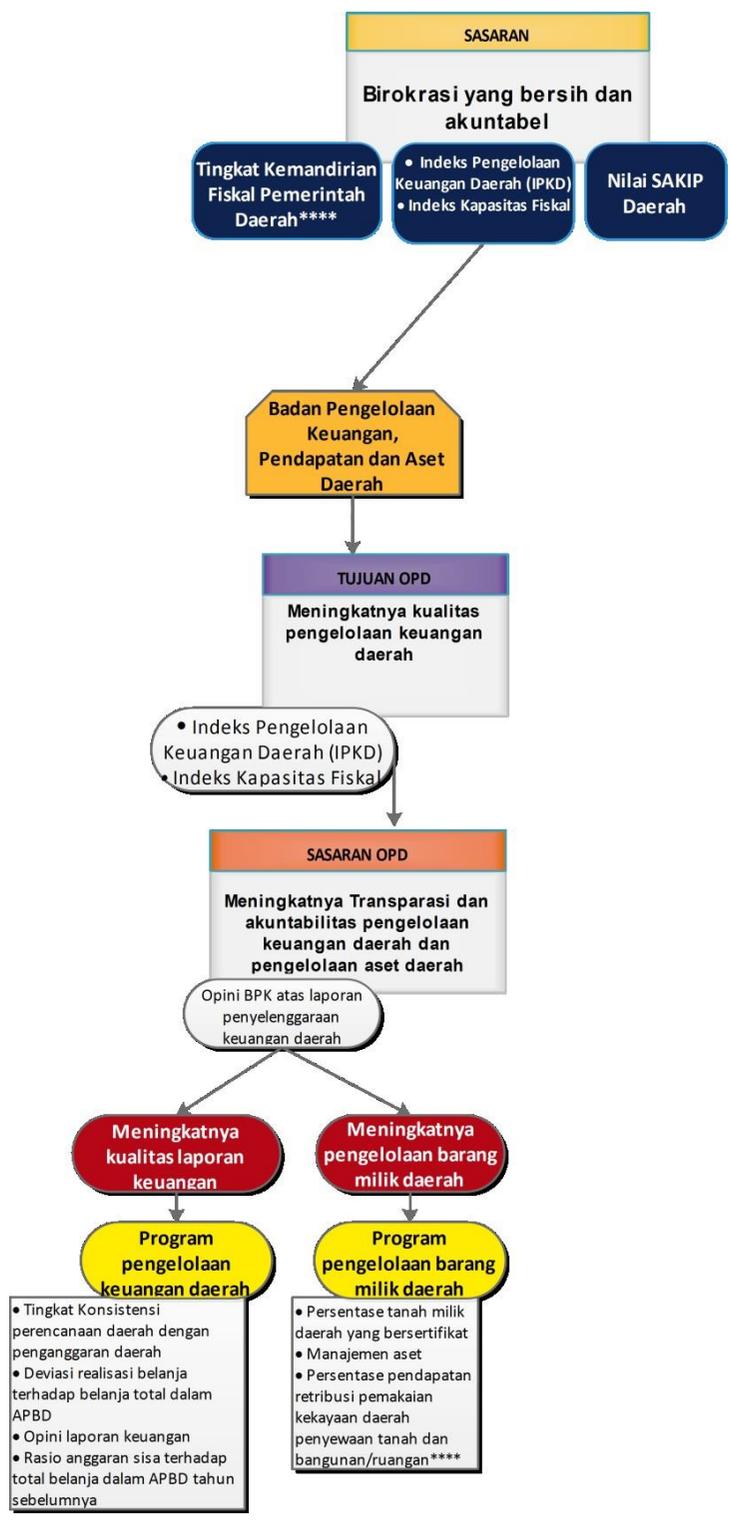
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Kerangka kerja logis pencapaian Misi 4 Kabupaten Tuban 2021-2026 tersebut memiliki kerangka intervensi penyelesaian permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam gambar Pohon Kinerja berikut:



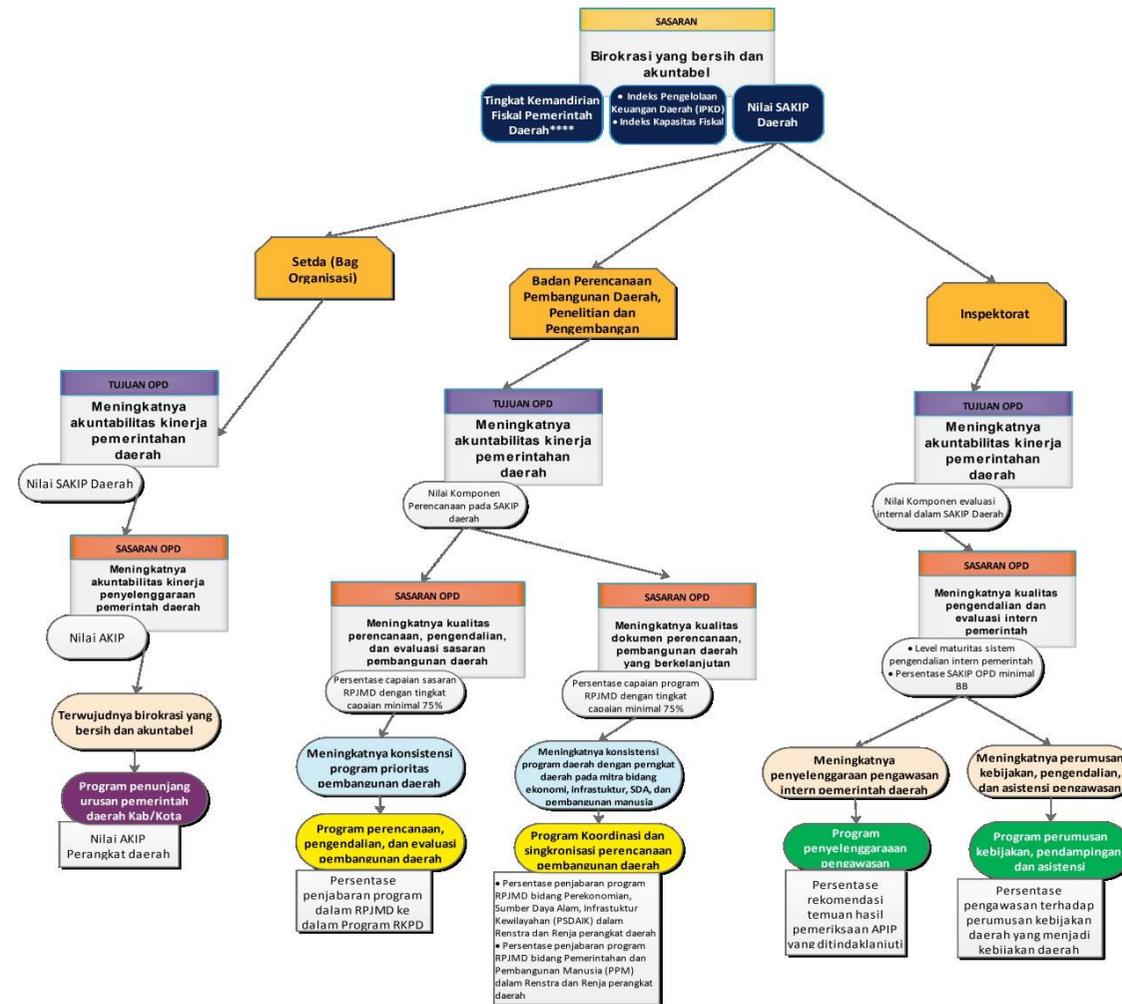
Gambar 5. 26 Misi 4 Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah****

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

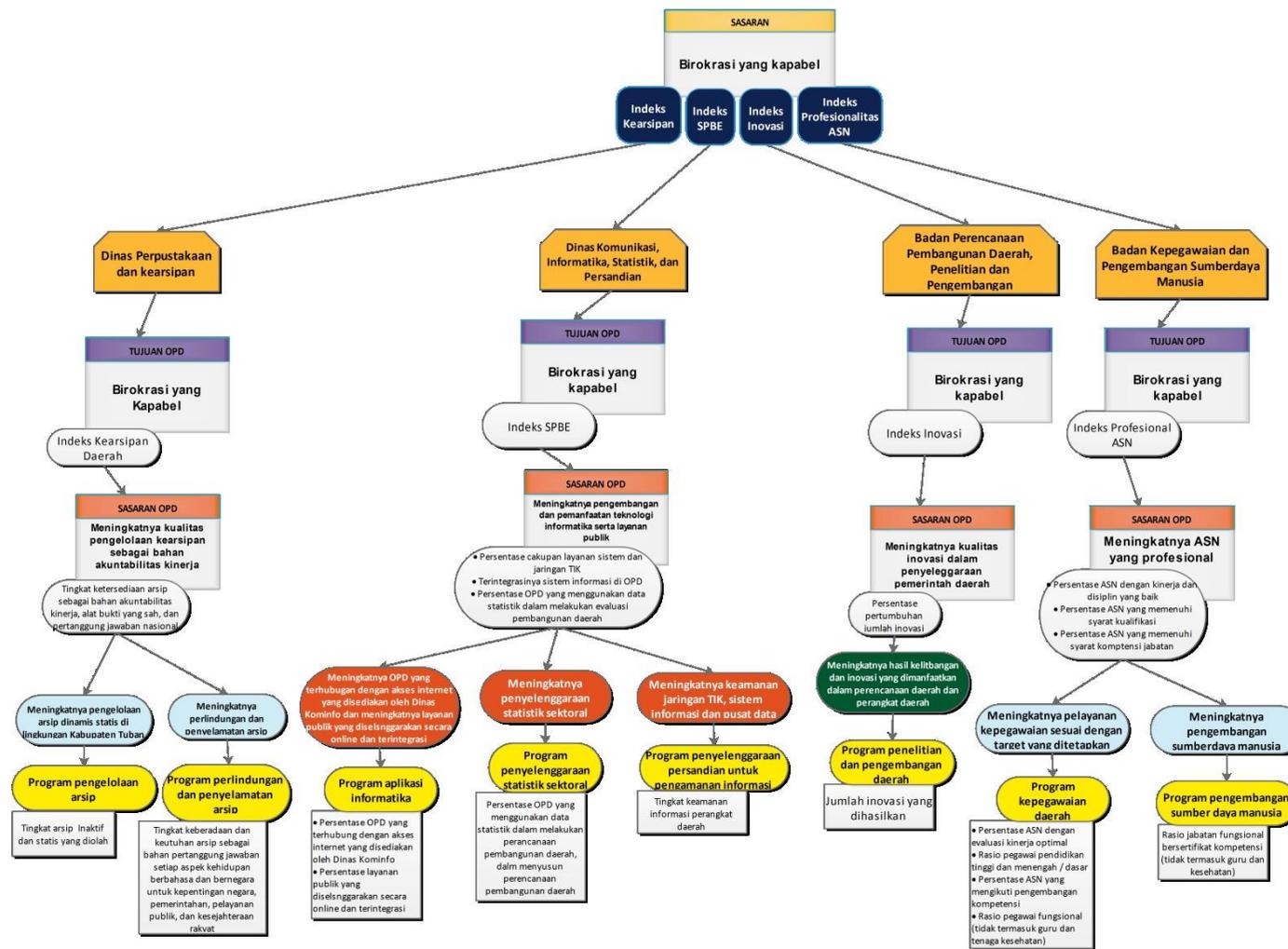


Gambar 5. 27 Misi 4 Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

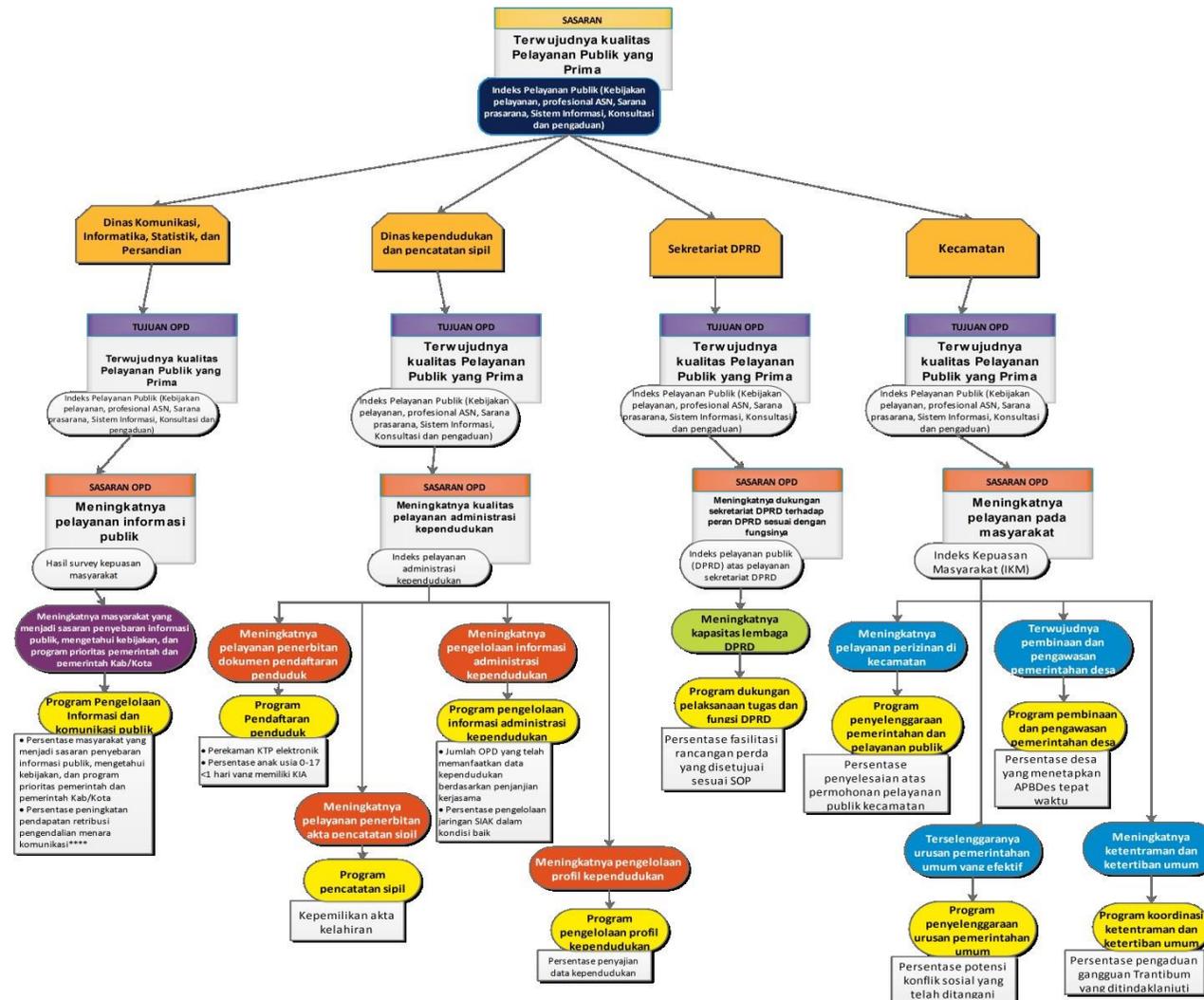
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 28 Misi 4 Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP Daerah
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 29 Misi 4 Sasaran Birokrasi yang Kapabel
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 5. 30 Misi 4 Sasaran Birokrasi yang Kapabel Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban)

Tabel 5. 5 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

| No | Visi Misi | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Tahun ke- | | | | | Kondisi Akhir (2026) |
|--|-----------|--|---|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Visi : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan | | | | | | | | | | |
| Misi 1 : Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal | | | | | | | | | | |
| Tujuan : | | | | | | | | | | |
| T1 | | Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi | Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index) | 74,14 | 74,80 | 75,13 | 75,47 | 75,80 | 76,14 | 76,14 |
| Sasaran : | | | | | | | | | | |
| T1 S1 | | Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur | Indek Kualitas Layanan Infrastruktur | 75,80 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 84,00 |
| T1S2 | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*** | 68,98 | 63,23 | 63,44 | 63,65 | 63,86 | 64,07 | 64,07 |
| Realisasi IKLH Tahun 2020 masih menggunakan metode perhitungan lama, target IKLH Tahun 2022-2026 menggunakan metode perhitungan baru sesuai SE MENLHK Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan RPJMD Berwawasan Lingkungan | | | | | | | | | | |
| T1S3 | | Berkurangnya resiko bencana | Indeks Resiko Bencana | 145,52 | 139 | 133 | 127 | 121 | 115 | 115 |
| T1S4 | | Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis | Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup | 88,00 | 89,5 | 90,26 | 91,03 | 91,81 | 92,59 | 92,59 |
| Misi 2 : “Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif” | | | | | | | | | | |
| Tujuan : | | | | | | | | | | |
| T2 | | Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, | Laju Pertumbuhan Ekonomi** | -5,58 | 4,07-4,31 | 4,32-4,42 | 4,43-4,86 | 4,87-5,01 | 5,02-5,39 | 5,02-5,39 |

| No | Visi Misi | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Tahun ke- | | | | | Kondisi Akhir (2026) |
|-----|-----------|---|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2) | Tingkat Kemiskinan** | 15,91 | 15 | 14,50 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 13,00 |
| | | | Gini Ratio** | 0,337 | 0,310-0,347 | 0,310-0,345 | 0,310-0,344 | 0,310-0,342 | 0,310-0,340 | 0,310-0,340 |
| | | | Indeks Williamson | 0,99060 | 0,951-0,980 | 0,942-0,970 | 0,938-0,960 | 0,923-0,954 | 0,912-0,947 | 0,912-0,947 |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** | 4,81 | 4,0 | 4,0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | Sasaran : | | | | | | | | |
| | T2S5 | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan | PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | -1,39 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,05 |
| | | | PDRB Sektor Industri Pengolahan | -11,44 | 3,51 | 3,82 | 4,73 | 4,91 | 5,03 | 5,03 |
| | | | PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -9,34 | 5,92 | 6,43 | 6,81 | 7,12 | 7,53 | 7,53 |
| | T2S6 | Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Tingkat Inflasi Daerah | 1,93 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| | | | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,6999 | 0,7445 | 0,7652 | 0,7859 | 0,8086 | 0,8273 | 0,8273 |
| | | | PDRB Per kapita | 52.920.000 | 55.000.000 | 56.080.000 | 57.180.000 | 58.310.000 | 59.450.000 | 59.450.000 |
| | T2S7 | Meningkatnya nilai investasi daerah | Persentase peningkatan nilai investasi | n/a | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| No | Visi Misi | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Tahun ke- | | | | | Kondisi Akhir (2026) |
|--|-----------|--|--|---------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| MISI 3 : “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih” | | | | | | | | | | |
| Tujuan : | | | | | | | | | | |
| T3 | | Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | 68,4 | 69,00 | 69,70 | 70,40 | 71,10 | 71,80 | 71,80 |
| | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 87,78 | 88,10 | 88,27 | 88,44 | 88,6 | 88,77 | 88,77 |
| Sasaran : | | | | | | | | | | |
| T3S8 | | Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat | Indeks Pendidikan | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 |
| | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | n/a | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 10,9 |
| T3S9 | | Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| T3S10 | | Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar | Indeks Ketahanan Pangan | 83,57 | 85,5 | 87,3 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| T3S11 | | Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 65,54 | 66,02 | 66,5 | 66,98 | 67,47 | 67,95 | 67,95 |
| MISI 4 : “Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif” | | | | | | | | | | |
| Tujuan : | | | | | | | | | | |
| T4 | | Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | 60,40 | 61,2 | 61,61 | 62,01 | 62,42 | 62,84 | 62,84 |
| Sasaran : | | | | | | | | | | |
| T4S12 | | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah | 0,2195 | 0,2349 | 0,2426 | 0,2503 | 0,2580 | 0,2657 | 0,2657 |

| No | Visi Misi | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2020) | Target Tahun ke- | | | | | Kondisi Akhir (2026) |
|-----|-----------|--|---|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | Daerah | | | | | | | |
| | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | n/a | 75 | 76,25 | 77,50 | 78,75 | 80 | 80 |
| | | | Indeks Kapasitas Fiskal | 1,431 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah | 69,67 | 72,29 | 74,24 | 76,28 | 78,36 | 80,15 | 80,15 |
| | T4S13 | Birokrasi yang kapabel | Indeks Kearsipan Daerah | 77,63 | 77,63 | 78 | 78,25 | 78,5 | 79 | 79 |
| | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,17 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| | | | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) | 46,42 | 60 | 62,14 | 64,36 | 66,66 | 69,04 | 69,04 |
| | | | Indeks Inovasi | 56,74 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 70 |
| | T4S14 | Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima | Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi) | 3,53 | 3,7 | 3,79 | 3,88 | 3,97 | 4,07 | 4,07 |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Keterangan :

- ** : Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024
- *** : Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan RPJMD Berwawasan Lingkungan

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Tuban. Selain itu, konstruksi rumusan substansi tujuan dan sasaran pembangunan sebagai satu kesatuan kerangka logis arsitektural pembangunan juga mutlak menjadi dasar pijakan. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan:

- 1) Sebagian besar Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan sudah terbangun dengan dukungan infrastruktur dan suprastruktur.
- 2) Tuban merupakan sedikit daerah di Jawa Timur yang telah menandatangani TP2DD
- 3) Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup
- 4) Indeks daya saing (intervensi kelembagaan) yang tinggi
- 5) Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang sebagian besar memadai.
- 6) Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadai.
- 7) Prasarana dan sarana pendidikan yang memadai.
- 8) Basis potensi ekonomi daerah yang relatif beragam dan besar
- 9) Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Tuban.
- 10) Adanya beberapa perusahaan nasional-internasional berlokasi di Kabupaten Tuban
- 11) Meningkatnya indeks pembangunan gender.
- 12) Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.

b. Kelemahan:

- 1) Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah-masalah Sosial yang masih cukup tinggi.
- 2) Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan.
- 3) Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif rendah.
- 4) APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.
- 5) Tingginya potensi dan resiko bencana
- 6) Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang masih kurang.
- 7) Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas
- 8) Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang belum mencapai 30%.
- 9) Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.
- 10) Potensi pariwisata yang tinggi belum dikelola secara maksimal
- 11) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
- 12) Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.
- 13) Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.
- 14) Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.
- 15) Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.
- 16) Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.
- 17) Masih adanya kawasan kumuh.
- 18) Masih ada daerah rawan pangan
- 19) Masih tingginya angka kemiskinan meski angka pengangguran relatif rendah di Kabupaten Tuban.
- 20) Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.
- 21) Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.
- 22) Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.
- 23) Minimnya minat baca masyarakat.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang:

- 1) Direktif Provinsi Jawa Timur yang menempatkan Tuban dalam koridor wilayah pertumbuhan
- 2) Relasi infrastruktur, lingkungan, bencana saling timbal balik
- 3) Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.
- 4) Momentum kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

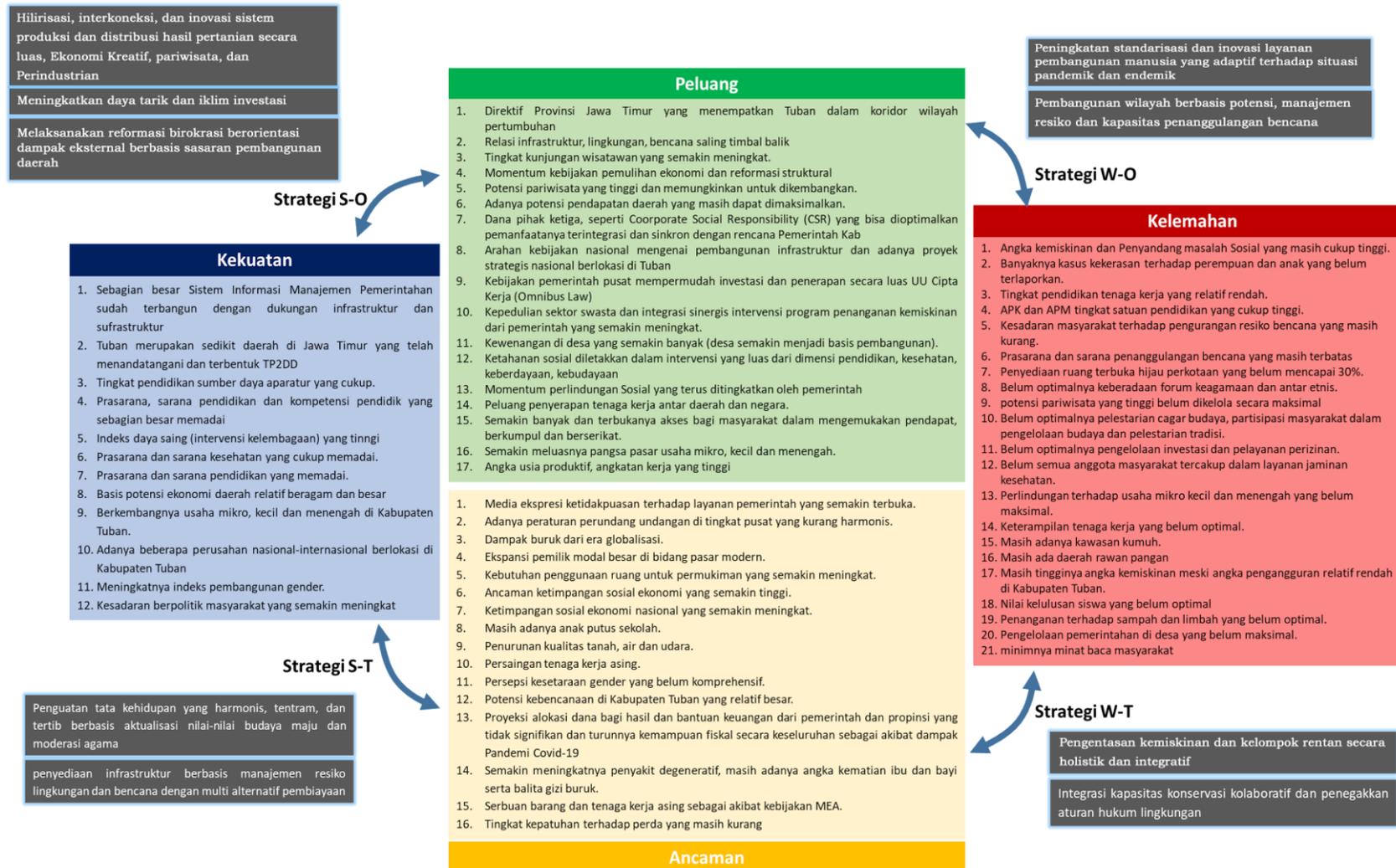
- 5) Potensi pariwisata yang tinggi dan memungkinkan untuk dikembangkan.
- 6) Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.
- 7) Dana pihak ketiga, seperti Corporate Social Responsibility CSR (CSR) yang cukup besar dan belum terintegrasi pemanfaatannya
- 8) Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur dan adanya proyek strategis nasional berlokasi di Tuban
- 9) Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi dan penerapan secara luas UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
- 10) Kepedulian sektor swasta dan integrasi sinergis intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.
- 11) Kewenangan di desa yang semakin banyak (desa semakin menjadi basis pembangunan).
- 12) Ketahanan sosial diletakkan dalam intervensi yang luas dari dimensi pendidikan, kesehatan, keberdayaan, kebudayaan
- 13) Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 14) Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
- 15) Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.
- 16) Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.
- 17) Angka usia produktif dan angkatan kerja yang tinggi.

b. Ancaman:

- 1) Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
- 2) Adanya peraturan perundang undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.
- 3) Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan budaya pendatang.
- 4) Dampak buruk dari era globalisasi.
- 5) Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.
- 6) Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.
- 7) Ancaman ketimpangan sosial ekonomi yang semakin tinggi.
- 8) Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.
- 9) Masih adanya anak putus sekolah.
- 10) Penurunan kualitas tanah, air dan udara.

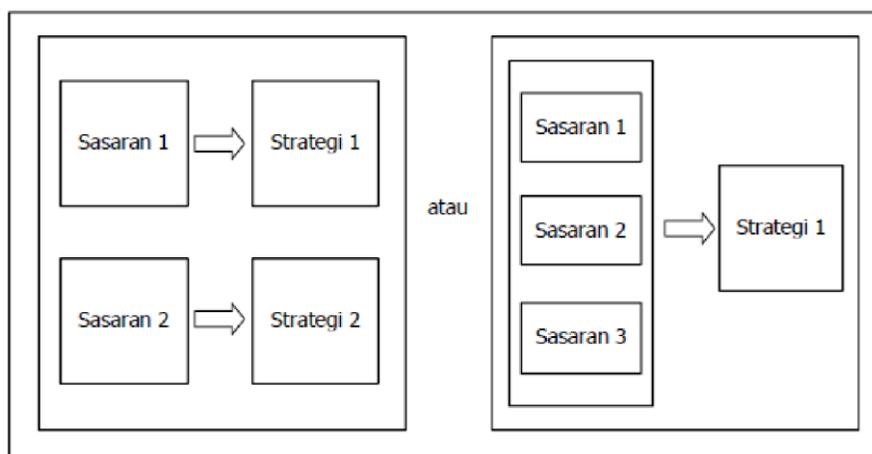
- 11) Persaingan tenaga kerja asing.
- 12) Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.
- 13) Potensi kebencanaan di Kabupaten Tuban yang relatif besar.
- 14) Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan propinsi yang tidak signifikan dan turunnya kemampuan fiskal secara keseluruhan sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19
- 15) Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.
- 16) Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.
- 17) Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi perpaduan analisis lingkungan adalah sebagai berikut:



Gambar 6.1 Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Analisis SWOT Kabupaten Tuban 2021-2026
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Strategi pembangunan yang disusun harus dapat menjawab sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan, hal tersebut guna mendukung pencapaian tujuan, serta visi dan misi Kepala Daerah.



Gambar 6.2 Skenario Perumusan Strategi

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Berikut keterkaitan strategi dan sasaran pembangunan Kabupaten Tuban:

Tabel 6.1 Keterkaitan Strategi dan Sasaran Pembangunan

| Visi: Membangun serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan | | |
|--|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| Misi 1: “Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal” | | |
| Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi (T1) | Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur | penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan (St 1) |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum lingkungan (St 2) |
| | Berkurangnya resiko bencana | Pembangunan wilayah berbasis potensi, manajemen resiko dan kapasitas penanggulangan bencana (St 3) |
| | Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis | Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju |

| | | |
|--|---|---|
| | | dan moderasi agama (St4) |
| Misi 2: “Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif” | | |
| Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2) | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan | Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian secara luas, Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian (St 5) |
| | Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM, dan Bumdes | Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan (St 7) |
| | Meningkatnya nilai investasi daerah | Meningkatkan daya tarik dan iklim investasi (St 6) |
| Misi 3: “Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih” | | |
| “Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender” (T3) | Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat | Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik (St 8) |
| | Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat | |
| | Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar | |
| | Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| Misi 4: “Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif” | | |
| “Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik (T4)” | terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Melaksanakan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal berbasis sasaran pembangunan daerah (St 9) |
| | terwujudnya birokrasi yang kapabel | |
| | meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima | |
| | meningkatnya sistem pengawasan yang efektif | |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam RPJMD Kabupaten Tuban terdapat 17 Sasaran Pembangunan dengan 9 Strategi pembangunan. Selain itu strategi pembangunan yang disusun memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. berikut penyandingan masalah dan strategi yang sudah dirumuskan:

Tabel 6.2 Penyandingan masalah dan strategi

| NO | MASALAH | STRATEGI |
|----|--|---|
| 1 | Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu ditingkatkan | Penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan (St 1) |
| 2 | Cakupan, pemerataan, kualitas fungsi Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang perlu ditingkatkan | |
| 3 | Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan layanan Perhubungan yang belum sepenuhnya terpenuhi | |
| 4 | Pengendalian, Pemeliharaan, pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup belum optimal | Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum atas dampak lingkungan (St 2) |
| 5 | Potensi kebencanaan Kabupaten Tuban yang relatif tinggi | Pembangunan wilayah berbasis potensi dan manajemen resiko lingkungan dan bencana (St 3) |
| 6 | Ancaman Ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat yang semakin tinggi seiring kompleksitas kehidupan | Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi beragama (St 4) |
| 7 | Masih tingginya potensi konflik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat | |
| 8 | Masih minimnya peran Koperasi dalam menumbuhkan Wirausaha, UMKM dan IKM | Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian (secara luas), Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian (St 5) |
| 9 | Belum semua sektor memiliki nilai tambah dan keunggulan daya saing yang kuat (Daya saing ekonomi) | |
| 10 | Rendahnya pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah | |
| 11 | Ancaman keberlanjutan peningkatan produktifitas sektor Kelautan dan Perikanan | |
| 12 | Pengembangan pariwisata dengan ekonomi kreatif belum terintegrasi | |
| 13 | Adanya potensi ancaman keberlanjutan produktivitas pertanian | |
| 14 | Masih rendahnya peningkatan nilai tambah pada komoditas pertanian | |
| 15 | Rendahnya manajemen pemeliharaan ternak | |
| 16 | Nilai perdagangan yang belum akseleratif | |
| 17 | Industri menengah-kecil tumbuh belum | |

| NO | MASALAH | STRATEGI |
|----|--|--|
| | maksimal | |
| 18 | Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dan Desa | |
| 19 | Belum tercipta <i>link and match</i> pendidikan dan pasar kerja | Meningkatkan daya tarik dan kualitas struktur investasi (St 6) |
| 20 | Belum optimalnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya | |
| 21 | Iklim investasi belum mampu memberikan daya tarik investor | |
| 22 | Pemerintah belum mampu menjamin ketersediaan dan kontinuitas bahan baku kepada investor dibidang pertanian dan perikanan | |
| 23 | Kemiskinan masih ditangani secara parsial dengan pendekatan sosial, belum dioptimalkan dengan pengarusutamaan kolaboratif dengan pendekatan ekonomi. | Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan (St 7) |
| 24 | Masih belum optimalnya peran pengarusutamaan gender. | |
| 25 | Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola pangan harapan | |
| 26 | Masih terdapat daerah rawan pangan. | |
| 27 | Rendahnya minat masyarakat terhadap transmigrasi | |
| 28 | Layanan Pendidikan yang berkualitas sesuai standar belum merata* | Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik (St 8) |
| 29 | Literasi siswa masih rendah* | |
| 30 | Angka putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah tinggi | |
| 31 | Rendahnya rata-rata lama sekolah | |
| 32 | Kualitas dan akses layanan kesehatan belum merata. | |
| 33 | Kasus kematian ibu & bayi serta angka stunting yang masih relatif tinggi. | |
| 34 | Kurangnya inklusivitas pelayanan yang ramah dan berwawasan difabelitas | |
| 35 | Minat baca masyarakat masih rendah | |
| 36 | Peran Kepemudaan dan Olah raga dalam memajukan daerah belum optimal | |
| 37 | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesejahteraan keluarga. | |
| 38 | Masih terdapat angka pernikahan dini. | |
| 39 | Aset daerah belum seluruhnya tersertifikat | Pelaksanaan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal, berbasis sasaran pembangunan daerah (St 9) |
| 40 | Fungsi dan kegiatan Komunikasi dan Informatika masih belum massif membangun citra kinerja pemerintah | |
| 41 | Masih terdapat tumpang tindih data statistik sektoral menyebabkan data tidak valid | |
| 42 | Pengelolaan persandian masih belum optimal | |
| 43 | Pengelolaan kearsipan belum | |

| NO | MASALAH | STRATEGI |
|---|--|----------|
| | sepenuhnya tertib | |
| 44 | Belum optimalnya kapasitas Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan rancangan kebijakan daerah | |
| 45 | Belum optimalnya pelayanan Sekretariat Daerah untuk menunjang fungsi-fungsi kinerja DPRD | |
| 46 | Belum optimalnya kinerja Perencanaan daerah | |
| 47 | Belum optimalnya kinerja pengelolaan Keuangan dan aset daerah | |
| 48 | Belum optimalnya pengembangan pola karir dan peningkatan kesejahteraan ASN | |
| 49 | Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN | |
| 50 | Belum optimalnya kinerja Penelitian dan Pengembangan daerah | |
| 51 | Belum optimalnya pengawasan yang berorientasi pada pembinaan internal daerah | |
| 52 | Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil | |
| 53 | Kapasitas pelayanan belum terstandarisasi | |
| Keterangan : * = Rekomendasi KLHS RPJMD | | |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penyusunan dokumen RPJPD arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang di bagi kedalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya penyinerjian antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program

pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan. Berdasarkan strategi yang sudah disusun diatas, berikut arah kebijakan untuk masing-masing sasaran dan strategi:

Tabel 6.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

| No | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur | penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan (ST 1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar pemukiman layak huni 2. Penyediaan infrastruktur daya dukung perekonomian 3. Pembangunan Infrastruktur pencegah dan perlindungan terhadap bencana 4. Pembangunan Infrastruktur Akses keterhubungan desa dan kota antar wilayah |
| 2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum lingkungan (St 2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi dan kapasitas konservasi untuk pemulihan lingkungan 2. Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penegakkan hukum lingkungan |
| 3 | Berkurangnya resiko bencana | Pembangunan wilayah berbasis potensi, manajemen resiko dan kapasitas penanggulangan bencana (St 3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas mitigasi bencana 2. Perencanaan dan pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan 3. Pengendalian, penertiban, dan penegakkan hukum lingkungan |
| 4 | Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis | Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi agama (ST 4) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemajuan dan aktualisasi nilai-nilai budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 2. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum |
| 5 | Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan | Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian secara luas, Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian (St 5) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hulu hilir pelaku ekonomi primer dan penguatan faktor produksi 2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan 3. Reformasi tata kelola usaha ekonomi untuk Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan mencakup Peningkatan jaringan kerjasama usaha ekonomi unggulan, |

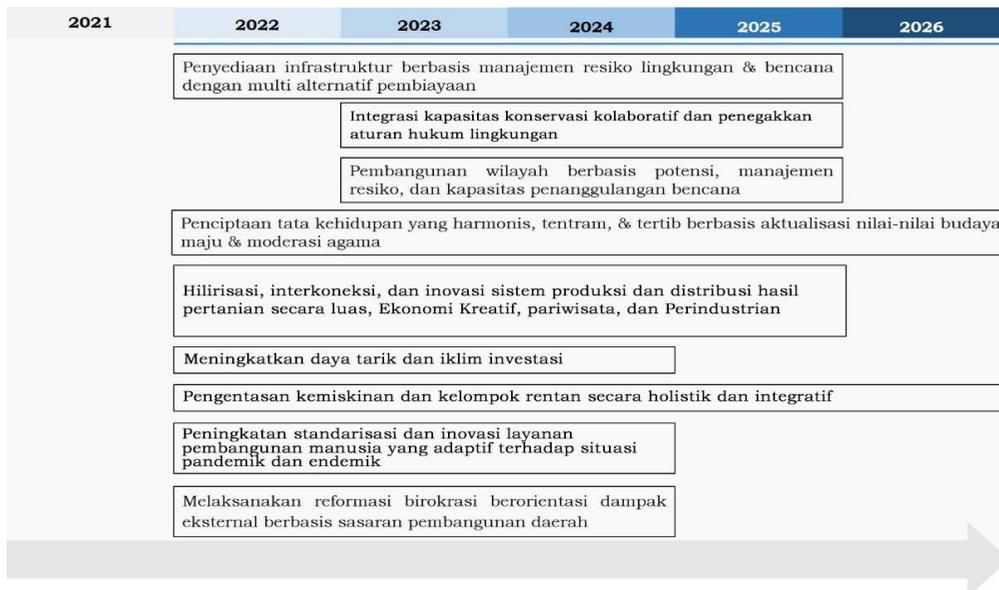
| No | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|--|--|
| | | | <p>Penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi modern</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata 5. Pembangunan sarana prasarana pertanian (secara luas) |
| 6 | Meningkatnya Nilai Investasi daerah | Meningkatkan daya tarik dan iklim investasi (St 6) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Potensi (sektoral) dan kebutuhan Investasi 2. Promosi dan penciptaan iklim investasi 3. Peningkatan layanan investasi |
| 7 | Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM, dan Bumdes | Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan (St 7) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Relasi sinergis pertumbuhan wilayah ekonomi dan Pemerataan pusat aktivitas perekonomian 2. Kerjasama ekonomi antar Kecamatan dan Penguatan ekonomi berbasis kawasan perdesaan 3. Penyediaan kredit dan stimulus usaha 4. Peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja 5. Penciptaan lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja 6. Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penguatan faktor produksi 7. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDES 8. perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberian subsidi, dan perlindungan upah (Pengurangan beban pengeluaran kelompok rentan dan miskin) |
| 8 | Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat | Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik (St 8) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan Lama dan Lanjut sekolah dalam penyelenggaraan wajib belajar 3. Pengembangan inovasi sistem pembelajaran yang efektif berbasis peserta didik masa pandemik |
| 9 | Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemenuhan standarisasi kuantitas dan kualitas sistem layanan kesehatan 2. Adaptasi dan pemantapan protokol kesehatan di masa dan pasca pandemik covid 19 3. Penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting |
| 10 | Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pola pangan harapan 2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat 3. Pengurangan kerawanan pangan 4. Peningkatan Cadangan pangan |

| No | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|---|
| 11 | Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | 1. Penguatan pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan 2. Peningkatan Perlindungan anak |
| 12 | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Melaksanakan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal berbasis sasaran pembangunan daerah (St 9) | Penguatan akuntabilitas tata kelola sistem dan proses bisnis pemerintahan |
| 13 | Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | | 1. Penataan desain dan struktur organisasi untuk pengembangan kapabilitas kelembagaan 2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas ASN |
| 14 | meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima | | Penguatan inovasi layanan publik |
| 15 | meningkatnya sistem pengawasan yang efektif | | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Daerah |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Setiap arah kebijakan diatas tidak semua berjalan secara bersamaan, namun setiap tahun mempunyai arah kebijakan masing-masing. Arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu untuk menggaransi pencapaian arah kebijakan secara logis menyangkut kapan suatu arah kebijakan dijalankan dalam relasinya dengan arah kebijakan lainnya, mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Hal terpenting adalah keseluruhan arah kebijakan harus menjadi fokus yang menentukan arah dari pembangunan itu sendiri dari secara periodik dan berkesinambungan. Arah kebijakan pada dasarnya melekat pada masing-masing strategi, sehingga secara tidak langsung perumusan horizon waktu juga dapat dilakukan berdasarkan perspektif tahapan strategi.

Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penetapan prioritas pada tahun tertentu bukan berarti urusan lain yang tidak menjadi prioritas tidak dikerjakan. Muatan prioritas ini paling tidak tercermin dalam afirmasi alokasi anggaran, dan banyak atau sedikitnya kegiatan yang juga harus dibedakan berdasarkan pertimbangan mandatori urusannya. Adapun tahapan strategi pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 6.3 Tahapan Strategi Pembangunan Tahun 2022-2026

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

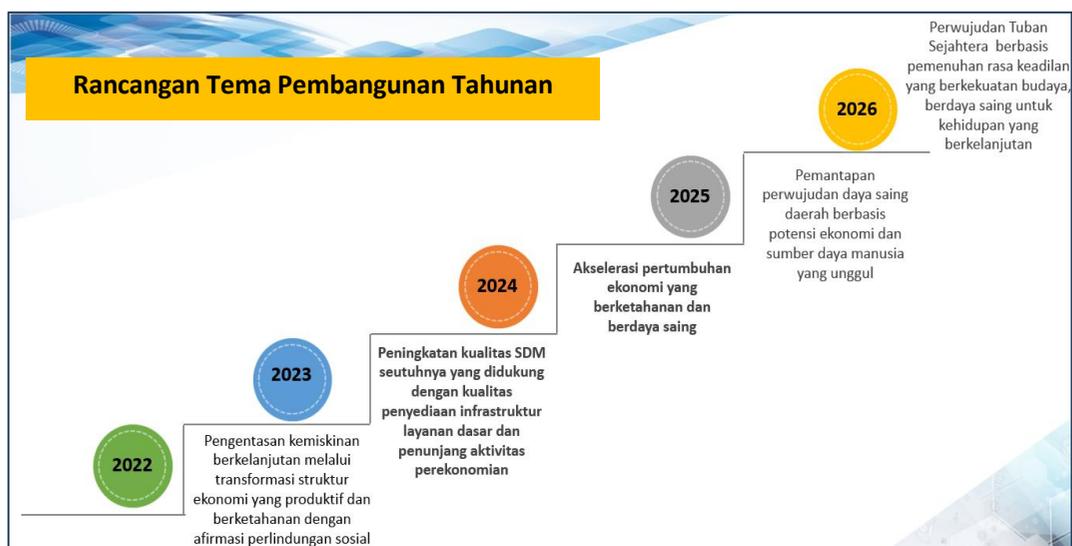
Sedangkan apabila didetailkan berdasarkan perspektif dan pemetaan rumusan arah kebijakan, maka tahapan pembangunan Kabupaten Tuban di setiap tahunnya akan terlihat sebagai berikut :



Gambar 6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022-2026

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan diatas untuk menggambarkan arah pembangunan setiap tahunnya diarahkan pada rancangan tema tahunan sebagaimana berikut :



Gambar 6.5 Rancangan Tema Pembangunan Tahunan
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

6.3 Program Pembangunan Berbasis Platform dan Janji Politik

Sesuai dengan definisi normatif RPJMD sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah disampaikan dan dikampanyekan secara legal formal, maka program-program pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD juga harus memuat dan mengakomodir *political statement* yang telah dijanjikan. Berikut identifikasi dan teknokratisasi program dan kegiatan yang menjadi platform janji politik dan interelasinya secara nomenklatur sesuai permendagri 90 tahun 2019 maupun Kepemendagri 050 Tahun 2020.

Tabel 6.4 Penandingan Program Kerja Kampanye dengan Program Menurut Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

| No | Program Kerja Kampanye | Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 | Perangkat Daerah |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Membangun infrastruktur yang partisipatif: pemulihan jalan, pemulihan penerangan jalan, revitalisasi irigasi pertanian, revitalisasi sarana prasarana perikanan, sarana prasarana Kesehatan, sarana prasarana pendidikan | Program penyelenggaraan jalan | Dinas PUPR PRKP |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas PUPR PRKP |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Pengolaan Perikanan Tangkap | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Pengolaan Perikanan Budidaya | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Pengolahan dan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |

| No | Program Kerja Kampanye | Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 | Perangkat Daerah |
|----|---|---|---|
| | | Pemasaran Hasil Perikanan | |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 2 | Membangun serta memantapkan sumberdaya manusia berkualitas berbasis nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal, penguatan kesenian tradisional, tradisi, adat dan budaya lokal, penguatan pendidikan karakter | Program Pengembangan Kurikulum | Dinas Pendidikan |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| 3 | Membangun serta memantapkan peran serta masyarakat, pemerintahan desa, BUMDesa dan dunia usaha:menumbuhkembangkan satu desa satu unggulan, kerjasama desa, dukungan penguatan Tuban koridor maritime logistik, penguatan ketahanan pangan | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| | | Program Penggunaan dan Pemasarana Produk Dalam Negeri | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| | | Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 4 | Membangun ekonomi kerakyatan serta memantapkan nilai tambah melalui penguatan: UMKM, koperasi, BUMDesa, peran serta dunia usaha dalam kemitraan dan kewirausahaan masyarakat; produktivitas, olah dan kemas penganekaragaman usaha pertanian, perikanan darat dan laut, peternakan; produktivitas, olah dan kemas penganekaragaman usaha wisata, seni dan budaya tradisioanl, kerajinan, kuliner; pengembangan wisata berbasis lingkungan | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| | | Program Pengembangan UMKM | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| | | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| | | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kesenian | Dinas Kebudayaan, |

| No | Program Kerja Kampanye | Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 | Perangkat Daerah |
|----|---|---|---|
| | | Tradisional | Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 5 | Membangun Pendidikan yang Partisipatif dengan memperluas jangkauan: bantuan siswa kurang mampu, bantuan biaya sekolah dan tunjangan kinerja guru tidak tetap dan guru ngaji, penguatan Bantuan Operasional Madrasah Diniyah, penguatan insentif pengembangan Pondok Pesantren dalam menumbuhkembangkan partisipasi sekolah; Muatan Lokal; Pelatihan oleh dan berbasis Dunia Usaha; Dukungan Pengelolaan SMU dan SMK Jurusan Prioritas (Kelautan, Teknologi Pertanian, Pariwisata) | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | | Program Pengembangan Kurikulum | Dinas Pendidikan |
| | | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 6 | Membangun, memulihkan serta memantapkan Lingkungan yang Partisipatif: Perencanaan Pembangunan yang berwawasan serta selaras dengan Lingkungan Alam serta Sosial; Konservasi serta dukungan Rehabilitasi Lahan, Lingkungan, Kawasan Pantai, Hutan dan Pertambangan; Konservasi Sumber Air; Ruang Terbuka Hijau dan Menumbuhkembangkan Biopori, Dukungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Dinas LH dan Perhubungan |
| | | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas LH dan Perhubungan |
| | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Dinas LH dan Perhubungan |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas LH dan Perhubungan |
| 7 | Membangun Kesehatan melalui Penguatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lansia, Kesehatan Masyarakat, Gizi Masyarakat, Akses-Fasilitas-Pelayanan Kesehatan yang meluas, Perbaikan Sanitasi Lingkungan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Dinas PUPR PRKP |

| No | Program Kerja Kampanye | Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 | Perangkat Daerah |
|----|--|--|---|
| | dan Air Bersih | Penyediaan Air Minum | |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas PUPR PRKP |
| 8 | Membangun serta menumbuhkembangkan Pemuda Wirausaha, Sarana Keolahragaan, Kesenian, Kebudayaan, Kerajinan, Kewirausahaan | Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 9 | Membangun Pemerintahan: memantapkan budaya Birokrasi yang Melayani Pelayanan Berbasis IT, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pengawasan yang efektif dan transparan, Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa-Kota | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat |
| | | Program Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Tabel 6.5 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

| NO | Program Kepmendagri 050 | Perangkat Daerah |
|-----|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Dinas Pendidikan |
| 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan |
| 4 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan | Dinas Kesehatan, Pengendalian |

| NO | Program Kepmendagri 050 | Perangkat Daerah |
|------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penduduk dan KB |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB |
| 6 | Program penyelenggaraan jalan | Dinas PUPR PRKP |
| 7 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas PUPR PRKP |
| 8 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas PUPR PRKP |
| 9 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas PUPR PRKP |
| 10 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 11 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 12 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 13 | Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 14 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 15 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 16 | Program Pengolaan Perikanan Tangkap | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 17 | Program Pengolaan Perikanan Budidaya | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 18 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 19 | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 20 | Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 21 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 22 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 23 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas KP, Pertanian dan Perikanan |
| 24 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 25 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 26 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 27 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 28 | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |

| NO | Program Kepmendagri 050 | Perangkat Daerah |
|------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 29 | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 30 | Program Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 31 | Program Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 32 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| 33 | Program Penggunaan dan Pemasarana Produk Dalam Negeri | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| 34 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| 35 | Program Pengembangan UMKM | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| 36 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan |
| 37 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 38 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 39 | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 40 | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 41 | Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 42 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 43 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 44 | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 45 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 46 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| 47 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 48 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 49 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| 50 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Tabel 6.6 Program Pembangunan Kewilayahan

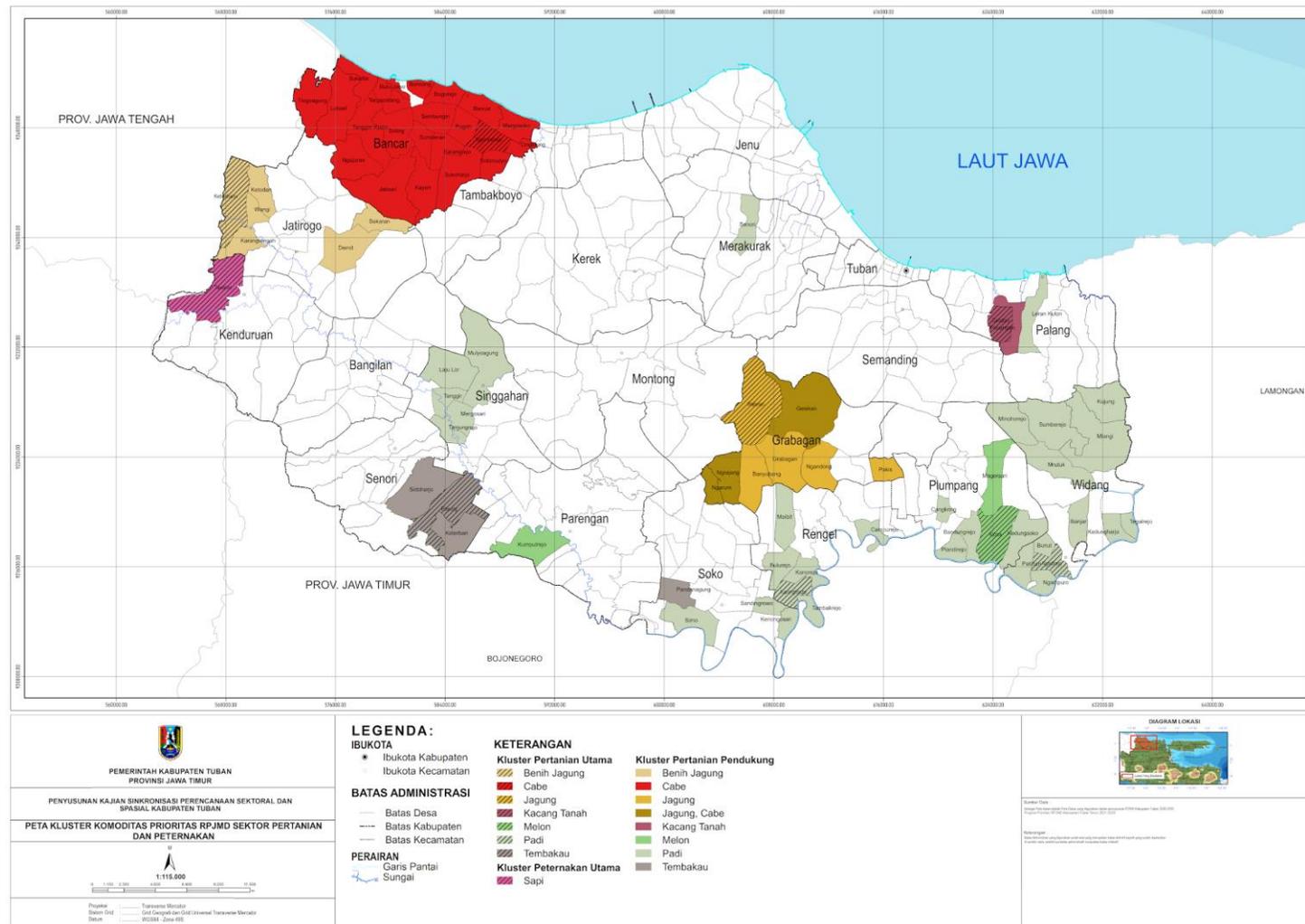
| Sektor | Kluster Komoditas | Lokasi Utama | Lokasi Pendukung | Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah |
|------------------|---------------------|---|--|---|
| Pertanian | Padi | 1. Desa Ngadirejo Kecamatan Widang 2. Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel | Kecamatan Plumpang: 1. Desa Kedungsoko, 2. Desa Cangkring, 3. Desa Plandirejo 4. Desa Bandungrejo Kecamatan Widang: 1. Desa Mlangi, 2. Desa Patihan, 3. Desa Bunut, 4. Desa Ngadipuro, 5. Desa Banjar, 6. Desa Kedungharjo, 7. Desa Tegalrejo, 8. Desa Sumberejo, 9. Desa Mrutuk, 10. Desa Minohorejo 11. Desa Kujung Kecamatan Rengel: 1. Desa Bulurejo, 2. Desa Tambakrejo, 3. Desa Kanorejo, dan 4. Desa Campurejo Kecamatan Merakurak: 1. Desa Senori Kecamatan Singgahan: 1. Desa Mulyoagung, 2. Desa Laju Lor, 3. Desa Mergosari, 4. Desa Tanggir, dan 5. Desa Tanjungrejo Kecamatan Soko: 1. Desa Kenongosari, 2. Desa Sokosari, dan 3. Desa Sandingrowo Kecamatan Palang: 1. Desa Leran Kulon | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan: 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Perizinan Usaha Pertanian 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan: 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Pengembangan Ekspor 3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
| | Jagung | Desa Waleran Kecamatan Grabagan | Kecamatan Grabagan: 1. Desa Grabagan, 2. Desa Pakis, 3. Desa Gesikan, 4. Desa Ngarum, 5. Desa Ngandong, 6. Desa Banyubang, 7. Desa Ngrejeng | 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Program Pengembangan |
| | Benih Jagung | Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo | Kecamatan Jatirogo: 1. Desa Wangi, 2. Desa Demit, 3. Desa Ketodan, 4. Desa Karang Tengah, 5. Desa Sekaran | |

| Sektor | Kluster Komoditas | Lokasi Utama | Lokasi Pendukung | Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah |
|------------------|---------------------|--|---|---|
| | Kacang Tanah | Desa Cendoro Kecamatan Palang | Desa Pucangan Kecamatan Palang | UMKM 6. Program Pemberdayaan UMKM |
| | Cabe | Desa Ngampelrejo Kec. Bancar | Kecamatan Bancar: 1. Desa Margosuko, 2. Desa Sidomulyo, 3. Desa Jatisari, 4. Desa Sukoharjo, 5. Desa Kayen, 6. Desa Bancar, 7. Desa Cingklung, 8. Desa Pugoh, 9. Desa Karangrejo, 10. Desa Siding, 11. Desa Ngujuran, 12. Desa Tenggerkulon, 13. Desa Tlogoagung, 14. Desa Latsari, 15. Desa Sukolilo, 16. Desa Bulujowo, 17. Desa Banjarjo, 18. Desa Tergambang, 19. Desa Bogorejo, 20. Desa Boncong, 21. Desa Sembungin, dan 22. Desa Sumberan Kecamatan Grabagan: 23. Desa Ngarum, 24. Desa Ngrejeng, 25. Desa Gesikan | Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |
| | Melon | Desa Klotok Kecamatan Plumpang | 1. Desa Magersari Kecamatan Plumpang 2. Desa Kumpulrejo Kecamatan Parengan | |
| | Tembakau | Desa Rayung Kecamatan Senori | Kecamatan Senori: 1. Desa Sidoharjo, dan 2. Desa Katerban Kecamatan Soko: 3. Desa Pandanagung | |
| | Sapi | Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata: 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Perikanan | Ikan Laut | Desa Bulu Meduro Kecamatan Bancar | Kecamatan Bancar: 1. Desa Bulujowo, 2. Desa Boncong, 3. Desa Bancar, dan 4. Desa Banjarjo | |
| | Rajungan | Desa Kradenan Kecamatan Palang (Kampung Rajungan) | Kecamatan Palang: 1. Kelurahan Panyuran, 2. Desa Tasikmadu, 3. Desa Gesikharjo, 4. Desa Karangagung, dan 5. Desa Glodog | |

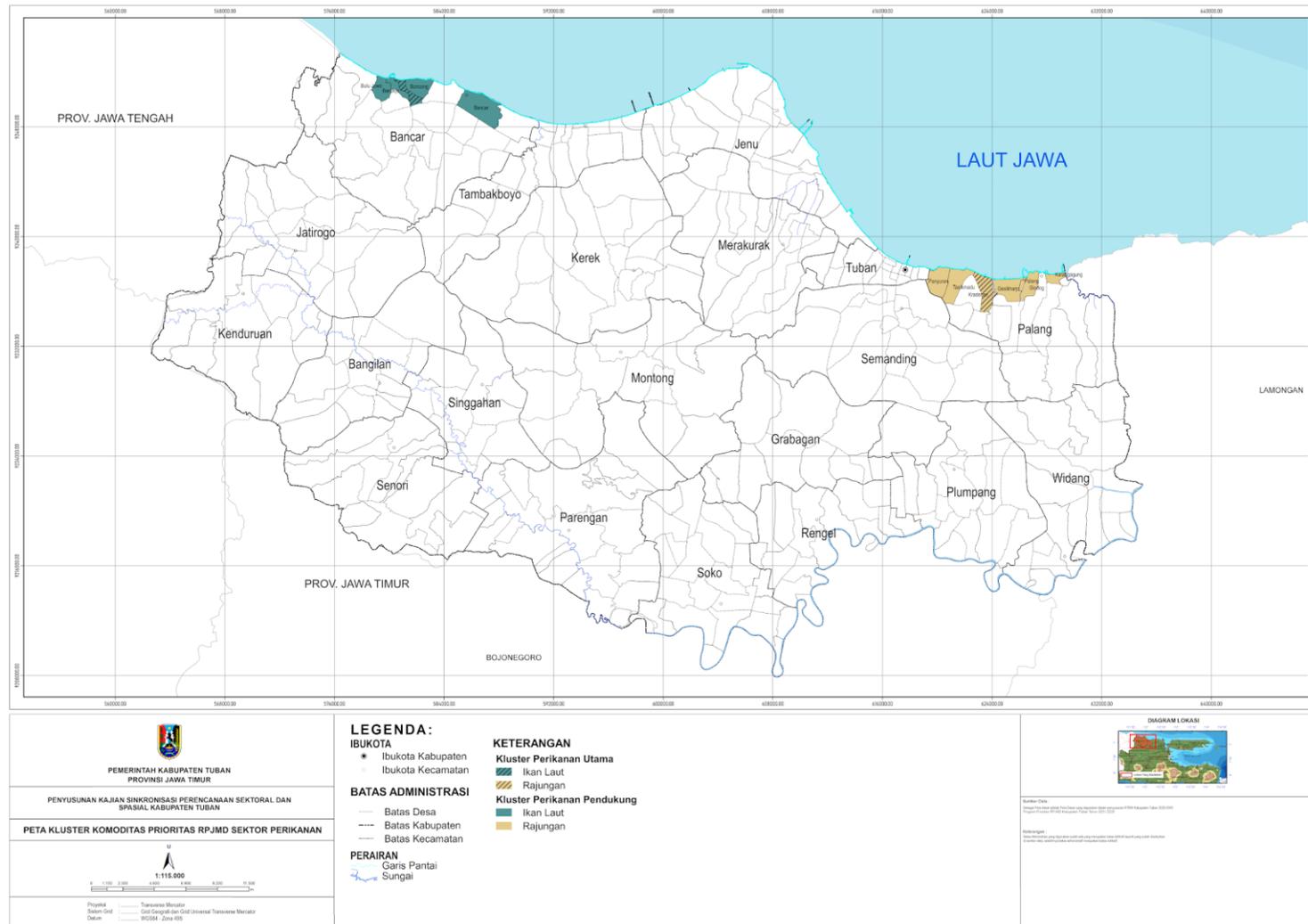
| Sektor | Kluster Komoditas | Lokasi Utama | Lokasi Pendukung | Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah | | |
|-----------------------|--|---|---|--|---|--|
| Sentra Industri (IKM) | Olahan Ikan Laut (Krupuk Ikan, Terasi, Ikan Asin, dll) | Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo | Kecamatan Tambakboyo: 1. Desa Glondonggede (TPI) dan 2. Desa Gadon Kecamatan Jenu: 1. Desa Mentoso | 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6. Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian: 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja Kecamatan: 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | |
| | | | Kecamatan Kerek (penghasil tanaman kapas, pewarna alam, sentra kerajinan batik): 1. Desa Margomulyo, 2. Desa Kedungrejo, 3. Desa Gaji, 4. Desa Padasan, 5. Desa Jarorejo Kecamatan Kerek (sebagai titik kedatangan): 1. Desa Sumberarum Kecamatan Merakurak: 1. Desa Sugihan | | | |
| Pariwisata | Wisata Minat Khusus | Batik Gedog (Kampung Batik) - Desa Margorejo Kecamatan Kerek | Kecamatan Kerek (penghasil tanaman kapas, pewarna alam, sentra kerajinan batik): 1. Desa Margomulyo, 2. Desa Kedungrejo, 3. Desa Gaji, 4. Desa Padasan, 5. Desa Jarorejo Kecamatan Kerek (sebagai titik kedatangan): 1. Desa Sumberarum Kecamatan Merakurak: 1. Desa Sugihan | 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6. Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian: 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja Kecamatan: 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | |
| | | | Wisata Alam | | Air Terjun Nglirip - Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan | 1. Desa Tingkis Kecamatan Singgahan (Batu Van Tuban) 2. Desa Guwo Terus Kecamatan Montong (Mata Air Krawak) 3. Desa Kedung Jambe Kecamatan Singgahan (Sumber Air Panas) |
| | | | | | Pantai Boom – Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban | 1. Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu (Wisata Kambang Putih) 2. Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu (Wisata Pantai Cemara) |
| | | Pantai Kelapa – Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang | Kecamatan Palang (Petik Belimbing): 1. Desa Tasikmadu Kecamatan Palang (Kebun Siwalan): 1. Desa Tunah Kecamatan Palang 1. Desa Dawung 2. Desa Jatimulyo | | | |
| | | Wisata Pelang – Desa Tahulu Kecamatan Merakurak | Kecamatan Merakurak: 1. Desa Mandirejo (Wisata Silowo) 2. Desa Sambonggede (Wisata Kampung Air) 3. Desa Tuwiri Wetan (Wisata Kedung Sari/WKS) | | | |

| Sektor | Kluster Komoditas | Lokasi Utama | Lokasi Pendukung | Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah |
|---------------|--------------------------|---|---|---|
| | Wisata Religi | Makam Sunan Bonang – Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Gesikharjo Kecamatan Palang (Makam Ibrahim Asmoro Qondi) 2. Desa Bejagung Kecamatan Semanding (Makam Sunan Bejagung) | |

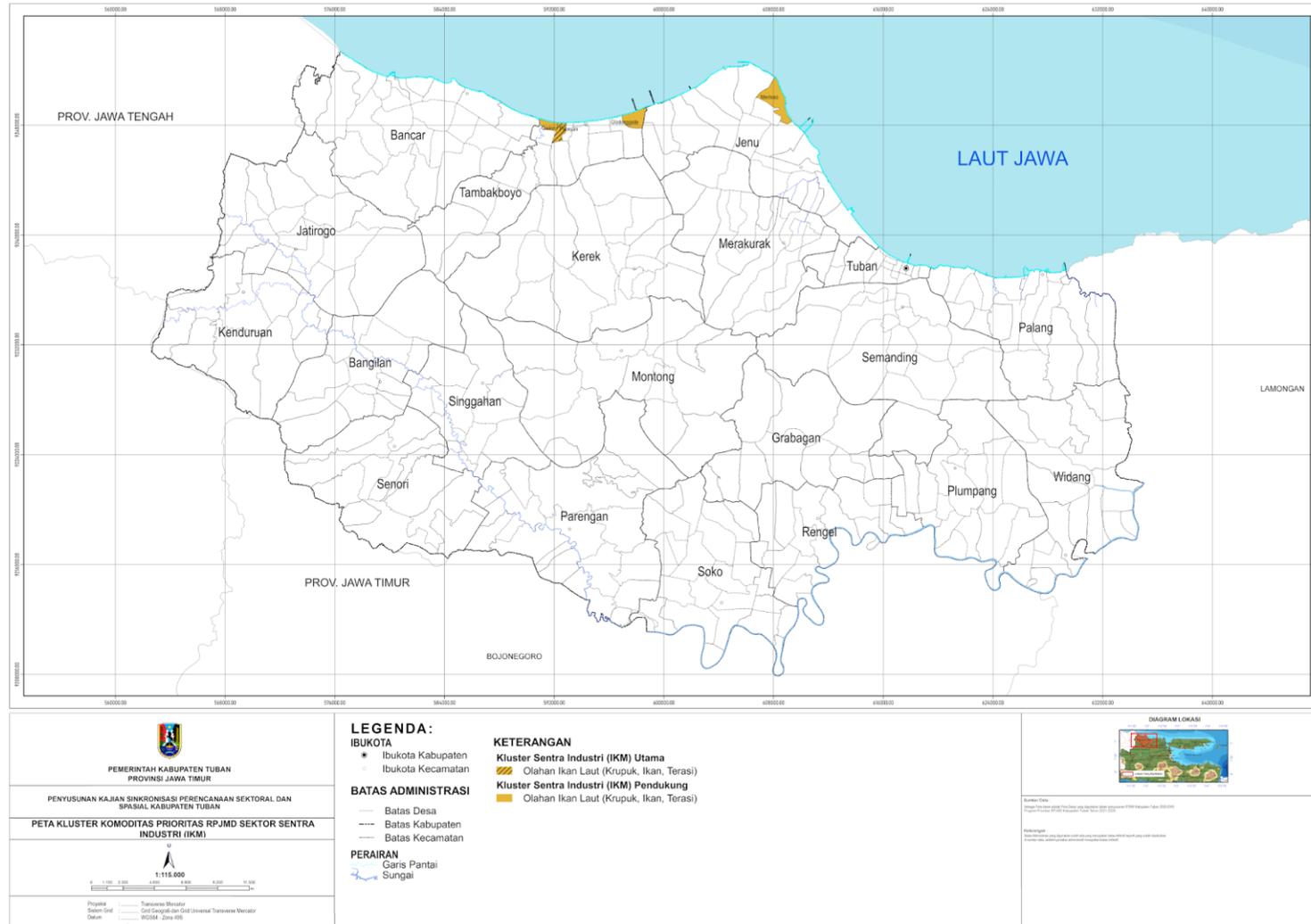
(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



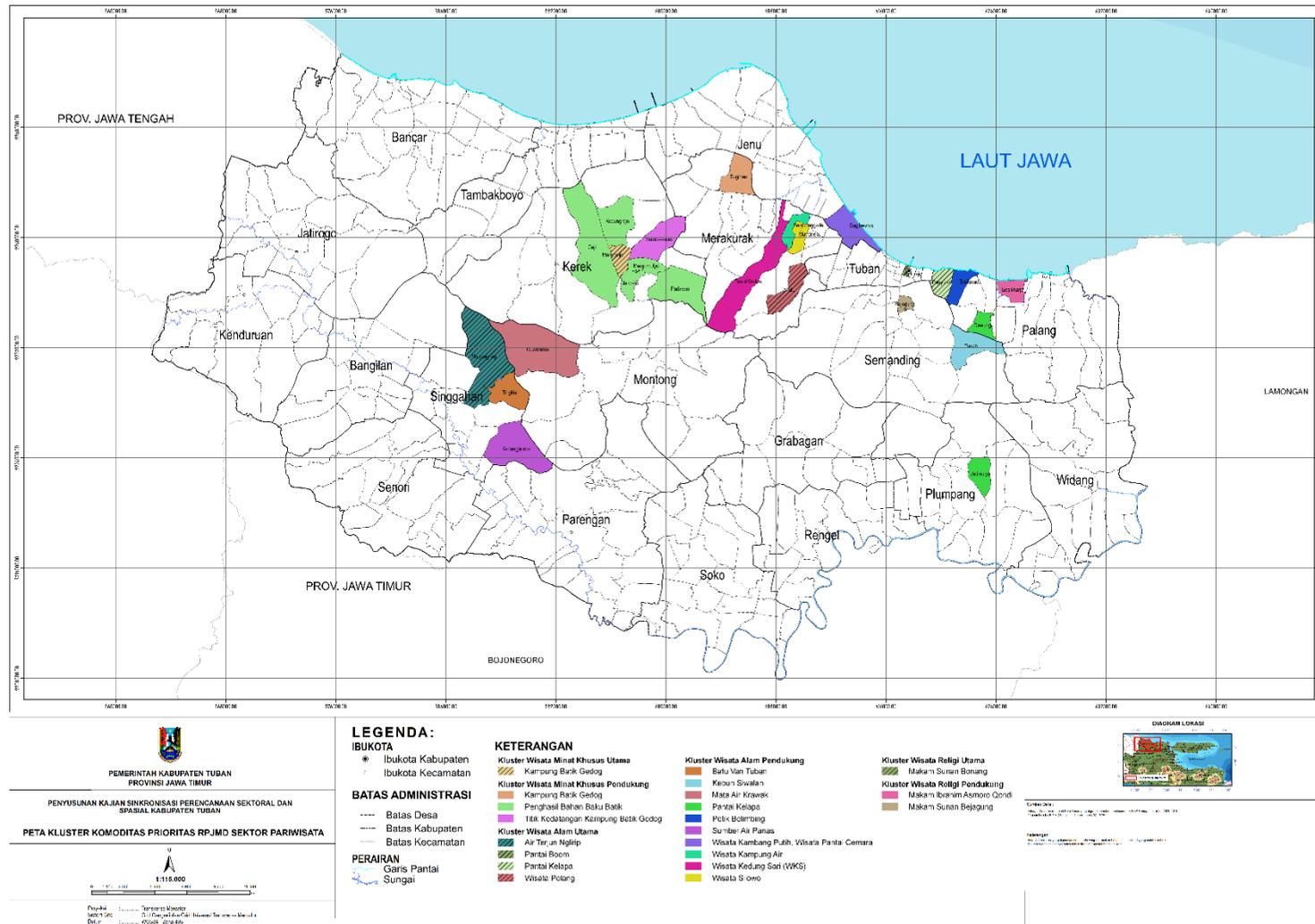
Gambar 6.6 Peta OVOP Kluster Pertanian
(Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 6.7 Peta OVOP Kluster Perikanan
(Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 6.8 Peta OVOP Kluster Sentra Industri (IKM)
(Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)



Gambar 6.9 Peta OVOP Kluster Pariwisata
(Sumber : Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

6.4 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dirumuskan dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan. Berikut program pembangunan daerah yang disandingkan dengan misi, tujuan dan sasaran dan Strategi pembangunan daerah :

Tabel 6.7 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|--------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|--|-----|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan: Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan | Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index) | 74,14 | 74,80 | | 75,13 | | 75,47 | | 75,80 | | 76,14 | | 76,14 | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|---|---|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|--|--------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | | Rp. |
| selaras aktivitas sosial ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas Layanan Infrastruktur | Indek Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (%) | 75,80 | 76,00 | | 78,00 | | 80,00 | | 82,00 | | 84,00 | | 84,00 | | |
| Strategi: Penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan (St 1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten (%) | 88,88 | 92,18 | 192.156.600.000 | 94,61 | 209.905.294.445 | 96,43 | 206.854.565.215 | 98,25 | 219.225.500.702 | 100 | 211.382.047.618 | 100 | 1.039.524.007.981 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di Kabupaten Tuban(%) | 84,36 | 85,23 | 8.874.100.000 | 86,42 | 8.962.841.000 | 87,01 | 9.052.469.410 | 88,2 | 9.142.994.104 | 88,9 | 9.234.424.045 | 88,9 | 45.266.828.559 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) | 45,2 | 55,10 | 6.864.989.000 | 61,50 | 6.933.638.890 | 67,30 | 7.002.975.279 | 72,15 | 7.073.005.032 | 85,00 | 7.143.735.082 | 85,00 | 35.018.343.283 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|--|---------------|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Program Pengelolaan Izin Lokasi | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%) | 90 | 90 | 25.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 250.000.000 | Permukiman |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (%) | 76,47 | 22,34 | 1.605.859.600 | 43,62 | 1.621.918.196 | 64,89 | 1.638.137.378 | 82,98 | 1.654.518.752 | 100 | 1.671.063.939 | 100 | 8.191.497.865 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Program Pengembangan Jasa Kontruksi | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Kecelakaan) | 0 | 0 | 54.072.500 | 0 | 54.613.225 | 0 | 55.159.357 | 0 | 55.710.951 | 0 | 56.268.060 | 0 | 275.824.093 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, kendaraan bermotor/alat berat (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%) | 10,8 | 18,2 | 136.095.000 | 22,3 | 137.455.950 | 26,4 | 138.830.510 | 30,4 | 140.218.815 | 34,5 | 141.621.003 | 34,5 | 694.221.277 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|--------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|--|---------------------|--|-----------------------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Kawasan Permukiman |
| Program Penataan Bangunan Gedung | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%) | 100 | 20 | 270.000.000 | 40 | 272.700.000 | 60 | 275.427.000 | 80 | 278.181.270 | 100 | 280.963.083 | 100 | 1.377.271.353 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Jumlah dokumen perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 2 | 22.487.202.00 0 | 1 | 22.712.074.02 0 | 1 | 22.939.194.76 0 | 1 | 23.168.586.70 8 | 1 | 23.400.272.57 5 | 6 | 114.707.330.0 63 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%) | n/a | 100 | 25.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 250.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan regional untuk menunjang tingkat layanan | n/a | 70 | 1.800.000.000 | 72 | 1.818.000.000 | 74 | 1.836.180.000 | 76 | 1.854.541.800 | 78 | 1.873.087.218 | 78 | 9.181.809.018 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|---|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|----------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | yang telah direncanakan (%) | | | | | | | | | | | | | | | Permukiman |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%) | 82,74 | 84,22 | 7.650.331.265 | 84,98 | 7.726.834.578 | 85,74 | 7.804.102.923 | 86,50 | 7.882.143.953 | 87,28 | 7.960.965.392 | 87,28 | 39.024.378.111 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%) | 75,32 | 77,79 | 5.398.635.400 | 80,74 | 5.452.621.754 | 83,49 | 5.507.147.972 | 86,25 | 5.562.219.451 | 88,29 | 5.617.841.646 | 88,29 | 27.538.466.223 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi penyedotan kakus (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik (%) | 58,92 | 18,64 | 5.622.228.772 | 22,64 | 5.678.451.060 | 22,64 | 5.735.235.570 | 30,64 | 5.792.587.926 | 34,64 | 5.850.513.805 | 34,64 | 28.679.017.133 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--|--------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | | Rp. |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) | 9,39 | 10 | 93.408.000.00 0 | 20 | 94.342.080.00 0 | 35 | 95.285.500.80 0 | 50 | 96.238.355.80 8 | 70 | 97.200.739.36 6 | 70 | 476.474.675.9 74 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Program Pengembangan Perumahan | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota | n/a | 0,006 | 500.000.000 | 0,006 | 1.300.000.000 | 0,006 | 1.313.000.000 | 0,006 | 1.326.130.000 | 0,006 | 1.339.391.300 | 0,03 | 5.778.521.300 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase masyarakat yang membutuhkan rumah, termasuk rumah komersil.(%) | 14,71 | 1,19 | 100.000.000 | 1,49 | 100.000.000 | 1,64 | 100.000.000 | 1,64 | 100.000.000 | 1,79 | 100.000.000 | 7,7 | 500000000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar kawasan kumuh (%) | n/a | 80 | 1.300.000.000 | 60 | 1.313.000.000 | 40 | 1.326.130.000 | 20 | 1.339.391.300 | 0 | 1.352.785.213 | 0 | 6.631.306.513 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Program Kawasan Permukiman | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%) | 6,15 | 0,12 | 100.000.000 | 0,12 | 110.000.000 | 0,12 | 111.100.000 | 0,12 | 112.211.000 | 0,12 | 113.333.110 | 0,12 | 546.644.110 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kot a yang ditangani infrastrukturnya (%) | 97,50 | 9,73 | 13.584.647.00 0 | 21,90 | 13.720.493.47 0 | 21,90 | 13.857.698.40 5 | 21,90 | 13.996.275.38 9 | 21,90 | 14.136.238.14 3 | 97,32 | 69.295.352.40 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota | 0,52 | 0,50 | 35.553.101.52 1 | 0,48 | 35.908.632.53 6 | 0,46 | 36.267.718.86 2 | 0,44 | 36.630.396.05 0 | 0,42 | 36.996.700.01 1 | 0,42 | 181.356.548.9 80 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/ Umum (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi tempat khusus parkir (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pengujian kendaraan | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|----------------|---|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | bermotor (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase kapal yang memiliki PAS kapal (%) | 59,49 | 70 | 48.455.000 | 70 | 48.939.550 | 70 | 49.428.946 | 70 | 49.923.235 | 70 | 50.422.467 | 70 | 247.169.198 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)* | 68,98 | 63,23 | | 63,44 | | 63,65 | | 63,86 | | 64,07 | | 64,07 | | | |
| Strategi: Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum lingkungan (St 2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%) | 80 | 100 | 28.693.100 | 100 | 28.980.031 | 100 | 29.269.831 | 100 | 29.562.530 | 100 | 29.858.155 | 100 | 146.363.647 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| Program Pengelolaan Persampahan | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | 54,03 | 56,90 | 8.142.697.776 | 67 | 8.224.124.754 | 78 | 8.306.366.001 | 89 | 8.389.429.661 | 100 | 8.473.323.958 | 100 | 41.535.942.150 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ke bersihan (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| Program Pengendalian | Persentase penyelesaian | 100 | 100 | 2.861.056.950 | 100 | 2.889.667.520 | 100 | 2.918.564.195 | 100 | 2.947.749.837 | 100 | 2.977.227.335 | 100 | 14.594.265.836 | Dinas Lingkungan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|--|-----------------------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup | dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH (%) | | | | | | | | | | | | | | | Hidup dan Perhubungan |
| Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase persetujuan lingkungan yang diselesaikan (%) | 100 | 100 | 181.086.500 | 100 | 182.897.365 | 100 | 184.726.339 | 100 | 186.573.602 | 100 | 188.439.338 | 100 | 923.723.144 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah Lembaga yang peduli dan Berbudaya Lingkungan (Lembaga (278 sekolah adiwiyata dan 50 RW/RW berstatus KIB)) | 328 | 34 | 479.500.000 | 34 | 484.295.000 | 34 | 489.137.950 | 34 | 494.029.330 | 34 | 498.969.623 | 34 | 2.445.931.902 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase Pelayanan Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti (%) | 100 | 95 | 91.853.500 | 95 | 92.772.035 | 95 | 93.699.755 | 95 | 94.636.753 | 95 | 95.583.120 | 95 | 468.545.164 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Jumlah kader lingkungan hidup yang terbentuk (Kader) | 200 | 100 | 50.000.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 165.000.000 | 100 | 585.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Luas kawasan KEHATI yang dikelola (Ha) | n/a | 3 | 600.122.750 | 4 | 606.123.978 | 5 | 612.185.217 | 6 | 618.307.069 | 7 | 624.490.140 | 26 | 3.061.229.154 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan | |
| Sasaran: Berkurangnya resiko bencana | Indeks Resiko Bencana | 145,52 | 140 | | 135 | | 130 | | 125 | | 120 | | 120 | | | |
| Strategi: Pembangunan wilayah berbasis | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--------------------|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| potensi, manajemen resiko dan kapasitas penanggulangan bencana (St 3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penanggulangan Bencana | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) | | 77 | 198.999.700 | 77 | 200.989.697 | 77 | 202.999.594 | 77 | 205.029.590 | 77 | 207.079.886 | 77 | 1.015.098.467 | Badan Penanggulan n Bencana Daerah |
| | Persentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik (%) | | 100 | 2.010.474.300 | 100 | 2.030.579.043 | 100 | 2.050.884.833 | 100 | 2.071.393.682 | 100 | 2.092.107.619 | 100 | 10.255.439.47 7 | Badan Penanggulan n Bencana Daerah |
| | Persentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana (%) | | 100 | 1.740.847.650 | 100 | 1.758.256.127 | 100 | 1.775.838.688 | 100 | 1.793.597.075 | 100 | 1.811.533.045 | 100 | 8.880.072.584 | Badan Penanggulan n Bencana Daerah |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran (%) | n/a | 5-7 | 249,026,200 | 5-7 | 251.516.462 | 5-7 | 254.031.627 | 5-7 | 256.571.943 | 5-7 | 259.137.662 | 5-7 | 1.270.283.894 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Sasaran: Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis | Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup | 88,00 | 89,5 | | 90,26 | | 91,03 | | 91,81 | | 92,59 | | 92,59 | | |
| Strategi: Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi agama (St 4) | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|----------------|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Persentase Pelanggaran gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) | 100 | 100 | 4.732.348.400 | 100 | 4.779.671.884 | 100 | 4.827.468.603 | 100 | 4.875.743.289 | 100 | 4.924.500.722 | 100 | 24.139.732.897 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 100 | 100 | 101.988.600 | 100 | 103.008.486 | 100 | 104.038.571 | 100 | 105.078.957 | 100 | 106.129.746 | 100 | 520.244.360 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi penanganan konflik sosial | Persentase Potensi Konflik Sosial Dan Politik Yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 75 | 472.637.800 | 80 | 477.364.178 | 85 | 482.137.820 | 90 | 486.959.198 | 95 | 491.828.790 | 95 | 2.410.927.786 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | Persentase Peningkatan Masyarakat yang terlibat dalam Kewaspadaan dini masyarakat (%) | 100 | 71 | 150.852.000 | 72 | 152.360.520 | 73 | 153.884.125 | 74 | 155.422.966 | 75 | 156.977.196 | 75 | 769.496.808 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan (%) | 100 | 71 | 372.921.400 | 72 | 376.650.614 | 73 | 380.417.120 | 74 | 384.221.291 | 75 | 388.063.504 | 75 | 1.902.273.930 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter (%) | 100 | 80 | 656.908.100 | 81 | 663.477.181 | 82 | 670.111.953 | 83 | 676.813.072 | 85 | 683.581.203 | 85 | 3.350.891.509 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui | persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik (%) | 74,63 | 60 | 1.862.120.900 | 62 | 1.880.742.109 | 64 | 1.899.549.530 | 65 | 1.918.545.025 | 67 | 1.937.730.476 | 67 | 9.498.688.040 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (%) | 53,13 | 84 | 2.170.206.850 | 85 | 2.191.908.919 | 86 | 2.213.828.008 | 87 | 2.235.966.288 | 88 | 2.258.325.951 | 88 | 11.070.236.01 5 | Sekretariat Daerah | |
| | Jumlah Rancangan Kebijakan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 17 | 28 | 32.916.518.55 0 | 30 | 33.245.683.73 6 | 31 | 33.578.140.57 3 | 32 | 33.913.921.97 9 | 33 | 34.253.061.19 8 | 33 | 167.907.326.0 35 | Sekretariat Daerah | |
| Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah dan sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------|----|------|----|--|-----|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan: Meningkatkan daya saing dan daya sanding ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan | Laju Pertumbuhan Ekonomi* | -5,58 | 4,07 - 4,31 | 4,32 - 4,42 | 4,43 - 4,86 | 4,87 - 5,01 | 5,02 - 5,39 | 5,02 – 5,39 | | | | | | | |
| | Tingkat Kemiskinan* | 15,91 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 13 | | | | | | | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* | 0,337 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | | | | | | | |
| | Gini Rasio* | 0.99060 | 0,310 - 0,347 | 0,310 - 0,345 | 0,310 - 0,344 | 0,310 - 0,342 | 0,310 - 0,340 | 0,310- 0,340 | | | | | | | |
| | Indeks Williamson | 4,81 | 0,951 - 0,980 | 0,942 - 0,970 | 0,938 - 0,960 | 0,923 - 0,954 | 0,912 - 0,947 | 0,912- 0,947 | | | | | | | |
| Sasaran: Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan | PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | -1.39 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,05 | | | | | | | |
| Strategi : | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---|--------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian secara luas, Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian (St 5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | 31,58 | 24,36 | 710.587.600 | 22,74 | 717.693.476 | 21,25 | 724.870.411 | 19,85 | 732.119.115 | 18,53 | 739.440.306 | 18,53 | 3.624.710.908 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase sarana pertanian yang digunakan (%) | 87,85 | 70,04 | 5.981.779.600 | 80,05 | 6.041.597.396 | 80,04 | 6.102.013.370 | 80,14 | 6.163.033.504 | 80,13 | 6.224.663.839 | 80,13 | 30.513.087.70 ⁸ | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sesudah dipotong (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kelompok tani kelas utama (%) | 5,86 | 6,7 | 2.113.449.550 | 7,8 | 2.134.584.046 | 8,6 | 2.155.929.886 | 9,3 | 2.177.489.185 | 10 | 2.199.264.077 | 10 | 10.780.716.74 ³ | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana | Persentase prasarana pertanian yang digunakan (%) | 36,22 | 60,47 | 30.049.211.57 ⁵ | 65,41 | 30.349.703.69 ¹ | 72,05 | 30.653.200.72 ⁸ | 79,74 | 30.959.732.73 ⁵ | 90,49 | 31.269.330.06 ² | 90,49 | 153.281.178.7 ⁹¹ | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--|--------------------|--|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | Perikanan |
| Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota (%) | 80 | 80 | 20.000.000 | 80 | 50.000.000 | 80 | 50.500.000 | 80 | 51.005.000 | 80 | 51.515.050 | 80 | 203.020.050 | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%) | 20 | 20 | 874.651.590 | 20 | 883.398.106 | 20 | 892.232.087 | 20 | 901.154.408 | 20 | 910.165.952 | 20 | 4.461.602.143 | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota (ton) | 41.781.129 | 45,93 3,50 | 2.434.603.700 | 4777 0,84 | 2.458.949.737 | 49,60 8,18 | 2.483.539.234 | 51,44 5,52 | 2.508.374.627 | 53,28 2,86 | 2.533.458.373 | 53.282, 86 | 12.418.925.67 1 | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan | Jumlah Kawasan yang Dipantau (Kawasan) | 0 | 8 | 147.185.000 | 10 | 148.656.850 | 12 | 150.143.419 | 14 | 151.644.853 | 16 | 153.161.301 | 16 | 750.791.422 | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota (ton) | 21.530,80 | 24.65 0,61 | 2.929.075.000 | 26.37 6,16 | 2.958.365.750 | 28.22 2,49 | 2.987.949.408 | 30.19 8,06 | 3.017.828.902 | 32.31 1,93 | 3.048.007.191 | 90.732, 4726 | 14.941.226.25 0 | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) | 34.738,09 | 35,78 8,05 | 1.531.877.800 | 36,32 4,87 | 1.547.196.578 | 36,86 9,74 | 1.562.668.544 | 37,42 2,79 | 1.578.295.229 | 37,98 4,129 06 | 1.594.078.182 | 112.276 ,6574 | 7.814.116.333 | | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Sasaran: Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, | PDRB Sektor Industri Pengolahan | -11.44 | 3,51 | | 3,82 | | 4,73 | | 4,91 | | 5,03 | | 5,03 | | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--------------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%) | 1,17 | 1,04 | 2.121.783.920 | 1,10 | 2.443.001.759 | 1,10 | 2.467.431.777 | 1,20 | 2.492.106.095 | 1,20 | 2.517.027.156 | 1,20 | 12.041.350.70 6 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Industri Kecil dan Menengah) | 0 | 11.00 0 | 31.542.100 | 11.50 0 | 31.857.521 | 12.00 0 | 32.176.096 | 12.50 0 | 32.497.857 | 13.00 0 | 32.822.836 | 13.000 | 160.896.410 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) | 0 | 52 | 11.260.000 | 54 | 11.372.600 | 56 | 11.486.326 | 58 | 11.601.189 | 60 | 11.717.201 | 60 | 57.437.316 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%) | n/a | 10 | 103.200.000 | 11 | 104.232.000 | 12 | 105.274.320 | 13 | 106.327.063 | 14 | 107.390.334 | 14 | 526.423.717 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | |
| Program Pembangunan Kawasan transmigrasi | Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan (%) | 0 | 20 | 315.200.000 | 21 | 318.352.000 | 22 | 321.535.520 | 23 | 324.750.875 | 24 | 327.998.384 | 24 | 1.607.836.779 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%) | 100 | 20 | 2.698.822.000 | 21 | 2.725.810.220 | 22 | 2.753.068.322 | 23 | 2.780.599.005 | 24 | 2.808.404.995 | 24 | 13.766.704.54 3 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | |
| Program Hubungan | Persentase Perusahaan yang | 13 | 5 | 755.138.000 | 6 | 762.689.380 | 7 | 770.316.274 | 8 | 778.019.437 | 9 | 785.799.631 | 9 | 3.851.962.721 | Dinas Tenaga Kerja dan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|----------------------------|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Industrial | menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%) | | | | | | | | | | | | | | Perindustrian |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%) | 72 | 70 | 2.179.840.000 | 71 | 2.201.638.400 | 72 | 2.223.654.784 | 73 | 2.245.891.332 | 74 | 2.268.350.245 | 74 | 11.119.374.76 ₁ | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Sasaran: Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan | PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Mamin | -9,34 | 5,92 | | 6,43 | | 6,81 | | 7,12 | | 7,53 | | 7,53 | | |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%) | 1 | 1 | 864.538.200 | 1 | 873.183.582 | 1 | 881.915.418 | 1 | 890.734.572 | 1 | 899.641.918 | 1 | 4.410.013.690 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Program Pemasaran Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (%) | 5 | 5 | 410.000.000 | 5 | 414.100.000 | 5 | 418.241.000 | 5 | 422.423.410 | 5 | 426.647.644 | 5 | 2.091.412.054 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|---|---|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|--|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pariwisata |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata (%) | 36 | 36 | 1.010.000.000 | 39 | 1.020.100.000 | 42 | 1.030.301.000 | 45 | 1.040.604.010 | 48 | 1.051.010.050 | 48 | 5.152.015.060 | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi tempat rekreasi (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%) | 2 | 2 | 100.000.000 | 2 | 101.000.000 | 2 | 102.010.000 | 2 | 103.030.100 | 2 | 104.060.401 | 2 | 510.100.501 | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase peningkatan Jumlah pelaku kesenian daerah (%) | n/a | 10 | 170.000.000 | 10 | 171.700.000 | 10 | 173.417.000 | 10 | 175.151.170 | 10 | 176.902.682 | 50 | 867.170.852 | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Program Pengembangan Kebudayaan | Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola (Obyek) | 11 | 11 | 780.000.000 | 11 | 787.800.000 | 11 | 795.678.000 | 11 | 803.634.780 | 11 | 811.671.128 | 11 | 3.978.783.908 | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dikelola (Unit) | 83 | 83 | 89.450.000 | 87 | 90.344.500 | 91 | 91.247.945 | 96 | 92.160.424 | 100 | 93.082.029 | 100 | 456.284.898 | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Program Pengelolaan Permuseuman | Jumlah museum yang dikelola (Unit) | 1 | 1 | 983.450.900 | 1 | 993.285.409 | 1 | 1.003.218.263 | 1 | 1.013.250.446 | 1 | 1.023.382.950 | 1 | 5.016.587.968 | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Program Pembinaan Sejarah | Jumlah Dokumen Sejarah yang terinventarisir (Dokumen) | 4 | 4 | 100.000.000 | 5 | 101.000.000 | 6 | 102.010.000 | 7 | 103.030.100 | 8 | 104.060.401 | 30 | 510.100.501 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Sasaran: Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Daerah Berbasis Kemitraan Dunis Usaha, Koperasi, UMKM, dan Bumdes | Tingkat Inflasi Daerah | 1.93 | 1-2 | | 1-2 | | 1-2 | | 1-2 | | 1-2 | | 1-2 | | |
| Strategi: Pengentasan kemiskinan dan kelompok rentan secara holistik dan integratif (St 7) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU P Toko Swalayan) (%) | n/a | 50 | 20.000.000 | 60 | 20.200.000 | 62 | 20.402.000 | 70 | 20.606.020 | 72 | 20.812.080 | 72 | 102.020.100 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Bapokting (%) | <13 | <13 | 464.294.100 | <13 | 568.937.041 | <13 | 574.626.411 | <13 | 580.372.676 | <13 | 586.176.402 | <13 | 592.038.166 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya | n/a | 98 | 389.505.650 | 98 | 393.400.707 | 98 | 397.334.714 | 98 | 401.308.061 | 98 | 405.321.141 | 98 | 1.986.870.272 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--|--------|--|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | | Rp. |
| | (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%) | | | | | | | | | | | | | | Perdagangan |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi (%) | 70 | 71,48 | 8.244.273.650 | 73,68 | 8.326.716.387 | 73,68 | 8.409.983.550 | 75,98 | 8.494.083.386 | 78,98 | 8.579.024.220 | 78,98 | 42.054.081.19 ₂ | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan distribusi pelayanan pasar – pelataran/dasar an (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Los (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan retribusi pelayanan pasar – kios (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya (%) | n/a | 1,02 | 502.694.841 | 1,10 | 707.721.789 | 1,10 | 714.799.007 | 1,10 | 721.946.997 | 1,10 | 729.166.467 | 5,42 | 3.376.329.102 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| Program Pengembangan Ekspor | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%) | n/a | 3 | 492.760.500 | 1 | 497.688.105 | 1 | 502.664.986 | 1 | 507.691.636 | 1 | 512.768.552 | 7 | 2.513.573.779 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|---------------|---|-------------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Perdagangan |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Koperasi yang meningkat berkualitas (%) | 13,00 | 14,66 | 147.840.000 | 15,28 | 149.318.400 | 15,92 | 150.811.584 | 16,60 | 152.319.700 | 19,85 | 153.842.897 | 19,85 | 754.132.581 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase Koperasi Sehat (%) | 0,08 | 0,2 | 102.999.900 | 0,25 | 104.029.899 | 0,30 | 105.070.198 | 0,35 | 106.120.900 | 0,40 | 107.182.109 | 0,40 | 525.403.006 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM Koperasi yang berkualitas (%) | 0,06 | 0,07 | 651.752.000 | 0,08 | 658.269.520 | 0,09 | 664.852.215 | 0,010 | 671.500.737 | 0,011 | 678.215.745 | 0,011 | 3.324.590.217 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (Rasio) | 0,27 | 1,50 | 634.983.350 | 3,02 | 941.333.184 | 4,57 | 950.746.515 | 6,14 | 960.253.980 | 7,5 | 969.856.520 | 7,5 | 4.457.173.550 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Program Pengembangan UMKM | Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirasausaha (%) | 1,79 | 1,50 | 445.889.751 | 3,02 | 650.348.649 | 4,57 | 656.852.135 | 6,14 | 663.420.656 | 7,50 | 670.054.863 | 7,50 | 3.086.566.054 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (%) | 0,35 | 16,25 | 28.000.000 | 16,50 | 28.280.000 | 16,75 | 28.562.800 | 17,00 | 28.848.428 | 17,25 | 29.136.912 | 17,25 | 142.828.140 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | |
| Sasaran: Meningkatnya Ketahanan dan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Daerah Berbasis Kemitraan Dunis Usaha, Koperasi, UMKM, dan Bumdes | Indeks Desa Membangun | 0,6999 | 0,744 5 | | 0,765 2 | | 0,785 9 | | 0,806 6 | | 0,827 3 | | 0,8273 | | | |
| | PDRB Per | 52.920.00 | 55.00 | | 56.08 | | 57.18 | | 58.31 | | 59.45 | | 59.450. | | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|----------------------------|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| | kapita (rupiah) | 0 | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 000 | | |
| Program Penataan Desa | Persentase desa yang statusnya meningkat (%) | 9,65 | 9,97 | 55.963.500 | 9,97 | 56.523.135 | 9,97 | 57.088.366 | 9,97 | 57.659.250 | 9,97 | 58.235.843 | 9,97 | 285.470.094 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase Peningkatan Kerjasama Desa (%) | 30,7 | 10 | 428.849.500 | 10 | 433.137.995 | 10 | 437.469.375 | 10 | 441.844.069 | 10 | 446.262.509 | 50 | 2.187.563.448 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabilitas (%) | 58,27 | 64,63 | 6.131.343.700 | 70,74 | 6.192.657.137 | 77,17 | 6.254.583.708 | 83,6 | 6.317.129.545 | 90,03 | 6.380.300.841 | 90,03 | 31.276.014.93 ² | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%) | 7,72 | 14,47 | 1.557.161.440 | 16,08 | 1.572.733.054 | 17,68 | 1.588.460.385 | 19,29 | 1.604.344.989 | 20,90 | 1.620.388.439 | 20,90 | 7.943.088.307 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan | 90,3 | 91,5 | 1.067.574.250 | 91,5 | 1.078.249.993 | 92 | 1.089.032.492 | 93 | 1.099.922.817 | 94 | 1.110.922.046 | 94 | 5.445.701.598 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|--------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|----------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | Usaha Kesejahteraan Sosial (%) | | | | | | | | | | | | | | | dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar (%) | 97 | 97,5 | 9.356.081.800 | 97,5 | 9.449.642.618 | 98 | 9.544.139.044 | 99 | 9.639.580.435 | 100 | 9.735.976.239 | 100 | 47.725.420.136 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%) | 92 | 93 | 11.184.720.550 | 93 | 11.296.567.756 | 93 | 11.409.533.433 | 93 | 11.523.628.767 | 93 | 11.638.865.055 | 93 | 57.053.315.561 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%) | 100 | 100 | 168.294.250 | 100 | 169.977.193 | 100 | 171.676.964 | 100 | 173.393.734 | 100 | 175.127.671 | 100 | 858.469.812 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara (%) | 100 | 100 | 79.949.475 | 100 | 80.748.970 | 100 | 81.556.459 | 100 | 82.372.024 | 100 | 83.195.744 | 100 | 407.822.673 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Program Pemberdayaan | Persentase desa dengan | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Kenduruan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|-------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| Masyarakat Desa dan Kelurahan | Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Jatirogo | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Bangilan | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Bancar | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Senori | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Tambakboyo | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Singgahan | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Kerek | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Parengan | |
| Program | Persentase desa | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|--|---------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | | | | | | | | | | | | | | | Montong |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Soko | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Jenu | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Merakurak | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Rengel | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Semanding | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 1000 0% | 101.507.513 | 1000 0% | 102.015.050 | 10000% | 505.025.063 | Kecamatan Tuban | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Plumpang | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 1000 0% | 102.015.050 | 10000% | 505.025.063 | Kecamatan Palang | |
| Program | Persentase desa | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|--------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | | | | | | | | | | | | | | Widang |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | Kecamatan Grabagan |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terrealisasi melalui dana kelurahan | 80 | 80 | 799.504.947 | 80 | 803.502.472 | 80 | 807.519.984 | 80 | 811.557.584 | 80 | 815.615.372 | 80 | 4.037.700.359 | Kecamatan Palang |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terrealisasi melalui dana kelurahan | 80 | 80 | 2.353.724.594 | 80 | 2.365.493.217 | 80 | 2.377.320.683 | 80 | 2.389.207.286 | 80 | 2.401.153.323 | 80 | 11.886.899.10 ₃ | Kecamatan Semanding |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terrealisasi melalui dana kelurahan | 80 | 80 | 10.013.414.96 ₂ | 80 | 10.063.482.03 ₇ | 80 | 10.113.799.44 ₇ | 80 | 10.164.368.44 ₄ | 80 | 10,215,190,28 ₆ | 80 | 50.570.255.17 ₆ | Kecamatan Tuban |
| Sasaran: Meningkatnya nilai investasi daerah | Persentase peningkatan nilai investasi (%) | n/a | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | |
| Strategi: Meningkatkan daya tarik dan iklim investasi (St 6) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan (%) | 0 | 100 | 215.732.500 | 100 | 217.889.825 | 100 | 220.068.723 | 100 | 222.269.410 | 100 | 224.492.105 | 100 | 1.100.452.563 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pelayanan | Persentase Jumlah Perijinan | 100 | 100 | 285.747.000 | 100 | 288.604.470 | 100 | 291.490.515 | 100 | 294.405.420 | 100 | 297.349.474 | 100 | 1.457.596.879 | Dinas Penanaman |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|---------------|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Penanaman Modal | dan non perijinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP (%) | | | | | | | | | | | | | | Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Promosi Penanaman Modal | Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal (%) | 24,01 | 30 | 290.420.000 | 30 | 293.324.200 | 30 | 296.257.442 | 30 | 299.220.016 | 30 | 302.212.217 | 30 | 1.481.433.875 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase jumlah pemohon ijin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal (%) | n/a | 80 | 162.642.500 | 85 | 164.268.925 | 90 | 165.911.614 | 93 | 167.570.730 | 97 | 169.246.438 | 97 | 829.640.207 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Cakupan pengendalian pelaku usaha (%) | 2,17 | 26,71 | 522.725.000 | 26,71 | 527.952.250 | 26,71 | 533.231.773 | 26,71 | 538.564.090 | 26,71 | 543.949.731 | 26,71 | 2.666.422.844 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan: Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan | Indeks Pembangunan Manusia* | 68,4 | 69,00 | | 69,70 | | 70,40 | | 71,10 | | 71,80 | | 71,80 | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| setara secara gender | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 87.78 | 88,10 | | 88,27 | | 88,44 | | 88,6 | | 88,77 | | 88,77 | | | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | n/a | 10,1 | | 10,3 | | 10,5 | | 10,7 | | 10,9 | | 10,9 | | | |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | 1:9 | 1:10 | 20.000.000 | 1:10 | 46.000.000 | 1:11 | 46.000.000 | 1:12 | 46.000.000 | 1:13 | 46.000.000 | 1:13 | 204.000.000 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (%) | 5,11 | 38,93 | 1.380.082.150 | 38,94 | 1.393.882.972 | 38,95 | 1.407.821.801 | 38,93 | 1.421.900.019 | 38,96 | 1.436.119.019 | 38,96 | 7.039.805.961 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat | Indeks Pendidikan | 0.58 | 0,59 | | 0,6 | | 0,61 | | 0,62 | | 0,63 | | 0,63 | | | |
| Strategi: Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik (St 8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (%) | 100 | 100 | 109.210.527.0 90 | 100 | 110.302.632.3 61 | 100 | 111.405.658.6 85 | 100 | 112.519.715.2 71 | 100 | 113.644.912.4 24 | 100 | 557.083.445.8 31 | | Dinas Pendidikan |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- | 100 | 100 | 43.541.435.40 0 | 100 | 43.976.849.75 4 | 100 | 44.416.618.25 2 | 100 | 44.860.784.43 4 | 100 | 45.309.392.27 8 | 100 | 222.105.080.1 18 | | Dinas Pendidikan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|---|---|--------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | 15 tahun dalam pendidikan menengah (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) | n/a | 64,19 | 34.794.195.00 ₀ | 65,22 | 35.142.136.95 ₀ | 66,31 | 35.493.558.32 ₀ | 67,26 | 35.848.493.90 ₃ | 68,21 | 36.206.978.84 ₂ | 68,21 | 177.485.363.0 ₁₄ | Dinas Pendidikan | |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan (%) | 95 | 94,38 | 5.061.137.000 | 96,38 | 5.111.748.370 | 98 | 5.162.865.854 | 100 | 5.214.494.512 | 100 | 5.266.639.457 | 100 | 25.816.885.19 ₃ | Dinas Pendidikan | |
| Program Pengembangan Kurikulum | Persentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal (%) | n/a | 60 | 251.978.850 | 70 | 254.498.639 | 80 | 257.043.625 | 90 | 259.614.061 | 100 | 262.210.202 | 100 | 1.285.345.376 | Dinas Pendidikan | |
| Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan (%) | n/a | 0,02 | 22.705.000 | 0,02 | 22.932.050 | 0,02 | 23.161.371 | 0,02 | 23.392.984 | 0,02 | 23.626.914 | 0,02 | 115.818.319 | Dinas Pendidikan | |
| Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%) | 95,64 | 96,73 | 352.088.500 | 97,60 | 355.609.385 | 98,47 | 359.165.479 | 99,35 | 362.757.134 | 100 | 366.384.705 | 100 | 1.796.005.202 | Dinas Pendidikan | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) | 100 | 100 | 1.101.000.000 | 100 | 1.112.010.000 | 100 | 1.123.130.100 | 100 | 1.134.361.401 | 100 | 1.145.705.015 | 100 | 5.616.206.516 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata | |
| Program Pengembangan | Persentase Organisasi | 1,93 | 1,93 | 1.300.000.000 | 1,93 | 1.313.000.000 | 2 | 1.326.130.000 | 2 | 1.339.391.300 | 2 | 1.352.785.213 | 2 | 6.631.306.513 | Dinas Kebudayaan, | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|--------|----------------|------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|--|-----------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| kapasitas Kepramukaan | Kepramukaan (Gugus depan) yang meningkat kapasitasnya (%) | | | | | | | | | | | | | | | Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga (%) | 75 | 80 | 4.332.872.300 | 80 | 4.376.201.023 | 85 | 4.419.963.033 | 85 | 4.464.162.664 | 90 | 4.508.804.290 | 90 | 22.102.003.310 | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata |
| | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Olahraga (%) | N/A | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata |
| Sasaran: Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | 0.79 | 0,80 | | 0,80 | | 0,80 | | 0,81 | | 0,81 | | 0,81 | | | |
| Strategi: Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik (St 8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Fasyankes terakreditasi (%) | 44,9 | 56,8 | 16.004.400.250 | 65,5 | 28.066.719.673 | 70,1 | 36.702.535.574 | 75,6 | 23.964.000.000 | 80,6 | 29.214.000.000 | 80,6 | 133.951.655.497 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Persentase Keluarga Sehat (%) | 25,51 | 25,80 | 91.233.507.900 | 26 | 92.145.842.979 | 26,50 | 93.067.301.409 | 27 | 93.997.974.423 | 28 | 94.937.954.167 | 28 | 465.382.580.878 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|----------------|--|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | laboratorium kesehatan (%) | | | | | | | | | | | | | | | Keluarga Berencana |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah - laboratorium (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat (%) | 60,09 | 65,08 | 527.973.950 | 70,07 | 533.253.690 | 75,05 | 538.586.226 | 80,04 | 543.972.089 | 85,03 | 549.411.810 | 85,03 | 2.693.197.764 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan | Persentase Fasyankes dengan tenaga kesehatan sesuai standar (%) | 46,15 | 64,10 | 5.500.331.000 | 74,36 | 5.555.334.310 | 74,36 | 5.610.887.653 | 92,31 | 5.666.996.530 | 100 | 5.723.666.495 | 100 | 28.057.215.988 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (%) | 31,40 | 40,55 | 2.711.076.500 | 49,70 | 2.738.187.265 | 58,84 | 2.765.569.138 | 67,99 | 2.793.224.829 | 77,13 | 2.821.157.077 | 77,13 | 13.829.214.809 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase kebutuhan per-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 9 | 10,8 | 6.671.647.700 | 10,5 | 6.907.480.000 | 10 | 7.046.030.000 | 9,5 | 7.458.680.000 | 9 | 7.309.980.000 | 9 | 35.393.817.700 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks) | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun | 20,9 | 21 | 5.605.534.500 | 21 | 5.249.728.712 | 21 | 5.268.094.819 | 21 | 5.112.830.087 | 21 | 5.415.997.208 | 21 | 26.652.185.326 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pengendalian Penduduk | Jumlah Angka Kelahiran TFR (Total Fertility Rate) | 2,04 | 2,04 | 288.769.000 | 2,03 | 534.402.000 | 2,02 | 504.402.000 | 2,01 | 375.202.000 | 2,01 | 350.202.000 | 2,01 | 2.052.977.000 | | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--------------------|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Sasaran: Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar | Indeks Ketahanan Pangan | 83,57 | 85,5 | | 87,3 | | 89 | | 90 | | 91 | | 91 | | |
| Strategi: Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik (St 8) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase infrastruktur pangan yang digunakan (%) | 63,16 | 69,57 | 6.427.114.600 | 72 | 6.491.385.746 | 74,07 | 6.556.299.603 | 75,86 | 6.621.862.599 | 77,42 | 6.688.081.225 | 77,42 | 32.784.743.77 4 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Persentase ketersediaan pangan masyarakat (%) | 0,00039 | 52 | 560.773.000 | 57 | 566.380.730 | 58 | 572.044.537 | 59 | 577.764.983 | 60 | 583.542.632 | 60 | 2.860.505.882 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase desa tahan pangan (%) | 75,3 | 80,18 | 94.640.000 | 84,76 | 95.586.400 | 87,80 | 96.542.264 | 90,85 | 97.507.687 | 93,90 | 98.482.764 | 93,90 | 482.759.114 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase keamanan pangan (%) | 96 | 92 | 168.669.650 | 94 | 170.356.347 | 96 | 172.059.910 | 98 | 173.780.509 | 100 | 175.518.314 | 100 | 860.384.730 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Sasaran: Meningkatnya Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 65.54 | 66,02 | | 66,5 | | 66,98 | | 67,47 | | 67,95 | | 67,95 | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|---|---|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|---------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| Strategi: Indeks Pemberdayaan Gender | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD (%) | 12,5 | 15 | 225.316.500 | 15 | 227.569.665 | 16 | 229.845.362 | 17 | 232.143.815 | 18 | 234.465.253 | 18 | 1.149.340.595 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Terpilah (%) | 65 | 70 | 152.428.000 | 70 | 153.952.280 | 75 | 155.491.803 | 80 | 157.046.721 | 85 | 158.617.188 | 85 | 777.535.992 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Program Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasaan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 0,007 | 0,006 | 235.802.300 | 0,006 | 238.160.323 | 0,005 | 240.541.926 | 0,005 | 242.947.345 | 0,004 | 245.376.819 | 0,004 | 1.202.828.714 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Program peningkatan kualitas keluarga | Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 100 | 45.020.000 | 100 | 45.470.200 | 100 | 45.924.902 | 100 | 46.384.151 | 100 | 46.847.993 | 100 | 229.647.246 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%) | 9 | 9 | 172.615.100 | 9 | 174.341.251 | 15 | 176.084.664 | 20 | 177.845.510 | 25 | 179.623.965 | 25 | 880.510.490 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|--|-------------|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%) | 100 | 100 | 164.434.000 | 100 | 166.078.340 | 100 | 167.739.123 | 100 | 169.416.515 | 100 | 171.110.680 | 100 | 838.778.658 | dan Desa |
| Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan : Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik | Indeks Reformasi Birokrasi* | 60,40 | 61,2 | | 61,61 | | 62,01 | | 62,42 | | 62,84 | | 62,84 | | |
| Sasaran: Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah | 0,2195 | 0,234 9 | | 0,242 6 | | 0,250 3 | | 0,258 | | 0,265 7 | | 0,2657 | | |
| Strategi: Melaksanakan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal berbasis sasaran | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|-------------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| pembangunan daerah (St 9) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam (%) | 86,67 | 80 | 8.046.144.800 | 81 | 8.126.606.248 | 82 | 8.207.872.310 | 83 | 8.289.951.034 | 84 | 8.372.850.544 | 84 | 41.043.424.936 | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan (%) | N/A | 92 | 758.031.553 | 92 | 765.611.869 | 92 | 773.267.987 | 92 | 781.000.667 | 92 | 788.810.674 | 92 | 3.866.722.750 | | Sekretariat Daerah |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%) | 0,16 | 100 | 5.767.685.080 | 100 | 5.825.361.931 | 100 | 5.883.615.550 | 100 | 5.942.451.706 | 96,83 | 6.001.876.223 | 96,83 | 29.420.990.489 | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Sasaran: Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | n/a | 75 | | 76,25 | | 77,5 | | 78,75 | | 80 | | 80 | | | |
| | Indeks Kapasitas Fiskal | 1,431 | 1,5 | | 1,6 | | 1,7 | | 1,8 | | 1,9 | | 1,9 | | | |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah | N/A | 100 | 486.398.103.478 | 100 | 473.606.606.784 | 100 | 478.342.672.852 | 100 | 483.126.099.580 | 100 | 487.957.360.576 | 100 | 2.409.430.843.269 | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 87,05 | 97,23 | | 97,02 | | 96,76 | | 96,83 | | 96,83 | | 96,83 | | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | Rasio anggaran | 14,31 | 5,29 | | 2,77 | | 2,98 | | 3,24 | | 3,17 | | 3,17 | | | Badan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|--|--------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | | Rp. |
| | sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (Rasio) | | | | | | | | | | | | | | Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan (%) | N/A | 10 | 5.954.425.500 | 10 | 6.013.969.755 | 10 | 6.074.109.453 | 10 | 6.134.850.547 | 10 | 6.196.199.053 | 50 | 30.373.554.307 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | Presentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan (%) | N/A | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | Manajemen Aset (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat (%) | 27,81 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Sasaran: Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai SAKIP Daerah | 69,67 | 72,29 | | 74,24 | | 76,28 | | 78,36 | | 80,15 | | 80,15 | | |
| Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 80,20 | 80,01 | 26.683.026.617 | 80,50 | 26.736.392.670 | 81,00 | 26.789.865.456 | 81,5 | 26.843.445.186 | 82,00 | 26.897.132.077 | 82,00 | 133.949.862.006 | Sekretariat Daerah |
| Program Perencanaan, Pengendalian | Persentase Penjabaran Program dalam | 91,67 | 90 | 3.534.264.950 | 90 | 3.569.607.600 | 90 | 3.605.303.675 | 90 | 3.641.356.712 | 90 | 3.677.770.279 | 90 | 18.028.303.217 | Badan Perencanaan Pembangunan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|---------------|------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|--------------------|--|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| dan Evaluasi Pembangunan Daerah | RPJMD ke dalam Program RKPD (%) | | | | | | | | | | | | | | | Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah (%) | 0 | 90 | 1.810.543.400 | 90 | 1.828.648.834 | 90 | 1.846.935.322 | 90 | 1.865.404.676 | 90 | 1.884.058.722 | 90 | 9.235.590.954 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah (%) | 0 | 90 | 828.621.000 | 90 | 836.907.210 | 90 | 845.276.282 | 90 | 853.729.045 | 90 | 862.266.335 | 90 | 4.226.799.872 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang di tindaklanjuti (%) | 92 | 90 | 2.318.025.300 | 91 | 2.341.205.553 | 93 | 2.364.617.609 | 95 | 2.388.263.785 | 96 | 2.412.146.422 | 96 | 11.824.258.66 9 | Inspektorat | |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah (%) | 100 | 100 | 1.012.171.500 | 100 | 1.022.293.215 | 100 | 1.032.516.147 | 100 | 1.042.841.309 | 100 | 1.053.269.722 | 100 | 5.163.091.892 | Inspektorat | |
| Sasaran: Birokrasi yang bersih dan kapabel | Indeks Kearsipan Daerah | 77,63 | 77,63 | | 78 | | 78,25 | | 78,5 | | 79 | | 79 | | | |
| Strategi: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|----------------------------|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjaw aban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Arsip | Tingkat Arsip Inaktif dan Statis yang diolah (%) | 32 | 39 | 470.286.300 | 47 | 474.989.163 | 54 | 479.739.055 | 61 | 484.536.445 | 68 | 489.381.810 | 68 | 2.398.932.772 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%) | 43.58 | 20 | 116.000.350 | 20 | 117.160.354 | 20 | 118.331.957 | 20 | 119.515.277 | 20 | 120.710.429 | 100 | 591.718.367 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Sasaran: Birokrasi yang kapabel | Indeks SPBE | 2,17 | 2,5 | | 2,7 | | 2,9 | | 3,1 | | 3,3 | | 3,3 | | |
| Program Aplikasi Informatika | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100 | 100 | 2.986.924.000 | 100 | 3.016.793.240 | 100 | 3.046.961.172 | 100 | 3.077.430.784 | 100 | 3.108.205.092 | 100 | 15.236.314.28 ⁸ | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|----------------|---|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) | 92,73 | 20 | 1.203.466.449 | 20 | 1.215.501.113 | 20 | 1.227.656.125 | 20 | 1.239.932.686 | 20 | 1.252.332.013 | 100 | 6.138.888.386 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%) | 17 | 25 | 628.816.250 | 50 | 635.104.413 | 75 | 641.455.457 | 100 | 647.870.011 | 100 | 654.348.711 | 100 | 6.415.189.683 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) | N/A | 50 | 127.666.000 | 55 | 128.942.660 | 65 | 130.232.087 | 70 | 131.534.407 | 75 | 132.849.752 | 75 | 651.224.906 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | |
| Sasaran: Birokrasi yang kapabel | Indeks Inovasi | 56,74 | 61 | | 63 | | 65 | | 68 | | 70 | | 70 | | | |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Jumlah inovasi yang dihasilkan | 0 | 5 | 2.267.535.250 | 5 | 2.290.210.603 | 5 | 2.313.112.709 | 5 | 2.336.243.836 | 5 | 2.359.606.274 | 5 | 11.566.708.671 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | |
| Sasaran: Birokrasi yang kapabel | Indeks Profesional ASN | 46,42 | 60 | | 62,14 | | 64,36 | | 66,66 | | 69,04 | | 69,04 | | | |
| Program Kepegawaian Daerah | Persentase ASN dengan Evaluasi Kinerja Optimal (%) | 80 | 80 | 1.447.868.000 | 83 | 1.462.346.680 | 85 | 1.476.970.147 | 88 | 1.491.739.848 | 90 | 1.506.657.247 | 90 | 7.385.581.922 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasa | 79,62 | 90 | 803.246.950 | 93 | 811.279.420 | 94 | 819.392.214 | 97 | 827.586.136 | 99 | 835.861.997 | 99 | 4.097.366.716 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|---------------|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | |
| | r (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (%) | | | | | | | | | | | | | | Sumber Daya Manusia |
| | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (%) | 80 | 80 | 839.494.500 | 80 | 847.889.445 | 80 | 856.368.339 | 80 | 864.932.023 | 80 | 873.581.343 | 80 | 4.282.265.650 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) | 4,79 | 4 | 335.520.000 | 4 | 338.875.200 | 5 | 342.263.952 | 6 | 345.686.592 | 6 | 349.143.457 | 6 | 1.711.489.201 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan kesehatan) (%) | 32 | 7 | 1.202.926.000 | 8 | 1.214.955.260 | 9 | 1.227.104.813 | 10 | 1.239.375.861 | 11 | 1.251.769.619 | 11 | 6.136.131.553 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Sasaran: Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima | Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional ASN, Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan) | 3,53 | 3,7 | | 3,79 | | 3,88 | | 3,97 | | 4,07 | | 4,07 | | |
| Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah | 99,19 | 75 | 1.758.195.550 | 85 | 1.775.777.506 | 90 | 1.793.535.281 | 95 | 1.811.470.633 | 100 | 1.829.585.340 | 100 | 8.968.564.309 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|-----------------|--|---|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | kabupaten/kota (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pengendalian Menara komunikasi (%) | N/A | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| Program pendaftaran penduduk | Perekaman KTP Elektronik (%) | 95,56 | 99,30 | 2.154.747.850 | 99,50 | 2.150.000.000 | 99,60 | 2.198.058.282 | 99,70 | 2.220.038.865 | 99,80 | 2.242.239.253 | 99,80 | 10.965.084.250 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%) | 15,45 | 45 | 292.860.000 | 50 | 322.083.929 | 55 | 298.746.486 | 60 | 301.733.951 | 65 | 304.751.290 | 65 | 1.520.175.656 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Pencatatan Sipil | Kepemilikan akta kelahiran (%) | 96,41 | 97,9 | 299.999.900 | 99 | 302.999.899 | 100 | 306.029.898 | 100 | 309.090.197 | 100 | 312.181.099 | 100 | 1.530.300.993 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%) | 6,52 | 11,90 | 130.999.950 | 14,29 | 76.000.000 | 16,67 | 77.000.000 | 19,05 | 77.500.000 | 21,43 | 78.000.000 | 21,43 | 439.499.950 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | persentase pengelolaan jaringan SLAK dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 520.000.000 | 100 | 581.509.950 | 100 | 587.085.049 | 100 | 593.225.899 | 100 | 599.433.158 | 100 | 2.881.254.056 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase Penyajian Data Kependudukan (%) | 100 | 100 | 52.000.000 | 100 | 52.520.000 | 100 | 53.045.200 | 100 | 53.575.652 | 100 | 54.111.409 | 100 | 265.252.261 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase fasilitasi Rancangan Perda yang disetujui sesuai | 88,88 | 80 | 38.606.452.900 | 88 | 38.992.517.429 | 89 | 39.382.442.603 | 89 | 39.776.267.029 | 90 | 40.174.029.700 | 90 | 196.931.709.661 | | Sekretariat DPRD |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|--|---|--------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|--|-------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | SOP (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 35.017.500 | 100 | 35.192.588 | 100 | 35.368.550 | 100 | 35.545.393 | 100 | 35.723.120 | 100 | 176.847.151 | Kecamatan Montong | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 9.950.000 | 100 | 9.999.750 | 100 | 10.049.749 | 100 | 10.099.997 | 100 | 10.150.497 | 100 | 50.249.994 | Kecamatan Kerek | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.075.000 | 100 | 15.150.375 | 100 | 15.226.127 | 100 | 15.302.258 | 100 | 75.753.759 | Kecamatan Singgahan | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 12.900.000 | 100 | 12.964.500 | 100 | 13.029.323 | 100 | 13.094.469 | 100 | 13.159.941 | 100 | 65.148.233 | Kecamatan Tambakboyo | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 28.154.000 | 100 | 28.294.770 | 100 | 28.436.244 | 100 | 28.578.425 | 100 | 28.721.317 | 100 | 142.184.756 | Kecamatan Senori | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.060.000 | 100 | 12.120.300 | 100 | 12.180.902 | 100 | 12.241.806 | 100 | 60.603.008 | Kecamatan Bancar | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 18.600.000 | 100 | 18.693.000 | 100 | 18.786.465 | 100 | 18.880.397 | 100 | 18.974.799 | 100 | 93.934.662 | Kecamatan Bangilan | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan | N/A | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.060.000 | 100 | 12.120.300 | 100 | 12.180.902 | 100 | 12.241.806 | 100 | 60.603.008 | Kecamatan Kenduruan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|--------|--|---------------------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | | Rp. |
| | pelayanan publik kecamatan (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 12.800.000 | 100 | 12.864.000 | 100 | 12.928.320 | 100 | 12.992.962 | 100 | 13.057.926 | 100 | 64.643.208 | Kecamatan Parengan |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 16.800.000 | 100 | 16.884.000 | 100 | 16.968.420 | 100 | 17.053.262 | 100 | 17.138.528 | 100 | 84.844.211 | Kecamatan Soko |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 16.586.120 | 100 | 16.669.051 | 100 | 16.752.396 | 100 | 16.836.158 | 100 | 16.920.339 | 100 | 83.764.063 | Kecamatan Jenu |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 8.370.000 | 100 | 8.411.850 | 100 | 8.453.909 | 100 | 8.496.179 | 100 | 8.538.660 | 100 | 42.270.598 | Kecamatan Merakurak |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 13.194.550 | 100 | 13.260.523 | 100 | 13.326.825 | 100 | 13.393.459 | 100 | 13.460.427 | 100 | 66.635.784 | Kecamatan Rengel |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 168.944.048 | 100 | 169.788.768 | 100 | 170.637.712 | 100 | 171.490.901 | 100 | 172.348.355 | 100 | 853.209.784 | Kecamatan Semanding |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 979.534.273 | 100 | 984.431.944 | 100 | 989.354.104 | 100 | 994.300.875 | 100 | 999.272.379 | 100 | 4.946.893.575 | Kecamatan Tuban |
| | Persentase penyelesaian atas | N/A | 100 | 19.000.000 | 100 | 19.095.000 | 100 | 19.190.475 | 100 | 19.286.427 | 100 | 19.382.860 | 100 | 95.954.762 | Kecamatan Plumpang |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|--------|--|---------------------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | | Rp. |
| | permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 89.107.380 | 100 | 89.552.917 | 100 | 90.000.681 | 100 | 90.450.685 | 100 | 90.902.938 | 100 | 450.014.602 | Kecamatan Palang |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 12.100.000 | 100 | 12.160.500 | 100 | 12.221.303 | 100 | 12.282.409 | 100 | 12.343.821 | 100 | 61.108.033 | Kecamatan Widang |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 9.909.200 | 100 | 9.958.746 | 100 | 10.008.540 | 100 | 10.058.582 | 100 | 10.108.875 | 100 | 50.043.943 | Kecamatan Grabagan |
| | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | N/A | 100 | 15.967.000 | 100 | 16.046.835 | 100 | 16.127.069 | 100 | 16.207.705 | 100 | 16.288.743 | 100 | 80.637.352 | Kecamatan Jatirogo |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Kenduruan |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 99.991.100 | 90 | 100.491.056 | 94 | 100.993.511 | 97 | 101.498.478 | 100 | 102.005.971 | 100 | 504.980.115 | Kecamatan Jatirogo |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Bangilan |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Bancar |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Senori |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|---|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|-------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | ditangani (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Tambakboyo | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Singgahan | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Kerek | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Parengan | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 99.999.900 | 90 | 100.499.900 | 94 | 101.002.399 | 97 | 101.507.411 | 100 | 25.376.878 | 100 | 428.386.488 | Kecamatan Montong | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 102.014.948 | 100 | 192.390.573 | Kecamatan Soko | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 47.167.146 | 90 | 47.402.982 | 94 | 47.639.997 | 97 | 47.878.197 | 100 | 25.376.878 | 100 | 215.465.199 | Kecamatan Jenu | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 48.117.588 | 100 | 138.493.213 | Kecamatan Merakurak | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 28.467.000 | 90 | 28.609.335 | 94 | 28.752.382 | 97 | 28.896.144 | 100 | 25.376.878 | 100 | 140.101.738 | Kecamatan Rengel | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 147.948.900 | 90 | 148.688.645 | 94 | 149.432.088 | 97 | 150.179.248 | 100 | 29.040.624 | 100 | 625.289.505 | Kecamatan Semanding | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 150.930.144 | 100 | 241.305.769 | Kecamatan Tuban | |
| | Persentase | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|-------------|--|----------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | | | | | | | | | | | | | | | Plumpang |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | Kecamatan Palang | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 13.970.000 | 90 | 14.039.850 | 94 | 14.110.049 | 97 | 14.180.599 | 100 | 25.376.878 | 100 | 81.677.377 | Kecamatan Widang | |
| | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 14.251.502 | 100 | 104.627.127 | Kecamatan Grabagan | |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 95.735.500 | 100 | 96.214.178 | 100 | 96.695.248 | 100 | 97.178.725 | 100 | 97.664.618 | 100 | 483.488.269 | Kecamatan. Kenduruan | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 121.980.950 | 100 | 122.590.855 | 100 | 123.203.809 | 100 | 123.819.828 | 100 | 124.438.927 | 100 | 616.034.369 | Kecamatan Jatirogo | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 109.680.000 | 100 | 110.228.400 | 100 | 110.779.542 | 100 | 111.333.440 | 100 | 111.890.107 | 100 | 553.911.489 | Kecamatan Bangilan | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 96.530.500 | 100 | 97.013.153 | 100 | 97.498.218 | 100 | 97.985.709 | 100 | 98.475.638 | 100 | 487.503.218 | Kecamatan Bancar | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 97.745.000 | 100 | 98.233.725 | 100 | 98.724.894 | 100 | 99.218.518 | 100 | 99.714.611 | 100 | 493.636.747 | Kecamatan Senori | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 83.633.000 | 100 | 84.051.165 | 100 | 84.471.421 | 100 | 84.893.778 | 100 | 85.318.247 | 100 | 422.367.611 | Kecamatan Tambakboyo | |
| | Persentase desa | N/A | 100 | 79.020.000 | 100 | 79.415.100 | 100 | 79.812.176 | 100 | 80.211.236 | 100 | 80.612.293 | 100 | 399.070.804 | Kecamatan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|--|-----------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | | | | | | | | | | | | | | | Singgahan |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 94.587.000 | 100 | 95.059.935 | 100 | 95.535.235 | 100 | 96.012.911 | 100 | 96.492.975 | 100 | 477.688.056 | Kecamatan Kerek | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 55.399.950 | 100 | 55.676.950 | 100 | 55.955.334 | 100 | 56.235.111 | 100 | 56.516.287 | 100 | 279.783.632 | Kecamatan Parengan | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 85.125.000 | 100 | 85.550.625 | 100 | 85.978.378 | 100 | 86.408.270 | 100 | 86.840.311 | 100 | 429.902.585 | Kecamatan Montong | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 71.412.300 | 100 | 71.769.362 | 100 | 72.128.208 | 100 | 72.488.849 | 100 | 72.851.294 | 100 | 360.650.013 | Kecamatan Soko | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 99.340.500 | 100 | 99.837.203 | 100 | 100.336.389 | 100 | 100.838.070 | 100 | 101.342.261 | 100 | 501.694.422 | Kecamatan Jenu | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 89.953.750 | 100 | 90.403.519 | 100 | 90.855.536 | 100 | 91.309.814 | 100 | 91.766.363 | 100 | 454.288.982 | Kecamatan Merakurak | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 101.220.500 | 100 | 101.726.603 | 100 | 102.235.236 | 100 | 102.746.412 | 100 | 103.260.144 | 100 | 511.188.893 | Kecamatan Rengel | |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 187.273.000 | 100 | 188.209.365 | 100 | 189.150.412 | 100 | 190.096.164 | 100 | 191.046.645 | 100 | 945.775.585 | Kecamatan Semanding | |
| | Persentase desa | N/A | 100 | 376.321.500 | 100 | 378.203.108 | 100 | 380.094.123 | 100 | 381.994.594 | 100 | 383.904.567 | 100 | 1.900.517.891 | Kecamatan | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|--------|--|---------------------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | | Rp. |
| | yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | | | | | | | | | | | | | | Tuban |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 112.350.000 | 100 | 112.911.750 | 100 | 113.476.309 | 100 | 114.043.690 | 100 | 114.613.909 | 100 | 567.395.658 | Kecamatan Plumpnag |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 139.000.000 | 100 | 139.695.000 | 100 | 140.393.475 | 100 | 141.095.442 | 100 | 141.800.920 | 100 | 701.984.837 | Kecamatan Palang |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 121.849.800 | 100 | 122.459.049 | 100 | 123.071.344 | 100 | 123.686.701 | 100 | 124.305.134 | 100 | 615.372.029 | Kecamatan Widang |
| | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu (%) | N/A | 100 | 101.765.000 | 100 | 102.273.825 | 100 | 102.785.194 | 100 | 103.299.120 | 100 | 103.815.616 | 100 | 513.938.755 | Kecamatan Grabagan |
| Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum | Persentase pengaduan gangguan tratribum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 50.381.950 | 94 | 50.633.860 | 97 | 50.887.029 | 100 | 51.141.464 | 100 | 51.397.172 | 100 | 254.441.475 | Kecamatan Kenduruan |
| | Persentase pengaduan gangguan tratribum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 94 | 25.000.000 | 97 | 25.125.000 | 100 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 100.752.503 | Kecamatan Jatirogo |
| | Persentase pengaduan gangguan tratribum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 103.739.900 | 94 | 104.258.600 | 97 | 104.779.892 | 100 | 105.303.792 | 100 | 105.830.311 | 100 | 523.912.495 | Kecamatan Bangilan |
| | Persentase pengaduan gangguan | N/A | 90 | 94.817.000 | 94 | 95.291.085 | 97 | 95.767.540 | 100 | 96.246.378 | 100 | 96.727.610 | 100 | 478.849.614 | Kecamatan Bancar |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|---|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|-------------|--|--|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | tratibum yang ditindaklanjuti (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 50.280.000 | 94 | 50.531.400 | 97 | 50.784.057 | 100 | 51.037.977 | 100 | 51.293.167 | 100 | 253.926.601 | Kecamatan Senori | |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 51.099.850 | 94 | 51.355.349 | 97 | 51.612.126 | 100 | 51.870.187 | 100 | 52.129.538 | 100 | 258.067.049 | Kecamatan Tambakboyo | |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 115.590.000 | 94 | 116.167.950 | 97 | 116.748.790 | 100 | 117.332.534 | 100 | 117.919.196 | 100 | 583.758.470 | Kecamatan Singgahan | |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 54.719.800 | 94 | 54.993.399 | 97 | 55.268.366 | 97 | 55.544.708 | 100 | 55.822.431 | 100 | 276.348.704 | Kecamatan Kerek | |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 50.000.000 | 94 | 50.250.000 | 97 | 50.501.250 | 97 | 50.753.756 | 100 | 51.007.525 | 100 | 252.512.531 | Kecamatan Parengan | |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 15.000.000 | 94 | 25.000.000 | 97 | 25.125.000 | 100 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 100.752.503 | Kecamatan Montong | |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 49.999.850 | 94 | 50.249.849 | 97 | 50.501.098 | 100 | 50.753.604 | 100 | 51.007.372 | 100 | 252.511.774 | Kecamatan Soko | |
| | Persentase pengaduan | N/A | 90 | 15.000.000 | 94 | 52.597.018 | 97 | 52.860.003 | 100 | 53.124.303 | 100 | 53.389.925 | 100 | 211.971.250 | Kecamatan Jenu | |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|--------|--|------------------------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | | Rp. |
| | gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 79.384.150 | 94 | 79.781.071 | 97 | 80.179.976 | 100 | 80.580.876 | 100 | 80.983.780 | 100 | 400.909.853 | Kecamatan Merakurak |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 80.702.700 | 94 | 81.106.214 | 97 | 81.511.745 | 100 | 81.919.303 | 100 | 82.328.900 | 100 | 407.568.861 | Kecamatan Rengel |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 0 | 15.000.000 | 94 | 25.000.000 | 97 | 25.125.000 | 100 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 100.752.503 | Kecamatan Semanding |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 100.014.700 | 94 | 100.514.774 | 97 | 101.017.347 | 100 | 101.522.434 | 100 | 102.030.046 | 100 | 505.099.301 | Kecamatan Tuban |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 85.217.500 | 94 | 85.643.588 | 97 | 86.071.805 | 100 | 86.502.164 | 100 | 86.934.675 | 100 | 430.369.733 | Kecamatan Plumpang |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 69.992.500 | 94 | 70.342.463 | 97 | 70.694.175 | 100 | 71.047.646 | 100 | 71.402.884 | 100 | 353.479.667 | Kecamatan Palang |
| | Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | N/A | 90 | 56.314.700 | 94 | 56.596.274 | 97 | 56.879.255 | 100 | 57.163.651 | 100 | 57.449.469 | 100 | 284.403.349 | Kecamatan Grabagan |
| | Persentase | N/A | 90 | 40.177.500 | 94 | 40.378.388 | 97 | 40.580.279 | 100 | 40.783.181 | 100 | 40.987.097 | 100 | 202.906.445 | Kecamatan |

| MISI//TUJUAN/ SASARAN/STRA TEGI/POGRAM | INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/POGRAM | KONDISI AWAL RPJMD (Tahun 2020) | Target | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD (Tahun 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--|--|---|--------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--|-----|--|--------|
| | | | 2022 | Rp | 2023 | Rp | 2024 | Rp | 2025 | Rp | 2026 | Rp | Target | Rp. | | |
| | pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti (%) | | | | | | | | | | | | | | | Widang |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Halaman Sengaja Dikosongkan

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah didapatkan dari analisis terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Selanjutnya didapatkan kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan yang disajikan dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah disajikan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

| | Uraian | Proyeksi | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Kapasitas Riil kemampuan keuangan | 1.492.474.599.796.00 | 1.485.477.149.688.96 | 1.499.636.509.961.68 | 1.513.770.517.777.27 | 1.527.846.900.564.94 |
| 1.1. | Prioritas I | 702.014.422.152.00 | 711.694.402.855.06 | 674.135.074.164.83 | 736.389.494.705.21 | 748.456.663.390.58 |
| 1.2 | Prioritas II | 177.147.716.953.00 | 179.719.194.126.00 | 181.516.386.063.00 | 183.331.549.927.00 | 185.164.865.423.00 |
| 1.3 | Prioritas III | 613.312.460.691.00 | 594.063.552.707.90 | 643.985.049.733.85 | 594.049.473.145.06 | 594.225.371.751.36 |
| 2 | BELANJA DAERAH | 2.788.181.315.127.00 | 2.787.975.278.450.96 | 2.805.571.234.980.68 | 2.823.315.032.247.26 | 2.841.208.008.063.94 |
| 2.1 | Belanja Operasi | 1.869.413.028.879.00 | 1.882.511.372.415.25 | 1.895.712.720.453.11 | 1.909.017.963.142.91 | 1.922.427.998.837.04 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.119.157.350.507.00 | 1.124.753.137.259.53 | 1.130.376.902.945.83 | 1.136.028.787.460.56 | 1.141.708.931.397.86 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 660.491.663.507.00 | 667.096.580.142.07 | 673.767.545.943.49 | 680.505.221.402.93 | 687.310.273.616.96 |
| 2.1.3 | Belanja Hibah | 69.727.737.565.00 | 70.425.014.940.65 | 71.129.265.090.06 | 71.840.557.740.96 | 72.558.963.318.37 |
| 2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 20.036.277.300.00 | 20.236.640.073.00 | 20.439.006.473.73 | 20.643.396.538.47 | 20.849.830.503.85 |
| 2.2 | Belanja Modal | 435.109.751.670.00 | 439.460.849.186.70 | 441.355.457.678.57 | 442.769.012.255.35 | 443.696.702.377.91 |
| 2.2.1 | Belanja Modal - Tanah | 3.998.452.753.00 | 4.038.437.280.53 | 4.078.821.653.34 | 4.119.609.869.87 | 4.160.805.968.57 |
| 2.2.2 | Belanja Modal - Peralatan dan Mesin | 52.460.692.277.00 | 52.985.299.199.77 | 53.015.152.191.77 | 53.545.303.713.69 | 54.080.756.750.82 |
| 2.2.3 | Belanja Modal - Bangunan dan Gedung | 65.208.481.677.00 | 65.860.566.493.77 | 66.519.172.158.71 | 67.184.363.880.29 | 67.856.207.519.10 |
| 2.2.4 | Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan | 309.494.468.308.00 | 312.589.412.991.08 | 313.715.307.120.99 | 313.852.460.192.20 | 313.490.984.794.12 |
| 2.2.5 | Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya | 3.947.656.655.00 | 3.987.133.221.55 | 4.027.004.553.77 | 4.067.274.599.30 | 4.107.947.345.30 |
| 2.2.6 | Belanja Modal - Aset Lainnya | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Belanja tidak terduga | 32.655.477.729.00 | 11.550.741.340.90 | 10.283.009.475.08 | 9.146.943.387.1 | 8.105.975.499.54 |
| 2.3.1 | Belanja tidak terduga | 32.655.477.729.00 | 11.550.741.340.90 | 10.283.009.475.08 | 9.146.943.387.15 | 8.105.975.499.54 |
| 2.4 | Belanja Transfer | 451.003.056.849.00 | 454.452.315.508.11 | 458.220.047.373.92 | 462.381.113.461.86 | 466.977.331.349.46 |
| 2.4.1 | Bagi Hasil | 33.323.990.963.00 | 36.773.249.622.11 | 40.540.981.487.92 | 44.702.047.575.86 | 49.298.265.463.46 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 417.679.065.886.00 | 417.679.065.886.00 | 417.679.065.886.00 | 417.679.065.886.00 | 417.679.065.886.00 |

(Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban, 2021)

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tuban

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|--------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|---|----------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (P1) | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar (%) | 100 | 100 | 109.210.527.090 | 100 | 110.302.632.361 | 100 | 111.405.658.685 | 100 | 112.519.715.271 | 100 | 113.644.912.424 | 100 | 557.083.445.831 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (P1) | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah (%) | 100 | 100 | 43.541.435.400 | 100 | 43.976.849.754 | 100 | 44.416.618.252 | 100 | 44.860.784.434 | 100 | 45.309.392.278 | 100 | 222.105.080.118 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (P1) | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) | n/a | 64.19 | 34.794.195.000 | 65.22 | 35.142.136.950 | 66.31 | 35.493.558.320 | 67.26 | 35.848.493.903 | 68.21 | 36.206.978.842 | 68.21 | 177.485.363.014 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (P1) | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan (%) | 95 | 94.38 | 5.061.137.000 | 96.38 | 5.111.748.370 | 98 | 5.162.865.854 | 100 | 5.214.494.512 | 100 | 5.266.639.457 | 100 | 25.816.885.193 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (P1) | Persentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal (%) | n/a | 60 | 251.978.850 | 70 | 254.498.639 | 80 | 257.043.625 | 90 | 259.614.061 | 100 | 262.210.202 | 100 | 1.285.345.376 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 4 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (P1) | Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%) | 95.64 | 96.73 | 352.088.500 | 97.60 | 355.609.385 | 98.47 | 359.165.479 | 99.35 | 362.757.134 | 100 | 366.384.705 | 100 | 1.796.005.202 | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | | |
|------|---|---|--|--|--------------------------------------|--|----------------|------|----------------|-------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------------------------------|---|---|----|
| | | | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | target | Rp |
| 1 | 1 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN (P1) | Persentase Pelayanan Perijinan Operasional Pendidikan (%) | n/a | 0.02 | 22.705.000 | 0.02 | 22.932.050 | 0.02 | 23.161.371 | 0.02 | 23.392.984 | 0.02 | 23.626.914 | 0.02 | 115.818.319 | DINAS PENDIDIKAN | |
| 1 | 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1) | Persentase Fasyankes terakreditasi (%) | 44.9 | 56.8 | 16.004.400.250 | 65.5 | 16.164.444.253 | 70.1 | 16.326.088.695. | 75.6 | 16.489.349.581 | 80.6 | 16.654.243.077 | 80.6 | 81.638.525.857 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1) | Persentase Keluarga Sehat (%) | 25.51 | 25.80 | 91.233.507.900 | 26 | 92.145.842.979 | 26.50 | 93.067.301.409 | 27 | 93.997.974.423 | 28 | 94.937.954.167 | 28 | 465.382.580.878 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1) | Persentase peningkatan pendapatan retribusi laboratorium kesehatan (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (P1) | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah – laboratorium (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | | |
|------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|----------------------------------|---|--|----|
| | | | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (P1) | Persentase Fasyankes dengan tenaga kesehatan sesuai standar (%) | 46.15 | 64.10 | 5.500.331.000 | 74.36 | 5.555.334.310 | 74.36 | 5.610.887.653 | 92.31 | 5.666.996.530 | 100 | 5.723.666.495 | 100 | 28.057.215.988 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 2 | 4 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (P1) | Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat (%) | 60.09 | 65.08 | 527.973.950 | 70.07 | 533.253.690 | 75.05 | 538.586.226 | 80.04 | 543.972.089 | 85.03 | 549.411.810 | 85.03 | 2.693.197.764 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 2 | 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (P1) | Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (%) | 31.40 | 40.55 | 2.711.076.500 | 49.70 | 2.738.187.265 | 58.84 | 2.765.569.138 | 67.99 | 2.793.224.829 | 77.13 | 2.821.157.077 | 77.13 | 13.829.214.809 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 3 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (P1) | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di Kabupaten Tuban(%) | 84.36 | 85.23 | 8.874.100.000 | 86.42 | 8.962.841.000 | 87.01 | 9.052.469.410 | 88.2 | 9.142.994.104 | 88.9 | 9.234.424.045 | 88.9 | 45.266.828.559 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| 1 | 3 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (P1) | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi(%) | 45.2 | 55.10 | 6.864.989.000 | 61.50 | 6.933.638.890 | 67.30 | 7.002.975.279 | 72.15 | 7.073.005.032 | 85 | 7.143.735.082 | 85 | 35.018.343.283 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| 1 | 3 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (P1) | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh | 82.74 | 84.22 | 7.650.331.265 | 84.98 | 7.726.834.578 | 85.74 | 7.804.102.923 | 86.50 | 7.882.143.953 | 87.28 | 7.960.965.392 | 87.28 | 39.024.378.111 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL (P1) | Presentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan Regional untuk menunjang tingkat layanan yang telah direncanakan. (%) | n/a | 70% | 1.800.000.000 | 72% | 1.818.000.000 | 74% | 1.836.180.000 | 76% | 1.854.541.800 | 78% | 1.873.087.218 | 78 | 9.181.809.018 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 3 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (P1) | Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic (%) | 75.32 | 77.79 | 5.398.635.400 | 80.74 | 5.452.621.754 | 83.49 | 5.507.147.972 | 86.25 | 5.562.219.451 | 88.29 | 5.617.841.646 | 88.29 | 27.538.466.223 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 3 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (P1) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 3 | 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (P1) | Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik (%) | 58.92 | 18.64 | 5.622.228.772 | 22.64 | 5.678.451.060 | 26.64 | 5.735.235.570 | 30.64 | 5.792.587.926 | 34.64 | 5.850.513.805 | 34.64 | 28.679.017.133 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|---|----|--|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|------|----------------------------------|--|----|
| | | | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| 1 | 3 | 8 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG (P1) | Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota (%) | 100 | 20 | 270.000.000 | 40 | 272.700.000 | 60 | 275.427.000 | 80 | 278.181.270 | 100 | 280.963.083 | 100 | 1.377.271.353 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| 1 | 3 | 9 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (P1) | Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | 2 | 22.487.202.000 | 1 | 22.712.074.020 | 1 | 22.939.194.760 | 1 | 23.168.586.708 | 1 | 23.400.272.575 | 6 | 114.707.330.063 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| 1 | 3 | 9 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (P1) | Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| 1 | 3 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (P1) | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten (%) | 88.88 | 92.18 | 192.156.600.000 | 94.61 | 195.935.002.478 | 96.43 | 153.219.079.785 | 98.25 | 210.265.340.381 | 100 | 217.072.267.526 | 100 | 968.648.290.171 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| 1 | 3 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (P1) | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%) | 10.8 | 18.2 | 136.095.000 | 22.3 | 137.455.950 | 26.4 | 138.830.510 | 30.4 | 140.218.815 | 34.5 | 141.621.003 | 34.5 | 694.221.277 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|---|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---|----------------------------------|---------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 1 | 3 | 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (P1) | Rasio proyek yang menjadi kewenangannya tanpa kecelakaan konstruksi (%) | 0 | 0 | 54.072.500 | 0 | 54.613.225 | 0 | 55.159.357 | 0 | 55.710.951 | 0 | 56.268.060 | 0 | 275.824.093 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 3 | 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (P1) | Persentase Peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah bermotor / alat berat (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 3 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (P1) | Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (%) | 76.47 | 22.34 | 1.605.859.600 | 43.62 | 1.621.918.196 | 64.89 | 1.638.137.378 | 82.98 | 1.654.518.752 | 100 | 1.671.063.939 | 100 | 8.191.497.865 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 4 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (P1) | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota (%) | n/a | 100 | 500.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | 100 | 1.313.000.000 | 100 | 1.326.130.000 | 100 | 1.339.391.300 | 100 | 5.778.521.300 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 4 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (P1) | Persentase masyarakat yang membutuhkan rumah. termasuk rumah komersil. (%) | 14.71 | 1.19 | 100.000.000 | 1.49 | 100.000.000 | 1.64 | 100.000.000 | 1.64 | 100.000.000 | 1.79 | 100.000.000 | 7.7 | 500.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 1 | 4 | 3 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (P1) | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%) | 6.15 | 0.12 | 100.000.000 | 0.12 | 110.000.000 | 0.12 | 111.100.000 | 0.12 | 112.211.000 | 0.12 | 113.333.110 | 0.60 | 546.644.110 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 4 | 3 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (P1) | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya (%) | 97.50 | 9.73 | 13.584.647.000 | 21.90 | 13.720.493.470 | 21.90 | 13.857.698.405 | 21.90 | 13.996.275.389 | 21.90 | 14.136.238.143 | 97.32 | 69.295.352.406 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 4 | 4 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (P1) | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar kawasan kumuh (%) | n/a | 80 | 1.300.000.000 | 60 | 1.313.000.000 | 40 | 1.326.130.000 | 20 | 1.339.391.300 | 0 | 1.352.785.213 | 0 | 6.631.306.513 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 4 | 5 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) (P1) | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) | 9.39 | 10 | 93.408.000.000 | 20 | 94.342.080.000 | 35 | 95.285.500.800 | 50 | 96.238.355.808 | 70 | 97.200.739.366 | 70 | 476.474.675.974 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 5 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|--------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 1 | 5 | 2 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P1) | Persentase Pelanggaran gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) | 100 | 100 | 4.732.348.400 | 100 | 4.779.671.884 | 100 | 4.827.468.603 | 100 | 4.875.743.289 | 100 | 4.924.500.722 | 100 | 24.139.732.897 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P1) | Persentase Perda dan perkara yang ditegakan (%) | 100 | 100 | 101.988.600 | 100 | 103.008.486 | 100 | 104.038.571 | 100 | 105.078.957 | 100 | 106.129.746 | 100 | 520.244.360 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 1 | 5 | 3 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (P1) | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) | n/a | 77 | 198.999.700 | 77 | 200.989.697 | 77 | 202.999.594 | 77 | 205.029.590 | 77 | 207.079.886 | 77 | 1.015.098.467 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik (%) | n/a | 100 | 2.010.474.300 | 100 | 2.030.579.043 | 100 | 2.050.884.833 | 100 | 2.071.393.682 | 100 | 2.092.107.619 | 100 | 10.255.439.477 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana (%) | n/a | 100 | 1.740.847.650 | 100 | 1.758.256.127 | 100 | 1.775.838.688 | 100 | 1.793.597.075 | 100 | 1.811.533.045 | 100 | 8.880.072.584 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 4 | PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (P1) | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit) | n/a | 5-7 | 249.026.200 | 5-7 | 251.516.462 | 5-7 | 254.031.627 | 5-7 | 256.571.943 | 5-7 | 259.137.662 | 5-7 | 1.270.283.894 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 1 | 6 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|--------|------|----------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 1 | 6 | 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (P1) | Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (%) | 90.3 | 91.5 | 1.067.574.250 | 91.5 | 1.078.249.993 | 92 | 1.089.032.492 | 93 | 1.099.922.817 | 94 | 1.110.922.046 | 094 | 5.445.701.598 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1 | 6 | 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (P1) | Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar (%) | 97 | 97.5 | 9.356.081.800 | 97.5 | 9.449.642.618 | 98 | 9.544.139.044 | 99 | 9.639.580.435 | 100 | 9.735.976.239 | 100 | 47.725.420.136 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1 | 6 | 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (P1) | Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%) | 92 | 93 | 11.184.720.550 | 93 | 11.296.567.756 | 93 | 11.409.533.433 | 93 | 11.523.628.767 | 93 | 11.638.865.055 | 93 | 57.053.315.561 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1 | 6 | 6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA (P1) | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota (%) | 100 | 100 | 168.294.250 | 100 | 169.977.193 | 100 | 171.676.964 | 100 | 173.393.734 | 100 | 175.127.671 | 100 | 858.469.812 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 1 | 6 | 7 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (P1) | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara (%) | 100 | 100 | 79.949.475 | 100 | 80.748.970 | 100 | 81.556.459 | 100 | 82.372.024 | 100 | 83.195.744 | 100 | 407.822.673 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|--------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 7 | 2 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (P3) | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%) | n/a | 10 | 103.200.000 | 11 | 104.232.000 | 12 | 105.274.320 | 13 | 106.327.063 | 14 | 107.390.334 | 14 | 526.423.717 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2 | 7 | 3 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P2) | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%) | 100 | 20 | 2.698.822.000 | 21 | 2.725.810.220 | 22 | 2.753.068.322 | 23 | 2.780.599.005 | 24 | 2.808.404.995 | 24 | 13.766.704.543 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2 | 7 | 4 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA (P3) | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%) | 72 | 70 | 2.179.840.000 | 71 | 2.201.638.400 | 72 | 2.223.654.784 | 73 | 2.245.891.332 | 74 | 2.268.350.245 | 74 | 11.119.374.761 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2 | 7 | 5 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (P3) | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%) | 13 | 5 | 755.138.000 | 6 | 762.689.380 | 7 | 770.316.274 | 8 | 778.019.437 | 9 | 785.799.631 | 9 | 3.851.962.721 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2 | 8 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 2 | PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P3) | Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD (%) | 12.5 | 15 | 225.316.500 | 15 | 227.569.665 | 16 | 229.845.362 | 17 | 232.143.815 | 18 | 234.465.253 | 18 | 1.149.340.595 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---|----------------------------------|---------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 8 | 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (P3) | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio) | 0.007 | 0.006 | 235.802.300 | 0.006 | 238.160.323 | 0.005 | 240.541.926 | 0.005 | 242.947.345 | 0.004 | 245.376.819 | 0.004 | 1.202.828.714 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 8 | 4 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA (P3) | Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 100 | 45.020.000 | 100 | 45.470.200 | 100 | 45.924.902 | 100 | 46.384.151 | 100 | 46.847.993 | 100 | 229.647.246 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 8 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK (P3) | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Terpilah (%) | 65 | 70 | 152.428.000 | 70 | 153.952.280 | 75 | 155.491.803 | 80 | 157.046.721 | 85 | 158.617.188 | 85 | 777.535.992 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 8 | 6 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) (P3) | Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%) | 9 | 9 | 172.615.100 | 9 | 174.341.251 | 15 | 176.084.664 | 20 | 177.845.510 | 25 | 179.623.965 | 25 | 880.510.490 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 8 | 7 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (P3) | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%) | 100 | 100 | 164.434.000 | 100 | 166.078.340 | 100 | 167.739.123 | 100 | 169.416.515 | 100 | 171.110.680 | 100 | 838.778.658 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 9 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN (P2) | Persentase infrastruktur pangan yang digunakan (%) | 63.16 | 69.57 | 6.427.114.600 | 72 | 6.491.385.746 | 74.07 | 6.556.299.603 | 75.86 | 6.621.862.599 | 77.42 | 6.688.081.225 | 77.42 | 32.784.743.774 | DINAS KETAHANAN PANGAN. PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 9 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (P2) | Persentase ketersediaan pangan masyarakat (%) | 0.00039 | 52 | 560.773.000 | 57 | 566.380.730 | 58 | 572.044.537 | 59 | 577.764.983 | 60 | 583.542.632 | 60 | 2.860.505.882 | DINAS KETAHANAN PANGAN. PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 9 | 4 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN (P2) | Persentase desa tahan pangan (%) | 75.3 | 80.18 | 94.640.000 | 84.76 | 95.586.400 | 87.80 | 96.542.264 | 90.85 | 97.507.687 | 93.90 | 98.482.764 | 93.90 | 482.759.114 | DINAS KETAHANAN PANGAN. PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 9 | 5 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (P2) | Persentase keamanan pangan (%) | 96 | 92 | 168.669.650 | 94 | 170.356.347 | 96 | 172.059.910 | 98 | 173.780.509 | 100 | 175.518.314 | 100 | 860.384.730 | DINAS KETAHANAN PANGAN. PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 10 | | URUSAN PERTANAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI (P3) | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%) | 90 | 90 | 25.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 50.000.000 | 90 | 250.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|--------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 10 | 4 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (P3) | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%) | n/a | 100 | 25.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 250.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2 | 1 | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (P2) | Persentase penyelesaian dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH (%) | 100 | 100 | 2.861.056.950 | 100 | 2.889.667.520 | 100 | 2.918.564.195 | 100 | 2.947.749.837 | 100 | 2.977.227.335 | 100 | 14.594.265.836 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 11 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (P2) | Luas kawasan KEHATI yang dikelola (Ha) | n/a | 3 | 600.122.750 | 4 | 606.123.978 | 5 | 612.185.217 | 6 | 618.307.069 | 7 | 624.490.140 | 26 | 3.061.229.154 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 11 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (P3) | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota (%) | 80 | 100 | 28.693.100 | 100 | 28.980.031 | 100 | 29.269.831 | 100 | 29.562.530 | 100 | 29.858.155 | 100 | 146.363.647 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 11 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) (P3) | Persenrase persetujuan lingkungan yang diselesaikan (%) | 100 | 100 | 181.086.500 | 100 | 182.897.365 | 100 | 184.726.339 | 100 | 186.573.602 | 100 | 188.439.338 | 100 | 923.723.144 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 11 | 8 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT (P3) | Jumlah kader lingkungan hidup yang terbentuk (Kader) | 200 | 100 | 50.000.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 165.000.000 | 100 | 585.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 11 | 9 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT (P3) | Jumlah Lembaga yang peduli dan Berbudaya Lingkungan (Lembaga (278 sekolah adiwiyata dan 50 RW/RW berstatus KIB)) | 328 | 34 | 479.500.000 | 34 | 484.295.000 | 34 | 489.137.950 | 34 | 494.029.330 | 34 | 498.969.623 | 34 | 2.445.931.902 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP (P3) | Persentase Pelayanan Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti (%) | 100 | 95 | 91.853.500 | 95 | 92.772.035 | 95 | 93.699.755 | 95 | 94.636.753 | 95 | 95.583.120 | 95 | 468.545.164 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (P2) | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%) | 54.03 | 56.90 | 8.142.697.776 | 67 | 8.224.124.754 | 78 | 8.306.366.001 | 89 | 8.389.429.661 | 100 | 8.473.323.958 | 100 | 41.535.942.150 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan(%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (P2) | Perekaman KTP Elektronik (%) | 95.56 | 99.30 | 2.154.747.850 | 99.50 | 2.176.295.329 | 99.60 | 2.198.058.282 | 99.70 | 2.220.038.865 | 99.80 | 2.242.239.253 | 99.80 | 10.991.379.578 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|----------------------------------|------------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 12 | 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (P2) | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%) | 15.45 | 45 | 319.860.000 | 50 | 323.058.600 | 55 | 326.289.186 | 60 | 329.552.078 | 65 | 332.847.599 | 65 | 1.631.607.462 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL (P2) | Kepemilikan akta kelahiran (%) | 96.41 | 97.90 | 299.999.900 | 99 | 302.999.899 | 100 | 306.029.898 | 100 | 309.090.197 | 100 | 312.181.099 | 100 | 1.530.300.993 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (P3) | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%) | 6,52 | 11.90 | 130.999.950 | 14.29 | 76,000,000 | 16.67 | 77,000,000.00 | 19.05 | 77,500,000.00 | 21.43 | 78,000,000.00 | 21.43 | 439,499,950.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (P3) | persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%) | 100 | 100 | 520.000.000 | 100 | 581,509,950 | 100 | 587,085,049.00 | 100 | 593,225,899.00 | 100 | 599,433,158.00 | 100 | 2,881,254,056.00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (P3) | Persentase Penyajian Data Kependudukan (%) | 100 | 100 | 52.000.000 | 100 | 52.520.000 | 100 | 53.045.200 | 100 | 53.575.652 | 100 | 54.111.409 | 100 | 265.252.261 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 2 | PROGRAM PENATAAN DESA (P3) | Prosentase desa yang statusnya meningkat (%) | 9.65 | 9.97 | 55.963.500 | 9.97 | 56.523.135 | 9.97 | 57.088.366 | 9.97 | 57.659.250 | 9.97 | 58.235.843 | 9.97 | 285.470.094 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 13 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (P2) | Persentase Peningkatan Kerjasama Desa (%) | 30.7 | 10 | 428.849.500 | 10 | 433.137.995 | 10 | 437.469.375 | 10 | 441.844.069 | 10 | 446.262.509 | 50 | 2.187.563.448 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 4 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (P2) | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabilitas (%) | 58.27 | 64.63 | 6.131.343.700 | 70.74 | 6.192.657.137 | 77.17 | 6.254.583.708 | 83.6 | 6.317.129.545 | 90.03 | 6.380.300.841 | 90.03 | 31.276.014.932 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN AN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (P2) | Persentase Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan (%) | 7.72 | 14.47 | 1.557.161.440 | 16.08 | 1.572.733.054 | 17.68 | 1.588.460.385 | 19.29 | 1.604.344.989 | 20.90 | 1.620.388.439 | 20.90 | 7.943.088.307 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 1 | 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK (P3) | Jumlah Angka Kelahiran TFR (Total Fertility Rate) (%) | 2.04 | 2.04 | 288.769.000 | 2.03 | 534.402.000 | 2.02 | 504.402.000 | 2.01 | 375.202.000 | 2.01 | 350.202.000 | 2.01 | 2.052.977.000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 3 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) (P3) | Persentase kebutuhan per-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 9 | 10.8 | 6.671.647.700 | 10.5 | 6.907.480.000 | 10 | 7.046.030.000 | 9.5 | 7.458.680.000 | 9 | 7.309.980.000 | 9 | 35.393.817.700 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|---|--------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 14 | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) (P3) | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun (usia) | 20.9 | 21 | 5.605.534.500 | 21 | 5.249.728.712 | 21 | 5.268.094.819 | 21 | 5.112.830.087 | 21 | 5.415.997.208 | 21 | 26.652.185.326 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (P2) | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (ratio/ruas jalan) | 0.52 | 0.50 | 35.553.101.521 | 0.48 | 35.908.632.536 | 0.46 | 36.267.718.862 | 0.44 | 36.630.396.050 | 0.42 | 36.996.700.011 | 0.42 | 181.356.548.980 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/Umum (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir (%) | n/a | 10% | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 15 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (P3) | Persentase kapal yang memiliki PAS kapal (%) | 59.49 | 70 | 48.455.000 | 70 | 48.939.550 | 70 | 49.428.946 | 70 | 49.923.235 | 70 | 50.422.467 | 70 | 247.169.198 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |
| 2 | 1 | 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (P3) | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) | 99.19 | 75 | 1.758.195.550 | 85 | 1.775.777.506 | 90 | 1.793.535.281 | 95 | 1.811.470.633 | 100 | 1.829.585.340 | 100 | 8.968.564.309 | DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA. STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 | 16 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (P3) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA. STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 | 16 | 3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA (P2) | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) | 100 | 100 | 2.986.924.000 | 100 | 3.016.793.240 | 100 | 3.046.961.172 | 100 | 3.077.430.784 | 100 | 3.108.205.092 | 100 | 15.236.314.288 | DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA. STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 | 16 | 3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA (P2) | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) | 92.73 | 20 | 1.203.466.449 | 20 | 1.215.501.113 | 20 | 1.227.656.125 | 20 | 1.239.932.686 | 20 | 1.252.332.013 | 20 | 6.138.888.386 | DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA. STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 | 1 | 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---|----------------------------------|---------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 17 | 4 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI (P3) | Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (%) | 0.35 | 16.25 | 28.000.000 | 16.50 | 28.280.000 | 16.75 | 28.562.800 | 17.00 | 28.848.428 | 17.25 | 29.136.912 | 17.25 | 142.828.140 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 4 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (P3) | Persentase Koperasi Sehat (%) | 0.08 | 0.2 | 102.999.900 | 0.25 | 104.029.899 | 0.30 | 105.070.198 | 0.35 | 106.120.900 | 0.40 | 107.182.109 | 0.40 | 525.403.006 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 5 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (P3) | Persentase SDM Koperasi yang berkualitas (%) | 0.06 | 0.07 | 651.752.000 | 0.08 | 658.269.520 | 0.09 | 664.852.215 | 0.010 | 671.500.737 | 0.011 | 678.215.745 | 0.011 | 3.324.590.217 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI (P2) | Persentase Koperasi yang meningkat berkualitas (%) | 13.00 | 14.66 | 147.840.000 | 15.28 | 149.318.400 | 15.92 | 150.811.584 | 16.60 | 152.319.700 | 19.85 | 153.842.897 | 19.85 | 754.132.581 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM) (P2) | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (Rasio) | 0.27 | 1.50 | 634.983.350 | 3.02 | 941.333.184 | 4.57 | 950.746.515 | 6.14 | 960.253.980 | 7.5 | 969.856.520 | 7.5 | 4.457.173.550 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (P2) | Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha (%) | 1.79 | 1.50 | 445.889.751 | 3.02 | 650.348.649 | 4.57 | 656.852.135 | 6.14 | 663.420.656 | 7.50 | 670.054.863 | 7.50 | 3.086.566.054 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 18 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (P3) | Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan (%) | 0 | 100 | 215.732.500 | 100 | 217.889.825 | 100 | 220.068.723 | 100 | 222.269.410 | 100 | 224.492.105 | 100 | 1.100.452.563 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (P3) | Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal (%) | 24.01 | 30 | 290.420.000 | 30 | 293.324.200 | 30 | 296.257.442 | 30 | 299.220.016 | 30 | 302.212.217 | 30 | 1.481.433.875 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL (P2) | Persentase Jumlah Perijinan dan non perijinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP (%) | 100 | 100 | 285.747.000 | 100 | 288.604.470 | 100 | 291.490.515 | 100 | 294.405.420 | 100 | 297.349.474 | 100 | 1.457.596.879 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Orang Pribadi (%) | N/A | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 50 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 | 18 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (P3) | Cakupan pengendalian pelaku usaha (%) | 2.17 | 26.71 | 522.725.000 | 26.71 | 527.952.250 | 26.71 | 533.231.773 | 26.71 | 538.564.090 | 26.71 | 543.949.731 | 26.71 | 2.666.422.844 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (P2) | Persentase jumlah pemohon ijin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal (%) | n/a | 80 | 162.642.500 | 85 | 164.268.925 | 90 | 165.911.614 | 93 | 167.570.730 | 97 | 169.246.438 | 97 | 829.640.207 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|--------|------|---------------|------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN (P2) | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) | 100 | 100 | 1.101.000.000 | 100 | 1.112.010.000 | 100 | 1.123.130.100 | 100 | 1.134.361.401 | 100 | 1.145.705.015 | 100 | 5.616.206.516 | DINAS KEBUDAYAAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 | 19 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN (P2) | Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga (%) | 75 | 80 | 4.332.872.300 | 80 | 4.376.201.023 | 85 | 4.419.963.033 | 85 | 4.464.162.664 | 90 | 4.508.804.290 | 90 | 22.102.003.310 | DINAS KEBUDAYAAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 | 19 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Olahraga (%) | N/A | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS KEBUDAYAAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 | 19 | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITASN KAPASITAS KEPRAMUKAAN (P3) | Persentase Organisasi Kepramukaan (Gugus depan) yang meningkat kapasitasnya (%) | 1.93 | 1.93 | 1.300.000.000 | 1.93 | 1.313.000.000 | 2 | 1.326.130.000 | 2 | 1.339.391.300 | 2 | 1.352.785.213 | 2 | 6.631.306.513 | DINAS KEBUDAYAAN. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 | 20 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|--------|------|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|---------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 20 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (P3) | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%) | 17 | 25 % | 628.816.250 | 50 | 635.104.413 | 75 | 641.455.457 | 100 | 647.870.011 | 100 | 654.348.711 | 100 | 6.415.189.683 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 | 21 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (P3) | Tingkat keamanan informasi perangkat daerah (%) | n/a | 50 | 127.666.000 | 55 | 128.942.660 | 65 | 130.232.087 | 70 | 131.534.407 | 75 | 132.849.752 | 75 | 651.224.906 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (P2) | Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola (Objek) | 11 | 11 | 780.000.000 | 11 | 787.800.000 | 11 | 795.678.000 | 11 | 803.634.780 | 11 | 811.671.128 | 11 | 3.978.783.908 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 | 22 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL (P2) | Persentase peningkatan Jumlah pelaku kesenian daerah (%) | N/A | 10 | 170.000.000 | 10 | 171.700.000 | 10 | 173.417.000 | 10 | 175.151.170 | 10 | 176.902.682 | 50 | 867.170.852 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|---|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|---------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 22 | 4 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH (P3) | Jumlah Dokumen Sejarah yang terinventarisir (Dokumen) | 4 | 4 | 100.000.000 | 5 | 101.000.000 | 6 | 102.010.000 | 7 | 103.030.100 | 8 | 104.060.401 | 30 | 510.100.501 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 | 22 | 5 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA (P3) | Jumlah cagar budaya yang dikelola (Unit) | 83 | 83 | 89.450.000 | 87 | 90.344.500 | 91 | 91.247.945 | 96 | 92.160.424 | 100 | 93.082.029 | 100 | 456.284.898 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 | 22 | 6 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN (P3) | Jumlah museum yang dikelola (unit) | 1 | 1 | 983.450.900 | 1 | 993.285.409 | 1 | 1.003.218.263 | 1 | 1.013.250.446 | 1 | 1.023.382.950 | 1 | 5.016.587.968 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 | 2 | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 2 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (P3) | Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat (%) | 5.11 | 38.93 | 1.380.082.150 | 38.94 | 1.393.882.972 | 38.95 | 1.407.821.801 | 38.93 | 1.421.900.019 | 38.96 | 1.436.119.019 | 38.96 | 7.039.805.961 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 3 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO (P3) | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk (Rasio) | 1:9 | 1:10 | 20.000.000 | 1:10 | 46.000.000 | 1:11 | 46.000.000 | 1:12 | 46.000.000 | 1:13 | 46.000.000 | 1:13 | 204.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 2 | 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (P3) | Tingkat Arsip Inaktif dan Statis yang diolah (%) | 32 | 39 | 470.286.300 | 47 | 474.989.163 | 54 | 479.739.055 | 61 | 484.536.445 | 68 | 489.381.810 | 68 | 2.398.932.772 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|---|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 2 | 24 | 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (P3) | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%) | 43.58 | 20 | 116.000.350 | 20 | 117.160.354 | 20 | 118.331.957 | 20 | 119.515.277 | 20 | 120.710.429 | 100 | 591.718.367 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (P2) | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota (ton) | 21.530.80 | 24.650.61 | 2.929.075.000 | 26.376.16 | 2.958.365.750 | 28.222.49 | 2.987.949.408 | 30.198.06 | 3.017.828.902 | 32.311.93 | 3.048.007.191 | 90.732.4726 | 14.941.226.250 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (P2) | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota (ton) | 41.781.129 | 45.933.50 | 2.434.603.700 | 47770.84 | 2.458.949.737 | 49.608.18 | 2.483.539.234 | 51.445.52 | 2.508.374.627 | 53.282.86 | 2.533.458.373 | 53.282.86 | 12.418.925.671 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|---|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---|----------------------------------|---------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 3 | 25 | 5 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (P2) | Jumlah Kawasan yang Dipantau (Kali) | 0 | 8 | 147.185.000 | 10 | 148.656.850 | 12 | 150.143.419 | 14 | 151.644.853 | 16 | 153.161.301 | 16 | 750.791.422 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 6 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2) | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) | 34.738.09 | 35.788.05 | 1.531.877.800 | 36.324.87 | 1.547.196.578 | 36.869.74 | 1.562.668.544 | 37.422.79 | 1.578.295.229 | 37.984.12906 | 1.594.078.182 | 112.276.6574 | 7.814.116.333 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA (P2) | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%) | 1 | 1 | 864.538.200 | 1 | 873.183.582 | 1 | 881.915.418 | 1 | 890.734.572 | 1 | 899.641.918 | 1 | 4.410.013.690 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 3 | 26 | 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (P2) | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (%) | 5 | 5 | 410.000.000 | 5 | 414.100.000 | 5 | 418.241.000 | 5 | 422.423.410 | 5 | 426.647.644 | 5 | 2.091.412.054 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 3 | 26 | 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (P3) | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%) | 2 | 2 | 100.000.000 | 2 | 101.000.000 | 2 | 102.010.000 | 2 | 103.030.100 | 2 | 104.060.401 | 2 | 510.100.501 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 3 | 26 | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (P2) | Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata (%) | 36 | 36 | 1.010.000.000 | 39 | 1.020.100.000 | 42 | 1.030.301.000 | 45 | 1.040.604.010 | 48 | 1.051.010.050 | 48 | 5.152.015.060 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |
| 3 | 26 | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (P2) | Persentase sarana pertanian yang digunakan (%) | 87.85 | 70.04 | 5.981.779.600 | 80.05 | 6.041.597.396 | 80.04 | 6.102.013.370 | 80.14 | 6.163.033.504 | 80.13 | 6.224.663.839 | 80.13 | 30.513.087.708 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 27 | 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (P2) | Persentase prasarana pertanian yang digunakan (%) | 36.22 | 60.47 | 30.049.211.575 | 65.41 | 30.349.703.691 | 72.05 | 30.653.200.728 | 79.74 | 30.959.732.735 | 90.49 | 31.269.330.062 | 90.49 | 153.281.178.791 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 27 | 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Hewan Sebelum Dipotong (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| 3 | 27 | 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (P2) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Hewan Sesudah Dipotong (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 3 | 27 | 4 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (P3) | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | 31.58 | 24.36 | 710.587.600 | 22.74 | 717.693.476 | 21.25 | 724.870.411 | 19.85 | 732.119.115 | 18.53 | 739.440.306 | 18.53 | 3.624.710.908 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 27 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (P3) | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%) | 20 | 20 | 874.651.590 | 20 | 883.398.106 | 20 | 892.232.087 | 20 | 901.154.408 | 20 | 910.165.952 | 20 | 4.461.602.143 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 27 | 6 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (P3) | Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota (%) | 80 | 80 | 20.000.000 | 80 | 50.000.000 | 80 | 50.500.000 | 80 | 51.005.000 | 80 | 51.515.050 | 80 | 203.020.050 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 27 | 7 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (P3) | Persentase kelompok tani kelas utama (%) | 5.86 | 6.7 | 2.113.449.550 | 7.8 | 2.134.584.046 | 8.6 | 2.155.929.886 | 9.3 | 2.177.489.185 | 10 | 2.199.264.077 | 10 | 10.780.716.743 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 2 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (P3) | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%) | n/a | 50 | 20.000.000 | 60 | 20.200.000 | 62 | 20.402.000 | 70 | 20.606.020 | 72 | 20.812.080 | 72 | 102.020.100 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 3 | 30 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (P3) | Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri i (%) | 70 | 71.48 | 8.244.273.650 | 73.68 | 8.326.716.387 | 73.68 | 8.409.983.550 | 75.98 | 8.494.083.386 | 78.98 | 8.579.024.220 | 78.98 | 42.054.081.192 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (P3) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN | |
| 3 | 30 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (P3) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN | |
| 3 | 30 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (P3) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10% | | 50% | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN | |
| 3 | 30 | 4 | PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (P2) | Persentase Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Bapokting (%) | <13 | <13 | 464.294.100 | <13 | 568.937.041 | <13 | 574.626.411 | <13 % | 580.372.676 | <13 % | 586.176.402 | <13 % | 2.774.406.630.00 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|---|--------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------|---------------|--------|---|----------------------------------|----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 3 | 30 | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR (P3) | Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%) | n/a | 3 | 492.760.500 | 1 | 497.688.105 | 1 | 502.664.986 | 1 % | 507.691.636 | 1 % | 512.768.552 | 7 % | 2.513.573.779 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 6 | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (P3) | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%) | n/a | 98 | 389.505.650 | 98 | 393.400.707 | 98 | 397.334.714 | 98 % | 401.308.061 | 98 % | 405.321.141 | 98 % | 1.986.870.272 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 6 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (P3) | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 7 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (P2) | Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya (%) | n/a | 1.02 | 502.694.841 | 1.10 | 707.721.789 | 1.10 | 714.799.007 | 1.10 % | 721.946.997 | 1.10 % | 729.166.467 | 5.42 % | 3.376.329.102 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 2 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (P3) | Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkatkan Skala Usahanya (%) | 1.17 | 1.04 | 2.121.783.920 | 1.10 | 2.443.001.759 | 1.10 | 2.467.431.777 | 1.20 | 2.492.106.095 | 1.20 | 2.517.027.156 | 1.20 | 12.041.350.706 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 3 | 31 | 3 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA (P3) | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Kabupaten/Kota (%) | 0 | 52 | 11.260.000 | 54 | 11.372.600 | 56 | 11.486.326 | 58 | 11.601.189 | 60 | 11.717.201 | 60 | 57.437.316 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|---|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 3 | 31 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (P3) | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Industri Kecil dan Menengah) | 0 | 11.000 | 31.542.100 | 11.500 | 31.857.521 | 12.000 | 32.176.096 | 12.500 | 32.497.857 | 13.000 | 32.822.836 | 13.000 | 160.896.410 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 3 | 3 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | 3 | Program Pembangunan Kawasan transmigrasi (P3) | Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan (%) | 0 | 20 | 315.200.000 | 21 | 318.352.000 | 22 | 321.535.520 | 23 | 324.750.875 | 24 | 327.998.384 | 24 | 1.607.836.779 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (P2) | Persentase Rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (%) | 53.13 | 84 | 2.170.206.850 | 85 | 2.191.908.919 | 86 | 2.213.828.008 | 87 | 2.235.966.288 | 88 | 2.258.325.951 | 88 | 11.070.236.015 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (P2) | Jumlah rancangan kebijakan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%) | 17 | 28 | 32.916.518.550 | 30 | 33.245.683.736 | 31 | 33.578.140.573 | 32 | 33.913.921.979 | 33 | 34.253.061.198 | 33 | 167.907.326.035 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (P3) | Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam (%) | 86.67 | 80 | 8.046.144.800 | 81 | 8.126.606.248 | 82 | 8.207.872.310 | 83 | 8.289.951.034 | 84 | 8.372.850.544 | 84 | 41.043.424.936 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (P3) | Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi Pembangunan (%) | n/a | 92 | 758.031.553 | 92 | 765.611.869 | 92 | 773.267.987 | 92 | 781.000.667 | 92 | 788.810.674 | 92 | 3.866.722.750 | SEKRETARIAT DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 4 | 2 | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (P3) | Persentase fasilitasi Rancangan Perda yang disetujui sesuai SOP (%) | 88.88 | 80 | 38.606.452.900 | 88 | 38.992.517.429 | 89 | 39.382.442.603 | 89 | 39.776.267.029 | 90 | 40.174.029.700 | 90 | 196.931.709.661 | SEKRETARIAT DPRD |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (P2) | Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD (%) | 91.67 | 90 | 3.534.264.950 | 90 | 3.569.607.600 | 90 | 3.605.303.675 | 90 | 3.641.356.712 | 90 | 3.677.770.279 | 90 | 18.028.303.217 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 | 1 | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (P2) | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah (%) | 0 | 90 | 1.810.543.400 | 90 | 1.828.648.834 | 90 | 1.846.935.322 | 90 | 1.865.404.676 | 90 | 1.884.058.722 | 90 | 9.235.590.954 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 | 1 | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (P2) | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah (%) | 0 | 90 | 828.621.000 | 90 | 836.907.210 | 90 | 845.276.282 | 90 | 853.729.045 | 90 | 862.266.335 | 90 | 4.226.799.872 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 | 2 | | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|---|----------------------------------|-------------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 5 | 2 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P3) | Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah (%) | n/a | 100 | 486.398.103.478 | 100 | 465.293.367.089 | 100 | 514.025.635.224 | 100 | 462.889.569.136 | 100 | 461.848.601.248 | 100 | 2.409.430.843.269 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P3) | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%) | 87.05 | 97.23 | | 97.02 | | 96.76 | | 96.83 | | 96.83 | | 96.83 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P3) | Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | | WTP | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (P3) | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD sebelumnya (Rasio) | 14.31 | 5.29 | | 2.77 | | 2.98 | | 3.24 | | 3.17 | | 3.17 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P3) | Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat (%) | 27.81 | 10 | 5.954.425.500 | 10 | 6.013.969.755 | 10 | 6.074.109.453 | 10 | 6.134.850.547 | 10 | 6.196.199.053 | 10 | 30.373.554.307 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P3) | Manajemen Aset (Dokumen) | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | | |
|----------|----------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------|---------------|----------------------------------|---|--|----|
| | | | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | target | Rp |
| 5 | 2 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P3) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| 5 | 2 | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (P3) | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan (%) | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| 5 | 2 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (P3) | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%) | 0.16% | 100 | 5.767.685.080 | 100 | 5.825.361.931 | 100 | 5.883.615.550 | 100 | 5.942.451.706 | 96.83 | 6.001.876.223 | 96.83 | 29.420.990.489 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| 5 | 3 | | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (P3) | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar(PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) (%) | 79.62 | 90 | 1.447.868.000 | 93 | 1.462.346.680 | 94 | 1.476.970.147 | 97 | 1.491.739.848 | 99 | 1.506.657.247 | 99 | 7.385.581.922 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 | 3 | 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (P3) | Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) (Rasio) | 4.79 | 4 | 803.246.950 | 4 | 811.279.420 | 5 | 819.392.214 | 6 | 827.586.136 | 6 | 835.861.997 | 6 | 4.097.366.716 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 | 3 | 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (P3) | Prosentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (%) | 80 | 80 | 839.494.500 | 80 | 847.889.445 | 80 | 856.368.339 | 80 | 864.932.023 | 80 | 873.581.343 | 80 | 4.282.265.650 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|--------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 5 | 3 | 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (P3) | Prosentase ASN dengan Evaluasi Kinerja Optimal (%) | 80 | 80 | 335.520.000 | 83 | 338.875.200 | 85 | 342.263.952 | 88 | 345.686.592 | 90 | 349.143.457 | 90 | 1.711.489.201 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 | 4 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (P3) | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan kesehatan) (%) | 32 | 7 | 1.202.926.000 | 8 | 1.214.955.260 | 9 | 1.227.104.813 | 10 | 1.239.375.861 | 11 | 1.251.769.619 | 11 | 6.136.131.553 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 | 5 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 2 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (P3) | Jumlah inovasi yang dihasilkan (Inovasi) | 0 | 5 | 2.267.535.250 | 5 | 2.290.210.603 | 5 | 2.313.112.709 | 5 | 2.336.243.836 | 5 | 2.359.606.274 | 5 | 11.566.708.671 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (P2) | Presentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang di tindaklanjuti (%) | 92 | 90 | 2.318.025.300 | 91 | 2.341.205.553 | 93 | 2.364.617.609 | 95 | 2.388.263.785 | 96 | 2.412.146.422 | 96 | 11.824.258.669 | INSPEKTORAT |
| 6 | 1 | 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI (P2) | Persentase pengawasan terhadap perumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah (%) | 100 | 100 | 1.012.171.500 | 100 | 1.022.293.215 | 100 | 1.032.516.147 | 100 | 1.042.841.309 | 100 | 1.053.269.722 | 100 | 5.163.091.892 | INSPEKTORAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|---|----------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 35.017.500 | 100 | 35.192.588 | 100 | 35.368.550 | 100 | 35.545.393 | 100 | 35.723.120 | 100 | 176.847.151 | KECAMATAN MONTONG |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 9.950.000 | 100 | 9.999.750 | 100 | 10.049.749 | 100 | 10.099.997 | 100 | 10.150.497 | 100 | 50.249.994 | KECAMATAN KEREK |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.075.000 | 100 | 15.150.375 | 100 | 15.226.127 | 100 | 15.302.258 | 100 | 75.753.759 | KECAMATAN SINGGAHAN |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 12.900.000 | 100 | 12.964.500 | 100 | 13.029.323 | 100 | 13.094.469 | 100 | 13.159.941 | 100 | 65.148.233 | KECAMATAN TAMBAKBOYO |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 28.154.000 | 100 | 28.294.770 | 100 | 28.436.244 | 100 | 28.578.425 | 100 | 28.721.317 | 100 | 142.184.756 | KECAMATAN SENORI |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.060.000 | 100 | 12.120.300 | 100 | 12.180.902 | 100 | 12.241.806 | 100 | 60.603.008 | KECAMATAN BANCAR |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 18.600.000 | 100 | 18.693.000 | 100 | 18.786.465 | 100 | 18.880.397 | 100 | 18.974.799 | 100 | 93.934.662 | KECAMATAN BANGILAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.060.000 | 100 | 12.120.300 | 100 | 12.180.902 | 100 | 12.241.806 | 100 | 60.603.008 | KECAMATAN KENDURUAN |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 12.800.000 | 100 | 12.864.000 | 100 | 12.928.320 | 100 | 12.992.962 | 100 | 13.057.926 | 100 | 64.643.208 | KECAMATAN PARENGAN |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK(P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 16.800.000 | 100 | 16.884.000 | 100 | 16.968.420 | 100 | 17.053.262 | 100 | 17.138.528 | 100 | 84.844.211 | KECAMATAN SOKO |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 16.586.120 | 100 | 16.669.051 | 100 | 16.752.396 | 100 | 16.836.158 | 100 | 16.920.339 | 100 | 83.764.063 | KECAMATAN JENU |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 8.370.000 | 100 | 8.411.850 | 100 | 8.453.909 | 100 | 8.496.179 | 100 | 8.538.660 | 100 | 42.270.598 | KECAMATAN MERAKURAK |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 13.194.550 | 100 | 13.260.523 | 100 | 13.326.825 | 100 | 13.393.459 | 100 | 13.460.427 | 100 | 66.635.784 | KECAMATAN RENGEL |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 168.944.048 | 100 | 169.788.768 | 100 | 170.637.712 | 100 | 171.490.901 | 100 | 172.348.355 | 100 | 853.209.784 | KECAMATAN SEMANDING |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 979.534.273 | 100 | 984.431.944 | 100 | 989.354.104 | 100 | 994.300.875 | 100 | 999.272.379 | 100 | 4.946.893.575 | KECAMATAN TUBAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 19.000.000 | 100 | 19.095.000 | 100 | 19.190.475 | 100 | 19.286.427 | 100 | 19.382.860 | 100 | 95.954.762 | KECAMATAN PLUMPANG |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 89.107.380 | 100 | 89.552.917 | 100 | 90.000.681 | 100 | 90.450.685 | 100 | 90.902.938 | 100 | 450.014.602 | KECAMATAN PALANG |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 12.100.000 | 100 | 12.160.500 | 100 | 12.221.303 | 100 | 12.282.409 | 100 | 12.343.821 | 100 | 61.108.033 | KECAMATAN WIDANG |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 9.909.200 | 100 | 9.958.746 | 100 | 10.008.540 | 100 | 10.058.582 | 100 | 10.108.875 | 100 | 50.043.943 | KECAMATAN GRABAGAN |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (P3) | Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%) | n/a | 100 | 15.967.000 | 100 | 16.046.835 | 100 | 16.127.069 | 100 | 16.207.705 | 100 | 16.288.743 | 100 | 80.637.352 | KECAMATAN JATIROGO |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN KENDURUAN |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN JATIROGO |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN BANGILAN |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN BANCAR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|--------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN SENORI |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN TAMBAKBOYO |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN SINGGAHAN |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN KEREK |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN PARENGAN |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN MONTONG |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN SOKO |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN JENU |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN MERAKURAK |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN RENGEL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|--------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|---|----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN SEMANDING |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | 80 | 80 | 2.353.724.594 | 80 | 2.365.493.217 | 80 | 2.377.320.683 | 80 | 2.389.207.286 | 80 | 2.401.153.323 | 80 | 11.886.899.103 | KECAMATAN SEMANDING |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN TUBAN |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | 80 | 80 | 10.013.414.962 | 80 | 10.063.482.037 | 80 | 10.113.799.447 | 80 | 10.164.368.444 | 80 | 10.215.190.286 | 80 | 50.570.255.176 | KECAMATAN TUBAN |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN PLUMPANG |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN PALANG |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | 80 | 80 | 799.504.947 | 80 | 803.502.472 | 80 | 807.519.984 | 80 | 811.557.584 | 80 | 815.615.372 | 80 | 4.037.700.359 | KECAMATAN PALANG |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN WIDANG |
| 7 | 1 | 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (P3) | persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%) | n/a | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.500.000 | 100 | 101.002.500 | 100 | 101.507.513 | 100 | 102.015.050 | 100 | 505.025.063 | KECAMATAN GRABAGAN |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 50.381.950.00 | 94 | 50.633.860 | 97 | 50.887.029 | 100 | 51.141.464 | 100 | 51.397.172 | 100 | 254.441.475 | KECAMATAN KENDURUAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|----|----------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 15.000.000.00 | 94 | 25.000.000 | 97 | 25.125.000 | 100 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 100.752.503 | KECAMATAN JATIROGO |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 103.739.900.00 | 94 | 104.258.600 | 97 | 104.779.892 | 100 | 105.303.792 | 100 | 105.830.311 | 100 | 523.912.495 | KECAMATAN BANGILAN |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 94.817.000.00 | 94 | 95.291.085 | 97 | 95.767.540 | 100 | 96.246.378 | 100 | 96.727.610 | 100 | 478.849.614 | KECAMATAN BANCAR |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM(P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 50.280.000.00 | 94 | 50.531.400 | 97 | 50.784.057 | 100 | 51.037.977 | 100 | 51.293.167 | 100 | 253.926.601 | KECAMATAN SENORI |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 51.099.850.00 | 94 | 51.355.349 | 97 | 51.612.126 | 100 | 51.870.187 | 100 | 52.129.538 | 100 | 258.067.049 | KECAMATAN TAMBAKBOYO |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 115.590.000.00 | 94 | 116.167.950 | 97 | 116.748.790 | 100 | 117.332.534 | 100 | 117.919.196 | 100 | 583.758.470 | KECAMATAN SINGGAHAN |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 54.719.800.00 | 94 | 54.993.399 | 97 | 55.268.366 | 97 | 55.544.708 | 100 | 55.822.431 | 100 | 276.348.704 | KECAMATAN KEREK |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 50.000.000.00 | 94 | 50.250.000 | 97 | 50.501.250 | 97 | 50.753.756 | 100 | 51.007.525 | 100 | 252.512.531 | KECAMATAN PARENGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|--------|----|----------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 15.000.000.00 | 94 | 25.000.000 | 97 | 25.125.000 | 100 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 100.752.503 | KECAMATAN MONTONG |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 49.999.850.00 | 94 | 50.249.849 | 97 | 50.501.098 | 100 | 50.753.604 | 100 | 51.007.372 | 100 | 252.511.774 | KECAMATAN SOKO |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 15.000.000.00 | 94 | 52.597.018 | 97 | 52.860.003 | 100 | 53.124.303 | 100 | 53.389.925 | 100 | 211.971.250 | KECAMATAN JENU |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 79.384.150.00 | 94 | 79.781.071 | 97 | 80.179.976 | 100 | 80.580.876 | 100 | 80.983.780 | 100 | 400.909.853 | KECAMATAN MERAKURAK |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 80.702.700.00 | 94 | 81.106.214 | 97 | 81.511.745 | 100 | 81.919.303 | 100 | 82.328.900 | 100 | 407.568.861 | KECAMATAN RENGEL |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 0 | 15.000.000.00 | 94 | 25.000.000 | 97 | 25.125.000 | 100 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 100.752.503 | KECAMATAN SEMANDING |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 100.014.700.00 | 94 | 100.514.774 | 97 | 101.017.347 | 100 | 101.522.434 | 100 | 102.030.046 | 100 | 505.099.301 | KECAMATAN TUBAN |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan transtibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 85.217.500.00 | 94 | 85.643.588 | 97 | 86.071.805 | 100 | 86.502.164 | 100 | 86.934.675 | 100 | 430.369.733 | KECAMATAN PLUMPANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|----|---------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 69.992.500.00 | 94 | 70.342.463 | 97 | 70.694.175 | 100 | 71.047.646 | 100 | 71.402.884 | 100 | 353.479.667 | KECAMATAN PALANG |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 56.314.700.00 | 94 | 56.596.274 | 97 | 56.879.255 | 100 | 57.163.651 | 100 | 57.449.469 | 100 | 284.403.349 | KECAMATAN GRABAGAN |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (P3) | Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%) | n/a | 90 | 40.177.500.00 | 94 | 40.378.388 | 97 | 40.580.279 | 100 | 40.783.181 | 100 | 40.987.097 | 100 | 202.906.445 | KECAMATAN WIDANG |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN KENDURUAN |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 99.991.100 | 90 | 100.491.056 | 94 | 100.993.511 | 97 | 101.498.478 | 100 | 102.005.971 | 100 | 504.980.115 | KECAMATAN JATIROGO |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN BANGILAN |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN BANCAR |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN SENORI |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN TAMBAKBOYO |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|---|----------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN SINGGAHAN |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN KEREK |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN PARENGAN |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 99.999.900 | 90 | 100.499.900 | 94 | 101.002.399 | 97 | 101.507.411 | 100 | 25.376.878 | 100 | 428.386.488 | KECAMATAN MONTONG |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 102.014.948 | 100 | 192.390.573 | KECAMATAN SOKO |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 47.167.146 | 90 | 47.402.982 | 94 | 47.639.997 | 97 | 47.878.197 | 100 | 25.376.878 | 100 | 215.465.199 | KECAMATAN JENU |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 48.117.588 | 100 | 138.493.213 | KECAMATAN MERAKURAK |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 28.467.000 | 90 | 28.609.335 | 94 | 28.752.382 | 97 | 28.896.144 | 100 | 25.376.878 | 100 | 140.101.738 | KECAMATAN RENGEL |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 147.948.900 | 90 | 148.688.645 | 94 | 149.432.088 | 97 | 150.179.248 | 100 | 29.040.624 | 100 | 625.289.505 | KECAMATAN SEMANDING |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 150.930.144 | 100 | 241.305.769 | KECAMATAN TUBAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN PLUMPANG |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 25.376.878 | 100 | 115.752.503 | KECAMATAN PALANG |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 13.970.000 | 90 | 14.039.850 | 94 | 14.110.049 | 97 | 14.180.599 | 100 | 25.376.878 | 100 | 81.677.377 | KECAMATAN WIDANG |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (P3) | Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani (%) | n/a | 90 | 15.000.000 | 90 | 25.000.000 | 94 | 25.125.000 | 97 | 25.250.625 | 100 | 14.251.502 | 100 | 104.627.127 | KECAMATAN GRABAGAN |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 95.735.500 | 100 | 96.214.178 | 100 | 96.695.248 | 100 | 97.178.725 | 100 | 97.664.618 | 100 | 483.488.269 | KECAMATAN. KENDURUAN |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 121.980.950 | 100 | 122.590.855 | 100 | 123.203.809 | 100 | 123.819.828 | 100 | 124.438.927 | 100 | 616.034.369 | KECAMATAN JATIROGO |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 109.680.000 | 100 | 110.228.400 | 100 | 110.779.542 | 100 | 111.333.440 | 100 | 111.890.107 | 100 | 553.911.489 | KECAMATAN BANGILAN |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 96.530.500 | 100 | 97.013.153 | 100 | 97.498.218 | 100 | 97.985.709 | 100 | 98.475.638 | 100 | 487.503.218 | KECAMATAN BANCAR |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 97.745.000 | 100 | 98.233.725 | 100 | 98.724.894 | 100 | 99.218.518 | 100 | 99.714.611 | 100 | 493.636.747 | KECAMATAN SENORI |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 83.633.000 | 100 | 84.051.165 | 100 | 84.471.421 | 100 | 84.893.778 | 100 | 85.318.247 | 100 | 422.367.611 | KECAMATAN TAMBAKBOYO |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 79.020.000 | 100 | 79.415.100 | 100 | 79.812.176 | 100 | 80.211.236 | 100 | 80.612.293 | 100 | 399.070.804 | KECAMATAN SINGGAHAN |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 94.587.000 | 100 | 95.059.935 | 100 | 95.535.235 | 100 | 96.012.911 | 100 | 96.492.975 | 100 | 477.688.056 | KECAMATAN KEREK |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 55.399.950 | 100 | 55.676.950 | 100 | 55.955.334 | 100 | 56.235.111 | 100 | 56.516.287 | 100 | 279.783.632 | KECAMATAN PARENGAN |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 85.125.000 | 100 | 85.550.625 | 100 | 85.978.378 | 100 | 86.408.270 | 100 | 86.840.311 | 100 | 429.902.585 | KECAMATAN MONTONG |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 71.412.300 | 100 | 71.769.362 | 100 | 72.128.208 | 100 | 72.488.849 | 100 | 72.851.294 | 100 | 360.650.013 | KECAMATAN SOKO |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 99.340.500 | 100 | 99.837.203 | 100 | 100.336.389 | 100 | 100.838.070 | 100 | 101.342.261 | 100 | 501.694.422 | KECAMATAN JENU |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 89.953.750 | 100 | 90.403.519 | 100 | 90.855.536 | 100 | 91.309.814 | 100 | 91.766.363 | 100 | 454.288.982 | KECAMATAN MERAKURAK |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 101.220.500 | 100 | 101.726.603 | 100 | 102.235.236 | 100 | 102.746.412 | 100 | 103.260.144 | 100 | 511.188.893 | KECAMATAN RENDEL |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 187.273.000 | 100 | 188.209.365 | 100 | 189.150.412 | 100 | 190.096.164 | 100 | 191.046.645 | 100 | 945.775.585 | KECAMATAN SEMANDING |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 376.321.500 | 100 | 378.203.108 | 100 | 380.094.123 | 100 | 381.994.594 | 100 | 383.904.567 | 100 | 1.900.517.891 | KECAMATAN TUBAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 112.350.000 | 100 | 112.911.750 | 100 | 113.476.309 | 100 | 114.043.690 | 100 | 114.613.909 | 100 | 567.395.658 | KECAMATAN PLUMPNAG |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 139.000.000 | 100 | 139.695.000 | 100 | 140.393.475 | 100 | 141.095.442 | 100 | 141.800.920 | 100 | 701.984.837 | KECAMATAN PALANG |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 121.849.800 | 100 | 122.459.049 | 100 | 123.071.344 | 100 | 123.686.701 | 100 | 124.305.134 | 100 | 615.372.029 | KECAMATAN WIDANG |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (P3) | Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu | n/a | 100 | 101.765.000 | 100 | 102.273.825 | 100 | 102.785.194 | 100 | 103.299.120 | 100 | 103.815.616 | 100 | 513.938.755 | KECAMATAN GRABAGAN |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (P3) | Presentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideology pancasila dan karakter (%) | 100 | 80 | 656.908.100 | 81 | 663.477.181 | 82 | 670.111.953 | 83 | 676.813.072 | 85 | 683.581.203 | 85 | 3.350.891.509 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (P3) | presentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan. etika. budaya dan politik | 74.63 | 60 | 1.862.120.900 | 62 | 1.880.742.109 | 64 | 1.899.549.530 | 65 | 1.918.545.025 | 67 | 1.937.730.476 | 67 | 9.498.688.040 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|--------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| 8 | 1 | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (P3) | Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan (%) | 100 | 71 | 372.921.400 | 72 | 376.650.614 | 73 | 380.417.120 | 74 | 384.221.291 | 75 | 388.063.504 | 75 | 1.902.273.930 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (P3) | Persentase Peningkatan Masyarakat yang terlibat dalam Kewaspadaan dini masyarakat (%) | 100 | 71 | 150.852.000 | 72 | 152.360.520 | 73 | 153.884.125 | 74 | 155.422.966 | 75 | 156.977.196 | 75 | 769.496.808 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (P3) | Persentase Potensi Konflik Sosial Dan Politik Yang ditindaklanjuti (%) | 100 | 75 | 472.637.800 | 80 | 477.364.178 | 85 | 482.137.820 | 90 | 486.959.198 | 95 | 491.828.790 | 95 | 2.410.927.786 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 78.18 | 80.01 Poin | 654.106.968.437 | 80.50 Poin | 655.415.182.374 | 81.00 Poin | 656.726.012.739 | 81.50 Poin | 658.039.464.764 | 82.00 Poin | 659.355.543.694 | 82.00 Poin | 3.283.643.172.007 | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 Poin | 77.102.122.112 | 80.50 Poin | 77.256.326.356 | 81.00 Poin | 77.410.839.009 | 81.50 Poin | 77.565.660.687 | 82.00 Poin | 77.720.792.008 | 82.00 Poin | 387.055.740.172 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik | 9.1 | 27.3 | 48.046.063.650 | 45.5 | 48.142.155.777 | 63.6 | 48.238.440.089 | 81.8 | 48.334.916.969 | 100 | 48.431.586.803 | 100 | 241.193.163.288 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit (%) | 53.8 | | | 69.2 | 4.200.000.000 | 76.9 | 5.040.000.000 | 92.3 | 6.048.000.000 | 100 | 7.257.600.000 | 100 | 22.545.600.000 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit (%) | 61.5 | 69.2 | 178.539.888.742 | 76.9 | 178.896.968.519 | 84.6 | 179.254.762.457 | 92.3 | 179.613.271.981 | 100 | 179.972.498.525 | 100 | 896.277.390.225 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|--------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan | n/a | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 | 25.387.356.594 | 80.50 | 25.438.131.307 | 81.00 | 25.489.007.570 | 81.50 | 25.539.985.585 | 82.00 | 25.591.065.556 | 82.00 Poin | 127.445.546.612 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 | 7.674.722.110 | 80.50 | 7.690.071.554 | 81.00 | 7.705.451.697 | 81.50 | 7.720.862.601 | 82.00 | 7.736.304.326 | 82.00 Poin | 38.527.412.288 | SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 76.52 | 80.01 | 4.161.864.711 | 80.50 | 4.170.188.440 | 81.00 | 4.178.528.817 | 81.50 | 4.186.885.875 | 82.00 | 4.195.259.647 | 82.00 Poin | 20.892.727.490 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 | 8.801.170.608 | 80.50 | 8.818.772.949 | 81.00 | 8.836.410.495 | 81.50 | 8.854.083.316 | 82.00 | 8.871.791.483 | 82.00 Poin | 44.182.228.851 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 | 29.594.266.047 | 80.50 | 29.653.454.579 | 81.00 | 29.712.761.488 | 81.50 | 29.772.187.011 | 82.00 | 29.831.731.385 | 82.00 Poin | 148.564.400.511 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 81.39 | 80.01 | 6.387.988.120 | 80.50 | 6.400.764.096 | 81.00 | 6.413.565.624 | 81.50 | 6.426.392.756 | 82.00 | 6.439.245.541 | 82.00 Poin | 32.067.956.138 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 | 21.952.537.186 | 80.50 | 21.996.442.260 | 81.00 | 22.040.435.145 | 81.50 | 22.084.516.015 | 82.00 | 22.128.685.047 | 82.00 Poin | 110.202.615.654 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 71.65 | 80.01 | 7.107.214.756 | 80.50 | 7.121.429.186 | 81.00 | 7.135.672.044 | 81.50 | 7.149.943.388 | 82.00 | 7.164.243.275 | 82.00 Poin | 35.678.502.648 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 | 14.388.593.584 | 80.50 | 14.417.370.771 | 81.00 | 14.446.205.513 | 81.50 | 14.475.097.924 | 82.00 | 14.504.048.120 | 82.00 Poin | 72.231.315.911 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 | 6.294.270.851 | 80.50 | 6.306.859.393 | 81.00 | 6.319.473.111 | 81.50 | 6.332.112.058 | 82.00 | 6.344.776.282 | 82.00 Poin | 31.597.491.695 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 77.72 | 80.01 | 8.555.146.843 | 80.50 | 8.572.257.137 | 81.00 | 8.589.401.651 | 81.50 | 8.606.580.454 | 82.00 | 8.623.793.615 | 82.00 Poin | 42.947.179.700 | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 81.39 | 80.01 | 4.949.906.434 | 80.50 | 4.959.806.247 | 81.00 | 4.969.725.859 | 81.50 | 4.979.665.311 | 82.00 | 4.989.624.642 | 82.00 Poin | 24.848.728.493 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | N/A | 80.01 | 3.321.053.631 | 80.50 | 3.327.695.738 | 81.00 | 3.334.351.130 | 81.50 | 3.341.019.832 | 82.00 | 3.347.701.872 | 82.00 Poin | 16.671.822.203 | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 80.20 | 80.01 | 26.683.026.617 | 80.50 | 26.736.392.670 | 81.00 | 26.789.865.456 | 81.50 | 26.843.445.186 | 82.00 | 26.897.132.077 | 82.00 Poin | 133.949.862.006 | SEKRETARIAT DAERAH |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 79.46 | 80.01 | 38.229.989.447 | 80.50 | 38.306.449.426 | 81.00 | 38.383.062.325 | 81.50 | 38.459.828.449 | 82.00 | 38.536.748.106 | 82.00 Poin | 191.916.077.753 | SEKRETARIAT DPRD |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 80.29 | 80.01 | 5.480.109.413 | 80.50 | 5.491.069.632 | 81.00 | 5.502.051.771 | 81.50 | 5.513.055.875 | 82.00 | 5.524.081.986 | 82.00 Poin | 27.510.368.677 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 88.76 | 80.01 | 22.624.852.497 | 80.50 | 22.670.102.202 | 81.00 | 22.715.442.406 | 81.50 | 22.760.873.291 | 82.00 | 22.806.395.038 | 82.00 Poin | 113.577.665.434 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 81.05 | 80.01 | 18.303.081.886 | 80.50 | 18.339.688.050 | 81.00 | 18.376.367.426 | 81.50 | 18.413.120.161 | 82.00 | 18.449.946.401 | 82.00 Poin | 91.882.203.923 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 80.71 | 80.01 | 6.401.575.277 | 80.50 | 6.414.378.428 | 81.00 | 6.427.207.184 | 81.50 | 6.440.061.599 | 82.00 | 6.452.941.722 | 82.00 Poin | 32.136.164.210 | INSPEKTORAT |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 72.00 | 80.01 | 2.861.178.289 | 80.50 | 2.866.900.646 | 81.00 | 2.872.634.447 | 81.50 | 2.878.379.716 | 82.00 | 2.884.136.475 | 82.00 Poin | 14.363.229.572 | KECAMATAN KENDURUAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 70.04 | 80.01 | 2.795.079.282 | 80.50 | 2.800.669.441 | 81.00 | 2.806.270.779 | 81.50 | 2.811.883.321 | 82.00 | 2.817.507.088 | 82.00 Poin | 14.031.409.911 | KECAMATAN JAITROGO |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 70.57 | 80.01 | 2.541.416.319 | 80.50 | 2.546.499.152 | 81.00 | 2.551.592.150 | 81.50 | 2.556.695.334 | 82.00 | 2.561.808.725 | 82.00 Poin | 12.758.011.680 | KECAMATAN BANGILAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 74.31 | 80.01 | 2.523.170.307 | 80.50 | 2.528.216.648 | 81.00 | 2.533.273.081 | 81.50 | 2.538.339.627 | 82.00 | 2.543.416.306 | 82.00 Poin | 12.666.415.969 | KECAMATAN BANCAR |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 66.10 | 80.01 | 3.050.062.244 | 80.50 | 3.056.162.368 | 81.00 | 3.062.274.693 | 81.50 | 3.068.399.243 | 82.00 | 3.074.536.041 | 82.00 Poin | 15.311.434.589 | KECAMATAN SENORI |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 68.33 | 80.01 | 2.441.096.533 | 80.50 | 2.445.978.726 | 81.00 | 2.450.870.684 | 81.50 | 2.455.772.425 | 82.00 | 2.460.683.970 | 82.00 Poin | 12.254.402.337 | KECAMATAN TAMBAKBOYO |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|---------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---|----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 68.76 | 80.01 | 2.154.216.538 | 80.50 | 2.158.524.971 | 81.00 | 2.162.842.021 | 81.50 | 2.167.167.705 | 82.00 | 2.171.502.040 | 82.00 Poin | 10.814.253.276 | KECAMATAN SINGGAHAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 71.63 | 80.01 | 2.431.966.868 | 80.50 | 2.436.830.802 | 81.00 | 2.441.704.463 | 81.50 | 2.446.587.872 | 82.00 | 2.451.481.048 | 82.00 Poin | 12.208.571.053 | KECAMATAN KEREK |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 67.25 | 80.01 | 2.919.799.463 | 80.50 | 2.925.639.062 | 81.00 | 2.931.490.340 | 81.50 | 2.937.353.321 | 82.00 | 2.943.228.027 | 82.00 Poin | 14.657.510.213 | KECAMATAN PARENGAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 70.5400 | 80.01 | 2.155.405.235 | 80.50 | 2.159.716.045 | 81.00 | 2.164.035.478 | 81.50 | 2.168.363.549 | 82.00 | 2.172.700.276 | 82.00 Poin | 10.820.220.582 | KECAMATAN MONTONG |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 75.06 | 80.01 | 3.081.934.394 | 80.50 | 3.088.098.263 | 81.00 | 3.094.274.459 | 81.50 | 3.100.463.008 | 82.00 | 3.106.663.934 | 82.00 Poin | 15.471.434.059 | KECAMATAN SOKO |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 74.09 | 80.01 | 2.369.893.358 | 80.50 | 2.374.633.145 | 81.00 | 2.379.382.411 | 81.50 | 2.384.141.176 | 82.00 | 2.388.909.458 | 82.00 Poin | 11.896.959.548 | KECAMATAN JENU |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 70.07 | 80.01 | 2.542.800.381 | 80.50 | 2.547.885.982 | 81.00 | 2.552.981.754 | 81.50 | 2.558.087.717 | 82.00 | 2.563.203.893 | 82.00 Poin | 12.764.959.726 | KECAMATAN MERAKURAK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|--------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|----------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 72.95 | 80.01 | 2.557.417.757 | 80.50 | 2.562.532.593 | 81.00 | 2.567.657.658 | 81.50 | 2.572.792.973 | 82.00 | 2.577.938.559 | 82.00 Poin | 12.838.339.539 | KECAMATAN RENGEL |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 75.34 | 80.01 | 5.052.122.104 | 80.50 | 5.062.226.348 | 81.00 | 5.072.350.801 | 81.50 | 5.082.495.503 | 82.00 | 5.092.660.494 | 82.00 Poin | 25.361.855.249 | KECAMATAN SEMANDING |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 78.70 | 80.01 | 14.927.315.915 | 80.50 | 14.957.170.547 | 81.00 | 14.987.084.888 | 81.50 | 15.017.059.058 | 82.00 | 15.047.093.176 | 82.00 Poin | 74.935.723.583 | KECAMATAN TUBAN |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 72.08 | 80.01 | 2.733.455.123 | 80.50 | 2.738.922.033 | 81.00 | 2.744.399.877 | 81.50 | 2.749.888.677 | 82.00 | 2.755.388.454 | 82.00 Poin | 13.722.054.165 | KECAMATAN PLUMPANG |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 73.60 | 80.01 | 3.725.259.502 | 80.50 | 3.732.710.021 | 81.00 | 3.740.175.441 | 81.50 | 3.747.655.792 | 82.00 | 3.755.151.104 | 82.00 Poin | 18.700.951.859 | KECAMATAN PALANG |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 70.99 | 80.01 | 2.497.963.059 | 80.50 | 2.502.958.985 | 81.00 | 2.507.964.903 | 81.50 | 2.512.980.833 | 82.00 | 2.518.006.795 | 82.00 Poin | 12.539.874.575 | KECAMATAN WIDANG |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 68.59 | 80.01 | 2.349.990.126 | 80.50 | 2.354.690.106 | 81.00 | 2.359.399.486 | 81.50 | 2.364.118.285 | 82.00 | 2.368.846.522 | 82.00 Poin | 11.797.044.526 | KECAMATAN GRABAGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2020 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|--------------|--|-------------------------------------|---|--|--------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | (Tahun 0) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD 2026 | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | | Rp | |
| X | XX | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin) | 79.00 | 80.01 | 3.901.402.981 | 80.50 | 3.909.205.787 | 81.00 | 3.917.024.199 | 81.50 | 3.924.858.247 | 82.00 | 3.932.707.963 | 82.00 Poin | 19.585.199.177 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| TOTAL | | | | | | 2.788.181.315.127.00 | | 2.787.975.278.450.96 | | 2.805.571.234.980.68 | | 2.823.315.032.247.26 | | 2.841.208.008.063.94 | | 14.050.421.507.239 | | |

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. 1 Matriks Indikator Kinerja dan Target Kinerja Daerah Kabupaten Tuban

| No | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | Target Tahun Ke | | | | |
|----------|--|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index) | - | 74,80 | 75,13 | 75,47 | 75,80 | 76,14 |
| 1,1 | Indek Kualitas Layanan Infrastruktur | % | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 |
| 1,2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | - | 63,23 | 63,44 | 63,65 | 63,86 | 64,07 |
| 1,3 | Indeks Resiko Bencana | - | 139 | 133 | 127 | 121 | 115 |
| 1,4 | Indeks Toleransi /Kerukunan Hidup | - | 89,5 | 90,26 | 91,03 | 91,81 | 92,59 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,07-4,31 | 4,32-4,42 | 4,43-4,86 | 4,87-5,01 | 5,02-5,39 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | % | 15 | 14,50 | 14,00 | 13,50 | 13,00 |
| 4 | Gini Ratio | - | 0,310-0,347 | 0,310-0,345 | 0,310-0,344 | 0,310-0,342 | 0,310-0,340 |
| 5 | Indeks Williamson | - | 0,951-0,980 | 0,942-0,970 | 0,938-0,960 | 0,923-0,954 | 0,912-0,947 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 4,0 | 4,0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2,1 | PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | % | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,05 |
| 2,2 | PDRB Sektor Industri Pengolahan | % | 3,51 | 3,82 | 4,73 | 4,91 | 5,03 |
| 2,3 | PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | % | 5,92 | 6,43 | 6,81 | 7,12 | 7,53 |
| 2,4 | Tingkat Inflasi Daerah | % | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 2,5 | Indeks Desa Membangun (IDM) | - | 0,7445 | 0,7652 | 0,7859 | 0,8086 | 0,8273 |
| 2,6 | PDRB Per kapita | Rp, | 55,000,000 | 58,080,000 | 57,180,000 | 58,310,000 | 59,450,000 |

| No | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | Target Tahun Ke | | | | |
|----------|---|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2,7 | Persentase peningkatan nilai investasi | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | - | 69,00 | 69,70 | 70,40 | 71,10 | 71,80 |
| 8 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | - | 88,10 | 88,27 | 88,44 | 88,6 | 88,77 |
| 3,1 | Indeks Pendidikan | - | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 |
| 3,2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | - | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 11 |
| 3,3 | Indeks Kesehatan | - | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 |
| 3,4 | Indeks Ketahanan pangan | - | 85,5 | 87,3 | 89 | 90 | 91 |
| 3,5 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | - | 66,02 | 66,5 | 66,98 | 67,47 | 67,95 |
| 9 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | - | 61,2 | 61,61 | 62,01 | 62,42 | 62,84 |
| 4,1 | Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah | - | 0,2349 | 0,2426 | 0,2503 | 0,2580 | 0,2657 |
| 4,2 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | - | 75 | 76,25 | 77,50 | 78,75 | 80,00 |
| 4,3 | Indeks Kapasitas Fiskal | - | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| 4,4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah | % | 72,29 | 74,24 | 76,28 | 78,36 | 80,15 |
| 4,5 | Indeks Kearsipan Daerah | - | 77,63 | 78 | 78,25 | 78,5 | 79 |
| 4,5 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | - | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
| 4,6 | Indeks Profesional ASN | - | 60 | 62,14 | 64,36 | 66,66 | 69,04 |
| 4,7 | Indeks Inovasi | Skala 0-100 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 |
| 4,8 | Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional ASN, Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi) | - | 3,7 | 3,79 | 3,88 | 3,97 | 4,07 |

Tabel 8, 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tuban

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------------------|---|--|----------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index) | Indeks Persepsi warga terhadap wilayah tempat tinggal nya (Ikatan Perencana Ahli Indonesia) | | Indikator Tujuan Misi 1 | - | 74,14 | 74,80 | 75,13 | 75,47 | 75,80 | 76,14 | 76,14 | IKU Pemerintah Daerah |
| 2 | Indek Kualitas Layanan Infrastruktur | Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah | | Indikator Sasaran Misi 1 | - | 75,80 | 76,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 84,00 | IKU Pemerintah Daerah |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu | | Indikator Sasaran Misi 1 | - | 68,98 | 63,23 | 63,44 | 63,65 | 63,86 | 64,07 | 64,07 | IKU Pemerintah Daerah |
| 4 | Indeks Resiko Bencana | Tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) | | Indikator Sasaran Misi 1 | - | 145,52 | 139 | 133 | 127 | 121 | 115 | 115 | IKU Pemerintah Daerah |
| 5 | Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup | Indeks dibentuk dari toleransi, | | Indikator Sasaran Misi 1 | - | 88,00 | 89,5 | 90,26 | 91,03 | 91,81 | 92,59 | 92,59 | IKU Pemerintah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------------------------------|--|----------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | kesetaraan, dan kerjasama, Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan, Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas | | | | | | | | | | | Daerah |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa | | Indikator Tujuan Misi 2 | % | -5,58 | 4,07-4,31 | 4,32-4,42 | 4,43-4,86 | 4,87-5,01 | 5,02-5,39 | 5,02-5,39 | IKU Pemerintah Daerah |
| 7 | Tingkat Kemiskinan | Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan | | Indikator Tujuan Misi 2 | % | 15,91 | 15 | 14,50 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 13,00 | IKU Pemerintah Daerah |
| 8 | Gini Ratio | Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh | | Indikator Tujuan Misi 2 | - | 0,337 | 0,310-0,347 | 0,310-0,345 | 0,310-0,344 | 0,310-0,342 | 0,310-0,340 | 0,310-0,340 | IKU Pemerintah Daerah |
| 9 | Indeks Williamson | Indeks untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antarwilayah/daerah | | Indikator Tujuan Misi 2 | - | 0,9906 0 | 0,951-0,980 | 0,942-0,970 | 0,938-0,960 | 0,923-0,954 | 0,912-0,947 | 0,912-0,947 | IKU Pemerintah Daerah |
| 10 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah | | Indikator Tujuan Misi 2 | % | 4,81 | 4,0 | 4,0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | IKU Pemerintah Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|---|----------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | angkatan kerja | | | | | | | | | | | |
| 11 | PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | | Indikator Sasaran Misi 2 | % | -1,39 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 2,05 | 2,05 | IKU Pemerintah Daerah |
| 12 | PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | | Indikator Sasaran Misi 2 | % | -9,34 | 5,92 | 6,43 | 6,81 | 7,12 | 7,53 | 7,53 | IKU Pemerintah Daerah |
| 13 | PDRB Sektor Industri Pengolahan | Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu Sektor Industri Pengolahan | | Indikator Sasaran Misi 2 | % | -11,44 | 3,51 | 3,82 | 4,73 | 4,91 | 5,03 | 5,03 | IKU Pemerintah Daerah |
| 14 | Tingkat Inflasi | persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga | | Indikator Sasaran Misi 2 | | 1,93 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | IKU Pemerintah Daerah |
| 15 | Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan | | Indikator Sasaran Misi 2 | - | 0,6999 | 0,7445 | 0,7652 | 0,7859 | 0,8086 | 0,8273 | 0,8273 | IKU Pemerintah Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|---|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan | | | | | | | | | | | |
| 16 | PDRB Perkapita | Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu | | Indikator Sasaran Misi 2 | Rp, | 52,920,000 | 55,000,000 | 56,080,000 | 57,180,000 | 58,310,000 | 59,450,000 | 59,450,000 | IKU Pemerintah Daerah |
| 17 | Persentase Peningkatan Nilai investasi | $(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) / \text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota} \times 100\%$ | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Misi 2 | % | n/a | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | IKU Pemerintah Daerah |
| 18 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak | | Indikator Tujuan Misi 3 | - | 68,4 | 69,00 | 69,70 | 70,40 | 71,10 | 71,80 | 71,80 | IKU Pemerintah Daerah |
| 19 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki | | Indikator Tujuan Misi 3 | - | 87,78 | 88,10 | 88,27 | 88,44 | 88,6 | 88,77 | 88,77 | IKU Pemerintah Daerah |
| 20 | Indeks Pendidikan | Indeks yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah | | Indikator Sasaran Misi 3 | - | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | IKU Pemerintah Daerah |
| 21 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks yang menggambarkan tingkat literasi suatu daerah | | Indikator Sasaran Misi 3 | - | n/a | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 11 | 11 | IKU Pemerintah Daerah |
| 22 | Indeks Kesehatan | Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh | | Indikator Sasaran Misi 3 | - | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | IKU Pemerintah Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|----------------------------------|---|----------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | seseorang sejak lahir / Derajat kesehatan suatu masyarakat | | | | | | | | | | | |
| 23 | Indeks Ketahanan pangan | Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah, Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan | | Indikator Sasaran Misi 3 | - | 83,57 | 85,5 | 87,3 | 89 | 90 | 91 | 91 | IKU Pemerintah Daerah |
| 24 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik | | Indikator Sasaran Misi 3 | - | 65,54 | 66,02 | 66,5 | 66,98 | 67,47 | 67,95 | 67,95 | IKU Pemerintah Daerah |
| 25 | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur, Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata | | Indikator Tujuan Misi 4 | - | 60,40 | 61,2 | 61,61 | 62,01 | 62,42 | 62,84 | 62,84 | IKU Pemerintah Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|----------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | kelola pemerintahan yang baik (good governance) | | | | | | | | | | | |
| 26 | Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah | Indikator untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 0,2195 | 0,2349 | 0,2426 | 0,2503 | 0,2580 | 0,2657 | 0,2657 | IKU Pemerintah Daerah |
| 27 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | n/a | 75 | 76,25 | 77,50 | 78,75 | 80 | 80 | IKU Pemerintah Daerah |
| 28 | Indeks Kapasitas Fiskal | Kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 1,431 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | IKU Pemerintah Daerah |
| 29 | Nilai SAKIP Daerah | Penilaian Akuntabilitas kinerja Daerah dari Kemenpan RB | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 69,67 | 72,29 | 74,24 | 76,28 | 78,36 | 80,15 | 80,15 | IKU Pemerintah Daerah |
| 30 | Indeks Kearsipan Daerah | | | Indikator Sasaran Misi 4 | | 77,63 | 77,63 | 78 | 78,25 | 78,5 | 79 | 79 | |
| 31 | Indeks SPBE | Merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 2,17 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | IKU Pemerintah Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|----------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | bobot domain | | | | | | | | | | | |
| 32 | Indeks Profesional ASN | ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 46,42 | 60 | 62,14 | 64,36 | 66,66 | 69,04 | 69,04 | IKU Pemerintah Daerah |
| 33 | Indeks Inovasi | Himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 56,74 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 70 | IKU Pemerintah Daerah |
| 34 | Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional ASN, Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi) | Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 3,53 | 3,7 | 3,79 | 3,88 | 3,97 | 4,07 | 4,07 | IKU Pemerintah Daerah |
| Aspek Kesejahteraan Umum | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Melanjutkan Sekolah Ke SD | <i>Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir sekolah dasar pada tahun</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | - | N/A | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | Dinas Pendidikan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|----------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | <i>ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun ajaran sekarang</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Angka Melanjutkan Sekolah Ke SMP | <i>Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir sekolah menengah pertama pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan sekolah menengah atas pada tahun ajaran sekarang</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | - | N/A | 98 | 98,2 | 98,5 | 98,8 | 99 | 99 | Dinas Pendidikan |
| 3 | Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A | <i>Jumlah murid (SD/MI/Paket A) usia 7-12 / Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun x 100 %</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 4 | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B | <i>Jumlah murid (SMP/MTs/Paket B) usia 13-15 / umlah Penduduk usia 13-15 tahun x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 98,65 | 98,95 | 99 | 99,2 | 99,94 | 99,95 | 99,95 | Dinas Pendidikan |
| 5 | Angka Partisipasi Kasar PAUD | <i>Jumlah murid (PAUD) usia 0-6 / Jumlah Penduduk usia 0-6 tahun x 100 %</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 100 | 96,35 | 96,4 | 96,45 | 96,6 | 96,7 | 96,7 | Dinas Pendidikan |
| 6 | Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A | <i>Jumlah murid SD/MI/Paket A / Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun x 100 %</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 99,72 | 99,82 | 99,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 7 | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B | <i>Jumlah murid SMP/MTs/Paket B / umlah Penduduk usia 13-15 tahun x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 95,49 | 83,79 | 83,81 | 83,9 | 83,92 | 83,95 | 83,95 | Dinas Pendidikan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 8 | Harapan Lama Sekolah | <i>lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Tahun | 12,21 | 12,26 | 12,29 | 12,31 | 12,33 | 12,35 | 12,35 | Dinas Pendidikan |
| 9 | Rata Rata Lama Sekolah | <i>Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Tahun | 6,9 | 7,23 | 7,37 | 7,51 | 7,65 | 7,79 | 7,79 | Dinas Pendidikan |
| 10 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar | <i>(Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD)/(Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Pendidikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 11 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah | <i>Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP)/(Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Pendidikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 12 | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | <i>(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD)/(Jumlah anak usia 5-6 tahun @pada provinsi yang bersangkutan) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Pendidikan | % | n/a | 64,19 | 65,12 | 66,31 | 67,26 | 68,21 | 68,21 | Dinas Pendidikan |
| 13 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum | <i>(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Pendidikan | % | 98 | 94,38 | 96,38 | 98 | 100 | 100 % | 100 | Dinas Pendidikan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|----------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan | <i>pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (jumlah anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan) x 100%</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 | Persentase peningkatan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal | <i>(jumlah Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tahun (n) – jumlah Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tahun n-1 / jumlah pengembangan kurikulum muatan lokal tahun (n)) x 100%</i> | | Indikator Program Pengembangan Kurikulum | % | n/a | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 15 | Persentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan (%) | <i>(Jumlah pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentua / Jumlah pendidik) X 100%</i> | | Indikator Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | % | 95,64 | 96,73 | 97,60 | 98,47 | 99,35 | 100 | 100 | Dinas Pendidikan |
| 16 | Persentase Pelayanan Perijinan Operasional Pendidikan | <i>Jumlah Lembaga yang mendapatkan ijin operasional / Seluruh lembaga yang mengajukan perijinan) x 100%</i> | | Indikator Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | % | n/a | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Dinas Pendidikan |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|---|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk | <i>(Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan) / (Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota)</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | 0,0629 | 0,0657 | 0,0670 | 0,0683 | 0,0696 | 0,0708 | 0,0708 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | <i>(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan) / (Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | % | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | <i>(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan) / (Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 4 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | <i>(Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar) / (Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | % | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | <i>(Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar) / (Jumlah balita di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | % | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <i>(Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar) / (Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 7 | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | <i>(Jumlah orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) / (Jumlah orang usia 15 - 29 tahun di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | % | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 8 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | <i>(Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) / (Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | % | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 9 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <i>(Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) / (Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | % | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 10 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <i>(Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) / (Jumlah penderita</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita | % | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | <i>DM di kabupaten/kota) x 100%</i> | | Diabetes Melitus | | | | | | | | | Berencana |
| 11 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | <i>(Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) / (Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | % | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 12 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | <i>(Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) / (Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | % | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 13 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | <i>(Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar) / (Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | % | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 14 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | <i>(Jumlah RS rujukan yang terakreditasi) / (Jumlah RS di Kabupaten/ Kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator SubKegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 15 | Angka Harapan Hidup | <i>Hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Tahun | 71,43 | 71,6 | 71,8 | 72 | 72,2 | 72,4 | 72,4 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 16 | Persentase Keluarga Sehat | <i>Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah keluarga yang disurvei x 100%</i> | | Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 25,51 | 25,80 | 26 | 26,50 | 27 | 28 | 28 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 17 | Persentase Fasyankes terakreditasi | <i>Jumlah Fasyankes terakreditasi % di bagi Jumlah seluruh fasyankes X 100%</i> | | Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 56,8 | 65,5 | 70,1 | 75,6 | 80,6 | 80,6 | 97,14 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 18 | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan | <i>Jumlah pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan tahun n – Jumlah pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan tahun n) x 100%</i> | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 19 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi laboratorium kesehatan | <i>(Jumlah pendapatan retribusi laboratorium kesehatan tahun n – Jumlah pendapatan retribusi laboratorium kesehatan tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi laboratorium kesehatan tahun n) x 100%</i> | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------|---------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 20 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah - laboratorium | <i>(Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-laboratorium tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-laboratorium tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah-laboratorium tahun n) x 100%</i> | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 21 | Persentase Fasyankes dengan tenaga kesehatan sesuai standart | <i>(Jumlah Fasyankes dengan tenaga kesehatan sesuai standart/Seluruh Jumlah Fasyankes) x 100%</i> | | Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | (%) | 46,15 | 64,10 | 74,36 | 74,36 | 92,31 | 100 | 100 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 22 | Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat | <i>sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syara dibagi jumlah seluruh sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syara x 100%</i> | | Indikator Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | % | 60,09 | 65,08 | 70,07 | 75,05 | 80,04 | 85,03 | 85,03 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 23 | Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri | <i>Jumlah Desa/Kelurahan Purnama dan mandiri dibagi Jumlah Desa/Kelurahan siaga aktif 100%</i> | | Indikator Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | % | 31,40 | 40,55 | 49,70 | 58,84 | 67,99 % | 77,13 % | 77,13 % | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Cakupan Konektifitas Wilayah Jalan dan Jembatan | (Jumlah akhir panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi / dengan Total keseluruhan panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi) x 100 % | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 88,88 | 92,18 | 94,61 | 96,43 | 98,25 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2 | "Cakupan infrastruktur Pengeloan SDA " | (Jumlah Infrastruktur Pengelolaan SDA Kodisi Baik / Seluruh Jumlah Infrastruktur Pengelolaan SDA) x 100% | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 37 | 50,55 | 57,75 | 65,15 | 72,08 | 85,00 | 85,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 3 | Tingkat pemanfaatan ruang sesuai rencana | Prosentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 60 | 88 | 90 | 92,50 | 94,50 | 96 | 96 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 4 | Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di Kabupaten Tuban(%) | (Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)) / (Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)) x | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | % | 84,36 | 85,23 | 86,42 | 87,01 | 88,2 | 88,9 | 88,9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 100% * | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | (Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha) , direhabilitasi (ha), dioperasi (ha) dan pelihara (ha) di tahun eksisting) / (luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | % | 85,2 | 55,10 | 61,50 | 67,30 | 72,15 | 85,00 | 85,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 6 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | (Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | % | 82,74 | 84,22 | 84,98 | 85,74 | 86,50 | 87,28 | 87,28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|---|---|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 7 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | (Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten A) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | % | 75,32 | 77,79 | 80,74 | 83,49 | 86,25 | 88,29 | 88,29 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 8 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi penyedotan kakus | (Jumlah pendapatan retribusi penyedotan kakus tahun n – Jumlah pendapatan retribusi penyedotan kakus tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi penyedotan kakus tahun n) x 100% | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 9 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan regional untuk menunjang tingkat layanan yang telah direncanakan | Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana persampahan regional dibagi jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yang dibutuhkan x 100% | - | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | % | n/a | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 10 | Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik | Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh saluran permukiman yang | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | % | 58,92 | 18,64 | 22,64 | 22,64 | 30,64 | 34,64 | 34,64 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | dibutuhkan X 100 % | | | | | | | | | | | Kawasan Permukiman |
| 11 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | (Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya) / (Jumlah IMB yang berlaku) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penataan Bangunan Gedung | % | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 12 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten | (Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penyelenggaraan Jalan | % | 88,88 | 92,18 | 94,61 | 96,43 | 98,25 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 13 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | (Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi) dibagi (Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengembangan Jasa Kontruksi | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 14 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, kendaraan bermotor/alat berat | (Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, kendaraan bermotor/alat berat tahun n - Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, kendaraan bermotor/alat berat | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Pengembangan Jasa Kontruksi | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, kendaraan bermotor/alat berat tahun n) x 100% | | | | | | | | | | | |
| 15 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | (jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis / (Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengembangan Jasa Konstruksi | % | 10,8 | 18,2% | 22,3 | 26,4 | 30,4 | 34,5 | 34,5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 16 | Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang | Jumlah dokumen tersusun dibagi jumlah dokumen rencana tata ruang diakhir periode x 100% | | Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | % | 76,47 | 22,34 | 43,62 | 64,89 | 82,98 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 17 | Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi dibagi seluruh luas tanah yang diberikan izin x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Izin Lokasi | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 18 | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penyelesaian Sengketa Tanah | Kasus yang tertang | n/a | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---|---|---|---------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | mediasi | jumlah pengaduan sengketa tanah garapan | | Garapan | ani | | | | | | | | Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 19 | Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bngangunan dan liangkungan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bngangunan dan liangkungan kawasan Kabupaten/Kota | | Indikator Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Dokumen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 20 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan | (Jumlah pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan n – Jumlah pendapatan izin mendirikan bangunan n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan n) x 100% | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase permukiman yang terfasilitasi PSU | <i>luas permukiman yang terfasilitasi PSU / luas kawasan permukiman Kabupaten/ Kota x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | n/a | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 70 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | <i>(Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum))</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | % | 9,39 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 70 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 4 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota | <i>Jumlah Unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan di tangani pada tahun n X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengembangan Perumahan | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5 | Persentase masyarakat yang membutuhkan rumah, termasuk rumah komersil, | Jumlah unit kebutuhan rumah / Jumlah total unit rumah Kab/Kota x 100% | | Indikator Program Pengembangan Perumahan | % | 14,71 | 1,19 | 1,49 | 1,64 | 1,64 | 1,79 | 7,75 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 6 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar kawasan kumuh | Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah Kab/Kota x 100% | | Indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | % | n/a | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 7 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | <i>Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah Kab/Kota x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Kawasan Permukiman | % | n/a | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 8 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya | <i>Luas Permukiman Kumuh yang tertangani dibagi Total Luas Permukiman Kumuh Yang telah ditetapkan x 100 %</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Kawasan Permukiman | % | 97,50 | 9,73 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 97,32 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kapasitas Daerah | " C = A+B+C+D+E+F+G / 7 KATERANGAN (- A =perkuatan kebijakan dan kelembagaan 0,67, - B= pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 0,40, - C = pengembangan sisteminformasi diklat dan dan logistik 0,64, - D=penanganan tematik kawasan rawan bencana 0,61, - E=peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana 0,32, - F=perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 0,41, - G=pengembangan sistem pemulihan | | Indikator Sasarap Perangkat Daerah | - | n/a | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | Badan Penangguangan Bencana Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | <i>bencana 0,26"</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase Penurunan Tingkat Kasus Kebakaran | <i>(Jumlah kasus/kejadian kebakaran Tahun ke-n dikurangi Jumlah kasus/kejadian kebakaran n-1 / Jumlah kasus/kejadian kebakaran Tahun Ke-N) x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | n/a | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 3 | Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang-undangan | <i>(Jumlah Pelanggaran Perundang-undangan Daerah Tahun ke-n dikurangi Jumlah Pelanggaran Perundang-undangan Daerah Tahun n-1 / Jumlah Pelanggaran Perundang-undangan Daerah Tahun Ke-N) x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 14,97 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 4 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | <i>(Jumlah pengaduan yang ditangani) / (Jumlah pelanggaran yang masuk) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 5 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | <i>Jumlah Pelanggaran Perda/perkada yang ditegakkan dibagi jumlah keseluruhan Pelanggaran Perda/perkada dikali 100 %</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 6 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | <i>Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non | menit | n/a | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | <i>pemadaman kebakaran</i> | | Kebakaran | | | | | | | | | |
| 7 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | <i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penanggulangan Bencana | % | n/a | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 8 | Persentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik | <i>Jumlah Kejadian Bencana (/) Jumlah Penanganan Bencana (x) 100%</i> | | Indikator Program Penanggulangan Bencana | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 9 | Persentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana | <i>Jumlah Rehab Rekon yang tertangani / Jumlah Kebutuhan Rehab Rekon x 100%</i> | | Indikator Program Penanggulangan Bencana | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Menurunnya PMKS | (Jumlah PMKS Tahun N –Jumlah PMKS Tahun N-1 / Jumlah PMKS Tahun N) x 100% | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 90 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran) / (Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penanganan Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | bencana daerah kabupaten/kota) x 100% | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | (Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti) / (Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 4 | Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial | <i>Jumlah PSKS yang Aktif dibagi Jumlah total PSKS dikali 100%</i> | | Indikator Program Pemberdayaan Sosial | % | 90,3 | 91,5 | 91,5 | 92 | 93 | 94 | 94 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5 | Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar | <i>(Jumlah PMKS yang Dilayani / Jumlah PMKS yang Memerlukan Rehabilitasi Sosial (N-2)) x 100%</i> | | Indikator Program rehabilitasi sosial | % | 97 | 97,5 | 97,5 | 98 | 99 | 100 | 100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--|----------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | <i>(Jumlah PMKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial / Jumlah PMKS yang Memerlukan Perlindungan dan Jaminan Sosial (N-2)) x 100%</i> | | Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | % | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 7 | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara | <i>Jumlah TMP terpelihara dibagi jumlah TMP dikali 100</i> | | Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja | | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Cakupan Pencari Kerja Terdaftar Dapat Ditempatkan | <i>Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2 | Persentase Potensi perselisihan hubungan industrial | <i>(Jumlah Perusahaan yang tidak menerapkan Tata Kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan / Jumlah Perusahaan) x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 87 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | <i>(Jumlah kegiatan yang dilaksanan yg mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kab/Kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Perencanaan Tenaga Kerja | % | n/a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 4 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi | <i>(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja terdaftar) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | % | 100 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 5 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | <i>(PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)) / (Jumlah tenaga kerja) X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | % | n/a | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 6 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | <i>(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penempatan Tenaga Kerja | % | 72 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 7 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | <i>(Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) / Jumlah Perusahaan) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Hubungan Industrial | % | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Indeks PUG | Nilai indeks IPUG pada APE | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 50 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 60 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | Indeks Perlindungan Khusus Anak | Nilai IPKA pada KLA | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | n/a | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 60 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 3 | Rasio KDRT | (Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam 1 tahun / 1,000 rumah tangga) x 100% | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 4 | Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD | (Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / total belanja langsung APBD) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | % | 12,5 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 5 | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan) | <i>Jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan / 100,000</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program perlindungan perempuan | Rasio | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 6 | Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti | <i>(Jumlah pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh pengaduan melalui Puspaga) x100%</i> | | Indikator Program peningkatan kualitas keluarga | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 7 | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Terpilah | <i>(Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Terstandar / Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah) x 100%</i> | | Indikator Program pengelolaan sistem data gender dan anak | % | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 8 | Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak | <i>(Jumlah Desa/Kelurahan menginisiasi Dekela / Jumlah Keseluruhan Desa/Kelurahan) x 100%</i> | | Indikator Program pemenuhan hak anak (pha) | % | 9 | 9 | 9 | 15 | 20 | 25 | 25 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 9 | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | <i>(Jumlah pengaduan anak korban kekerasan yang ditangani / jumlah pengaduan anak korban kekerasan) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program perlindungan khusus anak | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase infrastruktur pangan yang digunakan | <i>jumlah lumbung yang digunakan dibagi total jumlah lumbung yang ada dikalikan 100%</i> | | Indikator Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | % | 63,18 | 69,57 | 72 | 74,07 | 75,86 | 77,42 | 77,42 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 2 | Persentase ketersediaan pangan masyarakat | <i>jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan dikalikan 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | % | 0,0039 | 52 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 3 | Persentase desa tahan pangan | <i>jumlah desa tahan pangan dibagi jumlah desa yang ada dikalikan 100%</i> | | Indikator Program Penanganan Kerawanan Pangan | % | 75,3 | 80,18 | 84,76 | 87,80 | 90,85 | 93,90 | 93,90 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 4 | Persentase keamanan pangan | <i>jumlah sampel yang aman dikonsumsi dibagi jumlah sampel yang diuji dikalikan 100%</i> | | Indikator Program Pengawasan Keamanan Pangan | % | 96 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times I KU) + (0,219 \times IKL)$ | | Indikator Tujuan Perangkat Daerah | - | 68,98 | 63,23 | 63,44 | 63,65 | 63,86 | 64,07 | 64,07 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 2 | Indeks Kualitas Air | $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | - | 60,82 | 53,49 | 53,59 | 53,69 | 53,94 | 54,19 | 54,19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | - | 98,92 | 79,32 | 79,42 | 79,52 | 79,81 | 80,10 | 80,10 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times$ | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | - | 52,64 | 50,21 | 50,80 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 5 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/kota) / "usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan " X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|----------------|---|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Persentase penyelesaian dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH | <i>Jumlah Dokumen/ (bagi) yang diamanatkan PUU LH X 100%</i> | | Indikator Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 7 | Luas kawasan KEHATI yang dikelola | <i>Luas kawasan KEHATI yang dikelola</i> | | Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Ha | n/a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 8 | Persentase persetujuan lingkungan yang diselesaikan | <i>Jumlah permohonan persetujuan lingkungan dan/atau Persetujuan Teknis / (dibagi) 100%</i> | | Indikator Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 9 | Jumlah kader lingkungan hidup yang terbentuk | <i>Jumlah kader lingkungan hidup yang terbentuk</i> | | Indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Kader Lingkungan Hidup | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 10 | Jumlah Lembaga yang peduli dan Berbudaya Lingkungan | <i>Jumlah Lembaga yang peduli dan Berbudaya Lingkungan</i> | | Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Lembaga | 328 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 11 | Persentase Pelayanan Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti | <i>(Jumlah Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Pengaduan Lingkungan) x 100%</i> | | Indikator Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 12 | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | <i>(Total Vol sampah yang dapat ditangani) / (Total vol timbunan sampah kabupaten/kota) X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Persampahan | % | 54,03 | 56,90 | 67 | 78 | 89 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 13 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan | <i>(Jumlah pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun n) x 100%</i> | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Pengelolaan Persampahan | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan | <i>Hasil Survey Independen terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 80,02 | 90,70 | 90,90 | 91,00 | 91,20 | 91,50 | 91,50 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | <i>(Jumlah OPD yang telah memanfaatkan @data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja) / (jumlah OPD) X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | % | 6,52 | 11,90 | 14,29 | 16,67 | 19,05 | 21,43 | 21,43 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3 | Perekaman KTP elektronik | <i>(Jumlah penduduk berumur 17 Tahun keatas@yang memiliki KTP) / (jumlah penduduk 17 tahun) X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pendaftaran Penduduk | % | 95,56 | 99,30 | 99,50 | 99,60 | 99,70 | 99,80 | 99,80 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 4 | Kepemilikan akta kelahiran | <i>(Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah@memiliki akta lahir)/(Jumlah anak usia 0- 18 tahun) X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pencatatan Sipil | % | 96,41 | 97,90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5 | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | <i>(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari@yang memiliki KIA)/(Jumlah anak usia 0- 17 tahun) X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pendaftaran Penduduk | % | 15,45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6 | Persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik | <i>jumlah jaringan SIAK di kecamatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jaringan SIAK yang ada dikalikan seratus persen</i> | | Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 7 | Persentase Penyajian Data Kependudukan | <i>Jumlah jenis data kependudukan yang disajikan dibagi jumlah jenis data kependudukan yang wajib disajikan dikalikan seratus persen</i> | | Indikator Program Pengelolaan Profil Kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan status desa mandiri | <i>(Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun)/(jumlah desa berkembang (per awal tahun n)) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 7,71 | 9,65 | 11,25 | 12,86 | 14,47 | 16,08 | 16,08 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|----------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Persentase peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan | <i>Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan dibagi jumlah desa kali 100%</i> | | Indikator Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | % | 7,72 | 14,47 | 16,08 | 17,68 | 19,29 | 20,90 | 20,90 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 3 | Prosentase desa yang statusnya meningkat | <i>Jumlah desa yang statusnya meningkat dibagi jumlah desa dikali 100%</i> | | Indikator Program Penataan Desa | % | 9,65 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 4 | Persentase Peningkatan Kerjasama Desa | <i>Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya</i> | | Indikator Program Peningkatan Kerjasama Desa | % | 30,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5 | Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabilitas | <i>Jumlah Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel dibagi dengan jumlah desa seluruhnya dikali 100%</i> | | Indikator Program Administrasi Pemerintahan Desa | % | 58,27 | 64,63 | 70,74 | 77,17 | 83,60 | 90,03 | 90,03 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Angka Kelahiran TFR (Total Fertility Rate) | <i>Jumlah Angka Kelahiran TFR (Total Fertility Rate)</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengendalian Penduduk | - | 2,04 | 2,04 | 2,03 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | Persentase kebutuhan per-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | <i>(Jumlah Peserta KB Modern / Jumlah pasangan usia subur) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb) | % | 9 | 10,8 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 4 | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun | <i>Jumlah Anggota Keluarga yang menjadi anggota dalam kelompok Binaan ketahanan keluarga</i> | | Indikator Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bidang (ks) | Umur | 20,9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | <i>Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (JK1 X bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Rasio | n/a | 68,89 | 68,18 | 71,36 | 74,55 | 77,73 | 77,73 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|---|---|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota | <i>Jumlah V/C ratio ruas jalan yang di survey / Jumlah seluruh ruas jalan yang di survey</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (llaj) | ratio/ruas jalan | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 3 | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan/ Umum | <i>(Jumlah pendapatan retribusi pelayanan parker di tepi jalan – umum tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pelayanan parker di tepi jalan – umum tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pelayanan parker di tepi jalan – umum tahun n) x 100%</i> | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD Tahun 2021-2026 | Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (llaj) | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 4 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor | <i>(Jumlah pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun n) x 100%</i> | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD Tahun 2021-2026 | Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (llaj) | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 5 | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal -Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum | <i>(Jumlah pendapatan retribusi terminal-tempat parker untuk kendaraan penumpang dan bis umum tahun n – Jumlah pendapatan retribusi terminal-tempat parker untuk kendaraan penumpang dan bis</i> | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD Tahun 2021-2026 | Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (llaj) | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | umum tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi terminal-tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum tahun n) x 100% | | | | | | | | | | | |
| 6 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi tempat khusus parkir | (Jumlah pendapatan retribusi tempat khusus parkir tahun n – Jumlah pendapatan retribusi tempat khusus parkir tahun n-1) / (pendapatan retribusi tempat khusus parkir tahun n) x 100% | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD Tahun 2021-2026 | Indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (llaj) | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 7 | Persentase kapal yang memiliki PAS kapal | Jumlah kapal yang memiliki PAS kapal dibagi jumlah kapal yang ada x100% | | Indikator Program Pengelolaan Pelayaran | % | 59,49 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | (Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo/ Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) X 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Aplikasi Informatika | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | <i>(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan@secara online dan terintegrasi) / "Jumlah Layanan Publik" x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Aplikasi Informatika | % | 92,73 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 3 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | <i>(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran@penyebaran informasi publik,@mengetahui kebijakan dan program prioritas@pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota) / "Jumlah penduduk" x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik | % | 99,19 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 4 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pengendalian Menara komunikasi | <i>(Jumlah pendapatan retribusi pengendalian Menara komunikasi tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pengendalian Menara komunikasi tahun n - 1) / (Jumlah pendapatan retribusi pengendalian Menara komunikasi tahun n) x 100%</i> | Sesuai arahan BPK untuk Peningkatan PAD Tahun 2021-2026 | Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan UMKM | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Tingkat Kenaikan Koperasi yang meningkatkan kualitasnya | <i>(Jumlah Koperasi yang meningkat kualitas nya tahun N – Jumlah Koperasi yang meningkat kualitas nya tahun N-1 / Jumlah Koperasi yang meningkat kualitas nya tahun N) x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 2 | Tingkat Kenaikan Usaha mikro menjadi wirausaha | <i>(Jumlah Usaha mikro menjadi wirausaha tahun N - Jumlah Usaha mikro menjadi wirausaha tahun N-1 / Jumlah Usaha mikro menjadi wirausaha tahun N) x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 3 | Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirasausaha | <i>(Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/ Jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100 %</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengembangan UMKM | % | 1,79 | 1,50 | 3,02 | 4,57 | 6,14 | 7,50 | 7,50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 4 | Persentase Koperasi yang meningkat berkualitas | <i>(Jumlah Koperasi Yang meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan asset / Jumlah seluruh koperasi) X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | % | 13,00 | 14,66 | 15,28 | 15,92 | 16,60 | 19,85 | 19,85 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 5 | Persentase SDM Koperasi yang berkualitas | <i>(Jumlah SDM Koperasi yang berkualitas / seluruh Jumlah SDM Koperasi) x 100%</i> | | Indikator Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | % | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Persentase Koperasi Sehat | <i>(Jumlah Koperasi yang sehat / seluruh koperasi) x 100%</i> | | Indikator Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | % | 0,08 | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 7 | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | <i>(Jumlah pertumbuhan wirausaha baru / Jumlah Wirausaha yang ada) x 100 %</i> | | Indikator Program Pemberdayaan UMKM | % | ,27 | 1,50 | 3,02 | 4,57 | 6,14 | 7,50 | 7,50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | <i>((Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1)@di kabupaten/kota)/("Jumlah investasi tahun n-1 di " kabupaten/kota) X 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | -48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 2 | Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan | <i>(Jumlah rumusan kebijakan yang ditetapkan/ Jumlah rumusan kebijakan) X 100%</i> | | Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 3 | Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal | <i>(Jumlah calon investor yang merealisasikan penanaman modal/ Jumlah calon investor) X 100%</i> | | Indikator Program Promosi Penanaman Modal | % | 24,01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|---|----------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 4 | Cakupan pengendalian pelaku usaha | (Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengendalian / jumlah NIB efektif) x 100% (| | Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | % | 2,17 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 5 | Persentase Jumlah Perijinan dan non perijinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP | (Jumlah Perijinan dan non perijinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP/Jumlah seluruh Perijinan dan non perijinan yang diterbitkan) x 100% | | Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 6 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi | (Jumlah pendapatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi tahun n) x 100% | | Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal | | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 7 | Persentase Jumlah pemohon ijin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal | (Jumlah pemohon ijin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal / jumlah seluruh pemohon ijin atau calon investor) x 100% | | Indikator Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | % | n/a | 80 | 85 | 90 | 93 | 97 | 97 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | <i>(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 2 | Peningkatan Prestasi Olahraga | <i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | % | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Olahraga (%) | <i>(Jumlah pendapatan retribusi Retribusi Tempat Olahraga tahun n – Jumlah pendapatan Retribusi Tempat Olahraga tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi Retribusi Tempat Olahraga n) x 100%</i> | | Indikator Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 3 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | <i>(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi) / (Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota) x</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase Organisasi Kepramukaan (Gugus depan) yang meningkat kapasitasnya | <i>(Jumlah Organisasi Kepramukaan (Gugus depan) yang meningkat Kapasitasnya / seluruh Jumlah Organisasi kepramukaanya) x 100%</i> | | Indikator Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan | % | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | <i>(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah) / (Jumlah OPD) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 6,52 | 1 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 2 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | <i>(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) / (Jumlah OPD) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | % | 17 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|---------------------------------|---|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | (Jumlah nilai per area keamanan informasi) / (Jumlah area penilaian) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | % | n/a | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 75 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Kesenian, Kebudayaan, dan cagar budaya yang dilestarikan | (Kesenian, kebudayaan, dan Cagar Budaya yang dilestarikan / Kesenian, Kebudayaan, dan Cagar Budaya yang terdata) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | buah | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 2 | Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola | Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola | | Indikator Program Pengembangan Kebudayaan | Objek | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 3 | Persentase peningkatan Jumlah pelaku kesenian daerah | Jumlah kesenian daerah yang dikelola | | Indikator Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 4 | Jumlah Dokumen Sejarah yang terinventarisir | Jumlah Dokumen Sejarah yang terinventarisir | | Indikator Program Pembinaan Sejarah | Dokumen | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 30 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 5 | Jumlah cagar budaya yang dikelola | Jumlah cagar budaya yang dikelola | | Indikator Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Unit | 83 | 83 | 87 | 91 | 96 | 100 | 100 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Jumlah museum yang dikelola | Jumlah museum yang dikelola | | Indikator Program Pengelolaan Permuseuman | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, Mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, hingga anggota perpustakaan yang ada di wilayahnya | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator tujuan Perangkat Daerah | - | n/a | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 11 | 11 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Poin | n/a | 60 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,5 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3 | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | (Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan/Jumlah perpustakaan) X 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | | % | 5,82 | 12,58 | 19,35 | 26,12 | 32,88 | 39,65 | 39,65 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 4 | Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat | Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite dibagi Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) dikalikan 100 persen | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pembinaan Perpustakaan | % | 5,11 | 38,93 | 38,94 | 38,95 | 38,93 | 38,96 | 38,96 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 5 | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan di wilayahnya dibagi Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) dikalikan 100 persen | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | - | 1:9 | 1:10 | 1:10 | 1:11 | 1:12 | 1:13 | 1:13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | $T = (a + i + s + j) / 4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik j = persentase jumlah arsip yang</p> | | Indikator Sasaran Perangkat Ddaerah | - | 44,77 | 49,11 | 53,44 | 57,78 | 62,11 | 66,45 | 66,45 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tingkat Arsip Inaktif dan Statis yang diolah | | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Arsip | % | 32 | 39 | 47 | 54 | 61 | 68 | 68 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | $T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | % | 43,58 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Ton | 63311,93 | 59771 | 62092 | 64502 | 67006 | 69607 | 69607 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 2 | Jumlah Total Produksi | Jumlah Total | | Indikator Program | Ton | 21,530, | 24,650,61 | 26,376,16 | 28,222,49 | 30,198,06 | 32,311,93 | 90,732,472 | Dinas |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | Perikanan Tangkap kabupaten/kota | Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota | | Pengelolaan Perikanan Tangkap | | 80 | | | | | | 6 | Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 3 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan | (Jumlah pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan tahun n – Jumlah pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan tahun n) x 100% | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 4 | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota | | Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Ton | 41,781,129 | 45,933,50 | 47770,84 | 49,608,18 | 51,445,52 | 53,282,86 | 53,282,86 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 5 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi | (Jumlah pendapatan retribusi pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi tahun n) x 100% | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 6 | Jumlah Kawasan yang Dipantau | Jumlah Kawasan yang Dipantau | | Indikator Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Kali | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 7 | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan | Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan | | Indikator Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Ton | 3,738,09 | 35,788,05 | 36,324,87 | 36,869,74 | 37,422,79 | 37,984,12906 | 112,276,6574 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Urusan Pilihan Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1) / (Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 2 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 3 | Tingkat Hunian Akomodasi | Jumlah kamar yang terjual) / (Jumlah kamar yang tersedia) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | n/a | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 37 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 4 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan | (Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1) / (Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pemasaran Pariwisata | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 5 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------------------|---|--|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 6 | Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata | (Jumlah SDM Pariwisata yang meningkat Kualitas nya /Seluruh SDM pariwisata) x 100% | | Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | % | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 48 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| 7 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi tempat rekreasi | (Jumlah pendapatan retribusi tempat rekreasi tahun n – Jumlah pendapatan retribusi tempat rekreasi tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi tempat rekreasi tahun n) x 100% | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata |
| Urusan Pilihan Bidang Pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi) | (Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun) / (Luas panen) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Kw/hektar | 61,23 | 61,24 | 61,25 | 61,27 | 61,28 | 61,29 | 61,29 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 2 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) / (Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) x 100% | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | % | 31,85 | 24,36 | 22,74 | 21,25 | 19,85 | 18,53 | 18,53 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 3 | Persentase sarana pertanian yang digunakan | (Jumlah sarana yang digunakan / jumlah total sarana yg diberikan) x 100% | | Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | % | 87,85 | 70,04 | 80,05 | 80,4 | 80,14 | 80,13 | 80,13 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|---|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Perikanan |
| 4 | Persentase prasarana pertanian yang digunakan | Jumlah prasarana yang digunakan dibagi jumlah prasarana yang dibangun dikalikan 100 | | Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | % | 36,22 | 60,47 | 65,41 | 72,05 | 79,74 | 90,49 | 90,49 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 5 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong | $(\text{Jumlah pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong tahun } n - \text{Jumlah pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong tahun } n-1) / (\text{Jumlah pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sebelum dipotong tahun } n) \times 100\%$ | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 6 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sesudah dipotong | $(\text{Jumlah pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sesudah dipotong tahun } n - \text{Jumlah pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sesudah dipotong tahun } n-1) / (\text{Jumlah pendapatan retribusi pemeriksaan hewan sesudah dipotong tahun } n) \times 100\%$ | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 7 | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Luas area pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dibagi luas area terdampak dikalikan 100 | | Indikator Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------------|--|--|---|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 8 | Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota | jumlah usulan yang di setuju dibagi jumlah usulan yang direkomendasi dikalikan 100 | | Indikator Program Perizinan Usaha Pertanian | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 9 | Persentase kelompok tani kelas utama | jumlah kelompok tani kelas utama dibagi jumlah kelompok tani yang dibina dikalikan 100 | | Indikator Program Penyuluhan Pertanian | % | 5,86 | 6,7 | 7,8 % | 8,6 | 9,3 | 10 | 10 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| Urusan Pilihan Bidang Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | <i>(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan tahun n / Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Indikator Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | % | n/a | 50 | 60 | 62 | 70 | 72 | 72 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 2 | Persentase kinerja realisasi pupuk, | <i>(Realisasi) / (RDKK) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | 33,79 | 33,79 | 33,89 | 33,99 | 34,09 | 34,19 | 34,19 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 3 | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | <i>(Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan) / (Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota)</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Indikator Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | % | 58,97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 4 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang | <i>(Jumlah pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pelayanan tera/tera</i> | Sesuai arahan BPK untuk peningkatan PAD Tahun 2021-2026 | Indikator Indikator Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | ulang tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang tahun n) x 100% | | | | | | | | | | | Perdagangan |
| 5 | Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi | (Jumlah sarana prasarana perdagangan yang layak fungsi pada tahun n / total sarana prasarana perdagangan tahun n) x 100 % | | Indikator Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | % | 70 | 71,48 | 73,68 | 73,68 | 75,98 | 78,98 | 78,98 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 6 | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran | (Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi pelayanan pasar – pelataran/dasaran tahun n – Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi pelayanan pasar – pelataran/dasaran tahun n-1) / (Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi pelayanan pasar – pelataran/dasaran tahun n) x 100% | Sesuai arahan BPK untuk meningkatkan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | - | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 7 | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Los | (Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – loss tahun n – Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – loss tahun n- | Sesuai arahan BPK untuk meningkatkan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | - | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|--|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 1) / (Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – loss tahun n) x 100% | | | | | | | | | | | |
| 8 | Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Kios | $(\text{Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Kios tahun } n - \text{Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Kios tahun } n-1) / (\text{Jumlah Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Kios tahun } n) \times 100\%$ | Sesuai arahan BPK untuk meningkatkan PAD tahun 2021-2026 | Indikator Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | - | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 9 | Persentase Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Bapokting | $\frac{\text{Rata-rata harga 21 Komoditas Bapokting Tahun } n \text{ dikurangi Rata-rata harga 21 Komoditas Bapokting Tahun } n-1 \text{ dibagi Rata-rata harga 21 Komoditas Bapokting Tahun } n-1}{\text{Kali 100\%}}$ | | Indikator Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | % | < 13 | < 13 | < 13 | < 13 | < 13 | < 13 | < 13 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 10 | Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor | $(\text{Jumlah pelaku usaha Ekspor Tahun } n \text{ dikurangi Jumlah pelaku usaha Ekspor Tahun } n-1) / \text{Jumlah pelaku usaha Ekspor Tahun } n-1) \times 100\%$ | | Indikator Program pengembangan ekspor | % | n/a | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 11 | Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya | $(\text{Jumlah Produk lokal yang di fasilitasi pemasarannya pada Tahun } n - \text{Jumlah})$ | | Indikator Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | % | n/a | 1,02 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | <i>Produk lokal yang difasilitasi pemasarannya pada tahun n / Jumlah produk lokal yang difasilitasi pemasarannya pada tahun n) x 100%</i> | | | | | | | | | | | Menengah dan Perdagangan |
| 11 | Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi | <i>(Jumlah pemeriksaan dan pengawasan Koperasi tahun n – Jumlah pemeriksaan dan pengawasan koperasi tahun n-1) / (Jumlah pemeriksaan dan pengawasan Koperasi tahun n) x 100%</i> | | Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | | 0,35 | 16,25 | 16,50 | 16,75 | 17,00 | 17,25 | 17,25 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| Urusan Pilihan Bidang Perindustrian | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | <i>(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlah izin yang dikeluarkan) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengendalian Izin Usaha Industri | % | n/a | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | <i>Tersediannya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan, Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan, Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Industri Kecil dan Menengah | n/a | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---|----------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | <i>bahan bakar/ energy, Informasi tenaga kerja, Informasi investasi</i> | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkatkan Skala Usahanya | <i>(Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah yang meningkat skala usahanya pada tahun n / dengan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah seluruhnya pada tahun n) x 100%</i> | | Indikator Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | % | 1,13 | 1,04 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan | <i>(Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan / jumlah seluruh calon transmigran) x 100%</i> | | Indikator Program Pembangunan Kawasan transmigrasi | % | 0 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Evaluasi AKIP | <i>Nilai Evaluasi AKIP dari Kemenpan RB</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Nilai | 69,67 | 70,1 | 70,32 | 70,53 | 70,75 | 70,97 | 70,97 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Persentase rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah | <i>Persentase Rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah</i> | | Indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | % | 53,13 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | Sekretariat Daerah |
| 3 | Jumlah Rancangan Kebijakan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Jumlah Rancangan Kebijakan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | | Indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Angka | 17 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | Sekretariat Daerah |
| 4 | Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan | <i>(Jumlah rumusan hasil fasilitasi kebijakan</i> | | Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan | % | 86,67 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | Sekretariat Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---|----------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | sumber daya alam | perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi kebijakan / Jumlah seluruh rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam) x 100% | | | | | | | | | | | |
| 5 | Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan | (Jumlah rumusan kebijakan dan fasilitasi kebijakan pemerintahan yang menjadi kebijakan / Jumlah seluruh rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pemerintahan) x 100 % | | Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan | % | n/a | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | Sekretariat Daerah |
| Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik (DPRD) Atas Pelayanan Sekretariat DPRD | <i>Hasil penilaian indeks pelayanan publik berdasarkan kriteria kementerian PAN dan RB</i> | | Indikator Sasarana Perangkat Daerah | - | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | Sekretariat DPRD |
| 2 | Prosentase fasilitasi Rancangan Perda sesuai SOP | <i>(Jumlah program yang rancangan perda yang disetujui secara tepat waktu / Jumlah rancangan perda yang diajukan dibahas) x 100%</i> | | Indikator Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | % | 88,88 | 80 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | Sekretariat DPRD |
| Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|----------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Persentase Capaian Sasaran RPJMD dengan Tingkat Capaian Minimal 75% | <i>Jumlah Capaian Sasaran RPJMD dengan Tingkat Capaian Minimal 75% / Jumlah seluruh Capaian Sasaran RPJMD) x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 2 | Persentase Capaian Program RPJMD dengan Tingkat Capaian Minimal 75% | <i>Jumlah Capaian Program RPJMD dengan Tingkat Capaian Minimal 75% / Jumlah seluruh Capaian Program RPJMD) x 100%</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 3 | Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD | <i>(Jumlah program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD dilaksanakan dalam dokumen RKPD / Jumlah seluruh program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD) x 100%</i> | | Indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | % | 91,67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 4 | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>(Jumlah program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dilaksanakan dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah / Jumlah seluruh program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD bidang</i> | | Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | % | n/a | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | <i>Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) x 100%</i> | | | | | | | | | | | |
| 5 | Persentase penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah | <i>(Jumlah program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dilaksanakan dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah / Jumlah seluruh program yang direncanakan dalam dokumen RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)) x 100%</i> | | Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | % | n/a | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rasio PAD | <i>(Jumlah PAD) / (Jumlah APBD non migas) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | - | 5,2 | 5,62 | 7,52 | 7,61 | 7,71 | 7,76 | 7,76 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |
| 3 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | Opini Laporan Keuangan | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah | - | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|---------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 4 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | <i>(Nilai realisasi SILPA) / (Total belanja anggaran tahun sebelumnya) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah | - | 14,31 | 5,29 | 2,77 | 2,98 | 3,24 | 3,17 | 3,17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |
| 5 | Tingkat konsistensi perencanaan daerah dengan penganggaran daerah | | | Indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |
| 6 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | <i>(Nilai absolut dari Total Belanja dalam realisasi) / (total belanja APBD dikurangi 1) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah | - | 87,05 | 97,23 | 97,02 | 96,76 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |
| 7 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | <i>(Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi) / (total PAD dalam APBD dikurangi 1) x 100%</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | - | 87,05 | 97,23 | 97,02 | 96,76 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |
| 8 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan | <i>(Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan tahun n – Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah bangunan tahun n) x 100%</i> | | Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |
| 9 | Persentase peningkatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan | <i>(Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan tahun n – Jumlah pendapatan</i> | | Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | n/a | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|---------------------------------|---|---------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan tahun n-1) / (Jumlah pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah ruangan tahun n) x 100% | | | | | | | | | | | |
| 10 | Manajemen Aset | <i>Apakah ada daftar asset tetap?, Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?, Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?, Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |
| 11 | Persentase tanah milik daerah yang bersertifikat | <i>(Jumlah tanah milik daerah yang bersertifikat / Jumlah Tanah Milik Daerah) x 100%</i> | | Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 27,81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah |
| Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase ASN dengan Evaluasi Kinerja Optimal | <i>Jumlah ASN dengan Nilai Prestasi Kerja minimal 90 dibagi dengan Jumlah seluruh ASN dikalikan 100%</i> | | Indikator Program Kepegawaian Daerah | % | 80 | 80 | 83 | 85 | 88 | 9 | 90% | BKPSDM |
| 2 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | <i>Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas dibagi dengan seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah</i> | | Indikator Program Kepegawaian Daerah | % | 79,62 | 90 | 93 | 94 | 97 | 99 | 99 | BKPSDM |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--|----------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | <i>diklaikan 100%</i> | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi | <i>Jumlah ASN yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional/ sertifikasi dan ASN yang mengikuti Assesment (Pemetaan Kompetensi) dibagi dengan Jumlah ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi dikalikan 100%</i> | | Indikator Program Kepegawaian Daerah | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | BKPSDM |
| 4 | Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) | <i>Jumlah Pegawai PNS Fungsional dibagi dengan Jumlah Seluruh Pegawai Pemerintah) (tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan dikalikan 100%</i> | | Indikator Program Kepegawaian Daerah | - | 4,79 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | BKPSDM |
| Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan kesehatan) | <i>Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) diklaikan</i> | | Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | BKPSDM |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|---------------------------------|--|---------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | |
| Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah inovasi yang dihasilkan | Jumlah inovasi yang dihasilkan | | Indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Inovasi | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Tuban oleh BPKP | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | LEVEL | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Inspektorat |
| 2 | Persentase SAKIP Perangkat Daerah Minimal BB | (Jumlah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal BB / Jumlah Nilai Sakip Seluruh Perangkat Daerah) x 100% | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 69,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Inspektorat |
| 3 | Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti | (Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP) x 100% | | Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan | % | 92 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 96 | Inspektorat |
| 4 | Persentase Pengawasan terhadap rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah | (Jumlah Pengawasan terhadap rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah / Seluruh Jumlah Pengawasan terhadap rumusan | | Indikator Program Perumusan dan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Inspektorat |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------|--|--|----------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | kebijakan daerah) x 100% | | | | | | | | | | | |
| Urusan Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan | (Jumlah Masyarakat Pemohon Pelayanan Publik Kecamatan Tahun N - Jumlah Masyarakat Pemohon Pelayanan Publik Kecamatan Tahun N) / Jumlah Masyarakat Pemohon Pelayanan Publik Kecamatan Tahun N | | Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 2 | Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani | (Jumlah Potensi Konflik Sosial yang telah ditangani / Jumlah Seluruh Potensi Konflik) x 100% | | Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | % | n/a | 90 | 90 | 94 | 97 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 3 | Persentase desa yang menetapkan APBDes yang tepat waktu | (Jumlah Desa yang menetapkan APBDes yang tepat waktu / Jumlah Seluruh Desa) x 100% | | Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 4 | Persentase pengaduan gangguan tratribum yang ditindaklanjuti | (Jumlah pengaduan gangguan tratribum yang ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh pengaduan gangguan tratribum) x 100% | | Indikator Program Koordinasi Ketentraman dan katertiban Umum | % | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 5 | Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi | (Jumlah desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi / Jumlah Seluruh Desa) x 100% | | Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | % | n/a | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Kecamatan |
| 6 | Persentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terrealisasi melalui | (Jumlah usulan jasil Musrenbang kelurahan yang | | Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Kecamatan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------------|---|--|----------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | dana kelurahan | terrealisasi melalui dana kelurahan / Jumlah Seluruh usulan jasil Musrenbang kelurahan) x 100% | | dan Kelurahan | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Potensi Konflik Sosial Dan Politik Yang Dapat Diselesaikan | <i>(Jumlah Potensi Konflik Sosial Dan Politik yang Menimbulkan Perpecahan Yang Dapat Diselesaikan / Jumlah seluruh Konflik Sosial Dan Politik yang Menimbulkan Perpecahan) x 100 %</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik | <i>(Jumlah Masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik tahun N - Jumlah Masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik tahun N-1 / Jumlah Masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik tahun N) x 100%</i> | | Indikator Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | % | 74,63 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 67 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan | <i>(Jumlah Kegiatan Ormas yang telah sesuai ketentuan / Jumlah Seluruh kegiatan Ormas) x 100%</i> | | Indikator Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | % | 100 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 4 | Persentase Potensi Konflik Sosial Dan | <i>(Jumlah Potensi Konflik Sosial dan</i> | | Indikator Program Peningkatan | % | 100 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | Badan Kesatuan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------|--|--|----------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | Politik Yang ditindaklanjuti | <i>Politik yang ditindaklanjuti / Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik satu tahun) X 100</i> | | Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi penanganan konflik sosial | | | | | | | | | Bangsa dan Politik |
| 5 | Presentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideology pancasila dan karakter | <i>(Jumlah Masyarakat yang mengikuti penguatan ideology pancasila dan karakter tahun N - Jumlah Masyarakat yang mengikuti penguatan ideology pancasila dan karakter tahun N-1 / Jumlah Masyarakat yang mengikuti penguatan ideology pancasila dan karakter N) 100%</i> | | Indikator Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | % | 100 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 6 | Presentase Peningkatan Masyarakat yang terlibat dalam Kewaspadaan dini masyarakat | <i>(Jumlah Masyarakat dalam Kewaspadaan dini masyarakat tahun N - Jumlah Masyarakat dalam Kewaspadaan dini masyarakat tahun N-1 / Jumlah Masyarakat dalam Kewaspadaan dini masyarakat tahun N) x 100%</i> | | Indikator "Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | % | 100 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Aspek Daya Saing Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Nelayan | Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (ItIK) dengan indeks yang | | | - | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------------------------|--|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | dibayar petani (IbIK) pada subsektor perikanan | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ekspor Bersih Perdagangan | Ekspor Perdagangan dikurangi import | | | USD Miliar | n/a | 151,9 | 152 | 152,5 | 153 | 153,5 | 153,5 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 3 | WBK/WBBM | Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan, tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik | | | - | | WBK= 75, WBBM=85 | WBK= 76, WBBM=86 | WBK= 77, WBBM=87 | WBK= 78, WBBM=88 | WBK= 79, WBBM=89 | WBK= 79, WBBM=89 | |
| 4 | Nilai SAKIP | Penilaian Akuntabilitas kinerja Daerah dari Kemenpan RB | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 69,67 | 70,97 | 70,97 | 70,97 | 70,97 | 70,97 | 70,97 | IKU Pemerintah Daerah |
| 5 | Indeks Kelembagaan | Mencerminkan kelembagaan dari sisi struktur dan proses dalam mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kemampuan dalam | | | - | n/a | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | IKU Pemerintah Daerah |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|--|----------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi | | | | | | | | | | | |
| 6 | Indeks SPBE | Merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 2,17 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 7 | Indeks Profesional ASN | Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 46,42 | 60 | 62,14 | 64,36 | 66,66 | 69,04 | 69,04 | IKU Pemerintah Daerah |
| 8 | Indeks Pelayanan Publik | Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah | | Indikator Sasaran Misi 4 | - | 3,53 | 3,7 | 3,79 | 3,88 | 3,97 | 4,07 | 4,07 | IKU Pemerintah Daerah |
| 9 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | (Jumlah pengaduan yang ditangani) / (Jumlah pelanggaran yang masuk) x 100% | | Indikator Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Satpol PP |
| 10 | Persentase Potensi Konflik Sosial Dan Politik Yang ditindaklanjuti | (Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik yang ditindaklanjuti / Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik satu tahun) X 100 | | Indikator Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi penanganan konflik sosial | % | 100 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | Bakesbangpol |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|---|---------------------------------|--|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 11 | persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik | <i>(Jumlah Masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik tahun N - Jumlah Masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik tahun N-1 / Jumlah Masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik tahun N) x 100%</i> | | Indikator Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | % | 74,63 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 67 | Bakesbangpol |
| 12 | Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan | <i>(Jumlah Kegiatan Ormas yang telah sesuai ketentuan / Jumlah Seluruh kegiatan Ormas) x 100%</i> | | Indikator Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | % | 100 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | Bakesbangpol |
| 13 | Cakupan Konektivitas Wilayah Jalan dan Jembatan | <i>(Jumlah akhir panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi / dengan Total keseluruhan panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi) x 100 %</i> | | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | % | 88,18 | 92,18 | 94,61 | 96,43 | 98,25 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 14 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | <i>Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (JKL X bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</i> | Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 | Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Rasio | n/a | 68,89 | 68,18 | 71,36 | 74,55 | 77,73 | 77,73 | Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan |
| 15 | Jumlah Pajak daerah yang meningkat realisasinya | Jenis Pajak daerah yang meningkat realisasinya | Perda Kabupaten Tuban | | jenis | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Badan Pengelolaan Keuangan, |

| No | Indikator Kinerja | Definisi Operasional / Formulasi | Rujukan Aturan | Posisi Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Awal Periode (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Periode (2026) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | Nomor 9 Tahun 2020 | | | | | | | | | | Pendapatan dan Aset Daerah |
| 16 | Persentase kesesuaian LKD terhadap SAP (%) | (Jumlah kesesuaian LKD terhadap SAP / seluruh jumlah LKD) x 100% | Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| 17 | Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP (%) | (Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP / Seluruh OPD) x 100% | Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| 18 | Terlaksananya kegiatan sertifikasi tanah aset | Terlaksananya kegiatan sertifikasi tanah aset | "Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Bupati Tuban Nomor 107 Tahun 2021" | | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |

* : Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/prt/2015 bahwa sungai di kab tuban adalah kewenangan pemerintah pusat, Meskipun demikian, untuk penghitungan kinerja berdasarkan wilayah sungai yang ada di kabupaten tuban

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Tuban tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tuban. Selanjutnya ditetapkan Pedoman Transisi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah terhitung mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
2. Pada Tahun ke-5 (lima) setelah periode Bupati berakhir, ditetapkan satu tahun transisi, yaitu Tahun 2027 yang memuat penetapan indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban lima tahun selanjutnya.
3. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2021-2026, maka dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 ini pada dasarnya merupakan suatu perencanaan strategis yang berkaitan erat dengan proses penetapan arah perkembangan Kabupaten Tuban, apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (2021–2026), serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005–2025, perubahan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016–2021, dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, tetap mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten

Tuban Tahun 2016–2020 serta arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020–2040.

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 perlu didukung dengan konsistensi, transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab penuh dari setiap elemen. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban beserta masyarakat dan dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026 ini dengan sebaik-baiknya;
2. RPJMD ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan RPJMD Kabupaten Tuban 2021–2026;
5. Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan; dan
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tuban berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi.